

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
15. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
16. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
17. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
18. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
19. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
20. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
21. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
22. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
23. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
24. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, rencana tata ruang wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(2) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
    a. RKPD;
    b. Renstra Perangkat Daerah;
    c. Renja Perangkat Daerah; dan
    d. perencanaan penganggaran.
(2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Daerah serta dengan kabupaten yang berbatasan.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD, meliputi:
    BAB I PENDAHULUAN;
    BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;
    BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
    BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
    BAB V PENUTUP.
(2) Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan RPJMD memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
   a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
   b. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 18);
   c. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 20);
   d. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 23);
   e. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 26);
   f. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/350/K/411.013/ 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025,

   dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 168-3/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep Pembangunan Daerah dimaksud, Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing Daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, rencana tata ruang wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Mengingat perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat *(Quick Wins)* yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan Pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah memiliki peran krusial dalam menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, serta sektor swasta. Proses ini mencakup penyusunan kebijakan, perumusan strategi, serta pelaksanaan program yang terarah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari upaya sistematis dan terencana, perencanaan pembangunan daerah harus disusun dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, serta tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis yang dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun tiga dokumen perencanaan utama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang mencakup periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan atau berlaku selama 1 tahun.

Ketiga dokumen perencanaan ini memiliki keterkaitan yang erat dan berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. RPJPD berperan mewujudkan visi jangka panjang yang menggambarkan arah pembangunan daerah dalam dua dekade ke depan, sementara RPJMD merupakan turunan dari RPJPD yang lebih terperinci dalam bentuk program dan kebijakan untuk jangka menengah. Selanjutnya, RKPD menjadi panduan operasional yang merinci prioritas pembangunan setiap tahunnya, sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya dokumen-dokumen perencanaan tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara efektif.

Sebagai hasil dari proses pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024, telah terpilih kepala daerah Kabupaten Nganjuk secara sah yaitu **Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A.** dan **Trihandy Cahyo Saputro, S.T.** yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2025-2030. Visi, misi dan program kepala

daerah/wakil kepala daerah selanjutnya akan dijabarkan ke dalam dokumen rencana pembangunan lima tahun melalui penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan dokumen RPJMD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) tahapan penyusunan RPJMD, yaitu: (1) persiapan penyusunan RPJMD, (2) penyusunan Rancangan Awal RPJMD, (3) penyusunan Rancangan RPJMD, (4) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD, (5) perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan (6) penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pada tahap persiapan penyusunan RPJMD, telah dilakukan beberapa aktivitas, mencakup penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hingga telah tersusun rancangan teknokratik RPJMD. Dokumen ini menjadi pedoman bagi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk menyusun rancangan visi, misi dan program bakal calon pimpinan daerah yang akan disampaikan dalam proses pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Setelah kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dilantik, maka rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan menjadi rancangan awal RPJMD hingga nantinya ditetapkankan menjadi RPJMD, paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah/wakil kepala daerah dilantik.

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 ***masuk dalam periode***

lima tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dengan visi *Kabupaten Nganjuk Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan*. Visi dan misi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam menentukan tujuan dan sasaran sehingga arah pembangunan daerah ke depan dapat disusun secara berkesinambungan. Sebagai dokumen perencanaan strategis, RPJMD juga harus selaras dengan RPJPD, RPJMN, serta RTRW, agar pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi dengan kebijakan nasional serta aspek tata ruang dan lingkungan hidup.

RPJMD memiliki keterkaitan sistemik dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah rumusan visi dan misi dan program kepala daerah dimanifestasikan ke dalam dokumen RPJMD, maka rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan target Program Pembangunan Daerah beserta kebutuhan pendanannya. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target dalam Renstra Perangkat Daerah, demikian pula target RKPD diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun target pembangunan tahunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Situbondo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan antar dokumen perencanaan di tingkat daerah memainkan peran yang sangat krusial dalam menciptakan sinergi antara kebijakan pembangunan di level lokal, provinsi, dan nasional.

Hubungan yang terjalin ini memastikan bahwa setiap rencana pembangunan saling mendukung dan menguatkan, sehingga strategi yang diambil dapat mencerminkan tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Integrasi tersebut diwujudkan melalui penerapan pendekatan perencanaan yang bersifat tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan ini menekankan pada analisis mendalam terhadap tema-tema pembangunan, pemahaman menyeluruh atas keseluruhan konteks, serta koordinasi antar sektor yang erat dengan mempertimbangkan aspek tata ruang secara strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi Kabupaten/Kota wajib diselaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan lain. Hal ini mencakup penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi acuan di tingkat nasional, serta RPJMD Provinsi yang merefleksikan kebijakan pembangunan di level provinsi.

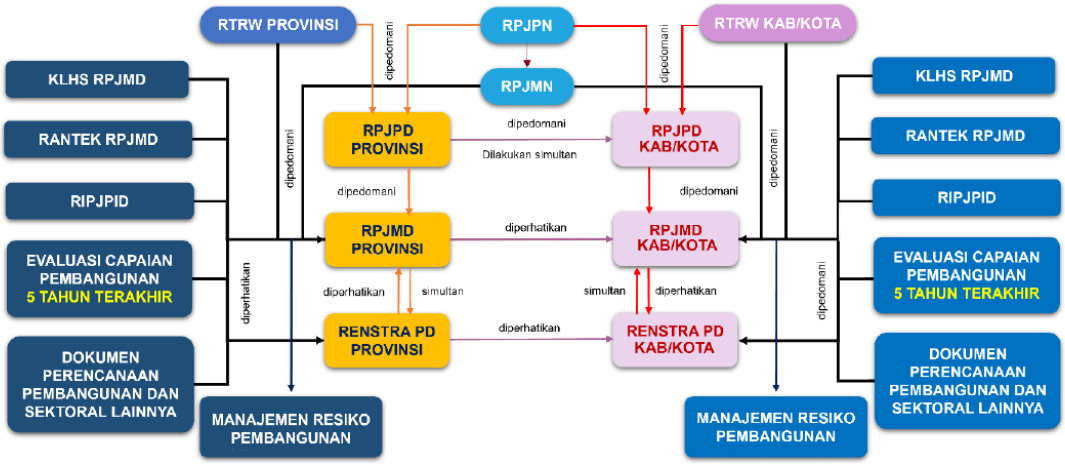
Melalui pendekatan THIS dan penyesuaian dokumen-dokumen perencanaan tersebut, setiap tingkat pemerintahan dapat menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya koheren, tetapi juga adaptif terhadap dinamika dan tantangan yang ada. Keselarasan ini memungkinkan adanya harmonisasi dalam implementasi program pembangunan, mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Telaah ini memiliki beberapa tujuan strategis, di antaranya:

1. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan agar terjadi sinergi dalam aspek waktu, ruang, serta fungsi pemerintahan.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan, sehingga kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan akuntabel.

3. Memastikan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah, baik dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Inmendagri No. 2 Tahun 2025, diolah

Mengacu pada gambar di atas, hubungan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya menjadi aspek fundamental dalam memastikan keberhasilan pembangunan daerah yang terarah, inklusif, dan berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat secara luas. Keterkaitan antar dokumen tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Sebagai bagian dari pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 harus juga mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029. Isu strategis, visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Nganjuk harus selaras dan/atau mengacu pada isu

strategis, visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;

2. RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari sasaran pokok RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2045 pada tahap I atau periode 5 (lima) tahun pertama. Gambaran umum, permasalahan dan isu strategis RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJPD Kabupaten Nganjuk, khususnya di tahap I. Pun demikian dengan sasaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD tahap I, menjadi acuan perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi hingga arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 juga harus mengacu dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 – 2041, khususnya indikasi program 5 (lima) tahap II;
4. RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 diselaraskan dengan rekomendasi Isu Strategis KLHS – RPJMD sebagai komitmen pembangunan berkelanjutan.
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang juga harus dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 terutama berkaitan pada penyelesaian permasalahan utama daerah dengan menghasilkan rekomendasi berbasis bukti.
6. RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
7. RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 hingga tahun 2030;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan RKPD Kabupaten Nganjuk akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berkenaan.

9. RKPD Kabupaten Nganjuk akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara hingga ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk adalah merumuskan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan 2025-2029 yang akan menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Dokumen ini dirancang agar kebijakan pembangunan daerah dapat terarah, terukur, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara efektif.

1.4.2 Tujuan

Sedangkan penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menganalisis data mengenai gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta identifikasi permasalahan dan isu strategis yang harus diatasi pada periode 2025-2029. Analisis ini penting agar dokumen perencanaan yang dihasilkan lebih komprehensif dan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
2. Menjabarkan visi, misi, serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah. Selain itu, dokumen ini juga akan menetapkan indikator kinerja pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam periode lima tahun tersebut.

3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dengan adanya dokumen RPJMD ini, setiap perangkat daerah dapat menyusun rencana kerja yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai sektor pemerintahan.

Dengan demikian RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keberlanjutan. Dokumen ini juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk secara menyeluruh.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun secara sistematis untuk memberikan arah yang jelas dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Sistematika dokumen ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup aspek perencanaan, evaluasi kondisi daerah, strategi pembangunan, hingga program perangkat daerah. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, berikut adalah sistematika RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029:

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menyajikan latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah/wakil kepala daerah

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Menyajikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum

1.3. Hubungan Antar Dokumen
Menyajikan hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Perencanaan Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya

1.4. Maksud dan Tujuan
Menyajikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

1.5. Sistematika Penulisan
Menyajikan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Bab II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.2. Gambaran Keuangan Daerah
Menyajikan penjelasan tentang realisasi APBD Tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2026-2030.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis
- 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
- 2.3.2. Isu Strategis Daerah

Bab III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 3.1.1. Visi dan Misi
- 3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2025-2029

3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.2.3. Penyelarasan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Bab IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.3. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Bab V PENUTUP

dengan sistematika ini RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, strategis, serta mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

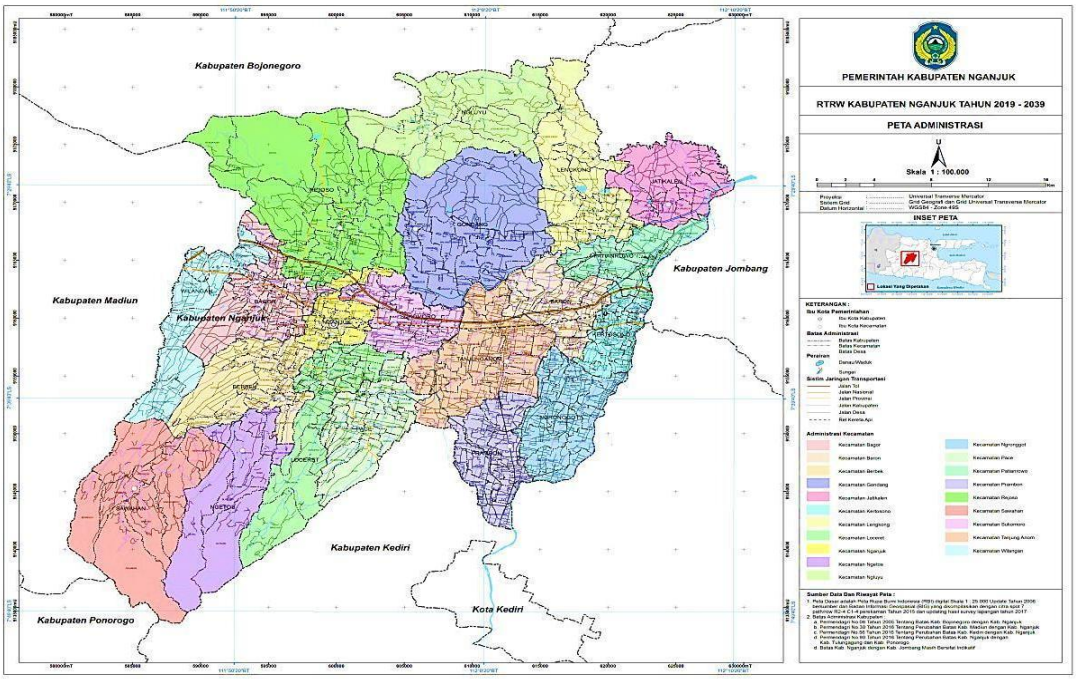
A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan letak astronomis pada koordinat 111° 5´- 112° 13´ Bujur Timur dan 7° 20´ – 7°50´ Lintang Selatan. Kabupaten Nganjuk memiliki wilayah daratan seluas 128.822 Ha dan secara administrasi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
Sebelah Selatan: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung
Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun
Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri

Secara administrasi wilayah perencanaan terdiri atas seluruh wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Nganjuk, yang terdiri dari 20 Kecamatan, dan 284 Kelurahan/Desa. Wilayah kecamatan paling luas adalah Kecamatan Rejoso dengan luas wilayah 16.303,97 Ha atau sebesar 12,65% dari luas wilayah kabupaten. Sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Kertosono dengan luas wilayah 2.348,67 Ha dan 2.479,44 Ha. Luas wilayah tiap kecamatan dan gambaran wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Nganjuk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luasan (Ha)	Prosentase (%)
1	Kecamatan Sawahan	9	11.138,19	8,56
2	Kecamatan Ngetos	9	7.840,74	6,22
3	Kecamatan Berbek	19	5.748,45	4,30
4	Kecamatan Loceret	22	6.865,27	5,31
5	Kecamatan Pace	18	5.104,62	4,03
6	Kecamatan Tanjung Anom	16	7.553,79	6,01
7	Kecamatan Prambon	14	4.494,18	3,42
8	Kecamatan Ngronggot	13	5.294,03	4,13
9	Kecamatan Kertosono	14	2.479,44	1,93
10	Kecamatan Patianrowo	11	3.513,80	2,74
11	Kecamatan Baron	11	4.004,52	2,87
12	Kecamatan Gondang	17	11.418,18	8,75
13	Kecamatan Sukomoro	12	3.752,74	2,90
14	Kecamatan Nganjuk	15	2.348,67	1,90
15	Kecamatan Bagor	21	5.434,51	4,18
16	Kecamatan Wilangan	6	5.143,54	4,05

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luasan (Ha)	Prosentase (%)
17	Kecamatan Rejoso	24	15.682,30	12,65
18	Kecamatan Ngluyu	6	8.977,29	6,66
19	Kecamatan Lengkong	16	7.199,36	5,89
20	Kecamatan Jatikalen	11	4.828,39	3,51
Jumlah		**284**	**128.822,00**	**100,00**

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041

Kabupaten Nganjuk memiliki posisi strategis sebagai simpul konektivitas regional di Jawa Timur bagian barat, karena dilalui jaringan jalan tol Trans-Jawa, jalur arteri nasional, serta rel kereta api lintas barat–timur. Hal ini menjadikan Nganjuk sebagai gateway pergerakan barang dan manusia antara Madiun–Solo di sisi barat dengan Kediri–Jombang–Surabaya di sisi timur, sekaligus menghubungkan akses ke Bojonegoro di utara serta Tulungagung dan Ponorogo di selatan. Keberadaan Nganjuk juga semakin penting sebagai hinterland Bandara Dhoho Kediri, sehingga berfungsi sebagai pusat logistik, warehousing, dan park dan ride bagi mobilitas penumpang maupun kargo lintas kabupaten.

Dalam bidang ekonomi, Nganjuk dikenal sebagai salah satu lumbung pangan dan hortikultura utama di Jawa Timur, khususnya padi dan bawang merah. Produksi dalam skala besar ini berperan penting dalam menjamin pasokan pangan bagi kabupaten sekitar seperti Jombang, Kediri, dan Madiun, sekaligus menopang rantai pasok agroindustri hingga Bojonegoro dan Tulungagung. Keunggulan tersebut menjadikan Nganjuk berkontribusi pada stabilisasi harga dan penyediaan stok pangan regional, terutama untuk komoditas strategis yang rentan terhadap fluktuasi musiman. Potensi pengembangan agroindustri, cold chain, serta pusat distribusi berbasis hortikultura menjadikan Nganjuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberi nilai tambah lintas kabupaten.

Dari perspektif lingkungan dan tata air, Kabupaten Nganjuk memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan air dan mengurangi risiko bencana. Keberadaan bendungan, jaringan irigasi, dan daerah aliran sungai di wilayah pegunungan Wilis–Liman berfungsi tidak hanya untuk mendukung produktivitas pertanian di Nganjuk, tetapi juga untuk memasok kebutuhan air bagi sebagian wilayah Kediri dan Jombang. Selain itu, fungsi tata air ini berkontribusi pada pengendalian banjir dan kekeringan yang berdampak ke wilayah sekitarnya, sekaligus menyimpan potensi pengembangan energi mikrohidro dan ekowisata berbasis waduk.

Dalam konteks industri dan jasa, posisi geografis yang strategis dan biaya lahan yang relatif lebih kompetitif menjadikan Nganjuk ideal sebagai pusat *distribution center* dan *cross-docking* yang melayani Kediri, Jombang, Madiun, hingga Bojonegoro. Sektor UMKM, industri kemasan, dan pengolahan hasil pertanian berkembang pesat dan mampu menciptakan integrasi ekonomi dengan pasar di kabupaten tetangga. Di samping itu, Nganjuk juga berperan sebagai pusat layanan menengah untuk kesehatan, pendidikan vokasi, dan jasa keuangan yang melengkapi layanan sekunder di wilayah sekitar.

Di bidang pariwisata, Nganjuk berfungsi sebagai pintu gerbang menuju destinasi wisata pegunungan Wilis–Liman bersama Kediri, Madiun, dan Ponorogo, serta menjadi jalur penghubung menuju wisata pantai selatan di Tulungagung. Potensi wisata agribisnis, desa wisata, serta event budaya agraris di Nganjuk mampu menjadi magnet wisata yang memperpanjang *length of stay* wisatawan di kawasan ini. Sementara itu, pada aspek sosial-ekonomi, Nganjuk juga berperan sebagai *commuter belt* regional, di mana biaya hidup dan perumahan yang lebih terjangkau menjadikan wilayah ini sebagai lokasi domisili pekerja yang beraktivitas di Kediri, Jombang, dan Madiun.

Secara keseluruhan, Kabupaten Nganjuk dapat diposisikan sebagai hub logistik, agroindustri, dan tata air yang menyatukan arus barang, jasa, dan manusia antarwilayah Jombang, Kediri, Madiun, Tulungagung, Ponorogo, dan Bojonegoro. Peran strategis ini, apabila diperkuat dengan pengembangan konektivitas multimoda, klaster agro bernilai tambah, serta pengelolaan air lintas daerah, akan menghasilkan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan bagi subkawasan Jawa Timur bagian barat.

2. Topografi

Topografi wilayah menjadi salah satu pertimbangan untuk melihat kesesuaian penggunaan lahan. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikompilasikan dengan citra spot 7 path/row, RTRW Kabupaten Nganjuk tahun 2021-2041 menunjukkan wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan daratan yang memiliki kontur datar, bergelombang dan berbukit. Klasifikasi ketinggian di Kabupaten Nganjuk terdiri atas 37-50 mdpl, 50-100 mdpl, 100-150mdpl, 150-250 mdpl, 250-350 mdpl, 350-450 mdpl, 450-600 mdpl, 600-750 mdpl, 750-950 mdpl, 950-1.150 mdpl, 1.150-1.400 mdpl, 1.400-1.650 mdpl, 1.650-2.000 mdpl dan >2.000 mdpl. Kabupaten Nganjuk didominasi oleh jenis klasifikasi ketinggian 50-100 mdpl sebesar 37 % atau seluas 47.977,58 Ha. Kondisi luasan topografi tersebut tersebar ke seluruh wilayah dengan rincian sebagai berikut:

a. Kondisi wilayah yang berada di ketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 798,670 Km^2 atau 62% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 15 kecamatan, yaitu: Kecamatan Wilangan, Bagor, Nganjuk, Sukomoro, Rejoso, Gondang, Loceret, Pace, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Kertosono, Patianrowo, Lengkong, dan Kecamatan Jatikalen.

b. Kondisi wilayah yang berada di ketinggian 100 – 1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 437,99 Km^2 atau 34,05% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Ngluyu, Lengkong, Gondang, Rejoso, Wilangan, Bagor, Berbek, Ngetos, Pace, sawahan, dan Kecamatan Loceret. Adapun wilayah Kecamatan Rejoso, Ngluyu, Gondang, Jatikalen berada di bagian utara Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-897 mdpl, yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau, bahan galian kapur, hutan produksi, dan hutan lindung. Sedangkan wilayah Kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, Loceret, Pace, dan Wilangan berada di sebelah selatan dan Barat wilayah Kabupaten Nganjuk berada di lereng Gunung Wilis potensial untuk tanaman perkebunan, hortikultura, hutan produksi dan hutan lindung.
c. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 631,23 Km^2 atau 4,89% dari luas wilayah terdiri atas 2 wilayah kecamatan saja, yaitu: Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos. Wilayah ini berada di bagian Selatan Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2.563 mdpl, potensial untuk hutan produksi dan hutan lindung. Terdapat enam kecamatan yang memiliki dua jenis topografi yaitu berada pada ketinggian 25 – 100 meter dpl dan 100 – 1.000 meter dpl. Keenam kecamatan tersebut yaitu: Kecamatan Lengkong, Rejoso, Wilangan, Bagor, Pace, dan Loceret.
    1) Selain dikelompokkan dari kondisi konturnya, wilayah Kabupaten Nganjuk juga terbagi menurut kelerengannya.

Menurut kelerengannya wilayah ini dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

2) Wilayah dengan kelerengan antara 0% – 2%, luasnya meliputi 52,95% dari luas wilayah Kabupaten Nganjuk yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Wilayah ini cukup baik untuk kegiatan budidaya berupa pertanian maupun untuk kegiatan permukiman.
3) Wilayah dengan kelerengan 2% – 15%, luasnya meliputi 29,86% dari seluruh luas wilayah kabupaten dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Wilayah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian dan permukiman.
4) Wilayah dengan kelerengan 15% – 40%, luasnya meliputi 10,50% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, Loceret, Wilangan, Rejoso, Gondang, Ngluyu dan Lengkong. Wilayah ini sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman tahunan/tanaman keras.
5) Wilayah dengan kelerengan > 40%, luasnya meliputi sekitar 6,68% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Sawahan, Ngetos, Wilangan dan Ngluyu. Merupakan wilayah yang seharusnya dihutankan karena merupakan kawasan penyangga tanah, air dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Klasifikasi (Ha)														Total
		37-50 mdpl	50-100 mdpl	100-150 mdpl	150-250 mdpl	250-350 mdpl	350-450 mdpl	450-600 mdpl	600-750 mdpl	750-950 mdpl	950-1150 mdpl	1150-1400 mdpl	1400-1650 mdpl	1650-2000 mdpl	>2000 mdpl	
1	Bagor		4.508,33	825,67	55,97											5.434,51
2	Baron	3.698,56														4.004,52
3	Berbek		2.595,70	1.119,49	1.288,95	514,39	29,73									5.748,45
4	Gondang	2.552,33	6.401,94	1.603,41	610,14	109,32										11.418,18
5	Jatikalen	2.213,91	2.609,93	4,55												4.828,39
6	Kertosono	2.492,97														2.479,44
7	Lengkong	1.782,47	2.479,35	2.148,88	788,66											7.199,36
8	Loceret		2.923,52	492,82	746,55	745,70	684,74	611,55	366,74	219,23	50,10	2,87				6.865,27
9	Nganjuk		2.445,23													2.348,67
10	Ngetos		36,22	507,15	1.136,64	711,25	640,80	876,76	745,30	708,52	656,60	761,31	611,03	493,40	127,33	7.840,74
11	Ngluyu		105,28	1.396,90	6.321,72	757,06										8.977,29
12	Ngronggot	3.585,11	1.732,20													5.294,03
13	Pace	319,84	3.725,93	586,13	411,31	157,75										5.104,62
14	Patianrowo	3.513,80														3.513,80
15	Prambon		4.410,32													4.494,18
16	Rejoso	0,54	9.272,67	2.503,46	2.489,46	1.567,47	268,14	166,86	35,36							15.682,30
17	Sawahan				24,89	647,97	1.506,99	1.928,38	1.315,00	1.423,43	1.236,73	1.171,01	703,54	629,62	442,01	11.138,19
18	Sukomoro	2.128,16	1.611,79													3.752,74
19	Tanjunganom	6.372,73	1.368,08													7.553,79
20	Wilangan		1.829,73	1.307,57	1.295,64	741,06	50,12									5.143,54
Jumlah		**28.734,48**	**47.977,58**	**12.514,30**	**15.180,44**	**5.951,98**	**3.180,53**	**3.583,56**	**2.462,40**	**2.351,19**	**1.943,43**	**1.935,19**	**1.314,57**	**1.123,02**	**569,34**	**128.822,00**

Sumber : Perda No. 2 tahun 2021 tentang RTRW Kab. Nganjuk tahun 2021-2041

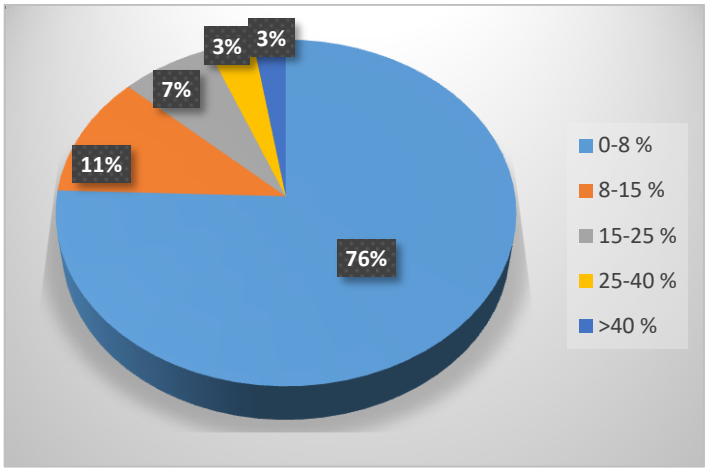
Selain dikelompokkan dari kondisi konturnya, wilayah Kabupaten Nganjuk juga terbagi menurut kelerengannya. Klasifikasi kelerengan lahan di Kabupaten Nganjuk terdiri atas 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan >40% untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.3.

Tabel 2.3 Luas Kelerengan Per Kecamatan Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Klasifikasi Kelerengan (Ha)					Total
		0-8%	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %	
1	Kecamatan Bagor	5.389,97					5.434,51
2	Kecamatan Baron	3.698,56					4.004,52
3	Kecamatan Berbek	4.978,58	551,69	18,00			5.748,45
4	Kecamatan Gondang	10.362,55	653,61	211,38	49,60		11.418,18
5	Kecamatan Jatikalen	4.738,52	89,86				4.828,39
6	Kecamatan Kertosono	2.492,97					2.479,44
7	Kecamatan Lengkong	6,041,15	1.059,52	98,69			7.199,36
8	Kecamatan Loceret	3.436,43	1.617,83	1.252,45	442,11	95,01	6.865,27
9	Kecamatan Nganjuk	2.445,23					2.348,67
10	Kecamatan Ngetos	1.231,61	2.062,30	1.898,75	1.660,99	1.158,65	7.840,74
11	Kecamatan Ngluyu	4.855,15	2.154,82	1.413,85	157,15		8.977,29
12	Kecamatan Ngronggot	5.317,31					5.294,03
13	Kecamatan Pace	4.497,93	560,74	128,41	13,88		5.104,62
14	Kecamatan Patianrowo	3.513,80					3.513,80
15	Kecamatan Prambon	4.410,32					4.494,18
16	Kecamatan Rejoso	12.710,29	2.699,12	837,91	56,65		15.682,30
17	Kecamatan Sawahan	1.076,56	2.607,57	3.239,79	2.146,03	1.959,62	11.138,19
18	Kecamatan Sukomoro	3.739,95					3.752,74
19	Kecamatan Tanjunganom	7.740,81					7.553,79
20	Kecamatan Wilangan	4.626,02	570,19	27,91			5.143,54
Jumlah		**97.320,52**	**14.634,65**	**9.127,14**	**4.526,41**	**3.213,28**	**128.822,00**

Sumber : Materi teknis peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041

Berdasarkan tabel diatas kelerengan lahan di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh klasifikasi kelerengan 0-8% sebesar 76 % atau seluas 97.320,52 Ha dari luas wilayah kabupaten, untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.2.



Gambar 2.2 Prosentase Kelerengan Lahan di Kabupaten Nganjuk

3. Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi daerah dapat menggambarkan potensi sumber daya alam, serta beberapa kemungkinan bencana yang mungkin timbul. Wilayah Kabupaten Nganjuk termasuk dalam Zona Solo dengan Sub Zona Ngawi. Zona ini ditempati oleh gunung api yang berumur kwarter dengan puncak seperti Wilis, Lawu, dll. Diantaranya terdapat dataran seperti dataran Madiun, Kediri, Jember, yang umumnya tersusun oleh endapan lahar dan batuan gunung api. Dataran tersebut merupakan cekungan air tanah produktif yang didominasi oleh endapan alluvium vulkanik.

Batuan di sebagian wilayah Kabupaten Nganjuk umumnya terdiri dari endapan alluvium, sedangkan sebagian lainnya terdiri dari batuan berumur pliosen sampai pleistosen. Wilayah Kabupaten Nganjuk berdasarkan ciri-ciri fisik dan batuan penyusunnya secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. Perbukitan Kendeng

   Di daerah ini tersusun oleh batuan sedimen pasir sampai lempung liat setebal 40 – 80 meter dengan sisipan tipis pasir.

b. Gunung api Wilis

   Pada daerah ini terdapat batu pasir tufa yang mengandung sisipan pasir atau breksi. Batuan di daerah ini berupa lapisan batuan yang berasal dari rombakan material letusan gunung

api, breksi, lahar dan batu pasir bersifat andesit. Pada daerah ini tanahnya terdiri dari bahan-bahan asal pegunungan dengan ketebalan 80 – 110 meter berupa pasir tufa berbutir halus sisipan kasar atau kerikil dengan sisipan lempung tufaan atau pasir lempung di dalamnya.

c. Dataran Rendah

Di daerah ini bagian atas setebal 30 – 70 meter terdiri dari lempung abu-abu hitam dengan pasiran coklat yang dipisahkan oleh lapisan tipis pasiran sebagai pengandung air. Bagian bawah berupa lapisan batu pasir tufaan atau lempung tufaan dengan sisipan pasir atau kerikil.

Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi tiga bagian menurut jenis tanah, yaitu tanah sawah (35%), tanah kering (27%) dan tanah hutan (38%). Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 (empat) kecamatan yang berada pada daerah pegunungan terletak pada ketinggian 150 sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi yaitu desa Ngliman di Kecamatan Sawahan.

Bila di lihat dari tipe sebaran tanah yang ada, maka wilayah Kabupaten Nganjuk terbagi ke dalam 3 asal jenis tanah berdasarkan pembentukannya, yaitu berasal dari Jenis tanah yang pembentukannya berasal dari material gunung berapi seperti tanah andosol, latosol, grumosol dan regosol tersebar hampir di seluruh kecamatan-kecamatan, jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai yang sering disebut dengan tanah aluvial di dataran rendah dan tanah yang berasal dari pelapukan bebatuan besar dengan jenis tanah litosol. Wilayah yang memiliki jenis tanah tersebut adalah Rejoso dan Ngluyu. Sebaran jenis tanah ini pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Jenis Tanah
Sawahan	Andosol, Latosol
Ngetos	Andosol, Latosol
Berbek	Latosol, Gromosol
Loceret	Andosol, Latosol, Gromosol, Aluvial
Pace	Latosol, Gromosol, Aluvial
Tanjunganom	Gromosol, Aluvial
Prambon	Aluvial
Ngronggot	Aluvial
Kertosono	Aluvial
Patianrowo	Aluvial, Regosol
Baron	Aluvial
Gondang	Aluvial, Regosol
Sukomoro	Aluvial, Regosol
Nganjuk	Gromosol, Aluvial, Regosol
Bagor	Gromosol, Regosol
Wilangan	Latosol, Gromosol, Regosol
Rejoso	Latosol, Regosol, Litosol
Ngluyu	Latosol, Regosol, Litosol
Lengkong	Regosol
Jatikalen	Aluvial, Regosol

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2023

Adapun susunan geologi secara umum di Kabupaten Nganjuk terdiri atas kalibeng, batuan gunung api ijen tua, edapan sungai, formasi alluvial, formasi batu gamping terumbu, formasi gitung, formasi kabuh, formasi kerek, formasi lidah, formasi notopuro, formasi sonde, formasi tambakromo, morfonit ngebel dan morfoset arkalang. Kabupaten Nganjuk didominasi oleh formasi alluvial sebesar 55% atau seluas 69.749,81Ha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5 Luas Kecamatan Menurut Klasifikasi Geologi Di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Formasi (Ha)															Total
		Anggota Klitik, Formasi Kalibeng	Batuan Gunung Api Ijen Tua	Endapan Sungai	Formasi Aluvial	Formasi Batu Gamping Terumbu	Formasi Gintung	Formasi Kabuh	Formasi Kalibeng	Formasi Kerek	Formasi Lidah	Formasi Notopuro	Formasi Sonde	Formasi Tambakromo	Morfonit Ngebel	Morfoset Arkalangan	
1	Bagor				3.365,49							152,69				1871,79	5.434,51
2	Baron				3.269,04	178,71						250,81					4.004,52
3	Berbek				2.012,13											3536,14	5.748,45
4	Gondang	51,72			5.133,2	1,38		2104,24	112,21		15,45	831,51	148,06	2879,37			11.418,18
5	Jatikalen				1.502,47			784,01	117,42		470,48		49.93	1.904,08			4.828,39
6	Kertosono				2492,97												2.479,44
7	Lengkong				1.231,69			2.298,10	2.018,01	112,14	292,98	98,41	166,24	981,80			7.199,36
8	Loceret				6189,44		654,39										6.865,27
9	Nganjuk				2445,23												2.348,67
10	Ngetos			197,54	3829,62		3718,29									266,85	7.840,74
11	Ngluyu	805,37						6,16	6348,31	85,42	24,94		328,49	982,27			8.977,29
12	Ngronggot				5317,31												5.294,03
13	Pace				5200,96												5.104,62
14	Patianrowo				2.652,29							861,51					3.513,80
15	Prambon				4410,32												4.494,18
16	Rejoso	279,1	432		5704,63			3711,55	0,24			585,99	539,29	5051,16			15.682,30
17	Sawahan			4598,36	2728,68		1201,23									2501,3	11.138,19
18	Sukomoro				3739,95												3.752,74
19	Tanjunganom				7678,33							62,49					7.553,79
20	Wilangan				775,3							412,13			42,67	3994,04	5.143,54
Jumlah		**1.136,20**	**432,00**	**4.795,91**	**69.749,81**	**180,09**	**5.573,91**	**8.828,64**	**8.615,81**	**200,01**	**804,74**	**3.254,74**	**1.232,91**	**11.804,46**	**42,67**	**12.170,11**	**128.822,00**

Sumber : Materi Teknis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041

Secara garis besar jenis tanah di Kabupaten Nganjuk sebagian besar tergolong pada tanah subur dan hanya beberapa kecamatan yang mempunyai tanah yang tidak subur yaitu di Kecamatan Ngluyu dimana daerahnya berbukitan dan tanahnya berkapur. klasifikasi jenis tanah yang ada di Kabupaten Nganjuk terdiri atas jenis tanah endoquerts endoaquaepts, hapludands dystrudepts, haplusterts usthortents dan haplustolls haplustepts untuk lebih jelasnya mengenai besaran dan lokasi persebarannya dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Klasifikasi (Ha)				Total
		Endoaquerts Endoaquepts	Hapludands Dystrudepts	Haplusterts Usthortents	Haplustolls Haplustepts	
1	Kecamatan Bagor	3.107,85	2.167,67	114,45		5.434,51
2	Kecamatan Baron	3.698,56				4.004,52
3	Kecamatan Berbek	371,20	5.177,06			5.748,45
4	Kecamatan Gondang	6.962,72		4.078,97	235,44	11.418,18
5	Kecamatan Jatikalen	3.724,22		1.104,16		4.828,39
6	Kecamatan Kertosono	2.492,97				2.479,44
7	Kecamatan Lengkong	3.009,78		2.148,18	2.041,40	7.199,36
8	Kecamatan Loceret	1.773,47	5.070,37			6.865,27
9	Kecamatan Nganjuk	2.445,23				2.348,67
10	Kecamatan Ngetos		8.012,31			7.840,74
11	Kecamatan Ngluyu			947,94	7.633,03	8.977,29
12	Kecamatan Ngronggot	5.317,31				5.294,03
13	Kecamatan Pace	1.651,85	3.549,11			5.104,62
14	Kecamatan Patianrowo	3.513,80				3.513,80
15	Kecamatan Prambon	4.410,32				4.494,18
16	Kecamatan Rejoso	7.023,31		7.485,34	1.795,33	15.682,30
17	Kecamatan Sawahan		11.029,57			11.138,19
18	Kecamatan Sukomoro	3.739,95				3.752,74
19	Kecamatan Tanjunganom	7.740,81				7.553,79
20	Kecamatan Wilangan	1.210,19	3.385,47	628,46		5.143,54
Jumlah		**62.227,48**	**38.391,56**	**16.474,18**	**11.728,78**	**128.822,00**

Sumber : Materi Teknis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041

Dari tabel diatas jenis tanah di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh jenis tanah endoquerts endoaquaepts atau jenis tanah campuran rigosol dan litosol yaitu sebesar 48 % atau seluas 62.227,48 Ha. Jenis tanah endoquerts endoaquaepts termasuk kategori jenis tanah subur karena mengandung vuklanik dan cocok untuk pertanian.

4. Iklim

Secara umum dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur curah hujan di Kabupaten Nganjuk tidak terlalu jauh berbeda. Di Kabupaten Nganjuk pada bulan Mei sampai dengan November terjadi musim kemarau dan pada bulan Desember sampai bulan April terjadi musim penghujan. Pada bulan-bulan tertentu pada musim kemarau yaitu bulan Juli - September berhembus angin kencang dari Gunung Wilis menuju Kota Nganjuk, karena itu pula Kota Nganjuk dikenal dengan sebutan kota angin.

Tabel 2.7 Kondisi Iklim Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Bulan *Month*	Suhu/*Temperature* (°C)			Kelembaban/*Humidity* (%)		
	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/*January*	23,30	26,90	31,80	68,00	87,23	98,00
Februari/*February*	20,40	24,50	31,20	60,00	83,88	100,00
Maret/*March*	20,40	24,36	31,20	64,00	85,65	100,00
April/*April*	19,60	24,71	30,60	54,00	84,27	100,00
Mei/*May*	20,40	25,06	30,40	62,00	85,49	100,00
Juni/*June*	20,00	25,31	31,60	57,00	75,71	98,00
Juli/*July*	15,00	24,52	31,00	56,00	77,63	98,00
Agustus/*August*	16,00	23,92	30,40	57,00	74,59	98,00
September/*September*	18,40	24,68	31,60	52,00	65,48	83,50
Oktober/*October*	19,00	25,43	32,40	51,25	68,40	85,50
November/*November*	20,40	26,27	32,60	52,25	68,81	86,50
Desember/*December*	18,20	25,15	31,20	67,75	81,79	91,25

Bulan *Month*	Kecepatan Angin (knot) *Wind Velocity (knot)*			Tekanan Udara/*Atmospheric Pressure* (mbar)		
	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari/*January*	0,00	3,62	15,00	986,20	998,00	1002,40
Februari/*February*	0,00	1,13	6,70	930,80	934,75	1016,90
Maret/*March*	0,00	1,00	4,60	931,60	935,60	938,70
April/*April*	0,00	1,39	6,70	930,50	934,69	938,60
Mei/*May*	0,00	1,13	4,60	930,10	934,03	993,50
Juni/*June*	0,00	1,32	4,60	930,60	934,67	1014,50
Juli/*July*	0,00	1,25	5,10	932,20	935,57	938,50
Agustus/*August*	0,00	1,28	5,14	932,00	935,78	938,30
September/*September*	0,00	1,46	15,43	934,70	936,68	938,30
Oktober/*October*	0,00	1,47	10,20	934,00	936,17	938,10
November/*November*	0,00	1,45	6,17	934,90	936,25	938,10
Desember/*December*	0,00	1,34	6,17	932,70	934,77	937,00

Bulan *Month*	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)[1] *Number of Precipitation (mm/year)[1]*	Jumlah Hari Hujan (hari)[1] *Number of Rainy Days (day)[1]*	Penyinaran Matahari (jam) *Duration of Sunshine (hour)*
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/*January*	343,40	18	4,1
Februari/*February*	319,86	17	4,4
Maret/*March*	311,95	14	4,1
April/*April*	220,84	13	4,3
Mei/*May*	13,64	1	5,6
Juni/*June*	52,20	3	7,5
Juli/*July*	10,50	1	5,9
Agustus/*August*	4,60	1	6,2
September/*September*	33,73	3	7,7
Oktober/*October*	9,91	2	6,8
November/*November*	216,41	12	6,7
Desember/*December*	478,16	19	5,0

Sumber : BMKG Stasiun Sawahan, 2025

5. Hidrologi

Secara hidrologis, Kabupaten Nganjuk terdiri atas 41 sungai. Sungai-sungai tersebut menyebabkan kondisi dan struktur tanah Kabupaten Nganjuk cukup produktif.

Tabel 2.8 Kondisi Sungai Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Nama Sungai *Name of River*	**Panjang** *Length (Km)*	**Luas Daerah Pengaliran** Watering Area *(Km 2)*	**Debit Air** (Meter Kubik)	
			Terendah	Tertinggi
(2)	(3)	(4)	(5)	
Widas	91,000	430.150	550	260.871
Sopang	4,700	6.562	-	-
Butuh	4,200	2.000	-	25
Manyung	8,300	19.240	25	38.489
Ngumpul	12,000	15.750	30	15.848
Mencaro	6,750	16.200	15	1.409
Kedungmaron	7,500	15.000	17	1.573

Nama Sungai *Name of River*	**Panjang** *Length (Km)*	**Luas Daerah Pengaliran** Watering Area *(Km 2)*	**Debit Air** (Meter Kubik)	
			Terendah	Tertinggi
Rejoso	23,500	27.000	15	2.840
Wedekan	6,100	7.000	19	1.663
Wengkal	12,000	24.000	14	1.617
Kedungpadang	11,000	122.845	10	1.992
Senggowar	22,000	76.600	53	4.466
Babadan	7,000	1.400	12,5	1.175
Tretes	15,000	30.000	30	2.362
Kedungsengon	7,200	14.400	32	2.381
Jarakan	4,250	8.500	14	2.192
Jaan	5,100	10.200	15,5	1.581
Nglempoh	5,120	4.500	8,9	710
Jurangdandang	2,750	19.700	6,75	660
Logawe	3,000	2.450	100	1.215
Sumberkepuh	5,600	34.300	100	1.215
Sumbersono	5,000	3.250	1,53	1.500
Perning	3,500	36.770	4,24	420
Kedungsoko	6,500	80.850	20.951	151.452
Kedungpedet/Primer	5,250	70.710	513	5.043
Puh Salak	12,600	14.624	47	5.226
Kedung Galih	18,200	24.375	56	4.585
Logo	11,500	4.500	-	-
Konang	31,700	28.050	48	5.783
Tunggak	15,200	18.562	7	3.770
Gandu	4,900	7.875	1.633	4.585
Kuncir Kanan	27,246	18.085	33,74	10.281
Kuncir Kiri	9,550	26.050	56,45	18.347
Bodor	16,000	21.800	14.862	23.605
Watulanang	7,000	14.600	9,17	6.844
Sumber Kemiri	5,000	3.750	7	500
Sumber Doko	3,000	1.500	-	-
Sumberklampok	3,000	1.250	7	300
Beng	20,000	14.000	1,52	1.400
Sematok			39,81	8.078
Margomulyo			23,5	4.877
KedungGupit			100	2.401

Sumber: Dinas PUPR, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sungai yang berada di Kabupaten Nganjuk terdiri atas 43 sungai dengan panjang antara 2,75 Km (Sungai Jurangdandang) sampai 91 Km (Sungai Widas). Sedangkan, Kabupaten Nganjuk memiliki debit air tertinggi 260,87 meter^3. Sungai yang memiliki daerah pengairan terluas yaitu Sungai Widas dengan luas 430.150 Km^2, sedangkan

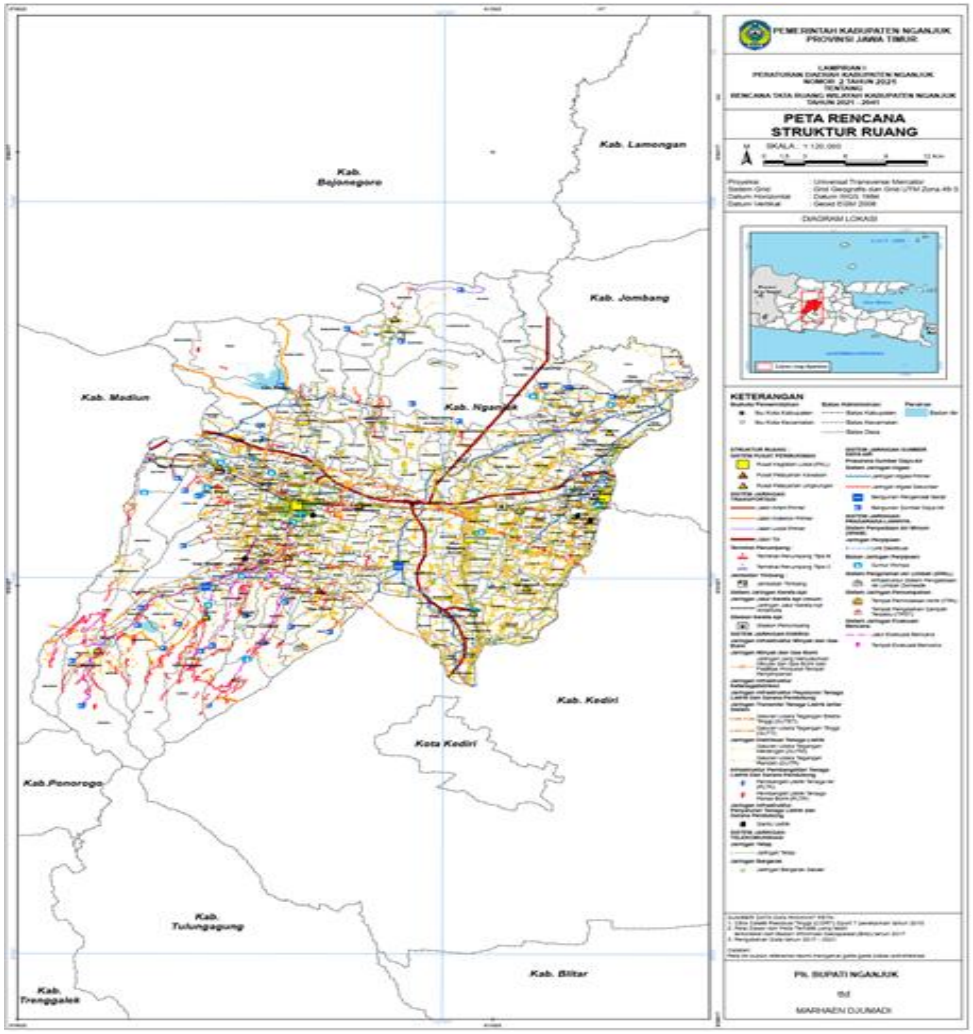
sungai yang memiliki daerah pengairan tersempit yaitu Sungai Kedung Gupit dengan luas 1 Km^2.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, meliputi:

1. menetapkan sistem pusat pelayanan kegiatan skala wilayah kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan yaitu:
   a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan pusat pelayanan skala kecamatan atau sekelompok desa/kelurahan yang berfungsi melayani kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Sebuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 pasal 15 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 pasal 8, ditetapkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal berada di Perkotaan Tanjunganom, Perkotaan Nganjuk, Perkotaan Kertosono, dan Perkotaan Rejoso.
   b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat pelayanan dengan skala yang lebih kecil dibanding PKL, yang melayani kebutuhan penduduk pada lingkup beberapa desa atau kelurahan dalam satu kawasan. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 pasal 8 berada di Perkotaan Pace, Perkotaan Berbek, dan Perkotaan Lengkong.
   c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat pelayanan skala paling kecil dalam hierarki pusat kegiatan. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2021-2041 pasal 8 berada di Perkotaan Sawahan di Kecamatan Sawahan, Perkotaan Ngetos, Perkotaan Prambon, Perkotaan Ngronggot, Perkotaan Loceret, Perkotaan Baron, Perkotaan Sukomoro,Perkotaan Bagor, Perkotaan Wilangan, Perkotaan Patianrowo, Perkotaan Gondang, Perkotaan Jatikalen, dan Perkotaan Ngluyu.



Gambar 2.3 Peta Rencana Struktur Ruang
Sumber: Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021

1. Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

a. jalan umum;
b. jalan tol;
c. terminal penumpang; dan
d. jembatan timbang

Jalan umum terdiri atas:

a. jalan arteri primer terdiri atas:
    1) ruas jalan batas Kabupaten Madiun-Batas Kota Nganjuk;
    2) jalan Gatot Subroto;
    3) jalan Lingkar Nganjuk;
    4) ruas jalan batas Kota Nganjuk-Kertosono; dan
    5) ruas jalan Kertosono-Batas Kabupaten Jombang.
b. jalan kolektor primer terdiri atas:
    1) ruas jalan Batas Kabupaten Nganjuk (Simpang 4 Candi) – Batas Kabupaten Kediri;
    2) ruas jalan Guyangan – Simpang Empat Candi;
    3) ruas jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng) – Nganjuk (Guyangan);
    4) ruas batas kabupaten Kediri – Magersari;
    5) ruas jalan Magersari – Pogoh;
    6) ruas jalan Pogoh - Selopuro;
    7) ruas jalan Selopuro – Kepel;
    8) ruas jalan Kepel - Bulak;
    9) ruas jalan Bulak– Sidorejo;
    10) ruas jalan Sidorejo – Proliman;
    11) ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas Kab.Madiun).
    12) ruas jalan Jetis – Watudandang;
    13) ruas jalan Tanjungtani-Gondanglegi;
    14) ruas jalan Warujayeng – Jetis; dan
    15) ruas jalan Waung – Warujayeng.
    16) ruas jalan Gondang Kulon-Ngujung;
    17) ruas jalan Ngangkatan-Gondang Kulon;

18) ruas jalan Ngujung – Lengkong;
19) ruas jalan Lengkong-Ngasem;
20) ruas jalan Ngasem-Munung;
21) ruas jalan Kemaduh-Lengkong;
22) ruas jalan Banaran-Kemaduh;
23) jalan Gatot Subroto (Kecamatan Kertosono);
24) jalan A Yani (Kecamatan Kertosono);
25) ruas jalan Rejoso – Ngangkatan;
26) ruas jalan Tamanan - Rondokuning - Klangon (batas Kabupaten Madiun).
27) ruas batas kabupaten Kediri – Magersari.
28) ruas jalan Magersari – Pogoh;
29) ruas jalan Pogoh - Selopuro;
30) ruas jalan Selopuro – Kepel;
31) ruas jalan Kepel - Bulak;
32) ruas jalan Bulak– Sidorejo;
33) ruas jalan Sidorejo – Proliman;dan
34) ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas Kab.Madiun).

c. jalan lokal primer terdiri atas:
1) ruas jalan Banjarsari – Kurungrejo;
2) ruas jalan Banjarsari –Kelutan;
3) ruas jalan Baron – Kwajon;
4) ruas jalan Berbek – Kuncir;
5) ruas jalan Berbek – Nglajer;
6) ruas jalan Cerme – Berbek;
7) ruas jalan Gajahbelur – Jetis;
8) ruas jalan Gareman-Babadan;
9) ruas jalan Gebangkerep-Kaloran;
10) ruas jalan Gondangkulon-Ngluyu;
11) ruas jalan Jekek – Kemaduh;
12) ruas jalan Kandeg – Jekek;

13) ruas jalan Kandeg-Kandangan;
14) ruas jalan Kudu-Tambak;
15) ruas jalan Kuncir – Sidorejo;
16) ruas jalan Loceret-Berbek;
17) ruas jalan Mungkung – Berbek;
18) ruas jalan Ngluyu – Bajang;
19) ruas jalan Ngrami – Gondangkulon;
20) ruas jalan Ngrombot – Tirobinangun;
21) ruas jalan Patihan-Gajah Belur;
22) ruas jalan Semanding – Berbek;
23) ruas jalan Sidorejo-Ngliman;
24) ruas jalan Siwalan – Sawahan;
25) ruas jalan Tirtobinangun – Begendeng;
26) ruas jalan Trayang –Kelutan;
27) ruas jalan Warujayeng – Jetis;
28) ruas jalan Warujayeng – Trayang;
29) ruas jalan Watudandang-Kelutan;
30) ruas jalan Wilangan - Bomo (Proliman);
31) ruas jalan Baron – Gareman;
32) ruas jalan Gajahbelor – Watudandang;
33) Jalan Supriadi;
34) ruas jalan Kandeg-Demangan;
35) ruas jalan Kandeg-Jekek;
36) ruas jalan Kedunglo –Tanjungtani;
37) ruas jalan Kelutan – Jabon;
38) ruas jalan Kudu – Ngrombot;
39) ruas jalan Kuncir – Pogoh;
40) ruas jalan Loceret-Ngepeh;
41) ruas jalan Mangunsari – Bajulan;
42) ruas jalan Ngepung-Babadan;
43) ruas jalan Ngrajeg – Ngujung;
44) ruas jalan Sekaran-Patihan;

45) ruas jalan Tamanan – Sambikerep;
46) ruas jalan Tanjungrejo-Sekaran;
47) ruas jalan Dukuhan-Tambak;
48) ruas jalan Bukur-Pakucen; dan
49) ruas jalan Kedung Ingas-Kedung Mlaten.

d. Jalan tol, terdiri atas:
1) ruas jalan Tol Ngawi-Kertosono;
2) ruas jalan Kertosono-Kediri; dan
3) ruas jalan Kertosono- Babat.

e. Terminal penumpang terdiri atas:
1) Terminal penumpang tipe B Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk.
2) Terminal penumpang tipe C terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ketosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Nganjuk,

f. Jembatan timbang, terdapat di Kecamatan Bagor.

2. Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan kereta api terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api.

Jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antar kota jalur ganda Surabaya-Jember-Banyuwangi dan Bangil-Malang-Blitar-Kertosono yang melintasi di Kecamatan Wilangan-Kecamatan Bagor-Kecamatan Nganjuk-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Tanjunganom -Kecamatan Baron-Kecamatan Kertosono.

Stasiun kereta api berupa stasiun penumpang yang terdapat di Kecamatan Nganjuk, di perbatasan Kecamatan Baron dan Kecamatan Tanjunganom; Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Sukomoro dan di Kecamatan Wilangan.

3. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi meliputi:

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yaitu yaitu jalur minyak dan gas bumi yang melalui Kecamatan Kertosono-Kecamatan Baron-Kecamatan Tanjunganom-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Nganjuk-Kecamatan Bagor-Kecamatan Wilangan-Kecamatan Rejoso-Kecamatan Gondang-Kecamatan Lengkong-Kecamatan Jatikalen

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
    1) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Loceret.
    2) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP) terdapat di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Rejoso.
b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
    1) jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem terdiri atas:
        a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) terdapat di Kecamatan Ngronggot Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Bagor dan Kecamatan Wilangan; dan

b) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terdapat di Kecamatan Prambon, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Sawahan.

2) jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
   a) Saluran Udara Tengangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh kecamatan; dan
   b) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh kecamatan.
3) gardu induk terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Kertosono dan Kecamatan Nganjuk.

4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air meliputi:
   1) sistem jaringan irigasi;
   2) sistem pengendalian banjir; dan
   3) bangunan sumber daya air.
b. Sistem jaringan terdiri atas:
   1) jaringan irigasi primer terdiri atas:
      a) saluran primer Widas Utara di Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening;
      b) saluran primer Warujayeng-Kertosono (W-K) di Daerah Irigasi (D.I) Mrican Kiri;
      c) saluran primer Ngudikan Kiri dan Ngudikan Kanan di Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening; dan
      d) saluran primer Bulakmojo di Daerah Irigasi (D.I) Bulakmojo.
   2) jaringan irigasi sekunder dan tersier tersebar di seluruh kecamatan.
c. sistem pengendali banjir berupa bangunan pengendali banjir di Bendungan Semantok Kecamatan Rejoso, Bendungan Margopatut Kecamatan Sawahan, Dam Kuncir Kecamatan Ngetos dan Dam Malangsari Kecamatan Tanjunganom.

d. Bangunan sumber daya terdiri atas:
    1) bendungan, terdiri atas:
        a) bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso; dan
        b) bendungan Margopatut di Kecamatan Sawahan.
    2) embung terdiri atas:
        a) embung Kulak Secang, embung Gondang (Pojok Dua) dan embung Joho, di Kecamatan Pace;
        b) embung Oro-oro Ombo, embung Suru dan embung Sekarlangit di Kecamatan Ngetos;
        c) embung Bajulan di Kecamatan Loceret;
        d) embung Estu Mulyo, embung Suwaru dan embung Klonggean di Kecamatan Sawahan.
        e) embung Tempuran dan embung Bajang di Kecamatan Ngluyu;
        f) embung Bangle di Kecamatan Lengkong; dan
        g) embung Sumber Urip di Kecamatan Berbek.
    3) waduk, terdiri atas:
        a) waduk Mbah Irun atau Puhsalak, waduk Sumber Suko di Kecamatan Bagor;
        b) waduk Sumberkepuh, waduk Sumbersono dan waduk Logawe di Kecamatan Lengkong;
        c) waduk Kedung Sengon dan waduk Sumberagung di Kecamatan Gondang;
        d) waduk Perning di Kecamatan Jatikalen; dan
        e) waduk Manggarejo di Kecamatan Wilangan

5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

a. Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
    1) sistem penyediaan air minum (SPAM);
    2) sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
    3) sistem jaringan persampahan; dan
    4) sistem jaringan evakuasi bencana.

b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas kabupaten/kota dan Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten.

1) Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas kabupaten/kota terdiri atas:

a) Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Besar merupakan SPAM Regional Lintas Tengah memanfaatkan Sungai Brantas meliputi Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang;

b) Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Kecil terdiri atas:

(1) Kabupaten Madiun - Kabupaten Nganjuk; dan

(2) Kabupaten Kediri - Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Jombang.

2) Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten terdiri atas:

a) jaringan perpipaan meliputi:

(1) unit air baku terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk;

(2) unit produksi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk;

(3) unit distribusi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk; dan

(4) unit pelayanan terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk.

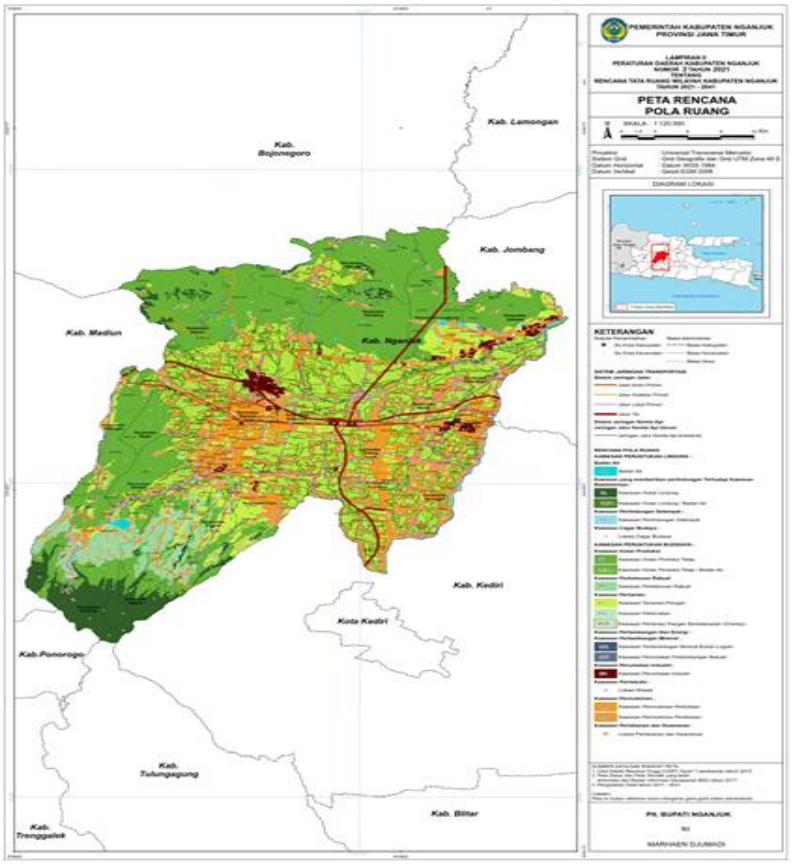
(5) bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa terdapat di Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Berbek, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Baron, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Lengkong.

c. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa sistem pengelolaan air limbah domestik yaitu Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terdapat di Kecamatan Pace.

d. Sistem jaringan persampahan terdiri atas:
   1) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di Kecamatan Prambon.
   2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdapat di Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Pace, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Kertosono

e. Sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

1) jalur evakuasi bencana banjir dari titik lokasi banjir melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
2) jalur evakuasi bencana bahaya cuaca ekstrem terdiri atas:
   a) jalur evakuasi bencana puting beliung dari titik lokasi puting beliung melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
   b) jalur evakuasi bencana angin dari titik lokasi angin melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
3) jalur evakuasi bencana longsor dari titik lokasi longsor melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
4) jalur evakuasi bahaya bencana letusan gunung berapi dari titik lokasi melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana
5) tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Pace dan Kecamatan Prambon; dan
6) tempat evakuasi bencana sebagaimana tertulis pada point 4) terdapat di fasilitas umum kecuali sarana pendidikan



Gambar 2.4 Peta Rencana Pola Ruang
Sumber: Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021

6. Sistem Pusat Permukiman

a. Rencana sistem pusat permukiman di daerah meliputi :
   1) PKL
   2) PPK
   3) PPL

b. PKL sebagaimana dimaksud meliputi Perkotaan Nganjuk; Perkotaan Tanjunganom; Perkotaan Kertosono; dan Perkotaan Rejoso.

c. PPK sebagaimana dimaksud meliputi Perkotaan Pace di Kecamatan Pace; Perkotaan Berbek di Kecamatan Berbek; dan Perkotaan Lengkong di Kecamatan Lengkong.

d. PPL sebagaimana dimaksud meliputi Perkotaan Sawahan di Kecamatan Sawahan; Perkotaan Ngetos di Kecamatan Ngetos; Perkotaan Prambon di Kecamatan Prambon; Perkotaan Ngronggot di Kecamatan Ngronggot; Perkotaan

Loceret di Kecamatan Loceret; Perkotaan Baron di Kecamatan Baron; Perkotaan Sukomoro di Kecamatan Sukomoro; Perkotaan Bagor di Kecamatan Bagor; Perkotaan Wilangan di Kecamatan Wilangan; Perkotaan Patianrowo di Kecamatan Patianrowo; Perkotaan Gondang di Kecamatan Gondang; Perkotaan Jatikalen di Kecamatan Jatikalen; dan Perkotaan Ngluyu di Kecamatan Nguluyu.

7. Kawasan Budidaya

a. Kawasan hutan produksi meliputi:
   1) kawasan hutan produksi tetap; dan
   2) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
b. kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 42.324 Ha.
c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Rejoso dengan luasan kurang lebih 428 Ha.

Kawasan perkebunan rakyat terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan dengan luasan kurang lebih 5.000 Ha (lima ribu hektar).

a. Kawasan pertanian terdiri atas:
   1) kawasan tanaman pangan; dan
   2) kawasan peternakan.
b. Kawasan tanaman pangan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 37.781 Ha dengan kawasan yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang,

Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngluyu dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 27.542 Ha.

c. Kawasan peternakan terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Patianrowo dengan luasan kurang lebih 151 Ha.

Kawasan pertambangan dan energi, berupa kawasan pertambangan mineral terdiri atas:

a. kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Sawahan dengan luasan kurang lebih 50 Ha; dan
b. kawasan peruntukan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 104 Ha.

Kawasan peruntukan industri terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Wilangan.dengan luasan kurang lebih 1.918 Ha.

a. Kawasan pariwisata terdiri atas:
   1) lokasi pariwisata alam;
   2) lokasi pariwisata budaya;
   3) lokasi pariwisata buatan.

b. Lokasi pariwisata alam, terdiri atas:
   1) Air terjun Sedudo, wisata Watu Lawang, agrowisata lingkar Gunung Wilis, air terjun Watu Lumbung, air terjun Banyu Anjlok, air terjun Selo Leter, wisata *agroforestry*, wisata alam Watu Belah, air terjun Singokromo, air terjun Gedangan, kebun mawar (Agrowisata Ganter), embung estumulyo, Bukit Persinggahan Jend. Sudirman (BPJS), wisata hutan Bambu, bukit batu Songgong, Petungulung Tubing Adventure dan Gua Ndalem Kebonagung di Kecamatan Sawahan;
   2) Air Merambat Roro Kuning, air terjun Pring Jowo, pendakian Sekartaji, air terjun Coban Unut, pemandian Sri Tanjung Wisata Tirta, wisata Jolotundo, Gua Alap-alap dan Bukit Gua Dali Sumber Klampok di Kecamatan Loceret;
   3) Air Terjun Ngebleng di Kecamatan Jatikalen;
   4) Grojogan Dhuwur Sumbermiri di Kecamatan Lengkong.
   5) Wisata bukit Salju, sumber mata air Banyu Towo, air terjun Coban Tretes dan air terjun Sumber Manik di Kecamatan Ngetos;
   6) Gua Margo Tresno dan wisata watu Gandul di Kecamatan Ngluyu;
   7) Gua dan Grojogan Putri ayu di Kecamatan Rejoso; dan
   8) Lokasi pariwisata wisata alam lainnya yang terdapat di seluruh kecamatan.

c. Lokasi pariwisata budaya terdiri atas:

1) Makam Kanjeng Djimat dan Masjid Al-Arfiyyah di Kecamatan Berbek;
2) Petilasan Gajah Mada di Kecamatan Kertosono;
3) Candi Lor, monumen DR. Soetomo, pura Kerta Bhuwana Giri Wilis, monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Gua Romusha di Kecamatan Loceret;
4) Gedung Juang 45, klenteng Hok Yoe Kiong dan museum Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk;
5) Makam Kyai Poleng, pertapaan Argojali, makam Sunan Ngatas Angin, kampung Mangga, candi Ngetos dan Makam Para Aulia Ngetos di Kecamatan Ngetos;
6) Makam Sono Gedong dan makam Rajeg Wesi di Kecamatan Ngluyu;
7) Makam Nyi Ageng Sepet dan makam Sentono Kacek di Kecamatan Pace;
8) Petilasan Kadipaten Posono, makam Tumenggung Kopek dan Masjid Pakuncen Kecamatan Patianrowo;
9) Situs Condrogeni, makam Ki Ageng Ngaliman, makam Gedhong Wetan, petilasan Watu Banteng, makam Eyang Kabul Misuwur, pertapaan Sadepok dan Makam Menteri Supeno di Kecamatan Sawahan;
10) Makam Keniten dan Padepokan Langen Tayub di Kecamatan Tanjunganom; dan
11) Makam Syech Sulukhi di Kecamatan Wilangan.

d. Lokasi pariwisata buatan terdapat di seluruh kecamatan.

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g terdiri atas:

a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman pedesaan.

(1) Kawasan permukiman perkotaan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 12.010 Ha.

(2) Kawasan permukiman pedesaan terdapat di seluruh kecamatan direncanakan dengan luasan kurang lebih 17.888 Ha.

8. Kawasan Strategis

a. Kawasan Strategis yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:
b. Kawasan Agropolitan Selingkar Wilis meliputi Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan Kecamatan Berbek;
c. Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang;
d. Kawasan industri meliputi Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Sukomoro;
e. Kawasan pariwisata Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso;
f. Kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan; dan
g. Kawasan ekonomi cepat tumbuh di Kecamatan Pace.

9. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041. Kondisi pemanfaatan ruang tersebut mengalami perubahan seiring perkembangan waktu sejalan dengan kegiatan/aktivitas masyarakat. Secara detail, perubahan pemanfaatan ruang Kabupaten Nganjuk dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2. Adapun pemanfaatan ruang Kabupaten

Nganjuk tahun 2020-2024 disajikan pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 2.9 Pemanfaatan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Luas lahan	153.058,8	153.058,8	153.058,8	153.058,8	395.884 m^2
Luas lahan sesuai Rencana Tata Ruang	124.523,018 m^2 (81,36 %)	124.658,263 m^2 (81,44 %)	125.408,794 m^2 (81,94 %)	125.666.698 m^2 (82,10 %)	395.884 m^2 (100 %)

Sumber : Dinas PUPR tahun,2025

10. Tata Guna Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan di Kabupaten Nganjuk. Luas wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 adalah 1.288,22 Km^2 / 128.822 Ha yang terbagi menjadi 20 kecamatan, 264 desa, dan 20 kelurahan.

Dalam perkembangannya pemanfaatan lahan tersebut mengalami perubahan, salah satunya pada jenis tanah sawah. Alih fungsi lahan sawah tidak hanya pada daerah suburban, akan tetapi telah masuk ke daerah pedesaan. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk, namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan.

Perubahan tata guna lahan berdasarkan data Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diterbitkan.

Sehingga pada tahun 2024 diperoleh data penggunaan lahan Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut

Tabel 2.10 Tata Guna Lahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2024

Penggunaan Lahan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
Hutan	28,831.79	28,831.79	28,403.79	28,403.79	28,403.79	28,393.87
Industri Dan Pergudangan	337.25	383.48	383.78	409.75	421.02	457.872571
Ladang/ Tegalan	27,539.05	27,411.90	27,400.20	27,400.20	27,400.20	27,400.20
Permukiman	19,374.52	19,392.36	19,394.59	19,415.34	19,419.19	19,429.84
Pertambangan	120.08	241.39	252.46	252.46	252.46	252.46
Peternakan	96.53	97.66	97.66	112.03	112.03	112.03
Sawah	51,452.77	51,393.40	51,391.51	51,330.43	51,315.30	51,277.72
Sungai	941.21	941.21	941.21	941.21	941.21	941.21
Waduk	128.8	128.8	556.8	556.8	556.8	556.8
TOTAL	128,822.00	128,822.00	128,822.00	128,822.00	128,822.00	128,822.00

Sumber: Materi Teknis Perda Kabupaten Nganjuk No. 2 Tahun 2021 dan Dinas PUPR

Dari data yang disajikan terkait pemanfaatan lahan dalam beberapa waktu terakhir, dapat diketahui tren peralihan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan luas dan persentase alih fungsi lahan yang telah terjadi dan akan terjadi di masa mendatang. Pemanfaatan lahan sebagian besar merupakan perubahan dari lahan existing berupa sawah. Untuk mengantisipasi terus berkurangnya lahan sawah yang akan berpotensi mengganggu ketahanan pangan, maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengantisipasi dengan menyusun peraturan daerah tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Nganjuk, kawasan perkotaan berpusat di sekitar Alun-Alun dan Pendopo Kabupaten Nganjuk, kemudian berkembang ke semua arah. Penggunaan lahan berupa tegalan masih cukup luas berlokasi di sebelah

selatan dan barat Kabupaten Nganjuk. Penggunaan lahan berupa sawah yang tidak begitu luas, terdapat di sekitar Kaliulo di sebelah utara kabupaten.

Untuk kawasan terbangun didominasi oleh kawasan permukiman, perkantoran dan perdagangan; sedangkan untuk kawasan tidak terbangun didominasi oleh kebun campuran/tegalan, ladang, sawah di pinggiran kota. Secara lebih rinci penyebaran penggunaan lahan adalah sebagai berikut:

1. Perumahan

   Kawasan perumahan umumnya menyebar mengikuti pola jaringan jalan utama kota. Pada kawasan pusat kota, kawasan perumahan ini bersifat masif (memenuhi seluruh ruang) bersamaan dengan penggunaan lahan intensif lainnya (perkantoran, perdagangan, jasa, dan fasilitas kota). Pada kawasan bukan pusat kota, penyebaran kawasan permukiman ini terlihat jelas mengikuti jaringan jalan, sehingga membentuk kantong-kantong kawasan tidak terbangun berupa kebun campuran, tegalan, dan ladang.

2. Kawasan Perkantoran

   Kawasan perkantoran pemerintah seperti instansi pemerintah sektoral (Kanwil dan Kandep) serta Perangkat Daerah, umumnya beraglomerasi di kawasan pusat kota.

3. Kawasan Perdagangan dan Jasa

   Kawasan perdagangan dan jasa terutama berlokasi di pusat kota. Penyebaran kawasan perdagangan ini tampak membentuk pola berbentuk pita (*ribbon*).

4. Fasilitas Umum

   Untuk fasilitas kota, baik fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, lokasinya menyebar di seluruh wilayah kota, sesuai dengan lingkup pelayanannya.

Berdasarkan analisis pemanfaatan lahan di atas, nampak bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Nganjuk adalah sawah yaitu sebesar 39,81% dari luas wilayah keseluruhan, kemudian hutan sebesar 22,03% dan ladang/tegalan sebesar 21,27%. Pemanfaatan lahan sebagai sawah mendominasi 11 kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Wilayah kecamatan yang didominasi pemanfaatan lahannya oleh hutan ada 8 wilayah kecamatan, sedangkan kecamatan yang didominasi penggunaan lahan kering adalah Kecamatan Ngronggot. Maka dengan analisis pemanfaatan lahan di Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pemanfaatan lahan Kabupaten Nganjuk memiliki core competence (unggulan) daerah sebagai daerah Pertanian.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Daya dukung dan daya tampung dalam bertujuan agar pemanfaatan ruang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berikut ini merupakan penjelasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Nganjuk.

1. Analisis Daya Dukung Pangan

Penentuan status daya dukung pangan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan penduduk.

Tabel 2.12 merupakan data penggunaan lahan di Kabupaten Nganjuk tahun 2019- 2023. Data penggunaan lahan diperoleh melibatkan beberapa cara, baik secara manual maupun menggunakan teknologi berupa Sistem Informasi Geografis (SIG). Tahapan yang dilakukan yakni pengumpulan data melalui peta dasar berupa peta topografi, citra satelit, atau peta yang diperoleh dari survei lapangan dan data pendukung berupa peta zonasi,

data kepemilikan lahan, data tata ruang, dan informasi terkait lainnya. Selanjutnya dilakukan klasifikasi penggunaan lahan dengan mendefinisikan kategori dan pengelompokan data dalam beberapa kategori yaitu lahan pertanian sawah (irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, dan rawa lebak), lahan pertanian bukan sawah (tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang penggembalaan/rumput, hutan negara, dan pemanfaatan lainnya), serta lahan bukan pertanian. Tahapan selanjutnya pengukuran luas lahan yang secara efektif dapat dilakukan secara digital menggunakan SIG, kemudian dapat dilakukan tabulasi dan analisis data, serta pembuatan peta yang menggambarkan kondisi penggunaan lahan berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya

2. Daya Dukung Pangan Eksisting

Indikator ketersediaan dicerminkan oleh luas lahan pertanian dan produktivitasnya. Sebagaimana produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas dalam bentuk pangan pokok khususnya beras.Perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$t = \frac{Lp/Pd}{KFM/Pr}$$

Dimana :

t	= Daya Dukung Wilayah Pertanian
Lp	= Luas Panen (Ha)
Pd	= Jumlah Penduduk (jiwa)
KFM	= Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun)
Pr	= Produksi lahan rata – rata per hektar (Kg/Ha)

Kelestarian ekosistem tergantung pada ketersediaan sumberdaya yang cukup merata dan berkelanjutan. Sumber daya yag dimaksud adalah sumberdaya yang dapat diperbaharui dan sebagai indikatornya adalah ketersediaan bahan makanan utama

yaitu beras. Dengan asumsi dari perhitungan daya dukung pertanian di atas, jika:

a. t>1

   Terlampaui, wilayah tersebut mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

b. t<1

   Belum terlampaui, wilayah tersebut tidak mampu melaksanakan swasembada pangan atau dapat diartikan bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah penduduk optimal.

c. t=1

   Wilayah tersebut memiliki daya dukung lingkungan optimal. Jadi nilai 1 (satu) merupakan batas ambang daya dukung lingkungan.

Parameter yang digunakan : (1) luas panen; (2) jumlah penduduk; (3) kebutuhan fisik minimum (KFM); dan (4) produktivitas lahan/ ha. Kebutuhan fisik minimum yang diperlukan untuk menentukan besarnya daya dukung wilayah lahan pertanian sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kondisi wilayah. KFM (Kebutuhan Fisik Minimum) didasarkan atas nilai sebesar 265 kg beras/org/tahun yang setara dengan 2600 Kilo kalori/kapita/tahun. Untuk mengetahui informasi lebih jelas terkait daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.

Tabel 2.11 Daya Dukung Lahan Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	Produksi Padi (ton)	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	Produktivitas Beras (ton)	KFM	K (KFM/Produktifitas Tanaman Pangan (Beras))	Daya Dukung	Keterangan
Sawahan	40072	2055	11500,97	0,051282691	6,172936	0,265	0,042929329	1,194584039	Terlampaui
Ngetos	39665	2050	11843,21	0,051682844	6,3713518	0,265	0,041592429	1,242602189	Terlampaui
Berbek	60668	3762	24178,82	0,062009626	7,0878533	0,265	0,037387907	1,658547673	Terlampaui
Loceret	78396	4785	31893,06	0,061036277	7,3524077	0,265	0,036042615	1,693447531	Terlampaui
Pace	68896	4868	32384,26	0,070657222	7,3303615	0,265	0,036151014	1,954501824	Terlampaui
Tanjunganom	121513	9609	66028,14	0,079077959	7,5728697	0,265	0,034993339	2,259800293	Terlampaui
Prambon	75461	6763	45762,86	0,089622454	7,4626387	0,265	0,035510228	2,523849032	Terlampaui
Ngronggot	86810	3692	24696,41	0,042529662	7,3744539	0,265	0,035934864	1,183520888	Terlampaui
Kertosono	57176	1557	9960,82	0,027231706	7,054784	0,265	0,037563163	0,72495774	Belum Terlampaui
Patianrowo	46204	4758	29119,81	0,102978097	6,7461372	0,265	0,039281739	2,621525932	Terlampaui
Baron	56460	5395	33240,55	0,095554375	6,7902296	0,265	0,039026663	2,448438279	Terlampaui
Gondang	57651	4584	29077,63	0,079512931	6,9886454	0,265	0,03791865	2,096934646	Terlampaui
Sukomoro	48580	3670	23188,09	0,075545492	6,9665992	0,265	0,038038646	1,986019487	Terlampaui
Nganjuk	71067	1915	12347,65	0,026946403	7,1098995	0,265	0,037271976	0,722966849	Belum Terlampaui
Bagor	63867	3325	21226,68	0,052061315	7,0327378	0,265	0,037680916	1,381636141	Terlampaui
Wilangan	31592	1510	10097,31	0,047796911	7,3744539	0,265	0,035934864	1,330098543	Terlampaui
Rejoso	74266	6228	39880,78	0,083860717	7,054784	0,265	0,037563163	2,232525448	Terlampaui
Ngluyu	14518	1159	6631,83	0,079831933	6,3052132	0,265	0,042028714	1,899461722	Terlampaui
Lengkong	34507	2194	12475,58	0,063581302	6,2721439	0,265	0,042250306	1,504871991	Terlampaui
Jatikalen	21242	1627	8843,86	0,076593541	5,9965664	0,265	0,044191956	1,733200962	Terlampaui

Berdasarkan data pada tabel diatas mengenai daya dukung lahan pertanian pangan di Kabupaten Nganjuk tahun 2024, dapat diketahui bahwa sebagian besar kecamatan memiliki daya dukung yang mencukupi, sementara beberapa kecamatan lainnya mengalami kondisi yang melampaui batas daya dukung. Hal ini tercermin dalam diagram pada Gambar 3.31, yang menunjukkan bahwa 85% wilayah masih dalam kategori "Terlampaui", sedangkan 15% sisanya tergolong "Belum Terlampaui". Kecamatan- kecamatan yang memiliki daya dukung terlampaui menunjukkan rasio KFM yang lebih rendah, menandakan bahwa lahan pertanian di wilayah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Sebaliknya, kecamatan yang belum terlampaui memiliki keseimbangan antara luas panen, produksi padi, serta kebutuhan pangan penduduknya. Hal ini menjadi indikator penting dalam perencanaan ketahanan pangan daerah untuk memastikan ketersediaan pangan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk.

3. Daya Dukung Pangan Proyeksi Tahun 2029

Proyeksi ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti kapasitas produksi pangan lokal, termasuk luas dan produktivitas lahan pertanian, serta teknologi yang digunakan. Selain itu, peran impor dan ekspor pangan diperhitungkan untuk memahami dinamika perdagangan dan ketersediaan pasar yang berpengaruh pada suplai pangan daerah Ketersediaan sumber daya alam yang diperlukan untuk produksi pangan, seperti air, tanah, dan iklim, juga dievaluasi secara mendalam untuk menilai sejauh mana lingkungan alam dapat mendukung produksi pangan secara berkelanjutan. Proyeksi jumlah penduduk selama periode RPJMD tahun 2025 - 2029 dihitung untuk menentukan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi. Analisis ini mencakup evaluasi kapasitas produksi pangan lokal, termasuk luas dan produktivitas

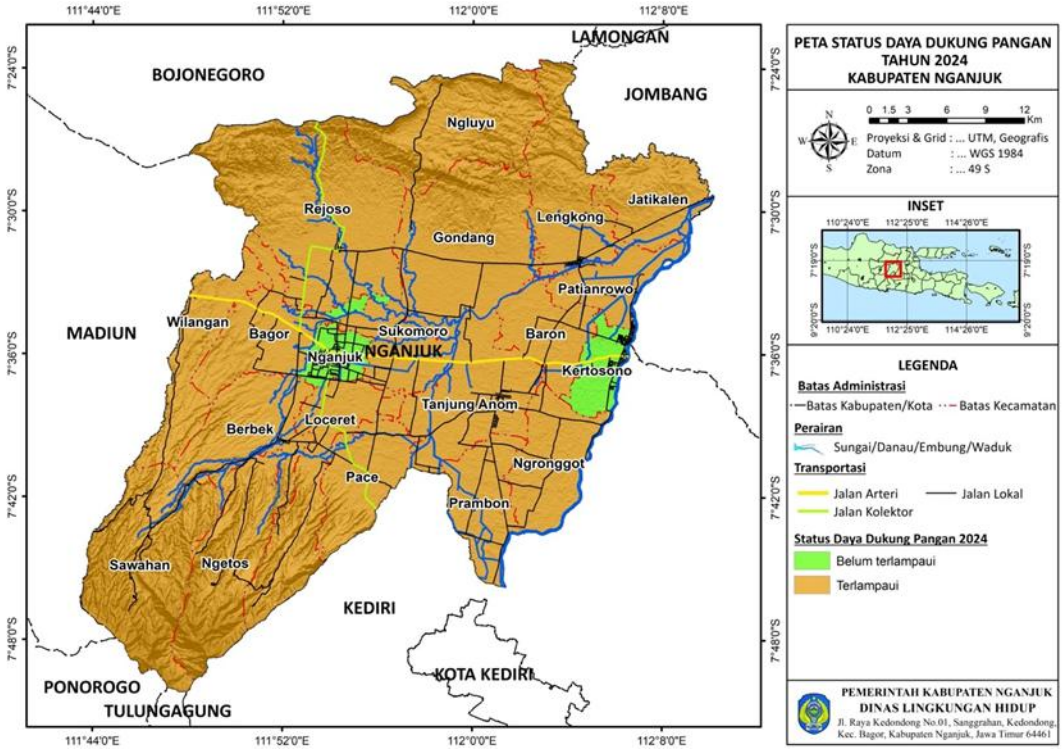
lahan pertanian, serta teknologi yang digunakan. Berikut adalah proyeksi dan peta sebaran daya dukung pangan di Kabupaten Nganjuk pada periode 5 tahun yang akan datang yaitu Tahun 2025 - 2029 :

Tabel 2.12 Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029

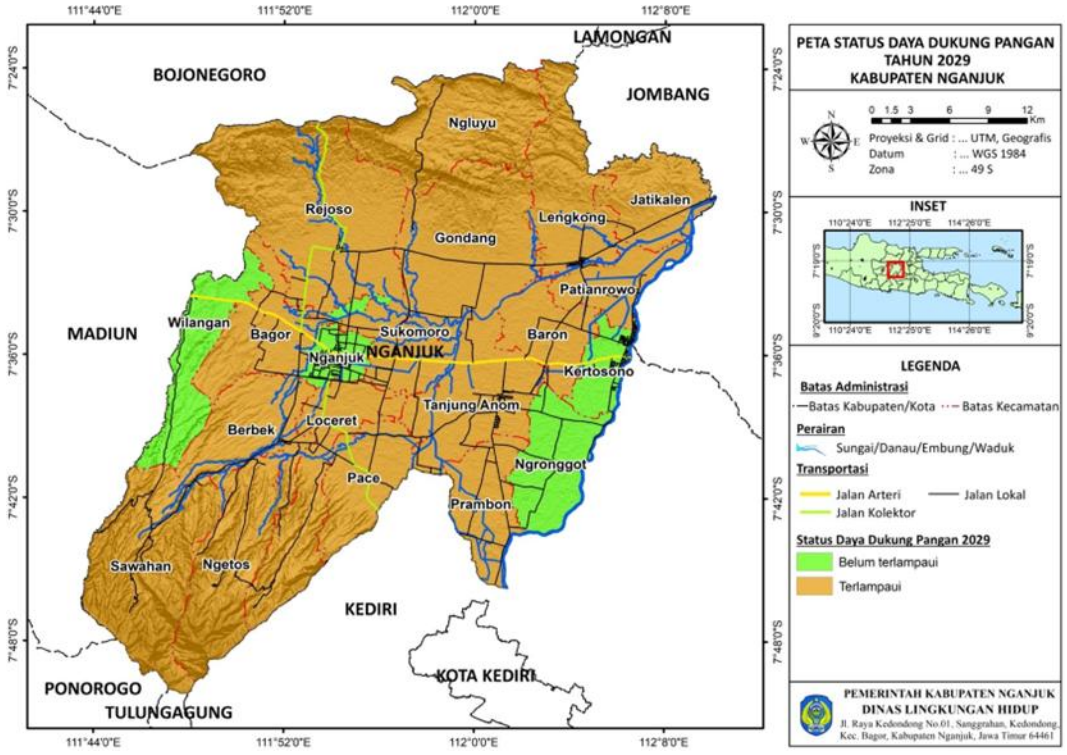
No	Kecamatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Status tahun 2029
1	Sawahan	1,365	1,359	1,354	1,348	1,342	Terlampaui
2	Ngetos	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	Terlampaui
3	Berbek	1,438	1,435	1,432	1,429	1,426	Terlampaui
4	Loceret	1,167	1,163	1,160	1,156	1,153	Terlampaui
5	Pace	1,456	1,449	1,442	1,434	1,427	Terlampaui
6	Tanjunganom	1,239	1,224	1,209	1,194	1,179	Terlampaui
7	Prambon	1,311	1,301	1,291	1,282	1,272	Terlampaui
8	Ngronggot	0,509	0,482	0,456	0,431	0,408	Belum Terlampaui
9	Kertosono	0,598	0,602	0,606	0,610	0,613	Belum Terlampaui
10	Patianrowo	2,048	2,041	2,034	2,027	2,020	Terlampaui
11	Baron	1,713	1,704	1,695	1,686	1,677	Terlampaui
12	Gondang	1,993	1,982	1,971	1,960	1,950	Terlampaui
13	Sukomoro	1,455	1,429	1,404	1,380	1,356	Terlampaui
14	Nganjuk	0,434	0,429	0,424	0,420	0,415	Belum Terlampaui
15	Bagor	1,113	1,105	1,096	1,088	1,080	Terlampaui
16	Wilangan	0,459	0,444	0,428	0,413	0,399	Belum Terlampaui
17	Rejoso	1,637	1,624	1,610	1,596	1,583	Terlampaui
18	Ngluyu	1,983	1,970	1,956	1,943	1,929	Terlampaui
19	Lengkong	1,549	1,545	1,541	1,537	1,533	Terlampaui
20	Jatikalen	1,844	1,839	1,835	1,830	1,826	Terlampaui

Berdasarkan Tabel Proyeksi Daya Dukung Pangan di Kabupaten Nganjuk, terlihat adanya variasi dalam kemampuan setiap kecamatan dalam mendukung kebutuhan pangan penduduknya hingga tahun 2029. Sebagian besar kecamatan menunjukkan rasio daya dukung pangan yang melebihi angka 1, yang berarti sumber daya pangan di wilayah tersebut telah terlampaui oleh kebutuhan penduduknya. Kecamatan Sawahan

memiliki rasio 1,342, Ngetos 1,429, Berbek 1,423, Loceret 1,153, Pace 1,327, Tanjunganom 1,274, Prambon 1,272, Patianrowo 2,016, Baron 1,677, Gondang 1,560, Sukomoro 1,356, Rejoso 1,553, Ngluyu 1,531, Lengkong 1,523, dan Jatikalen 1,820. Hal ini menunjukkan bahwa di kecamatan-kecamatan tersebut, kebutuhan pangan sudah melampaui kapasitas daya dukung yang tersedia, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan ketahanan pangan jika tidak diimbangi dengan strategi peningkatan produksi atau efisiensi distribusi. Sementara itu, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki rasio di bawah atau mendekati angka 1, yang menunjukkan bahwa daya dukung pangan mereka belum sepenuhnya terlampaui. Kecamatan Ngronggot memiliki rasio 0,408, Kertosono 0,613, Nganjuk 0,415, dan Wilangan 0,399. Wilayah-wilayah ini masih memiliki daya dukung yang relatif lebih baik dibandingkan kecamatan lain yang sudah terlampaui, namun tetap memerlukan perhatian agar tidak mengalami defisit di masa depan. Ketimpangan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor seperti jumlah penduduk, luas lahan pertanian, serta efisiensi dalam distribusi dan konsumsi pangan. Dari data ini menunjukkan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Nganjuk berada dalam kondisi daya dukung pangan yang sudah terlampaui, sehingga diperlukan strategi khusus dari pemerintah daerah dalam mengelola ketahanan pangan.



Gambar 2.5 Daya Dukung Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024



Gambar 2.6 Daya Dukung Pangan Tahun 2029

4. Analisis Daya Dukung Air

Analisis daya dukung air dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air. Metode ini menunjukkan cara perhitungan daya dukung air di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Dengan metode ini dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa suatu wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Untuk memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan.

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Ketersediaan (*Supply*) air di suatu wilayah dapat dihitung menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional berikut ini.

Rumus :

$$C = \frac{\mathrm{S}(C_i \; x \; A_i)}{A_i}$$

$$R = \frac{\mathrm{S}R_i}{\mathrm{S}m}$$

$$S_A = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan :

S_A = ketersediaan air (m^3/ tahun)
C = koefisien limpasan tertimbang
C_i = koefisien limpasan penggunaan lahan
A_i = luas penggunaan lahan (ha)

R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/ tahunan)
R_i = curah hujan tahunan pada stasiun (mm)
m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan
A = luas wilayah (ha)
10 = faktor konversi dari mm. Ha menjadi m^3

Sedangkan untuk kebutuhan (*Demand*) air dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut

Rumus DA air minum :

$$D_A = N \times KHL_A$$

Keterangan :

$D_{air\ minum}$ = total kebutuhan air (m3/ tahun)
N = jumlah penduduk (orang)
KHL_A = kebutuhan air untuk hidup layak

Rumus DA irigasi :

$$D_A = T \times H \quad A$$

Keterangan :

$D_{Air\ minum}$ = total kebutuhan air untuk irigasi (m3/ tahun)
A = luas area (Ha)
H = ketebalan air/ tinggi genangan (m3/ hari)
T = lama pemberian air (hari)

Penentuan status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (S_A) dan kebutuhan air (D_A).

Nilai $S_A > D_A$, daya dukung air dinyatakan surplus

Nilai SA < DA, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui air di wilayah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2029 dapat dilihat dalam Tabel berikut. Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diperkirakan daya dukung

Tabel 2.13 Daya Dukung Air Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No	Kecamatan	SA = ketersediaan air (m3/ tahun)	DA = total kebutuhan air (m3/ tahun) Tahun 2024	
1	Sawahan	151.604.279,97	40.847.880,66	Belum terlampaui
2	Ngetos	106.479.652,10	42.467.289,17	Belum terlampaui
3	Berbek	80.896.629,65	55.887.616,93	Belum terlampaui
4	Loceret	91.334.149,28	73.096.596,24	Belum terlampaui
5	Pace	67.889.182,72	71.453.995,08	Terlampaui
6	Tanjunganom	84.427.525,67	117.444.828,91	Terlampaui
7	Prambon	57.645.864,72	69.130.838,46	Terlampaui
8	Ngronggot	53.388.010,52	66.089.159,34	Terlampaui
9	Kertosono	27.156.412,45	38.660.405,29	Terlampaui
10	Patianrowo	35.790.645,70	48.756.432,90	Terlampaui
11	Baron	41.556.931,44	65.795.221,09	Terlampaui
12	Gondang	82.720.110,80	112.064.772,82	Terlampaui
13	Sukomoro	50.848.100,16	70.721.919,79	Terlampaui
14	Nganjuk	30.556.743,75	36.671.443,22	Terlampaui
15	Bagor	71.891.640,38	60.644.342,93	Belum terlampaui
16	Wilangan	62.056.326,92	27.727.409,54	Belum terlampaui
17	Rejoso	109.847.515,93	115.376.799,00	Terlampaui
18	Ngluyu	85.076.916,00	49.342.543,70	Belum terlampaui
19	Lengkong	64.118.465,86	57.788.897,59	Belum terlampaui
20	Jatikalen	47.228.753,67	26.352.340,71	Belum terlampaui
	Jumlah	1.402.513.857,67	1.246.320.733,37	Terlampaui

Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan tabel diatas mengenai daya dukung air di Kabupaten Nganjuk tahun 2024, dapat diketahui bahwa total ketersediaan air di seluruh kecamatan mencapai 1.402.513.857,67 m^3 per tahun, sedangkan total kebutuhan air yang untuk tahun 2024 adalah 1.246.320.733,37 m^3 per tahun. Dari data tersebut, sebagian besar kecamatan memiliki ketersediaan air yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tahun 2024, seperti Berbek, Loceret, Pace, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Kertosono, Patianrowo, Baron, Gondang, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, Rejoso, Ngluyu, Lengkong, dan Jatikalen, yang ditandai dengan status "terlampaui." Namun, terdapat beberapa kecamatan yang mengalami defisit air, yaitu Sawahan, Ngetos, dan Wilangan, yang ditandai dengan status "belum terlampaui," menandakan bahwa kebutuhan air di wilayah ini belum sepenuhnya tercukupi berdasarkan tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif, termasuk

optimalisasi pemanfaatan air, peningkatan infrastruktur penyediaan air, serta penerapan kebijakan konservasi air guna menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk.

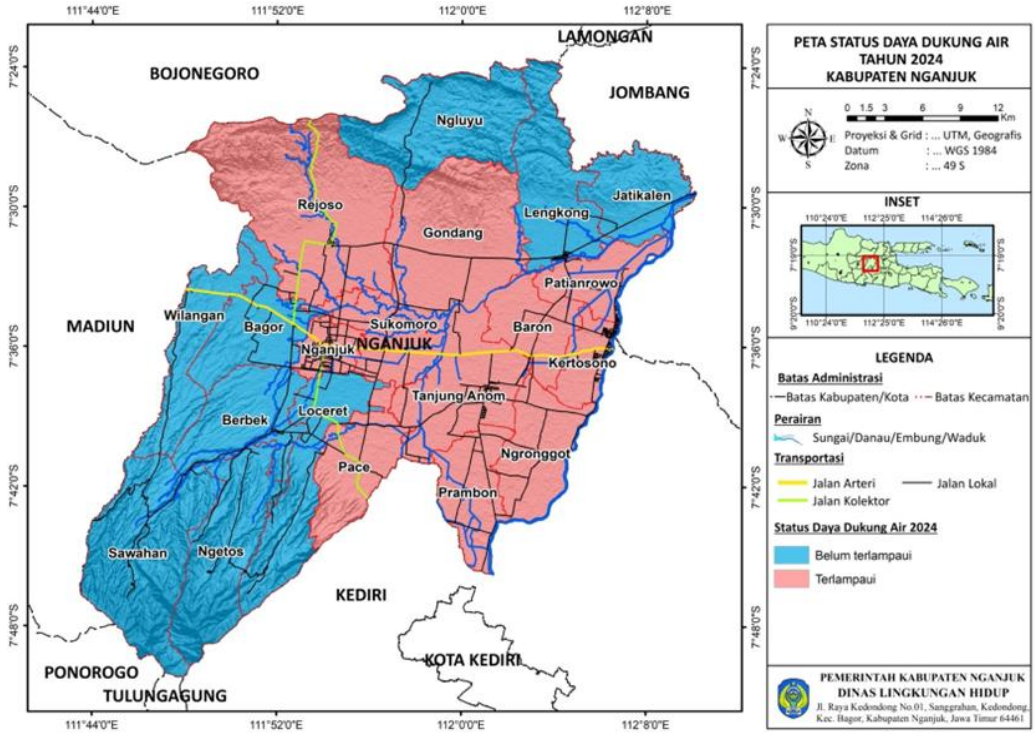
Tabel 2.14 Daya Dukung Air Kabupaten Nganjuk Tahun 2029

No	Kecamatan	SA = ketersediaan air (m3/ tahun)	DA = total kebutuhan air (m3/ tahun) Tahun 2029	
1	Sawahan	151.604.279,97	61.634.502	Belum terlampaui
2	Ngetos	106.479.652,10	57.164.423	Belum terlampaui
3	Berbek	80.896.629,65	90.132.738	Terlampaui
4	Loceret	91.334.149,28	115.149.913	Terlampaui
5	Pace	67.889.182,72	99.296.156	Terlampaui
6	Tanjunganom	84.427.525,67	196.723.499	Terlampaui
7	Prambon	57.645.864,72	121.337.086	Terlampaui
8	Ngronggot	53.388.010,52	184.091.672	Terlampaui
9	Kertosono	27.156.412,45	87.609.051	Terlampaui
10	Patianrowo	35.790.645,70	69.598.777	Terlampaui
11	Baron	41.556.931,44	82.567.672	Terlampaui
12	Gondang	82.720.110,80	84.293.129	Terlampaui
13	Sukomoro	50.848.100,16	79.768.349	Terlampaui
14	Nganjuk	30.556.743,75	118.559.173	Terlampaui
15	Bagor	71.891.640,38	99.440.308	Terlampaui
16	Wilangan	62.056.326,92	45.359.025	Belum terlampaui
17	Rejoso	109.847.515,93	116.048.600	Terlampaui
18	Ngluyu	85.076.916,00	20.923.855	Belum terlampaui
19	Lengkong	64.118.465,86	52.793.545	Belum terlampaui
20	Jatikalen	47.228.753,67	33.495.471	Belum terlampaui
Jumlah		1.402.513.857,67	1.815.986.945	Terlampaui

Sumber : Hasil Analisis 2024

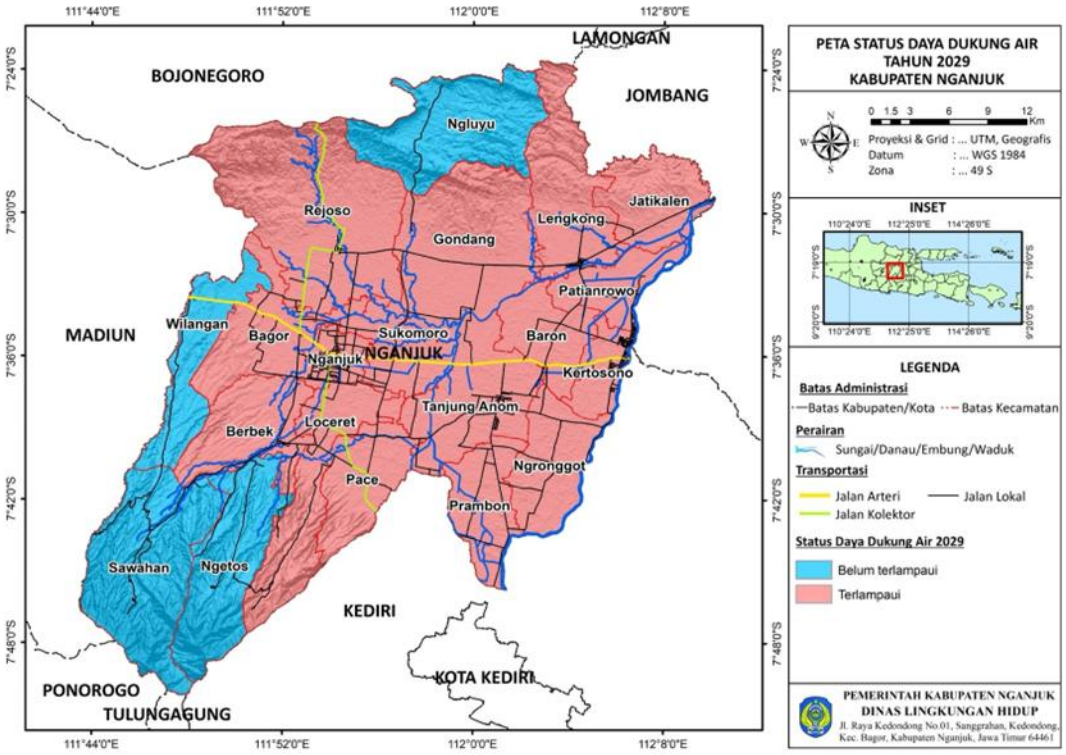
Berdasarkan Tabel diatas mengenai daya dukung air di Kabupaten Nganjuk tahun 2029, total ketersediaan air di seluruh kecamatan tercatat sebesar 1.402.513.857,67 m^3 per tahun, sementara total kebutuhan air yang diproyeksikan mencapai 1.815.986.945 m^3 per tahun. Dari data tersebut, terlihat bahwa beberapa kecamatan masih memiliki ketersediaan air yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, seperti Berbek, Loceret, Pace, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Kertosono, Patianrowo, Baron, Gondang, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, dan Rejoso, yang ditandai dengan status "terlampaui." Namun, beberapa kecamatan

lainnya diperkirakan mengalami defisit air karena kebutuhan airnya melebihi ketersediaan yang ada. Kecamatan-kecamatan yang mengalami kondisi ini, seperti Sawahan, Ngetos, Wilangan, Ngluyu, Lengkong, dan Jatikalen, ditandai dengan status "belum terlampaui." Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2029, tekanan terhadap sumber daya air di Kabupaten Nganjuk semakin meningkat, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kebutuhan air yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan air yang lebih baik, termasuk efisiensi penggunaan air, optimalisasi infrastruktur penyediaan air, serta kebijakan konservasi air yang berkelanjutan guna memastikan ketersediaan air bagi masyarakat di masa mendatang.



Gambar 2.7 Daya Dukung Air Tahun 2024 Kabupaten Nganjuk (Eksisting)

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Nganjuk



Gambar 2.8 Peta Daya Dukung Air Tahun 2029
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Nganjuk

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk

mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. IKP merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota) dimana semakin tinggi nilainya maka ketahanan pangan di wilayah tersebut semakin tinggi. Adapun nilai IKP oleh Badan Pangan nasional dikelompokkan menjadi 6 katergori, yaitu Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), Prioritas 6 (Sangat Tahan).

Tabel 2.15 Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan Expert Judgement

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio kosumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	0,30
	Sub Total	**0,30**
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
	Sub Total	**0,30**
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8.	Persentase balita *stunting*	0,05
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
	Sub Total	**0,40**

Tabel 2.16 Kategorisasi Nilai IKP

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75– 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96– 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber: Bapanas, 2024

Adapun Nilai IKP dirilis secara periodik tahunan oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, Badan Pangan Nasional, dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Tabel 2.17 Indeks Ketahan Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 dengan perhitungan 9 Indikator

Data	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	81.98	82.17	81.82	83.68	84.88
Ketegori	6 (Sangat Tahan)	6 (Sangat Tahan)	6 (Sangat Tahan)	6 (Sangat Tahan)	6 (Sangat Tahan)

Sumber : Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 223.1 tahun 2025 tentang Peta kerentanan dan Ketahanan Pangan nasional, terdapat perubahan indikator yang digunakan pada perhitungan Indeks Ketahanan Pangan Daerah, dimana semula IKP dihitung berdasarkan Komposit 3 (tiga) aspek dan 9 (sembilan) indikator menjadi 3 (tiga) aspek 11 (sebelas) indikator untuk perhitungan IPK Kabupaten/kota. Adapun berdasarkan

data pehitungan IKP dengan 11 (Sebelas) indikator oleh Bapanas, didapatkan nilai IKP Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebesar 71,42 (Prioritas 5 atau kategori tahan). Data IKP dengan 11 (sebelas) indikator tersebut, sesuai dengan arahan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 223.1 tahun 2025 menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan.

2. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan

Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi adalah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang aman dan sehat dari saluran terkelola yang sesuai dengan standar kesehatan. Jaringan perpipaan mengacu pada sistem distribusi air melalui pipa, sedangkan non-perpipaan melibatkan akses langsung ke sumber terlindungi seperti sumur pompa, bak penampung air hujan, atau bangunan penangkap mata air.

Penyediaan air minum melalui SPAM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air sehat dan bersih, yang mendukung kehidupan yang sehat dan produktif

Tabel 2.18 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan Terlindungi

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi	95,37% (14,15% JP dan 81,22% BJP terlindungi)	95,52% (15,20% JP dan 80,32% BJP terlindungi)	99,34% (16,58% JP dan 82,76% BJP terlindungi)	99,53 % (17,79% aman/JP Dan 81,74% BJP terlindungi)

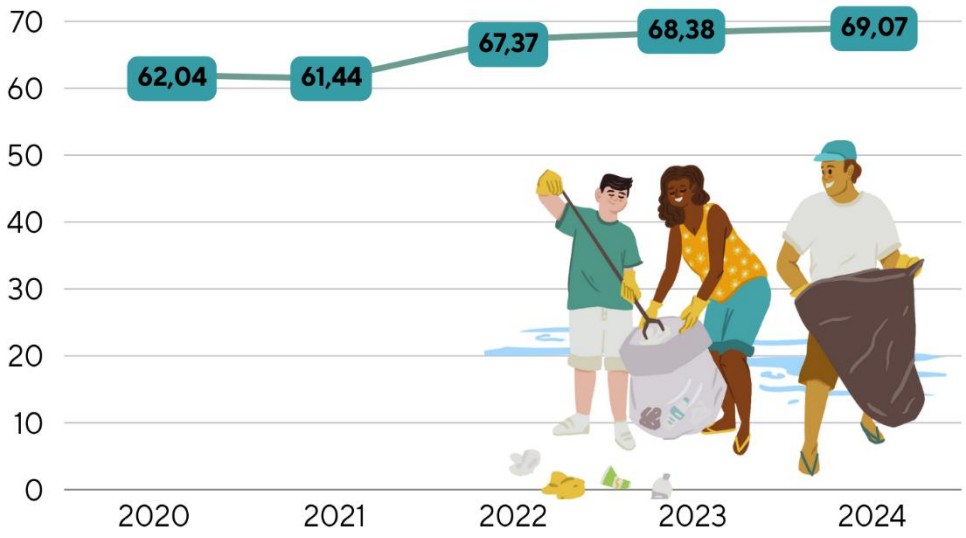
Sumber : Dinas PUPR, 2024

Akses rumah tangga perkotaan di Kabupaten Nganjuk terhadap air siap minum perpipaan masih terbatas, meskipun telah ada upaya signifikan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan distribusi air bersih.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah. IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Nganjuk cenderung dinamis namun masih berada di dalam kategori sedang (50<IKLH<70) sampai dengan baik (70<IKLH<90), sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut :



Gambar 2.9 Nilai IKLH Kabupaten Nganjuk 2020-2024
Sumber : Dinas LH Kabupaten Nganjuk, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan tren yang

cenderung meningkat. Pada tahun 2020 nilai IKLH tercatat sebesar 62,04 dan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 61,44. Namun, setelah itu terjadi perbaikan yang cukup signifikan, di mana nilai IKLH meningkat menjadi 67,37 pada tahun 2022, 68,38 pada tahun 2023, dan mencapai 69,07 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya terkait dengan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pemulihan kualitas air dan udara. Meski demikian, capaian nilai IKLH yang berada pada kisaran 60–69 masih menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya optimal dan memerlukan penguatan intervensi kebijakan berkelanjutan. Dengan tren positif yang ditunjukkan, Kabupaten Nganjuk memiliki peluang untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui strategi penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan daerah.

Kualitas air diukur pada sungai yang melewati Kabupaten Nganjuk yaitu Sungai Widas dan Kuncir pengukuran dilakukan pada 3 (tiga) titik yaitu hulu, tengah, dan hilir dan diukur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diharapkan dapat mewakili 2 (dua) musim, yaitu kemarau dan penghujan. Adapun parameter yang diukur ada 8 (delapan), yaitu DO, BOD, COD, TSS, pH, NO3-N, Total Phosphat dan Fecal Coli. Kualitas udara diukur pada lokasi yang mewakili kawasan perumahan, transportasi, industri dan perkantoran di Kabupaten Nganjuk, untuk parameter yang diukur adalah NO2 dan SO2. Sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan tutupan hutan, RTH, dan tutupan vegetasi lainnya yang ditampilkan dalam peta deliniasi yang dilengkapi dengan luasan dan titik koordinat Semakin tinggi IKLH, Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Nganjuk semakin Baik

Tabel 2.19 Indeks Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk Tahun 2020--2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)	56	53.33	61.61	60.67	56.25
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)	68.03	78.84	79.45	80.28	88.18
Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	62.08	54.46	54.91	55.31	55.74

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2024

Berdasarkan data Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk tahun 2020–2024, kondisi kualitas lingkungan memperlihatkan variasi antar indikator. Pada aspek Indeks Kualitas Air (IKA), nilainya cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Dari angka 56 pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 53,33 pada 2021, meskipun sempat meningkat menjadi 61,61 pada 2022. Namun, pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 56,25. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait pencemaran dan keterbatasan upaya pemulihan.

Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan tren yang positif dan relatif stabil meningkat. Dari 68,03 pada 2020, nilai IKU terus membaik hingga mencapai 88,18 pada 2024. Capaian ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam pengendalian pencemaran udara, baik melalui regulasi emisi, peningkatan ruang terbuka hijau, maupun faktor eksternal seperti berkurangnya aktivitas industri pencemar.

Adapun Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami dinamika dengan kecenderungan perbaikan secara bertahap. Pada 2020 nilai IKL tercatat 62,08, turun menjadi 54,46 pada 2021, namun meningkat kembali hingga 55,74 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi tekanan, terutama akibat alih fungsi lahan dan

degradasi lingkungan, meskipun upaya pemulihan dan pengendalian telah mulai menunjukkan hasil positif.

Secara keseluruhan, capaian indeks lingkungan hidup Kabupaten Nganjuk 2020–2024 menggambarkan bahwa kualitas udara berada pada kategori baik dan terus membaik, sedangkan kualitas air dan lahan masih memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air dan tata kelola lahan, disertai penguatan regulasi serta partisipasi masyarakat agar kualitas lingkungan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nganjuk mengalami progres kenaikan. Nilai IKLH yang merupakan gambaran pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantara adalah sebagai berikut :

Faktor Pendorong

Faktor pendorong kenaikan nilai IKLH adalah semakin meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Nganjuk. Adapun bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan antara lain :

1. Meningkatnya pengelolaan sampah yang dilakukan dengan upaya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah. Selain itu juga didukung oleh beroperasinya fasilitas pengurangan sampah, diantaranya bank sampah, TPS3R serta pelaksanaan program sedekah sampah oleh masyarakat yang berjalan dengan baik.

Tabel 2.20 Data Bank Sampah di Kabupaten Nganjuk

NO	NAMA BANK SAMPAH	JUMLAH SAMPAH MASUK (Ton/Hari)
1	Bank Sampah Induk SALEPOK OMAHE NGANJUK	1,04074
2	Bank Sampah Unit Bank Sampah ANGGREK	0,00844
3	Bank Sampah Unit Bank Sampah BAROKAH	0,00822
4	Bank Sampah Unit Bank Sampah BERINGIN HIJAU	0,00623
5	Bank Sampah Unit Bank Sampah BUKUR	0,00742
6	Bank Sampah Unit Bank Sampah BUNGUR MAKMUR	0,00881
7	Bank Sampah Unit Bank Sampah CENGKOK	0,00779
8	Bank Sampah Unit Bank Sampah DAHLIA	0,00735
9	Bank Sampah Unit Bank Sampah DESA BLONGKO	0,00693
10	Bank Sampah Unit Bank Sampah DESA GETAS	0,00535
11	Bank Sampah Unit Bank Sampah DESA JEGREG	0,00735
12	Bank Sampah Unit Bank Sampah DESA NGANGKATAN	0,00671
13	Bank Sampah Unit Bank Sampah ESTU SAE	0,00892
14	Bank Sampah Unit Bank Sampah FLAMBOYAN	0,0086
15	Bank Sampah Unit Bank Sampah KEDONDONG	0,00813
16	Bank Sampah Unit Bank Sampah KELURAHAN CANGKRINGAN	0,0086
17	Bank Sampah Unit Bank Sampah KELURAHAN KAUMAN (BSK)	0,00752
18	Bank Sampah Unit Bank Sampah KRAMAT BERSIH	0,00773
19	Bank Sampah Unit Bank Sampah MAJU BAHAGIA	0,00714
20	Bank Sampah Unit Bank Sampah MARGO UTOMO	0,00755
21	Bank Sampah Unit Bank Sampah MBEJAJI	0,00924
22	Bank Sampah Unit Bank Sampah MELATI	0,0073
23	Bank Sampah Unit Bank Sampah MULYO AGUNG	0,00614
24	Bank Sampah Unit Bank Sampah MUSIRKIDUL	0,00656
25	Bank Sampah Unit Bank Sampah NGUDI SARIRO	0,00752
26	Bank Sampah Unit Bank Sampah PELITA	0,00995
27	Bank Sampah Unit Bank Sampah PLOSO	0,00923
28	Bank Sampah Unit Bank Sampah SEGER WARAS	0,0073
29	Bank Sampah Unit Bank Sampah SEJAHTERA	0,00673
30	Bank Sampah Unit Bank Sampah SINAR TERANG	0,00892
31	Bank Sampah Unit Bank Sampah SUMBER REJEKI	0,00676
32	Bank Sampah Unit Bank Sampah TANJUNG	0,00671

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk, 2025

Tabel 2.21 TPS3R di Kabupaten Nganjuk

NO	NAMA FASILITAS PENGELOLA SAMPAH	JUMLAH SAMPAH MASUK (ton/hari)
1	TPS 3R Ganungkidul	1,53867
2	TPS 3R Kartoharjo	4,99798
3	TPS 3R Kedondong	6,11369
4	TPS 3R Kertosono	8,67455
5	TPS 3R Mastrip	8,04699
6	TPS 3R Pasar Berbek	8,67455
7	TPS 3R Pasar Loceret	6,75137
8	TPS 3R Pasar Wage	9,49444
9	TPS 3R Payaman	1,32502
10	TPS 3R Perdana	6,49378
11	TPS 3R Petak	5,23307
12	TPS 3R Tanjunganom	8,57333

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk, 2025

2. Pembinaan di sekolah melalui kegiatan sosialisasi serta pemberian penghargaan diantaranya, Sekolah Adiwiyata serta Ecopesantren. Selain itu di lingkungan masyarakat juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemberian penghargaan,diantaranya melalui kegiatan lomba Berseri, RT Cantik dan Kampung Iklim
3. Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup terutama pengelolaan limbah industri, selain itu juga peningkatan layanan pengaduan masyarakat dengan pemberian fasilitasi penanganan akan permasalahan lingkungan
4. Peningkatan tutupan lahan, dilakukan dengan penambahan luas serta pemeliharaan RTH serta penanaman pohon tepi jalan

Faktor Penghambat

1. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan semakin meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan

2. Berkembangnya sektor industri di Kabupaten Nganjuk perlu mendapatkan perhatian, karena diikuti oleh meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, terutama sektor jasa dan perdagangan sebagai penunjang aktivitas industri. Hal ini jika tidak dikelola akan berkontribusi pada penurunan lingkungan hidup
3. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor akan berkontribusi pada penurunan kualitas udara
4. Meski sudah dilakukan langkah persuasif terhadap pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat, namun kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan hidup masih kurang

Selain indeks kualitas lingkungan hidup, capaian lingkungan hidup berkualitas di Kabupaten Nganjuk juga diukur berdasarkan pengelolaan Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, seperti 2 tabel Berikut:

Tabel 2.22 Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (Ton/Tahun)	N/A	55435,46	40895,07	41443,51	41733,37
Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	N/A	162013,72	162107,74	163086,82	167098,17
Persentase Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	N/A	34,22	25,23	25,41	24,98

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2025

Berdasarkan data pengelolaan sampah Kabupaten Nganjuk pada periode 2021–2024, volume sampah yang berhasil diolah melalui fasilitas pengolahan sampah menunjukkan tren fluktuatif.

Pada tahun 2021 jumlah sampah terolah mencapai 55.435,46 ton, namun menurun cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 40.895,07 ton. Pada tahun 2023 dan 2024 volume sampah terolah relatif stabil, masing-masing sebesar 41.443,51 ton dan 41.733,37 ton. Sementara itu, timbulan sampah cenderung meningkat dari 162.013,72 ton pada tahun 2021 menjadi 167.098,17 ton pada tahun 2024. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya efektivitas pengolahan sampah, tercermin dari penurunan persentase sampah terolah terhadap timbulan sampah, dari 34,22 persen pada tahun 2021 menjadi 24,98 persen pada tahun 2024. Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun kapasitas pengolahan sampah masih berlangsung, pertumbuhan timbulan sampah yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan kapasitas pengolahan menyebabkan proporsi sampah terolah semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sistem pengelolaan sampah, baik melalui peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan, perluasan cakupan layanan, maupun penguatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan timbulan sampah di sumber.

Tabel 2.23 Rumah Tangga Terlayani Penuh Pengumpulan Sampah

TAHUN	JUMLAH RUMAH TANGGA	TIMBULAN SAMPAH (ton/tahun)	TIMBULAN SAMPAH PER RT (ton/tahun)	SAMPAH TEROLAH TPS3R (ton/hari)	SAMPAH MASUK TPS3R (ton/thn)	SAMPAH MASUK TPA (ton/thn)	RT TERLAYANI TPS3R dan TPA	
2021	387.453	162.013,72	0,42	51,77	18.896,05	27.375,00	**110.656**	**28,56%**
2022	397.016	162.107,74	0,41	50,91	18.582,15	27.499,10	**112.857**	**28,43%**
2023	403.928	163.086,82	0,40	50,99	18.611,35	27.845,85	**115.064**	**28,49%**
2024	411.550	167.098,17	0,41	51,17	18.678,71	28.225,45	**115.521**	**28,07%**

Sumber Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara meningkatkan cakupan

permukiman yang dilayani pengangkutan sampah. Sampai dengan Tahun 2024 baru sekitar 28,07% Rumah Tangga yang terlayani pengangkutan sampah maupun masyarakat yang mengangkut mandiri ke TPA.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:

a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
b. menyediakan TPS, TPST dan/atau TPA di tempat yang telah ditentukan;
c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA; dan
f. memroses sampah di TPA.

Prinsip pengolahan sampah orang pribadi atau badan wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah di daerah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sedangkan penanganan sampah di TPA secara terpadu dilakukan dengan *system control landfill* atau *sanitary landfill*.

Berdasarkan *masterplan* persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa ada tiga skenario yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten nganjuk. Skenario tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skenario pertama: pengolahan eksisting dengan kenaikan penanganan sesuai kemampuan APBN dan kenaikan reduksi di sumber

2. Skenario kedua: pengolahan eksisting dengan kenaikan penanganan sesuai kemampuan APBN serta kenaikan reduksi di sumber dan di TPS 3R
3. Skenario ketiga: pengolahan dengan kenaikan reduksi dan kenaikan penanganan sesuai dengan Jakstrada.

Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Nganjuk dan jangkauan pelayanan saat ini berjumlah 3 (tiga) unit, yaitu:

1. TPA Kedungdowo terletak di desa Kedungdowo Kecamatan Kota Nganjuk dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Nganjuk, Rejoso, Gondang, Bagor dan Sukomoro, dengan luas lahan 4,90 Ha dan sistem pengolahan sampah *control landfill* dengan kapasitas sebesar 12.072,38 m3.
2. TPA Pandantoyo terletak di desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan cakupan wilayah perkotaan kecamatan Kertosono, Tanjunganom, Ngronggot, Patianrowo, dengan luas lahan 1,20 Ha dan sistem pengolahan sampah *control landfill* dengan kapasitas sebesar 2.956,50 m3.
3. TPA Bendil terletak di desa Berbek Kecamatan Berbek dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Sawahan, Pace, Berbek, dengan luas lahan 1,2 Ha dan sistem pengolahan sampah *control landfill* dengan kapasitas sebesar 1.463,75 m3.

F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Upaya meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim ditunjukkan dengan indikator penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta Indeks Risiko bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

1. Indeks Risiko Bencana

Indeks risiko bencana adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman bencana, serta kemampuan daerah tersebut untuk menanggulanginya. Indeks ini memberikan gambaran tentang

seberapa besar risiko yang dihadapi suatu daerah akibat bencana, dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

Tabel 2.24 IRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Nganjuk	n/a	119,20	117,22	114,69	112,14

Sumber:BNPB, 2025

Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Nganjuk mengalami tren menurun, dimana hal ini menggambarkan pengelolaan bencana yang semakin baik. Nilai IRB tersebut didasarkan pada perhitungan dengan menggunakan nilai Bahaya (H) serta Kerentanan (V) Tahun 2021. Nilai IRB Kabupaten Nganjuk tahun 2024 adalah sebesar 112,14 dan masuk dalam kelas sedang (klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah: Tinggi >144; Sedang 13 – 144; Rendah <13). Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki tingkat kesiapan yang baik dalam menghadapi bencana.

2. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Risiko Bencana (IRB). IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Nganjuk terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2024 sebesar 0,63 dan masuk dalam kategori sedang. Nilai IKD Kabupaten Nganjuk tahun 2023 lebih tinggi dari nilai IKD Provinsi Jawa Timur. Data nilai IKD Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2020 sampai dengan tahun 2024) disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.25 IKD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Nganjuk	0,54	0,54	0,56	0,64	0,63

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur, 2024

Ancaman bahaya merupakan pemicu eksternal maupun internal yang bisa menimbulkan bencana di Kabupaten Nganjuk. Untuk ancaman, terdapat dua komponen penting yang dihadapi yaitu: 1) jumlah masyarakat terpapar yaitu komposisi kelompok masyarakat yang berpotensi terkena bencana, dan 2) ancaman yang berasal dari peta ancaman.

Kajian Risiko Bencana Kabupaten Nganjuk tahun 2024 memperlihatkan bahwa penyebaran wilayah rawan bencana sangat luas dan mencakup ragam kondisi topografi. Sekitar seratus desa/kelurahan di dua puluh kecamatan, seperti Rejoso, Loceret, Sawahan, Pace, dan Ngetos, masuk kategori prioritas mitigasi. Untuk memperkuat tanggap darurat, beberapa desa di Ngluyu, Lengkong, Jatikalen, dan Patianrowo telah menjadi wilayah pilot *Desa Tangguh Bencana*. Kawasan dataran tinggi di Sawahan, Ngetos, dan Berbek berisiko tinggi terhadap tanah longsor dan banjir lokal saat musim hujan, sementara dataran rendah dan area pesawah—terutama di wilayah dekat sungai—rentan terhadap genangan air. Contoh nyata peristiwa banjir dan pohon tumbang di Kecamatan Pace menegaskan kerawanan tersebut. Selain itu, peta risiko angin puting beliung menunjukkan bahwa 11 % wilayah kabupaten, terutama permukiman padat dengan topografi datar, berada pada tingkat risiko tinggi. Hal ini berdampak signifikan terhadap populasi yang rentan dan potensi kerugian ekonomi.

Tabel 2.26 Potensi Bencana Berdasarkan Kajian Resiko Bencana

Kecamatan	Kapasitas	Banjir		Tanah Longsor		Kebakaran Gedung dan Permukiman		Kekeringan		Kebakaran Lahan dan Hutan		Cuaca Ekstrim (Puting Beliung)	
		SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS
Sawahan	2	18	TINGGI	22.5	TINGGI	3	RENDAH	4	RENDAH	13.5	TINGGI	4	RENDAH
Ngetos	2	18	TINGGI	22.5	TINGGI	8	SEDANG	18	TINGGI	13.5	TINGGI	18	TINGGI
Berbek	2	18	TINGGI	5	RENDAH	8	SEDANG	10	SEDANG	3	RENDAH	4	RENDAH
Loceret	2	12	SEDANG	10	SEDANG	8	SEDANG	10	SEDANG	3	RENDAH	4	RENDAH
Pace	2	18	TINGGI	10	SEDANG	3	RENDAH	4	RENDAH	3	RENDAH	8	SEDANG
Tanjunganom	2	4	RENDAH	5	RENDAH	3	RENDAH	4	RENDAH	3	RENDAH	4	RENDAH
Prambon	2	4	RENDAH	5	RENDAH	10	SEDANG	4	RENDAH	3	RENDAH	4	RENDAH
Ngronggot	2	4	RENDAH	5	RENDAH	8	SEDANG	4	RENDAH	3	RENDAH	8	SEDANG
Kertosono	2	4	RENDAH	5	RENDAH	8	SEDANG	4	RENDAH	3	RENDAH	10	SEDANG
Patianrowo	2	4	RENDAH	5	RENDAH	3	RENDAH	4	RENDAH	3	RENDAH	8	SEDANG
Baron	2	4	RENDAH	5	RENDAH	3	RENDAH	4	RENDAH	3	RENDAH	8	SEDANG
Gondang	2	4	RENDAH	5	RENDAH	13.5	TINGGI	18	TINGGI	3	RENDAH	4	RENDAH
Sukomoro	2	12	SEDANG	5	RENDAH	12	SEDANG	12	SEDANG	5	REBDAH	12	SEDANG
Nganjuk	2	18	TINGGI	5	RENDAH	13.5	TINGGI	8	SEDANG	3	RENDAH	18	TINGGI
Bagor	2	18	TINGGI	5	RENDAH	3	RENDAH	4	RENDAH	10	SEDANG	8	SEDANG
Wilangan	2	4	RENDAH	5	RENDAH	3	RENDAH	4	RENDAH	10	SEDANG	4	RENDAH
Rejoso	2	18	TINGGI	5	RENDAH	3	RENDAH	18.5	TINGGI	3	RENDAH	18	TINGGI
Ngluyu	2	4	RENDAH	5	RENDAH	3	RENDAH	18.5	TINGGI	3	RENDAH	8	SEDANG
Lengkong	2	4	RENDAH	5	RENDAH	3	RENDAH	18.5	TINGGI	3	RENDAH	8	SEDANG
Jatikalen	2	18	TINGGI	5	RENDAH	10	SEDANG	8	SEDANG	3	RENDAH	4	RENDAH

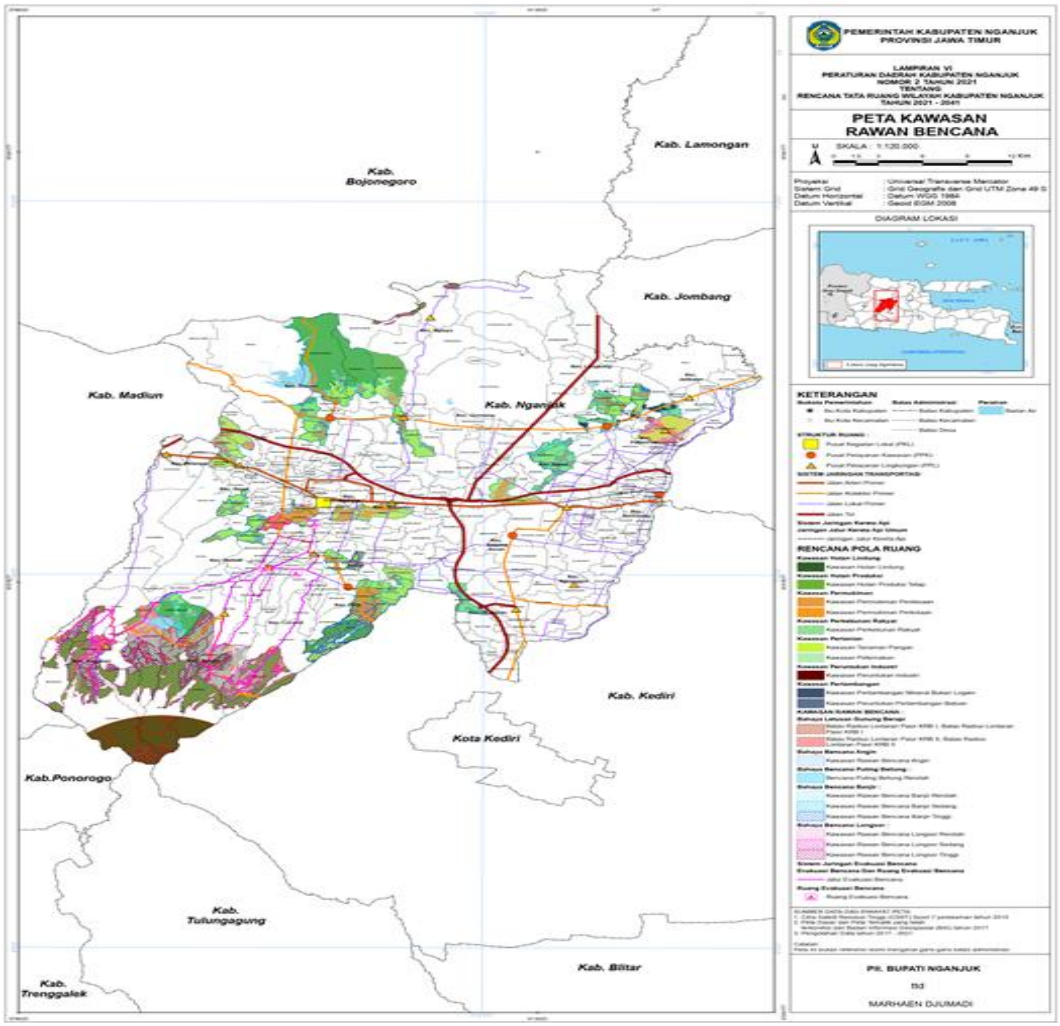
Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2023

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Kabupaten Nganjuk menyebutkan bahwa potensi ancaman risiko bencana di Kabupaten Nganjuk ada 6 yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran gedung dan pemukiman, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta cuaca ekstrem (sesuai tabel ancaman bencana di atas).

Potensi ancaman bencana yang diperkirakan atau kemungkinan terjadi sebagai berikut:

1) Bencana alam banjir bandang, bencana ini rutin setiap tahun terjadi akibat hujan lebat di hulu sungai pada Sungai Semantok, Sungai Kuncir, Sungai Widas, Sungai Kledungsuko, Sungai Bodor, Dan Sungai Konang yang menimbulkan erosi dasar dan tanggul sungai yang berdampak kerusakan tanggul, badan jalan, permukiman di daerah aliran sungai dan bangunan pengairan/ bangunan sungai lainnya
2) Bencana alam genangan banjir, bencana ini merupakan akibat dari meluapnya sungai akibat curah hujan merata di atas normal yang berlangsung lama, sehingga menggenangi permukiman dan areal persawahan yang berdampak banyaknya tanaman puso dan gagal panen.
3) Bencana alam angin kencang dan puting beliung, bencana ini terjadi pada awal musim penghujan dan akhir musim kemarau, yang rutin sebagai dampak angin turun gunung dan perubahan suhu yang mendadak sehingga terjadi peningkatan kecepatan angin. Bencana ini sering berdampak rumah permukiman roboh, pohon roboh dan gangguan penyakit akibat debu yang menyertainya.
4) Bencana alam kekeringan, bencana rutin di musim kemarau ini terjadi akibat ketidakseimbangan kawasan resapan air dengan kapasitas curah hujan yang secara umum cukup tinggi, sehingga di musim kemarau selalu kekurangan air irigasi sekitar 300 juta m^3 sementara kandungan air tanah kurang mendukung kebutuhan air bersih.

5) Bencana kebakaran hutan dan lahan, lokasi yang kerap terjadi yaitu di Kecamatan Berbek, Bagor, Rejoso, Wilangan, Ngetos, Sawahan, Lengkong dan Loceret. Untuk kebakaran rumah lebih cenderung terjadi di daerah padat penduduk seperti Kecamatan Wilangan, Nganjuk dan Tanjunganom yang disebabkan hubungan arus pendek listrik ataupun api kompor dapur



Gambar 2.10 Peta Kawasan Rawan Bencana
Sumber: Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021-2041

Klasifikasi bencana serta lokasi rawan bencana pada masing-masing jenis bencana berdasarkan dokumen Kajian risiko bencana (KRB) kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.27 Hasil Kajian Risiko Kabupaten Nganjuk

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
3	Kekeringan	Sedang	Rendah	Tinggi	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
5	Letusan Gunung Api	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
6	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
7	Epidemi Wabah Penyakit	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
10	Likuifaksi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025

Adapun rincian lokasi rawan bencana berdasarkan jenis risiko bencana disajikan pada tabel dibawah

Tabel 2.28 Risiko Bencana Tanah Longsor

KECAMATAN	Luas Risiko (ha)	Kelas Risiko
Bagor	3.065,67	Sedang
Baron	3.543,03	Sedang
Berbek	1.433,43	Sedang
Gondang	3.796,20	Sedang
Jatikalen	1.217,34	Sedang
Kertosono	2.466,18	Sedang
Lengkong	1.004,58	Sedang
Loceret	2.991,33	Sedang
Nganjuk	2.350,44	Sedang
Ngetos	141,66	Sedang
Ngluyu	0,00	-
Ngronggot	5.264,19	Sedang
Pace	3.772,80	Sedang
Patianrowo	2.674,17	Sedang
Prambon	4.441,23	Sedang
Rejoso	5.477,13	Sedang
Sawahan	0,00	-
Sukomoro	3.751,02	Sedang
Tanjunganom	7.486,74	Sedang
Wilangan	597,60	Sedang
Kabupaten Nganjuk	**55.474,74**	**Sedang**

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025

Tabel 2.29 Risiko Bencana Banjir

KECAMATAN	Luas Risiko (ha)	Kelas Risiko
Bagor	3.861,81	Sedang
Baron	4.074,57	Sedang
Berbek	1.785,24	Sedang
Gondang	7.136,28	Sedang
Jatikalen	2.263,23	Sedang
Kertosono	2.456,37	Sedang
Lengkong	3.307,86	Sedang
Loceret	2.950,02	Sedang
Nganjuk	2.304,90	Sedang
Ngetos	0,18	Rendah
Ngluyu	1.597,68	Sedang
Ngronggot	5.281,56	Sedang
Pace	3.776,58	Sedang
Patianrowo	3.538,44	Sedang
Prambon	4.452,75	Sedang
Rejoso	7.957,80	Sedang
Sawahan	0,00	-
Sukomoro	3.576,24	Sedang
Tanjunganom	7.654,86	Sedang
Wilangan	1.766,97	Sedang
Kabupaten Nganjuk	**69.743,34**	**Sedang**

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025

Tabel 2.30 Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

KECAMATAN	Luas Risiko (ha)	Kelas Risiko
Bagor	4.478,67	Sedang
Baron	2.850,84	Sedang
Berbek	4.853,97	Sedang
Gondang	10.463,49	Sedang
Jatikalen	4.403,88	Sedang
Kertosono	1.539,99	Sedang
Lengkong	4.877,37	Tinggi
Loceret	5.663,79	Sedang
Nganjuk	1.286,28	Sedang
Ngetos	7.274,70	Sedang
Ngluyu	8.679,06	Sedang
Ngronggot	3.418,11	Sedang
Pace	3.941,01	Sedang
Patianrowo	2.724,30	Sedang
Prambon	3.078,36	Sedang
Rejoso	14.568,66	Sedang
Sawahan	10.399,14	Sedang
Sukomoro	2.940,30	Sedang
Tanjunganom	5.129,46	Sedang
Wilangan	4.618,35	Sedang
Kabupaten Nganjuk	**107.189,73**	**Tinggi**

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025

Tabel 2.31 Risiko Bencana Cuaca Ekestrem

KECAMATAN	Luas Risiko (ha)	Kelas Risiko
Bagor	5.430,24	Sedang
Baron	4.004,19	Sedang
Berbek	5.747,40	Sedang
Gondang	11.420,19	Sedang
Jatikalen	4.757,31	Sedang
Kertosono	2.469,51	Sedang
Lengkong	7.149,51	Sedang
Loceret	6.512,49	Sedang
Nganjuk	2.350,17	Sedang
Ngetos	4.274,55	Sedang
Ngluyu	8.878,86	Sedang
Ngronggot	5.267,34	Sedang
Pace	5.079,87	Sedang
Patianrowo	3.491,19	Sedang
Prambon	4.448,25	Sedang
Rejoso	15.602,04	Sedang
Sawahan	7.409,61	Sedang
Sukomoro	3.751,29	Sedang
Tanjunganom	7.543,08	Sedang
Wilangan	5.046,93	Sedang
Kabupaten Nganjuk	**120.634,02**	**Sedang**

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025

Tabel 2.32 Risiko Bencana Kekeringan

KECAMATAN	Luas Risiko (ha)	Kelas Risiko
Bagor	5.529,33	Sedang
Baron	4.076,64	Sedang
Berbek	5.856,21	Sedang
Gondang	11.622,78	Sedang
Jatikalen	4.865,76	Sedang
Kertosono	2.512,80	Sedang
Lengkong	7.289,28	Sedang
Loceret	6.974,37	Sedang
Nganjuk	2.391,48	Sedang
Ngetos	7.973,55	Sedang
Ngluyu	9.079,11	Sedang
Ngronggot	5.368,77	Sedang
Pace	5.171,04	Sedang
Patianrowo	3.555,72	Sedang
Prambon	4.530,60	Sedang
Rejoso	15.894,81	Sedang
Sawahan	11.256,84	Sedang
Sukomoro	3.820,23	Sedang
Tanjunganom	7.681,50	Sedang
Wilangan	5.156,10	Sedang
Kabupaten Nganjuk	**130.606,92**	**Sedang**

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025

Tabel 2.33 Risiko Bencana Kegagalan Teknologi

KECAMATAN	Luas Risiko (Ha)	Kelas Risiko
Bagor	5.427,09	Sedang
Baron	3.994,92	Sedang
Berbek	5.715,99	Sedang
Gondang	11.414,52	Sedang
Jatikalen	4.754,16	Sedang
Kertosono	2.466,90	Sedang
Lengkong	7.107,21	Sedang
Loceret	6.844,23	Sedang
Nganjuk	2.348,73	Sedang
Ngetos	7.825,32	Sedang
Ngluyu	8.877,24	Sedang
Ngronggot	5.260,68	Sedang
Pace	5.075,55	Sedang
Patianrowo	3.485,07	Sedang
Prambon	4.446,54	Sedang
Rejoso	15.601,32	Sedang
Sawahan	11.025,99	Sedang
Sukomoro	3.747,78	Sedang
Tanjunganom	7.529,13	Sedang
Wilangan	5.046,48	Sedang
Kabupaten Nganjuk	**127.994,85**	**Sedang**

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025

Tabel 2.34 Risiko Bencana Gempa Bumi

KECAMATAN	Luas Risiko (ha)	Kelas Risiko
Bagor	5.429,97	Sedang
Baron	3.997,89	Sedang
Berbek	5.746,68	Sedang
Gondang	11.419,74	Sedang
Jatikalen	4.756,95	Sedang
Kertosono	2.463,03	Sedang
Lengkong	7.149,96	Sedang
Loceret	6.844,86	Sedang
Nganjuk	2.346,30	Sedang
Ngetos	7.829,10	Rendah
Ngluyu	8.877,06	Rendah
Ngronggot	5.261,49	Sedang
Pace	5.077,26	Sedang
Patianrowo	3.489,84	Sedang
Prambon	4.446,72	Sedang
Rejoso	15.601,32	Sedang
Sawahan	11.034,09	Rendah
Sukomoro	3.742,92	Sedang
Tanjunganom	7.526,88	Sedang
Wilangan	5.044,77	Sedang
Kabupaten Nganjuk	**128.086,83**	**Sedang**

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025

Tabel 2.35 Risiko Bencana Likuifaksi

KECAMATAN	Luas Risiko (ha)	Kelas Risiko
Bagor	3.065,67	Sedang
Baron	3.543,03	Sedang
Berbek	1.433,43	Sedang
Gondang	3.796,20	Sedang
Jatikalen	1.217,34	Sedang
Kertosono	2.466,18	Sedang
Lengkong	1.004,58	Sedang
Loceret	2.991,33	Sedang
Nganjuk	2.350,44	Sedang
Ngetos	141,66	Sedang
Ngluyu	0,00	-
Ngronggot	5.264,19	Sedang
Pace	3.772,80	Sedang
Patianrowo	2.674,17	Sedang
Prambon	4.441,23	Sedang
Rejoso	5.477,13	Sedang
Sawahan	0,00	-
Sukomoro	3.751,02	Sedang
Tanjunganom	7.486,74	Sedang
Wilangan	597,60	Sedang
Kabupaten Nganjuk	**55.474,74**	**Sedang**

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025

Tabel 2.36 Risiko Bencana Wabah Penyakit

KECAMATAN	Luas Risiko (Ha)	Kelas Risiko
Bagor	102,42	Rendah
Baron	291,42	Rendah
Berbek	303,93	Rendah
Gondang	232,11	Rendah
Jatikalen	423,90	Rendah
Kertosono	100,53	Rendah
Lengkong	188,55	Rendah
Loceret	95,58	Rendah
Nganjuk	222,39	Rendah
Ngetos	884,34	Rendah
Ngluyu	867,96	Rendah
Ngronggot	582,75	Rendah
Pace	185,94	Rendah
Patianrowo	616,68	Rendah
Prambon	171,45	Rendah
Rejoso	170,64	Rendah
Sawahan	205,83	Rendah
Sukomoro	299,52	Rendah
Tanjunganom	880,56	Rendah
Wilangan	628,02	Rendah
Kabupaten Nganjuk	**7.454,52**	**Rendah**

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025

Tabel 2.37 Risiko Bencana Letusan Gunung Api

KECAMATAN	Luas Risiko (ha)	Kelas Risiko
Bagor	0,00	-
Baron	0,00	-
Berbek	0,00	-
Gondang	0,00	-
Jatikalen	0,00	-
Kertosono	0,00	-
Lengkong	0,00	-
Loceret	0,00	-
Nganjuk	0,00	-
Ngetos	1.182,78	Rendah
Ngluyu	0,00	-
Ngronggot	0,00	-
Pace	0,00	-
Patianrowo	0,00	-
Prambon	0,00	-
Rejoso	0,00	-
Sawahan	1.124,10	Rendah
Sukomoro	0,00	-
Tanjunganom	0,00	-
Wilangan	0,00	-
Kabupaten Nganjuk	**2.306,88**	**Rendah**

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai langkah Pengurangan Risiko Bencana adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Aspek Regulasi dalam Penanggulangan Bencana Rekomendasi yang dapat diterapkan di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:
   a) Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian tata ruang
   b) Memperkuat peraturan daerah mengenai tata ruang yang berfokus pada pengurangan risiko bencana serta aspek kelembagaan dan sistem penanggulangan bencana di daerah.
   c) Memperkuat peraturan daerah dan peraturan turunan seperti peraturan bupati yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

d) Memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh potensi dari pentahelix stakeholder, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
e) Memperkuat peraturan terkait penyebaran informasi kebencanaan untuk memastikan validitas informasi tersebut.
f) Meningkatkan perbaikan, implementasi, serta monitoring regulasi terkait kebencanaan yang lebih rinci dan dapat diterapkan.
g) Memberikan insentif dan disinsentif dalam upaya penyelamatan, perlindungan, dan pengawasan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

2. Integrasi Kebijakan Penanggulan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan

   Dorongan untuk mengintegrasikan kajian risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan harus terus dilakukan melalui kebijakan strategis dan penyusunan berbagai dokumen perencanaan penanggulangan bencana, seperti:
   a) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB),
   b) Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB),
   c) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kebencanaan,
   d) Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk semua jenis bencana.

3. Peningkatan jumlah dan mutu infrastruktur darurat (Emergency Infrastructure)

   Adapun konsep penyediaan penampungan darurat dalam menghadapi bencana dapat dijabarkan sebagai berikut:
   a. Penyediaan air bersih secara mandiri melalui inisiatifmasya rakat (PAM-BM).

b. Melakukan pemasangan sambungan rumah (SR) air minum dengan memperluas jaringan PDAM.
c. Pengadaan sistem pembuangan sanitasi lingkungan komunal atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) skala kecil.
d. Mengembangkan fasilitas dan meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni.

4. Penguatan Kerja Sama Multistakeholder dalam Penanggulangan dan Penelitian Bencana

   Adapun beberapa rekomendasi untuk peningkatan kemitraan ini adalah sebagai berikut:

   a) Memperkokoh lembaga, SDM, jaringan, agenda, pendanaan, dan elemen lainnya untuk menciptakan ekosistem inovasi yang kokoh dan berkesinambungan dalam riset dan pengembangan terkait kebencanaan.
   b) Memperluas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
   c) Meningkatkan lingkungan investasi dan memperluas skema pendanaan untuk kebencanaan.

5. Penerapan Mitigasi Struktural

   Mitigasi struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana melalui pembangunan infrastruktur fisik yang menggunakan teknologi. Rekomendasi dalam penerapan mitigasi struktural yang dapat dilakukan:

   a) Pengadaan mitigasi struktural seperti Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota.
   b) Penerapan pendekatan 3R (rewetting, revegatasi, dan revitalisasi) pada mata pencaharian penduduk.
   c) Pengimplementasian Vetiver Grass Tech (Penanaman Vetiver) sebagai bentuk konservasi tanah dan air dengan pendekatan bioengineering metode vegetatif.

d) Pemantauan berkala hulu sungai.

6. Integrasi Sosialisasi dan Edukasi Sebagai Bentuk Upaya Peningkatan Kapasitas/Tata Kelola Sumber Daya Manusia

   Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini antara lain meliputi :

   a) Pengadaan edukasi dengan pengintegrasian inovasi.
   b) Perluasan informasi panduan penyelamatan diri secara digital.
   c) Perluasan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan pemahaman dari masyarakat mengenai pentingnya jenis ancaman seluruh bencana yang terdapat di Kabupaten Nganjuk Penyusunan Panduan SOP/Prosedur Cara Penyelamatan Diri yang efektif untuk seuruh jenis bencana.
   d) Penyelenggaraan sosialisasi/edukasi terkait bangunan tahan bencana.
   e) Penyederhanaan penyampaian tentang kebencanaan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.

7. Peningkatan Jaminan Hidup Pasca Bencana

   Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

   a) Pemberian Bantuan Materi Maupun Non Materi Kepada Masyarakat Terdampak Secara Merata.
   b) Pemberian Bantuan Modal Bagi Masyarakat yang terkena dampak paling parah.
   c) Peningkatan Koordinasi Dan Pelibatan Masyarakat Dalam Pendistribusian Bantuan.

8. Peningkatan Mutu Sistem Layanan Kesehatan

   Beberapa upaya untuk meningkatkan mutu sistem layanan kesehatan adalah sebagai berikut:

   a) Pengintegrasian Rasio Jumlah Rumah Sakit terhadap Proyeksi Jumlah Penduduk.

b) Penambahan kuantitas Rumah Sakit Lapangan sesuai standar SNI.
c) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pendirian Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Lapangan Dengan Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perlengkapan Kesehatan.
d) Peningkatan Infrastruktur Digital Pelayanan Kesehatan (Health Information System) Berbasis Digital.

9. Penyusunan Rencana Evakuasi dan Mekanisme Pengungsian

Beberapa rekomendasi terkait rencana evakuasi dan mekanisme pengungsian adalah sebagai berikut:

a) Melakukan survey dan pemetaan lokasi yang cukup luas untuk penampungan arus penyintas dan kendaraan pengangkutnya.
b) Pemanfaatan participatory mapping. untuk penentuan
c) kesepakatan tempat dan jalur evakuasi yang diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana.
d) Penambahan signage untuk tempat dan jalur evakuasi.
e) Pemerintah memfasilitasi kebutuhan tempat posko siaga berupa bangunan, Gedung permanen milik pemerintah yang telah ada, yang memenuhi kriteria penjagaan lingkungan bencana.
f) Pengadaan Unit Ruang Pengungsian Komunal Sebagai Karantina Darurat Dengan Sistem Portable Melalui Program CSR.

10. Peningkatan Pengetahuan Informasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini Bencana

Langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk menjalankan strategi ini adalah:

a) Pengoptimalan implementasi emergency system / Early warning system dengan menyediakan stimulan uji coba EWS kepada masyarakat.

b) Penguatan diseminasi peringatan dan kemampuan kebencanaan ke masyarakat.
c) Penyusunan Modul Pelatihan Fasilitator Desa/Kelurahan tangguh Bencana.
d) Peningkatan pengawasan pengendalian tata ruang.
e) Pembuatan website sistem informasi peringatan atau validitas kejadian bencana yang terintegrasi dengan teknologi yang tepat guna.

11. Penyusunan Kajian Kerugian akibat dari Dampak Kerusakan Bencana

Penyusunan kajian kerugian dapat meminimalisir kerugian bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Strategi ini berkaitan dengan keuangan. Dua aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan Kajian Prediksi Kerugian Akibat Bencana.
b) Peningkatan iklim investasi dan skema pembiayaan (anggaran) untuk kerugian kebencanaan

3. Penurunan Emisi GRK

Upaya pengurangan GRK di Kabupaten Nganjuk selama periode 2011 hingga 2024 menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan melaksanakan aksi konkret dan melibatkan masyarakat secara aktif, Kabupaten Nganjuk tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Keberhasilan ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Selain itu, menciptakan kawasan yang memiliki tingkat keanekaan dan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik akan bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak

pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Nganjuk didukung dengan pelaksanaan kegiatan OPD terkait yang memberi kontribusi pada pengurangan gas rumah kaca. Kegiatan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.38 Capaian Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sampai Dengan Tahun 2024

Sektor	Sub Sektor	Jumlah Aksi Kegiatan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2Eq)
Energi	Energi	24	1.799,04
	Transportasi	66	37.986,80
Pengelolaan Limbah	Air Limbah	101	805,38
	Persampahan	436	41.849.94
Lahan	Pertanian	61	88.228,13
	Kehutanan	43	92.934,96
TOTAL		**731**	**263.561,09**

Sumber: https://pprk.bappenas.go.id/aksara

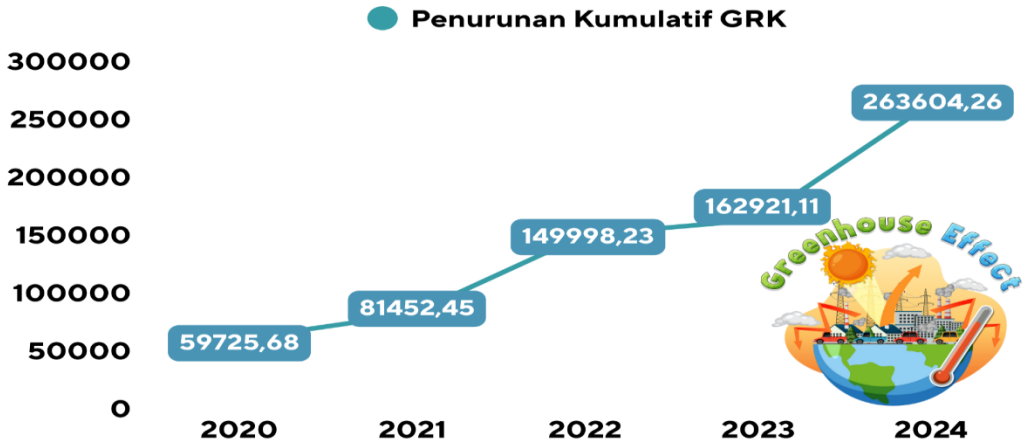
Adapun kontribusi penurunan emisi GRK untuk masing-masing sub bidang aksi kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.39 Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kab. Nganjuk

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Energi	421,87	601,43	854,97	1.035,28	1.799,04
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Transportasi	14.316,99	16.375,22	36.446,77	37.399,75	37.986,79
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Air Limbah	378,96	499,42	583,01	690,51	805,38
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Persampahan	0,00	17.992,49	23.971,16	35.297,02	41.849,94
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Pertanian	44.955,36	45949,76	87.833,46	88.175,10	88.228,13
Kontribusi penurunan emisi GRK Sub Bidang Kehutanan	0	0	308,86	323,44	92.934,96

Sumber: https://pprk.bappenas.go.id/aksara

Tabel di atas merupakan hasil pelaporan kegiatan yang berkontribusi pada pengurangan GRK pada aplikasi aksara mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 . Kontribusi penurunan gas rumah kaca yang dihasilkan dari aksi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk dan disajikan pada grafik



Gambar 2.11 Grafik Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Sumber: Dinas LH, 2024

G. Demografi

Penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebesar 1.148.611 jiwa, dengan perincian 577.609 jiwa penduduk laki – laki dan 571.002 jiwa penduduk perempuan. Dalam lima tahun terakhir ini, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk bertambah terus, dari 1.103.902 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.148.611 pada tahun 2024, yang berarti pertumbuhan Penduduk selama 5 tahun rata-rata sebesar 1 persen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.40 Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahan	38,670	39,586	39,604	39,705	40,072
Ngetos	37,574	38,909	39,123	39,200	39,665
Berbek	58,955	60,668	60,767	60,131	60,668
Loceret	75,315	77,218	77,420	77,914	78,396
Pace	65,706	68,049	68,120	68,435	68,896
Tanjunganom	117,014	120,184	120,228	120,687	121,513
Prambon	72,788	74,202	74,381	74,725	75,461
Ngronggot	83,038	85,870	85,975	86,066	86,810
Kertosono	56,182	56,795	56,641	56,925	57,176
Patianrowo	44,370	45,744	45,650	45,902	46,204
Baron	54,068	55,392	55,540	56,024	56,460
Gondang	55,026	56,414	56,606	57,155	57,651
Sukomoro	45,988	47,612	47,773	48,204	48,580
Nganjuk	69,011	69,867	69,667	70,283	71,067
Bagor	61,181	63,073	63,052	63,497	63,867
Wilangan	30,222	31,202	31,200	31,331	31,592
Rejoso	71,347	73,462	73,451	73,668	74,266
Ngluyu	14,160	14,399	14,421	14,480	14,518
Lengkong	32,998	33,903	33,956	34,139	34,507
Jatikalen	20,289	21,007	21,042	21,146	21,242
Jumlah	**1,103,902**	**1,133,556**	**1,134,617**	**1,139,617**	**1,148,611**

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berturut-turut adalah Kecamatan Nganjuk, Kertosono, dan Prambon. Sedangkan 3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah berturut-turut adalah Ngluyu, Sawahan, dan Lengkong. Data kepadatan penduduk per Kecamatan dapat dilihat di berikut ini:

Tabel 2.41 Kepadatan Penduduk per Kecamatan

Kecamatan	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa/km2)		
	2022	2023	2024
Sawahan	355.31	357.92	359.55
Ngetos	498.64	502.33	505.58
Berbek	1056.54	1052.71	1054.76
Loceret	1127.23	1137.72	1141.44
Pace	1333.75	1345.69	1348.94
Tanjunganom	1590.86	1602.5	1607.83
Prambon	1654.21	1669.11	1678.25
Ngronggot	1623.34	1634.29	1639.01
Kertosono	2283.38	2300.31	2304.99
Patianrowo	1298.61	1309.7	1314.37
Baron	1386.29	1404.26	1409.25
Gondang	495.53	503.24	504.65
Sukomoro	1271.93	1289.24	1293.5
Nganjuk	2964.72	3005.57	3024.17
Bagor	1159.5	1171.64	1174.53
Wilangan	606.22	612.24	613.84
Rejoso	468.1	471.03	473.3
Ngluyu	160.55	161.21	161.64
Lengkong	471.49	477.18	479.09
Jatikalen	435.57	438.88	439.75
Jumlah	**880.3**	**887.98**	**891.15**

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2025

Dilihat dari data sebaran penduduk di 20 Kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Nganjuk (3.024,17), Kertosono (2.304,99), dan Prambon (1.678,25), sedangkan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Ngluyu (161,64), Sawahan (359,55) dan Lengkong (479,09). Laju pertumbuhan penduduk di setiap Kecamatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahan	0.71	1.74	0.05	0.26	0.74
Ngetos	0.97	2.5	0.55	0.2	1.11
Berbek	0.93	0.34	0.16	-1.05	0.09
Loceret	0.89	0.54	0.26	0.64	0.52
Pace	1.09	0.61	0.1	0.46	0.46
Tanjunganom	0.75	0.57	0.04	0.38	0.42
Prambon	0.61	0.93	0.24	0.46	0.66
Ngronggot	1.01	1.9	0.12	0.11	0.75
Kertosono	0.7	-0.28	-0.27	0.5	0.1
Patianrowo	0.82	-0.02	-0.21	0.55	0.25
Baron	1.18	0.62	0.27	0.87	0.63
Gondang	0.96	0.27	0.34	0.97	0.61
Sukomoro	1.02	-0.31	0.34	0.9	0.43
Nganjuk	0.46	-0.59	-0.29	0.88	0.28
Bagor	0.75	-0.5	-0.03	0.71	0.19
Wilangan	1.17	0.96	-0.01	0.42	0.55
Rejoso	0.76	0.49	-0.01	0.3	0.4
Ngluyu	0.34	0.8	0.15	0.41	0.41
Lengkong	0.56	-0.36	0.16	0.54	0.35
Jatikalen	0.43	-0.65	0.17	0.49	0.12
Jumlah	**0.82**	**0.5**	**0.09**	**0.44**	**0.45**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk pada tahun mendatang. Dalam proyeksi penduduk ini dibutuhkan data per satu tahun dan akan mendapatkan hasil hingga tahun 2029. Perhitungan proyeksi penduduk di Kabupaten Nganjuk menggunakan metode geometrik. Berikut merupakan hasil perhitungan proyeksi penduduk berdasarkan kecamatan Kabupaten Nganjuk hingga tahun 2029.

Tabel 2.43 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Nganjuk 2025-2029

Kecamatan	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Sawahan	41391	42204	43032	43877	44739
Ngetos	40417	41210	42019	42844	43686
Berbek	63368	64612	65881	67174	68493
Loceret	80892	82480	84100	85751	87434
Pace	70832	72223	73641	75086	76561
Tanjunganom	125329	127789	130298	132856	135465
Prambon	77748	79274	80831	82418	84036
Ngronggot	89392	91147	92936	94761	96621
Kertosono	60118	61298	62502	63729	64980
Patianrowo	47589	48524	49476	50448	51438
Baron	58396	59542	60711	61903	63118
Gondang	59174	60335	61520	62728	63959
Sukomoro	49510	50482	51473	52484	53514
Nganjuk	73507	74950	76421	77922	79451
Bagor	65537	66824	68136	69473	70837
Wilangan	32632	33272	33926	34592	35271
Rejoso	76430	77931	79461	81021	82611
Ngluyu	15048	15343	15644	15951	16264
Lengkong	35214	35905	36610	37329	38062
Jatikalen	21599	22023	22455	22896	23345

Sumber: Hasil Perhitungan, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk pada 2025 diproyeksikan sebesar 1,138 juta orang, menjadi sebanyak 1,169 juta orang pada tahun 2030. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2025-2030 sebesar 0,5 persen setiap tahunnya.

Tabel 2.44 Proyeksi Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030

Klp Umur (Thn)	Proyeksi Penduduk Laki-laki Kabupaten Nganjuk Menurut Kelompok Umur (Ribu Jiwa)						Proyeksi Penduduk Perempuan Kabupaten Nganjuk Menurut Kelompok Umur (Ribu Jiwa)						TOTAL (Ribu Jiwa)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	39.67	39.42	39.21	39.21	38.85	38.7	38.08	37.85	37.64	37.45	37.29	37.14	77.75	77.27	76.85	76.66	76.14	**75.84**
5-9	38.83	38.93	39.06	39.25	39.48	39.68	36.93	37.14	37.44	37.8	38.13	38.2	75.76	76.07	76.5	77.05	77.61	**77.88**
10-14	40.79	40.5	40.15	39.75	39.31	38.92	39.21	38.89	38.42	37.86	37.35	37.16	80	79.39	78.57	77.61	76.66	**76.08**
15-19	41.49	41.5	41.4	41.21	40.97	40.72	39.49	39.55	39.56	39.51	39.39	39.19	80.98	81.05	80.96	80.72	80.36	**79.91**
20-24	40.43	40.44	40.63	40.93	41.2	41.36	38.84	38.8	38.9	39.09	39.29	39.42	79.27	79.24	79.53	80.02	80.49	**80.78**
25-29	42.03	41.85	41.46	40.96	40.54	40.31	39.77	39.78	39.55	39.18	38.83	38.63	81.8	81.63	81.01	80.14	79.37	**78.94**
30-34	40.56	40.69	40.99	41.37	41.66	41.75	37.65	37.75	38.15	38.72	39.23	39.53	78.21	78.44	79.14	80.09	80.89	**81.28**
35-39	42.06	41.6	41.13	40.71	40.43	40.33	40.37	39.8	39.12	38.44	37.92	37.68	82.43	81.4	80.25	79.15	78.35	**78.01**
40-44	43.51	43.31	43.03	42.68	42.28	41.85	41.67	41.5	41.3	41.06	40.74	40.31	85.18	84.81	84.33	83.74	83.02	**82.16**
45-49	42.54	42.83	42.99	43.04	43	42.89	41.56	41.68	41.69	41.61	41.48	41.32	84.1	84.51	84.68	84.65	84.48	**84.21**
50-54	38.83	39.37	39.97	40.56	41.08	41.49	39.17	39.54	39.94	40.35	40.69	40.93	78	78.91	79.91	80.91	81.77	**82.42**
55-59	35.15	35.58	36	36.42	36.87	37.36	36.6	36.96	37.28	37.59	37.91	38.24	71.75	72.54	73.28	74.01	74.78	**75.6**
60-64	30.44	31.05	31.57	32.03	32.47	32.9	32.53	33.3	33.91	34.38	34.79	35.19	62.97	64.35	65.48	66.41	67.26	**68.09**
65-69	23.48	24.31	25.12	25.9	26.61	27.25	24.9	26.05	27.26	28.46	29.54	30.47	48.38	50.36	52.38	54.36	56.15	**57.72**
70-74	15.9	16.61	17.35	18.11	18.86	19.6	17.77	18.54	19.36	20.22	21.16	22.15	33.67	35.15	36.71	38.33	40.02	**41.75**
75+	16.15	16.91	17.7	18.53	19.41	20.35	22.23	23.17	24.19	25.28	26.45	27.72	38.38	40.08	41.89	43.81	45.86	**48.07**
Total	**571.85**	**574.88**	**577.75**	**580.47**	**583.02**	**585.42**	**566.76**	**570.28**	**573.69**	**576.99**	**580.19**	**583.27**	**1138.61**	**1145.16**	**1151.44**	**1157.46**	**1163.21**	**1168.69**

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kebijakan otonomi daerah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah demi tujuan otonomi daerah, yaitu meliputi:

(i) peningkatan kesejahteraan masyarakat;
(ii) peningkatan pelayanan umum (*public service*); dan
(iii) peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab itu, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, baik urusan yang bersifat wajib maupun urusan pilihan. Pemerintah daerah memiliki *local discretion* (keleluasaan bertindak) yang lebih besar untuk menyusun kebijakan daerah guna memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan memberdayakan masyarakat agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat diwujudkan.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di daerah dapat diukur antara lain dengan dua indikator penting, yaitu:

(i) Indikator Makro Ekonomi Regional, yang antara lain meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun tertentu, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat perkembangan harga (inflasi), tingkat pendapatan per kapita (PDRB per Kapita), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan dan lain sebagainya;
(ii) Indikator Makro Sosial Regional, antara lain berupa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development* Index (HDI), tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, dan kemampuan daya beli masyarakat.

Secara makro ekonomi, indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari:

1. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam waktu satu tahun. Apabila ditinjau dari segi pendapatan, merupakan jumlah dari semua pendapatan yang timbul karena ikut sertanya faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 36.270,56 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 21.614,91 miliar.

Tabel 2.45 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

Kategori PDRB	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7767.69	7950.25	8422.27	9189.53	9761.2
B. Pertambangan dan Penggalian	509.71	533.88	575.58	632.5	663.9
C. Industri Pengolahan	3783.71	4188.85	4897.91	5368.78	5916.48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13.02	13.78	15.02	16.57	17.55
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.96	32.39	35.51	37.37	39.26
F. Konstruksi	2742.97	2870.14	3274.8	3526.93	3822.46
G. Perdagagan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5206.09	5636.35	6235.16	6840.49	7292.81
H. Transportasi dan Pergudangan	407.62	450.61	552.98	682.5	773.76
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	496.89	540.96	596.76	677.08	744.1
J. Informasi dan Komunikasi	1254.05	1334.42	1426.8	1544.36	1696.73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	590.47	614.31	665.21	711.85	769.38
L. Real Estate	461.04	473.51	505.35	527.27	545.5
M,N. Jasa Perusahaan	86.17	88.81	95.03	106.44	116.73
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1371.09	1374.86	1427.87	1476.93	1613.7
P. Jasa Pendidikan	1043.12	1050.94	1075.41	1161.25	1229.19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	181.5	195.22	210.3	228.27	241.4
R,S,T,U. Jasa Lainnya	656.05	704.04	807.78	918.82	1026.41
PDRB	26601.16	28053.33	30819.75	33646.95	36270.56

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Tabel 2.46 Persentase PDRB Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Berlaku 2020-2024 dalam (%)

Kategori PDRB	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.2	28.34	27.33	27.31	26.91
B. Pertambangan dan Penggalian	1.92	1.9	1.87	1.88	1.83
C. Industri Pengolahan	14.22	14.93	15.89	15.96	16.31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11
F. Konstruksi	10.31	10.23	10.63	10.48	10.54
G. Perdagagan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.57	20.09	20.23	20.33	20.11
H. Transportasi dan Pergudangan	1.53	1.61	1.79	2.03	2.13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.87	1.93	1.94	2.01	2.05
J. Informasi dan Komunikasi	4.71	4.76	4.63	4.59	4.68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.22	2.19	2.16	2.12	2.12
L. Real Estate	1.73	1.69	1.64	1.57	1.5
M,N. Jasa Perusahaan	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.15	4.9	4.63	4.39	4.45
P. Jasa Pendidikan	3.92	3.75	3.49	3.45	3.39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.68	0.7	0.68	0.68	0.67
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.47	2.51	2.62	2.73	2.83
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2024

Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,91 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,11 persen, Industri pengolahan sebesar 16,31 persen, Konstruksi sebesar 10,54 persen, serta Informasi Dan Komunikasi sebesar 4,68 persen. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk mencapai 78,55 persen.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2027-2019 menunjukkan adanya kenaikan setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah berkembang

semakin membaik. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan yang minus pada tahun 2020 dikarenakan situasi pandemi Covid-19-19 yang melanda secara global dan berdampak langsung pada sektor-sektor riil ekonomi produktif. Pada tahun 2024 berdasarkan proyeksi BPS, perekonomian secara umum mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2023.

Tabel 2.47 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Menurut Harga Konstan 2020-2024 (juta Rp)

Kategori PDRB	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5031.96	5115.75	5090.06	5326.24	5410.04
B. Pertambangan dan Penggalian	324.51	330.48	348.62	370.53	387.21
C. Industri Pengolahan	2575.94	2731.33	3050.73	3209.25	3423.41
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9.26	9.54	10.25	11.12	11.67
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.81	23.2	24.66	25.55	26.49
F. Konstruksi	1764.06	1816.23	1954.9	2069.21	2207.35
G. Perdagagan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3606.88	3799.33	3999.52	4230.39	4437.79
H. Transportasi dan Pergudangan	276.17	303.22	351.15	393.85	438.14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	343.73	360.52	386.82	421.05	454.1
J. Informasi dan Komunikasi	1071.74	1138.12	1200.32	1284.07	1376.6
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	427.5	429.85	442.57	459.45	480.73
L. Real Estate	334.46	340.9	359.49	370.76	380.52
M,N. Jasa Perusahaan	60.34	61.56	63.6	69.3	74.37
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	847.81	852.75	865.16	864.07	918.7
P. Jasa Pendidikan	685.04	689.42	695.32	735.23	772.32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127.38	134.58	140.62	147.14	155.47
R,S,T,U. Jasa Lainnya	481.78	503.88	559.41	611.35	660.01
PDRB	**17990.36**	**18640.68**	**19543.18**	**20598.57**	**21614.91**

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2024

Dari PDRB pendekatan pengeluaran, struktur ekonomi tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 73,01 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 28,67 persen, terbesar ketiga adalah Pengeluaran Pemerintah sebesar 6,62 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Inventori masing-masing sebesar 1,64 persen. Sedangkan yang harus menjadi perhatian adalah net eksport terhadap import daerah -11,58 persen.

Tabel 2.48 PDRB ADHB Pengeluaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

JENIS PENGELUARAN	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18618.41	19526.86	22345.72	24570.81	26481.86
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	404.35	420.93	462.3	521.28	594.95
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2317.31	2346.59	2205.35	2335.92	2402.75
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7604.12	7960.18	8894.07	9622.88	10397.06
Perubahan Inventori	276.24	522.98	567.94	570.56	595.28
Net Ekspor Barang dan Jasa	-2619.28	-2724.21	-3655.62	-3974.5	-4201.33
PDRB	26601.16	28053.33	30819.75	33646.95	36270.56

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

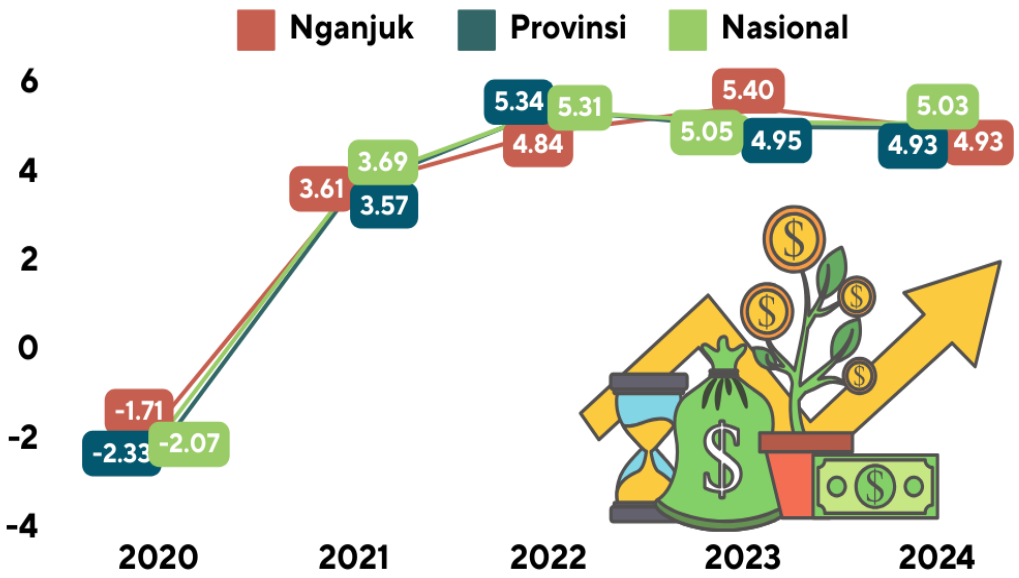
Tabel 2.49 PDRB ADHK Pengeluaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

JENIS PENGELUARAN	PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13050.87	13452.77	14427.75	15132.1	15906.82
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	251.62	257.23	276.17	309.25	348.24
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1440.34	1448.51	1452.59	1497.19	1568.94
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5006.94	5094.52	5372.96	5642.4	5966.38
Perubahan Inventori	161.41	294.41	305.21	292.52	291.48
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1920.81	-1906.75	-2291.51	-2274.89	-2466.96
PDRB	17990.36	18640.68	19543.18	20598.57	21614.91

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nganjuk dihitung dari perkembangan PDRB menurut harga konstan. Ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 11,25 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 7,96 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 7,85 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 7,32 persen, dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,21 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 7 persen.



Gambar 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Nganjuk Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Nganjuk, 2024

Tabel 2.50 Pertumbuhan Per sektor PDRB

Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.57	1.67	-0.5	4.64	1.57
B. Pertambangan dan Penggalian	-6.51	1.84	5.49	6.29	4.5
C. Industri Pengolahan	-1.43	6.03	11.69	5.2	6.67
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-1.24	3.02	7.41	8.58	4.86
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.25	6.38	6.27	3.64	3.68
F. Konstruksi	-6.03	2.96	7.63	5.85	6.68
G. Perdagagan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4.73	5.34	5.27	5.77	4.9
H. Transportasi dan Pergudangan	-6.41	9.8	15.81	12.16	11.25
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7.2	4.88	7.29	8.85	7.85
J. Informasi dan Komunikasi	7.61	6.19	5.47	6.98	7.21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-0.95	0.55	2.96	3.81	4.63
L. Real Estate	2.49	1.93	5.45	3.13	2.63
M,N. Jasa Perusahaan	-6.64	2.02	3.3	8.96	7.32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1.86	0.58	1.46	-0.13	6.32
P. Jasa Pendidikan	1.36	0.64	0.86	5.74	5.04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.08	5.65	4.48	4.64	5.66
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-13.45	4.59	11.02	9.28	7.96
PDRB	-1.71	3.61	4.84	5.4	4.93

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

Dengan melihat tren dan korelasi dari perekonomian, pertumbuhan ekonomi hampir diseluruh wilayah Indonesia mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, faktor eksternal terkait sentimen ketidakpastian ekonomi global dan konflik antar negara yang terjadi turut mempengaruhi perdagangan internasional dari sisi domestic turunnya permintaan,daya beli dan deflasi menjadi fokus strategi kebijakan fundamental ekonomi yang harus menjadi perhatian.

3. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh

seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Nganjuk atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 24.134 ribu rupiah. Secara nominal, angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 32.047 ribu rupiah.

Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Selanjutnya jika dilihat secara riil atau atas harga konstan, PDRB per kapita Kabupaten Nganjuk selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020 PDRB per kapita atas dasar harga konstan sebesar 16.322 ribu rupiah, kemudian meningkat dari tahun ke tahun hingga sebesar 19.028 ribu rupiah pada tahun 2024.

Tabel 2.51 PDRB per Kapita Kabupaten Nganjuk 2020-2024

Nilai PDRB/GRDP (milliar rupiah/*billion rupiahs*)					
Tahun/*year*	2020	2021	2022	2023*	2024**
- ADHB/ *at current price*	26.601 ,16	28.053,33	30.619,75	33.646,95	36.270,56
- ADHK/ *at 2010 constant price*	17.990 ,36	18.6410,68	19.543,16	20.598,57	21.614,91
PDRB per Kapita/*Per Capita GRDP* (ribu rupiah/*thousand rupiahs*)					
- ADHB/ *at current price*	24.134	25.260	27.591	29.916	32.047
- ADHK/ *at 2010 constant price*	16.322	16.795	17.496	18.314	19.026
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ *Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price*	-5,95	2,91	4,13	4,71	4,26
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ *Population (thousand people)*	1.102	1.110	1.117	1.125	1.132
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)/ *Population Growth (percent)*	4,50	0,66	0,69	0,66	0,63

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020–2024 secara umum dapat dikatakan berfluktuasi, dimana tahun 2020 pertumbuhan PDRB per kapita terkontraksi sebesar 5,95 persen kemudian mengalami tren meningkat hingga tahun 2023 mencapai 4,71 persen. Pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan namun melambat dengan angka sebesar 4,28 persen.

Ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Sesungguhnya tingkat pendapatan dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pendapatan yang rendah, tentunya mempersempit pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga pada kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas, pemenuhan konsumsi yang bersifat primer (makanan) menjadi pilihan utama. Sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder seperti rekreasi atau membeli barang-barang penunjang hobi. Dengan keterbatasan penghasilan itu pula yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

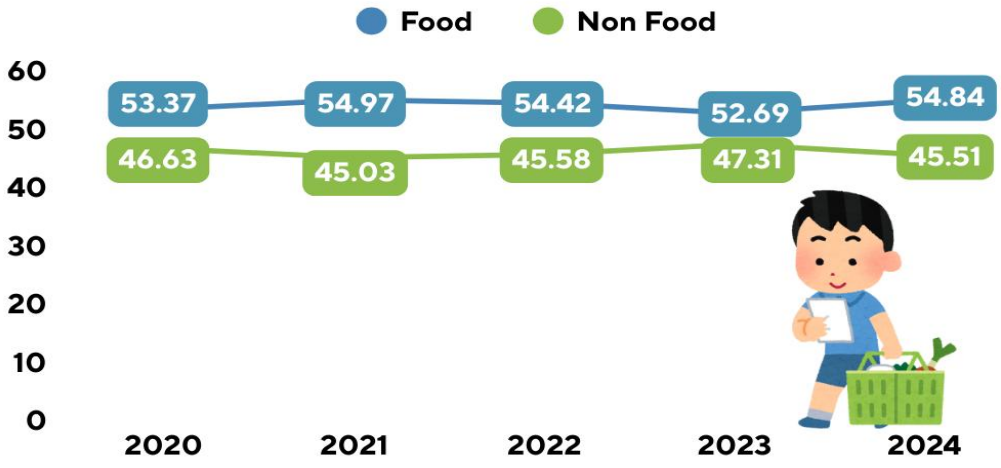
Pada umumnya data yang menunjukkan pendapatan masyarakat sangat sulit untuk diperoleh. Sehingga pengeluaran, dalam hal ini pengeluaran rumah tangga, merupakan proxy (pendekatan) dari pendapatan. Pendekatan pengeluaran konsumsi penduduk digunakan dalam setiap survei, karena sulitnya untuk memperoleh data tentang penghasilan/pendapatan penduduk dan ada kecenderungan masyarakat memberikan jawaban yang kurang relevan. Sebaliknya apabila ditanyakan tentang pengeluaran konsumsinya penduduk/masyarakat memberikan jawaban dengan jujur dan relevan.

Pola pengeluaran konsumsi penduduk merupakan informasi untuk melihat kesejahteraan penduduk. Besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun

bukan makanan (non makanan), secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa.

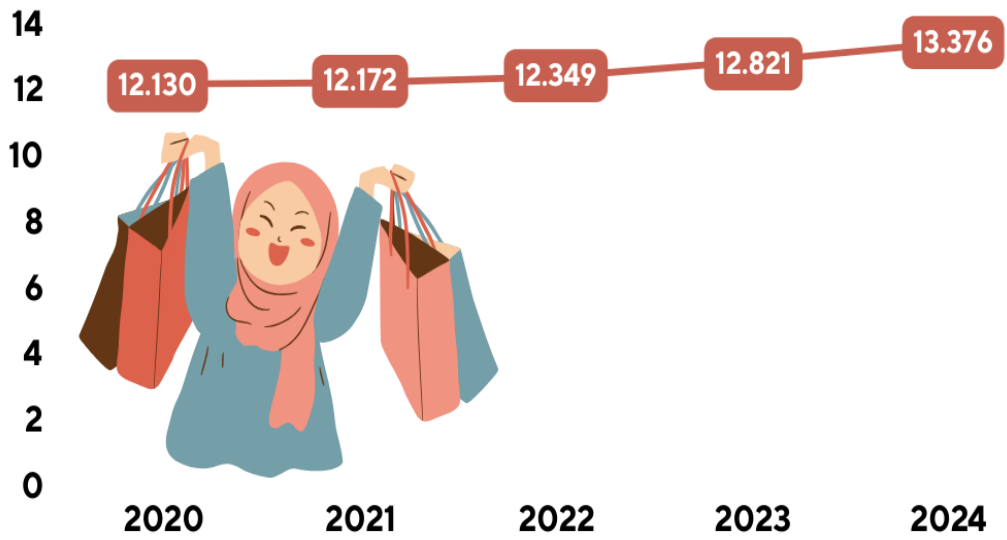
Biasanya pengeluaran makanan dapat mencapai titik jenuh, sementara pengeluaran untuk non makanan hampir tidak terbatas. Tarik-menarik antara dua pengeluaran tersebut, dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran untuk non makanan, berarti tingkat kesejahteraan semakin baik.

Argumentasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan semakin kecil porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Menurut literatur, tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran untuk non makanan sudah lebih dari 60 persen. Sehingga pola pengeluaran rumah tangga dapat mencerminkan besar dan kecilnya daya beli masyarakat.



Gambar 2.13 Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

Dimensi yang mewakili pada standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Kabupaten Nganjuk mencapai 13,78 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 555 ribu rupiah atau 4,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 1,84 persen per tahun.

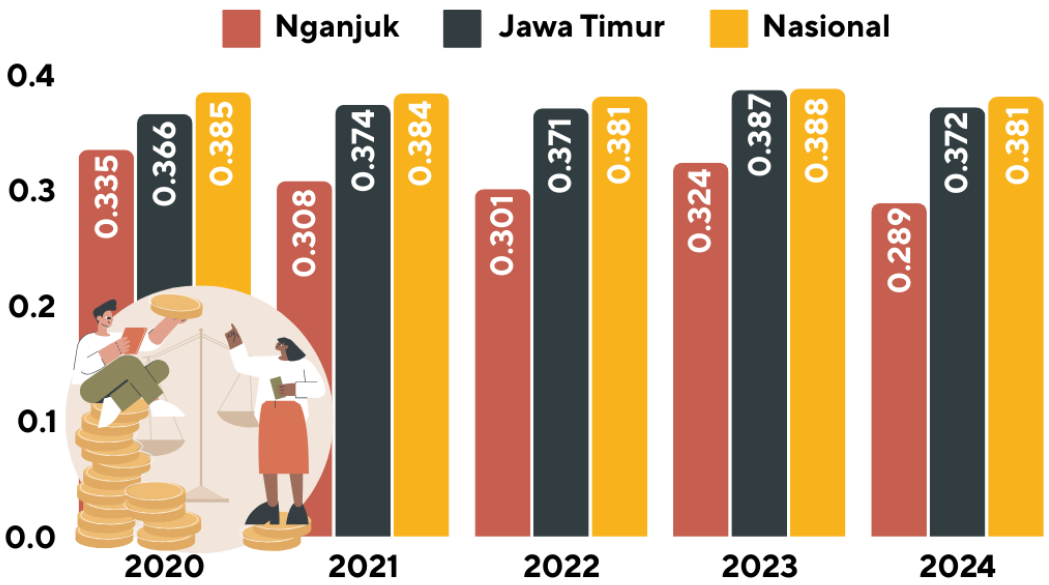


Gambar 2.14 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Kab.Nganjuk
Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024

4. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks Gini Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 berada di angka 0,335 dan pada tahun 2024 berada di angka 0,289. Sejak tahun 2020 hingga 2024 terlihat bahwa Indeks Gini Kabupaten Nganjuk mengalami tren penurunan. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Nganjuk semakin menurun, bahkan semakin rendah setiap tahunnya.



Gambar 2.15 Indeks Gini Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024
Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu isu penting yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Di masa pandemi Covid-19-19 yang dimulai pada tahun 2019 cenderung mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia karena semua sektor usaha terdampak. Meskipun dampak dari pandemi Covid-19-19 sangat terasa, namun berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19-19 ini.

Secara umum, dalam periode 2003-2014 tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 sebesar 241,90 ribu jiwa, berkurang sebesar 126,04 ribu jiwa menjadi 115,86 ribu jiwa

pada tahun 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2003 sebesar 23,53 persen, berkurang sebesar - 12,64 poin atau menjadi 10,89 persen pada tahun 2023.

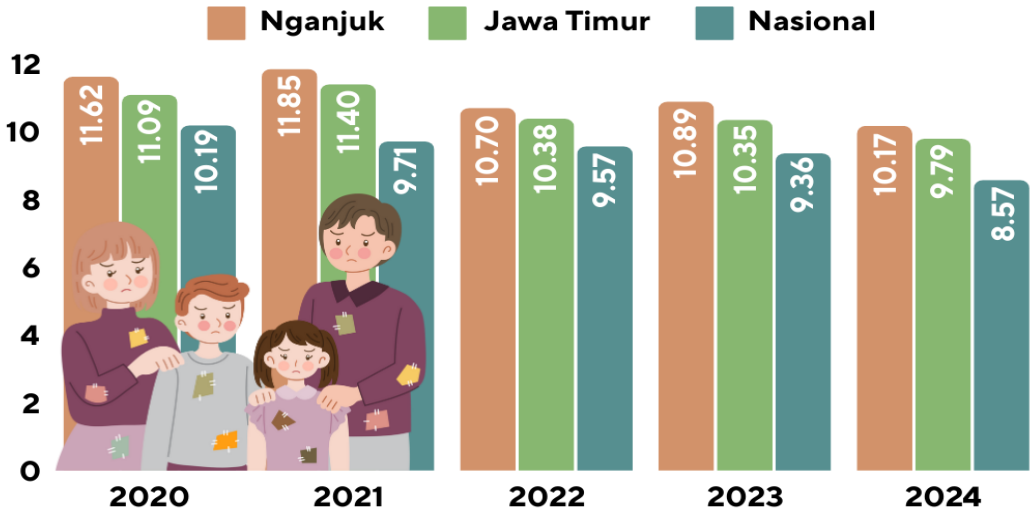
Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2023 mencapai 115,86 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 2,23 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 113,63 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk juga mengalami peningkatan dari 10,70 persen pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 10,89 persen pada bulan Maret 2023. Garis Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2023 sebesar Rp513.565,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp39.136,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 8,25 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp474.429,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nganjuk Maret 2023 sebesar 1,48, sama dengan kondisi Maret 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nganjuk Maret 2023 sebesar 0,31, sama dengan kondisi Maret 2022.

Tabel 2.52 Kondisi Kemiskinan Kab.Nganjuk Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	428.882	446.232	474.429	513.565	539.714
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	122,73	125,5	113	115,86	108,37
Penduduk Miskin (%)	11,62	11,85	10,70	10,89	10,17
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,62	1,56	1,48	1,48	1,04
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,35	0,31	0,31	0,31	0,18
Kemiskinan Ekstrem (Jiwa)	N/A	11.810	14.400	5.690	N/A
Kemiskinan ekstrem (%)	N/A	1,11	1,36	0,53	N/A

Sumber: BPS Kab Nganjuk,2024

Selama periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk berkurang sebanyak 7,49 ribu jiwa, dari 115,86 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 108,37 ribu jiwa pada Maret 2024 atau mengalami penurunan sebesar 6,46 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami penurunan sebesar 0,72 persen poin, dari 10,89 persen pada Maret 2023 menjadi 10,17 persen pada Maret 2024.

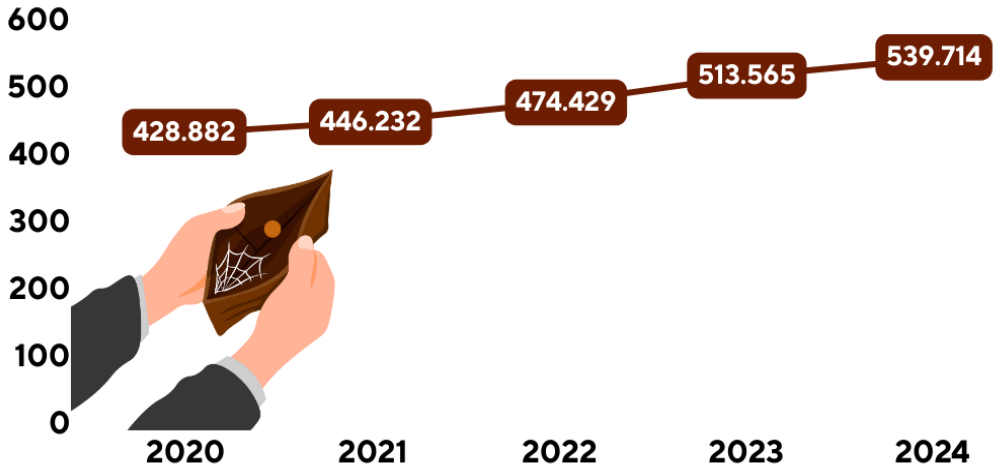


Gambar 2.16 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nganjuk
Sumber: BPS Kab.Nganjuk Tahun 2024

Pada lima tahun terakhir rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk masih relatif lebih tinggi dibanding dengan angka provinsi dan angka nasional. Meskipun secara umum persentase kemiskinan di Kabupaten Nganjuk menurun, tetapi penurunannya masih landai atau kurang tajam. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih keras lagi dan dengan cara yang tetap untuk menurunkan angka kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara metodologi, GK dibentuk berdasarkan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll), sementara paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan atau 47 jenis komoditas di pedesaan. Tetapi GK pada kabupaten/kota hanya disajikan sebagai satu garis kemiskinan secara total karena adanya keterbatasan jumlah sampel pada level kabupaten/kota. Perubahan GK dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan GK ini selain dipengaruhi inflasi juga dipengaruhi oleh dinamika pola konsumsi di kalangan penduduk yang dijadikan sebagai referensi dalam pengukuran seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rata-rata penduduk Kabupaten Nganjuk.



Gambar 2.17
Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk pada Maret 2024 adalah sebesar Rp539.714,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp26.149,00 per kapita per bulan. Dalam memaknai GK dapat kita analogikan dengan kebutuhan pengeluaran rumah tangga secara umum. Jika suatu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota rumah tangga yaitu ayah, ibu, dan dua orang anak, maka yang dibutuhkan rumah tangga tersebut untuk keluar dari garis kemiskinan pada tahun 2024 adalah 4 kali GK atau setara dengan Rp 2.158.856,00.

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Nganjuk miskin selama periode Maret 2024 antara lain adalah:

a. Program intervensi kemiskinan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk cukup efektif dalam intervensi kelompok sasaran pengentasan kesejahteraan

dikombinasikan dengan ketepatan pilihan paket komoditas harga bergejolak untuk program peningkatan kesejahteraan.

b. Berbagai macam program intervensi kemiskinan terus dilakukan di Kabupaten Nganjuk, dimana sekitar 45,37 persennya merupakan program kebijakan program pengurangan beban pengeluaran dan 37,96 persennya adalah program pengendalian harga kebutuhan pokok.
c. Inflasi Maret 2024 relatif terkendali sebesar 3,05% (y-on-y), meskipun demikian terjadi kenaikan harga komoditas pokok selama periode Maret 2023-Maret 2024. Komoditas penyumbang kenaikan terbesar adalah beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator kesejahteraan rakyat antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain dari itu kesejahteraan masyarakat juga dapat tercermin dari faktor ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan.

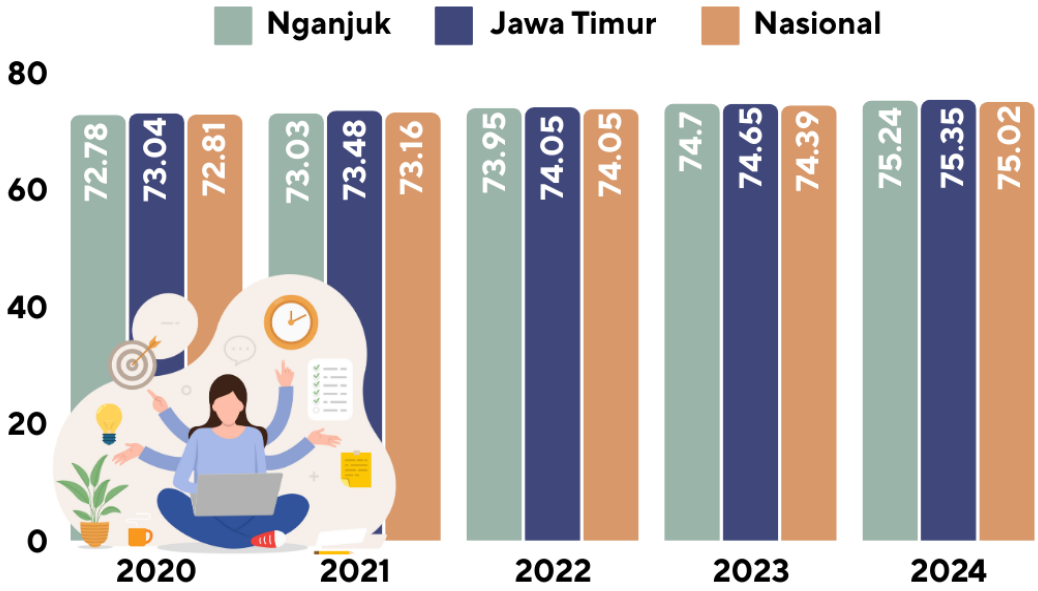
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan

(*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Nganjuk terus mengalami kemajuan selama periode 2020 hingga 2024. Pembangunan manusia di Kabupaten Nganjuk terus mengalami kemajuan. Selama 2020– 2024, IPM Kabupaten Nganjuk rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun, dari 72,78 pada tahun 2020 menjadi 75,24 pada tahun 2024.



Gambar 18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024
Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024

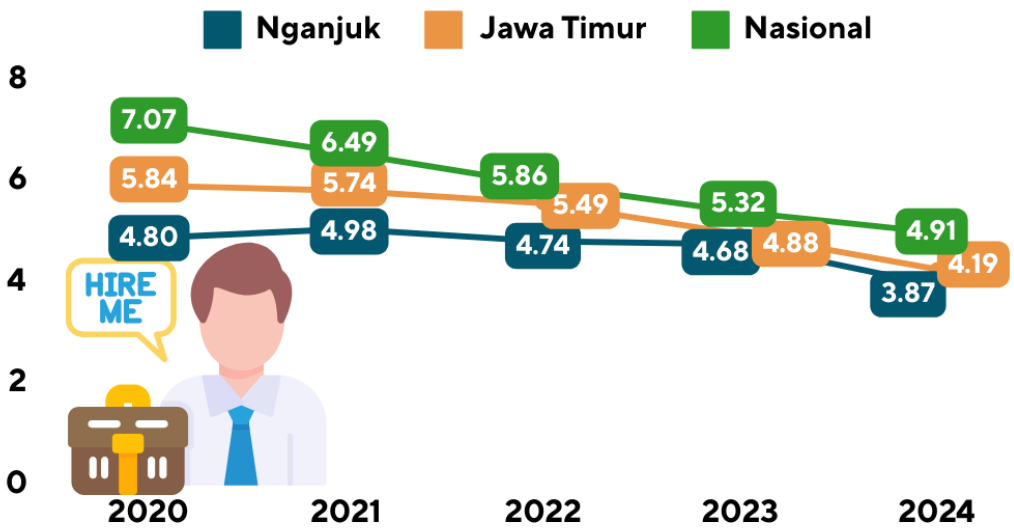
Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak yang mengalami peningkatan cukup tinggi dibanding tiga indikator lainnya yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 4,33 persen. Tiga indikator lainnya yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,01 persen. Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yaitu 0,21 persen.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tidak seperti anggapan umum, penganggur bukanlah orang-orang yang tidak melakukan apa-apa selama periode survei, namun penduduk yang aktif mencari kerja. Oleh

karena itu, anak sekolah dan pengurus rumah tangga tidak tergolong pengangguran karena tidak aktif mencari kerja.

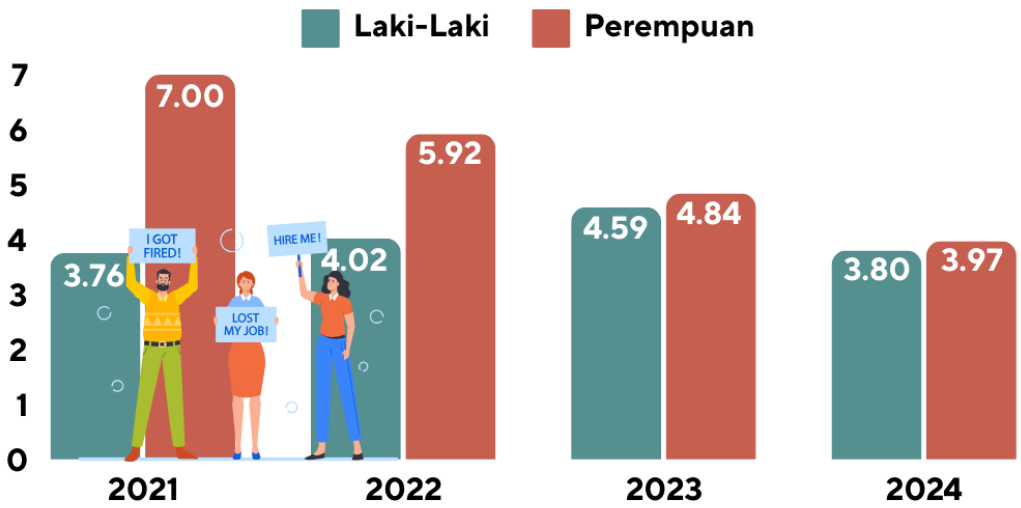
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,87 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 atau 4 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah punya pekerjaan/ usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha. TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,81 persen poin dibandingkan Agustus 2023.



Gambar 2.19 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

Pola penganggur di Nganjuk menunjukkan kecenderungan TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Begitu pula dengan pola TPT pada Agustus 2024 yang menunjukkan bahwa TPT perempuan lebih tinggi dibanding TPT laki-laki, yaitu

3,97 persen berbanding 3,80 persen. TPT baik laki-laki pada Agustus 2024 menunjukkan penurunan 0,79 persen poin dan TPT perempuan mengalami penurunan 0,87 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

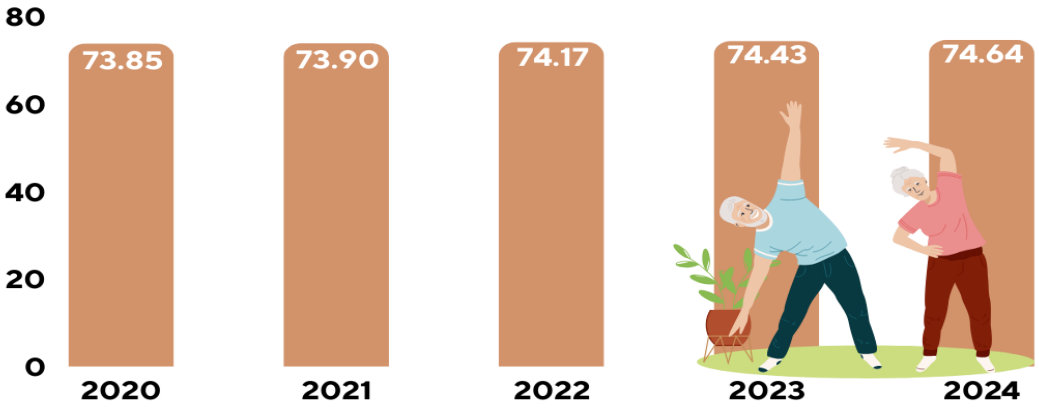


Gambar 2.20 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021–Agustus 2024
Sumber: BPS Kab.Nganjuk,2024

B. Kesehatan Untuk Semua

1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,79 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Nganjuk adalah 73,85 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,64 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,21 tahun atau 0,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,26 persen per tahun.

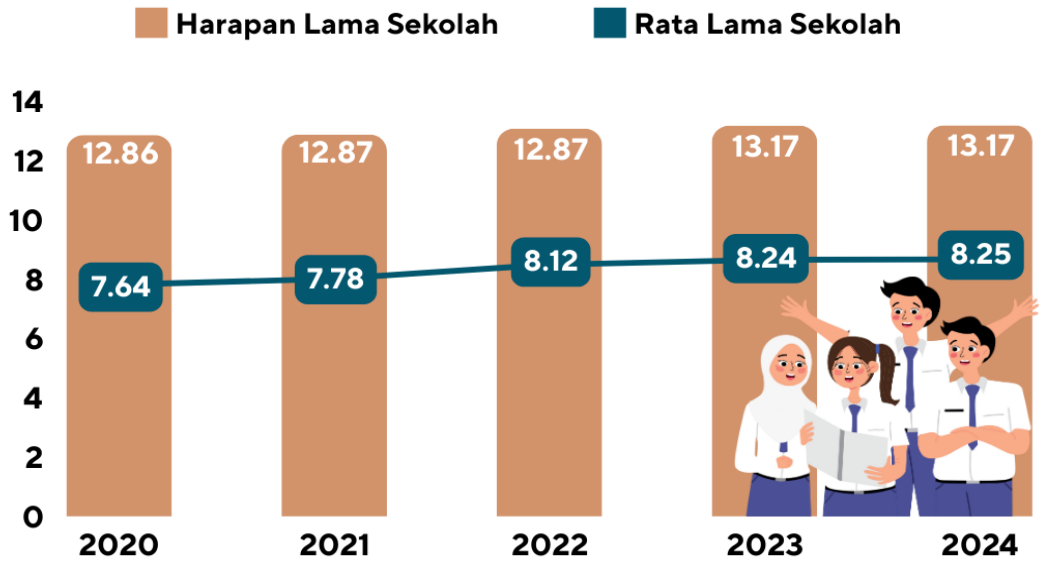


Gambar 2.21 Perkembangan Rata-Rata Usia Harapan Hidup Kab. Nganjuk
Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024

C. Pendidikan Berkualitas dan Merata

1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kabupaten Nganjuk rata - rata meningkat 0,61 persen per tahun.



Gambar 2.22 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kab. Nganjuk, 2020-2024
Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024

Sementara RLS meningkat 1,93 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun atau 0,07 persen dibandingkan tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,78 persen. Sementara itu, RLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun atau 0,12 persen dibandingkan tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,50 persen

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Sebagai upaya melindungi tenaga kerja secara menyeluruh dalam berbagai situasi, termasuk ketika mengalami kecelakaan kerja, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting bagi tenaga kerja. Di bawah ini disajikan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 2.53 Data Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

DATA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	78,41%	92,93%	81,42%	73,21%	22,94%

Sumber: BPS Kab. Nganjuk, 2024

Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk (2024), capaian cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Nganjuk menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, tingkat cakupan tercatat sebesar 78,41% dan mengalami peningkatan substansial menjadi 92,93% pada tahun 2021, yang mengindikasikan optimalisasi upaya pendaftaran tenaga kerja ke dalam program jaminan sosial. Namun, capaian tersebut menurun pada tahun 2022 menjadi 81,42% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 73,21%. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2024, dengan capaian hanya 22,94%,

yang berpotensi mencerminkan adanya kendala struktural maupun administratif dalam mempertahankan kepesertaan. Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat keberhasilan pada awal periode, konsistensi capaian belum terjaga, sehingga diperlukan strategi intervensi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara merata di seluruh sektor ekonomi.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Capaian ini menjelaskan kondisi peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar membangun serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa.

Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan indikator baru dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029. Hal ini merupakan tindaklanjut dari Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, sehingga data capaian historisnya belum ada.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan antar pemeluk agama di suatu wilayah, yang mencakup dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerja sama di antara umat beragama.

IKUB umumnya disusun berdasarkan survei persepsi masyarakat terkait hubungan antar umat beragama, penerimaan terhadap perbedaan keyakinan, kebebasan menjalankan ibadah, serta tingkat interaksi sosial lintas agama. Nilai indeks ini menggambarkan kondisi harmonisasi sosial-keagamaan: semakin tinggi skor indeks, semakin tinggi pula tingkat kerukunan yang terwujud.

Sementara Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat

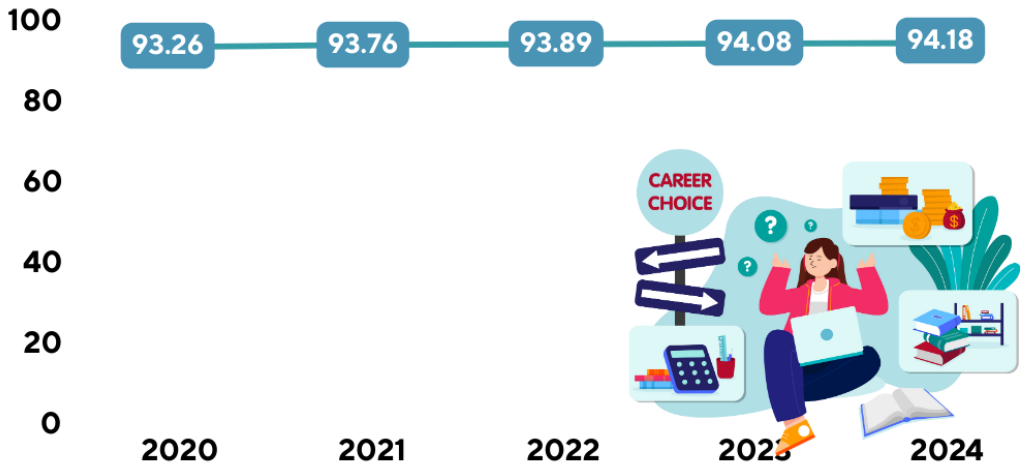
kemajuan pembangunan kebudayaan suatu daerah atau negara secara kuantitatif dan terstandar.

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif maka diukur beberapa indeks pendukung seperti Indeks Pembangunan Gender.

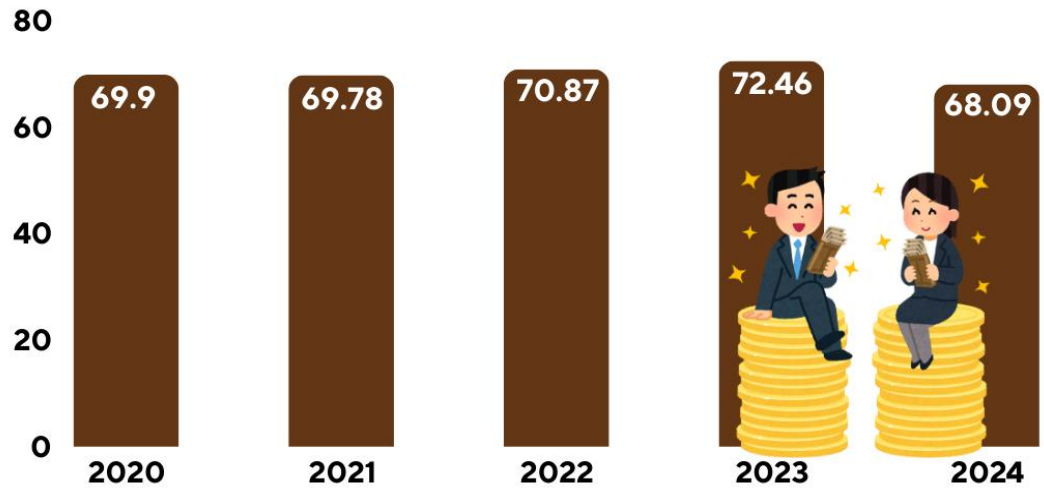
Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi pada saat Pandemi Covid-19 (2020-2021) sangat mempengaruhi aspek kerentanan ekonomi perempuan. Pasca pandemi, perbaikan dan pemulihan ekonomi juga berpengaruh besar terhadap perempuan, yang ditunjukkan dengan kenaikan IPG dan IDG.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. IPG digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki laki dan IPM perempuan sama seimbang.



Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.



Gambar 2.24 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2020– 2024
Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan antara tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan yang jauh lebih kecil jika dibandinkan dengan pendapatan rata-rata laki-laki, serta partisipasi perempuan dalam lembaga parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan keputusan masih kurang.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja;

Variabel pembentuk IKG antara lain :

a) Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran 2 tahun terakhir;
b) Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun;
c) Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/sederajat menurut jenis kelamin;
d) Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin;
e) Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin.

Tabel 2.54 Indeks Ketimpangan Gender

No	Provinsi/ Kabupaten	Indeks Ketimpangan Gerder (IKG)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	INDONESIA	0,472	0.465	0.459	0.447	0,421
2	JAWA TIMUR	0,449	0.46	0.44	0.423	0.347
3	Nganjuk	0,357	0.402	0.382	0.427	0.351

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk,2025

Berdasarkan tabel diatas, ketimpangan gender di Kabupaten Nganjuk menunjukkan penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Meski demikian, masih perlu perluasan peran serta perempuan dan peningkatan pemberdayaan perempuan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merinci kondisi umumnya sebagai satu elemen integral dalam rangka indikator kinerja pembangunan secara menyeluruh.

Dalam kerangka aspek daya saing ini, terdapat tujuh fokus utama yang diklasifikasikan, yaitu daya saing sumber daya manusia, iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan digital, perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi.

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya.

Salah satu daya saing daerah terkait pembangunan SDM adalah pada ketenagakerjaan sebagai faktor dan salah satu modal utama perekonomian.

Tabel 2.55 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Angkatan Kerja	379.262	248.135	627.397
	Bekerja	364.832	238.268	603.100
	Pengeangguran Terbuka	14.430	9.867	24.297
2	Bukan Angkatan Kerja	70.359	201.190	271.549
Jumlah		449.621	449.325	898.946

Sumber: sakernas,2024

Jumlah penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebesar 627.397 jiwa dan naik sebesar dengan komposisi penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Sementara untuk penduduk bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk perempuan.

Menurut status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2024 berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu, pekerjaan utama tertinggi berada pada status buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 28,45 persen, disusul oleh status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 22,25 persen, dan yang paling rendah berada pada status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar sebesar 2,31 persen.

Tabel 2.56 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
0	230.804	5.592	236.396	97,63
1	114.993	2.341	117.334	98,00
2	206.676	14.923	221.559	93,27
3	50.627	1.441	52.068	97,23
Jumlah	**603.100**	**24.297**	**627.397**	**96,13**

Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka, 2025

Jumlah pencari kerja menurut pendidikan tahun 2024 sebesar 6.487 orang. Selain itu, faktor UMK yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kabupaten lain yang berbatasan langsung menjadi daya saing tersendiri.

Tabel 2.57 Pencari Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Pendidikan	Pencari Kerja			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
Tidak tamat SD				
SD	29	40	69	1,06
SLTP	85	175	260	4,01
SMA	2.572	1.981	4.553	70,19
Sarjana Muda	113	170	283	4,36
Sarjana	512	802	1.314	20,26
S-2	3	5	8	0,12
Total	**3.314**	**3.173**	**6.487**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka, 2025

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Penguatan serta pemajuan riset dan inovasi merupakan salah satu bentuk terjemahan atas upaya untuk meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah. Saat ini, Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai upaya pemajuan riset dan inovasi melalui berbagai kebijakan yang ada. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat memahami bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan sangat terkait erat dengan pilihan kebijakan yang tepat di tengah ketidakpastian yang tinggi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, peran dari penelitian dan pengembangan (litbang) menjadi sangat krusial, terutama dalam mendorong lahirnya inovasi di berbagai bidang yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Inovasi yang dihasilkan harus mampu menjawab permasalahan

yang ada, baik dalam hal peningkatan efisiensi birokrasi, optimalisasi sumber daya, maupun penyediaan layanan publik yang lebih baik.

Untuk memperkuat dan memajukan Iptek dalam konteks inovasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan kebijakan diantaranya:

1. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Talenta Digital Melalui Layanan Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang. Kebijakan ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai upaya untuk mendorong transformasi digital dengan cara percepatan penguasaan teknologi digital oleh aparatur sipil negara dan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya manusia. Dalam Pengelolaan sumber daya manusia digital di Kabupaten Nganjuk, diselenggarakan layanan pemberdayaan melalui Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang atau disebut "Omah Tandang". Tujuan dari pembentukan Omah Tandang ini adalah sarana pemberdayaan talenta digital. Layanan melalui Omah Tandang ini meliputi a. peningkatan literasi dan keterampilan digital, b. fasilitasi produksi, c. fasilitasi perizinan usaha dan sertifikasi produk, dan d. fasilitasi promosi dan pemasaran.
2. Walaupun terdapat beberapa kebijakan terkait riset dan inovasi di Kabupaten Nganjuk namun demikian, upaya penguatan serta pemajuan riset dan inovasi di Kabupaten Nganjuk belum dilaksanakan secara terintegrasi dan dilandasi dengan regulasi sehingga belum berjalan secara optimal. Belum ada regulasi yang secara khusus mengatur terkait tatakelola riset dan inovasi di Kabupaten Nganjuk yang menyinergikan semua pemangku kepentingan riset dan inovasi agar dapat mendukung pencapain program pembangunan daerah. Dari sisi organisasi penyelenggara

riset dan inovasi, saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum melakukan transformasi organisasi perangkat daerah riset dan inovasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Saat ini, fungsi riset dan inovasi di Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih dijalankan oleh satu bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk. Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum membentuk perangkat daerah dengan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi daerah (BRIDA) atau Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Dalam konteks penyelenggaraan riset dan inovasi secara terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Nganjuk saat ini belum memiliki regulasi yang mengatur terkait penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah secara terintegrasi yang mengkoordinasi semua elemen riset dan inovasi di kabupaten Nganjuk;

3. Mengacu pada UU No 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK, terdapat amanat terkait urusan penataan repository data riset dan inovasi. Amanat regulasi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola data riset dan inovasi yang baik baik terkait prinsip-prinsip pengelolaan, penyimpanan, akses, dan pemanfaatan data riset dan inovasi, termasuk metadata, yang selaras dengan kebijakan tatakelola data riset dan inovasi secara nasional. Pada saat ini, kondisi penataan basis data riset dan inovasi di Kabupaten Nganjuk belum berjalan optimal. Data riset dan inovasi di Kabupaten Nganjuk masih tersebar di masing-masing perangkat daerah atau di masing-masing lembaga riset yang ada dan data-data tersebut belum sepenuhnya

termanfaatkan secara optimal untuk penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi daerah diukur dalam beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.58 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	14,22	14,93	15,89	15,96	16,31
2	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,87	1,93	1,94	2,01	2,05
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,75	62,24	66,79	66,89	69,79
4	Indeks Inovasi Daerah	N/A	17,60	54,73	49,67	57,28

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk,2025

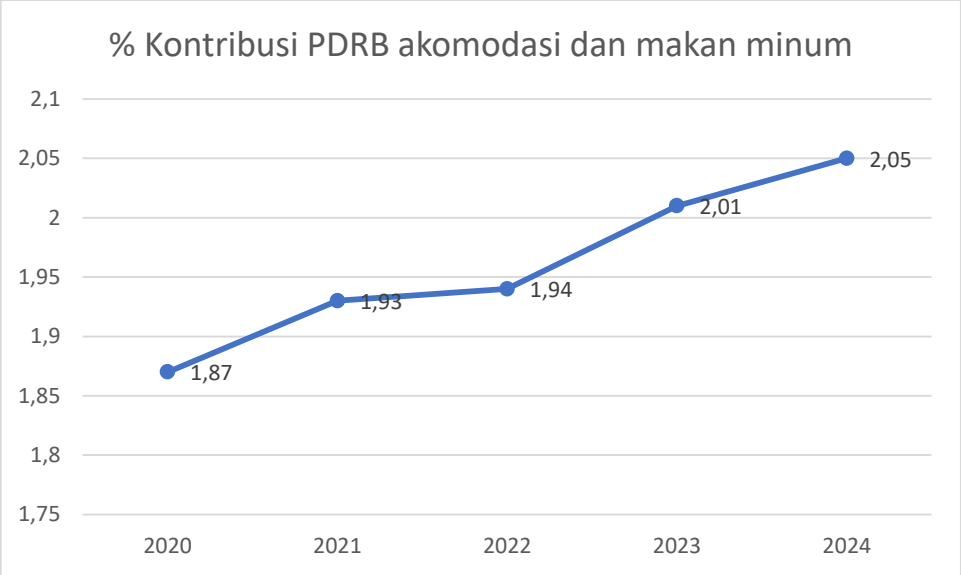
Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Nganjuk pada periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang relatif positif ditinjau dari aspek kontribusi sektor ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta capaian indeks inovasi daerah. Pada sektor industri pengolahan, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan signifikan dari 14,2 persen pada tahun 2020 menjadi 16,31 persen pada tahun 2024. Hal ini menegaskan peran strategis sektor industri pengolahan sebagai motor penggerak perekonomian daerah, seiring dengan berkembangnya basis agroindustri dan peningkatan investasi sektor manufaktur.

PDRB adalah ukuran total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Peningkatan PDRB sektor makanan dan minuman menunjukkan pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut, yang dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata.

Tabel 2.59 kontribusi PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum

Kategori PDRB	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	496.89	540.96	596.76	677.08	744.1

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor akomodasi, makanan, dan minuman memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui penerimaan pajak, pendapatan tenaga kerja, dan daya tarik pariwisata. Selain itu, sektor ini juga mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor akomodasi makanan dan minuman dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong termasuk peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan pariwisata. Sementara itu, faktor penghambat meliputi fluktuasi harga bahan baku, persaingan usaha yang ketat, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pariwisata dan perizinan.



Gambar 2.25 Kontribusi PDRB akomodasi dan makan minum

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga menunjukkan tren kenaikan meskipun relatif lambat, dari 1,87 persen pada tahun 2020 menjadi 2,05 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya dinamika positif pada sektor pariwisata dan jasa pendukung, meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil dan memerlukan penguatan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif serta pariwisata berbasis lokal.

Pada aspek ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat konsisten dari 65,75 persen pada tahun 2020 menjadi 69,79 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya kesempatan kerja serta perbaikan kondisi pasar tenaga kerja, meskipun tetap dibutuhkan peningkatan kualitas SDM agar daya saing tenaga kerja lebih optimal.

Salah satu tujuan pemajuan Iptek bagi daerah adalah untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk mengukur daya saing tiap-tiap daerah secara nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah atau disingkat IDSD, adalah instrumen pengukuran daya saing daerah di Indonesia sebagai bentuk representasi dari produktifitas dan pelaksanaan pembangunan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pada tahun 2024 pengukuran IDSD didasarkan atas 4 komponen, 12 pilar dengan jumlah indikator 64 untuk provinsi dan 51 untuk kabupaten/kota. Pengukuran IDSD ini merujuk pada *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019, dengan penyesuaian indikator dan metodologi agar lebih relevan.

Selain sebagai alat mendeteksi kekuatan, IDSD juga diperlukan oleh daerah sebagai sarana penentuan sektor produk unggulan daerah adalah proses identifikasi dan pemilihan sektor ekonomi yang memiliki potensi paling besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu

wilayah, dengan mempertimbangkan potensi lokal, daya saing, dan keselarasan dengan perencanaan pembangunan nasional. Proses ini melibatkan analisis data, pemanfaatan potensi sumber daya alam dan manusia, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan produk yang unik, berdaya saing, dan memiliki pasar yang luas. evaluasi pembangunan yang dilaksanakan serta mengetahui keberhasilan dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Dengan diketahuinya keberhasilan maupun tidak berhasilnya pembangunan serta kebijakan yang diambil melalui skor indikator pada IDSD maka Pemerintah Daerah dapat merancang lebih lanjut langkah-langkah atau upaya dalam menghadapi kondisi yang ada.

Untuk megetahui lebih lanjut posisi IDSD Kabupaten Nganjuk di level Nasional dan Provinsi Jawa Timur, di bawah ini ditampilkan Tabel 26 Skor IDSD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Tabel 2.60 Skor IDSD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Komponen	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
Pilar	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROV. JAWA TIMUR	4,73	4,51	3,95	4,20	3,93	4,01	2,16	2,78	2,40	5,00	4,24	4,63	3,88
KABUPATEN													
RATA-RATA KAB/KOTA	4,63	3,61	4,49	3,65	3,96	3,89	3,40	2,87	2,02	4,51	4,55	2,81	3,70
PACITAN	4,88	2,94	4,30	3,68	3,99	4,16	3,56	2,03	1,74	4,19	4,69	2,63	3,57
PONOROGO	4,66	2,95	4,68	3,66	4,05	3,99	4,19	3,01	2,23	4,31	4,27	3,60	3,80
TRENGGALEK	4,88	3,12	4,51	2,96	4,14	3,73	3,35	2,35	1,57	4,26	4,66	2,35	3,49
TULUNGAGUNG	4,61	3,59	4,69	3,50	4,17	4,01	3,57	3,07	1,60	4,60	4,66	2,61	3,72
BLITAR	4,82	3,74	4,68	3,74	4,12	3,85	3,26	2,86	1,75	4,57	4,45	1,27	3,59
KEDIRI	4,88	3,73	4,46	3,79	4,03	3,88	3,55	3,15	2,22	4,63	4,52	2,90	3,81
MALANG	4,85	4,25	4,51	3,83	4,03	3,55	3,04	2,60	1,71	5,00	4,71	3,40	3,79
LUMAJANG	4,43	3,75	4,26	3,62	3,83	3,59	2,57	2,37	1,47	4,51	4,39	1,99	3,40
JEMBER	4,64	4,07	4,21	3,60	3,76	3,57	3,27	2,86	1,65	4,90	4,49	4,19	3,77
BANYUWANGI	4,68	4,69	4,20	4,30	3,87	3,94	3,06	2,77	1,35	4,91	4,80	2,64	3,77
BONDOWOSO	4,78	3,72	3,92	3,45	3,55	3,37	2,80	2,53	1,62	4,29	4,25	2,26	3,38
SITUBONDO	4,78	3,55	4,07	3,56	3,75	3,74	2,10	2,41	2,58	4,29	4,34	2,69	3,49
PROBOLINGGO	4,69	3,64	3,99	3,36	3,60	3,46	2,45	2,35	1,65	4,53	4,99	2,48	3,43
PASURUAN	4,81	4,26	4,20	3,80	3,82	3,49	1,68	2,15	0,83	5,00	4,38	2,57	3,42

Komponen	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
Pilar	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
SIDOARJO	4,64	4,13	4,85	3,66	4,15	3,90	3,28	3,18	1,96	5,00	4,74	4,02	3,96
MOJOKERTO	4,80	3,74	4,45	3,69	4,03	4,12	2,10	2,30	1,54	4,95	4,35	2,96	3,59
JOMBANG	4,79	3,85	4,61	3,79	4,02	4,23	3,89	2,65	1,87	4,62	4,71	3,55	3,88
NGANJUK	4,75	3,49	4,38	3,61	3,94	3,88	2,25	3,17	1,61	4,43	4,28	2,01	3,48
MADIUN	4,73	3,28	4,41	3,93	3,94	3,99	3,60	3,58	2,47	4,28	4,83	1,98	3,75
MAGETAN	4,91	3,10	4,53	3,53	4,03	4,23	5,00	3,29	1,90	4,27	4,96	2,26	3,83
NGAWI	4,55	3,94	4,57	3,59	4,02	4,10	3,68	3,22	2,21	4,28	4,87	2,27	3,77
BOJONEGORO	4,72	3,75	4,19	2,86	3,97	3,67	1,44	2,68	1,31	4,93	4,68	2,82	3,42
TUBAN	4,76	3,30	4,25	3,16	3,95	3,79	2,41	2,31	1,13	4,82	4,67	2,39	3,41
LAMONGAN	4,56	3,83	4,41	3,97	4,02	4,02	3,44	2,46	1,70	4,60	4,81	2,84	3,72
GRESIK	4,55	4,12	4,81	3,78	4,03	3,97	2,11	2,47	2,33	5,00	4,82	3,29	3,77
BANGKALAN	4,60	3,44	4,08	3,48	3,82	2,85	3,39	2,12	1,70	4,35	4,12	3,38	3,44
SAMPANG	4,45	3,02	4,24	3,62	3,64	2,96	3,05	1,91	1,45	4,28	4,30	2,51	3,29
PAMEKASAN	4,52	2,58	4,28	3,81	3,61	4,00	3,68	2,17	1,81	4,21	4,39	3,17	3,52
SUMENEP	4,41	3,11	4,18	3,46	3,96	3,63	2,39	2,26	1,07	4,53	4,15	2,60	3,31
Pilar	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	Skor IDSD
KOTA													
KEDIRI	4,75	3,53	4,89	3,32	4,15	4,25	1,41	3,42	1,45	5,00	4,71	2,92	3,65
BLITAR	4,40	3,54	4,87	4,14	4,15	4,37	5,00	3,83	3,17	3,83	4,76	3,03	4,09
MALANG	4,33	4,06	4,96	3,96	4,10	4,00	4,74	4,32	3,10	4,90	4,59	4,17	4,27
PROBOLINGGO	4,28	3,28	4,76	3,31	3,84	4,26	5,00	3,31	2,53	4,08	4,56	2,17	3,78
PASURUAN	4,30	3,12	4,77	3,58	3,95	4,24	5,00	3,28	2,88	3,92	4,39	2,67	3,84
MOJOKERTO	4,48	3,85	4,87	4,11	4,10	4,28	5,00	3,90	3,04	3,83	3,63	2,43	3,96
MADIUN	4,71	3,78	4,90	3,83	4,04	4,32	5,00	4,55	3,96	4,18	4,70	3,16	4,26
SURABAYA	4,13	4,26	4,93	4,03	4,15	4,08	5,00	3,05	3,13	5,00	4,65	4,35	4,23
BATU	4,60	3,06	4,77	3,79	4,03	4,31	5,00	3,04	3,47	4,22	4,51	2,40	3,93

Sumber : Buku IDSD Tahun 2024 (BRIN RI)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan bahwa:

a) Skor IDSD Kabupaten Nganjuk sebesar 3,48 masih di atas skor nasional sebesar 3,43 namun masih berada di bawah skor Jawa Timur sebesar 3,88 dan masih pula di bawah rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 3,70.
b) Skor pilar Kabupaten Nganjuk yang berada di atas nasional adalah Pilar; 1, 2, 3, 4,10 dan 11 sedangkan selebihnya berada di bawah nasional.
c) Skor pilar Kabupaten Nganjuk yang berada di atas Provinsi adalah Pilar; 1, 5, 7, dan 11 sedangkan selebihnya berada di bawah Provinsi Jawa Timur;

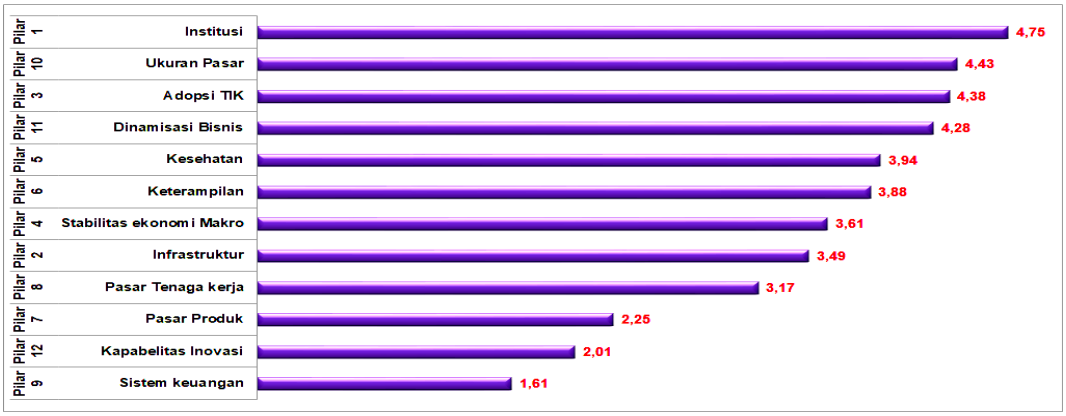
d) Skor pilar Kabupaten Nganjuk yang berada di atas rata-rata Kabupaten dan Kota di Jawa Timur hanya Pilar 1 dan sebagian besar berada di bawah rata-rata Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Tabel 2.61 Skor Pilar IDSD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Pilar		Skor
Komponen 1 Lingkungan Pendukung		4,06
Pilar 1	Institusi	4,75
Pilar 2	Infrastruktur	3,49
Pilar 3	Adopsi TIK	4,38
Pilar 4	Stabilitas ekonomi Makro	3,61
Komponen 2 Sumberdaya Manusia		3,91
Pilar 5	Kesehatan	3,94
Pilar 6	Keterampilan	3,88
Komponen 3 Pasar		2,87
Pilar 7	Pasar Produk	2,25
Pilar 8	Pasar Tenaga kerja	3,17
Pilar 9	Sistem keuangan	1,61
Pilar 10	Ukuran Pasar	4,43
Komponen 4 Ekosistem Inovasi		3,15
Pilar 11	Dinamisasi Bisnis	4,28
Pilar 12	Kapabelitas Inovasi	2,01
IDSD (jumlah rata-rata 4 komponen)		**3,48**

Sumber : Buku IDSD Tahun 2024, BRIN RI (diolah).

Gambar 2.26 Pilar Menurut Perolehan Skor Tertinggi

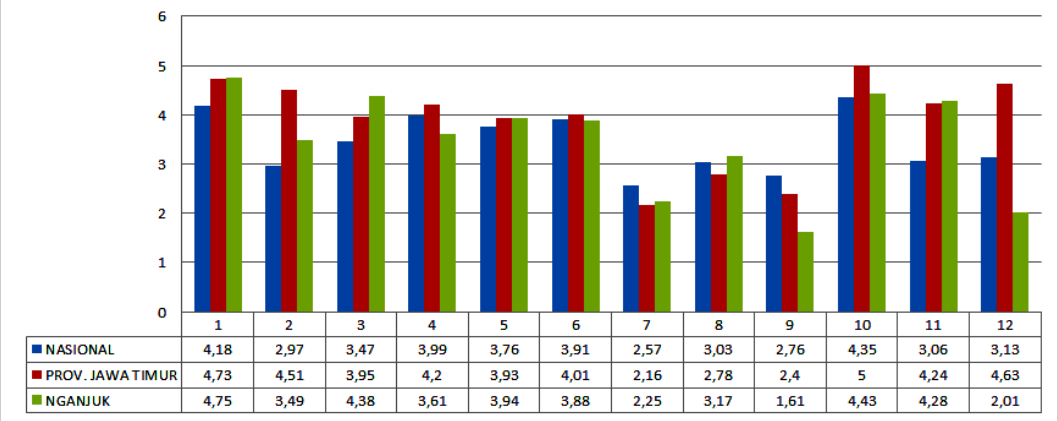


Sumber : Buku IDSD Tahun 2024, BRIN RI (diolah).

Berdasarkan Tabel 2.62 dan Gambar 2.27tersebut di atas diperoleh keterangan bahwa,

a) dari 4 komponen, komponen 1 Lingkungan Pendukung adalah komponen yang memiliki daya saing yang kuat dengan skor 4,06 sedangkan komponen yang memiliki daya yang rendah adalah komponen 3 Pasar dengan skor 2,87.
b) dari 12 pilar, 3 pilar yang memiliki daya tinggi adalah pilar 1 Institusi dengan skor 4,75 disusul Pilar 10 Ukuran Pasar dengan skor 4,43 dan kemudian Pilar Adopsi TIK dengan skor 4,38.
c) Sedangkan pilar yang memiliki daya terendah adalah Pilar 9 Sistem Keuangan dengan skor 1,61.

Gambar 2.28
Perbandingan Skor Pilar Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13
PROV. JAWA TIMUR	4,73	4,51	3,95	4,2	3,93	4,01	2,16	2,78	2,4	5	4,24	4,63
NGANJUK	4,75	3,49	4,38	3,61	3,94	3,88	2,25	3,17	1,61	4,43	4,28	2,01

Sumber : Buku IDSD Tahun 2024, BRIN RI (diolah).

Dari gambar di atas diperoleh keterangan bahwa:

a) Skor pilar di atas nasional dan Provinsi Jawa Timur adalah: Pilar 1, Pilar 3, Pilar 5, Pilar 8 Pilar 10 dan Pilar 11;
b) Skor Pilar di bawah nasional dan Provinsi Jawa Timur adalah: Pilar 9, dan Pilar 12; .
c) Skor Pilar di atas Provinsi Jawa Timur adalah: Pilar 1, Pilar 3, Pilar 5, Pilar 7, Pilar 8 dan Pilar 11.
d) Skor Pilar di bawah Provinsi Jawa Timur adalah: Pilar 2, Pilar 4, Pilar 6, Pilar 9, Pilar 10 dan Pilar 12.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dismupulkan bahwa, walaupun terdapat beberapa pilar memilki daya yang kuat baik di level nasional dan provinsi namun juga masih terdapat pilar yang memilki daya lemah baik di level nasional dan provinsi.

Dengan diketahuinya pilar yang masih memiliki daya yang lemah tersebut maka perlu dijadikan bahan evaluasi untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya perbaikan. Upaya perbaikan pilar dengan daya lemah ini tidak saja dimaknai sebagai perbaikan skor namun dapat dimaknai sebagai perbaikan produktivitas dan perbaikan sektor pembangunan yang masih memiliki kelemahan.

Perbaikan pilar yang perlu mendapatkan perhatian lebih sebaiknya diprioritaskan pada pilar yang memiliki skor dibawah provinsi Jawa Timur yakni, Pilar 2 Infrastruktur, Pilar 4 Stabilitas ekonomi Makro, Pilar 6 Keterampilan, Pilar 9 Sistem keuangan, Pilar 10 Ukuran Pasar dan Pilar 12 Kapabilitas Inovasi.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi Kabupaten Nganjuk menunjukkan arah yang positif, khususnya pada penguatan sektor industri pengolahan, peningkatan partisipasi tenaga kerja, serta akselerasi inovasi daerah. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan kewirausahaan, yang memerlukan intervensi kebijakan lebih terfokus agar dapat mendorong diversifikasi ekonomi serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Penentuan sektor produk unggulan daerah adalah proses identifikasi dan pemilihan sektor ekonomi yang memiliki potensi paling besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan potensi lokal, daya saing, dan keselarasan dengan perencanaan pembangunan nasional. Proses ini melibatkan analisis data, pemanfaatan potensi sumber daya alam

dan manusia, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan produk yang unik, berdaya saing, dan memiliki pasar yang luas.

Pertanian merupakan sub sektor yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Nganjuk. Selain areal yang di peruntukan luas, tanahnyapun relatif cocok untuk berbagai komoditas. Dengan alasan tersebut dan meneruskan tradisi maka sebagian besar masyarakat Kabupaten Nganjuk lebih memilih untuk menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

Berdasarkan data yang tersaji dalam Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2025, terdapat beberapa komoditas pertanian di Kabupaten Nganjuk yang jumlah produksinya di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menjadikan keunggulan tersendiri bagi Kabupaten Nganjuk. Keunggulan komoditas pertanian tersebut secara ekonomis dapat dijadikan basis untuk pengembangan produk unggulan di Kabupaten Nganjuk. Komoditas pertanian yang jumlah produksinya di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dimaksud diantaranya adalah, Bawang Merah, Jagung, Padi, Bunga Mawar dan Alpikat. Untuk mengatahui perbandingan produksi komoditas pertanian Kabupaten Nganjuk dengan rata-rata produksi Provinsi Jawa Timur, di bawah ini disajikan Tabel. 20 Komoditas Unggul Pertanian Kabupaten Nganjuk Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Tabel 2.63 Komoditas Unggul Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Komoditas	Jumlah produksi Kab. Nganjuk	Jumlah produksi Prov. Jatim	Rata-rata produksi Prov. Jatim	Selisih
Padi	404.975,09	9.270.435,29	243.959	161.016,27
Bawang Merah	2.055.912,00	4.766.597,52	125.437	1.930.475,22
Mawar	31.923.008	128.129.785	3.371.836	28.551.171,55
Alpukat	85.715	2.400.402	63.168	22.546,53

Sumber : *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2025*

Mencermati berbagai data diantaranya adalah Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2024 dan Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2024 doperoleh keterangan bahwa produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Nganjuk bervariasi. Tanaman perkebunan yang cukup menonjol di Kabupaten Nganjuk adalah tanaman Tebu, perkebunan Tebu hampir dapat dijumpai diseluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Pada Tahun 2024 produksi Tebu paling banyak dihasilkan di Kecamatan Gondang sebanyak 44.239,74 ton. Untuk mengetahui data produksi tanaman perkebunan di bawah ini sajikan Tabel 23 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024.

Tabel 2.64 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024.

Jenis Tanaman	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman tahunan					
Kelapa	28,80	251,17	207,41	203,89	196,65
Kopi	306,84	103,73	104,14	101,13	104,78
Kakao	51,81	376,86	374,75	352,46	334,92
Cengkeh	566,84	569,96	570,76	567,73	585,73
Jambu mete	86,19	86,00	79,23	64,87	62,13
Tanaman semusim					
Tebu	1.511,07	14.548,98	200.630,01	218.568,3	217.158,30
Tembakau	1.242,00	1.078,00	967,47	1.332,65	2.170,79
Nilam	254,43	170,49	76,55	140,00	140,00

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2025

Kendatipun bukan sub sektor unggul di Provinsi Jawa Timur, industri baik industri kecil maupun rumah tangga di Kabupaten Nganjuk adalah salah satu penopang ekonomi masyarakat yang penting. Jumlah industri baik industri kecil maupun rumah tangga di Kabupaten Nganjuk untuk selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan untuk tiap-tiap tahunnya.

Industri yang paling banyak terdapat di Kabupaten Nganjuk adalah mebel sebanya 249 unit. Sedangkan industry kerajinan raumah tangga paling banyak adalah anyaman sebanyak 4.128 unit. Sementara itu industri rumah tangga paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri batu merah atau batu bata sebanyak 3.609 unit. Industri batu merah atau batu bata ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 9.555 karyawan.

Pada tahun 2024, industri besar/sedang di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan 10 unit usaha. Unit usaha yang paling banyak didapat di Kabupaten Nganjuk adalah industri rokok sebanyak 23 unit. Industry rokok ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3.304 tenaga kerja. Industri rokok paling banyak berada di Kecamatan Berbek sebanyak 6 unit usaha.

Selanjutnya untuk mengetahui jumlah industri menurut jenisnya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 24 Jumlah Industri Menurut Jenisnya Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 s/d 2024 di bawah ini.

Tabel 2.65 Jumlah Industri Menurut Jenisnya Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 s/d 2024

Jenis	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Kecil	1,331	1,327	1,369	1,530	1,560
Industri Kerajinan Rumah Tangga	15,428	15,451	15,493	16,268	16,280
Industri Besar/sedang	167	167	167	167	177

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2025

Perdagangan merupakan sub sektor penting, terdapat 3 jenis sarana pedangan yang ada di Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah pasar, toko dan kios. Dari 3 jenis tersebut kios adalah sarana perdagangan yang paling banyak terdapat di Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2024 jumlah kios mengalami kenaikan 45 unit atau 1,20 % dibanding tahun 2023. Untuk

mengetahui lebih lanjut jumlah sarana perdagangan di bawah ini disajikan Tabel 25 Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 s/d 2024.

Tabel 2.66 Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Jenis Sarana Perdagangan	Tahun		
	2022	2023	2024
Pasar	35	35	35
Toko	360	360	360
Kios	3.756	3.756	3.801
Jumlah/Total	4.151	4.151	4.196

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2025

C. Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Diskripsi tentang pengembangan PUD ini untuk selanjutnya akan dibagi menjadi beberapa bahasan yang didasarkan atas beberapa ketentuan yang dimuat dalam pedoman pengembangan PUD menurut Permendagri/9/2014.

1. Perencanaan.

   Walaupun tidak secara khusus mengatur tentang perencanaan pengembangan PUD namun Pemda Kabupaten Nganjuk telah menerbitkan beberapa regulasi terkait lainnya. Regulasi yang terlah ditetapkan ini bersifat sektoral. Salah satu regulasi terkait dengan pengembangan PUD adalah pengembangan industri unggulan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembanguan Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2040. Salah satu ketentuan yang terkait dengan PUD dalam peraturan ini adalah ditetapkannya zonasi pengembangan UKM dimana berdasarkan Permendagri/9/2014 yang dijadikan pedoman dalam pengembangan PUD mengungkapkan bahwa UKM adalah salah pelaku usaha yang diproyeksikan sebagai subyek

pengembangan PUD. Selain peraturan tersebut terdapat pula regulasi yang mengatur tentang tata ruang wilayah, dimana dalam wilayah tersebut juga memuat secara khusus klasterisasi wilayah pengembangan UKM yakni Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2043.

Perencanaan pengembangan PUD harusnya tersistem dengan baik, keterkaitan dokumen perencanaan yang integrative, sinergis diperlukan. Mengingat perencanaan terkait pengembangan PUD Kabupaten Nganjuk terpisah di beberapa sektor maka harapan untuk dapat dijadikan acuan sangat sulit.

2. Pemodelan pengembangan PUD.

   Walaupun tidak secara kusus menetapkan pemodelan pengembangan PUD namun dari beberapa regulasi dapat diperoleh keterangan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menentukan pengembangan dengan beberapa model diantaranya adalah:

   a. Klasterisasi UKM melalui pengembangan industri ungulan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2020;
   b. Selain klasterisasi Pemda Kabupaten Nganjuk juga menetapkan model pengembangan dengan kompetensi wilayah perkotaan yakni Perkotaan Kertosono yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023.
   c. Pengembangan wilayah dengan program Kawasan Industri Nganjuk (KING) dan Kawasan Ekonomi Nganjuk (KEN) atau dikenal ***Slumbung Foods Festival*** **(SFF) yang di konsep sebagai sentra UMKM.**

3. Upaya pengembangan PUD dalam bentuk peningkatan daya dukung belum terlihat jelas dalam beberapa aspek diantaranya:
    a. Kualitas daya tarik belum meiliki ukuran/standar dan tidak memunculkan kekhasan secara spesifik seperti nilai budaya, social, kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutannya terhadap sumberdaya yang dimilki daerah. Selain secara prinsip pengembangan produk belum didukung oleh hal-hal tersebut kelemahan lain yang dimiliki adalah belum adanya upaya penyehatan investasi, minimnya bentuk inovasi, rendahmya kapasitas produk, keterbatasan ragam produk, SDM pendukung masih rendah serta belum menjadi *multiplier effect* pembangunan.
    b. Walaupun sudah ada upaya peningkatan kualitas infrastruktur baik yang bersifat umum, transportasi, produk dan pemasaran namun masih terbatas pada sektor dan komoditas tertentu salah satunya adalah Bawang Merah.
    c. Belum ada wadah promosi yang terpadu dan tersistem dengan baik seperti misalnya publikasi, pusat informasi bisnis, kemitraan atar pelaku ekonomi. Promosi secara umum dilakukan melalui even pameran berklasifikasi umum yang diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara.
    d. Peningkatan kerjasama hanya dilakukan dalam sektor atau komoditas tertentu dan itupun sebatas kerjasama dalam peningkatan produksi,
    e. Walaupun ada keterlibatan masyarakat dalam produksi namun keterlibatannya hanya sebatas sebagai pelaku usaha atau orang yang bekerja karena kebutuhan akan penghasilan dan belum ada rasa memiliki dari masyarakat bersangkutan. Walaupun sudah ada upaya untuk memberikan bantuan terhadap UMKM sebagai produsen

namun belum dilakukan tindakan lanjutan seperti pengingkatan kapasitas SDM dan Manajement.

f. Perlindungan terhadap produk belum difasilitasi penuh oleh Pemda baik dalam penentuan dan stabilisasi harga. Dalam konteks perlindungan terhadap komoditas khas daerah dan kekayaan intelktual Pemda Kabupaten Nganjuk sudah melakukan beberapa bentuk kegiatan fasilitasi namun jumlahnya masih terbatas

D. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan inklusif. Kedua konsep ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi.

Ekonomi hijau berfokus pada transisi menuju aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sementara ekonomi biru memanfaatkan potensi sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain indikator indeks ekonomi hijau dan indeks ekonomi biru Indonesia, dalam capaian penerapan ekonomi hijau dan biru juga dilakukan pengukuran pada porsi EBT dalam bauran energi primer. Porsi EBT dalam bauran energi primer adalah persentase kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) terhadap total konsumsi energi primer suatu negara dalam periode tertentu.

E. Transformasi Digital

Capaian ini menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Kabupaten Nganjuk melakukan pengukuran capaian transformasi digital dengan Indeks Masyarakat Digital (IDI). Indeks Masyarakat

Digital Indonesia (IMDI) adalah indikator komposit yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengukur tingkat digitalisasi masyarakat di tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia. Indeks ini dibangun berdasarkan kerangka *G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy*, hasil kerja sama dalam Presidensi G20 Indonesia. IMDI memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan, akses, dan pemanfaatan teknologi digital di tingkat lokal secara periodik dan terstandar.

F. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Capaian ini menjelaskan tentang kondisi integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Capaian ini berisi indikator sebagai berikut:

Tabel 2.67 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PMTB ADHK (Milyar)	5.006,94	5.094,52	5.372,96	5.642,40	5.966,38
2	PMTB ADHB (Milyar)	7.604,12	7.960,18	8.894,07	9.622,88	10.397,06
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	-4,80	1,75	5,47	5,01	5,74
4	Net Ekspor	-2.619,28	-2.724,21	-3.655,62	-3.974,50	-4.201,33

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk,2025

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah total nilai investasi yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menambah modal tetap dalam suatu perekonomian, sektor, atau perusahaan selama periode tertentu. Modal tetap itu sendiri mencakup barang-barang yang digunakan untuk produksi dan tidak dikonsumsi dalam satu periode produksi, seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan.

PMTB digunakan sebagai indikator penting dalam analisis ekonomi karena menggambarkan seberapa besar investasi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi PMTB, semakin besar pula potensi peningkatan output atau produksi dalam jangka panjang.

G. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan perkotaan umumnya berfungsi sebagai simpul utama kegiatan ekonomi modern, industri, perdagangan, jasa, serta pusat pemerintahan. Aksesibilitas yang lebih baik, infrastruktur yang relatif lengkap, serta ketersediaan tenaga kerja terampil menjadikan kota sebagai magnet investasi dan lokus pertumbuhan dengan daya ungkit tinggi. Kota tidak hanya mengakselerasi perkembangan sektor sekunder dan tersier, tetapi juga menjadi pasar utama bagi produk pertanian, perikanan, dan hasil sumber daya alam yang berasal dari kawasan perdesaan.

Sebaliknya, kawasan perdesaan berperan strategis sebagai basis produksi pangan, energi, bahan baku, dan ruang konservasi lingkungan yang menopang keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan perdesaan ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pada potensi lokal. Perdesaan tidak hanya menjadi penyedia komoditas primer bagi perkotaan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan agroindustri, ekowisata, dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Dengan demikian, desa berfungsi sebagai fondasi ketahanan pangan dan sumber pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya.

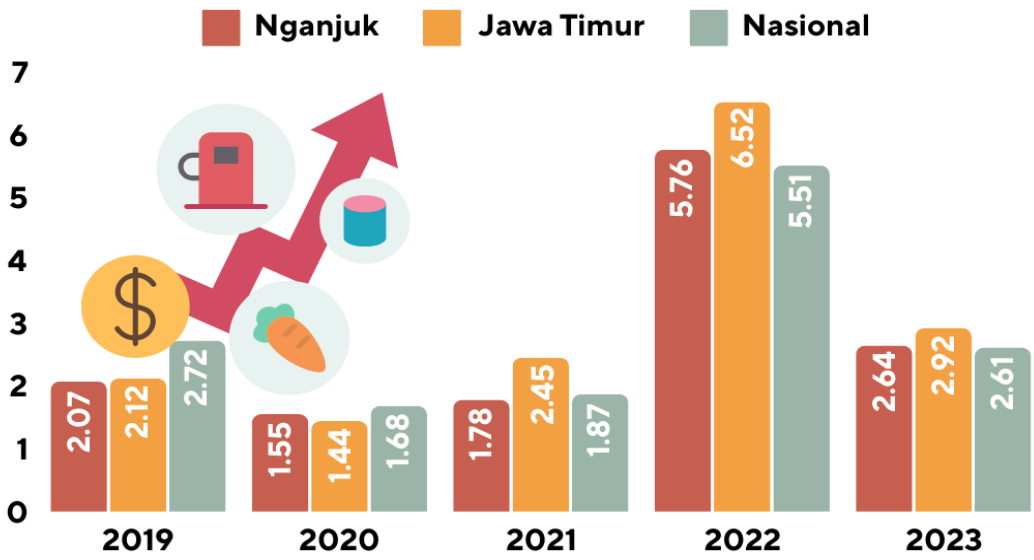
Hubungan fungsional antara perkotaan dan perdesaan membentuk pola *urban–rural linkage*, di mana arus barang, jasa,

modal, dan tenaga kerja berlangsung secara dinamis. Perkotaan berperan sebagai pusat distribusi dan inovasi, sementara perdesaan menjadi penyedia input produksi dan ruang pengembangan ekonomi hijau. Apabila dikembangkan secara seimbang, keterkaitan ini mampu menciptakan sistem pusat pertumbuhan yang lebih inklusif, mengurangi kesenjangan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, strategi pembangunan perlu diarahkan pada penguatan infrastruktur konektivitas, pengembangan klaster ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat desa agar tercipta keseimbangan peran perkotaan dan perdesaan sebagai motor pembangunan regional. Indikator yang digunakan dalam mengukur perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah Indeks Infrastruktur, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Presentase Desa Mandiri, dan Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau,dan berkelanjutan

H. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro merujuk pada kondisi perekonomian suatu wilayah yang relatif seimbang, tanpa fluktuasi besar atau gejolak yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi secara luas. Dalam kondisi stabil, variabel-variabel makro ekonomi seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran berada dalam level yang terkendali dan dapat diprediksi, sehingga menciptakan kepercayaan bagi investor, bisnis, dan masyarakat.

Kabupaten Nganjuk, pengukuran stabilitas ekonomi makro menggunakan beberapa indikator dalam pengukurannya, salah satu indikator yang dipakai adalah Tingkat inflasi.



Gambar 2.29 Laju Inflasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

Laju Inflasi Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 sebesar 2,64 persen. Inflasi Kabupaten Nganjuk banyak dipengaruhi oleh fluktuasi bahan pangan terkait dengan pengaruh perubahan cuaca. Indeks Perkembangan harga (IPH) menggambarkan perkembangan harga pada bahan pangan, sekaligus sebagai proksi inflasi, khususnya inflasi bahan pangan yang dihitung dari 20 komoditas. 20 komoditas tersebut di antaranya yaitu beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi, tepung terigu, udang, ikan kembung, mie instan, tempe, tahu, pisang, susu bubuk balita, susu bubuk dan jeruk. Sementara komoditas yang cenderung mengalami kenaikan di bulan Desember 2023 yaitu cabai rawit dengan angka 0,630 persen, cabai merah di angka 0,518 persen dan jeruk di angka 0,325 persen. Jika di rata-rata IPH di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan sebesar 1,742 persen dibandingkan dengan bulan November 2023. Ekonomi yang tumbuh dengan inflasi yang terkendali menunjukkan terjadi pemulihan ekonomi pada tahun 2021 setelah pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Nganjuk dan

nasional tumbuh minus dikarenakan puncak pandemi Covid-19-19 . Pada tahun 2022, ini ekonomi tumbuh 5,40% sedangkan laju inflasi 5,76%. Secara teoritis, laju inflasi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi menunjukkan masih tingginya faktor-faktor produksi atas barang dan jasa. Dari sisi hulu kebijakan pengendalian inflasi adalah pengendalian terhadap rantai distribusi bahan-bahan baku. Dari sisi hilir, kebijakan yang tepat adalah pengendalian harga komoditas pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif mengacu pada sistem pengelolaan dan peraturan yang dirancang untuk berfungsi secara koheren (terintegrasi) dan fleksibel (adaptif) dalam menghadapi perubahan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Tujuan utama dari regulasi dan tata kelola ini adalah untuk menciptakan sistem yang responsif terhadap perubahan, menghindari tumpang tindih atau konflik antar kebijakan, serta memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. Dalam kinerjanya, regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif ini diukur dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.68 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	2,62	2,14	2,18	3,62	3,84
2	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Indeks Reformasi Birokrasi	61,01	59,04	60,18	66,65	82,92

Kinerja penyelenggara Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Nganjuk rata-rata terbilang Sangat Baik.

Pada tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah 2,14 (cukup) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil evaluasi SPBE tahun 2020 yang mendapat Nilai 2,62 (baik). Terdapat 4 (empat) domain yang dinilai tingkat kematangannya (maturity level) yaitu domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Dari 4 domain yang dinilai, dijabarkan lagi menjadi 47 indikator. Pada tahun 2024, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperoleh nilai 3,84 (Sangat Baik) yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dengan nilai 3,62 (Sangat Baik) dan 2022 dengan nilai 2,18 (Cukup).

Indeks Reformasi Birokrasi didasarkan atas indeks kepuasan masyarakat terhadap integritas pemerintah dan indeks persepsi masyarakat terhadap birokrasi yang baik dan bebas dari KKN, akuntabilitas kinerja pemerintah serta pelayanan publik. Capaian indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebesar 82,92 dengan kategori “A”, atau 129,99% dari target sebesar 63,79. Upaya-upaya untuk mencapai target tersebut dilakukan dengan cara pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang baik serta rekrutmen maupun penempatan pegawai berdasar sistem merit, penerapan e-government menuju *smart city*, pelaksanaan kinerja yang akuntabel serta, pelayanan publik yang semakin baik dan inovatif.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan dukungan tata kelola hukum yang berkeadilan, sistem keamanan daerah yang tangguh, serta demokrasi yang substansial. Hukum berkeadilan di tingkat daerah menjadi fondasi untuk menjamin kepastian dan perlindungan bagi seluruh warga, sekaligus memastikan tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan

publik maupun penegakan aturan. Penyelenggaraan hukum yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi daerah serta mendorong terciptanya iklim sosial-ekonomi yang kondusif.

Selanjutnya, keamanan daerah yang tangguh merupakan prasyarat penting bagi stabilitas pembangunan di wilayah. Konsep keamanan daerah tidak hanya terbatas pada aspek ketertiban umum dan penegakan aturan, melainkan juga mencakup keamanan sosial, ekonomi, serta mitigasi bencana. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur keamanan daerah, sinergi antar-lembaga, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi faktor utama untuk mewujudkan daerah yang aman, stabil, dan resilien terhadap berbagai ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional.

Sementara itu, demokrasi substansial harus dihadirkan dalam tata kelola daerah dengan mengedepankan partisipasi masyarakat yang bermakna, penghormatan hak asasi manusia, serta penguatan lembaga perwakilan dan kelembagaan publik di tingkat lokal. Demokrasi yang substansial tidak berhenti pada prosedur pemilihan semata, tetapi tercermin pada proses kebijakan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan demikian, sinergi antara hukum yang berkeadilan, keamanan daerah yang tangguh, dan demokrasi substansial akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, stabilitas wilayah yang terjaga, serta pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan dalam mengukur Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial adalah Persentase Penegakan Perda, Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Rasa Aman, dan Indeks Ketentraman dan Ketertiban.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya gentar Kawasan

Sub bab ini menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dana pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan Nasional di berbagai bidang, mengenmbangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif, serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia. Capaian ini diukur dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas, kemajuan, daya saing, dan kemandirian suatu daerah—baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun demikian hingga dokumen ini dimuat pengukuran capaiannya masih belum tersedia.

D. Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan nilai sebesar 67,45 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya komitmen untuk mendorong perbaikan pada pelaksanaan manajemen kinerja.

Tabel 2.69 Rincian hasil evaluasi

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	22,18	22,77
Pengukuran Kinerja	30	19, 10	20,22
Pengukuran Kinerja	15	11,71	11,78
Pengukuran Kinerja	25	14,46	15,30
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,45	70,07
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

Sumber : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB 2023-2024, diolah

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk. tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a) Meskipun telah dilakukan reviu pembahasan perencanaan kinerja pada perangkat daerah, namun masih ditemukan sebagian perangkat daerah merumuskan kinerja strategis belum berorientasi hasil sesuai dengan levelnya dan indikator kinerja yang dimiliki belum sepenuhnya relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja strategis;

b) Pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah sudah melakukan penyusunan pohon kinerja, namun belum sepenuhnya pohon kinerja yang dimiliki menjenjangkan kinerjanya secara logis, karena hubungan antar level kinerja tidak memiliki kausalitas/keterkaitan dan cenderung masih ditemukan pola hubungan kinerja yang *redundant* antar *leveling* kinerja;

c) Pengidentifikasian *crosscutting* pada pohon kinerja khususnya pada penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya menggambarkan *sharing outcome* antar lintas tugas dan fungsi yang dimiliki perangkat daerah benar-benar mempengaruhi percepatan penanggulangan kemiskinan, karena penyusunannya belum berdasarkan *critical success factor* (CSF).

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a) Aplikasi pengukuran kinerja, monev.nganjukkab.go.id belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana

pengukuran kinerja strategis perangkat daerah, karena masih ditemukan beberapa perangkat daerah yang belum melaporkan pencapaian kinerjanya secara berkala;

b) Rencana aksi yang dimiliki belum sepenuhnya menggambarkan penetapan kinerja program dan kegiatan yang berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) belum berjalan efektif;

c) Pengukuran kinerja individu (SKP) belum sepenuhnya menunjang pencapaian kinerja organisasi/perangkat daerah. Hal ini dapat dilihat pada penyusunan matriks peran hasil yang menggambarkan hubungan kinerja individu dan kinerja organisasi/perangkat daerah tidak saling mempengaruhi.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a) Laporan kinerja pemerintah daerah (LPPD) dan perangkat daerah belum mengungkapkan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan juga analisis upaya perbaikan ke depan pada setiap pencapaian kinerja;

b) Belum maksimalnya penggunaan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, di mana dapat dilihat dari masih ada beberapa target kinerja pada tahun berjalan yang lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya pada beberapa Perangkat Daerah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a) Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar perangkat daerah belum memberikan temuan dan

rekomendasi yang cukup serta konkret sesuai dengan permasalahan utama yang dialami oleh setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP.

b) Pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum optimal dilakukan, karena masih ditemukan beberapa perangkat daerah yang belum menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya.

5. Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Evaluasi akuntabilitas terhadap upaya pengelolaan program kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan mendapatkan gambaran umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui presentasi dan diskusi, serta menganalisis efektivitas biaya (*cost-effectiveness analysis*) yang dilakukan dengan membandingkan data anggaran kemiskinan pada SIPD dengan data penurunan jumlah masyarakat miskin pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) BPS. Berdasarkan hasil evaluasi, didapat hal-hal sebagai berikut:

a) Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan *tagging* penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebesar Rp 237.386.295.621 atau 9,23% dari total pas belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 82 subkegiatan. Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada sub kegiatan "pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat" yaitu sebesar 35,72% dan terkecil adalah pada sub kegiatan "pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota" yang hanya 0,0017%;

b) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada Maret 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten

Nganjuk adalah sebesar 10,89% atau naik 0, 19% dibandingkan dengan tahun 2022;

c) Hasil analisis tim evaluator masih menemukan adanya sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, serta alokasi anggaran pendukung (pembangunan penampungan sampah, biaya alat tulis kantor, KawaUFaksimili/lnterneUTV berlangganan, dan lainnya).

6. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a) Memastikan kembali perencanaan kinerja pada level pemerintah daerah (RPD tahun 2024 - 2026) dan Renstra perangkat daerah tahun 2024 - 2026 untuk merumuskan kinerja strategis berorientasi hasil sesuai dengan levelnya dan menetapkan indikator kinerja yang relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja strategis;

b) Mendorong penyusunan pohon kinerja yang berdasarkan kerangka logis yaitu dimulai dari isu strategis yang ada, yang kemudian dijabarkan hingga level kinerja terkecil, kemudian dipastikan hubungan antar level kinerja memiliki kausalitas/keterkaitan/*critical success factor*,

c) Memastikan pengidentifikasian *crosscutting* pada pohon kinerja, khususnya pada penanggulangan kemiskinan dan isu strategis daerah lainnya dapat menggambarkan *sharing outcome* antarlintas tugas dan fungsi perangkat daerah yang benar-benar dapat mempengaruhi percepatan pencapaian kinerja strategis daerah;

d) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi monev.nganjukkab.go.id sebagai sarana pengukuran kinerja dengan memastikan semua perangkat daerah mengisi pengukuran kinerja yang dimiliki berdasarkan perencanaan

kinerja yang paling *update*, sehingga pengukuran kinerja menggambarkan pencapaian kinerja yang sesuai dengan perencanaan kinerja yang dimiliki;

e) Memastikan kembali rencana aksi yang dimiliki sudah mengawal penetapan program kinerja dan kegiatan yang berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) berjalan efektif;

f) Memastikan kembali perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi dengan cara memastikan matriks peran hasil yang disusun dapat menggambarkan keterkaitan kinerja individu dengan kinerja organisasi/perangkat daerah;

g) Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja dengan mengungkapkan analisis seluruh pencapaian realisasi kinerja yang diperjanjikan, khususnya dalam memberikan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan juga analisis upaya perbaikan ke depan pada setiap pencapaian kinerja;

h) Mendorong pemanfaatan analisis atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevan dan *achievable* serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;

i) Mendorong evaluator internal untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan cara memberikan temuan dan rekomendasi yang konkret dan sesuai dengan akar permasalahan sehingga ke depannya laporan tersebut dapat dijadikan dasar dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap perangkat daerah;

j) Mendorong pelaksanaan *monitoring* secara berkala terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas yang diberikan kepada perangkat daerah guna memastikan optimalisasi tindak lanjut yang dilakukan;

k) Terkait dengan tema kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk seharusnya menyempurnakan pohon kinerja kemiskinan yang sudah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lapangan yang menyebabkan kemiskinan di wilayah Kabupaten Nganjuk, sehingga dapat diketahui permasalahan kinerja mana saja yang perlu menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan;

l) Mendorong keterlibatan seluruh *stakeholders* di wilayah Kabupaten Nganjuk, baik internal Pemda maupun eksternal, dengan berdasarkan informasi *crosscutting* dan strategi kinerja yang sudah disusun berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki;

m) Pemerintah daerah beserta Bappeda agar melakukan reviu atas seluruh program, kegiatan, serta aktivitas yang ada beserta anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang telah disusun, sehingga dapat diketahui sejauh mana perencanaan dan penganggaran yang telah direncanakan dapat berdampak dalam menurunkan kemiskinan.

E. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah terkait Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan Fasilitas /Infrastruktur wilayah yang berkualitas serta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas, konsumsi, kualitas hidup masyarakat, pergerakan arus orang, barang dan jasa, menciptakan daya tarik investasi dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah. Berikut

beberapa kondisi kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah, sebagaimana telah dijabarkan dalam Subbab Aspek Pelayanan Umum:

1. Jaringan jalan

   Sesuai Panjang jalan kewenangan Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/171/K/411.013/2024 tentang tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, persentase jalan kabupaten nganjuk dalam kondisi mantap fungsional sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 73,94 % atau 1.095,808 Km dari 1.481,997 km (total Panjang jalan kewenangan Kabupaten Nganjuk). Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan untuk mewujudkan kondisi jalan kabupaten mantab fungsional.

2. Jaringan irigasi

   cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik di kabupaten Nganjuk belum 100 %, namun demikian Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan upaya peningkatan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik dari tahun ke tahun. Sebagaimana data pada tabel 2.64, pada tahun 2023 persentase jaringan irigasi kabupaten Nganjuk dalam kondisi baik telah mencapai 82,97% atau meningkat 1,64 % dari cakupan tahun 2022, yang sebesar 81,33%. Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya upaya rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap jaringan irigasi pada 210 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk.

   Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi menyebutkan bahwa irigasi artinya usaha penyediaan, air buat menunjang pertanian.

Jaringan irigasi terdiri atas saluran, bangunan, bangunan pelengkap yang digunakan, serta pembuangan air irigasi. Pada tahun 2020, tingkat keberfungsian jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 79,08%. Angka ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung pengairan lahan pertanian. Pada tahun 2021, capaian tersebut meningkat menjadi 79,88%, menandakan adanya perbaikan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Tren positif ini berlanjut pada 2022 dengan persentase 81,33%, diikuti kenaikan lagi pada 2023 menjadi 82,97%. Memasuki 2024, keberfungsian jaringan irigasi mencapai 84,51%, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 5,43 poin persentase dibandingkan tahun 2020.

3. Rumah Layak Huni

Untuk mendukung daya saing daerah diperlukan dukungan peningkatan kualitas hidup Masyarakat. Adapun Kualitas hidup tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesehatan dan kebahagiaan pribadi, tetapi juga oleh faktor eksternal, termasuk kondisi lingkungan tempat tinggal. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan rumah juga mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel Data Hasil Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2023 terdapat peningkatan jumlah rumah di Kabupaten Nganjuk yang juga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan penunjang fungsi hunian. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga terus berupaya mewujudkan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk melalui kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

4. Sarana prasarana perhubungan penunjang keselamatan lalu lintas

Sektor perhubungan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing suatu daerah melalui peningkatan aksesibilitas. Adapun salah satu Faktor yang menjadi fokus utama pada sektor perhubungan dalam peningkatan Keselamatan lalu lintas. Namun demikian, sebagaimana data pada tabel Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kewenangan Jalan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023) dan table (Data Jumlah Kendaraan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023), angka kejadian kecelakaan sangat fluktuatif dan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan. Adapun kejadian kecelakaan dipengaruhi beberapa hal, diantaranya: peningkatan mobilitas dan volume kendaraan, kondisi kendaraan yang tidak laik jalan kesadaran berlalu lintas masyarakat yang masih kurang, perlengkapan jalan yang masih kurang serta beberapa faktor lainnya. Untuk mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kecelakaan, pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berupaya melaksanakan beberapa kegiatan pencegahan, diantaranya melalui:

a. Penyediaan angkutan sekolah gratis dengan data sebagaimana tabel Data Angkutan Sekolah Gratis Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
b. Pengujian kendaraan bermotor, sebagaimana data pada tabel Data Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
c. Pemenuhan perlengkapan jalan kewenangan kabupaten yang memenuhi standar keselamatan sebagaimana tabel Persentase Pemenuhan perlengkapan jalan;dan

d. Penanganan Perlintasan Sebidang yang belum berpalang pintu, sebagaimana tabel Data Kondisi Perlintasan sebidang di Kabupaten Nganjuk.

F. Pelayanan Publik

Survei kepuasan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 menggunakan aplikasi Sukma E-Jatim didukung dengan pelaporan yang dikirimkan masing-masing perangkat daerah setelah periode pengumpulan data berakhir. Hasil pengolahan data dapat dilihat secara *real time* oleh admin masing-masing pemberi layanan. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu dalam pengolahan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Skala yang digunakan adalah skala nilai (*rating score*). Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat 9 (sembilan) unsur atau indikator yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dan dihitung menggunakan rumus berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berikut Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2024:

Tabel 2.70 Nilai IKM Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

NO.	DATA	TAHUN		
		2022	2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Nganjuk	84,33	85,22	87,29

Sumber : Sekretrariat Daerah 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan

pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Selain dari IKM, kualitas pelayanan publik juga diukur dengan Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Berdasarkan hasil/evapenilaian IPP tahun 2023, aspek pelayanan publik yang perlu diperbaiki antara ain sebagai berikut:

Jenis Layanan : Administrasi

Tahun : 2023

Nilai IPP : 3,87

Tabel 2.71 Rekomendasi Perbaikan

No	Prinsip/Indikator	Catatan
KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)		3,64
1	Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sudah Baik
2	Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.	Perlu Ditingkatkan
3	Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery	Sudah Baik
4	Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.	Sudah Baik
5	Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi)	Sudah Baik
6	SKM yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB	Sudah Baik
7	Jumlah media publikasi hasil SKM.	Sudah Baik
8	Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti	Perlu Ditingkatkan
9	Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan	Prioritas Pembinaan
PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)		3,6
10	Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.	Perlu Ditingkatkan
11	Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.	Sudah Baik
12	Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan	Perlu Ditingkatkan
13	Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.	Perlu Ditingkatkan
14	Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan	Sudah Baik
SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)		4,6
15	Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai	Sudah Baik
16	Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap	Sudah Baik
17	Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai	Sudah Baik
18	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan	Perlu Ditingkatkan
19	Tersedia sarana prasarana penunjang.	Sudah Baik
20	Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan.	Sudah Baik
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)		4,5
21	Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.	Sudah Baik
22	Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.	Sudah Baik

No	Prinsip/Indikator	Catatan
23	Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).	Sudah Baik
24	Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	Sudah Baik
KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)		2,85
25	Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas	Sudah Baik
26	Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.	Sudah Baik
27	Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.	Perlu Ditingkatkan
28	Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	Prioritas Pembinaan
INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)		2,5
29	Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.	Perlu Ditingkatkan
30	Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	Perlu Ditingkatkan

Jenis Layanan : Barang

Tahun : 2023

Nilai IPP : 4,08

Tabel2. 72 Rekomendasi Perbaikan

No	Prinsip/Indikator	Catatan
KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)		3,43
1	Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sudah Baik
2	Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.	Perlu Ditingkatkan
3	Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery	Sudah Baik
4	Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.	Perlu Ditingkatkan
5	Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi)	Sudah Baik
6	SKM yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB	Sudah Baik
7	Jumlah media publikasi hasil SKM.	Sudah Baik
8	Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti	Perlu Ditingkatkan
9	Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan	Perlu Ditingkatkan
PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)		4
10	Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.	Perlu Ditingkatkan
11	Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.	Sudah Baik
12	Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan	Sudah Baik
13	Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.	Perlu Ditingkatkan
14	Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan	Sudah Baik
SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)		4,8
15	Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai	Sudah Baik
16	Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap	Sudah Baik
17	Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai	Sudah Baik

No	Prinsip/Indikator	Catatan
18	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan	Sudah Baik
19	Tersedia sarana prasarana penunjang.	Sudah Baik
20	Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan.	Sudah Baik
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)		3,8
21	Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.	Sudah Baik
22	Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.	Perlu Ditingkatkan
23	Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).	Sudah Baik
24	Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	Perlu Ditingkatkan
KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)		3,45
25	Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas	Sudah Baik
26	Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.	Sudah Baik
27	Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.	Perlu Ditingkatkan
28	Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	Perlu Ditingkatkan
INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)		4,5
29	Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.	Sudah Baik
30	Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	Sudah Baik

Jenis Layanan : Jasa

Tahun : 2023

Nilai IPP : 4,35

Tabel 2.73 Rekomendasi Perbaikan

No	Prinsip/Indikator	Catatan
KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)		4,41
1	Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sudah Baik
2	Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.	Perlu Ditingkatkan
3	Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery	Sudah Baik
4	Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.	Sudah Baik
5	Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi)	Sudah Baik
6	SKM yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB	Sudah Baik
7	Jumlah media publikasi hasil SKM.	Sudah Baik
8	Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti	Sudah Baik
9	Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan	Sudah Baik
PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)		4,2
10	Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.	Sudah Baik
11	Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.	Sudah Baik
12	Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan	Sudah Baik
13	Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.	Sudah Baik
14	Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan	Perlu Ditingkatkan
SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)		4,8
15	Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai	Sudah Baik
16	Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap	Sudah Baik
17	Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai	Sudah Baik
18	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan	Sudah Baik
19	Tersedia sarana prasarana penunjang.	Sudah Baik
20	Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan.	Sudah Baik
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)		4,8
21	Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.	Sudah Baik
22	Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung	Sudah Baik

No	Prinsip/Indikator	Catatan
	operasional pelayanan.	
23	Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).	Sudah Baik
24	Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	Sudah Baik
KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)		4,4
25	Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas	Sudah Baik
26	Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.	Sudah Baik
27	Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.	Sudah Baik
28	Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	Perlu Ditingkatkan
INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)		3
29	Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.	Perlu Ditingkatkan
30	Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	Sudah Baik

G. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat SPM adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara merata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang merupakan hak konstitusional rakyat untuk memperolehnya.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari

Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Oleh karena itu, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM menjadi suatu hal yang sangat penting dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 7 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Pendidikan

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan menjelaskan bahwa dalam pemenuhan capaian SPM Bidang Pendidikan, dalam rangka mengukur tingkat partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang PAUD, Dasar dan Kesetaraan serta mengukur Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional, diperlukan penetapan target pada awal perencanaan tahun 2023.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good government* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan, termasuk urusan bidang

pendidikan. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal bidang pendidikan hadir sebagai tolok ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat di bidang pendidikan. Secara keseluruhan, capaian SPM Pendidikan di Kabupaten Nganjuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun 2024, angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan anak usia dini dapat tercapai dengan baik. Hal ini didasarkan pada perhitungan prosentase antara jumlah anak usia 5-6 tahun yang menempuh jenjang pendidikan anak usia dini (TK dan RA) dibandingkan dengan jumlah seluruh anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Nganjuk yang menjadi sasaran penerima layanan. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\text{APM PAUD} = \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada jenjang PAUD}}{\text{Jumlah sasaran anak usia 5-6 tahun di Kabupaten}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{27.481}{27.481} \text{ x } 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi anak usia 5-6 tahun pada satuan Pendidikan TK dan RA terealisasi sebesar 100%. Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa penduduk usia 5-6 tahun yang menjadi sasaran penerima layanan telah bersekolah secara tepat waktu pada pendidikan anak usia dini.

b. Pendidikan Dasar

Pada Tahun 2024, angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar tercapai sangat tinggi. Hal tersebut didasarkan pada perhitungan prosentase antara anak pada usia 7-15 tahun pada

jenjang SD/MI/SMP/MTs/Sederajat dibandingkan dengan anak usia 7-15 tahun di Kabupaten Nganjuk yang menjadi sasaran penerima layanan. Adapun rumus dan rincian perhitungan sebagaimana pencapaian tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a) Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yaitu:

$$\text{APM Pend. Dasar} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun pada jenjang Pendidikan Dasar}}{\text{Jumlah sasaran anak usia 7-15 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{137.110}{137.110} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut, dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi anak rentang usia 7-15 tahun pada jenjang pendidikan dasar sebesar 100%. Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa penduduk usia 7-15 tahun yang menjadi sasaran penerima layanan telah bersekolah formal secara tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b) Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional yaitu :

Berdasarkan hasil asesmen nasional pada tahun 2024 rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa terealisasi sebesar 80,62%. Dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya telah meningkat sebesar 16,95% dari hasil asesmen pada tahun 2023. Hal ini menjelaskan bahwa peserta didik telah memahami teks dan informasi, kemampuan membaca, kemampuan analisa menggunakan alat perhitungan bilangan yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

c. Pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu jenjang pendidikan non formal yang dimanfaatkan beberapa anak usia sekolah pada rentang usia 7-18 tahun sebagai alternatif jalur pendidikan non formal ketika terdapat peserta didik yang belum mampu untuk menyelesaikan dan menuntaskan pendidikan formal. Jalur pendidikan kesetaraan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam mewujudkan capaian angka partisipasi murni di Kabupaten Nganjuk. Untuk mengetahui realisasi standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

a) Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan yaitu:

$$\text{APM Kesetaraan} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan}}{\text{Jumlah sasaran anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah}} \times 100\%$$

$$= \frac{553}{553} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut, dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi penduduk rentang usia 7-18 tahun pada jenjang pendidikan kesetaraan adalah sebesar 100%. Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formal telah tuntas bersekolah formal secara tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah.

d. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional

Berdasarkan hasil asesmen nasional pada tahun 2024 rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa terealisasi sebesar 63,52%. Dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya telah meningkat sebesar 12,46% dari hasil asesmen pada tahun 2023. Hal ini menjelaskan bahwa warga belajar telah memahami teks dan informasi, kemampuan membaca, kemampuan Analisa menggunakan alat perhitungan bilangan yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang pendidikan secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang sangat tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun hal tersebut masih menyisakan beberapa hal yang memerlukan pemecahan permasalahan, antara lain berkaitan dengan realisasi atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Tabel 2.74 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kab. Nganjuk Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	APS PAUD	100	62.78	62.78	100	87.83	87.83	100	83.22	83.22
2	APS PENDIDIKAN DASAR	100	87.98	87.98	100	99.25	99.25	100	99.18	99.18
3	APS PENDIDIKAN NON FORMAL	100	3.00	3.00	100	3.86	3.86	100	8.55	8.55
4	RATA-RATA KEMAMPUAN LITERASI SD BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	26.21	26.21	100.00	75.28	75.28	100	89.87	89.87	100
5	RATA-RATA KEMAMPUAN LITERASI SMP BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	27.64	27.64	100.00	78.7	78.7	100	84.93	84.93	100
6	RATA-RATA KEMAMPUAN NUMERASI SD BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	51.26	51.26	100.00	59.71	59.71	100	73.87	73.87	100
7	RATA-RATA KEMAMPUAN NUMERASI SMP BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	52.88	52.88	100.00	56.39	56.39	100	81.79	81.79	100
8	IKLIM KEAMANAN SD	2.27	2.27	100.00	72.28	72.28	100	75.31	75.31	100
9	IKLIM KEAMANAN SMP	2.31	2.31	100.00	68.48	68.48	100	69.67	69.67	100
10	IKLIM KEBINEKAAN SD	2.23	2.23	100.00	70.7	70.7	100	75.45	75.45	100
11	IKLIM KEBINEKAAN SMP	2.27	2.27	100.00	68.56	68.56	100	73.81	73.81	100
12	IKLIM INKLUSIVITAS SD	2	2	100.00	57.5	57.5	100	58.28	58.28	100
13	IKLIM INKLUSIVITAS SMP	1.95	1.95	100.00	57.07	57.07	100	55.89	55.89	100
14	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B									
15	Pertumbuhan propersi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1\D IV									

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Pelayanan dasar bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Terdapat 12 jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diampu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 terkait new Posyandu yang bertujuan untuk menjadikan posyandu sebagai pusat layanan masyarakat yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan warga di tingkat kelurahan

Tujuan Utama "New Posyandu":

Transformasi Pelayanan:

Mengubah fokus posyandu yang semula hanya layanan kesehatan, menjadi layanan yang lebih luas.

Peningkatan Kesejahteraan:

Menjadikan posyandu sebagai pusat layanan komprehensif untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Implementasi Kebijakan:

Merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Bagaimana Posyandu Bekerja dalam Konsep Baru:

Mitra Pemerintah:

Posyandu bertindak sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sinérgi Lintas Sektor:

Memerlukan kerja sama dari berbagai lini dan lintas sektor untuk mensukseskan program new posyandu.

Akses Pelayanan Lebih Luas:

Masyarakat akan mendapatkan akses pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berikut kami tampilkan pengukuran pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang kesehatan:

Tabel 2.75 Capaian SPM Bidang Kesehatan

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	pelayanan kesehatan ibu hamil	80,61	79,57	76	77	100
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin	91,64	82,11	85	84	100
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	92,72	90,56	87	87	100
4	pelayanan kesehatan balita	64,15	74,64	80	97	100
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan	96,79	49,26	77	100	100
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif	14,05	23,52	56	81	100
7	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	35,37	49,65	55	86	100
8	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	12,99	14,53	24	43	100

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
9	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	77,96	97,08	101	100	100
10	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	92,02	76,11	133	100	100
11	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	86,89	18,57	32	100	100
12	pelayanan kesehatan orang dengan risikon terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	52,63	105,5	126	100	100

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan menyebutkan bahwa setiap ibu hamil harus mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan standar yang ditetapkan kepada semua ibu hamil di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui capaian standar pelayanan minimal pada ibu hamil di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di Kabupaten}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{9.813}{9.813} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 9.813 orang, sedangkan jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten

Nganjuk sebanyak 9.813 orang. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 100%.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui capaian standar pelayanan minimal pada ibu hamil di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.825}{10.825} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 10.825 orang sedangkan jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten Nganjuk sebanyak 10.825 orang. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 100%.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pemerintah Daerah berkewajiban dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada

bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.814}{10.814} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 10.814 bayi sedangkan jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk sebanyak 10.814 bayi. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 100%.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada balita di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran balita di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{53{,}783}{53{,}783} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 53.783 balita sedangkan jumlah sasaran balita di Kabupaten Nganjuk sebanyak 53.783 balita. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Nganjuk mencapai 100%.

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{143.827}{143.827} \times 100\%$$

= 100%

Pada tahun 2024, jumlah anak usia pendididkan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 143.827 anak sedangkan jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk sebanyak 143.827 anak. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk mencapai 100%.

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada penduduk yang berusia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dilaksanakan melalui edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penduduk usia produktif di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{694,131}{694,131} \times 100\%$$

= 100%

Untuk capaian tahun 2024, jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai

standar adalah sebanyak 694.131 jiwa, sedangkan jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Nganjuk sebanyak 694.131 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk usia produktif mencapai 100%.

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penduduk usia lanjut di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase warga usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah warga berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran warga berusia 60 tahun atau lebih yang ada di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{147{,}739}{147{,}739} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah penduduk lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 147.739 jiwa sedangkan jumlah sasaran warga lansia di Kabupaten Nganjuk sebanyak 147.739 jiwa. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Nganjuk mencapai 100%.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penderita hipertensi di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{214{,}542}{214{,}542} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tercatat sebanyak 214.542 jiwa, sedangkan jumlah estimasi penderita hipertensi di Kabupaten Nganjuk sebanyak 214.542 jiwa. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita hipertensi mencapai 100%.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita diabetes mellitus dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui

hasil capaian standar pelayanan minimal pada penderita diabetes mellitus di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia} \geq 15 \text{ tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{22.841}{22.841} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 22.841 jiwa, sedangkan jumlah estimasi penderita DM di Kabupaten Nganjuk sebanyak 22.841 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita diabetes mellitus mencapai 100%.

j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\text{Jumlah ODGJ berat di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.197}{2.197} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar adalah sebanyak 2.197 orang, sedangkan jumlah penderita ODGJ di Kabupaten sebanyak 2.197 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan kepada ODGJ berat mencapai 100%.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Kasus tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis adalah pasien tuberkulosis yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan contoh uji biologinya (sputum dan jaringan) melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan. Seluruh orang terduga penderita TBC dilakukan pemeriksaan/test lebih lanjut untuk memastikan gejala yang diderita adalah benar-benar TBC. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang terduga penderita tuberkulosis di Kabupaten Nganjuk, maka dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang terduga TBC di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.164}{10.164} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 10.164 orang, sedangkan jumlah orang terduga TBC di Kabupaten sebanyak 10.164 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis mencapai 100%.

l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus = HIV*) yang meliputi: (1) edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, dan (2) skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. Orang yang memiliki risiko terinfeksi virus HIV adalah ibu hamil, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), transgender/waria, pengguna napza suntik (penasun), dan warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang dengan risiko terinfeksi virus

yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) di Kabupaten Nganjuk, maka dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{25{,}234}{25{,}234} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dari 25.234 orang yang beresiko terinfeksi HIV, sebanyak 25.234 orang telah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai

3. Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada bidang urusan pekerjaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yakni:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Pengukuran SPM Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan

perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.203}{4.203} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan sebanyak 4.203 KK sedangkan jumlah rumah tangga di Kabupaten sebanyak 4.203 KK. Dengan demikian, capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 100%.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pengukuran SPM Bidang Air Limbah Domestik adalah persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik} = \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.789}{3.789} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Hingga tahun 2024, jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik adalah sebanyak 3.789 unit. Sedangkan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Nganjuk sebanyak 3.789 unit. Dengan demikian, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai 100%.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenis pelayanan urusan pekerjaan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 2.76 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	99.32%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	98.81%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025, diolah

4. Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada Urusan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten

Perhitungan capaian SPM dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung dengan membandingkan antara jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024 dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024}} \times 100\%$$

$$= \frac{72}{72} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani sebanyak 72 rumah, sedangkan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024 sebanyak 72 rumah. Dengan demikian, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana telah mencapai 100%.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

Perhitungan capaian SPM dalam fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dihitung dengan membandingkan antara rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\text{Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten} = \frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, rumah tangga penerima subsidi uang sewa, dan rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 0 rumah, sedangkan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun 2024 sebanyak 0 rumah.

Dengan demikian, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten telah mencapai 100%.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenis pelayanan urusan perumahan rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 2.77 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	Batas Waktu
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak hun bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	100%	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pencapaian Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan good governance dan good goverment di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk bidang ketentraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum hadir sebagai tolak ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat. Berikut kami tampilkan realisasi pencapaian kinerja Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 :

Tabel 2.78 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**					***100.00%***
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		50	50	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00%**
	JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	131	131	0	100.00%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	10	10	0	100.00%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	78	78	0	100.00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	100.00%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

6. Kebakaran

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan good governance dan good goverment di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk sub urusan kebakaran. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran hadir sebagai tolak ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat. Berikut kami tampilkan realisasi pencapaian kinerja standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran dengan teknis perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota :

Tabel 2.79 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		**TUNTAS UTAMA**			**99.64%**
1 .	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran***				***99.64%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	180	180	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.64%**
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia**	**98.19%**
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	180	176	4	97.78 %
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	0	100.00%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	190	190	0	100.00%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	81	74	7	91.36%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	0	0	0	100.00%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	0	0	0	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

7. Kebencanaan

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Layanan ini terkait dengan tersedianya sarana prasarana yang digunakan sebagai penunjang penanggulangan bencana dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menangani bencana. Indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu:

a. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil *rescue*, dapur umum, tenda posko kesehatan, dan air sanitasi.
b. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana).

Realisasi kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.80 Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	1.144.508	1.144.508	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia**	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100.00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.144.508	1.144.508	0	100.00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	300	300	0	100.00%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	5	5	0	100.00%
2.	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	1.144.508	1.144.508	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	355	355	0	100.00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM)	38	38	0	100.00%
3.	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	12	12	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	0	100.00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	12	12	0	100.00%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana	14	14	0	100.00%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	12	12	0	100.00%

7. Sosial

Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pelayanan dasar yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial. Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
   (1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   (2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial. Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
   (1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   (2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial. Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
   (1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   (2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya. Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
   (1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
   (2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
   (3) Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
   (4) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota. Kriteria penerima layanan rehabilitasi per satu kali kejadian bencana adalah sebagai berikut:
   (1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
   (2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau;
   (3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good government* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata, yang dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk urusan bidang sosial. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal bidang sosial hadir sebagai tolok ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sosial. Berikut

pengukuran pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang sosial:

Tabel 2.81
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	1.113	1.113	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	260	260	0	100.00%
	2. Penyediaan permakanan (orang)	31	31	0	100.00%
	3. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (orang)	5	5	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang (orang)	1	1	0	100.00%
	5. Penyediaan alat bantu (orang)	229	229	0	100.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	5	5	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	260	260	0	100.00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar (orang)	260	260	0	100.00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (orang)	3	3	0	100.00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	1	1	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	31	31	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	3	3	0	100.00%
	13. Layanan rujukan (orang)	24	24	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	5.802	5.802	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	1.440	1.440	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat (orang)	1.440	1.440	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan (orang)	6	6	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang (orang)	6	6	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	5	5	0	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	1.440	1.440	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (orang)	1.440	1.440	0	100.00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (orang)	6	6	0	100.00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	6	6	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	6	6	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	6	6	0	100.00%
	12. Layanan rujukan (orang)	1	1	0	100.00%
3.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	144	144	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	18	18	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2. Penyediaan permakanan (orang)	18	18	0	100.00%
	3. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (orang)	9	9	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang (orang)	9	9	0	100.00%
	5. Penyediaan alat bantu (orang)	1	1	0	100.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	5	5	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	18	18	0	100.00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar (orang)	18	18	0	100.00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (orang)	11	11	0	100.00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	1	1	0	0.00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	18	18	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	11	11	0	100.00%
	13. Layanan rujukan (orang)	7	7	0	100.00%
4.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti***				***100.00%***
	Ya ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khusus nya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	101	101	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	11	11	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat (orang)	11	11	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan (orang)	11	11	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang (orang)	8	8	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	5	5	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	11	11	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (orang)	11	11	0	100.00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan (orang)	3	3	0	100.00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	8	8	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	11	11	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	3	3	0	100.00%
	12. Layanan rujukan (orang)	8	8	0	100.00%
5.	***Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota***				***100.00%***
		Ya Terjadi Bencana			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	641	641	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Penyediaan permakanan (orang)	327	327	0	100.00%
	2. Penyediaan sandang (orang)	130	130	0	100.00%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (orang)	126	126	0	100.00%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (orang)	50	50	0	100.00%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial (orang)	8	8	0	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

H. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia sebagai pengganti Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, akan tetapi masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.



Berdasarkan tujuan SDG's berdasarkan metadata 1 terdapat 15 tujuan yang relavan dengan Kabupaten Nganjuk, yaitu Tujuan 1(Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 15 (Ekosistem Daratan), Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Indikator yang menjadi kewenangan daerah sebesar 220, namun indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk sebesar 203. Indikator yang tidak menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk seperti sektor energi dan indikator terkait IKN. Berikut merupakan tabel indikator yang dieliminasi karena merupakan kewenangan kabupaten yang bukan kewenangan Kabupaten Nganjuk. Kewenangan Kabupaten Nganjuk disesuaikan dengan

kemampuan dan karakteristik wilayah Kabupaten Nganjuk yang diperoleh berdasarkan analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ketercapaian TPB Kabupaten Nganjuk terhadap target nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.82 Tabel capaian indikator TPB Kabupaten Nganjuk

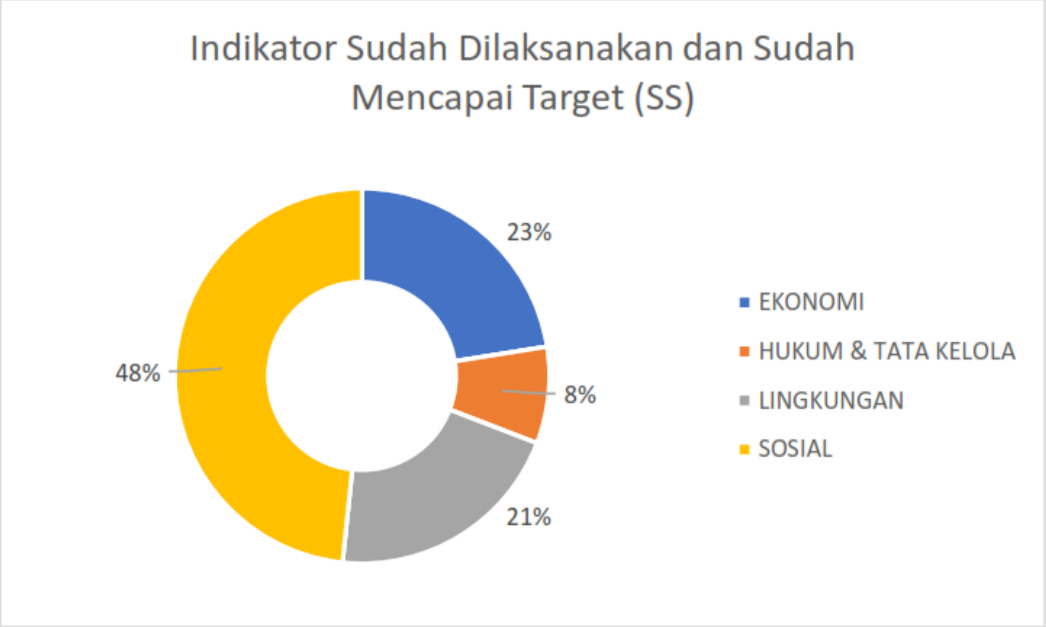
KATEGORI	JUMLAH	%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)	120	59,11
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)	66	32,51
Indikator TPB yang belum dilaksanakan tetapi belum mencapai target (BB)	13	6,4
Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD)	4	1,97
TOTAL	**203**	**100**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan data indikator TPB, dari total 203 indikator, 120 indikator (59,11%) telah dilaksanakan dan mencapai target. Sebanyak 66 indikator (32,51%) sudah dilaksanakan namun belum mencapai target. Selain itu, terdapat 13 indikator (6,4%) yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Terdapat juga 4 indikator (1,97%) yang tidak atau belum terdapat data. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas indikator TPB telah dilaksanakan dengan pencapaian target yang signifikan, meskipun masih ada beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target dalam kategori SS mencerminkan implementasi yang sangat efektif dari rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilakukan dengan baik dan hasil yang diperoleh tidak hanya memenuhi namun juga sebagian telah melebihi standar yang ditetapkan. Selain itu, indikator ini seringkali mencerminkan adanya keberlanjutan dalam pelaksanaan dan pengelolaan, memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipertahankan dalam jangka

panjang. Meskipun indikator sudah mencapai target, evaluasi dan perbaikan terus menerus juga menjadi bagian dari proses, menjaga standar tetap tinggi dan memungkinkan penyesuaian jika diperlukan. Secara keseluruhan, indikator dalam kategori SS menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik, dengan pelaksanaan, hasil, dan pengelolaan yang efektif.

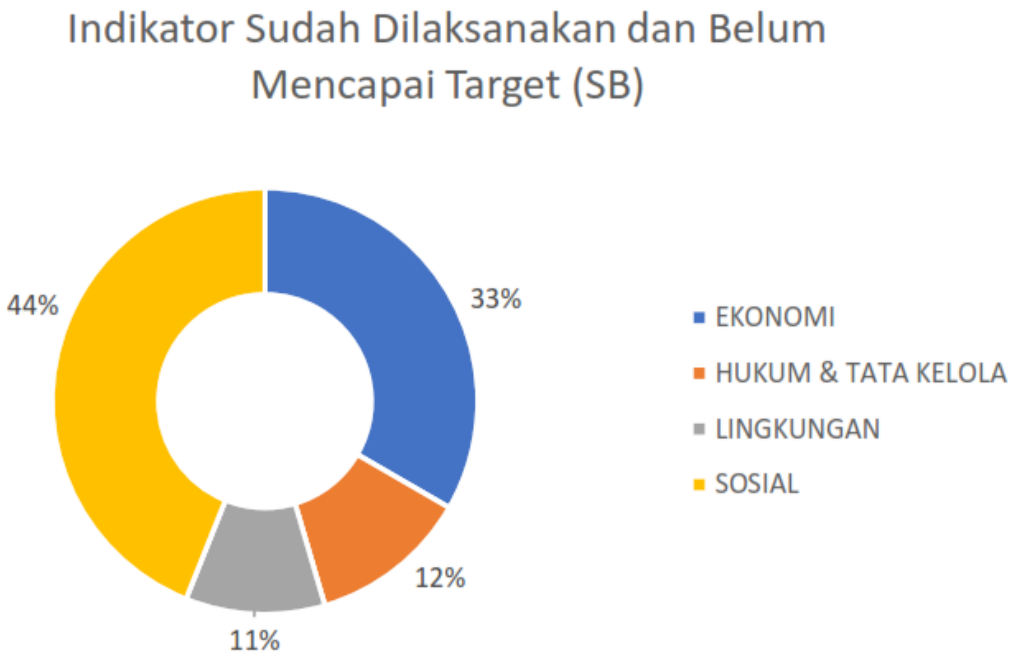


Gambar 2.30 Indikator Yang Sudah Dilaksanakan Dan Mencapai Target

Capaian indikator TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang telah dilaksanakan dan mencapai target dalam kategori SS menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan. Indikator-indikator ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Contohnya, indikator seperti laju pertumbuhan PDB per kapita, prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun, dan persentase rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum layak telah menunjukkan pencapaian yang memuaskan, melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, indikator-indikator terkait

kesehatan seperti angka kematian balita dan prevalensi HIV juga menunjukkan pencapaian yang baik. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dari program dan kebijakan yang telah diimplementasikan, serta menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Data ini menggarisbawahi kemajuan yang telah dicapai dan menyediakan landasan yang solid untuk melanjutkan upaya perbaikan di masa depan.

Indikator yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target dalam kategori SB menunjukkan pencapaian yang baik, meskipun mungkin tidak sama optimalnya dengan kategori SS. Indikator dalam kategori ini menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan yang dilakukan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, tetapi mungkin ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya maksimal. Pencapaian ini mencerminkan pelaksanaan yang efektif dan hasil yang memuaskan, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut atau peningkatan dalam beberapa area. Kategori SB mencakup indikator yang telah memenuhi tujuan yang diharapkan, tetapi mungkin menghadapi tantangan tertentu atau membutuhkan penyesuaian tambahan untuk memastikan keberhasilan yang lebih menyeluruh. Penjelasan ini mencerminkan kemajuan yang signifikan, dengan catatan bahwa proses evaluasi dan perbaikan terus-menerus tetap penting untuk mengoptimalkan hasil dan mencapai standar yang lebih tinggi.

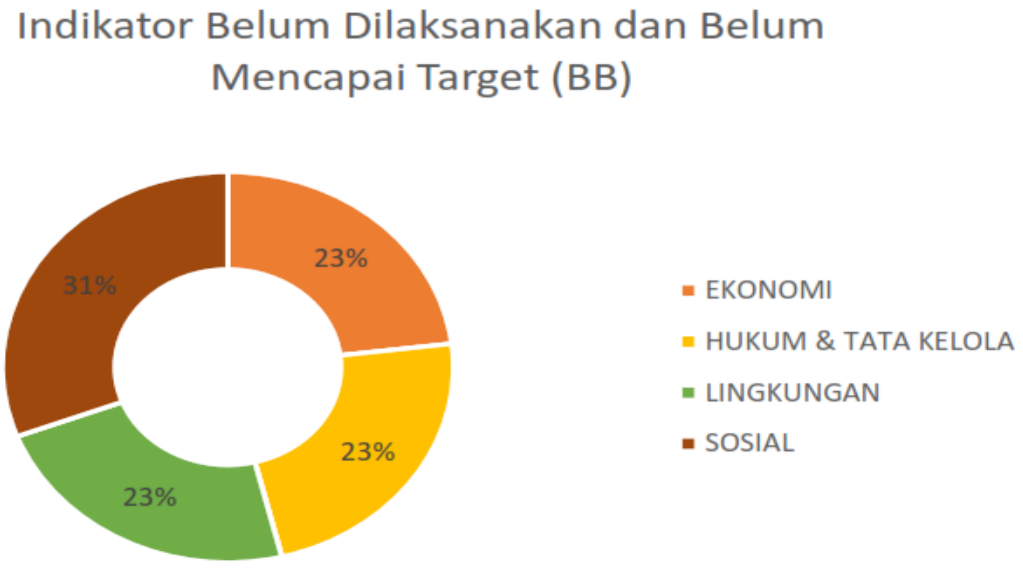


Gambar 2.31 Indikator Yang Sudah Dilaksanakan Dan Belum Mencapai Target

Kesimpulan dari indikator yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Meskipun banyak indikator menunjukkan usaha dan kemajuan, beberapa indikator masih jauh dari target yang ditetapkan, menandakan perlunya upaya yang lebih intensif dan strategi yang lebih efektif. Capaian yang belum memenuhi target mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, yang masing- masing memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan hasil. Hal tersebut termasuk upaya dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah, menurunkan prevalensi malnutrisi dan kekurangan gizi, serta mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, indikator terkait dengan pengelolaan bencana, kualitas lingkungan, dan akses layanan dasar juga menunjukkan perlunya peningkatan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat strategi dan implementasi kebijakan agar dapat mengatasi kekurangan ini dan mencapai target yang telah ditetapkan, demi perbaikan

yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan yang lebih baik di masa depan.

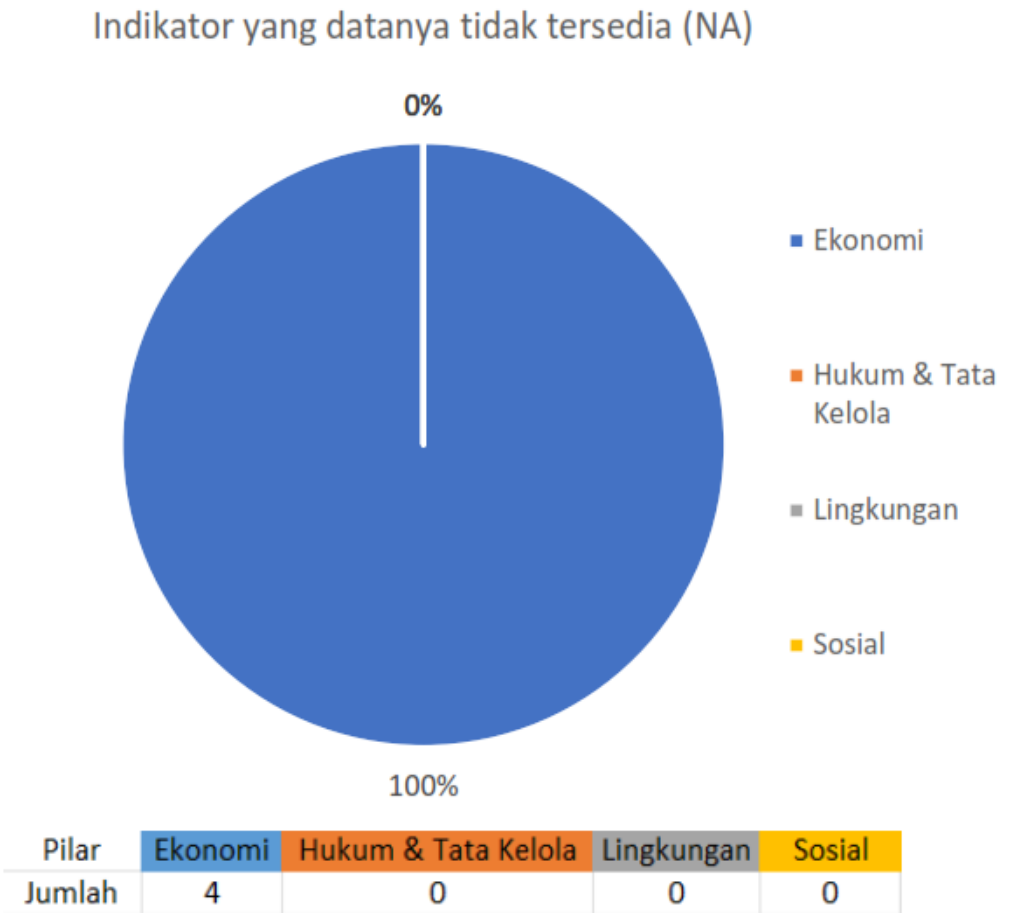
Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB) menunjukkan bahwa terdapat sejumlah aspek atau kegiatan yang belum sepenuhnya diimplementasikan atau belum mencapai hasil yang diharapkan. Kategori ini mencerminkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan atau pencapaian dari indikator yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan untuk memenuhi target ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, hambatan operasional, atau kurangnya koordinasi dan perencanaan yang efektif. Evaluasi dan pemantauan yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab spesifik dari kegagalan tersebut dan untuk merumuskan strategi perbaikan yang dapat mengatasi tantangan yang ada serta memastikan bahwa indikator tersebut dapat direalisasikan secara optimal di masa depan.



Gambar 2.32 Indikator Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Kesimpulan dari tabel capaian indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target menunjukkan adanya sejumlah tantangan signifikan dalam berbagai bidang yang perlu segera ditangani. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek penting seperti akses terhadap layanan air minum aman, penguatan pengurangan risiko bencana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, serta pengelolaan sampah dan energi terbarukan. Belum tercapainya target pada indikator-indikator ini mencerminkan adanya kekurangan dalam implementasi, pengelolaan, atau koordinasi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab utama dari kegagalan tersebut, serta merumuskan langkah-langkah strategis dan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Upaya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan akan sangat penting untuk memastikan bahwa target-target ini dapat tercapai dan mendukung pencapaian tujuan yang lebih luas dalam pengembangan berkelanjutan.

Indikator yang datanya tidak tersedia (TAD) merujuk pada kondisi di mana informasi atau data yang diperlukan untuk mengukur pencapaian indikator tersebut belum dapat diakses atau belum dikumpulkan. Ketidaktersediaan data ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sistem informasi, kurangnya mekanisme pemantauan, atau tantangan dalam pengumpulan data di lapangan. Akibatnya, tidak ada evaluasi atau penilaian yang dapat dilakukan terhadap kemajuan atau pencapaian indikator tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat sistem pengumpulan data, meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait, dan mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dapat tersedia secara tepat waktu dan akurat. Berikut merupakan jumlah indikator yang datanya tidak tersedia.



Pilar	Ekonomi	Hukum & Tata Kelola	Lingkungan	Sosial
Jumlah	4	0	0	0

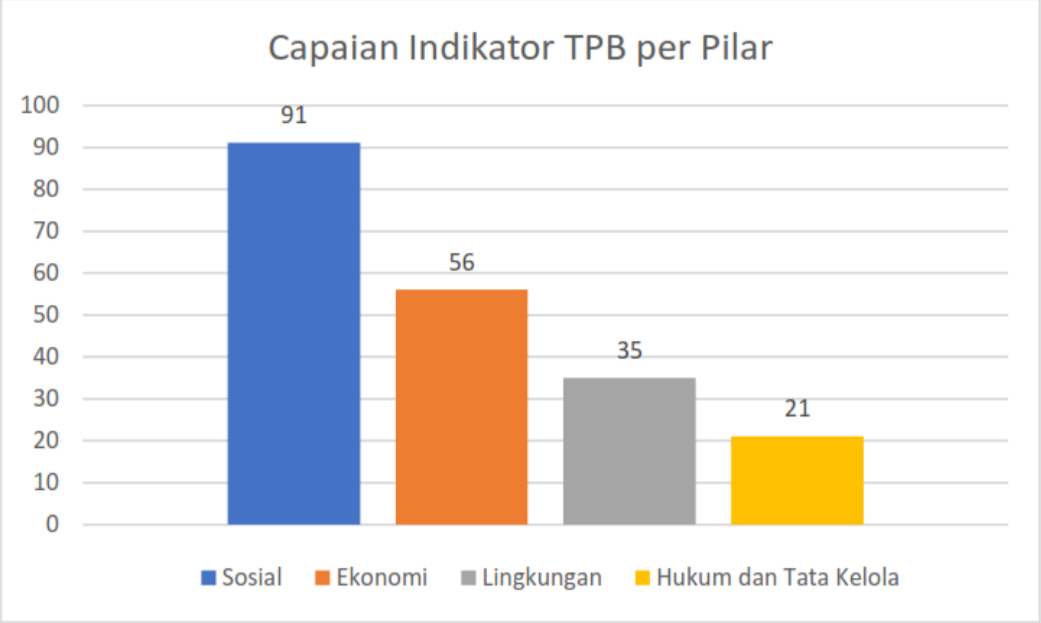
Gambar 2.33 jumlah indikator yang datanya tidak tersedia

Kesimpulan dari tabel indikator yang datanya tidak tersedia menunjukkan adanya kekurangan informasi yang signifikan dalam beberapa area penting yang mempengaruhi evaluasi dan perencanaan. Indikator-indikator seperti intensitas energi primer, akses ke lembaga keuangan, serta proporsi penduduk yang hidup di bawah ambang pendapatan median merupakan elemen kunci dalam pemantauan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketidaktersediaan data untuk indikator-indikator ini menghambat kemampuan untuk melakukan analisis yang komprehensif dan menyusun kebijakan yang berbasis bukti. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengatasi kekurangan dalam

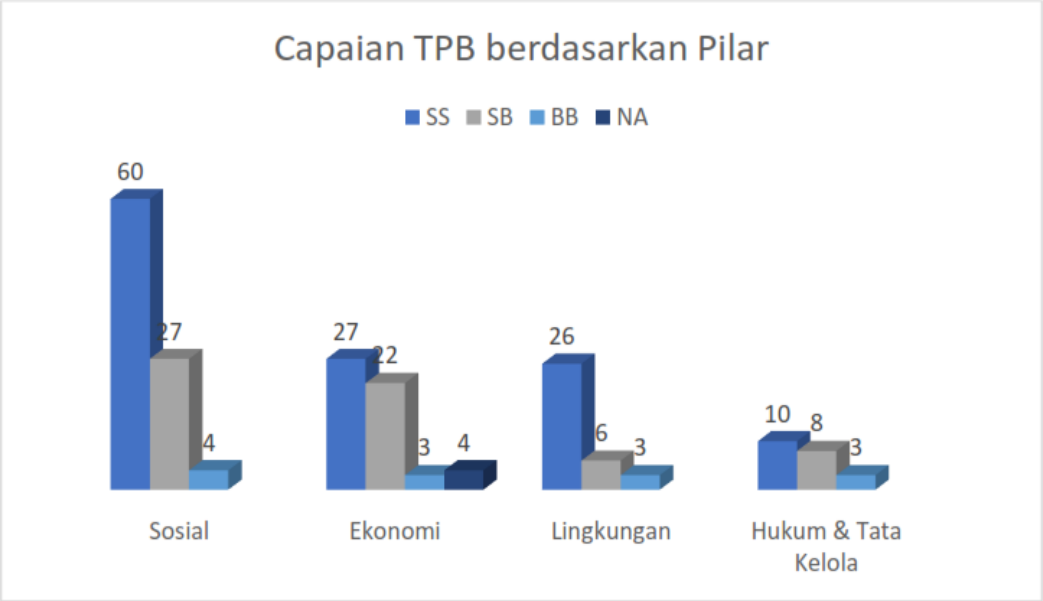
sistem pengumpulan data dan memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia untuk mendukung perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengumpulan data dan memperkuat kapasitas institusi terkait akan sangat penting untuk mengatasi kekosongan informasi terkait.

Capaian Indikator TPB per Pillar

Capaian indikator tujuan pembangunan bekelanjutan berdasarkan pilar terdapat 4 (empat) pilar sosial, lingkungan, ekonomi dan hukum dan tata Kelola. Dari total 220 indikator kewenangan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk sebanyak 203. Terdapat 91 indikator dalam pilar sosial, 35 indikator pilar lingkungan, 56 indikator dalam pilar ekonomi, 21 indikator dalam pilar hukum dan tata Kelola sehingga total indikator berjumlah 203.



Gambar 2.34 Capaian Indikator TPB per Pillar



Gambar 2.35 Capaian TPB Berdasarkan Pillar

Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di dalam bertujuan untuk memastikan terlaksananya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari generasi ke generasi berikutnya. Pilar sosial berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan di Kabupaten Nganjuk terdiri dari 91 indikator dan 5 tujuan. Berdasarkan hasil yang dilakukan, 60 Indikator yang sudah dan mencapai target (SS), 27 Indikator yang sudah dilaksanakan belum mencapai target (SB) dan 4 Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB). Pilar ekonomi berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan di Kabupaten Nganjuk, terdiri dari 59 indikator dan 5 tujuan. Berdasarkan hasil pengkajuan yang dilakukan, terdapat 27 Indikator yang Sudah dan Mencapai Target (SS), 22 Indikator yang Sudah Dilaksanakan Belum Tercapai Mencapai Target (SB), 3 Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB) dan 4 Indikator Tidak Tersedia data (NA). Pilar lingkungan berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan di Kabupaten Nganjuk, terdiri dari 37 indikator dan 5 tujuan. Berdasarkan hasil pengkajuan yang dilakukan, terdapat 26 Indikator yang

Sudah dan Mencapai Target (SS), 6 Indikator yang Sudah Dilaksanakan Belum Tercapai Mencapai Target (SB), 3 Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB) serta tidak ada Indikator yang tidak tersedia data (NA). Pilar hukum dan tata Kelola berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan di Kabupaten Nganjuk terdiiri dari 21 indikator dan 1 tujuan. Berdasarkan hasil pengkajuan yang dilakukan, terdapat 10 Indikator yang Sudah dan Mencapai Target (SS), 8 Indikator yang Sudah Dilaksanakan Belum Tercapai Mencapai Target (SB) dan 3 Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB).

I. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

I.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Selama lima tahun terakhir, capaian bidang pendidikan dapat dilihat dari indikator-indikator semakin meningkatnya angka kelulusan di tiap jenjang pendidikan dari SD hingga SMP/MTs, angka putus sekolah yang semakin menurun setiap tahun, angka kelulusan yang semakin meningkat di seluruh jenjang, dan persentase guru yang memiliki kualifikasi sarjana juga semakin meningkat. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kabupaten Nganjuk sangat dinamis dan mampu bersaing dengan daerah lain. Angka Partisipasi Murni salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan karena dapat meningkatkan nilai indeks pendidikan yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia. Angka APM di Kabupaten Nganjuk di atas angka rata-rata APM Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun belakangan ini.

Beberapa Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah rasio siswa terhadap daya tampung sekolah,

kelayakan sarana dan prasarana, serta kualitas pendidik. Pencermatan atas dasar sebaran Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata lama sekolah memiliki definisi yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Indikator kinerja ini diperuntukkan untuk mengukur indeks pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Realisasi kinerja rata-rata lama sekolah di Kabupaten Nganjuk sebesar 8,25. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki komitmen, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah serta angka melanjutkan sekolah. Peningkatan kedua komponen tersebut, diharapkan memberikan peluang dan harapan bagi seluruh penduduk usia sekolah untuk dapat bersekolah secara tepat waktu dan melanjutkan pendidikan sampai dengan ketuntasan wajib belajar 12 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator kinerja ini diperuntukkan untuk mengukur indeks pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Data realisasi harapan lama sekolah sebesar 13,18. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Nganjuk memiliki harapan lama sekolah sampai dengan pendidikan tinggi.

Dari aspek kualitas Pendidikan, Pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di Kabupaten Nganjuk, memiliki peserta didik yang telah mencapai kompetensi literasi minimum. Satuan pendidikan tersebut telah berhasil dalam meningkatkan kompetensi peserta didik dalam mengintegrasikan

beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks.

Selain dari sisi literasi, kompetensi numerasi juga tak kalah penting. Pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di Kabupaten Nganjuk memiliki peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum pada numerasi. Satuan pendidikan tersebut telah berhasil dalam meningkatkan kompetensi peserta didik dalam mengaplikasikan konsep matematik yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Akan tetapi hal yang harus digarisbawahi adalah masih ada sekitar 30% peserta didik baik jenjang pendidikan dasar yang belum memiliki kompetensi literasi dan numerasi minimum.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur capaian kinerja bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan mendasar.

Tabel 2.83 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Sederajat	99.62	99.62	99.96	99.75	100
SMP/MTs/Sederajat	99.4	99.36	97.76	97.9	95.31
SMA/SMK/MA/Sederajat	81.19	83.19	84.17	85.2	91.1

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Tabel 2.84 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Sederajat	98.14	98.23	99.96	99.75	100
SMP/MTs/Sederajat	90.53	90.64	90.53	90.09	88.71
SMA/SMK/MA/Sederajat	64.04	65.35	65.16	71.75	73.3

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

b. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menggambarkan jumlah murid yang dapat menyelesaikan tingkatan pendidikan tertentu.

Tabel 2.85 Jumlah Kelulusan Sekolah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Siswa Tingkat Akhir SD/MI	17.499	16.449	17.506	16.776	12,529
2	Lulusan Jenjang SD/MI	17.499	16.449	17.506	16.776	12,529
3	Jumlah Siswa Tingkat Akhir SMP/MTs	16.039	16.548	17.714	16.720	11.575
4	Lulusan Jenjang SMP/MTs	16.022	16.527	17.714	16.720	11.575

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2024

c. Rasio Guru/Murid

Rasio Guru/Murid dalam hal ini adalah perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid untuk masing-masing tingkat pendidikan di Kabupaten Nganjuk tahun 2020-2024.

Tabel 2.86 Rasio Guru terhadap Murid dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	1: 14,13	1: 13,62	1: 12,88	1: 12,78	1 : 11,89
SMP	1: 13,70	1: 14,07	1: 14,57	1: 14,28	1 : 13,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2024

Rasio guru terhadap jumlah siswa di Kabupaten Nganjuk pada semua jenjang pendidikan sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, yaitu setiap 1 (satu) orang guru berbanding dengan 13-17 orang siswa. Dalam

beberapa waktu ke depan, SPM ini akan ditingkatkan lagi melalui peningkatan kualitas guru.

d. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menggambarkan jumlah siswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkatan tertentu *(Drop Out)*. Angka putus sekolah di Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami perbaikan. Angka putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2017. Namun pada tahun-tahun selanjutnya, angka putus sekolah tersebut berhasil ditekan hingga angka nol.

Tabel 2.87 Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Anak Sekolah SD/MI	98.347	96.649	95.551	92.254	95,513
2	Jumlah anak Putus Sekolah SD/MI	0	0	0	368	188
3	Jumlah Anak Sekolah SMP/MTs	49.772	51.619	51.648	51.479	52,257
4	Jumlah anak Putus Sekolah SMP/MTs	0	0	0	0	735

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2024

e. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh

kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran

Tabel 88 Angka Melek Huruf Tahun 2020-2024

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Melek Huruf	93,59	92,25	92,49	94,17	100

f. Profesionalitas Guru

Guru merupakan salah satu faktor strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan karena gurulah yang meletakkan dan mempersiapkan dasar perkembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa. Untuk melaksanakan itu, tentu diperlukan guru yang berkualitas dan dan berdedikasi tinggi. Tabel di bawah menggambarkan kualitas guru di Kabupaten Nganjuk. Ada sebagian kecil guru SD/MI dan SMP/MTs yang belum berijazah minimal S1 atau D4.

Tabel 2.89 Kualifikasi Guru di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020–2024

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Guru SD/MI	6.962	7.096	7.416	7.782	7.413
2	Guru SD Berijazah S1/D IV	6.506	5.021	5.011	7.454	6.867
3	Jumlah Guru SMP/MTs	3.633	3.668	3.543	3.732	3.573
4	Guru SMP Berijazah S1/D IV	3.339	2.093	1.787	2.458	3.592

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2024

g. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel 2.90 Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Anak Sekolah TK/RA	41.598	40.674	31.157	39.651	29.190
2	Jumlah Usia 4 – 6	34.572	34.572	30.265	45.261	29.977

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2024

3. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi peningkatan SDM, pada calon generasi penerus, sejak dari kandungan dan balita. Indikator bidang kesehatan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.91 Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 200 – 2024

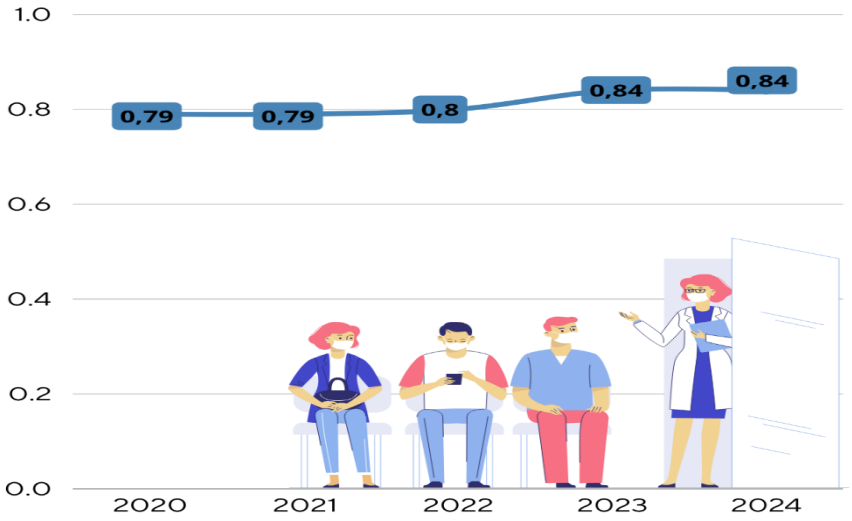
No	Data	2020	2021	2022	2023	2024	Ket
1	Persentase balita gizi buruk	1,74	1,48	1,16	0,79	0,60	Persen
2	Persentase balita gizi kurang	7,55	7,47	6,89	4,4	5,20	Persen
3	Cakupan desa siaga aktif	0	19	9	21	21	Jumlah
4	Usia Harapan Hidup	73,85	73,90	74,17	74,43	74,64	Persen
5	Angka Kematian Ibu (AKI)	83	226,43	167,24	129,33	90,52	Per 100.000 Kelahiran hidup

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024	Ket
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	0	25,3	20	17,1	5,4	Persen
7	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	79	95	92	92	92	Persen
8	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	34	32	50	100	94	Persen
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	74,19	74,18	77,24	95,17	96,88	Persen

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan data diatas hal yang harus menjadi fokus adalah terkait penanganan stunting. Kondisi stunting di Kabupaten Nganjuk masih menjadi perhatian, meskipun ada tren penurunan. Namun, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, termasuk intervensi gizi, penyuluhan, dan pendampingan. Selain itu, belum 100%nya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional menjadi permasalahan terkait aksesbilitas dan penyediaan layanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.

Indeks kesehatan merupakan indikator yang mengukur status kesehatan masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai indikator, termasuk persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, tingkat pemanfaatan layanan kesehatan, dan indikator kesehatan lain seperti harapan hidup.



Gambar 2.36 Indeks Kesehatan kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2025

Tabel 2.92 Jumlah Kematian Bayi, Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023

No	Data	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kematian Bayi	102	117	70	163	76
2	Jumlah Kematian Ibu	9	12	30	21	16
3	Jumlah Kelahiran Hidup	14.192	14.376	13.249	12.271	12.371

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2024

Dari data angka kematian bayi tahun 2018-2023 tercatat jumlah kematian bayi mengalami kenaikan dari angka 104 pada tahun 2018 dan 163 pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 76 kasus. Sedangkan jumlah kelahiran hidup cenderung menurun, di tahun 2018 ada sebanyak 15.458 kelahiran dan di tahun 2023 adalah 12.371 kelahiran. Menurunnya jumlah kelahiran merupakan dampak dari menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR).

Kematian ibu tahun 2017-2020 berfluktuasi pada kisaran 11-13 jiwa. Akan tetapi pada tahun 2021 angka kematian ibu naik signifikan sebanyak 30 kasus, tetapi pada tahun 2023 menurun menjadi sebanyak 16 kasus.

Tabel 2.93 Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023

No	Data	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Balita Gizi Buruk (jiwa)	5.308	5.354	7.776	618	402
2	Persentase balita *stunting*)* (%)	11,87	11,02	11.9	7.17	5.7
Jumlah Balita		61.186	51.974	65.342	72.919	57.574

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2024

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nganjuk, dari data dinas kesehatan Kabupaten Nganjuk tahun 2023, angka balita gizi buruk ada sebanyak 402 kasus.

Status balita *stunting* di Kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan setiap 5 tahun, di tahun 2013 mencapai 44,3% dan di tahun 2018 menurun menjadi 29,7%. Angka ini relatif tinggi sehingga sejak tahun 2018 Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebagai 100 daerah kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi prioritas dalam penanganan *stunting*. Berdasarkan pada tabel 2.39 terlihat bahwa prevalensi balita *stunting* pada tahun 2019 sebesar 11,87% dan di tahun 2021 naik menjadi 11,9% dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,17% dan tahun 2023 turun menjadi 5,7%. Jika di Bandingkan dengan hasil rekesdas selisihnya dengan hasil pada bulan timbang memang cukup besar, tetapi yang jelas bahwa *stunting* masih menjadi masalah di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 2.94 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023

No	Data	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ibu Hamil	16.619	16.434	15.678	15.519	15.400
2	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kunjungan	12.950	13.247	12.451	11.838	11.916
Cakupan (%)		77,9	80,6	79.4	76.28	77.4

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2024

Dari data cakupan ibu hamil Kabupaten Nganjuk tahun 2019 -2023 tercatat jumlah ibu hamil terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 16.619 orang dan ibu hamil yang mendapatkan kunjungan tertinggi pada tahun 2020 dengan angka 13.247 (80,6%). Jumlah kehamilan setiap tahun terus menurun dan terendah pada tahun 2023 sebesar 15.400 kehamilan.

Tabel 2.95 Desa dengan cakupan UCI di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023

No	Data	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Kelurahan	284	284	284	284	284
2	Desa/Kelurahan Cakupan UCI	262	242	209	247	263
Cakupan		92,3	85,2	73,6	96.64	99.6

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2024

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proyeksi sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Data Desa dengan Cakupan UCI Tahun 2019-2023 terlihat pada tabel di atas. Tahun 2019 dari sejumlah 284 Desa/Kelurahan cakupan UCI yaitu 262, tahun 2020 cakupan UCI 242, pada tahun 2021 menurun menjadi 209, tahun 2022 menjadi 247 dan terakhir tahun 2023 yaitu 263.

Tabel 96 Prevalensi HIV di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023

No	Data	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penderita HIV yang Masih Hidup	169	113	185	269	139
Prevalensi		0,016	0,011	0.012	0.02532	0.01306

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2024

Dari data ini, terlihat fluktuasi dalam jumlah penderita HIV yang masih hidup dan prevalensinya setiap tahun. Jumlah penderita HIV tertinggi tercatat pada tahun 2022, yaitu 269 orang, dengan prevalensi tertinggi juga pada tahun yang sama sebesar 0,02532. Pada tahun 2023, jumlah penderita menurun menjadi 139 orang, dengan prevalensi sebesar 0,01306

Tabel 2.97 Prevalensi Penderita Kusta di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023

No	Data	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Temuan Baru (PB + MB)	5	20	10	30	28

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2024

Indikator ini menunjukkan jumlah kasus kusta terdaftar Pausi Basiler (PB) maupun Multi Basiler (MB) pada saat tertentu per 10.000 penduduk. Di Kabupaten Nganjuk pada data Prevalensi Penderita Kusta 2019-2023, jumlah temuan baru (PB + MB) paling tinggi ada pada tahun 2022 dengan 30 kasus.

Tabel 2.98 Jumlah Kasus TB Per Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023

No	Data	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus TB	1.028	711	443	1050	1464

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2024

Angka kematian bayi dan ibu melahirkan menunjukkan tren yang naik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pelayanan dasar kesehatan, sehingga mampu menekan kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Bila dibandingkan dengan capaian SDGs (12 per 1000 kelahiran hidup) maka angka tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan. Demikian pula angka kematian ibu melahirkan yang standar capaian SDGs (70 per 100.000) maka angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Nganjuk 129,3 pada tahun 2023 masih jauh berada di atas target.

Capaian bidang kesehatan yang paling tampak adalah pada penurunan angka balita gizi buruk, penduduk yang memanfaatkan Puskesmas, dan peningkatan rumah sehat.

a. Jumlah Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, dan diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Ketersediaan rumah sakit diukur dari rasio jumlah rumah sakit dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.99 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Nganjuk

Tahun	Fasilitas Kesehatan				
	RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Tempat Tidur	Klinik
2019	5	20	82	1.023	31
2020	5	20	82	1.054	31
2021	5	20	82	961	34
2022	5	20	82	905	36
2023	5	20	82	874	46

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kab.Nganjuk 2024

b. Jumlah Tenaga Medis

Tenaga medis di rumah sakit yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk sangat menentukan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Tenaga medis merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat menerima pelayanan kesehatan. Berikut adalah data secara lengkap mengenai jumlah tenaga medis pada tahun 2023:

Tabel 2.100 Jumlah Tenaga Medis di Puskesmas Tahun 2023

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
BAGOR	3	10	30	1	1
BARON	5	16	20	1	2
BERBEK	3	19	35	5	1
GONDANG	3	13	24	2	1
JATIKALEN	3	6	12	2	1
KERTOSONO	21	209	81	26	10
LENGKONG	2	19	22	2	2
LOCERET	2	20	32	1	1
NGANJUK	39	554	127	75	18
NGETOS	3	16	17	2	1
NGLUYU	4	8	14	3	2
NGRONGGOT	4	25	26	0	2
PACE	1	12	30	2	1
PATIANROWO	3	10	22	2	1
PRAMBON	4	15	25	3	1
REJOSO	2	23	34	0	1
SAWAHAN	3	15	17	2	0
SUKOMORO	3	16	22	1	1
TANJUNGANOM	3	23	30	1	0
WILANGAN	3	16	20	1	0
TOTAL	114	1045	640	132	47

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2024

Tabel 2.101 Jumlah Tenaga Medis Dinas Kesehatan dan RSU Tahun 2023

No	Tenaga Kesehatan	Dinkes	RSU Nganjuk	RSU Kertosono
1	Dokter Spesialis	0	34	26
2	Dokter Umum	59	18	18
3	Dokter Gigi	15	2	2
4	Apoteker	13	11	4
5	Ahli Gizi	23	11	8
6	Bidan	536	45	59
7	Perawat	303	315	197
8	Asisten Apoteker/SMF/Ak.F	23	21	12
9	Asisten Rontgen /APRO	0	0	0
10	Kesehatan Masyarakat (SKM)	7	4	1
11	Analisis kesehatan/pranata laboratorium kesehatan	26	22	13
12	Fisioterapis	0	0	0
13	Rekam Medik	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2024

4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan prasarana wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan energi serta sarana dan prasarana dasar permukiman merupakan aspek utama dalam pembangunan suatu daerah serta memiliki peran yang penting bagi peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

a. Penyelenggaraan Jalan

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan diarahkan untuk mewujudkan kondisi jaringan jalan yang mantap dalam mendukung konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Menindaklanjuti penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, pada tahun 2023 telah diundangkan Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya dan Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 dan 188/210/KPTS/013/2023. Beberapa Perubahan peraturan perundangan tersebut juga mengamanatkan perlunya perubahan terhadap penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten. Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan terkait penyelenggaraan jalan serta dalam rangka menjamin

ketertiban dan pemerataan penyelenggaraan jalan, maka pada tahun 2024 ditetapkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/171/K/411.013/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten sebagai pengganti Keputusan Bupati Nomor 188/21/K/411.013/2016. Adapun sesuai Keputusan Bupati Nomor 188/171/K/411.013/2024, jalan Kabupaten tersebut yang tersebar di 20 Kecamatan dengan panjang ruas 1.481,997 km, panjang jalan ini selanjutnya menjadi bahan perencanaan pembangunan di sektor penyelenggaraan jalan.

Selama kurun waktu 2020-2024, pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berupaya melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan dan bangunan perlengkapannya untuk mewujudkan kondisi jalan kabupaten mantab fungsional, dengan data realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.102 Capaian Kinerja Pengelolaan Prasarana Jalan Tahun 2020 - 2024 (Persen)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan kabupaten (km)	1.153,482	1.153,482	1.153,482	1.153,482	1.481,997
Realisasi jalan dalam kondisi mantap	982,923	1.004,358	1.016,419	1.095,808	1.072,820
Tingkat kemantapan jalan (%)	85,21	87,07	88,12	95,00	73,29

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk, 2024

Berdasarkan tabel diatas, sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/171/K/411.013/2024, Panjang jalan kewenangan Kabupaten Nganjuk bertambah sepanjang 328,515 Km dari Panjang jalan sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/21/K/411.013/2016. Bertambahnya panjang jalan kewenangan Kabupaten Nganjuk memiliki

konsekuensi pada penurunan persentase panjang jalan dalam kondisi mantab fungsional. Disamping itu pada penyelenggaraan jalan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan jalan dan jembatan diantaranya akibat penurunan kondisi jalan dan jembatan akibat umur rencana dan beban berlebih, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas jalan secara berkelanjutan

b. Perkembangan Jaringan Irigasi

Pengelolaan jaringan irigasi dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan air irigasi guna mendukung ketahanan/ kedaulatan pangan dengan meningkatkan produksi padi. Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaanya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi, Kabupaten Nganjuk memiliki 210 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk, dengan luas total 14.951 Ha, adapun daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, panjang total jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk adalah 400.401 m, berikut data kinerja pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan melalui

Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, Optimalisasi jaringan irigasi, serta Rehabilitasi jaringan irigasi:

Tabel 2.103 Jaringan Irigasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Nganjuk (m)	400.401	400.401	400.401	400.401	400.401
2	Panjang Jaringan Irigasi yang di tingkatkan	33.040,65	3.200	5.800	6.580	6.15
3	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	316.627	319.827	325.657	332.237	338.387
4.	Persentase jaringan irigasi kondisi baik (%)	79,08	79,88	81,33	82,97	84,51

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk, 2024

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa jaringan irigasi belum 100 % dalam kondisi baik, sehingga diperlukan upaya peningkatan melalui rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap jaringan irigasi untuk menunjang pemenuhan irigasi pada 14.951 Ha daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Panjang total jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk dari tahun 2020 hingga 2024 tercatat tetap sebesar 400.401 meter. Meskipun panjang keseluruhan tidak berubah, upaya peningkatan jaringan irigasi terus dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan mencapai 33.040,65 meter, kemudian pada 2021 sebesar 3.200 meter, 2022 sebesar 5.800 meter, 2023 sepanjang 6.580 meter, dan 2024 sebesar 6.150 meter.

Kondisi jaringan irigasi yang baik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik tercatat 316.627 meter atau

79,08% dari total jaringan. Angka ini naik menjadi 319.827 meter (79,88%) pada 2021, lalu menjadi 325.657 meter (81,33%) di 2022. Pada 2023, jumlahnya bertambah lagi menjadi 332.237 meter (82,97%), dan di 2024 mencapai 338.387 meter atau 84,51% dari total jaringan.

Selain meningkatkan daya guna air, pengelolaan jaringan irigasi juga diarahkan untuk mengendalikan daya rusak air. Melalui program pengendalian banjir telah dilaksanakan.

Tabel 2.104 Ketersediaan Air Irigasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

No	Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Kebutuhan Air Irigasi Berdasarkan Rencana Tanam (liter/Detik)	46.180	46.546	43.229	43,229	42,377
2	Total ketersediaan air irigasi yang sampai di petak tersier (liter/Detik)	25.566	26.836	27.548	27,548	29,730
3	Realisasi ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam (liter/Detik)	29.401	30.861	31.680	32,96	36,257

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk, 2024

Berdasarkan data di atas ketersediaan air irigasi di petak tersier cukup besar. Namun jika dilihat dari total kebutuhan dan realisasi air irigasi di musim tanam masih mengalami defisit. Artinya ke depan Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan berusaha untuk memperbaiki tata kelola air irigasi, sehingga jumlah kebutuhan air irigasi di musim tanam dapat tercukupi.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pengelolaan irigasi diukur dengan Indeks Kinerja Saluran Irigasi (IKSI). IKSI merupakan penilaian untuk mengetahui kondisi kinerja irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mendukung produktivitas pertanian. Pengukuran IKSI berdasarkan petunjuk Peraturan menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/ PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, meliputi 6 indikator dengan dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

1) Prasarana Fisik (45%);
2) Produktivitas tanam (15%);
3) Sarana Penunjang (10%);
4) Organisasi personalia (15%);
5) Dokumentasi (5%);
6) Kondisi Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (10%).

Dengan kriteria Penilaian mengacu pada Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015, sebagai berikut:

(1) Nilai IKSI 80%-100%: Kinerja Sangat Baik (SB)
(2) Nilai IKSI 70%-79%: Baik (B)
(3) Nilai IKSI 55%-69%: Kinerja Kurang (K) dan perlu perhatian
(4) Nilai IKSI <55%: Kinerja Jelek (J) dan perlu segera penanganan

Adapun IKSI Kabupaten Nganjuk didapatkan dari rata rata nilai IKSI 210 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah Irigasi. Berikut Realisasi IKSI Kabupaten Nganjuk Tahun 2024:

Tabel 2.105 Indeks Kondisi Sistem Irigasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha)	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)				Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)
			Baik (Ha)	Rusak Ringan (Ha)	Rusak Sedang (Ha)	Rusak Berat (Ha)	Jumlah
							Nilai Maks 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asem Linting	18	4	4	2	9	54
2	Badong I	10	9	1	1	1	75
3	Badong II	6	5	0	0	0	73
4	Balongrejo	159	80	32	24	24	76
5	Banaran	29	25	1	1	1	74
6	Bangun	2	2	0	0	0	74
7	Batu	4	3	0	0	0	76
8	Bedrek	298	149	60	45	45	75
9	Bendolo I	10	9	1	1	1	75
10	Bendolo II	22	19	1	1	1	76
11	Beru	57	11	11	6	29	53
12	Besuk	248	62	50	12	124	58
13	Blimbing	3	3	0	0	0	75
14	Bodo	116	58	23	17	17	71
15	Bomo I	62	53	3	3	3	74
16	Bomo II	18	12	2	3	2	64
17	Brono I	4	3	0	0	0	75
18	Brono II	3	2	0	0	0	65
19	Cepoko	30	26	2	2	2	75
20	Clanget	11	7	1	2	1	65
21	Curik	6	5	0	0	0	76
22	Dadapan	41	31	2	4	4	70
23	Dam Banaran	687	584	34	34	34	73
24	Demangan I	21	4	4	2	11	55
25	Demangan II	32	6	6	3	16	54
26	Dokerso	109	93	5	5	5	74
27	Dukun	26	22	1	1	1	76
28	Gambyok I	13	11	1	1	1	74
29	Gambyok II	14	9	1	2	1	65
30	Gambyok III	16	14	1	1	1	76
31	Ganter	2	2	0	0	0	70
32	Gawok	74	37	15	11	11	76
33	Gayam	5	4	0	0	0	75
34	Gayu	26	22	1	1	1	76
35	Gedang Klutuk	18	12	2	3	2	64

No.	Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha)	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)				Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)
			Baik (Ha)	Rusak Ringan (Ha)	Rusak Sedang (Ha)	Rusak Berat (Ha)	Jumlah
							Nilai Maks 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Gedong I	4	3	0	0	0	74
37	Gedong II	8	4	2	1	1	70
38	Gendingan I	18	12	2	3	2	65
39	Gendingan II	8	5	1	1	1	65
40	Gendingan III	5	4	0	0	0	75
41	Genjeng	86	56	9	13	9	66
42	Gilis I	160	136	8	8	8	75
43	Gilis II	135	88	14	20	14	63
44	Gimbal I	3	3	0	0	0	76
45	Gimbal II	3	1	1	0	2	59
46	Girirejo	213	138	21	32	21	64
47	Glagah Ombo	13	7	3	2	2	71
48	Glodok	25	16	3	4	3	64
49	Guwo Budeh	15	13	1	1	1	75
50	Guwo Landak	18	9	4	3	3	71
51	Jabon	24	20	1	1	1	75
52	Jambu	20	15	1	2	2	70
53	Jasem	5	4	0	0	0	75
54	Jati I	22	19	1	1	1	76
55	Jati II	5	3	1	1	1	64
56	Jati Rejo	12	8	1	2	1	64
57	Jeruk	26	13	5	4	4	70
58	Jetis	227	136	45	23	23	78
59	Jolotundo	25	16	3	4	3	65
60	Joso	364	309	18	18	18	75
61	Jurang Jungkel	23	20	1	1	1	76
62	Jurang Jungkel I	20	10	4	3	3	70
63	Jurang Kunci	12	8	1	2	1	63
64	Juwet	27	20	1	3	3	71
65	Juwok	14	9	1	2	1	64
66	Juwok I	6	4	1	1	1	64
67	Juwok II	4	3	0	1	0	66
68	Juwok III	12	6	2	2	2	69
69	Juwok IV	14	7	3	2	2	70
70	Juwok V	13	8	1	2	1	66
71	Juwok VI	18	9	4	3	3	70
72	Juwok VII	20	5	4	1	10	55

No.	Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha)	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)				Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)
			Baik (Ha)	Rusak Ringan (Ha)	Rusak Sedang (Ha)	Rusak Berat (Ha)	Jumlah
							Nilai Maks 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Kajar	38	32	2	2	2	75
74	Kali Tunggak	3	3	0	0	0	76
75	Kalianjok	266	200	13	27	27	69
76	Kapas	483	97	97	48	242	53
77	Karangsono	17	14	1	1	1	75
78	Kebon Agung	74	44	15	7	7	79
79	Ked. Padang	35	30	2	2	2	75
80	Kedung Bengkah	2	2	0	0	0	70
81	Kedung Krangkeng	7	6	0	0	0	76
82	Kedung Kudi	183	156	9	9	9	75
83	Kedung Ringin	3	2	0	0	0	68
84	Kedung Sengon	439	263	88	44	44	79
85	Kedung Soko	788	670	39	39	39	74
86	Kemukus	26	22	1	1	1	74
87	Ketandan	757	379	151	114	114	71
88	Klati	158	32	32	16	79	53
89	Klili I	15	10	2	2	2	65
90	Klili II	24	18	1	2	2	71
91	Klili III	24	16	2	4	2	65
92	Klonggean I	46	39	2	2	2	75
93	Klonggean II	111	94	6	6	6	75
94	Kobong I	13	7	3	2	2	71
95	Kobong II	56	48	3	3	3	74
96	Kobong III	9	8	0	0	0	74
97	Kopen	14	7	3	2	2	70
98	Kramat	233	198	12	12	12	75
99	Krecoan I	20	13	2	3	2	65
100	Krecoan II	18	12	2	3	2	65
101	Krecoan III	34	26	2	3	3	71
102	Kuncir	13	11	1	1	1	75
103	Kweden	31	26	2	2	2	73
104	Lempoh	65	42	7	10	7	66
105	Logawe	259	220	13	13	13	74
106	Macanan	369	74	74	37	185	53
107	Maguan	311	187	62	31	31	78
108	Manding	5	3	1	1	1	64
109	Manyung	63	32	13	9	9	74

No.	Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha)	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)				Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)
			Baik (Ha)	Rusak Ringan (Ha)	Rusak Sedang (Ha)	Rusak Berat (Ha)	Jumlah
							Nilai Maks 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Meko	3	3	0	0	0	76
111	Mekuto I	4	3	0	0	0	70
112	Mekuto II	8	7	0	0	0	75
113	Mencaro	130	111	7	7	7	75
114	Mlilir	795	517	80	119	80	66
115	Mujang	8	7	0	0	0	74
116	Ngampel Gading	11	8	1	1	1	69
117	Ngargo Wekas	29	25	1	1	1	75
118	Ngargojali I	34	26	2	3	3	70
119	Ngargojali II	47	40	2	2	2	75
120	Ngliman	3	3	0	0	0	75
121	Ngloni	13	8	1	2	1	66
122	Nglumpang	24	16	2	4	2	65
123	Ngomben	122	104	6	6	6	73
124	Ngumpul I	16	10	2	2	2	66
125	Ngumpul II	47	35	2	5	5	69
126	Nitis	10	8	1	1	1	69
127	Nolehan	5	4	0	0	0	76
128	Pandansili II	21	18	1	1	1	74
129	Pandansili I	2	1	0	0	1	60
130	Peh Pandan	28	7	6	1	14	55
131	Pengkol	126	107	6	6	6	75
132	Perning	133	113	7	7	7	75
133	Petung Surak	21	18	1	1	1	75
134	Petungulung	12	3	2	1	6	55
135	Pogoh	13	8	1	2	1	64
136	Poleng	33	21	3	5	3	64
137	Precet	7	5	0	1	1	70
138	Puh Salak	131	66	26	20	20	75
139	Punjul I	35	26	2	4	4	70
140	Punjul II	3	3	0	0	0	75
141	Purwo	74	63	4	4	4	76
142	Reco Lancar	35	18	7	5	5	70
143	Sabrang	88	18	18	9	44	53
144	Sambirobyong	45	29	5	7	5	66
145	Sbr. Agung	322	81	64	16	161	54
146	Sbr. Argomulyo	178	116	18	27	18	64

No.	Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha)	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)				Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)
			Baik (Ha)	Rusak Ringan (Ha)	Rusak Sedang (Ha)	Rusak Berat (Ha)	Jumlah
							Nilai Maks 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
147	Sbr. Ayung	43	22	9	6	6	71
148	Sbr. Blereng	5	3	1	1	1	64
149	Sbr. Dandang	66	43	7	10	7	65
150	Sbr. Gondang I	60	39	6	9	6	66
151	Sbr. Gondang II	12	9	1	1	1	70
152	Sbr. Gondang III	6	4	1	1	1	65
153	Sbr. Gondang IV	29	15	6	4	4	70
154	Sbr. Gosari	11	8	1	1	1	71
155	Sbr. Jatitunggak	34	22	3	5	3	64
156	Sbr. Jurang Jero	30	20	3	5	3	64
157	Sbr. Jurang Limas	47	24	9	7	7	70
158	Sbr. Jurang Ringin	11	7	1	2	1	65
159	Sbr. Loricik	28	24	1	1	1	75
160	Sbr. Manggrarejo	85	43	17	13	13	75
161	Sbr. Manik	14	12	1	1	1	76
162	Sbr. Ngambak I	62	31	12	9	9	70
163	Sbr. Ngambak II	120	102	6	6	6	73
164	Sbr. Puncu	5	3	1	1	1	66
165	Sbr. Sangku	18	12	2	3	2	64
166	Sbr. Sedati	66	43	7	10	7	64
167	Sbr. Sentono	3	2	0	0	0	71
168	Sbr. Trincingan	54	27	11	8	8	69
169	Sbr. Wates	34	22	3	5	3	65
170	Selopuro I	113	57	23	17	17	71
171	Selopuro II	6	5	0	1	1	70
172	Semangu	11	3	2	1	6	55
173	Senggowar	22	18	1	2	1	75
174	Sengkrik	14	7	3	2	2	71
175	Sentono	37	30	2	4	2	74
176	Sergan	19	15	1	2	1	74
177	Sumber Gayam	14	7	3	2	2	70
178	Sumber Gondang	20	13	2	3	2	65
179	Sumber Kemiri	104	52	21	16	16	70
180	Sumber Kepuh	135	81	27	14	14	79
181	Sumber Klampok	71	46	7	11	7	66
182	Sumber Sangsang	46	23	9	7	7	70
183	Sumber Setri	27	22	1	3	1	73

No.	Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha)	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)				Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)
			Baik (Ha)	Rusak Ringan (Ha)	Rusak Sedang (Ha)	Rusak Berat (Ha)	Jumlah
							Nilai Maks 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
184	Sumber Soko	60	30	12	9	9	76
185	Sumber Sono	162	130	8	16	8	74
186	Sumbersari	1	1	0	0	0	74
187	Surti	13	3	3	1	7	55
188	Suwaru	19	16	1	1	1	74
189	Suwaru I	19	16	1	1	1	75
190	Suwaru II	6	5	0	1	1	71
191	Talar/Keduk	39	33	2	2	2	75
192	Telik	1	1	0	0	0	70
193	Tempuran	31	26	2	2	2	75
194	Tirip	114	91	6	11	6	76
195	Tiripan	363	236	36	54	36	64
196	Tretes	599	389	60	90	60	64
197	Tretes I	16	10	2	2	2	65
198	Tretes II	10	7	1	2	1	65
199	Tritik	42	21	8	6	6	70
200	Tunglur	266	133	53	40	40	76
201	Turi	18	15	1	1	1	76
202	Watu Brayut I	20	10	4	3	3	70
203	Watu Brayut II	3	2	0	0	0	64
204	Watu Brayut III	3	2	0	0	0	66
205	Watu Kajang	2	1	0	0	0	64
206	Watugudik	24	16	2	4	2	64
207	Watukajang	38	30	2	4	2	75
208	Watulanang I	122	61	24	18	18	70
209	Watulanang II	7	5	1	1	1	65
210	Wengkal	16	14	1	1	1	74
Total		14,951	9,448	1,813	1,546	2,144	70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Berdasarkan kriteria penilaian, IKSI Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan nilai 70 termasuk dalam kategori Baik, namun demikian nilai tersebut merupakan ambang batas kategori baik, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja sistem irigasi yang meliputi 6 indikator penyusunnya.

c. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang daerah. Pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Nganjuk. Jumlah pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan dasar perhitungan indikator kinerja persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang, berikut realisasi kinerja dalam mengukur ketaatan ruang daerah

Tabel 2.106 Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
luas total lahan yang diajukan KKPR (m^2)	1.782.740	138.605	475.187	169.665	395.884
luas pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang/ yang disetujui (PKKPR) (m^2)	1.660.557 (93,15%)	84.858 (61,22%)	464.723 (97,8%)	169.665 (100%)	395.884 (100%)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Berdasarkan data di atas, terdapat *trend* peningkatan persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk mempertahankan kinerja tersebut diperlukan upaya penyelenggaraan penataan ruang yang lebih komprehensif sesuai dengan kaidah peraturan perundangan, yang meliputi: perencanaan tata ruang; pemanfaatan ruang; pengendalian pemanfaatan ruang; pengawasan penataan

ruang; pembinaan penataan ruang; dan kelembagaan penataan ruang. Selain itu, substansi yang tidak kalah penting adalah penyelarasan

d. Daya Dukung Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pengolahan Air Limbah Domestik)

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu tujuan TPB/SDGs, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan TPB/SDGs, pemerintah juga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum (PU) yaitu pemenuhan Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari dengan 60 liter/orang/hari serta penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri PUPR 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM, Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari didefinisikan sebagai air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari dipenuhi dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan (JP) serta SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi (sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter). Adapun penyelenggaraan SPAM JP dilaksanakan oleh beberapa *stakeholder* yaitu:

1) PDAM Nganjuk selaku BUMD Kabupaten Nganjuk sebagai penyelenggara (Pengelolaan dan Pengembangan) Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan (SPAM) di wilayah perkotaan.
2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang selaku pengampu urusan PU melalui penyelenggaraan (Pengelolaan dan Pengembangan) SPAM wilayah pedesaan, baik melalui pendanaan APBD, DAK maupun APBN (program SPAM berbasis Masyarakat).
3) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan air minum berbasis masyarakat melalui kelompok HIPPAM dan KPSPAM.

Sedangkan SPAM BJP terlindungi diselenggarakan oleh masyarakat dan didorong dengan pemicuan melalui sosialisasi serta pendampingan kesadaran akan hidup bersih dan sehat oleh Dinas Kesehatan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang dengan akses air minum JP dan BJP terlindungi sebesar 99,34% (16,58% JP dan 82,76% BJP terlindungi).

Sesuai dengan PUPR No 13 Tahun 2023, penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik meliputi rumah tangga dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S) akses Layak; SPALD-S akses aman (terdapat rantai layanan/ penyedotan dan pengolahan di IPLT) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (SPALD-T). Sampai dengan saat ini Kabupaten Nganjuk belum memiliki IPLT maupun kerjasama pembuangan limbah domestik dengan IPLT terdekat sehingga capaian penyediaan pengolahan air limbah domestik dihitung berdasarkan persentase rumah tangga dengan SPALD-S akses layak. Adapun kategorisasi jenis Unit Pengolahan Setempat dan Lokasi Penerapannya akses

berdasarkan Permen PUPR Nomor13 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.107 Jenis Unit Pengolahan Setempat dan Lokasi Penerapannya berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023

Jenis unit pengolahan setempat	**Perkotaan**	**Perdesaan dengan kepadatan penduduk ≥ 25 jiwa/ha**	**Perdesaan dengan kepadatan penduduk ≤ 25 jiwa/ha**
Cubluk kembar	Tanpa Akses	Tanpa Akses	Akses Layak
Tangki septik individual	Akses Layak	Akses Layak	Akses Layak
MCK	Akses Layak	Akses Layak	Akses Layak
Tangki Septik Komunal	Akses Layak	Akses Layak	Akses Layak

Sumber: lampiran 1 Permen PUPR 13/2023

Namun demikian terdapat perbedaan kategorisasi jenis unit pengolahan setempat dan Lokasi penerapannya yang digunakan pada perhitungan realisasi kinerja penyediaan pengolahan air limbah domestik tahun 2021-2023, di mana kategorisasi mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah dicabut dengan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023. Adapun perbedaan kategorisasi jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapan pada Permen PUPR 13 Tahun 2023 tidak ada kategori akses dasar, sedangkan pada Permen PUPR 29 Tahun 2018, cubluk kembar di pedesaan (tanpa pembagian kepadatan penduduk) termasuk kategori akses dasar dan perhitungan kinerja nya dihitung berdasarkan persentase rumah tangga dengan SPALD-S akses dasar dan akses layak.

Tabel 2.108 Jenis Unit Pengolahan Setempat dan Lokasi Penerapannya Berdasarkan Permen PUPR No 29 Tahun 2018

Jenis unit pengolahan setempat	Perkotaan	Perdesaan
Cubluk kembar	Tanpa Akses	Akses Dasar
Tangki septik individual	Akses Layak	Akses Layak
MCK	Akses Layak	Akses Layak
Tangki Septik Komunal	Akses Layak	Akses Layak

Sumber: lampiran 1 Permen PUPR 29/2018

Dengan diterbitkannya Permen PUPR 13 Tahun 2023, maka diperlukan perhitungan ulang pada jenis pengolahan setempat cubluk kembar pada desa dengan kepadatan penduduk ≥ 25 jiwa/ha serta klasifikasi wilayah perkotaan dan pedesaan. Perhitungan ulang tersebut memiliki konsekuensi adanya penurunan terhadap perhitungan akses layak, sehingga berimplikasi juga terhadap penurunan kinerja penyediaan pengolahan air limbah domestik.

Berikut data realisasi kinerja penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2024:

Tabel 109 Realisasi Kinerja Penyediaan air minum dan pengolahan air limbah Domestik Kabupaten Nganjuk serta SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi	95,37% (14,15% JP dan 81,22% BJP terlindungi)	95,52% (15,20% JP dan 80,32% BJP terlindungi)	99,34% (16,58% JP dan 82,76% BJP terlindungi)	99,53 % (17,79% aman/JP Dan 81,74% BJP terlindungi)
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (perhitungan berdasarkan Permen PUPR 29/2018)	99,85% (layak 94,35% serta dasar 5,5)	99,85% (layak 94,61% serta dasar 5,24%)	98,81% (layak 79,79% serta dasar 19,01%)	96,95% (Akses Layak Khusus 9,84% +Akses Layak 87,12%) dan terdapat akses aman 0,0219%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Air siap minum perpipaan merupakan persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses ke air minum yang layak dan aman melalui sistem perpipaan (PDAM atau jaringan perpipaan lainnya). Sampai saat ini untuk jaringan perpipaan Kabupaten Nganjuk di wilayah perkotaan menggunakan jaringan PDAM dan untuk perdesaan melalui KPSPAM dan Dinas PUPR dengan sumber pendanaan dari APBD Kab, APBN dan DAK.

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama, dengan jenis kloset leher angsa dengan tangki septik yang terhubung ke sistem pengolahan air limbah (SPAL) atau tangki septik yang disedot secara berkala (setidaknya sekali dalam 3-5 tahun). Pada Tahun 2024 Kabupaten Nganjuk melakukan penyedotan SPALD-S Individu sejumlah 25 rumah tangga di perkotaan dan diolah ke IPLT Kabupaten Jombang, dengan ini dapat memberikan capaian Akses sanitasi aman Kabupaten Nganjuk menjadi 0,0219%.

Berdasarkan tabel diatas, akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan pada tahun 2024 sebesar 17,79% menggambarkan masih belum maksimalnya terkait penyediaan air minum, sehingga diperlukan upaya peningkatan akses layanan SPAM jaringan perpipaan di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan data pada Tabel diatas, terdapat 96,95% penduduk dengan akses penyediaan pengolahan air limbah domestic dengan kriteria mengacu pada Permen PUPR 29 Tahun 2018, namun demikian dengan terbitnya Permen PUPR 13 Tahun 2023 maka diperlukan perhitungan ulang terhadap jenis pengolahan setempat cubluk kembar pada desa dengan kepadatan penduduk ≥ 25 jiwa/ha serta klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan kategorisasi dalam Permen PUPR 13 Tahun 2023.

Sanitasi lingkungan merupakan salah satu fokus pembangunan kesehatan. salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh Pemerintah daerah adalah sanitasi rumah tangga termasuk MCK. Ketersediaan air bersih, fasilitas dan sarana sanitasi menjadi faktor yang berpengaruh dalam perubahan perilaku BABS. Keberhasilan intervensi program MCK Komunal maupun Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana prasarana dasar bagi masyarakat.

Tabel 2.110 Persentase Akses Jamban 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	*2024
Jumlah KK	310.315	310.959	317.653	321.131	334,245
JSP	221.727	224.563	252.314	256.364	291,184
% Akses JSP	71,45	72,22	79,43	79,84	87.12
JSSP	62.937	60.400	65.258	64.047	32,873
% Akses JSSP	20.28	19,42	20,54	19,94	9.84
Sharing	25.654	25.996	81	721	10,188
% Akses Sharing	8.27	8,84	0,03	0,22	3.05
BABS	0	0	0	0	0
% Akses BABS	0	0	0	0	0
% Akses Progres	100	100	100	100	100

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 2024 diolah Pokja PKP, Klasifikasi Perkotaan sesuai BPS No. 37 TAHUN 2010 dan Permen PUPR No. 13 Tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Kabupaten Nganjuk telah berhasil menghilangkan kebiasaan BABS. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pemenuhan infrastruktur dasar untuk sanitasi rumah tangga telah menunjukkan kinerja optimal yang didukung dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

5. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan permukiman didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyelenggarakan Kegiatan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan tersebut bermuara pada komitmen untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat kabupaten Nganjuk. Berikut beberapa data hasil Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024:

a. Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau

Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

1) Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (*sufficient living space*);
2) Memiliki akses terhadap air minum layak;
3) Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
4) Ketahanan bangunan (*durable housing*).

Selain terpenuhinya 4 (empat) kriteria tersebut, syarat kesehatan lainnya berupa :

1) Pencahayaan; dan
2) Penghawaan yang cukup.

Adapun Perhitungan Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Nganjuk berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{Jumlah\ Rumah\ Layak\ Huni}{Jumlah\ Total\ Rumah}\ x\ 100\%$$

Tabel 2.111 Data Persentase ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau tahun 2020 s.d. 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah di Kabupaten Nganjuk (unit)	323.305	325.293	327.281	329.269	316.157
Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	281.124 Unit (86,95 %)	281.761 (86,62%)	282.180 (86,22%)	282.888 (85,91%)	306.582 unit (96,97%)

Sumber Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Adapun data tahun 2020 s.d. 2023 merupakan data kinerja Dinas PRKPP, sedangkan data tahun 2024 merupakan updating berdasarkan dokumen RP3KP Kabupaten Nganjuk yang disusun di Tahun 2024. Berdasarkan hasil kajian pada dokumen RP3KP terdapat koreksi data jumlah total rumah di Kabupaten Nganjuk beserta jumlah rumah layak huni, data ini beserta hasil kinerja tahun 2024 kemudian dijadikan acuan perhitungan kinerja tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.112 Rumah Layak Huni di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Persil (Ha)	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni
1	Sawahan	135,114	10280	549	9731
2	Ngetos	133,575	10529	257	10272
3	Berbek	184,9	15824	294	15530
4	Loceret	266,357	20536	504	20032
5	Pace	237,606	18405	320	18085
6	Tanjunganom	451,623	33644	328	33316
7	Prambon	271,744	20460	181	20279
8	Ngronggot	377,281	24695	119	24576
9	Kertosono	186,39	14985	143	14842
10	Patianrowo	151,567	11681	434	11247
11	Baron	201,565	14792	206	14586
12	Gondang	225,674	16624	2085	14539
13	Sukomoro	178,865	13475	341	13134

No	Kecamatan	Luas Persil (Ha)	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni
14	Nganjuk	202,812	17639	77	17562
15	Bagor	227,941	18752	276	18476
16	Wilangan	130,085	9673	255	9418
17	Rejoso	288,493	22072	662	21410
18	Ngluyu	71,354	5675	469	5206
19	Lengkong	120,358	9822	1023	8799
20	Jatikalen	75,864	6594	1052	5542
Nganjuk		**4119,168**	**316.157**	**9.575**	**306.582**

Sumber Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Sebagaimana Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN, terdapat indikator rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Adapun definisi IUP ini mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan

Sesuai dengan pedoman penyelarasan RPJPD dan RPJMN, Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka IUP rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dapat dihitung menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak) dengan rumus:

$$PHLTB\ (proksi)\ =\ \frac{JRTHLTB(proksi)}{JRTx100}$$

- PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
- JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
- JRT: Jumlah rumah tangga

Berdasarkan data tabel 2.110 (Rumah Layak Huni di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024) dan data jumlah rumah tangga dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk , maka capaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan tahun 2024 Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

$$PHLTB\ (Proksi) = \frac{306.582}{411.550}\text{x}100\%$$

$$= 74{,}49\%$$

Berikut beberapa faktor pendorong pencapaian ketersediaan hunian layak terjangkau dan berkelanjutan:

a. Adanya kolaborasi pendanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik melalui pendanaan APBD maupun APBN dan BAZNAS;
b. Tersedianya SDM yang kompeten dan tingkat pendidikan sesuai standar;
c. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas;
d. Dukungan dan peran aktif dari masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat serta tantangan dalam pencapaian ketersediaan hunian layak terjangkau dan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

a. Adanya penurunan kualitas rumah, sehingga terjadi peningkatan RTLH;

b. Terjadinya pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan rumah layak huni;
c. Didalam RPJPD Kabupaten Nganjuk periode 2025-2045 terdapat Mandatory penyelarasan indikator utama pembangunan (IUP) beserta targetnya yaitu Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, terjangkau dan Berkelanjutan, dengan target 2045 sebesar 100%, penyelarasan IUP ini tentu akan berpengaruh pada perhitungan baseline sesuai dengan definisi IUP dan penentuan target pada perencanaan selanjutnya

Pengentasan Kawasan permukiman kumuh perkotaan merupakan amanat dari tujuan ke 11 SDG's, dengan target "Pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh". Untuk itu Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga berupaya dalam pengurangan luasan Kawasan perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Nganjuk.

Perhitungan persentase pengurangan luasan kawasan kumuh berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{Luas\ total\ kawasan\ kumuh\ dalam\ SK\ (Ha) - Luas\ Tahun\ n\ (Ha)}{Luas\ total\ kawasan\ kumuh\ dalam\ SK\ (Ha)}\ x\ 100\%$$

Adapun perhitungan pengurangan luasan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 s.d. 2023 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk, dengan luas 131,2 Ha, sedangkan perhitungan pengurangan tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk, dengan luas 155,88.

Tabel 2.113 Capaian kinerja pengurangan luasan kawaan kumuh tahun 2020 s.d. 2024

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Luas SK Kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh (Ha)	131,2	131,2	131,2	155,88
Pengurangan Kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh Komulatif (Ha)	28 Ha (21,34 %)	62,68 (47,77%)	91,70 (69,89%)	118,23 (75,83%)
Sisa Luasan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	103.2	68.52	39,5	37,65

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, KawasanPermukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Berikut beberapa tantangan dalam upaya peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh maupun pencegahan terhadap berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, diantaranya :

(a). Menurunnya kualitas lingkungan permukiman yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh baru;

(b). Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2023 tersebut belum mencakup seluruh kawasan permukiman perkotaan di 20 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Sehingga pada tahun 2024 Dinas PRKPP melaksanakan pendataan baseline Kawasan Perumahan dan permukiman kumuh di seluruh wilayah permukiman perkotaan/perdesaan di 20 Kecamatan. Hasil baseline 2024 selanjutnya dijadikan acuan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh melalui Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/166/K/411.013/2025 tentang Penetapan Lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk, sehingga dapat dipakai sebagai dasar penuntasan penanganan kawasan permukiman kumuh di periode perencanaan selanjutnya

Berdasarkan hasil verifikasi diatas, luasan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Nganjuk tersisa 37,65 Ha dan memiliki kategori kumuh ringan. Adapun Lokasi Kawasan Perumahan dan permukiman kumuh dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2023 baru mencakup Kawasan permukiman perkotaan di 7 (tujuh) kecamatan, sehingga pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga melaksanakan identifikasi lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh pada kawasan permukiman perkotaan di 13 (tiga belas) Kecamatan lainnya, sebagai dasar penanganan kawasan permukiman kumuh di periode perencanaan selanjutnya.

Berikut lokasi serta luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/166/K/411.013/2025 :

Tabel 2.114 luasan perumahan dan Permukiman Kumuh Tahun 2024

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
1	Ngumpul	0,67	RT 3 / RW 1	Ngumpul	Bagor
2	Malangbong	0,88	RT 2 / RW 1		
3	Kedungkajar	0,57	RT 1 / RW 2		
4	Balongrejo	1,14	RT 2 / RW 2	Balongrejo	
5	Wates	1,70	RT 4 / RW 1		
			RT 5 / RW 1		
6	Balongpesing	1,64	RT 1 / RW 8	Gandu	
			RT 2 / RW 8		
			RT 3 / RW 8		
7	Mlaten	1,06	RT 2 / RW 6		
8	Krajan	1,67	RT 4 / RW 3	Bagor Kulon	
9	Jekek	2,95	RT 1 / RW 1	Jekek	Baron
			RT 2 / RW 1		
10	Kuniran	0,95	RT 2 / RW 9		
11	Bendil	6,43	RT 1 / RW 7	Berbek	Berbek
			RT 2 / RW 7		
			RT 3 / RW 7		
			RT 4 / RW 7		
12	Sopan	7,39	RT 4 / RW 4	Sonopatik	
			RT 5 / RW 4		
			RT 1 / RW 2		
			RT 1 / RW 1		
			RT 7 / RW 1	Tiripan	

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
13	Tawing Bringkil	1,57	RT 1 / RW 1	Grojogan	
			RT 2 / RW 1		
14	Patranrejo	1,56	RT 7 / RW 4	Patranrejo	
15	Kantren	1,15	RT 5 / RW 3	Tiripan	
16	Ngujung	8,85	RT 1 / RW 2	Ngujung	Gondang
			RT 1 / RW 1		
			RT 2 / RW 1		
			RT 1 / RW 1		
			RT 2 / RW 2		
			RT 1 / RW 5		
			RT 2 / RW 3		
			RT 2 / RW 4		
17	Nglinggo Krajan	1,32	RT 1 / RW 4	Nglinggo	
18	Kedung Celeng	0,76	RT 6 / RW 1	Ketawang	
19	Ketawang	2,10	RT 4 / RW 3	Ketawang	
20	Kedung Galih	1,17	RT 2 / RW 3	Kedungglugu	
21	Kawedekan	1,97	RT 21 / RW 8	Balonggebang	
22	Begendeng	4,60	RT 1 / RW 1	Begendeng	Jatikalen
			RT 2 / RW 1		
			RT 3 / RW 1		
			RT 3 / RW 2		
			RT 2 / RW 3		
23	Kedungtunggak	1,56	RT 1 / RW 8	Jatikalen	
			RT 2 / RW 8		
24	Dlururejo	1,02	RT 4 / RW 1	Dlururejo	
25	Dawuhan	3,79	RT 11 / RW 3	Dawuhan	
			RT 12 / RW 3		
			RT 13 / RW 3		
26	Krawilan	9,73	RT 6 / RW 2		
			RT 7 / RW 2		
			RT 8 / RW 2		
			RT 9 / RW 2		
			RT 10 / RW 2		
27	Cekel	7,99	RT 1 / RW 1		
			RT 2 / RW 1		
			RT 3 / RW 1		
			RT 4 / RW 1		
			RT 5 / RW 1		
28	Lumpang Kuwik	7,02	RT 2 / RW 1	Lumpang Kuwik	
			RT 3 / RW 1		
			RT 1 / RW 3		
			RT 2 / RW 3		
			RT 3 / RW 3		
			RT 2 / RW 4		
			RT 3 / RW 4		
29	Tondowesi	1,65	RT 1 / RW 2	Pule	
30	Pule	0,60	RT 1 / RW 1		
31	Perning	2,81	RT 6 / RW 1	Perning	
			RT 7 / RW 1		

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
32	Seloguno	8,41	RT 3 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
			RT 6 / RW 2		
			RT 7 / RW 2		
			RT 8 / RW 2		
			RT 9 / RW 2		
			RT 10 / RW 2		
33	Sumbergondang	3,77	RT 1 / RW 3		
			RT 2 / RW 3		
34	Pinggir Rel	3,41	RT 2 / RW 1	Kutorejo	Kertosono
			RT 4 / RW 2		
			RT 6 / RW 3		
35	Templek	0,87	RT 11 / RW 5		
36	Nglawak	3,56	RT 1 / RW 2	Nglawak	
			RT 2 / RW 2		
37	Pilangkenceng	0,46	RT 1 / RW 10		
38	Pelem	2,98	RT 1 / RW 6	Pelem	
			RT 3 / RW 6		
			RT 3 / RW 5		
39	Klinter	1,69	RT 1 / RW 1		
40	Tembarak Utara	7,85	RT 1 / RW 2	Tembarak	
			RT 1 / RW 3		
			RT 1 / RW 5		
			RT 2 / RW 3		
			RT 2 / RW 4		
			RT 2 / RW 5		
41	Dukuh	5,63	RT 1 / RW 2	Ketandan	Lengkong
			RT 4 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
			RT 6 / RW 2		
			RT 6 / RW 1		
			RT 5 / RW 1		
42	Sumberejo	3,20	RT 1 / RW 9	Ngringin	
			RT 2 / RW 9		
			RT 3 / RW 10		
			RT 4 / RW 10		
43	Jerukwangi	2,71	RT 6 / RW 2	Banjardowo	Lengkong
			RT 1 / RW 2		
44	Banjaranyar	1,87	RT 2 / RW 4	Sawahan	
45	Besuk	1,36	RT 8 / RW 1	Sukorejo	Loceret
46	Sumberklampok	9,81	RT 1 / RW 4	Macanan	
			RT 2 / RW 4		
			RT 3 / RW 4		
			RT 4 / RW 4		
47	Plangkat	3,69	RT 1 / RW 8	Bajulan	
			RT 2 / RW 8		
48	Cacingan	1,11	RT 5 / RW 3	Jatirejo	Nganjuk
49	Kramat	1,64	RT 4 / RW 5	Kramat	
50	Klumpit	1,54	RT 3 / RW 5	Kartoharjo	

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
51	Belpas Wage	1,32	RT 1 / RW 10	Payaman	
			RT 2 / RW 10		
52	Bonggah	3,17	RT 4 / RW 5	Ploso	
			RT 7 / RW 6		
53	Tengger	3,90	RT 1 / RW 5	Blongko	Ngetos
			RT 5 / RW 5		
54	Salam Judeg	4,74	RT 1 / RW 6		
			RT 3 / RW 6		
55	Dodol	7,44	RT 1 / RW 4	Klodan	
			RT 13 / RW 5		
			RT 14 / RW 5		
56	Nglebak	2,15	RT 5 / RW 7		
57	Sumber	5,28	RT 1 / RW 2	Kuncir	
58	Dlopo	8,50	RT 1 / RW 6	Kepel	
			RT 5 / RW 6		
			RT 1 / RW 7		
			RT 3 / RW 7		
			RT 5 / RW 7		
			RT 3 / RW 8		
59	Tawangrejo	6,56	RT 1 / RW 3		
			RT 5 / RW 3		
			RT 6 / RW 3		
			RT 1 / RW 5		
			RT 3 / RW 4		
60	Sukonodo	1.63	RT 1 / RW 9	Ngetos	
			RT 2 / RW 9		
61	Oro Oro Ombo	3.16	RT 1 / RW 1	Oro-oro ombo	
			RT 2 / RW 1		
			RT 3 / RW 1		
62	Wonokroko	4.78	RT 1 / RW 2		
			RT 2 / RW 2		
			RT 4 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
63	Suru	6.71	RT 1 / RW 1	Suru	
			RT 2 / RW 1		
			RT 2 / RW 2		
			RT 3 / RW 2		
64	Watulanang	5.33	RT 1 / RW 1		
			RT 3 / RW 1		
			RT 3 / RW 2		
65	Nitis	3.49	RT 1 / RW 5	Mojoduwur	
			RT 2 / RW 5		
			RT 3 / RW 5		
			RT 4 / RW 5		
66	Gampeng	1.53	RT 3 / RW 2	Gampeng	Ngluyu
67	Puncu	2.35	RT 2 / RW 2		
68	Ngluyu	1.18	RT 13 / RW 3	Ngluyu	
69	Jonggang	2.21	RT 2 / RW 1	Sugihwaras	Ngluyu
70	Semen	1.79	RT 8 / RW 3		

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
71	Cabean	2.84	RT 10 / RW 4		
			RT 12 / RW 4		
72	Talun	0.55	RT 14 / RW 4	Tempuran	
73	Tanjungkalang	6.72	RT 3 / RW 3	Tanjungkalang	Ngronggot
			RT 3 / RW 5		
			RT 4 / RW 5		
74	Dayang	9.06	RT 1 / RW 1	Trayang	
			RT 2 / RW 1		
			RT 3 / RW 1		
			RT 1 / RW 1	Dadapan	
			RT 2 / RW 1		
75	Payaman	1.85	RT 1 / RW 1	Trayang	
			RT 2 / RW 1		
76	Banjarsari	2.26	RT 1 / RW 7	Banjarsari	
77	Sumbersari	3.80	RT 2 / RW 2	Mojokendil	
			RT 3 / RW 2		
78	Kates	2.17	RT 1 / RW 3	Pace Wetan	Pace
			RT 2 / RW 3		
79	Kedungmboto	1.38	RT 2 / RW 2	Ngepung	Patianrowo
			RT 3 / RW 2		
80	Termas	2.63	RT 26 / RW 7	Babadan	
			RT 27/ RW 7		
81	Nglaban	3.46	RT 33/ RW 9		
			RT 36 / RW 9		
82	Gilig	3,61	RT 37 / RW 10		
			RT 38 / RW 10		
			RT 39 / RW 10		
83	Babadan	2.06	RT 5 / RW 2	Babadan	
84	Doyok	1.21	RT 1 / RW 7	Tirtobinangun	
85	Buntut	2.92	RT 3 / RW 8		
			RT 4 / RW 8		
86	Balongkendal	2.00	RT 1 / RW 4		
			RT 2 / RW 4		
87	Ngrombot		RT 2 / RW 2	Ngrombot	
			RT 3 / RW 2		
88	Kurung	1.48	RT 5 / RW 1	Kurungrejo	Prambon
89	Ngetrep	1.21	RT 7 / RW 2		
90	Sugihwaras	1.66	RT 1 / RW 10	Sugihwaras	
91	Benden	2.51	RT 4 / RW 11	Gondanglegi	
92	BanyuurIp	0.88	RT 45 / RW 11	Sonoageng	
93	Tanjungtani	4.93	RT 3 / RW 4	Tanjungtani	
			RT 20 / RW 6		
			RT 22 / RW 7		
			RT 27 / RW 9		
94	Banyuurip	1.21	RT 1 / RW 1	Rejoso	Rejoso
95	Ngreco	3.04	RT 1 / RW 5	Sukorejo	
			RT 3 / RW 5		
96	Duwel	2.57	RT 4 / RW 1		
			RT 1 / RW 2		

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
97	Mlorah	9.06	RT 1 / RW 7	Mlorah	
			RT 2 / RW 7		
			RT 3 / RW 7		
			RT 2 / RW 3		
			RT 4 / RW 3		
			RT 2 / RW 2		
			RT 3 / RW 2		
			RT 4 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
98	Rawalingi	1.39	RT 1 / RW 2	Setren	
99	Mungkung	0.95	RT 1 / RW 2	Mungkung	
100	Puhkerep	9,62	RT 1 / RW 2	Puhkerep	
			RT 2 / RW 2		
			RT 4 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
101	Bulak	5.62	RT 1 / RW 8	Margopatut	Sawahan
			RT 2 / RW 9		
			RT 2 / RW 10		
			RT 2 / RW 11		
102	Batu Kidul	2,43	RT 2 / RW 12		
			RT 3 / RW 12		
103	Batulor	0.77	RT 1 / RW 13		
			RT 2 / RW 13		
104	Ngroto	3.95	RT 1 / RW 15		
			RT 2 / RW 15		
			RT 1 / RW 16		
			RT 2 / RW 16		
			RT 1 / RW 17		
105	Sidorejo Jurang Budeng	2.32	RT 1 / RW 18		
			RT 2 / RW 18		
106	Batu Watuwayang	1.46	RT 1 / RW 14		
			RT 2 / RW 14		
107	Patut	3.49	RT 1 / RW 23		
			RT 3 / RW 23		
			RT 1 / RW 22		
108	Sembung	5.75	RT 1 / RW 29		
			RT 2 / RW 29		
			RT 3 / RW 29		
			RT 1 / RW 31		
			RT 2 / RW 31		
			RT 3 / RW 31		
			RT 1 / RW 30		
109	Bakalan	4.94	RT 2 / RW 4	Duren	
			RT 3 / RW 4		
110	Gedang Klutuk	1.65	RT 6 / RW 6	Sawahan	
			RT 7 / RW 6		
			RT 8 / RW 6		
111	Gambyok Tegir	2.09	RT 2 / RW 4		
112	Jeblok	1.88	RT 6 / RW 3		

No	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan
113	Padusan	3.48	RT 1 / RW 1	Bagorwetan	Sukomoro
			RT 3 / RW 1		
114	Kajang	1.75	RT 17 / RW 6	Bungur	
115	Kapas	9.90	RT 1 / RW 4	Kapas	
			RT 2 / RW 4		
			RT 3 / RW 4		
			RT 4 / RW 4		
			RT 5 / RW 4		
			RT 6 / RW 4		
			RT 7 / RW 4		
			RT 1 / RW 7		
			RT 2 / RW 7		
			RT 3 / RW 7		
116	Bulupacing	0.82	RT 9 / RW 2	Putren	
117	Gempolan	1.06	RT 1 / RW 12	Sumengko	
118	Mlaten	4.61	RT 26 / RW 12	Ngrami	
			RT 27 / RW 12		
119	Bulurejo	2.90	RT 2 / RW 2	Warujayeng	Tanjunganom
120	Saru	9.51	RT 5 / RW 5	Sambirejo	
			RT 3 / RW 5	Warujayeng	
			RT 3 / RW 1		
			RT 2 / RW 3		
			RT 1 / RW 6		
121	Tawangsari	1.96	RT 1 / RW 1	Kedungombo	
122	Jegong	7.08	RT 1 / RW 1	Wilangan	Wilangan
			RT 4 / RW 2		
			RT 5 / RW 2		
			RT 6 / RW 2		
123	Punthuk	4.33	RT 2 / RW 6	Ngudikan	
			RT 3 / RW 6		
124	Manggarejo	1.79	RT 4 / RW 2	Mancon	
	Total	**408.12**			

Sumber Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah mengamanatkan keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut amanat Permendagri Nomor 9 Tahun 2009, telah dundangkan Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah.dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi amanat ketentuan perundangan untuk mernberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, serta memenuhi MCP KPK saat ini pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas PRKPP berupaya untuk melakukan percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Sampai dengan tahun 2024 terdapat 31 PSU perumahan yang telah dilaksanakan serah terima dari pengembang kepada pemerintah daerah dari 143 total perumahan yang ada di kabupaten Nganjuk. Berikut data PSU Perumahan yang telah diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk s/ d tahun 2024:

Tabel 2.115 PSU Perumahan yang sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk

No	Nama Perusahaan	Nama Perumahan	Lokasi Perumahan
1.	PT. Putra Tunas Artha Mandiri	Puri Tanjung Persada	Loceret
2.	PT. Berlian Karya Pramudya	Bumi Berlian Asri	Loceret
3.	PT. Nirwana Prima Graha Indonesia	Grand Nirwana	Nganjuk
4.	PT. Muncul Berkah Abadi	Mastrip Megah Premium	Nganjuk
5.	PT. Tunas Indra Nuansa Mulia	Nuansa Kapas Asri	Sukomoro
6.	PT. Ratu Propertindo	Graha Mutiara	Nganjuk
7.	PT. Tunas Adi Karya Propertindo	Griya Kedondong Asri	Bagor

No	Nama Perusahaan	Nama Perumahan	Lokasi Perumahan
8.	PT. Tri Mega Gading Mas	Griya Waung Asri	Baron
9.	PT. Tri Mega Gading Mas	Griya Asri III	Kertosono
10.	PT. Duta Graha Globalindo	Citra City	Nganjuk
11.	PT. Tunas Adi Karya Propertindo	Griya Jogomerto Asri	Tanjunganom
12.	PT. Tri Mega Gading Mas	Griya Nglawak Asri	Kertosono
13.	PT. Tri Sukses Manshurin	Sumengko Green	Loceret
14.	PT. Weka Utama Perkasa	Zahro In 1	Nganjuk
15.	PT. Weka Utama Perkasa	Zahro In 2	Nganjuk
16.	PT. Dian Adytamasentosa	Puri Mangundikaran	Nganjuk
17.	PT. Dian Adytamasentosa	Ganung Asri	Nganjuk
18.	PT. Bumi Purnama Raya	Villa Candi Mas	Loceret
19.	PT. Tirta Jaya Pesona	Green Begadung Residence	Nganjuk
20.	PT. Indo Karya Sanbtri	Taqiya Land	Kertosono
21.	PT. Tri Gatra Utama	Graha Gading	Kertosono
22.	PT. Tunas Adi Karya Propertindo	Griya Glotan asri	Tanjunganom
23.	PT. Cemara Gunung Sedayu	Griya Bumi Sedayu	Prambon
24.	PT. Bumi Inti Prakarsa	Bumi Jatirejo Residence	Nganjuk
25.	PT. Irfai Berkah Sejahtera	Griya Mastrip Regency	Nganjuk
26.	PT. Tirta Jaya Pesona	Green Werungotok Residence	Nganjuk
27.	PT. Putra Salim Grup	Green Safira Regency	Ketosono
28.	Graha Pilar Perkasa	Green Balongrejo Residence	Berbek
29.	PT. Irfa'I Berkah Sejahtera	Green Kertosono Residence	Kertosono
30.	PT.Ratu Propertindo	New Graha City	Bagor
31.	PT. Global Property Sukses	Mutiara Tanjungrejo Residence	Loceret

Sumber Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Dengan adanya serah terima PSU maka pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat melakukan intervensi pemeliharaan/ perbaikan PSU untuk menciptakan lingkungan perumahan yang

sehat dan aman. Adapun beberapa tantangan dalam upaya percepatan serah terima PSU, diantaranya:

1. Dokumen yang dijadikan persyaratan kurang lengkap
2. Sertifikat belum displit dan masih atas nama perorangan (belum atas nama perumahan).
3. Kurangnnya kesadaran Pengembang untuk menyerahkan PSU Perumahan.

Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Tahun 2020-2024 :

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Dinas PRKPP juga mengampu pelaksanaan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang terdiri dari :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten

Berikut hasil pelaksanaan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2022 s.d. 2024:

Tabel 2.116 Hasil Pelaksanaan Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2022 s.d. 2024

Data	2022	2023	2024
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (unit rumah)	86	102	53
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota (unit rumah)	271	1	0

Sumber Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota pada tahun 2022 sebanyak 86 unit rumah yang terdapat pada 18 Kelurahan/Desa di Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2023 sebanyak 102 unit rumah yang

terdapat pada 28 Kelurahan/Desa di Kabupaten Nganjuk. Adapun tahun 2024 sebanyak 53 unit rumah yang terdapat pada 12 Kelurahan/Desa di Kabupaten Nganjuk. Jenis bencana yang dimaksud diantaranya :

a) Hujan deras dan angin kencang;
b) Hujan deras;
c) Angin puting beliung;
d) Hujan angin;
e) Hujan lebat dan angin kencang.

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 sebanyak 271 unit rumah yang terdapat pada Desa Tritik dan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso serta Desa Ngetos Kecamatan Ngetos. Pada tahun 2023 sebanyak 1 unit rumah dengan jenis relokasi program yakni daerah sempadan sungai terdapat pada Desa Banaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Adapun tahun 2024 terdapat nol unit rumah.

6. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka menyukseskan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan peningkatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di Kabupaten Nganjuk. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap adalah suatu kondisi di mana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur. Indikator urusan Trantibumlinmas mencakup 3 urusan, yaitu urusan ketentraman dan ketertiban, urusan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan urusan kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Capaian kinerja urusan trantibumlinmas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.117 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata rata waktu tanggap bencana (Respontime)	72	68	N/A	N/A	52
2.	Persentase operasi penegakan perda dan perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
3.	Persentase operasi penanganan gangguan tramtibum yang ditangani	-	111,11	92,5	96	98,15
4.	Persentase penanganan konflik sosial dan kehidupan beragama	67	75	91	100	100
5.	Persentase forum antar umat beragama yang Difasilitasi	100	100	100	100	100
6.	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, Satpol PP, BPBD 2024

Berdasarkan data tabel di atas dapat dikatakan bahwa secara umum capaian kinerja di bidang urusan trantibum sudah sangat baik.

Fokus pada kebencanaan diukur dengan indikator indeks risiko bencana. IRB Kabupaten Nganjuk mempunyai tren menurun dan nilainya rata-rata lebih kecil dari IRB Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Semakin kecil nilai IRB, semakin kecil risiko bencana yang akan dialami oleh suatu daerah. Ini artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sudah berbenah, lebih tanggap, dan tangguh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan. Perhatian dari Pemerintah Daerah telah dilakukan terhadap beberapa hal yaitu tingkat ancaman bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas kemampuan untuk mencegah dan mengatasi bencana.

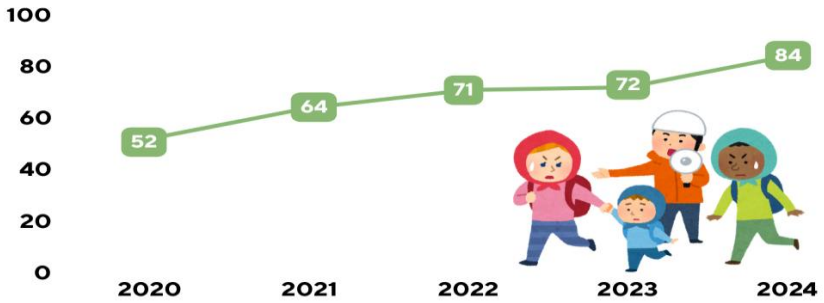
Program pencegahan bencana yang tak kalah penting adalah program Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana (DesTaNa) bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam

pengurangan risiko bencana secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan perempuan dalam pelatihan relawan di desa rawan bencana. Sampai dengan akhir tahun 2024 sudah terbentuk 72 desa tangguh bencana di Kabupaten Nganjuk. Data lokasi Desa Tangguh Bencana tersebut sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.118 Jumlah Desa Tangguh Bencana Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Destana	Cakupan Area
1	Sawahan	9	Desa
2	Ngetos	9	Desa
3	Berbek	9	Desa
4	Loceret	4	Desa
5	Pace	8	Desa
6	Tanjunganom	1	Desa
7	Prambon	1	Desa
8	Ngronggot	-	-
9	Kertosono	-	-
10	Patianrowo	-	-
11	Baron	-	-
12	Gondang	3	Desa
13	Sukomoro	4	Desa
14	Nganjuk	-	-
15	Bagor	2	Desa
16	Wilangan	4	Desa
17	Rejoso	9	Desa
18	Ngluyu	3	Desa
19	Lengkong	2	Desa
20	Jatikalen	4	Desa
Jumlah Total		**72**	

Sumber : BPBD Kabupaten Nganjuk, 2023



Gambar 2.37 Perkembangan Destana Tahun 2020-2024
Sumber: BPBD Kab.Nganjuk, 2024

Salah satu faktor penunjang keberhasilan penanggulangan bencana adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.119 Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

No	Kecamatan	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah	Lokasi	Kondisi
1	Sawahan	EWS	1 unit	Dkh. Petungulung Ds. Margopatut	Baik
		EWS	1 unit	Dkh. Tawang Ds. Bareng	Rusak
		EWS	1 unit	Ds. Bendolo	Rusak
		Chainsaw	1 unit	Kec. Sawahan	Baik
2	Ngetos	EWS	1 unit	Dkh. Dlopo Ds. Kepel	Baik
		EWS	1 unit	Dsn. Burikan Ds. Kepel	Rusak
		Chainsaw	1 unit	Kec. Ngetos	Baik
3	Berbek	Chainsaw	1 unit	Kec. Berbek	Baik
4	Loceret	Chainsaw	1 unit	Kec. Loceret	Baik
5	Pace				
6	Tanjunganom	Chainsaw	1 unit	Kec. Tanjunganom	Baik
7	Prambon				
8	Ngronggot				
9	Kertosono				
10	Patianrowo				
11	Baron				
12	Gondang				
13	Sukomoro	Chainsaw	1 unit	Kec. Sukomoro	Baik
14	Nganjuk	Vertical Rescue	1 set	Kantor BPBD	Baik
		Urban Rescue	1 set	Kantor BPBD	Baik
		Water Rescue	1 set	Kantor BPBD	Baik
		Perahu	8 unit	Kantor BPBD	2=Baik 6=Rusak
		Chainsaw	15 unit	Kantor BPBD	Baik
15	Bagor				
16	Wilangan				
17	Rejoso				
18	Ngluyu				
19	Lengkong				
20	Jatikalen				

Sumber : BPBD Kabupaten Nganjuk, 2023

Dengan apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah seperti di atas, dalam hal ini BPBD, diharapkan semua pihak siap terhadap potensi ancaman yang akan terjadi. Supaya tingkat potensi ancaman pun menjadi kecil, sehingga harapannya bisa menurunkan nilai IRB. Data kejadian bencana sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.120 Kejadian Bencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan
24 12 24 19:00	Banjir	Ds. Jogomerto, Kec. Tanjunganom a. Dsn. Jogomerto b. Dsn. Sukorejo	0	0	0	0	- KK terdampak: 40 KK - Sawah terdampak: 5 Ha
24 12 24 17:00	Tanah Longsor	Dsn. Glagah Ombo, Ds. Margopatut, Kec. Sawahan	0	0	0	0	Rumah rusak ringan : 2 unit
23 12 24 1:24	Gempa Bumi	20 km BaratLaut NGANJUK-JATIM	0	0	0	0	
22 12 24 17:00	Tanah Longsor	Sungai Avour (Sungai Buntung), Ds. Gondanglegi, Kec. Prambon	0	0	0	0	Tanggul jebol - Membahayakan pengguna jalan
21 12 24 18:00	Banjir	Kec. Berbek Ds. Sendangbumen Kec. Nganjuk* a. Kel. Payaman b. Kel. Ploso	0	0	0	0	
15 12 24 8:41	Gempa Bumi	15 km BaratDaya NGANJUK-JATIM	0	0	0	0	
13 12 24 14:15	Angin Kencang	Kec. Sukomoro * Jl. Raya Surabaya - Madiun, Ds. Sukomoro * Jl. Desa Bagor Wetan, Ds. Bagor Wetan	0	0	0	0	* Pohon tumbang: 2 unit * Arus lalu lintas terhambat sementara
11 12 24 7:00	Tanah Longsor	Dsn. Kedungingas, Ds. Rowomarto, Kec. Patianrowo	0	0	0	0	Tanggul longsor Panjang 8 m x Sol 8,5 m x Tinggi 3,3 m
09 12 24 9:45	Pohon Tumbang	Jalan Raya Gondang-Lengkong, Ds. Ngunjung, Kec. Gondang	0	0	0	0	Pohon tumbang: 1 unit
06 12 24 21:00	Tanah Longsor	Sungai Widas, Ds. Cangkringan, Kec. Nganjuk	0	0	0	0	Tanggul longosr panjang 50 Meter Lebar longsor 3 meter tinggi 3 meter, sisa tang ...

Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan
06 12 24 15:00	Tanah Longsor	Ds.Desa Klodan, Kec. Ngetos	0	0	0	0	Material batu longsoran diameter 2 meter menutup jalan
05 12 24 20:40	Banjir	Dsn. Sawungaling, Ds. Bagorkulon, Kec. Bagor	0	0	0	0	- Jalan desa tergenang dengan ketinggian : ± 40 cm (Surut Total)
05 12 24 15:00	Kejadian Lain	Dsn. Brayung, Ds. Sumberurip, Kec. Berbek	0	0	0	1	Rumah rusak berat : 1 unit
04 12 24 17:12	Pohon Tumbang	Jl. Citandui 35, Kelurahan Begadung, Kec. Nganjuk	0	0	0	0	- Pohon tumbang: 1 unit - Rumah kost: 1 unit
29 11 24 10:44	Pohon Tumbang	Jl. Warujayeng - Nganjuk, Ds. Wates, Kec. Tanjunganom	0	0	0	0	Pohon tumbang: 1 unit
24 11 24 17:25	Banjir	Dsn. Jegles, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace	0	0	0	0	Tanggul jebol di 2 titik, lebar masing-masing 10m dan 6m.
24 11 24 16:15	Angin Kencang	Jl. Loceret - Warujayeng Nganjuk, Dsn. Mojorejo, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace	0	0	0	0	- Pohon tumbang: 1 unit - Akses jalan terhambat
24 11 24 16:00	Banjir	Jl. Raya Kediri - Nganjuk, Ds. Joho, Kec. Pace	0	0	0	0	
24 11 24 15:30	Banjir	Ds. Banaran, Kec. Pace	0	0	0	0	
24 11 24 15:00	Angin Kencang	Jalan Raya Warujayeng Loceret ,Dsn. Jegles, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace	0	0	0	1	- Pohon tumbang: 1 unit - Motor: 1 unit
20 11 24 19:00	Angin Kencang	Jl. Rejoso - Gondang, Desa Campur Kec. Gondang.	0	0	0	0	Tempat usaha rusak: 1 unit

Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan
20 11 24 15:54	Angin Kencang	Ds. Rejoso, Kec. Rejoso	0	0	0	0	Pohon tumbang: 1 Unit
15 11 24 19:30	Pohon Tumbang	Jalan Raya Gondang – Rejoso Kel. Ngangkatan, Kec. Rejoso	0	0	0	0	Pohon tumbang : 1 Unit
04 11 24 14:30	Angin Kencang	Kec. Nganjuk Kota - Jl. Barito Kelurahan begadung - Jl. Bengawan solo, Kelurahan ...	0	0	0	0	Pohon tumbang: 7 unit
03 11 24 17:00	Angin Kencang	Kel. Kauman, Kec. Nganjuk	0	0	0	0	Pohon tumbang : 1 unit
20 10 24 14:47	Pohon Tumbang	JL. Raya Rejoso, Ds. Mlorah	0	0	0	0	Pohon tumbang menutup akses jalan.
20 10 24 14:41	Gempa Bumi	7 km BaratDaya NGANJUK-JATIM	0	0	0	0	
09 10 24 11:30	Kejadian Lain	Ds. Bajulan, Kec. Loceret	1	0	0	0	
16 09 24 17:00	Kebakaran Hutan	Dsn. Petunggulung, Ds. Margopatut, Kec. Sawahan	0	0	0	0	Luas hutan terbakar: 1 Ha
09 09 24 17:10	Pohon Tumbang	Ds. Ngepeh, Kec. Loceret	0	0	0	0	pohon tumbang: 1 unit
05 09 24 15:30	Pohon Tumbang	Ds. Sambirejo kec. Tanjunganom	0	0	0	0	Pohon tumbang : 1 unit
30 08 24 10:00	Kebakaran Hutan	Ds. Bareng, Kec. Sawahan	0	0	0	0	Luas area terbakar : ± 4 Ha
25 08 24 0:30	Pohon Tumbang	Ds. Losari, Kec. Gondang	0	0	0	5	- Rumah rusak berat : 1 unit - Rumah rusak sedang : 1 Unit - Pohon tumbang : 1 unit

Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan
24 08 24 18:44	Angin Kencang	Ds. Ngadiboyo, Kec. Rejoso	0	0	0	0	- Pohon tumbang: 1 unit - Akses jalan tertutup
16 07 24 13:00	Laka Laut	Sungai Brantas Desa Juwono, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk	1	0	0	0	
29 06 24 18:00	Pohon Tumbang	Jl. Panglima Sudirman, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk	0	0	0	0	- Pohon Tumbang : 1 batang berjenis Sepatu Dea
25 06 24 13:00	Pohon Tumbang	Jl. Supriyadi No. 10 Mangundikaran, Mangun Dikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk	0	0	0	0	
03 06 24 9:00	Tanah Longsor	Petak 2A-1 RPH Sugihan BKPH Pace, KPH Kediri, Dkh. Ngadisuko, Desa Duren, Kec. Sawahan	0	0	0	1	Lebar ± 50 Meter Panjang ± 150 Meter
28 05 24 12:00	Angin Kencang	Dsn. Cangkringan, Ds. Pacewetan, Kec. Pace	0	0	0	0	- Rumah rusak ringan: 1 unit
04 05 24 15:00	Pohon Tumbang	Jl. Raya Sukomoro, Ds. Kecubung, Kec. Pace	0	0	0	0	
04 05 24 14:00	Angin Kencang	Jl. Letjen S. Parman 25-29, Cangkringan, Kec. Nganjuk	0	0	0	0	- Pohon Tumbang: 1 Unit - Menimpa Jaringan Telekomunikasi
24 04 24 15:30	Banjir	Dsn. Balonggebang, Ds. Balonggebang, Kec. Gondang.	0	0	0	0	Rumah terdampak: 18 Unit
23 04 24 17:30	Angin Kencang	Dsn. Jaruman, Ds. Godean, Kec. Loceret	0	0	0	0	Pohon tumbang 1 unit
23 04 24 16:57	Banjir	Dsn. Banyurip, Ds. Rejoso, Kec. Rejoso	0	0	0	0	

Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan
29 03 24 12:49	Gempa Bumi	10 km Tenggara NGANJUK-JATIM	0	0	0	0	
28 03 24 14:00	Banjir	Dsn. Sempayang, Ds. Ja'an, Kec. Gondang	0	0	0	0	Rumah Tergenang: 6 Unit
16 03 24 16:30	Angin Kencang	Ds. Sengkut, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk.	0	0	0	0	-Rumah rusak ringan: 1 unit -Pohon tumbang: 1 unit
06 03 24 15:00	Angin Kencang	Jln Raya Loceret - Bajulan, RT 03 RW 11, Ds. Ngepeh, Kec. Loceret.	0	0	0	1	-Pohon tumbang: 1 unit -Kendaraan R2 rusak
06 03 24 14:30	Angin Kencang	RT 02 RW 02, Ds. Sekaran, Kec. Loceret	0	0	0	0	-Pohon tumbang : 1 unit -Kabel Listrik terputus -Akses jln tertutup pohon tumbang
02 03 24 21:00	Banjir	Ds. Banaran, Kec. Pace	0	0	0	0	KK terdampak: 16 KK
02 03 24 21:00	Banjir	Ds. Tanjungrejo, Kec. Loceret.	0	0	0	0	
02 03 24 18:00	Tanah Longsor	RT.04/RW.02, Dsn. Pengkol, Ds. Sumberurip, Kec. Berbek	0	0	0	0	- Rumah Rusak Ringan : 1 Unit - Kandang Ternak Rusak : 1 Unit
25 02 24 19:50	Pohon Tumbang	Ds. Godean, Kec. Loceret	0	0	0	0	-Pohon tumbang : 1 unit -Akses jalan terhambat
22 02 24 20:50	Pohon Tumbang	Jl. Raya Sukomoro, Ds. Pehserut, Kec. Sukomoro	0	0	0	0	- Pohon tumbang : 1 batang -Akses jalan terganggu
18 02 24 0:00	Angin Kencang	Ds. Kacangan, Kec. Berbek	0	0	0	0	Pohon tumbang : 1 batang -Akses jalan terhambat
15 02 24 17:00	Kejadian Lain	Dsn. Prambon, Ds. Tegaron, Kec. Prambon	1	0	0	0	

Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan
15 02 24 4:59	Gempa Bumi	8 km BaratDaya NGANJUK-JATIM	0	0	0	0	
14 02 24 16:58	Angin Kencang	Ds. Gringkil, Ds. Grojokan, Kec. Berbek	0	0	0	0	Pohon Tumbang : 1 Unit Rumah Rusak Ringan : 1 Unit Tiang Listrik tertimpa dahan pohon
11 02 24 16:23	Banjir	Ds. Banyuurip, Kec. Rejoso	0	0	0	0	
11 02 24 11:00	Tanah Longsor	Dkh. Jaten, RT 01 / RW 24, Ds. Margopatut, Kec. Sawahan	0	0	0	0	- Tanah longsor dengan Panjang 11 m, Lebar 2 m dan Tinggi 11 m -
07 02 24 19:30	Angin Kencang	Ds. Godean, Kec. Loceret	0	0	0	0	Pohon tumbang : 2 unit
04 02 24 15:00	Angin Kencang	Kec. Lengkong -Ds. Sumbersono, Dsn. Sumbersono -Ds. Prayungan, Dsn. Lengki	0	0	0	0	Kec. Lengkong a. Ds. Sumbersono, Dsn. Sumbersono - Rumah rusak ringan : 6 unit
04 02 24 10:10	Kejadian Lain	Dkh. Bareng RT 02 RW 08, Ds. Grojogan, Kec. Berbek	0	0	0	1	Luka Ringan : 1 Jiwa
03 02 24 20:00	Tanah Longsor	RT 02 RW 03 Dusun Kuncir Desa Kuncir, Kec. Ngetos	0	0	0	0	Tebing makam longsor dengan panjang 8 Meter tinggi 4 Meter Tersumbatnya saluran irigasi
02 02 24 11:00	Pohon Tumbang	Jl. Gang 1 Mastrip no. 8, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk	0	0	0	0	- Pohon Tumbang : 1 batang - Menutup akses jalan
01 02 24 16:30	Angin Kencang	- Jl.Kelud, Kel. Kramat, Kec. Nganjuk - Jl. Letjen S. Parman, Kel. Cangkringan - ...	0	0	0	1	Pohon Tumbang: 3 Unit

Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan
31 01 24 16:30	Pohon Tumbang	Dsn. Kemlokolegi, Ds. Kemlokolegi, Kec. Baron	0	0	0	0	-Pohon tumbang: 1 unit -Rumah rusak ringan: 1 unit
18 01 24 14:00	Pohon Tumbang	Jl. Raya Nganjuk - Kediri,Ds. Batembat Kec. Pace	0	0	0	0	Pohon Tumbang : 1 batang
17 01 24 14:41	Angin Kencang	-Jl. Raya Nganjuk Berbek, Dsn. Sekartoyo, Ds. Tempel Wetan, Kec. Loceret -Ds. Ng ...	0	0	0	0	-Pohon tumbang: 3 unit -Akses lalu lintas terhambat -Jaringan listrik dan Lampu Penerangan
11 01 24 16:45	Angin Kencang	Jl. Nasional Nganjuk - Madiun, Ds. Bagor Kulon, Kec. Bagor.	0	0	0	0	-Pohon tumbang: 1 unit -Arus lalu lintas terhambat
10 01 24 16:30	Angin Kencang	Kec. Loceret -Dsn. Candirejo, Kec. Loceret -Ds. Loceret,Kec. Loceret -Dsn. Sambi ...	0	0	0	0	-Ds. Candirejo, Kec. Loceret Pohon tumbang : 1 unit -Ds. Loceret,Kec. Loceret
09 01 24 5:30	Pohon Tumbang	Jl. A. Saleh, Kel. Kauman, Kec. Nganjuk	0	0	0	0	- Pohon Tumbang : 1 Unit - Akses Jalan Terganggu
08 01 24 15:00	Angin Kencang	Jl. Nganjuk - Bojonegoro, Dkh. Gondang, Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso	0	0	0	0	- Pohon Tumbang : 1 batang - Menutup Akses Jalan

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2024

7. Sosial

Kondisi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar bermata pencarian petani masih banyak yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya komitmen pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi, penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan dan kelompok rentan sosial lainnya dan meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dengan memberikan bantuan sosial, bantuan permodalan, dan bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar mampu bangkit dan mandiri. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi sosial masyarakat salah satunya adalah keberadaan sarana sosial dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Capaian kinerja urusan sosial tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.121 Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PMKS/PPKS	63.144	53.995	43.003	56.611	57158
Persentase PMKS/PPKS yang tertangani	97%	106,30%	106,38%	105.04%	100%
Persentase PSKS yang Aktif	78,61%	68,37%	71,40%	75,35%	75,36%

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2024

Capaian tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan penanganan bagi 26 PMKS/PPKS yang dilaporkan dan dapat tertangani oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data PMKS/ PPKS yang Tertangani sebagai berikut:

Tabel 2.122 Jumlah PMKS Tahun 2024

Jenis PMKS	Jumlah PMKS Keseluruhan	Jumlah PMKS yang Tertangani	Satuan
Keluarga Fakir Miskin	53,655	53,655	Orang
Anak Jalanan	14	14	Orang
Tuna Susila	14	14	Orang
Pengemis	1	1	Orang
Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	40	40	Orang
Anak Balita Terlantar	0	0	Orang
Anak Terlantar	7	7	Orang
Anak Berhadapan dengan Hukum	44	44	Orang
Anak dengan Kedisabilitasan :	63	63	Orang
a. Tubuh	60	60	Orang
b. Netra	0	0	Orang
c. Cacat Wicara	0	0	Orang
d. Mental	2	2	Orang
e. Cacat Ganda	1	1	Orang
Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Diperlakukan Salah	0	0	Orang
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	Orang
Lanjut Usia Terlantar	21	21	Orang
Penyandang Disabilitas dan Penyandang Penyakit Kronis	**72**	**72**	Orang
a. Tubuh	56	56	Orang
b. Netra	2	2	Orang
c. Cacat Wicara	0	0	Orang
d. Mental	14	14	Orang
e. Cacat Ganda	0	0	Orang
f. Penderita Penyakit Kronis	0	0	Orang
Pemulung	0	0	Orang
Kelompok Minoritas (Waria 108 dan Gay 980)	366	366	Orang
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	0	0	Orang
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	2,484	2,484	Orang
Korban Penyalahgunaan Napza	1	1	Orang
Korban Trafficking	0	0	Orang
Korban Tindakan Kekerasan atau yg Diperlakukan Salah	**0**	**0**	Orang
a. Wanita	0	0	Orang
b. Laki – laki	0	0	Orang
c. Lanjut Usia	0	0	Orang
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	1	1	Orang

Jenis PMKS	Jumlah PMKS Keseluruhan	Jumlah PMKS yang Tertangani	Satuan
Korban Bencana Alam	375	375	Orang
Korban Bencana Sosial	0	0	Orang
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	0	Orang
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	Orang
Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0	0	Orang
Jumlah	**57.158**	**57,158**	Orang
Rata rata	**100**		%

Sumber: LKjIP Dinas Sosial PPPA

Dikarenakan belum adanya pendataan secara menyeluruh bagi PMKS/PPKS di Kabupaten Nganjuk maka untuk mengukur penurunan PMKS/PPKS disandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun N. Setiap Tahun penurunan PMKS/PPKS tidak dapat dipastikan dikarenakan jumlah PMKS/PPKS yang setiap tahunnya berubah-ubah.

PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah data yang mencakup perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, dan lembaga. Data ini mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Capaian PSKS Tahun 2024 (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2.123 Jumlah PSKS Aktif Tahun 2024

No.	Jenis PSKS	Jumlah Anggota	Anggota Aktif	Anggota Tidak Aktif	Aktif (%)
1.	Pekerja Sosial Profesional	0	0	0	100
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	117	80	37	68,37
3.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	18	18	0	100
4.	Organisasi Sosial	27	27	0	100
5.	Karang Taruna	305	222	83	72,78
6.	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat)	20	20	0	100
Jumlah/Persentase yang Aktif		**487**	**367**	**120**	**75,36**

Sumber: Dinas Sosial dan PPPA, 2024

Penanganan PMKS pada tahun 2024 mencapai 100 persen. Tingginya capaian penanganan PPKS ini merupakan hasil kolaborasi program dan kegiatan Dinas Sosial dengan PSKS yang aktif di Kabupaten Nganjuk.

I.2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Pencapaian sasaran "Meningkatkan penyerapan tenaga kerja" telah dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan dengan hasil yang sudah nampak yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Capaian realisasi Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja sebagai berikut :

Tabel 2.124 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	65,75	64,24	66,79	66,89	69,79

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari dua per tiga penduduk Kabupaten Nganjuk termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yaitu 2,9 persen menjadi 69,79 persen. Sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2020-2021 akibat Pandemi covid-19 yang memukul sektor tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk. Awal Covid-19 yaitu tahun 2020 TPAK turun dibanding tahun 2019 yaitu 0,92 persen, dan pada tahun 2021 TPAK kembali turun menjadi 64,24 persen turun tajam dibanding tahun 2019 sebesar -2,43 persen.

Tabel 2.125 Rasio Ketergantungan

Data	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun keatas	335.734	339.071	343.277	348.134	368.360
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	768.168	770.612	773756	796.374	780.366
Rasio Ketergantungan (%)	43,71	44,00	44,37	47,71	47,20

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Profil ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk sangat terkait erat dengan angka ketergantungan jumlah penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 rasio ketergantungan di Kabupaten Nganjuk cenderung meningkat. Pada tahun 2023-2024 rasio ketergantungannya di kisaran 47 % meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 44,37%. Ini menunjukkan bahwa tren pertumbuhan penduduk usia non produktif meningkat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk usia produktif.

Penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Nganjuk pada Agustus 2023 sebesar 891,12 ribu orang atau mengalami kenaikan 43,52 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Nganjuk. Sebanyak 627,40 ribu orang atau sekitar 69,79 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja,

sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Nganjuk pada Agustus 2024 terdiri dari 603,10 ribu orang bekerja dan 24,30 ribu orang menganggur. Terjadi peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 31,29 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Dalam hal ini, terjadi penambahan penduduk bekerja sekitar 34,90 ribu orang dan pengurangan penduduk dengan kategori pengangguran sebanyak 3,61 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 69,79 persen atau mengalami kenaikan sebesar 2,90 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2023. Kenaikan TPAK ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Nganjuk. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 84,35 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 55,22 persen.

Tabel 2.126 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2022-Ags 2023		Perubahan Ags 2023-Ags 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	847,60	891,13	898,95	43,53	5,14	7,82	0,88
Angkatan Kerja	566,10	596,11	627,40	30,01	5,30	31,29	5,25
- Bekerja	539,24	568,20	603,10	28,96	5,37	34,90	6,14
- Pengangguran	26,85	27,91	24,30	1,06	3,95	-3,61	-12,93
Bukan Angkatan Kerja	281,51	295,01	271,55	13,50	4,80	-23,46	-7,95
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,74	4,68	3,87	-0,06		-0,81	
- Laki-laki	4,02	4,59	3,80	0,57		-0,79	
- Perempuan	5,92	4,84	3,97	-1,08		-0,87	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,79	66,89	69,79	0,10		2,90	
- Laki-laki	83,64	84,91	84,35	1,27		-0,56	
- Perempuan	50,31	48,86	55,22	-1,45		6,36	

Sumber: BPS Kab.Nganjuk Tahun 2025

Berdasarkan kondisi umum ketenagakerjaan Agustus 2024 yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian yang di antaranya: ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan, produktivitas, dan juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK.

Di Kabupaten Nganjuk, dari tahun ke tahun TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki yang terjun ke pasar kerja. TPT perempuan juga sedikit lebih tinggi dari TPT laki-laki, dimana pekerja perempuan masih mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, isu lain yang masih terjadi adalah TPT lulusan SMK yang menunjukkan angka tertinggi dibandingkan penduduk usia kerja dengan jenjang pendidikan lainnya. Tingginya TPT pada lulusan SMK dan juga pada lulusan SMA, selain isu link and match antara kemampuan/ skill dengan ketersediaan lapangan pekerjaan juga kemungkinan besar karena karakteristik angkatan kerja pada jenjang pendidikan ini cenderung untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki terutama pada kelompok pendatang baru di pasar kerja sehingga waktu tunggu dari saat menyatakan terjun di pasar kerja atau berniat untuk mencari pekerjaan hingga memperoleh pekerjaan yang sesuai akan relatif lebih lama dibanding angkatan kerja pada jenjang lain. Pelaksanaan job fair bisa menjadi salah satu sarana untuk memangkas waktu tunggu karena bisa mempercepat pertemuan antara pencari kerja berkemampuan khusus ini dengan penyedia lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan khusus tersebut. Perkembangan sektor Manufaktur di Kabupaten Nganjuk juga terlihat dari bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor Manufaktur. Sedangkan perkembangan sektor pertanian masih

sangat dipengaruhi musim, sebagaimana pada Agustus 2024 ini terpengaruh oleh musim panen bawang merah dan cengkeh.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu perlu fasilitasi pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan meningkatkan keterampilan perempuan dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan ekonomi. Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

Tabel 127 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian KDRT yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2024

Perlindungan anak dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk sebagai kabupaten layak anak diwujudkan dengan pemenuhan hak-hak anak yaitu:

a. hak sipil dan kebebasan,
b. hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan,
d. hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya,
e. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai kepedulian kepada perempuan dan anak, di antaranya, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bhayangkara, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Nganjuk, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan *Women Crisis Center* (WCC).

Beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.128 Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024

Jenis Tindak Kekerasan	Jumlah Kasus yang Melapor	Jumlah Kasus yang Ditangani	Satuan
Fisik	16	16	Kasus
Psikis	34	34	Kasus
Seksual	22	22	Kasus
Penelantaran	2	2	Kasus
Trafficking	0	0	Kasus
Lainnya	6	6	Kasus
Jumlah	**78**	**78**	**Kasus**
Rata rata	**100**		**%**

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2024

Bentuk-bentuk kekerasan yang berbasis gender menjadi beberapa agenda Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Permasalahan berbasis gender akan merugikan perkembangan fisik maupun non fisik terhadap korban dalam mencapai generasi SDM yang unggul. Pencapaian SDM Unggul menjadi prioritas nasional. Sehingga permasalahan berbasis gender harus segera ditekan hingga tanpa kasus. Pada tahun 2024 kasus psikis menempati urutan tertinggi mencapai 34 kasus, sedangkan kasus seksual menempati urutan kedua tertinggi yang mencapai 22 kasus.

Tabel 2.129 Kecamatan dengan Indikator Layak Anak

Kecamatan	Kecamatan yang Mendekati Indikator Layak Anak
Bagor	Sudah
Baron	Sudah
Berbek	Sudah
Gondang	Belum
Jatikalen	Sudah
Kertosono	Belum
Lengkong	Sudah
Loceret	Sudah
Nganjuk	Sudah
Ngetos	Belum
Ngluyu	Sudah
Ngronggot	Sudah
Pace	Belum
Patianrowo	Belum
Prambon	Belum
Rejoso	Sudah
Sawahan	Belum
Sukomoro	Belum
Tanjunganom	Sudah
Wilangan	Belum
Jumlah	**11**
Rata rata	**55%**

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2024

Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang sosial secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang cukup tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Selain berdasarkan idnidkator diatas, perlindungan anak juga diukur dengan Indeks perlindungan Anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah menghitung capaian pembangunan perlindungan anak. Sedangkan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menghitung capaian pemenuhan hak anak. Selanjutnya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPHA) menghitung capaian yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak penyadang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar.

IPA - IPHA - IPKA menjadi dasar dlm penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan Pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah.

IPA disusun berdasarkan komitmen Kovensi Hak- Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak.

Tabel 2.130 Indeks Perlindungan Anak

Indikator	Tahun	
	2021	2022
Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	51,48	54,12
Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	82,78	81,99
Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	81,52	82,22
Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	30,96	33,75
Indeks D5 Perlindungan Khusus	81,17	72,56
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,61	65,70

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk

3. Ketahanan Pangan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan, dalam kaitan ini pemerintah melakukan: pengamatan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap kecukupan ketersediaan pangan, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Ketahanan pangan juga menyangkut lembaga/instansi, dalam menyelenggarakan operasional yang sesuai dengan potensi dan budaya setempat, mengingat cakupan yang multi sektor dan multi wilayah dalam peragaman kegiatan ketahanan pangan sangat membutuhkan adanya koordinasi lintas sektoral yang mantap dan dukungan yang penuh dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk, guna mewujudkan ketahanan pangan daerah maupun

lokal wilayah. Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari tingkat ketersediaan konsumsi pangan dan penyaluran raskin.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah Kabupaten Nganjuk khususnya dalam meningkatkan sinergitas berbagai sektor perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Tujuan dari RAD-PG di antaranya untuk menghindari rawan pangan, *stunting*, dan kemiskinan.

Kinerja ketahanan pangan salah satunya diukur dari ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk.

Adapun ketersediaan pangan utama menunjukkan jumlah pangan utama (Beras) yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Ketersediaan pangan utama diukur dalam bentuk persentase perbandingan antara rata rata jumlah ketersediaan pangan utama dengan rata rata konsumsi pangan utama. Berikut data ketersediaan pangan utama kabupaten Nganjuk:

Tabel 2.131 Ketersediaan pangan Utama Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan Pangan Utama (%)	249,94	297,17	300,94	320,20	424,48

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan tabel diatas persentase ketersediaan pangan utama Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun memiliki nilai diatas 100% dan terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa secara agregat rata-rata ketersediaan pangan utama di Kabupaten Nganjuk dapat mencukupi bahkan melebihi (surplus) kebutuhan rata rata konsumsi pangan utama.

Tabel 2.132 Data Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 (Ton)

No	Komoditas	2020		2021		2022		2023		2024	
		Total Ketersediaan	Total Kebutuhan	Total Ketersediaan	Total Kebutuhan	Total Ketersediaan	Total Kebutuhan	Total Ketersediaan	Total Kebutuhan	Total Ketersediaan	Total Kebutuhan
1	Padi	313.719,22	105.047,75	313.946,83	104.473,29	185.664,18	124.772,76	340.581,23	124.474,48	411.989,45	126.026,24
2	Jagung	193.557,84	1.853,65	238.956,20	1.864,20	180.439,44	106.796,22	214.387,43	30.288,26	350.558	35.538
3	Kedelai	27.315,32	55,50	9.519,58	55,81	15.608,15	13.059,23	10.766,45	12.875,01	7.090,06	12.656
4	Bawang Merah	128.393,5	3.107,92	142.636,5	3.125,60	95.036,5	4.032,43	196.518,22	31.298,76	122.281	34.284
5	Bawang Putih	2.160,0	2.009,05	-	-	2.372,63	5.181,11	5.674,47	5.404,26	5.724,84	4.430,19
6	Cabe Besar	2.707,5	2.619,53	1.556,4	2.634,43	2.718,00	1.441,92	651,16	1.222,62	223,80	1.590,69
7	Cabe Rawit	7.033,8	2.208,84	*5.812,6*	*2.221,41*	10.629,00	5.056,94	6.039,96	5.094,53	4.319,75	6.083,68
8	Gula Pasir	16.790,5	7.558,91	*15.987,0*	*7.601,90*	26.261,74	13.155,05	41.123,90	14.480,30	41.163,50	13.700,62
9	Minyak Goreng	7.200	6.071,55	*7.200*	*6.106,08*	12.392,47	12.748,59	27.553	25.048	30.576	25.519
10	Daging Sapi	383,79	2.952,53	*995,63*	*2.969,32*	995,63	3.972,67	575,86	3.308	577,24	3.508,01
11	Daging Ayam	1.408,54	6.071,55	*1.453,89*	*6.106,08*	2.137,05	5.781,45	7.877,68	19.133,87	26.642,03	26.642
12	Telur	6.133,14	7.203,72	*6.133,14*	*7.244,69*	5.225,37	7.290,62	5.269	12.219	5.144,22	5.144,22

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

Capaian ini tentu saja didukung oleh beberapa factor pendorong diantanranya:

1. Nganjuk merupakan daerah sentra pertanian yang mendukung dalam penyediaan ketersediaan komoditas pangan
2. Tersedianya lumbung pangan yang berada di sejumlah desa dalam menjaga ketersediaan pangan berupa cadangan pangan.

Ketersediaan energi dan protein merupakan gambaran dari pencapaian kinerja ketahanan pangan daerah. Ketersediaan energi dan protein selain berkaitan dengan aspek produksi, juga mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat. Standar kecukupan protein berdasarkan kaidah gizi sehat adalah sebesar 63 gram per kapita/hari sedangkan standar kecukupan energi berdasarkan kaidah gizi sehat adalah sebesar 2.400 kkal per kapita/hari. Dengan demikian perencanaan target kinerja 3 tahun ke depan berpedoman pada standar tersebut.

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan penyajian data dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di tingkat rumah tangga konsumen untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per KKal/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah

Bappenas mengamanatkan melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi RAD-PG bahwa Pemerintah Daerah harus mampu mengidentifikasi kelurahan/ desa mana saja yang rawan pangan, *stunting*, dan kemiskinan tinggi.

Tabel 2.133 Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ketersediaan Energi (kal/kap/hr)	4352	3597	3061	2192	5.153
Jumlah Ketersediaan Protein (gr/Ka/hr)	171,90	142,34	118,60	61,00	148,76
SKOR PPH	92,1	93,7	95,3	91,2	93,39

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk 2024

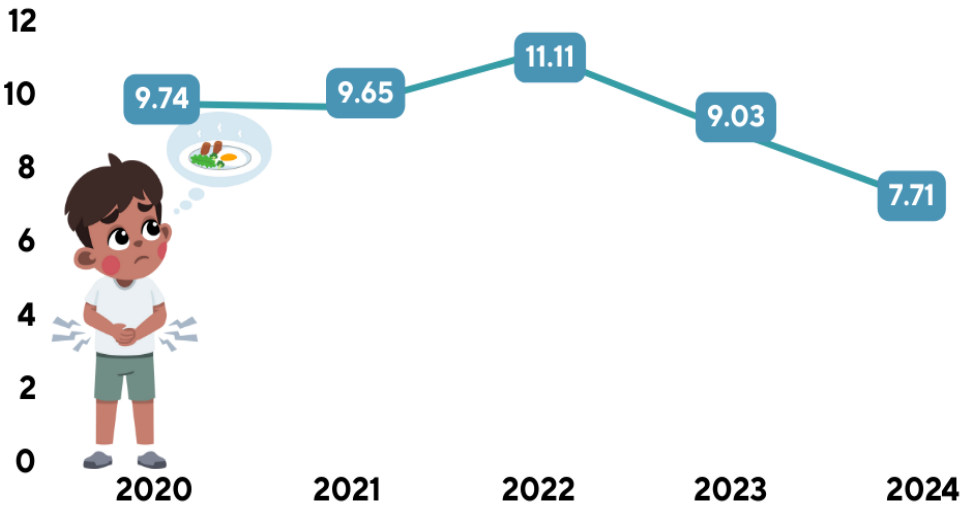
Salah satu alat ukur kerawanan pangan suatu wilayah adalah Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, *Prevalence of Undernourishment* (POU). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. POU dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi suatu daerah.

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan ntuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Adapun nilai POU dirilis secara periodik tahunan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai POU Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai

PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten



Gambar 2.38 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 prevalensinya sebesar 9,74%, sedikit menurun menjadi 9,65% di 2021, lalu sempat meningkat menjadi 11,11% pada 2022. Namun, pada tahun berikutnya kondisi membaik dengan penurunan ke 9,03% di 2023 dan mencapai titik terendah 7,71% pada 2024. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat, meskipun fluktuasi di tahun

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pangan merupakan salah satu

urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 12, Undang-Undang [UU] Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [UU Pemerintahan Daerah). Berdasarkan Lampiran UU Pemerintahan Daerah, konsumsi pangan merupakan salah satu urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat berkewajiban untuk penetapan target pencapaian konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi [AKG]. Pemerintah provinsi mempunyai kewajiban untuk melakukan promosi pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. Kewajiban pemerintah kabupaten/kota adalah melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan AKG.

Pemenuhan kebutuhan pangan sesual AKG seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk komposisi pangan yang menggambarkan keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Adapun Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan [PPH]. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Skor PPH merupakan komposit dari nilai konsumsi masyarakat yang meliputi kelompok pangan : 1) Padipadian; 2) Umbi-umbian; 3) Pangan Hewani; 4) Minyak dan lemak; 5) Buah dan biji berminyak; 6) Kacang-kacangan; 7) Gula; 8) Sayuran dan buah dan 9)Aneka bumbu dan bahan minuman. Adapun nilai maksimal Skor PPH adalah 100, semakin tinggi skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang.

Tabel 2.134 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

PPH	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nasional	86,30	87,20	92,29	94,10	93,50
Prov. Jawa Timur	87,00	88,70	92,80	93,80	93,90
Kab. Nganjuk	82,80	91,30	80,80	91,00	91,70

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat Skor PPH Kabupaten Nganjuk masih dibawah dengan skor PPH yang dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dan nasional, namun demikian dari tahun ke tahun Skor PPH Kabupaten Nganjuk menunjukan kenaikan dari 2022-2024, hal ini mengindikasikan konsumsi pangan di kabupaten Nganjuk semakin beragam dan bergizi seimbang. Adapun beberapa faktor pendorong dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan Skor PPH adalah:

Faktor Pendorong :

1. Semakin banyak media penyebaran informasi yang bisa digunakan dalam edukasi konsumsi pangan
2. Adanya program Makan Bergizi Gratis

Tantangan :

1. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat berpengaruh pada pola konsumsi
2. Mempromosikan penganekaragaman konsumsi melalui pemanfaatan pangan lokal
3. Meningkatkan produksi dan mengembangkan teknologi dalam pengolahan aneka pangan lokal pada UMKM

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat

ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian Masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi:

1. Sementara (transien) ketika ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang biasanya dikaitkan dengan goncangan atau tekanan khusus seperti kekeringan, banjir atau kerusuhan sipil; dan
2. Kronis yaitu ketika rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan pada waktu normal karena mereka tidak memiliki cukup tanah pendapatan atau aset produktif atau mengalami rasio ketergantungan yang tinggi, sakit kronis atau hambatan sosial.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan. Desa/kelurahan diklasifikasikan

dalam 6 (enam) kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat keparahan dan penyebab situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan yang masuk dalam prioritas 1, 2, dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 Rentan Pangan Tinggi, Prioritas 2 Rentan Pangan Sedang, Prioritas 3 Rentan Pangan Rendah. Desa/kelurahan di prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 Tahan Pangan Rendah, Prioritas 5 Tahan Pangan Sedang, Prioritas 6 Tahan Pangan Tinggi. Berikut hasil analisis FSVA Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2024:

Tabel 2.135 Hasil Analisis FVSA Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2024

NO	Tahun	Prioritas (Desa)					
		1	2	3	4	5	6
1	2021	1	7	16	68	118	74
2	2022	-	-	-	-	-	-
3	2023	0	0	2	5	10	267
4	2024	0	0	2	14	164	104

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kerawanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dasar, pemberian bantuan sosial dan pengembangan usaha produktif/UMKM
2. Peningkatan akses air bersih
3. Penyediaan tenaga kesehatan merata
4. Pemanfaatan Teknologi Pertanian dan perlindungan lahan pertanian sebagai penyedia pangan masyarakat
5. Menyediakan dan/atau mengoptimalkan lumbung pangan masyarakat beserta sarana prasarana penunjang lainnya

Dari beberapa upaya tersebut masih terdapat kendala/ hambatan dalam rangka penanggulangan kerawanan pangan diantaranya:

1. Masih belum memadainya infrastruktur dasar di daerah rawan pangan
2. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah rawan pangan
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan pangan lokal.

4. Pertanahan

Dalam rangka mendukung proses pembangunan, khususnya pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan urusan pertanahan. Penyelenggaraan urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk melalui beberapa kegiatan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian masalah pertanahan, dengan hasil sebagai berikut :

No	Tahun	Kegiatan yang dilaksanakan	
1	2022	1	Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data bangunan permukiman terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Kertosono Kediri di sejumlah 15 desa 3 kecamatan
		2	Melaksanakan identifikasi tanah milik Pemda di Kelurahan se Kabupaten Nganjuk sebanyak 20 Kelurahan
2	2023	1	Melakukan pembayaran biaya investasi dan akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk relokasi penduduk dampak pembangunan Bendungan Semantok atas nama Bupati Nganjuk berdasarkan dari tagihan Perum Perhutani Jatim dan Tagihan dari Kementerian LHK Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)

No	Tahun	Kegiatan yang dilaksanakan	
		2	Memfasilitasi membuat penetapan lokasi tanah untuk pembangunan fasilitas umum sesuai dengan surat permohonan dari instansi yang memerlukan tanah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk pekerjaan pelebaran jalan pada jembatan Kutorejo di Desa Kutorejo dan Desa Kerep Kidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk kurang lebih 2.400 meter persegi
3	2024	1	Melaksanakan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan hutan (PPTPKH) untuk permukiman dan fasum fasos Kabupaten Nganjuk sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang persetujuan pelepasan Kawasan hutan seluas 54,65 Ha
		2	Proses penataan batas lahan pengganti dalam rangka tukar menukar Kawasan hutan (TMKH) Kabupaten Bondowoso berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penunjukan Kawasan hutan lindung yang berasal dari lahan pengganti dalam rangka TMKH seluas kurang lebih 18,80 Ha
		3	Melakukan pembayaran investasi pada lokasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan non komersial untuk pembangunan penggunaan Kawasan hutan (penampungan korban bencana alam) atas nama Bupati Nganjuk sesuai surat tagihan Perum Perhutani Jawa Timur

Sumber Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan Bidang Pertanahan sebagai berikut:

1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.

   Indikator ini digunakan untuk mengukur Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan, adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} x100\%$$

2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum.

   Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum, dengan rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} x100\%$$

3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal.

   Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal, dengan rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang}}{\text{Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan}} x100\%$$

4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

   Indikator ini digunakan untuk Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, dengan rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} x100\%$$

5. Tersedianya tanah untuk masyarakat.

   Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase ketersediaan tanah untuk Masyarakat, dengan rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} x100\%$$

6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.

   Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi, dengan rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah Garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan}} x100\%$$

Adapun data capaian IKK urusan pemerintahan Bidang Pertanahan 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.136 Data Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Indikator Kinerja Kunci	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100 %	100%
Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	8,72%	100%
Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	100%	100%
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Catatan:

a. Dari tahun 2022-2024 luas tanah obyek landreform yang ditrisbusikan kepada penerima luasannya dibawah 0,5 ha.
b. Terdapat izin membuka tanah (persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan) pada akhir tahun 2023, sehingga Capaian tersedianya tanah untuk masyarakat baru dapat dihitung di tahun 2024 yaitu sebesar 66,63%.

5. Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan aspek keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dengan fungsi lingkungan, yang dapat menjamin pembangunan daerah berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal.

Di bidang pengelolaan sampah kinerjanya cenderung mengalami peningkatan, baik itu dalam cakupan penanganannya maupun persentase pengurangannya. Dari aturan Permendagri

Nomor 86 Tahun 2017 ada perubahan indikator sampah perkotaan yang terangkut ke TPA yaitu dalam penanganan sampah dan pengurangan sampah. Begitu pula dengan luasan RTH perkotaan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir secara konsisten mengalami peningkatan.

Tabel 2.137 Pengelolaan Sampah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2024 (Ton)

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Target sampah yang terangkut dalam 1 tahun	154.373,54	162.013,72	162.107,74	163.086,82	167.098,17
2	Realisasi sampah yang terangkut	143.806,48	81.561,85	65.411,62	66.102,05	65471,86

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2024

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara meningkatkan cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah dan meningkatkan sampah perkotaan yang terangkut ke TPA. Upaya-upaya ini telah meningkatkan realisasi sampah perkotaan yang terangkut ke TPA sebesar 66.102,05 ton atau 40,53% dari 163.086,82 ton perkiraan produksi sampah.

Kinerja pengurangan sampah serta penanganan sampah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 disajikan pada Neraca Pengelolaan Sampah. Adapun data tersebut bersumber dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), sebagaimana tabel dibawah

Tabel 2.138 Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2024
Kabupaten Nganjuk

	URAIAN	NILAI (Ton/tahun)
I	**JUMLAH TIMBULAN SAMPAH**	**167098,17**
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	**JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH**	**19390,67**
	Persentase pengurangan sampah	11,6
A	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0
B	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0
C	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	19390,67
III	**JUMLAH PENANGANAN SAMPAH**	**46081,19**
	Persentase penanganan sampah	27,58
D	Pemilahan/Pengumpulan	
E	Pengangkutan*)	0
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
F	Pengolahan	17854,98
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	17854,98
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0
G	Pemrosesan akhir	28226,21
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	28226,21
IV	**SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)**	**65471,86**
	Persentase sampah terkelola	39,18
V	**SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)**	**101626,31**
	Persentase sampah tidak terkelola	60,82

Sumber : SIPSN, 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai pengurangan sampah pada tahun 2024 adalah 19.390,67 Ton/Tahun sedangkan nilai penanganan sampah adalah 46.081,19 Ton/Tahun. Data series mengenai kinerja pengurangan dan penanganan sampah disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 2.139 Kinerja Pengurangan dan Penanganan Sampah (Ton/Thn)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Pengurangan Sampah	n/a	32.960,64	18.768,62	19.073,06	19.390,67
Penanganan Sampah	n/a	45.150,50	45.278,98	45.642,88	46.081,19

Sumber : SIPSN, 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:

a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
b. menyediakan TPS, TPST dan/atau TPA di tempat yang telah ditentukan;
c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA; dan
f. memroses sampah di TPA.

Prinsip pengolahan sampah orang pribadi atau badan wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah di daerah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sedangkan penanganan sampah di TPA secara terpadu dilakukan dengan *system control landfill* atau *sanitary landfill*.

Berdasarkan studi *masterplan* persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa ada tiga skenario yang dapat dilakukan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten nganjuk. Skenario tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skenario pertama: pengolahan eksisting dengan kenaikan penanganan sesuai kemampuan APBN dan kenaikan reduksi di sumber
2. Skenario kedua: pengolahan eksisting dengan kenaikan penanganan sesuai kemampuan APBN serta kenaikan reduksi di sumber dan di TPS 3R
3. Skenario ketiga: pengolahan dengan kenaikan reduksi dan kenaikan penanganan sesuai dengan Jakstrada

Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Nganjuk dan jangkauan pelayanan saat ini berjumlah 3 (tiga) unit, yaitu:

1. TPA Kedungdowo terletak di desa Kedungdowo Kecamatan Kota Nganjuk dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Nganjuk, Rejoso, Gondang, Bagor dan Sukomoro, dengan luas lahan 4,90 Ha dan sistem pengolahan sampah *control landfill* dengan kapasitas sebesar 12.072,38 m3.
2. TPA Pandantoyo terletak di desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan cakupan wilayah perkotaan kecamatan Kertosono, Tanjunganom, Ngronggot, Patianrowo, dengan luas lahan 1,20 Ha dan sistem pengolahan sampah *control landfill* dengan kapasitas sebesar 2.956,50 m3.
3. TPA Bendil terletak di desa Berbek Kecamatan Berbek dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Sawahan, Pace, Berbek, dengan luas lahan 1,2 Ha dan sistem pengolahan sampah *control landfill* dengan kapasitas sebesar 1.463,75 m3.

Tabel 2.140 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk	28950,71	28950,711	16998,55	16998,55	16998,55
2	Luas RTH Perkotaan yang seharusnya ada	5.790,14	5.79014	3.3989,71	3.399,71	3.3989,71
3	Luas RTH perkotaan tahun sebelumnya			31,39	21,12	44,08
4	Penambahan RTH Tahun ini				22,96	7,41
5	Luas RTH perkotaan sampai tahun ini		31,39	31,39	44,08	51,49

Sumber: Dinas LH Kabupaten Nganjuk, 2024

Pemerintah Kabupaten Nganjuk selalu berupaya meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Keberadaan RTH memiliki 3 fungsi yaitu fungsi ekologis, sosial-ekonomi, dan evakuasi. Fungsi ekologis yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan pengatur iklim. RTH juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yaitu RTH mampu memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai *landmark* kota. Sedangkan dalam fungsi evakuasi, RTH digunakan sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana alam.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan Catatan Sipil dan Kependudukan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat dengan menertibkan akta-akta kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang.

Indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil. Hal ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran. Bila dilihat selama kurun waktu tahun 2019-2023,

jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dan Akta kelahiran rata-rata mengalami peningkatan, peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya indentitas diri/administrasi kependudukan. Capaian Kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut:

Tabel 2.141 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2020–2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk wajib KTP	912,587	872,411	873,720	881,118	891.216
Jumlah anak usia 0-17 th kurang sehari	246,237	249,187	285,685	256,226	261,334
Kepemilikan KIA	34890	52246	61149	71649	78445
Penerbitan KIA	8307	17356	220117	71649	78445
Penerbitan KTP	109071	69364	256,117	874928	886210
Kepemilikan KTP	898898	810819	867254	878034	886210
Kepemilikan KTP elektronik	606870	757863	854411	878034	886210
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	98,50%	92,94%	99,26%	99,30%	99,30%
Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	66,50%	86,87%	97,79%	99,65%	99,43%
Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	266317	269717	327987	273133	293820
Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	47,500	23,726	288,991	257,861	274.808
Kepemilikan Akta Kelahiran	255,017	259,817	288,991	257,861	274808
Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	86,87%	91,59%	93%	94,41%	93,53%
Jumlah kematian yang dilaporkan	24,119	27,213	2,113	33,447	7.948
Penerbitan Kutipan Akta Kematian	6,913	3,177	2,002	33,447	7.948
Jumlah Instansi yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	5	5	7	8	8

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nganjuk 2024

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para *stakeholder* di daerah melalaui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Salah satu indikator untuk melihat pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah jumlah pengurus yang telah pelatihan BUMDES.

Tabel 2.142 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
.Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7079	0,73197	0,7032	0,7591	0,78191

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nganjuk 2024

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Sumber data dalam pengambilan data dilakukan di seluruh desa dengan harapan mendapatkan data dan informasi sesuai fakta yang ada di desa. Dalam Penentuan Status IDM, klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

a. Desa Sangat Tertinggal: IDM ≤ 0,4907
b. Desa Tertinggal: 0,4907 < IDM ≤ 0,5989

c. Desa Berkembang: 0,5989 < IDM ≤ 0,7072 4
d. Desa Maju: 0,7072 < IDM ≤ 0,81555
e. Desa Mandiri: IDM > 0,8155

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan pada tahun 2022. Sehingga pendekatan dan intervensi yang diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri akan berbeda sesuai hasil *updating* data.

Tabel 2.143 IDM per Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	MANDIRI					MAJU					BERKEMBANG					TERTINGGAL					SANGAT TERTINGGAL				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	SAWAHAN	**9**	0	0	0	2	5	7	7	8	7	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NGETOS	**9**	0	1	1	1	1	2	6	7	7	7	7	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BERBEK	**19**	1	1	1	1	1	5	5	5	8	14	13	13	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	LOCERET	**22**	0	3	4	6	8	13	13	12	12	14	9	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PACE	**18**	0	0	1	1	2	5	5	4	13	16	13	13	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PRAMBON	**14**	0	1	2	3	8	6	12	12	11	6	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	NGRONGGOT	**13**	0	0	0	3	5	2	4	7	8	7	11	9	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KERTOSONO	**13**	1	3	3	4	6	4	2	2	2	7	8	8	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PATIANROWO	**11**	0	0	0	0	4	11	11	11	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BARON	**11**	0	0	2	2	8	1	8	6	6	3	10	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TANJUNGANOM	**14**	0	0	0	0	1	4	8	11	13	13	10	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SUKOMORO	**10**	0	0	0	0	1	3	3	3	6	9	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	NGANJUK	**2**	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BAGOR	**19**	0	2	2	5	7	4	10	14	14	12	15	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	WILANGAN	**6**	0	0	0	2	5	5	6	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	REJOSO	**24**	3	4	4	7	2	4	10	10	15	21	18	11	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	GONDANG	**17**	1	1	1	2	4	4	4	6	14	12	12	12	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	NGLUYU	**6**	0	0	0	2	0	5	6	6	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	LENGKONG	**16**	0	1	1	4	3	4	8	6	11	13	12	8	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	JATIKALEN	**11**	1	1	1	1	2	2	6	6	6	9	9	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	**264**	**7**	**18**	**23**	**47**	**74**	**92**	**136**	**144**	**178**	**181**	**167**	**112**	**97**	**39**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	3

Sumber: Dinas PMD, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat peningkatan status desa mandiri yang semula 47 desa pada tahun 2023 menjadi 74 desa, desa maju yang semula 178 desa menjadi 181 desa, dan desa berkembang berkurang yang semula 39 desa menjadi 6 desa. Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan pada Tahun 2024. Sehingga Pendekatan dan intervensi yang diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri akan berbeda sesuai hasil Updating data.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu indikator kinerja untuk urusan keluarga berencana dan sejahtera di Kabupaten Nganjuk adalah perkembangan rasio akseptor KB. Tingkat fertilitas Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Nganjuk cukup Baik. Masyarakat Kabupaten Nganjuk saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting daripada kuantitasnya. Capaian kinerja urusan keluarga berencana tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.144 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. *Total Fertility Rate (TFR)*/Total Angka Kelahiran	1,88 Anak	1,83 Anak	1,73 Anak	1,72 Anak	1,52 Anak
2. *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	79,36%	78,46%	78,17%	77,12%	73,82%
3. Prosentase Usia Nikah Pertama di Bawah Usia 21 Tahun	7,833%	9,18%	7,51%	7,05%	N/A
4. Presentase Pasangan Usia Subur yang seharusnya ikut KB tapi belum KB (*unmet need*)	9,20%	9,66%	10,05%	7,82%	6,42%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Nganjuk 2025

Perpindahan penduduk yang lebih besar dari luar Kabupaten Nganjuk diperkirakan akan terjadi karena struktur PDRB Kabupaten Nganjuk bergeser ke arah sektor sekunder yang ditandai dengan pertumbuhan industri dan perdagangan.

9. Perhubungan

Penyelenggaran urusan perhubungan sangat erat kaitannya dengan sistem transportasi yang memiliki peranan penting untuk mendukung kegiatan ekonomi-sosial masyarakat serta pengembangan wilayah. Untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, di mana mobilitas transportasi orang dan barang semakin meningkat, maka penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Dalam rangka memfasilitasi masyarakat menggunakan angkutan umum yang nyaman, memberikan rasa aman kepada pengguna jalan, serta menciptakan lalu lintas yang lancar sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi:

a. Pelayanan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
b. Penyediaan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C dan Halte;
c. Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan; dan
d. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka menjamin ketertiban dan keamanan lalu lintas.

Kegiatan di atas bermuara pada komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan keselamatan transportasi di Kabupaten Nganjuk. Namun demikian kejadian kecelakaan di Kabupaten Nganjuk masih tergolong tinggi dan fluktuatif, hal ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas dan volume kendaraan, kondisi kendaraan yang tidak laik jalan kesadaran berlalu lintas masyarakat yang masih kurang, perlengkapan jalan yang masih kurang serta beberapa faktor lainnya. Berikut data jumlah kendaraan serta data kecelakaan Nganjuk Tahun 2020-2024:

Tabel 2.145 Data Jumlah Kendaraan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

No	Data Kendaraan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Roda 4	38.761	32.145	55.419	57.847	378.429
2	Roda 2	351.330	359.729	334.292	355.697	61.588
Jumlah		390.091	391.874	389.711	413.544	440.017

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, 2025

Berdasarkan data tabel 2.105, dapat dilihat jumlah kendaraan di Kabupaten Nganjuk selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, total kendaraan tercatat sebanyak 390.091 unit, terdiri dari 38.761 unit kendaraan roda empat dan 351.330 unit kendaraan roda dua. Tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 391.874 unit, dengan penurunan jumlah roda empat menjadi 32.145 unit, sedangkan roda dua meningkat menjadi 359.729 unit.

Tahun 2022 menunjukkan sedikit penurunan total kendaraan menjadi 389.711 unit, terdiri dari 55.419 unit roda empat dan 334.292 unit roda dua. Pada tahun 2023, jumlah kendaraan meningkat menjadi 413.544 unit, dengan 57.847 unit roda empat dan 355.697 unit roda dua.

Tahun 2024 mencatatkan total kendaraan terbanyak selama lima tahun terakhir, yakni 440.017 unit. Kenaikan ini didorong oleh lonjakan besar jumlah kendaraan roda empat yang mencapai 378.429 unit, meskipun kendaraan roda dua justru menurun tajam menjadi 61.588 unit.

Tabel 2.146 Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kewenangan Jalan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Lokasi Kejadian	Jumlah Kejadian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan Nasional	85	41	244	252	245
Jalan Provinsi	115	174	83	117	133
Jalan Kabupaten	468	500	593	640	594
Total Kejadian	**668**	**715**	**920**	**1.009**	**972**

Sumber: Kepolisian Resor Nganjuk, 2024

Tabel 2.147 Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

NO	DATA	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meninggal dunia	185	198	201	192	162
2	Luka berat	14	13	23	29	11
3	Luka ringan	1319	1336	1713	2113	2046
4	Kerugian Materi (Rp)	1.191.950.000	1.343.850.000	1.886.200.000	1.828.200.000	1.713.475.000
5	Jumlah Kejadian Kecelakaan	668	742	920	1.009	972

Sumber: Kepolisian Resor Nganjuk, 2024

Untuk mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kecelakaan, pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berupaya melaksanakan beberapa kegiatan pencegahan di antaranya:

1. Penyediaan angkutan sekolah gratis untuk mencegah kejadian kecelakaan yang melibatkan pelajar. Sampai dengan tahun 2023 telah beroperasi dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.148 Data Load Factor Angkutan Sekolah Gratis Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2024

Tahun	LOAD FACTOR												Rata-Rata
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
2022	78,22	75,30	86,35	88,97	91,02	92,40	95,60	94,76	91,23	88,71	98,12	96,32	89,75
2023	79,11	88,81	89,02	90,02	92,32	88,84	94,15	96,14	88,98	92,67	97,87	87,50	90,45
2024	76,38	64,68	85,24	87,32	87,92	84,90	100,94	99,75	99,63	99,90	107,96	99,14	91,15

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

2. Pengujian kendaraan bermotor, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.149 Data Kendaraan Lulus Uji Tahun 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kendaraan Uji kir	14924	14597	13698	11539	11.440
Kend. Lulus Uji	14915	14525	13474	11436	11.229
Kend. Tidak Lulus Uji	9	72	224	103	211
Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir	99,93%	99,50%	98,36%	99,10%	98,15%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, 2024

3. Pemenuhan perlengkapan jalan merupakan upaya mendukung peningkatan keselamatan lalu lintas, adapun pemenuhan perlengkapan jalan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.150 Pemenuhan Perlengkapan Jalan Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Standar Keselamatan

No.	Perlengkapan Jalan	Jumlah Tahun 2018	Jumlah Pengadaan Tahun						Jumlah
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rambu-rambu lalu lintas	1.936	223	0	134	13	42	33	2.381
2	Guardrail	78	0	42	88	0	60	64	332
3	APILL	149	6	4	2	0	3	7	171
4	Cermin Tikungan	12	0	0	0	0	13	5	30
5	Marka	0	0	151,3m²	745,98m²	1330,3m²	-	-	2228 m²
6	Traffic cone	0	0	0	100	0	-	-	100
7	Deliniator	305	200	0	0	0	-	-	505
8	Paku jalan bulat	380	0	0	0	0	-	-	380
9	PJU	4.659	207	450	147	39	84	139	5.725
10	Concret barrier	0	0	0	50	0	-	-	50
11	Pengadaan CCTV	2	2	0	0	0	-	-	4
12	Pengadaan ZOSS	6	0	0	0	0	-	-	6
13	Pengadaan PCTL	0	2	0	0	0	-	-	2

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Dalam rangka menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat pengguna jalan diperlintasan sebidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan upaya mengurangi resiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api dengan menutup perlintasan sebidang yang tidak memenuhi

kriteria dan atau menyediakan peralatan keselamatan perlintasan sebidang pada jalan kewenangan Kabupaten/ Kota dan desa. Pada wilayah kabupaten Nganjuk terdapat 23 (dua Puluh tiga) titik Lokasi perlintasan sebidang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.151 Data Palang Pintu Perlintasan Sebidang KA Nganjuk Tahun 2024

No	Data perlintasan sebidang	Berpalang Pintu	Penjaga Palang Pintu (orang)
1	JPL 106 BARAT POLSEK WILANGAN	√	*
2	JPL 104 NGUDIKAN WILANGAN	√	3
3	JPL 105 TIMUR WILANGAN (Jalan Nasional)	√	*
4	JPL 103 BAGOR KULON (Jalan Nasional)	√	*
5	JPL 102 PASAR BAGOR	√	3
6	JPL 101 SELOREJO BARAT LAPANGAN	√	3
7	JPL 100 SELOREJO TIMUR LAPANGAN	√	3
8	JPL 99 GUYANGAN BAGOR (Jalan Provinsi)	√	*
9	JPL 98 BARAT STASIUN NGANJUK (KAUMAN)	√	*
10	JPL 97A MASTRIP (MANGUNDIKARAN)	√	*
11	JPL 97 PAGARAN KEL. GANUNG KIDUL	√	3
12	JPL 96 POSPOL DS. PEHSERUT SUKOMORO (Simpang 4 TL)	√	3
13	JPL 95 TIMUR PASAR SUKOMORO (simp 4 TL)	√	*
14	JPL 92A KEDUNGSOKO SUKOMORO TIMUR LOTUS	√	3
15	JPL 93 KEDUNGSOKO BARAT POS POLISI	√	3
16	JPL 94 DS. NGLUNDO KEC. SUKOMORO (Wr. Kembar)	√	3
17	JPL 92 DS. MBLIMBING DEPAN GAPURA NGRAJEK	√	3
18	JPL 91 DS. BARONG TANJUNG ANOM	√	3
19	JPL 90 DS. WAUNG BARON (TIMUR STASIUN) (Jalan Nasional)	√	*
20	JPL 89 DS. BARON KEC. BARON (utara pasar baron)	√	3
21	JPL 87 DS. KEMLOKOLEGI KEC. BARON (pandan arum)	√	3
22	JPL 86 DS. LAMBANG KUNING KEC. KERTOSONO	√	4
23	JPL 85 DS BANARAN, KEC. KERTOSONO	√	
Jumlah		**23**	**43**

Sumber: Dinas Perhubungan kabupaten Nganjuk, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, pada tahun 2025 seluruh perlintasan sebidang yang belum berpalang pintu di Kabupaten Nganjuk sudah dapat tertangani, namun demikian masih terdapat *gap* kebutuhan penjaga palang pintu yang telah memenuhi sertifikasi teknis, sehingga diperlukan intervensi terhadap pemenuhan kebutuhan penjaga palang pintu perlintasn sebidang yang memenuhi sertifikasi teknis.

10. Komunikasi dan Informatika

Nilai Indeks SPBE merupakan hasil evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018.

Pada tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah 2,14 (Cukup) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil evaluasi SPBE tahun 2020 yang mendapat Nilai 2,62 (Baik). Pada tahun 2023, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperoleh nilai 3,62 (Sangat Baik) yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil evaluasi SPBE tahun 2022 dengan nilai 2,18 (Cukup). sementara pada tahun 2024 indeks SPBE Kabupaten Nganjuk sebesar 3,84 (sangat baik). Terdapat 4 (empat) domain yang dinilai tingkat kematangannya (Maturity Level) yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE, dijabarkan lagi menjadi 47 indikator.

Adapun nilai masing-masing domain serta perbandingannya dengan nilai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.152 Nilai SPBE Masing-Masing Domain

Domain	2021	2022	2023	2024
Kebijakan Internal SPBE	1,9	2,4	4,2	4,70
Tata Kelola SPBE	1,9	1,6	3,2	4,00
Layanan SPBE	2,75	2,87	4,07	4,02
Domain Manajemen SPBE	1	1	2,55	2,45

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nganjuk 2024

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha pemberdayaan ekonomi rakyat untuk menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan ekonomi berbasis kerakyatan semakin berdaya, serta kemiskinan dan jumlah pengangguran menurun.

Indikator kinerja urusan koperasi dan usaha mikro antara lain persentase koperasi aktif, persentase usaha mikro kecil, persentase usaha menengah di Kabupaten Nganjuk. Capaian kinerja urusan koperasi dan usaha mikro sebagai berikut:

Tabel 2.153 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 (Persen)

No.	DATA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi sehat	215	252	252	261	264
2	% Pertumbuhan usaha Mikro	157,51	89,59	44,13	103,5	28,03

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk 2025

Jumlah koperasi sehat di Kabupaten Nganjuk selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020, jumlah koperasi sehat tercatat sebanyak 215 koperasi. Kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 252 koperasi atau naik sekitar 17,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jumlah koperasi sehat tetap berada pada angka 252 koperasi, menunjukkan kondisi stagnan. Namun pada tahun 2023, jumlah koperasi sehat kembali meningkat menjadi 261 koperasi, dan pada tahun 2024 bertambah lagi menjadi 264

koperasi. Secara kumulatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah koperasi sehat bertambah sebanyak 49 koperasi atau mengalami pertumbuhan sebesar 22,8 persen.

Di sisi lain, perkembangan usaha mikro juga menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2020 tercatat sangat tinggi yaitu sebesar 157,51 persen. Namun pada tahun 2021 pertumbuhannya menurun menjadi 89,59 persen, dan kembali melambat pada tahun 2022 sebesar 44,13 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan usaha mikro kembali menguat hingga mencapai 103,5 persen, meskipun pada tahun 2024 mengalami perlambatan lagi menjadi 28,03 persen

Jumlah koperasi sehat menunjukkan perlunya upaya pemberdayaan koperasi agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Tabel 2.154 Data Koperasi Sehat

DATA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi	879	889	938	999	857
Jumlah Koperasi Sehat	215	252	258	261	264
Persentase Koperasi Sehat (%)	24,46	28,35	27,50	26,12	34,77

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2024

Dari sisi pemberdayaan koperasi, jumlah koperasi sehat yang sedikit meningkat di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan pemberdayaan koperasi, untuk menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan data keragaan koperasi tahun 2022 volume usaha koperasi mencapai Rp 585,7 Milyar. Dengan mayoritas jumlah koperasi didominasi oleh koperasi wanita. Sedangkan dari sisi permodalan, modal terbesar adalah jenis koperasi simpan pinjam. Dari aspek legalitas ada 112 koperasi yang sudah bersertifikat NIK dari Kementerian Koperasi dan UKM dari 381 yang sudah terdaftar.

Tantangan ke depan dalam meningkatkan kinerja koperasi di Kabupaten Nganjuk antara lain:

a. Kebutuhan SDM pengelola koperasi yang berkualitas dan pendekatan manajemen usaha yang profesional
b. Minimnya jumlah anak muda yang tertarik dengan koperasi karena koperasi dinilai kurang adaptif, modern, dan inovatif
c. Kesulitan untuk memasuki lingkup bisnis yang lebih besar terkait pengurusan izin dengan otoritas terkait
d. Akses pembiyaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber internal dan belum memanfaatkan skema pembiyaan yang lebih inklusif serta berbasis investasi
e. Pada kebanyakan koperasi, sistem produksi koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisiensikan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM, serta kurang tanggap terhadap pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan tekhnologi yang pesat

Tantangan ke depan dalam meningkatkan kinerja koperasi di Kabupaten Nganjuk antara lain:

a. Kebutuhan SDM pengelola koperasi yang berkualitas dan pendekatan manajemen usaha yang profesional
b. Minimnya jumlah anak muda yang tertarik dengan koperasi karena koperasi dinilai kurang adaptif, modern, dan inovatif
c. Kesulitan untuk memasuki lingkup bisnis yang lebih besar terkait pengurusan izin dengan otoritas terkait
d. Akses pembiyaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber internal dan belum memanfaatkan skema pembiyaan yang lebih inklusif serta berbasis investasi
e. Pada kebanyakan koperasi, sistem produksi koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisiensikan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM, serta kurang tanggap terhadap pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan tekhnologi yang pesat

Tabel 2.155 Data Keragaan Koperasi Tahun 2025

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (Unit)			Anggota (Orang)			RAT (Unit)	Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
		JML	Aktif	Tdk Aktif	JML	L	P					
1	KUD	20	12	8	28,755	18,088	10,667	9	6,591,087,364	8,620,959,890	6,563,413,954	326,028,342
2	Kop. Pertanian	79	6	73	905	539	366	4	1,304,814,356	479,066,300	1,653,138,760	41,473,750
3	Kop. Perkebunan	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kop. Peternakan	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kop. Kehutanan	61	23	38	37	19	18	1	6,744,500	3,422,500	9,263,000	364,500
6	Kopti	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kopinkra	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Koppontren	49	6	43	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kopkar	17	6	11	1,420	874	546	6	7,987,126,547	4,684,310,242	6,338,145,210	823,961,228
10	Kop. Angkatan Darat	1	1	0	627	313	314	1	4,074,538,828	2,197,289,044	4,266,891,721	577,052,849
11	Kop. Kepolisian	1	1	0	1,088	1,008	80	1	9,737,418,738	3,850,421,348	11,438,766,300	1,084,192,212
12	Kop. Serba Usaha	100	12	88	1,042	455	587	7	1,959,845,103	846,545,016	2,402,001,836	142,718,128
13	Kop. Pasar	8	2	6	294	86	208	2	616,812,397	395,793,898	2,058,550,000	46,413,000
14	Kop. Simpan Pinjam	65	45	20	25,495	13,908	11,587	36	35,354,976,893	82,542,345,885	122,797,592,683	5,771,688,285
15	Kop. Angkutan Darat	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kop. Telkom	1	1	0	45	40	5	1	744,769,879	98,722,422	67,500,000	67,344,695
17	Kop. Pegawai Negeri (KPRI	82	62	20	9,656	4,447	5,209	59	109,878,612,602	47,238,466,374	100,598,964,284	1,897,117,339
18	Kop. Wanita	312	170	142	15,416	0	15,416	158	30,333,095,807	5,855,534,532	43,209,438,689	3,661,352,737

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (Unit)			Anggota (Orang)			RAT (Unit)	Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
		JML	Aktif	Tdk Aktif	JML	L	P					
19	Kop. Veteran	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kop. Wredatama	4	3	1	293	62	231	3	1,443,626,820	608,935,758	2,165,690,000	68,168,237
21	Kop. Pepabri	8	6	2	386	200	186	4	770,408,513	220,518,936	463,231,945	68,131,200
22	Kop. Mahasiswa	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kop. Pemuda	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kop. Pertambangan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kop. Pedagang Kaki Lima	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kop. Jamu Gendong	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kop. Lainnya	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kop. Simpan Pinjam	12	6	6	1,592	614	978	5	2,413,543,378	10,301,082,197	12,267,799,421	218,627,840
29	Kop. Sekunder	1	1	0	0	0	0	1	3,524,484,712	1,930,568,393	392,150,000	5,695,972
30	Kop. Multi Pihak	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**857**	**367**	**490**	**87,051**	**40,653**	**46,398**	**298**	**216,741,906,437**	**169,873,982,735**	**316,692,537,802**	**14,800,330,314**

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2024

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, perkembangan usaha mikro pada tahun 2020-2024 dilihat dari aspek legalitas perizinannya. Selama pandemi Covid-19, pada tahun 2020-2021, sektor usaha mikro menunjukkan data perkembangan yang menarik. Hal ini terjadi selama pemberlakuan kebijakan PPKM yang berdampak langsung pada sektor formal, usaha mikro yang berbasis industri rumah tangga menjadi salah satu yang relatif dapat tumbuh dan menjadi penggerak perekonomian. Dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 pembinaan usaha mikro selalu ditingkatkan baik dalam peningkatan kualitas produk, pengemasan, marketing / *digital marketing*, maupun pengelolaan usaha. Pada Tahun 2024 jumlah usaha mikro yang sebesar 58718 usaha, meningkat dibandingkan Tahun 2023 sebanyak 45864 usaha.

Tabel 2.156 Data Usaha Mikro Yang Dibina dan Bisa Mengakses Perbankan

DATA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Mikro	8248	15637	22537	45864	58718
Pertumbuhan UM (%)	157	89,59	44,13	103,5	28,03

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2024

Selain pembinaan, upaya peningkatan usaha mikro oleh Pemerintah Daerah juga dilakukan dengan fasilitasi akses ke perbankan. Pada Tahun 2024 terdapat 28,03 usaha mikro yang dapat mengakses.

Tantangan ke depan dalam meningkatkan kinerja usaha mikro di Kabupaten Nganjuk antara lain:

a. Pelaku usaha mikro kurang pengetahuan tentang manajemen bisnis, tidak punya strategi ekspansi, kurang terlatih dan tidak memiliki mentor
b. Produktivitas belum optimal, desain produk tidak inovatif, bahan baku belum standar, produk kurang berkualitas,

kapasitas produksi rendah, kurang modal/peralatan sehingga tidak dapat bersaing

c. Produk usaha mikro masih sedikit yang bisa masuk pasar internasional karena belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk, kreativitas, akses bahan baku, jaringan distribusi, jaringan pemasaran serta model bisnis yang masih kurang
d. Belum secara masif memanfaatkan teknologi informasi untuk masuk dalam pasar digital yang ada peluang besar
e. Modal usaha minim sehingga sulit untuk memperbesar omzet usaha
f. Pembiayaan dari koperasi simpan pinjam belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha mikro

Tabel 2.157 Aspek legalitas Usaha Mikro

NO	KECAMATAN	TAHUN									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		PIRT	NIB	PIRT	NIB	PIRT	NIB	PIRT	NIB	PIRT	NIB
1	PATIANROWO	4	30	4	160	11	105	7	165	6	349
2	JATIKALEN	1	17	-	79	3	58	1	132	1	213
3	GONDANG	5	54	3	334	12	236	8	268	13	419
4	NGLUYU	-	6	-	33	-	67	2	34	-	93
5	LENGKONG	4	26	4	154	6	287	2	140	3	341
6	REJOSO	6	87	7	271	4	134	16	349	6	452
7	BAGOR	9	79	16	352	6	255	6	368	12	719
8	KERTOSONO	25	70	14	381	27	346	10	329	16	802
9	WILANGAN	6	25	2	171	5	154	4	132	10	296
10	BARON	22	46	11	216	16	89	14	228	13	769
11	SUKOMORO	9	77	6	244	8	126	6	220	9	504
12	NGRONGGOT	22	50	17	260	8	94	13	441	18	1.280
13	PRAMBON	15	68	15	316	21	97	13	444	15	1.065
14	TANJUNGANOM	24	132	14	136	11	752	18	773	25	1.636
15	SAWAHAN	2	32	5	148	8	241	4	187	5	556
16	BERBEK	6	59	8	153	2	515	2	280	6	547
17	LOCERET	7	98	17	134	21	621	8	488	23	915
18	PACE	7	49	10	112	11	413	11	263	6	597
19	NGANJUK	49	1.268	42	323	44	1.359	26	857	31	1.496
20	NGETOS	2	14	6	23	5	202	5	171	8	346
JUMLAH KESELURUHAN		225	2.287	201	4.000	229	6.151	176	6.269	226	13.395

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2024

Untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dilaksanakan peningkatan kapasitas manajerial, teknis, dan keterampilan lainnya bagi pelaku usaha mikro melalui pelatihan dan pendampingan di setiap kecamatan sesuai dengan kebutuhan pelatihan masyarakat misalkan pelatihan pengelolaan usaha, pelatihan pengemasan, pelatihan produksi makanan, pelatihan pemasaran secara digital, pelatihan pemasaran pada pasar modern, dan alin-lain. Pelatihan dan pemberdayaan dilakukan dengan sasaran masyarakat secara umum yang membutuhkan pemberdayaan untuk membuka usaha mikro maupun meningkatkan kapasitas usahanya.

12. Penanaman Modal

Iklim investasi yang kondusif mutlak diperlukan bagi suatu daerah guna meningkatkan kinerja penanaman modal. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan kontribusi dan pelayanan perizinan berusaha dan non beusaha yang prima melalui:

a. Pengembangan dan promosi potensi dan sumber daya daerah di segala bidang
b. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sekitar potensi dan produk unggulan daerah
c. Pengawasan penanaman modal di Kabupaten Nganjuk
d. Peningkatan profesionalisme aparatur di bidang pelayanan penanaman modal
e. Peningkatan kerjasama baik dengan instansi terkait maupun pihak swasta.

Dari beberapa hal tersebut di atas, kinerja penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan jumlah investor (PMA/PMDN) di Kabupaten Nganjuk dan perkembangan nilai investasinya. Capaian kinerja urusan penanaman modal sebagai berikut:

Tabel 2.158 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Realisasi Investasi	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Investasi PMDN	2,175,989,987,106	3,218,481,322,393	4,426,812,071,661	2,523,298,877,813	1,293,863,643,879
Realisasi Investasi PMA	0	37,521,500,000	102,264,111,841	385,072,750,694	65,327,558,965.00
Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	217,598,987,106	3,256,002,822,393	4,529,076,183,502	4,529,076,183,502	1.359.191.202.844

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Nganjuk 2024

Realisasi investasi penanaman modal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2023-2024 kecenderungan nilai investasi turun. Penurunan nilai investasi pada Tahun 2024 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah karena dokumen investasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (masterplan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai
2) Belum adanya regulasi tentang kemudahan berinvestasi atau Peraturan Daerah Tentang Percepatan Perizinan Berusaha
3) Masih adanya perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
4) Masih adanya perusahaan yang belum/tidak merealisasikan kegiatannya di lapangan setelah mereka memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5) Masih kurangnya pengetahuan pihak perusahaan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

13. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari beberapa capaian berikut:

a. Organisasi Pemuda yang aktif

Organisasi pemuda adalah wadah atau perkumpulan yang dibentuk dan dijalankan oleh para pemuda, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat anggotanya, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara, berikut data organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Nganjuk:

Tabel 2.159 Data Organisasi Pemuda Kabupaten Nganjuk

Organisasi	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Pemuda	18	16	17
Jumlah organisasi Pemuda yang aktif	15 (83,33%)	14 (87,5%)	15 (88,24%)

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

Tabel 2.160 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

KETERANGAN	2022	2023	2024
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten	249.438	246.304	246.745
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di Kabupaten	25.174 (10,09%)	23.980 (9,74%)	66.029 (26,76%)

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat fluktuasi organisasi pemuda yang aktif, sehingga diperlukan peran pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan organisasi pemuda yang aktif. Peran ini meliputi fasilitasi, pelatihan, pembinaan dan pendampingan. Disamping itu pemerintah juga perlu bersinergi dengan berbagai pihak terkait

untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan pemuda.

b. Prestasi Pemuda

Prestasi pemuda adalah pencapaian yang diraih oleh individu muda dalam berbagai bidang, baik akademik, non-akademik, maupun kepemimpinan, berikut data jumlah pemuda berprestasi Kabupaten Nganjuk:

Tabel 2.161 Data Pemuda Berprestasi Kabupaten Nganjuk

KETERANGAN	2022	2023	2024
Jumlah pemuda berprestasi (orang)	45	75	72

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

c. Wirausaha muda

Pemuda memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam ekonomi melalui berbagai kegiatan, seperti wirausaha, pengembangan keterampilan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi kreatif. Adapun tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dihitung berdasarkan formulasi berikut:

$$\frac{Jumlah\ pemuda\ (16-30\ tahun)\ yang\ berwirausaha\ di\ Kabupaten}{Jumlah\ pemuda\ (16-30\ tahun)\ di\ Kabupaten} x100\%$$

Berdasarkan formulasi diatas, berikut tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (berdasarkan LPPD Kabupaten Nganjuk, 2024):

$$\frac{23.517}{246.745} x100\% = 9{,}53\ \%$$

Pengembangan Wirausaha muda membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka penyediaan akses permodalan, pelatihan, pendampingan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta fasilitasi promosi produk dan akses pasar bagi wirausaha muda.

Berikut data pembinaan yang dilaksanakan Pemerintah kabupaten Nganjuk melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, selaku pengampu urusan kepemudaan dan olahraga:

Tabel 2.162 Data wirausaha muda yang mendapatkan pembinaan

KETERANGAN	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wirausaha muda yang menerima pembinaan	200	285	287	214

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

d. Pembinaan Atlet dan Olahraga

Hasil kinerja pembinaan atlet dan olahraga dapat diukur dari berbagai aspek, termasuk prestasi, pembinaan, dan dukungan lainnya yang diberikan. Kinerja yang baik ditandai dengan peningkatan jumlah atlet berprestasi, pembinaan yang sistematis, dan dukungan yang komprehensif. Pemerintah memiliki peran penting dalam pembinaan cabang olahraga (cabor) salah satunya melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan dan kebijakan, hingga penyediaan fasilitas dan pendanaan, berikut data cabang olah raga dalam pembinaan KONI Nganjuk di Tahun 2025:

1. Sepak Bola
2. Taekwondo
3. Tenis Meja
4. Angkat Besi
5. Senam
6. Bola Volly
7. Tembak
8. Gulat
9. Renang
10. Petanque
11. Jujitsu
12. Karate
13. Atletik
14. Sepeda
15. Angkat Berat
16. Bulu Tangkis
17. Muathay
18. Sepak Takraw
19. Binaraga dan Fitnes
20. Panahan
21. Drum Band
22. Pencak Silat
23. Sambo
24. Tarung Derajat
25. Wushu
26. Tenis
27. Kick Boxing
28. Billiar
29. MMA
30. Panjat tebing
31. Catur
32. Tinju Amatir
33. Aero Sport
34. Bridge
35. Bola Basket
36. E-sport

Berikut perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional yang merupakan hasil dari pembinaan Atlet dan Cabor yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk:

Tabel 2.163 perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional

KETERANGAN	2021	2022	2023	2024
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (medali)	12	9	12	5

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

14. Statistika

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik) dalam kerangka Satu Data Indonesia. Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Dokumen statistik sebagaimana dimaksud adalah Kabupaten Dalam Angka, PDRB dan data sektoral Kabupaten Nganjuk. Data sektoral daerah sebagai salah satu langkah awal dan *output* forum satu data Indonesia Kabupaten Nganjuk telah disusun pada tahun 2023 dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi dan perumusan kebijakan. Capaian kinerja urusan statistik yaitu:

Tabel 2.164 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 (Dokumen)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nganjuk Dalam Angka	1	1	1	1	1
Dokumen PDRB	1	1	1	1	1
Data sektoral	1	1	3	3	3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nganjuk 2024

15. Persandian

Urusan Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah data,berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi infomrasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi lebih penting.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun di sisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.

Penyelenggaraan urusan persandian pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk fokus pada pengelolaan pengamanan dan keamanan informasi. Pada tahun 2019 terdapat gangguan kemanan/siber khusunya gangguan ransomware pada *website* dan sistem RSUD Kertosono. Upaya penanganan dilaksanakan dengan identifikasi, pemulihan data dan peningkatan keamanan meliputi *hardware, software* dan *brainware*.

Pada tahun 2021-2023 terdapat gangguan *deface* pada *website* induk Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang mencakup semua *website* Pemerintah Daerah yang berhasil ditangani dengan upaya terakhir *restore backup*, selain itu serangan SEO judi online yang sangat mengganggu untuk kecepatan akses dan keamanan di pusat data sudah teratasi dengan merubah konfigurasi penyimpanan di server pusat data. Upaya-upaya peningkatan dan penguatan keamanan informasi meliputi:

a. Pemasangan *firewall*
b. Menutup *port* yang tidak diperlukan
c. Menggunakan Secure Socket Layer (SSL) berbayar
d. Peningkatan *security wearness* pada seluruh admin OPD.
e. Penggunaan CDN (*Content Delivery Network*)

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya proses yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan snapshot indeks kesiapan - dari aspek kelengkapan maupun kematangan - kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembanding dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.

Alat evaluasi ini kemudian bisa digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait (stakeholders).

Khusus untuk Instansi Pemerintah, penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI merupakan bentuk tanggungjawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi. Pertukaran informasi dan diskusi dengan Instansi pemerintah lainnya sebagai bagian dari penggunaan alat evaluasi Indeks KAMI ini juga menciptakan alur komunikasi antar pengelola keamanan informasi di sektor pemerintah sehingga semua pihak dapat mengambil manfaat dari lesson learned yang sudah dilalui.

Tabel 2.165 Evaluasi atas Indeks KAMI kabupaten Nganjuk

Data	2021	2022	2023	2024
Indeks KAMI	415	446	464	527
Tingkat Kematangan	Pemenuhan kerangka kerja dasar	Pemenuhan kerangka kerja dasar	Cukup Baik	Cukup Baik

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk, 2025

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

a. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan
b. Tata Kelola Keamanan Informasi
c. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
d. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
e. Pengelolaan Aset Informasi
f. Teknologi dan Keamanan Informasi
g. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan *(Cloud Service) dan* Perlindungan Data Pribadi.

Pengelompokan kedua dilakukan berdasarkan **tingkat kematangan** penerapan pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu kepada tingkatan kematangan yang digunakan oleh kerangka kerja COBIT atau CMMI. Tingkat kematangan ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melaporkan pemetaan dan pemeringkatan kesiapan keamanan informasi di Kementerian / Lembaga. Untuk keperluan Indeks KAMI, tingkat kematangan tersebut didefinisikan sebagai:

a. Tingkat I – Kondisi Awal
b. Tingkat II – Penerapan Kerangka Kerja Dasar
c. Tingkat III – Terdefinisi dan Konsisten
d. Tingkat IV – Terkelola dan Terukur
e. Tingkat V – Optimal

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan

kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

16. Kebudayaan

Seni budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok. Seni budaya mempunyai unsur keindahan dan telah dilestarikan secara turun temurun lintas generasi. Kegiatan budaya dan kesenian masyarakat yang saat ini masih menjadi tradisi di antaranya adalah:

a. Upacara/ prosesi siraman sedudo yang dilaksanakan pada awal bulan syuro;
b. Tradisi bersih desa/ nyadranan;
c. Prosesi gembyangan waranggono;
d. Langen Tayub wilayah Nganjuk Utara;
e. Seni Jaranan, Seni Hadrah;
f. Tari Salepuk, Tari Mongde, Sandur;
g. Kentrung Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot;
h. Jamasan pusaka di Gedung Pusaka Ngliman Kecamatan Sawahan;
i. Pawai alegoris pada peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk;
j. Wayang timplong Desa Jetis Kecamatan Pace.

Kegiatan seni budaya di Kabupaten Nganjuk didukung oleh pelaku-pelaku seni budaya di antaranya, 7 sanggar kesenian, 33 kelompok seni musik tradisional, 256 benda cagar budaya, 9 bangunan cagar budaya, 41 struktur cagar budaya, 79 situs cagar budaya, dan 4 museum.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki komitmen yang tinggi dalam melestarikan seni budaya yang tumbuh berkembang dan menjadi kekayaan budaya Kabupaten Nganjuk, Sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2022, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menjadi salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan. Ada 7 dimensi IPK meliputi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai acuan legal-formal untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Sebagaimana Pasal 4 UU Pemajuan Kebudayaan, supaya upaya pemajuan kebudayaan tidak memicu pertikaian dan penindasan yang mengancam keragaman masyarakat, yang merupakan identitas Bangsa Indonesia. Adapun obyek pemajuan kebudayaan meliputi 10 obyek, yaitu : 1) Tradisi Lisan; 2) Manuskrip; 3) Adat Istiadat; 4) Ritus; 5) Pengetahuan Tradisional; 6) Teknologi Tradisional; 7) Seni; 8) Bahasa; 9) Permainan Rakyat; dan 10) Olah Raga Tradisional. Adapun Kekayaan budaya menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Undang- undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa kebudayaan dijadikan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Dalam rangka pelestarian seni dan budaya di Kabupaten nganjuk telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk dan juga telah disusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/478/K/411.013/2023. Berikut beberapa data hasil Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024:

Tabel 2.166 Data Hasil Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk

Uraian	Jumlah Total	Realisasi yang dilestarikan									
		2020		2021		2022		2023		2024	
warisan seni budaya dan tradisi local	1513	409	27,03 %	327	21,61 %	532	35 %	548	36,22%	455	30,07 %
Terlestarikannya cagar Budaya (Benda, Situs dan kawasan cagar budaya)	305	87	28,53 %	89	29,18 %	94	30,82 %	100	32,79%	103	33,77 %

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan yaitu terlestarikannya Cagar Budaya, indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pelestarian cagar budaya, dengan rumus:

$$\frac{Jumlah\ cagar\ budaya\ yang\ dilestarikan}{Jumlah\ cagar\ budaya\ yang\ ditetapkan} \text{x} 100\%$$

Adapun yang dimaksud dengan cagar budaya yang dilestarikan adalah Keseluruhan jumlah warisan budaya bersifat kebendaan berupa cagar budaya benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan di darat dan atau di air yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan pemerintahKabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya yang dianggarkan dalam APBD meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air, sedangkan cagar Budaya yang ditetapkan adalah Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota tentang Penetapan cagar budaya.

Berdasarkan tabel 2.165 diatas menunjukkan terdapat tren peningkatan yang positif dalam persentase pelestarian benda,

situs, dan kawasan cagar budaya selama periode 2020-2024. Data yang disajikan juga menunjukkan bahwa upaya pelestarian cagar budaya di daerah ini terus mengalami peningkatan secara bertahap. Sedangkan pada pelestarian warisan seni budaya dan tradisi lokal di Kabupaten Nganjuk dari tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan adanya fluktuasi, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya telah dilakukan, masih diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kompleksitas dalam menjaga warisan budaya yang hidup di tengah dinamika zaman.

Masyarakat Kabupaten Nganjuk memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam setiap *event* budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, baik antusiasme penonton maupun pelaku seni dan dukungan UMKM untuk memeriahkan kegiatan budaya, seperti festival budaya, pameran seni, pertunjukan budaya maupun lokakarya. Beberapa *event* budaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1) Boyong Nata Praja Dan Sedekah Bumi
2) Lomba Reels Boyong Nata Praja Dan Sedekah Bumi
3) Bursa Pariwisata 2024
4) Pagelaran Wayang Kulit Hari Jadi Kabupaten Nganjuk
5) Lomba Desain Logo Hari Jadi Kabupaten Nganjuk
6) Pagelaran Ludruk
7) Pagelaran Campursari
8) Festival Wedding Kota Angin
9) Parade Dalang Muda Anjuk Ladang
10) Festival Kota Angin
11) Pameran Temporer Museum Anjuk Ladang
12) Sparkling Nganjuk Carnival

Dalam rangka memperluas akses masyarakat dan menyebarkan informasi warisan seni dan budaya khas Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan serius

melakukan promosi budaya daerah baik melalui media offline maupun *online*. Penyebaran informasi dilakukan melalui media elektronik misalnya televisi dan radio, melalui media cetak seperti *banner*, baliho, dan pamflet. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook dan Whatapps grup.

Penyebaran informasi budaya selain dilakukan di dalam daerah Kabupaten Nganjuk juga dilaksanakan di luar daerah dengan mengikuti acara Pesona Budaya Jawa Timur dan Citra Promosi Potensi Unggulan Daerah di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pada acara tersebut, Kabupaten Nganjuk menampilkan berbagai seni pertunjukan mulai pagelaran tari, tembang daerah, hingga ludruk. Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi seni dan budaya khas Nganjuk, namun juga potensi lainnya, seperti pariwisata dan produk UMKM unggulan Nganjuk.

17. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2018-2020, Kabupaten Nganjuk hanya memiliki 1 buah perpustakaan milik pemerintah Daerah. Capaian kinerja urusan perpustakaan sebagai berikut:

Tabel 2.167 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH PENGUNJUNG		KENAIKAN
		TAHUN 2023	TAHUN 2024	(%)
1	Layanan Umum	18.816	48.479	157,65
2	Layanan Digital (e-book)	6.076	11.225	84,74
3	Layanan Keliling	23.002	23.002	1,89
4	Layanan Donkel Beras	1.453	2.139	47,21
5	Layanan *Car Free Day*	6.542	11.024	68,51
6	Layanan TBM	10.032	17.229	71.74
7	Layanan Anal/Martabak	28.253	22.873	19,04
	JUMLAH	94.174	136.405	44,84

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk 2024

Persentase jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan yang signifikan dan terjadi penurunan jumlah pengunjung di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2024 kunjungan ke perpustakaan meningkat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia dan tingkat literasi masyarakat. IPLM mengacu pada empat dimensi utama, yaitu ketersediaan sumber belajar, aksesibilitas, kegiatan literasi, dan budaya literasi. Peningkatan IPLM menjadi prioritas strategis daerah dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas, berdaya saing, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berkelanjutan mendorong pembangunan fasilitas literasi, memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, dan menumbuhkan budaya literasi di sekolah maupun di masyarakat melalui berbagai program, seperti penguatan perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, serta gerakan literasi berbasis komunitas.

Tabel 2.168 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

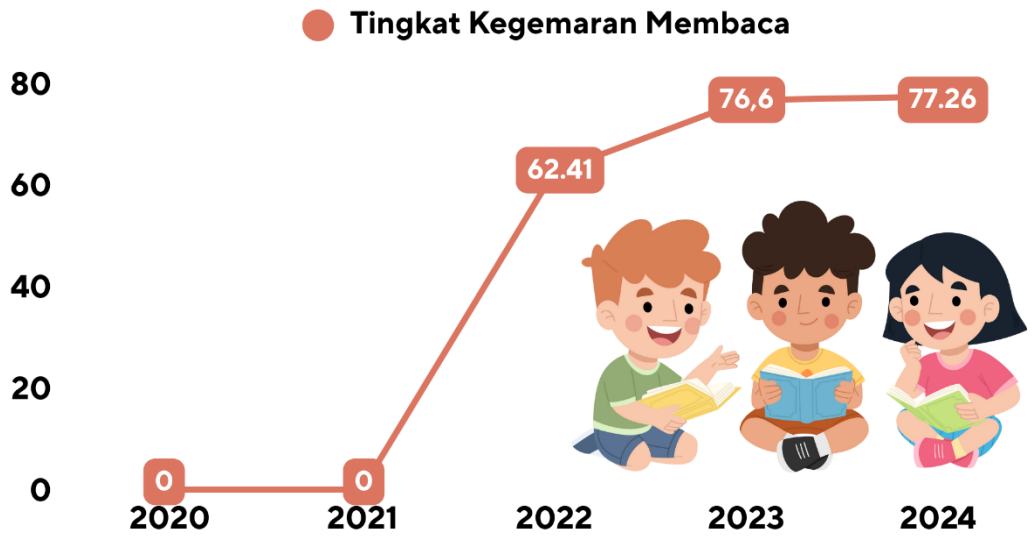
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Nganjuk	35,58	-	71,20	75,83	42,08
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Jawa Timur	13,44	14,78	15,70	15,78	78,60

Sumber:Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk 2024

Data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri dari 7 komponen, yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan berstandar Nasional Perpustakaan (SNP), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Aspek masyarakat (AM) terdiri dari komponen, yaitu Jumlah Penduduk, Jumlah Civitas Sekolah, Jumlah Civitas Akademika, Jumlah Penduduk yang Bekerja.

Faktor Pendorong Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah Pemerataan layanan Perpustakaan, Akses pendidikan yang berkualitas, Ketersediaan Sumber Daya Koleksi dan Tenaga Perpustakaan, Dukungan pemerintah daerah, Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan literasi masyarakat, Penggunaan Teknologi. Faktor Penghambat adalah Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya literasi, Kurangnya petugas perpustakaan dan pustakawan

Hal ini menunjukkan kenaikan minat baca dan kunjungan perpustakaan, dapat kita lihat di grafik dibawah:



Gambar 2.39 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk 2024

Definisi operasional tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat gemar membaca, baik dari segi frekuensi, durasi, maupun jenis media yang dibaca. Ukuran ini dapat digunakan untuk memantau perkembangan minat baca masyarakat dan mengevaluasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi. Di Kabupaten Nganjuk, tingkat kegemaran membaca pada tahun 2022 terjadi peningkatan dengan capaian sebesar 62,41. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 76,6 dan kembali meningkat pada tahun 2024 mencapai angka 77,26. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir telah terjadi penguatan budaya literasi di Kabupaten Nganjuk.

Peningkatan ini didorong oleh ketersediaan Koleksi buku bacaan di Perpustakaan Daerah semakin banyak dan bervariasi,

Layanan Perpustakaan Daerah telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, sarana literasi, baik melalui perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, maupun taman bacaan masyarakat, serta adanya program pemerintah daerah yang secara konsisten mendorong gerakan literasi di sekolah dan masyarakat. Meski demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi, antara lain Minat baca masyarakat masih rendah.

Secara keseluruhan, capaian tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Nganjuk memperlihatkan tren positif dan menggambarkan adanya peningkatan kualitas budaya literasi. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat infrastruktur literasi, memperluas akses bahan bacaan hingga ke desa-desa, serta membangun ekosistem literasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga budaya membaca dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Salah satu penggerak dan motor bagi perpustakaan dan penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah kapasitas pustakawan. Pustakawan merupakan salah satu sumber daya yang menggerakkan sumber daya lain dalam organisasi perpustakaan yang memungkinkan perpustakaan dapat berperan secara optimal didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga pustakawan menjadi ujung tombak keberhasilan dalam penyebarluasan informasi di perpustakaan. Pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap pustakawan Kabupaten Nganjuk menjadi fokus dari Pemerintah daerah. Berikut data jenis perpustakaan kabupaten nganjuk:

Tabel 2.169 Peningkatan kapasitas Pustakawan Daerah

No	Jenis Perpustakaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perpustakaan Umum	1	1	1	1	1
2	Perpustakaan Sekolah	0	0	291	408	700
3	Perpustakaan Desa	0	0	101	110	110
4	Perpustakaan Khusus	0	0	0	5	10
5	Perpustakaan Perguruan Tinggi	0	5	8	11	11

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.Nganjuk,2024

18. Kearsipan

Dalam urusan kearsipan ditunjukkan pada peningkatan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip dari instansi-instansi lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan melakukan manajemen kearsipan yang baik akan lebih memudahkan dalam menyimpan maupun pengambilan data sehingga lebih efisien dan aman.

Indeks Audit Kearsipan Internal Kabupaten Nganjuk merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Indeks ini menilai berbagai aspek penting, antara lain ketersediaan regulasi kearsipan, kelembagaan, sumber daya manusia pengelola arsip, sarana dan prasarana pendukung, serta pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis. Semakin tinggi capaian indeks menunjukkan semakin baik tata kelola kearsipan yang dilakukan, baik dari sisi kepatuhan administrasi maupun penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Capaian indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2020 tentang kearsipan. Data capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.170 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	-	-	60,68	74,34	85
2	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah	77,44	61,74	80,54	84,63	90,02
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	-	-	100	100	100
4.	Indeks Audit Kearsipan Internal	0	73	81	81,40	89,68

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk 2024

Tingkat ketersediaan arsip di Kabupaten Nganjuk menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat capaian yang terukur, namun pada tahun 2022 capaian indikator tercatat sebesar 60,68, meningkat menjadi 74,34 pada tahun 2023, dan ditargetkan mencapai 85 pada tahun 2024. Secara operasional, indikator ini merujuk pada kemudahan akses dan penggunaan arsip yang masih digunakan dalam kegiatan operasional organisasi, baik secara fisik maupun elektronik, kapanpun dan dimanapun dibutuhkan serta dalam kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan capaian tersebut didorong oleh sejumlah faktor, antara lain penerapan Tata Naskah Dinas, penyusunan dan penerapan Klasifikasi Arsip, keberadaan Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta penerapan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis (SKKAAD). Keempat faktor ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan sistem kearsipan yang tertata dan terintegrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah

keterbatasan fasilitas kearsipan, kurangnya tenaga ahli arsip, sistem penyimpanan yang belum berjalan secara optimal, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip. Faktor-faktor tersebut berpotensi memperlambat pencapaian target apabila tidak ditangani dengan langkah strategis.

Capaian indeks hasil pengawasan kearsipan di Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan dengan tren positif, yakni tahun 2020 sebesar 77,44, tahun 2021 61,74, tahun 2022 80,54, tahun 2023 84,63, dan ditargetkan 90,02 pada tahun 2024. Indeks ini merupakan nilai yang diberikan kepada instansi atas pelaksanaan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Peningkatan capaian didorong oleh kesadaran pentingnya pengawasan, dukungan pimpinan, ketersediaan sumber daya, mekanisme pengawasan yang efektif, serta partisipasi seluruh pihak.

Adapun kendala yang masih dihadapi meliputi kurangnya kesadaran sebagian aparatur, keterbatasan sistem dan sumber daya, serta minimnya pelatihan dan kompetensi petugas kearsipan. Upaya peningkatan diarahkan pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan sistem kearsipan modern untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Capaian indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip di Kabupaten Nganjuk menunjukkan kondisi yang sangat baik. Pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat capaian terukur, namun sejak tahun 2022 hingga 2024 capaian tercatat 100, yang berarti arsip tersedia secara lengkap serta terjaga keutuhannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara operasional, indikator ini merujuk pada ketersediaan arsip yang lengkap, utuh, dan terpelihara dari kerusakan maupun kehilangan. Keberhasilan ini ditunjang oleh faktor internal berupa bahan arsip, sistem penyimpanan, serta pemeliharaan arsip, dan faktor eksternal

seperti lingkungan penyimpanan, tindakan manusia, serta mitigasi bencana.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan tenaga ahli kearsipan, keterbatasan ruang penyimpanan, rendahnya kesadaran akan pentingnya arsip, serta risiko kehilangan atau kerusakan arsip. Oleh karena itu, penguatan SDM, peningkatan sarana penyimpanan, serta kesadaran kolektif terhadap pentingnya arsip menjadi strategi kunci dalam menjaga keberlanjutan capaian ini.

Capaian Indeks Audit Kearsipan Internal Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Pada tahun 2021 terjadi lompatan besar dengan capaian sebesar 73, kemudian terus meningkat menjadi 81 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 capaian kembali mengalami perbaikan dengan skor 81,40, dan pada tahun 2024 mencapai angka tertinggi yaitu 89,68. Perkembangan ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pembenahan sistem kearsipan secara berkesinambungan, sehingga kualitas tata kelola arsip semakin membaik dari tahun ke tahun.

I.3. Urusan Pilihan

1. Perikanan

Budidaya perikanan yang ada di Kabupaten Nganjuk merupakan perikanan air tawar.

Tabel 2.171 Produksi Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

No	Uraian Indikator Sasaran	satuan	Produksi Perikanan (Ton)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	9.486,3	10.011	11.050	11.872,22	10.920
2	Jumlah Produksi Perikanan Non Budidaya	Ton	611,70	628,01	651,85	677,20	679

Sumber: Dinas KPP,2024

Pada tabel terlihat bahwa kinerja produksi perikanan mengalami fluktuasi. Penurunan terjadi pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan permintaan produk perikanan oleh konsumen, terutama restoran/rumah makan. Produksi mulai meningkat kembali pasca pandemi Covid-19 yaitu tahun 2021-2023. Selanjutnya merupakan capaian angka konsumsi ikan perkapita/tahun masyarakat di Kabupaten Nganjuk, sebagaimana data berikut :

Tabel 2.172 Produksi Perikanan Per Kecamatan Tahun 2020-2024

Tahun	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
2020	26
2021	29,87
2022	31,33
2023	36,02
2024	38,20

Sumber: Dinas LkjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

Dalam tabel diatas menggambarkan adanya kenaikan Angka Konsumsi Ikan setiap tahunnya, yang berarti upaya untuk meningkatkan minat/kesadaran konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkat, hal ini mengambarkan pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein dan gizi, omega 3 dan zat gizi penting lainya yang dibutuhkan oleh tubuh. Penyebab tingginya minat masyarakat mengkonsumsi ikan banyak dipengaruhi oleh besarnya promosi, sosialisasi dan pelatihan olahan hasil perikanan melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu alat strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan pariwisata suatu daerah akan mudah dikenal sekaligus potensi-potensi unggulannya

sehingga secara tidak langsung pariwisata merupakan alat promosi bagi daerah untuk menarik minat investasi. Penguatan pariwisata daerah dilakukan dengan cara :

a. Peningkatan kapasitas amenitas/ fasilitas pendukung kepariwisataan daerah
b. Kesiapan mitigasi bencana dan jaring pengaman pasca bencana baik bagi masyarakat dan juga usaha pariwisata di destinasi pariwisata
c. Penyiapan strategi pemasaran sesuai karakteristik pasar pariwisata
d. Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata
e. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisatayang berkelanjutan
f. Peningkatan kesadaran wisata bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata terhadap potensi besar yang dimiliki daerahnya
g. Pengembangan wisata desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan data sebagai berikut;

Tabel 2.173 Data Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

KET	2020	2021	2022	2023	2024
PAD sektor pariwisata	Rp 1.022.740.460	Rp 892.567.475	Rp 1.525.678.285	Rp 1.417.484.520	Rp 1.280.705.675

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

Berdasar tabel diatas, pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Nganjuk dari tahun 2020 hingga 2024 terdapat pola fluktuasi yang signifikan, hal ini menggarisbawahi kompleksitas dan kerentanan pada sektor ini.

Periode ini ditandai oleh tantangan berat yang dipicu oleh pandemi COVID-19, yang secara drastis membatasi aktivitas pariwisata global dan lokal. Penurunan tajam pada tahun 2021 mencerminkan dampak langsung dari pembatasan perjalanan dan penutupan tempat wisata, menunjukkan betapa sensitifnya sektor pariwisata terhadap krisis kesehatan global. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun 2022, tren penurunan yang berlanjut pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa pemulihan tersebut tidak berkelanjutan dan bahwa tantangan struktural yang lebih dalam perlu diatasi.

Tabel 2.174 Data jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

KETERANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	184.739	193.093	204.873	350.550	367.522
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	0	0	0	0	1

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

Tabel 2.175 Data Potensi Destinasi Wisata di Kabupaten Nganjuk

No	Nama Destinasi Wisata
1	Air Terjun Sedudo
2	Air Merambat Roro Kuning
3	Goa Margo Tresno
4	Taman Rekreasi Anjuk Ladang
5	Kolam Renang Sri Tanjung
6	Grojogan Putri Ayu
7	Bukit Surga
8	Mini Water Park
9	Air Terjun Singokromo
10	Wisata Tani Betet
11	Taman Cengkok Asri
12	Wana Wisata Manyung
13	Jolotundo Glamping dan Edupark
14	Pemandian Air Hangat Jatikalen
15	Watulawang
16	Candi Lor
17	Candi Ngetos
18	Situs Condrogeni
19	Prasasti Bangle

No	Nama Destinasi Wisata
20	Museum Anjuk Ladang
21	Makam Nduro
22	Makam Kanjeng Jimat
23	Makam Ki Ageng Aliman
24	Makam Pakuncen
25	Makam Syech Syuluqi
26	Makam Malik Al Atos
27	Monumen Jendral Sudirman
28	Monumen Dr. Sutomo
29	Padepokan LangenTayub
30	Candi Banjarsari

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

Tabel 2.176 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

KETERANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	1,87%	1,93%	1,93%	2,01 %	2,05%

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

Tabel 2.177 Tingkat hunian akomodasi

Data Hunian	2022	2023	2024
Jumlah kamar terjual	21.481	24.123	22.660
Jumlah kamar yang tersedia	212.430	212.430	220.825
Tingkat hunian akomodasi	10,11%	11,35%	10,26%

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk

Data pada tabel 2.173 diatas merupakan agregat dari jumlah kunjungan wisatawan baik regional maupun manca negara baik dewasa maupun anak-anak di obyek wisata unggulan (obyek daya tarik wisata) baik yang beretribusi maupun yang tidak beretribusi, yaitu : semua lokasi wisata alam, wisata buatan, wisata religi dan wisata budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2020-2024. Data tersebut juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menarik wisatawan datang ke Kabupaten Nganjuk. Adapun rata-rata lama tinggal wisatawan di kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 adalah 0,224 hari, data ini mencerminkan rata-rata waktu kunjungan wisatawan pada

objek wisata di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan data rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2024, mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama. Angka ini tidak hanya sekadar statistik, tetapi mencerminkan dinamika kompleks yang mempengaruhi sektor pariwisata local sehingga diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan waktu kunjung wisatawan di kabupaten Nganjuk.

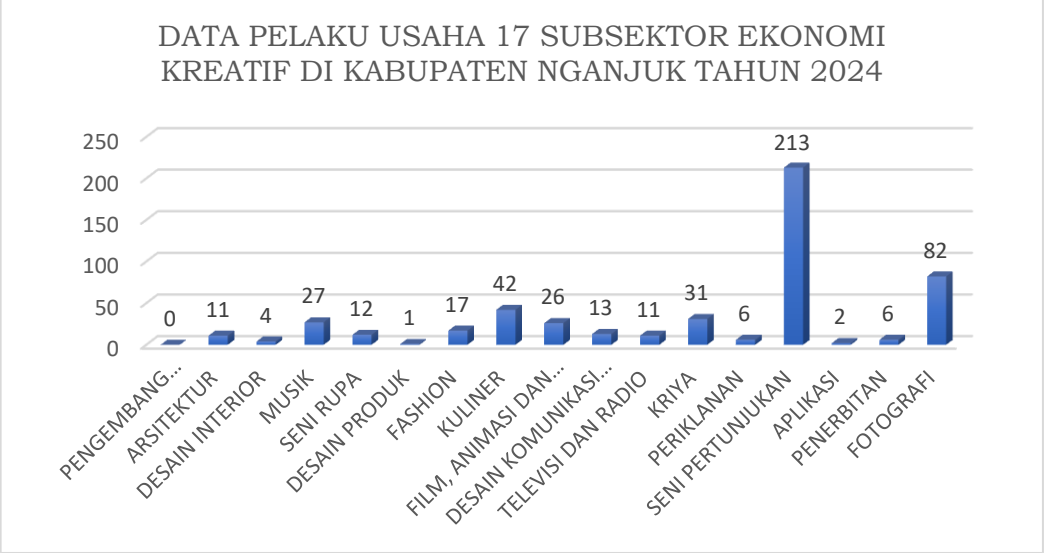
Penciptaan tren pariwisata baru melalui penerapan *digital tourism* menjadi lompatan besar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 jumlah pelaku ekonomi kreatif mempunyai kecenderungan yang meningkat.

Adapun berdasarkan kurasi Dinas Porabudpar, terdapat peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.178 Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

DATA	TAHUN		
	2022	2023	2024
Jumlah pelaku ekonomi kreatif	494	499	504

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk



Gambar 2.40 Data Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Nganjuk Per Subsektor Tahun 2024
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

Potensi Kabupaten Nganjuk sangat besar dalam perspektif pengembangan ekonomi kreatif. Kekayaan seni budaya, sumber daya alam yang melimpah, dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal utama yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Nganjuk menghadapi beberapa tantangan, antara lain belum adanya creative hub, sulitnya pemasaran produk ekraf, belum efektifnya pengembangan sentra / klaster kreatif dan pengembangan kota kreatif, minimnya produk ekonomi kreatif yang terstandarkan, masih rendahnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hasil kreativitas (HAKI), serta akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan dan pembiyaan dari lembaga pembiayaan yang masih belum optimal. Beberapa ekonomi kreatif yang sudah berkembang di Kabupaten Nganjuk,yakni:

Tabel 2.179 Data Potensi Ekonomi Kreatif Kabupaten Nganjuk

NO	NAMA PEMILIK	UMKM	KATEGORI EKRAF	NAMA PRODUK	ALAMAT	KECAMATAN
1	Yayuk Sri Rahayu	Swarnabhumi By Griya/Batik Sri Rahayu	Fashion	1. Jilbab Ecoprint 2. Kain Ecoprint 3. Kaos Ecoprint 4. Outer Ecoprint 5. Kain Ecoprint On Batik 6. Kemeja Ecoprint 7. Tunik 8. Masker Ecroprint Biru 9. Masker Ecoprint Ketapang	Buluputren, RT 02 / RW 01 No. 51, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk	Sukomoro
2	Feri Hendrawati	Ferdana Craft	Kriya	1. Toples Set 2. Gantungan Home 3. Bantal Leher 4. Dompet Anyaman 5. Dompet Jeans 6. Tas Jeans Pelangi 7. Tas Orange 8. Tas Belanja Kecil 9. Tas Belanja Besar	Perum Graha Kartini No. 61, Nganjuk	Nganjuk
3	Emi Masruroh	Miza Kleting Kuning	Kriya	1. Udheng Nganjuk 2. Tas Anyaman Bambu	Dsn. Pinggiran, Ds. Munung, RT 10/RW 06, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk	Jatikalen
4	Ristiani	Batik Bayu Mukti	Fashion	1. Batik Tulis 2. Batik Cap	Jl. Lurah S. Karto Pawiro, RT 09 / RW 3, Ds. Kacangan, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk	Berbek

NO	NAMA PEMILIK	UMKM	KATEGORI EKRAF	NAMA PRODUK	ALAMAT	KECAMATAN
5	Supiyah Arti	Arti Collection	Kriya	1. Tas Rajut Kecil 2. Tas Rajut Cream 3. Tas Aqua 4. Masker Bruklat 5. Masker Batik 6. Kopyah 7. Tas Handle 8. Dompet Pernik 9. Sepatu Sandal 10. Slop Sepatu 11. Konektor Rajut	Ds. Payaman, RT 03 / RW 01, Ds. Trayang, kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk	Ngronggot
6	Khuri Fidianto	Melaten	Fashion	1. Batik Tulis	RT 04 / RW 04, Ds. Kedungmelaten, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk	Lengkong
7	Umi Hanik	Hanik Collection	Kriya	1. Tas Belacu 2. Dompet Douch 3. Dompet Orange 4. Tas Macrame 5. Tas Hijau Kuning	Kel. Werungotok, Kec. / Kab. Nganjuk	Nganjuk
9	Lilik	I – Lee	Kriya	1. Keset	Lambangkuning, Kertosono, Kab. Nganjuk	Kertosono
10	Edi	Tetuko	Fashion	1. Batik Tulis 2. Batik Cap	Dk. Kalipang, Ds. Sumberkepuh, Tanjunganom, Nganjuk	Tanjunganom

NO	NAMA PEMILIK	UMKM	KATEGORI EKRAF	NAMA PRODUK	ALAMAT	KECAMATAN
11	Sri	Sri Siji	Fashion	1. Batik Tulis 2. Batik Sasirangan 3. Kaos Batik Sasirangan 4. Kopyah Batik Sasirangan 5. Dompet Batik Sasirangan 6. Selendang Batik	Perum. Candi Rejo, Blok GG No. 10, Nganjuk	Loceret
12	Ema Djatmiko	Griya Tirta Alamanda	Kriya	1. Dompet Polkadot 2. Dompet Jeans 3. Mukena Sulampita 4. Tas Lurik 5. Daster 6. Masker Sulam Pita 7. Tudung Saji 8. Dompet Bludru 9. Tempat Tisu 10. Tas Kanvas	Dsn. Sambiroto, Jl. Puntodewo, RT 01 / RW 03, Kec. Baron, Kab. Nganjuk	Baron
13	Edi	D'Joen	Fashion	1. Batik Cap	Dk. Kalipang, Ds. Sumberkepuh, Tanjunganom, Nganjuk	Tanjunganom
14	Yuni	Youniq Craft	Kriya	1. Konektor Kawat 2. Bross Tali Tenun 3. Bros Mutsinwire	Jl. Tumapel, Dsn. Seban, RT 03 / RW 04, Dsn. Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk	Baron
15	Ludi	Dua Payung	Fashion	1. Kain Tenun 2. Sarung Tenun	Ds. Sonoageng, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk	Prambon

NO	NAMA PEMILIK	UMKM	KATEGORI EKRAF	NAMA PRODUK	ALAMAT	KECAMATAN
16	Suwarni	Madisa	Kuliner	1. Keripik Talas 2. Keripik Usus 3. Rempeyek	Griya Jatirejo Indah Blok B No. 28, Nganjuk	Nganjuk
17	Nyamiati	Tito Rasa	Kuliner	1. Onde - Onde Ketawa 2. Keripik Talas 3. Keripik Pisang	Jl. Gatot Subroto III No. 4a, Kauman, Nganjuk	Nganjuk
18	Samsul Anam	Dua Putri	Kuliner	1. Keripik Sukun 2. Stick Bawang Original 3. Keripik Talas 4. Stick Bawang Pedas 6. Stick Buah Naga	RT 01 / RW 06, Ds. Tanjungkalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk	Ngronggot
19	Didik Adiyono	Mustika Laras	musik;	Alat Musik Gamelan	Ds. Jatirejo Kec. Loceret	Loceret
20	UD Restu Meubel	Supriyono	arsitektur dan desain interior	Furnitur	Ngepung	Patianrowo
21	UD Lintar Jaya	Samsodin	arsitektur dan desain interior	Furnitur	Dsn. Bulak,Tirtobinangun	Patianrowo
22	CV Sumber Rejeki Jaya	M. Hardi	arsitektur dan desain interior	Furnitur	Jl. Sutoyo, Dsn. Ngelan	Loceret
23	Prima Star	Sri Mariani	musik;	Rekaman	Kecubung	Pace
24	Karyadi	Madu Laras	musik;	Gamelan	Jatirejo	Loceret
25	Yudhistira Panduwigura	CV.Awdy Karya	arsitektur dan desain interior	jasa Kontruksi	Jl.Mastrip II B Ds.Ganung Kidul	Nganjuk

NO	NAMA PEMILIK	UMKM	KATEGORI EKRAF	NAMA PRODUK	ALAMAT	KECAMATAN
26	Margareta elok Putri Dks	CV.Afida Hilmi Production	arsitektur dan desain interior	Jasa Advertising	Perum Puri Mangundikaran	Nganjuk
27	Muktar Mukti Ali	CV. Wong Nganjuk	film, animasi dan video;	Even Organizer	Ds. Wilangan, Kec. Wilangan	Wilangan

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

3. Pertanian

Salah satu potensi Sumber Daya Alam yang menonjol di Kabupaten Nganjuk adalah potensi pertanian. Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Nganjuk dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (Agraris). Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 35,05 persen dari luas wilayah, belum termasuk untuk sektor perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan.

Tabel 2.180 Data Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Produksi Tanaman Pangan					
1	Padi (Ton)	544.900	491.961	515.231	484.378	512.422
2	Jagung (Ton)	222.905	193.991	211.783	199.813	236.791
3	Kedelai (Ton)	9.197	5.474	7.066	8.648	7.629
B	Produktivitas Tanaman Pangan					
1	Padi (Kw/Ha)	67,80	62,34	62,80	64,15	64,97
2	Jagung (Kw/Ha)	68,60	69,63	71,05	71,31	70,86
3	Kedelai (Kw/Ha)	20,31	20,41	20,28	20,43	20,40
C	Luas Panen Tanaman Pangan					
1	Padi (Ha)	36.945.319	30.670.003	32.355.135	31.074.041	33.290.538
2	Jagung (Ha)	15.292.330	13.508.115	15.046.628	14.249.138	16.779.371
3	Kedelai (Ha)	186.787	111.720	143.326	176.675	155.607

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk (Data dari Bidang Produksi dan perizinan pertanian dan BPS Nganjuk).

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu lumbung pangan di Propinsi Jawa Timur. Didukung dengan luas wilayah, potensi sektor pertanian di Kabupaten Nganjuk sangat potensial untuk dikembangkan. Padi menjadi komoditas utama dengan produksi 544.900 ton di tahun 2020 dan tiga tahun mengalami penurunan karena adanya perubahan iklim ekstrim dan serangan tikus. Tahun 2024 komoditas produksi padi mengalami kenikan 5,86% capaian produksi sebesar 512.422 ton dengan luas tanam 33.290.538 ha dan ada kenaikan luas tanam sebesar 6,66% dari tahun 2023. Capaian kinerja di tahun 2024 mulai ada kenaikan

produksi, provitas dan luas tanam dipengaruhi adanya perubahan sistem cara budidaya tanaman yang semakin canggih, kebutuhan irigasi yang relatif cukup meskipun belum merata, adanya pembangunan pompanisasi, Pembangunan irigasi, perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier meskipun belum maksimal, hama dan penyakit tanaman yang masih bisa dikendalikan, meningkatnya kesadaran petani tentang penggunaan bibit unggul/bersertifikat, dan adanya pelatihan tematik di Tingkat kelompok.

Tabel 2.181 Data Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Produksi Tanaman Hortikultura					
1	Bawang Merah (Ton)	173.061	193.652	193.988	183.758	205.591
2	Cabai besar (Ton)	1.173	290	135	158	225
3	Cabai kecil (Ton)	9.113	7.449	5.028	4.347	6.609
4	Melon (Ton)	6.008	2.534	2.424	1.996	1.581
5	Durian (Ton)	5.776	2.828	7.502	11.262	9.527
6	Alpukat (Ton)	4.959	7.987	7.284	11.521	8.572
7	Mangga (Ton)	35.773	22.294	19.616	38.587	35.392
8	Rambutan (Ton)	6.062	3.320	3.840	4.306	4.097
9	Duku (Ton)	1.575	1.541	2.217	2.284	294
B	Produktivitas Tanaman Hortikultura					
1	Bawang Merah (Kw/Ha)	119,31	115,41	111,84	108,62	98,35
2	Cabai besar (Kw/Ha)	76,19	64,53	54,04	46,56	45,08
3	Cabai kecil (Kw/Ha)	69,25	66,21	51,36	71,26	63,55
4	Melon (Kw/Ha)	270,65	143,19	169,52	150,11	110,52
5	Durian (Kw/Ha)	1,96	1,14	1,26	1,39	1,23
6	Alpukat (Kw/Ha)	1,53	1,79	3,87	1,87	1,20
7	Mangga (Kw/Ha)	1,25	0,94	1,14	1,25	1,38
8	Rambutan (Kw/Ha)	1,39	0,79	0,08	1,22	1,15
9	Duku (Kw/Ha)	1,59	1,35	1,57	1,66	0,28
C	Luas Panen Tanaman Hortikultura					

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Merah (Ha)	20.648.080	22.348.780	21.695.810	19.959.195	20.220.897
2	Cabai besar (Ha)	89.407	18.740	7.301	7.370	10.161
3	Cabai kecil (Ha)	631.096	493.170	258.220	309.791	419.964
4	Melon (Ha)	1.626.165	362.892	410.927	299.670	174.684
5	Durian (Ha)	11.297	3.236	9.438	15.614	11.752
6	Alpukat (Ha)	7.577	14.316	28.179	21.554	10.292
7	Mangga (Ha)	44.667	20.986	22.392	48.065	48.756
8	Rambutan (Ha)	8.439	2.633	306	5.264	4.718
9	Duku (Ha)	2.502	2.077	3.484	3.797	81

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk (Data dari Bidang Produksi dan perizinan pertanian dan BPS Nganjuk).

Bawang merah merupakan komoditas unggulan sektor pertanian hortikultura di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2024 produksi tertinggi berada di Kecamatan Rejoso dan Gondang. Di tahun 2024 produksi bawang merah mulai mengalami kenaikan 10,62% dari tahun 2023 dengan luas tanam 20.220.897 ha. Secara keseluruhan capaian kinerja di komoditas hortikultura yang mengalami kenaikan produksi hanya disektor unggulan yaitu komoditas bawang merah dan cabai, karena komoditas ini dapat meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.

Tabel 2.182 Data Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Produksi Tanaman Perkebunan					
1	Cengkeh (Ton)	567	570	571	568	586
2	Tembakau (Ton)	1.718	1.078	967	1.333	2.171
3	Kopi (Ton)	109	104	104	101	105
4	Tebu (Ton)	16.790	14.549	200.630	218.568	217.158
5	Nilam (Ton)	179	170	77	140	140
6	Wijen (Ton)	151	126	151	310	130
7	Kelapa (Ton)	303	251	207	204	197
8	Kakao (Ton)	379	377	375	352	335
B	Produktivitas Tanaman Perkebunan					
1	Cengkeh (Kw/Ha)	6,00	6,01	6,01	6,00	6,00

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Tembakau (Kw/Ha)	16,25	15,03	14,27	14,32	15,42
3	Kopi (Kw/Ha)	7,26	7,27	7,28	7,26	7,26
4	Tebu (Kw/Ha)	57,08	56,00	841,57	800,32	795,09
5	Nilam (Kw/Ha)	255,03	252,20	255,17	200,00	200,00
6	Wijen (Kw/Ha)	20,98	14,00	13,96	12,40	11,90
7	Kelapa (Kw/Ha)	11,93	11,60	11,61	11,60	11,60
8	Kakao (Kw/Ha)	4,54	4,54	4,54	4,51	4,50
C	Luas Panen Tanaman Perkebunan					
1	Cengkeh (Ha)	3.401	3.423	3.430	3.405	3.513
2	Tembakau (Ha)	27.923	16.206	13.805	19.086	33.468
3	Kopi (Ha)	790	754	758	734	761
4	Tebu (Ha)	958.335	814.744	168.843.980	174.925.309	172.660.503
5	Nilam (Ha)	45.528	42.998	19.533	28.000	28.000
6	Wijen (Ha)	3.171	1.764	2.103	3.846	1.548
7	Kelapa (Ha)	3.615,10	2.913,52	2.407,60	2.366	2.289
8	Kakao (Ha)	1.722,71	1.710,40	1.700,52	1.589	1.508

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk (Data dari Bidang Produksi dan perizinan pertanian dan BPS Nganjuk).

Komoditas perkebunan didominasi oleh tanaman tembakau. Komoditas tembakau mulai ada pengembangan wilayah di kecamatan Prambon dan Tanjunganom. Produksi tembakau pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 38,60% dengan luas tanam 33.468 ha produksi 2.171 ton. Hal ini dipengaruhi oleh harga jual yang tinggi, adanya dukungan dana dari kegiatan DBHCHT seperti pelatihan budidaya tembakau, penerapan PHT tembakau, Pembangunan Jalan Usaha tani, pengadaan handtraktor dan sarana transportasi roda tiga.

Tabel 2.183 Data produksi hasil peternakan dan produktivitas peternakan

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Peningkatan produksi hasil peternakan					
1	Daging (ton)	3.618,5	3.650,0	9.927,0	9.713,6	10.219,4
2	Telur (ton)	7.724,6	7.749,9	8.566,6	8.447,0	8.260,3
3	Susu (ton)	62	23	57	52	64
B	Populasi Ternak					
1	Ternak besar (Ekor)	142.560	144.497	124.597	121.837	119.373
2	Ternak Kecil (Ekor)	196.498	199.839	193.373	192.151	188.822
3	Ternak unggas (Ekor)	3.347.497	7.011.990	6.698.268	6.751.204	6.893.440
4	Aneka Ternak (Ekor)	54.023	59.392	50.637	73.414	77.507
C	Produktivitas peternakan program IB					
1	Service per conception	2	2	2	2	3
2	Calving interval	14	14	14	14	17
3	conception rate	20	20	20	30	45

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk (Data dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan BPS Nganjuk).

Populasi ternak dari tahun 2021 semakin menurun karena adanya wabah penyakit seperti : Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dan lumpy skin disease (LSD), keterbatasan pakan, perubahan iklim dan kurangnya akses terhadap teknologi pengolahan pakan. Tahun 2024 produksi daging sudah mengalami kenaikan sebesar 4.95% dari tahun 2023. Secara keseluruhan capaian kinerja belum mengalami kenaikan karena masih ada penyakit mulut dan kuku (PMK) sehingga peternak masih ada rasa takut.

Tabel 2.184 Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

No	Penyakit Hewan Menular	Jumlah Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	MCF	0	0	0	0	0
2.	ND	0	0	0	0	0
3.	Rabies	0	0	0	0	0
4.	BEF	2.478	2.145	1.928	452	553
5.	DGS	0	0	0	0	0
6.	Gumboro	0	0	0	0	0
7.	Penyakit Mulut dan Kuku	0	0	10.134	1.126	72
8.	Brucellosis	0	0	0	370	54
9.	SE	0	0	0	0	0
10.	TBC	0	0	0	0	0
11.	Leptospirosis	0	0	0	0	0
12.	Surra	0	0	0	0	0
13.	Scabies	602	495	282	21	120
14.	Pneumonia	10	0	10	0	0
15.	Bronchitis P	0	0	0	0	0
16.	Ascariasis	873	1.030	1.500	451	1.062
17.	Distomatosis	0	3	0	0	0
18.	Lain-lain PHM	48	83	52	2174	160
Jumlah penyakit hewan menular		4.011	3.756	13.906	4.594	2.021
Prosentase Penurunan Kasus = (Jumlah kasus (n-1) – Jumlah kasus n) x 100% / Jumlah kasus (n-1)		3,5%	6,36%	- 270,23%	66,96%	56,01%

Capaian kinerja persentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular dengan target penurunan 10% terealisasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 270,23% karena terjadi wabah menyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD). Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 66,96% dan pada tahun 2024 sebesar 56,01% hal ini di karenakan adanya penurunan penyakit hewan menular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD). Dinas Pertanian berupaya menanggulangi penyebaran penyakit hewan dengan

melakukan sosialisasi tentang penyakit hewan, pentingnya vaksinasi, pelayanan kesehatan hewan seperti pelayanan vaksinasi, pengobatan hewan ternak yang sakit, pemberian vitamin, pemeriksaan hewan ternak yang sakit serta edukasi menjaga kebersihan lingkungan kandang ternak.

Pada tahun 2024-2026, kinerja urusan pertanian diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Secara teoritis, NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). Penghitungan NTP dilandasi pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual dan petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi komoditas/produk pertanian.

Tabel 2.185 Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2024

Capaian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani	106	102,22	105,13	116,05	111,51

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

Nilai Tukar Petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Target Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 adalah 102,5. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, realisasi NTP tahun 2024 adalah 111,51.Indikator sasaran “NTP” dengan capaian tahun 2024 sebesar 111,51 atau 108,79% dari target

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 102,5 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori tercapai

a. NTP>100: Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih besar daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan rofes, rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan.
b. NTP=100: Ketika hubungan secara umum antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani sama. Harga pertanian secara umum dianggap setara antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani.
c. NTP<100: Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih kecil daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan rofes harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima

4. Perdagangan

Pemerintah dituntut mengambil langkah strategis dan kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan pada pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan Usaha Ekonomi Produktif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.

Sektor perdagangan di Kabupaten Nganjuk memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Penguatan sektor ini dilakukan dengan cara:

a. Penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan
b. Peningkatan efektivitas pengawasan barang

c. Perluasan pasar ekspor
d. Diversifikasi produk ekspor
e. Pemanfaatan hasil kerja sama antar daerah dan internasional
f. Pengembangan sumber daya manusia sektor perdagangan

Tabel berikut merupakan gambaran capaian kinerja urusan perdagangan.

Tabel 2.186 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Miliar Rp)	5206.09	5636.35	6235.16	6840.49	7292.81
Dustribusi PDRB ADHB (%)	19.57	20.09	20.23	20.33	20.11
Pertumbuhan ADHK (%)	-4.73	5.34	5.27	5.77	4.9

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024

Indikator-indikator di atas merepresentasikan peran sektor perdagangan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Daerah agar lebih mengembangkan potensi perdagangan terutama UMKM, ekonomi kreatif dan orientasi eksport.

Nilai ekspor daerah meningkat pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 12.921.630.000,- dibanding Tahun 2021 sebesar Rp. 13.515.410.000,-, namun menurun pada Tahun 2023 sebesar Rp. 12.983.810.000,-. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemberdayaan pelaku usaha ekspor, peningkatan produk, promosi dan misi dagang produk unggulan ekspor.

5. Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan salah satu prioritas utama dalam perekonomian daerah karena memiliki kontribusi signifikan terhadap PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Industri di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh industri kecil, dan industri kerajinan rumah tangga. Industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga mayoritas adalah industri mebel, makanan (tahu tempe) dan kerajinan anyaman. Penguatan industri ini dilakukan dengan pembentukan sentra industri kecil menengah (IKM), perluasan pangsa pasar IKM, dan peningkatan kompetensi pelaku usaha IKM.

Tabel 2.187 Jenis Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

Jenis Industri	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kecil	1.331	1.327	1.369	1.530	1.563
Kerajinan Rumah Tangga	15.428	15.451	15.493	16.269	16.280
Jumlah	**16.759**	**16.778**	**16.862**	**17.798**	**17.848**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk 2023

Tabel diatas menunjukkan kinerja perindustrian yang meningkat dari Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2023 tercatat 17.798 industri kecil dan kerajinan rumah tangga lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 sebesar 16.862 industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antardaerah kawasan transmigrasi, baik daerah pengirim transmigran maupun penerima transmigran memegang peranan sangat penting bagi keberhasilan program transmigrasi. Daerah yang telah menjalin kerjasama dalam bidang transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten

Nganjuk pada tahun 2022 adalah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2022, pemberangkatan calon transmigran sebanyak 1 Kepala Keluarga (KK) setelah sebelumnya pada tahun 2020-2021 tidak ada pemberangkatan professional dikarenakan situasi pandemi Covid-19 dan realokasi program transmigrasi dari Pemerintah Pusat. Calon transmigran yang diberangkatkan tersebut ditempatkan di lokasi Desa Raimuna, Kawasan Transmigrasi Mutiara, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

I.4. Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kondisi daerah Kabupaten Nganjuk terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satu indikatornya adalah ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
c. Rencana Strategis SKPD
d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
e. Rencana Kerja SKPD

Dalam urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Nganjuk diukur dengan persentase rekomendasi penelitian yang ditindaklanjuti yang merupakan indikator lama, serta persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang merupakan indikator baru. Lebih jelasnya capaian kinerja penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.188 Capaian Kinerja Perencanaan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 (Persen)

Indikator	Tahun				
	2020*	2021	2022	2023	2024
1. Persentase kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD	100	100	100	100	100
2. Persentase capaian sasaran pembangunan daerah ≥ 80%	77,78	94,44	100	94,44	94,44
3. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100
4. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	67	90,91	80	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk, 2024

2. Keuangan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator pengukuran kemandirian daerah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan urusan daerah. Dalam lima tahun terakhir kontribusi PAD terhadap belanja daerah terus meningkat. Akan tetapi pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan PAD meskipun apabila dibandingkan dengan target pada PAPBD T.A. 2022 realisasinya 111%. Penurunan PAD ini disebabkan pendapatan restribusi yang turun akibat adanya perubahan kebijakan terkait retribusi kesehatan, dll. Capaian kinerja pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.189 Capaian Kinerja Pendapatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 (Persen)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kontribusi PAD terhadap belanja daerah (%)	17,3	17,21	15,63	14,86	19,41
2. Prosentase realisasi PAD	124,5	132,99	111,02	186,6	100,94

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk, 2024

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah selama periode 2019-2023, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mencapai kinerja yang baik berdasarkan indikator ketepatan penyusunan LKPD dan perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit LKPD. Sedangkan untuk kinerja pengelolaan aset daerah selama 5 tahun terakhir cukup baik namun masih perlu ditingkatkan pengelolaannya. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.190 Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret
2. Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi BMD (Barang Milik Daerah/inventaris daerah) dengan baik (%)	100	100	100	100	100
3. Opini laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk, 2024

Selain itu, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 pengelolaan keuangan daerah diukur dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah dalam periode tertentu, yang bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Fungsi dan Tujuan IPKD :

a. Mengukur Kinerja:

   IPKD digunakan sebagai satuan ukuran untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah.

b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan:
   Tujuannya adalah mendorong pemerintah daerah agar lebih baik dalam mengelola keuangan daerah.
c. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas:
   IPKD juga mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
   Dimensi IPKD meliputi 6 hal, yaitu: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, 2. Kualitas pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah, 4. Penyerapan anggaran, 5. Kondisi keuangan daerah, dan 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keenam dimensi ini digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
d. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran:
   Mengukur sejauh mana dokumen perencanaan daerah (seperti RPJMD) sesuai dengan dokumen penganggaran (APBD).
e. Kualitas pengalokasian anggaran belanja dalam APBD:
   Menilai kualitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan.
f. Transparansi pengelolaan keuangan daerah:
   Menilai seberapa terbuka dan dapat diaksesnya informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah.
g. Penyerapan anggaran:
   Mengukur seberapa tinggi tingkat penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
h. Kondisi keuangan daerah:
   Menilai kesehatan dan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan.
i. Opini BPK atas LKPD:
   Menilai opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, biasanya

berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian nilai IPKD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
IPKD	63,69	69,829	70,729

Capaian IPKD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang disampaikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Dimensi I	Dimensi II	Dimensi III	Dimensi IV	Dimensi V	Dimensi VI	Nilai IPKD
8.668	19.828	6.983	15	5.251	15	70.729

Berdasarkan evaluasi, Kabupaten Nganjuk merupakan daerah dengan kemampuan keuangan rendah nilai IPKD yang diperoleh 70,729 kategori B atau perlu perbaikan. Dimensi yang harus menjadi perhatian adalah dimensi III aspek transparansi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi ketepatan waktu dan keteraksesan serta dimensi V aspek Kondisi keuangan daerah yang meliputi

a. kemandirian keuangan;
b. fleksibiitas keuangan;
c. solvabilitas opevasional;
d. solvabilitas jangka pendek;
e. solvabilitas jangka panjang; dan
f. solvabilitas layanan.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi. Fungsi penting dari manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya adalah memastikan kecukupan jumlah personel dan kualitas yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi harus didukung oleh manajemen informasi

kepegawaian yang baik. Maka dari itu, kecukupan sumber daya manusia dalam suatu instansi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas harus diperhatikan. Untuk itu, dilakukanlah manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan strategis berupa kecukupan jumlah dan peningkatan kualitas personel. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, maka manajemen karyawan harus didukung oleh manajemen informasi kepegawaian, yang berfungsi untuk mengelola data manajemen dan administrasi kepegawaian sebuah instansi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk melaksanakan Misi 2 dengan sasaran yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah" dengan indikator capaian Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 2.191 Indeks Profesionalisme ASN

Tahun	Dimensi				Nilai IP ASN	Kategori
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
2020	13,37	29,77	25	5	73,14	Sedang
2021	13,02	11,74	17,24	4,99	46,99	Sangat Rendah
2022	21,06	18,59	25	5	69,65	Rendah
2023	21,68	28,26	23,36	5	78,30	Sedang
2024	28,26	28,26	23,36	5	78,30	Sedang

Sumber: BKPSDM 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 ditetapkan 55 dan terealisasi 78,30 dengan capaian indikatornya sebesar 142,36%. Realisasi ini merupakan hasil pengukuran untuk tahun 2023 yang baru dikeluarkan oleh

BKN pada Bulan Oktober 2024 sebagaimana yang tertuang aplikasi SIASN. Untuk Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 belum tersedia pada aplikasi SIASN. Meningkatnya Nilai IP ASN dari tahun sebelumnya karena dipengaruhi salah satu Dimensi Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja yang mengalami Kenaikan secara signifikan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan BKPSDM dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Nganjuk di antaranya :

1. Melaksanakan Sosialisasi tentang IP ASN kepada pengelola kepegawaian untuk meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya meningkatkan kompetensi.
2. Memberikan layanan tugas belajar dengan bekerja sama dengan Lembaga Perguruan Tinggi , dan memberikan ijin tugas belajar untuk meningkatkan kualifkasi Pendidikan ASN
3. Memberikasi fasilitasi sertifikat keikutsertaan Pengembangan Kompetensi ASN III - 386
4. Menerbitkan surat edaran kepada perangkat daerah terkait keharusan dalam melaporkan pengembangan kompetensi mandiri ASN kepada BKPSDM melalui link yang telah disediakan oleh BKPSDM
5. Memberikan sosialisasi peraturan disiplin ASN terkait perintah dan larangan bagi pegawai, agar seluruh pegawai dapat benar-benar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut;

1. Belum optimalnya implementasi manajemen ASN berdasarkan sistem merit

2. Belum optimalnya penggunaan system informasi dalam layanan kepegawaian dikarenakan masih terdapat beberapa proses layanan kepegawaian yang dilaksanakan secara manual
3. SKP sebagai wujud penilaian kinerja belum bisa menggambarkan kinerja yang sesungguhnya, hal ini terbukti bahwa nilai skp hampir semua pegawai sesuai ekspektasi, sedangkan kinerja perangkat daerah yang dilaporkan setiap 3 bulan masih ada yang dibawah ekspektasi
4. Belum adanya pemetaan kebutuhan Diklat untuk peningkatan kompetensi ASN

Solusi :

1. Penerapan manajemen talenta dalam pengembangan karier ASN;
2. Melakukan updating data SIMAS dan melakukan pengembangan untuk layanan kepegawaian dengan prioritas layanan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
3. Mengembangkan penilaian kinerja berbasis output dan outcome, tidak sekadar menit aktivitas
4. Menyusun analis kebutuhan diklat berdasar gap

Tabel 2.192 Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi	65.00	69,50	106,92%
Capaian Kinerja				106,92%

Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah” diukur dengan indikator kinerja “Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi” adalah pejabat pada

Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang telah mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan rincian pejabat yang telah mengikuti uji kompetensi sebagai berikut:

a. Jumlah jabatan struktural yang terisi: 623 orang
b. Jumlah pejabat struktural yang telah ikut uji kompetensi: 433 orang
c. Jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti uji kompetensi : 190 orang
d. Persentase target pejabat struktural yang ikut uji kompetensi : 65,00%
e. Persentase realisasi pejabat struktural yang ikut uji kompetensi : 69,50%
f. Persentase capaian kinerja: 106,92%

I.5. Urusan Fungsi Pendukung

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, selain Dinas Daerah terdapat perangkat daerah lainnya yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan dan Inspektorat yang menyelenggarakan fungsi penunjang. Adapun capaian kinerja dari perangkat daerah tersebut selama periode 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.193 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda (%)	114	64	67	40	86%
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diterapkan	6	6	6	6	6
Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik dan sangat baik	52	51	52	52	52

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2023

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan masing-masing Perangkat Daerah disampaikan bahwa hasil perhitungan terhadap penilaian masyarakat terhadap pelayanan masing-masing perangkat daerah se-Kabupaten Nganjuk diperoleh dari 26.340 responden untuk tahun 2023 di aplikasi E-Sukma Jatim yang menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah 85,22.

Hal tersebut menunjukan bahwa mutu pelayanan pemerintah Kabupaten Nganjuk semakin baik, di mana kondisi ini meningkat dari tahun 2022 yang nilainya 84,33. Disampaikan bahwa nilai tertinggi IKM pada perangkat daerah Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2023 sebesar 92,12 dengan mutu A atau kinerja Sangat Baik pada Kecamatan Rejoso, sedangkan nilai terendah sebesar 70,87 dengan mutu C atau kinerja kurang baik diperoleh Kecamatan Baron. Namun secara umum, keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk memperoleh mutu pelayanan B atau kinerja pelayanan “Baik”.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Nganjuk diselenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah melalui pembinaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif serta pengembangan kapabilitas pengawasan intern Pemerintah Daerah yang profesional dan kompeten.

Pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan bagian dari upaya pembangunan daerah untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan”. Arah kebijakan pengawasan di Kabupaten Nganjuk

pada tahun 2023 adalah meningkatkan perencanaan pengawasan dengan pengawasan berbasis risiko, mengefektifkan mutu pengawasan secara professional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta peningkatan kapasitas APIP. Pelaksanaan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kabupaten Nganjuk tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.194 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
Maturitas SPIP	3.111	3.169	3.19

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Target maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) sebagai kelanjutan dari target penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelengggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP. Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan sub unsur SPIP juga perlu mengaitkan pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping menilai unsur dan sub unsur SPIP, dan menghasilkan nilai yang terintegrasi yaitu skor

maturitas SPIP, indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Pembaruan penilaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dilakukan oleh 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas (Inspektorat) terhadap 18 (Delapan Belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Penilaian Mandiri. Penentuan 18 (Delapan Belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dilakukan terhadap PD Pemangku Sasaran program K/L atau sasaran PD dari 30% sasaran strategis K/L/D, dengan jumlah minimal 2 (dua) sasaran strategis beserta seluruh sasaran kegiatan dan Rincian Output/Sub Kegiatan.

Pemilihan sasaran strategis mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan isu strategis pada K/L/D berdasarkan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan sesuai RPJMD 2018 – 2023. Sesuai tema tahun 2023 yaitu Terwujudnya kemandirian ekonomi, kemantapan infrastruktur, masyarakat yang sejahtera, aman, harmonis, berkepribadian dan berkebudayaan serta tata kelola pemerintahan yang baik, maka Satuan Kerja yang dilakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi sebagai berikut:

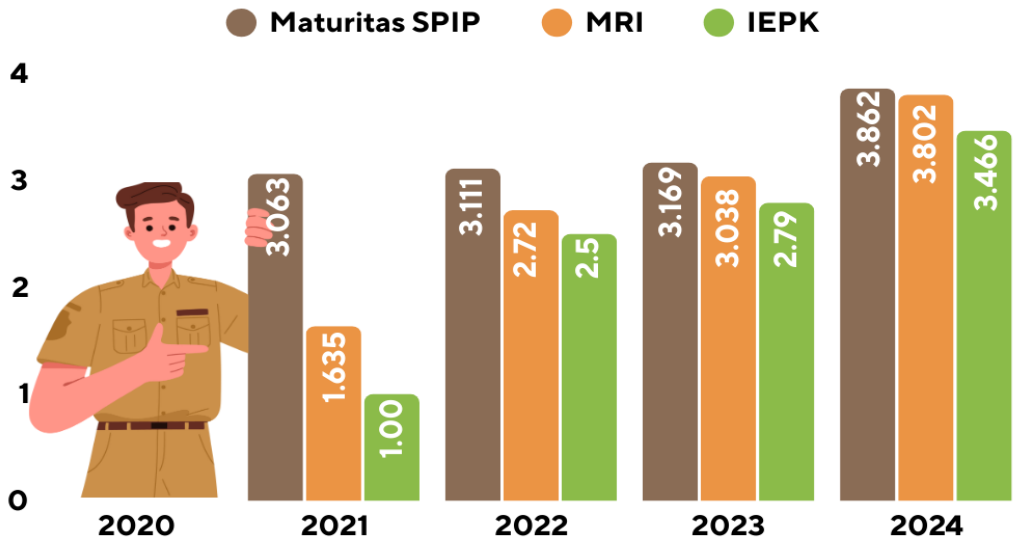
1) Inspektorat
2) BPKAD
3) Bappeda
4) Bapenda
5) BKPSDM

6) Sekretariat Daerah
7) Dinas Pendidikan
8) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
9) Dinas Kesehatan
10) Dinas Arpus
11) Dinas Perhubungan
12) Dinas Sosial PPPA
13) Dinas Pertanian
14) Dinas PPKB
15) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
16) Dinas Komunikasi dan Informatika
17) Dinas PUPR
18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Hasil dari Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan Evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur dan ditetapkan oleh Tim Panel Deputi Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP. Dengan hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Nganjuk memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi), skor Manajemen Indeks (MRI) sebesar 3,802 skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi sebesar 3,466. Rincian hasil penilaian diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 2.195 Capaian Realisasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,862
2	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3	3,802
3	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	3,466



Gambar 2.41 Grafik Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kab. Nganjuk

Berdasarkan gambar di atas, nilai *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Maturitas SPIP belum disampaikan ke Pemerintah Daerah. Sedangkan berdasarkan hasil penilaian atas *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tahun 2021 memperoleh skor 3,063 (Terdefinisi) dan pada tahun 2022 dan 2023 hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi naik dari tahun sebelumnya dengan skor 3,111 pada tahun 2022 dan 3,169 pada tahun 2023, dikarenakan terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dan seluruh jajaran ASN dalam pengendalian pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara hasil penilaian maturitas SPIP tahun 2024 sebesar 3,862. Gambaran kematangan SPIP dari Berkembang ke Terdefinisi dan memperoleh skor yang terus meningkat di tahun 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.

Capaian indikator kinerja Sasaran “Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah” dengan sub sasaran Maturitas SPIP berdasarkan skala ordinal, memperoleh predikat 3 atau 105,63% dari target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebesar 3 dan termasuk dalam kategori “Tercapai”

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1), mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diukur dalam bentuk uang. Hal ini juga mencakup segala aset dan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikelola sebagai konsekuensi dari hak dan kewajiban tersebut. Dalam konteks pengelolaannya, keuangan daerah mencakup seluruh siklus kegiatan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk memahami kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam pemenuhan layanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan sangat bergantung pada sumber penerimaan yang cukup dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan *"money follow program"* menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang telah direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian target pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Sebuah daerah yang dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemandirian fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Daerah yang mandiri secara keuangan memiliki fleksibilitas lebih dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Untuk memahami tingkat kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk, diperlukan analisis mendalam terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini mencakup evaluasi terhadap pendapatan, belanja, serta kebijakan fiskal yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mencermati tren kinerja keuangan masa lalu, dapat diidentifikasi pola penerimaan dan pengeluaran daerah, efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan, serta potensi dan tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal di masa mendatang.

Selain itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kemandirian fiskal. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang tepat dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah, dan pengembangan investasi daerah. Dengan demikian, Kabupaten Nganjuk dapat membangun sistem keuangan daerah yang lebih stabil, berkelanjutan, serta mampu mendukung pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai instrumen utama yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai dokumen keuangan daerah, APBD merupakan penjabaran kuantitatif dari visi, misi, serta strategi pembangunan daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan perangkat daerahnya. Struktur APBD mencerminkan alokasi pendanaan atas berbagai program prioritas, termasuk sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, serta pelayanan dasar yang sesuai dengan potensi, kondisi, dan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan secara sistematis, berbasis data, dan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat agar efektivitasnya dalam meningkatkan pelayanan publik dapat terjamin.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis mendalam terhadap pelaksanaan APBD dalam lima tahun terakhir. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kapasitas fiskal daerah dalam mendanai program pembangunan, mengidentifikasi tren penerimaan dan pengeluaran daerah, serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap pengelolaan APBD, pemerintah daerah dapat menyusun strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

(PAD), mengoptimalkan belanja daerah, serta memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Setiap komponen memiliki peran strategis dalam menentukan kapasitas fiskal daerah dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, analisis pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara menyeluruh dengan memahami karakteristik masing-masing komponen, serta bagaimana kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan tersebut.

Pendapatan Daerah mencakup berbagai sumber penerimaan yang dapat diperoleh daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Analisis terhadap pendapatan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan yang dapat mendukung kemandirian fiskal daerah, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Belanja Daerah mencerminkan kebijakan pengalokasian anggaran untuk berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi belanja dilakukan secara efisien, efektif, dan berbasis kinerja, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, Pembiayaan Daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam pendapatan dan belanja daerah, seperti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, serta investasi daerah. Pembiayaan ini memiliki peran penting dalam menutup defisit anggaran atau

membiayai program strategis yang tidak dapat sepenuhnya didanai melalui pendapatan reguler.

Analisis menyeluruh terhadap ketiga komponen APBD sangat penting dalam menyusun kerangka pendanaan jangka menengah dan jangka panjang. Dengan memahami peluang dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih optimal serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kebijakan nasional.

A. Realisasi APBD Tahun 2020-2024

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara target anggaran dan realisasinya dan menyandingkan antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan dan menandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel 2.152 berikut.

Tabel 2.196 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

URAIAN	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
PENDAPATAN DAERAH	**2,435,396,958,079.43**	**2,608,437,761,443.24**	**2,501,485,726,442.93**	**2,687,326,930,682.60**	**2,834,719,085,803.33**	**3.6%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**402,347,144,361.43**	**478,462,299,146.24**	**445,309,435,990.93**	**402,487,512,960.60**	**486,211,985,270.33**	**3.8%**
Pajak Daerah	110,299,917,866.92	122,126,175,036.00	135,071,942,647.00	149,424,800,824.00	164,519,508,865	9.5%
Retribusi Daerah	26,520,448,228.21	25,138,334,329.55	26,494,763,548.82	29,386,629,455.58	300,633,783,476	24.9%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,741,455,562.80	4,040,422,262.90	4,099,258,627.94	4,425,444,868.86	4,641,297,791	5.2%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	261,785,322,703.50	327,157,367,517.79	279,643,471,167.17	219,250,637,812.16	16,417,395,138	-315.0%
PENDAPATAN TRANSFER	**1,924,766,633,718.00**	**2,020,931,609,297.00**	**1,906,669,688,426.00**	**2,234,991,490,708.00**	**2,348,507,100,533.00**	**4.6%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,792,157,887,801.00	1,820,178,567,900.00	1,723,874,078,094.00	2,002,309,215,415.00	2,125,777,785,955.00	3.9%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	132,608,745,917.00	200,753,041,397.00	182,795,610,332.00	232,682,275,293.00	222,729,314,578.00	10.3%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**108,283,180,000.00**	**109,043,853,000.00**	**149,506,602,026.00**	**49,847,927,014.00**	**-**	**-57.4%**
Pendapatan Hibah	108,283,180,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-601.6%
Plain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	-	103,043,853,000.00	143,506,602,026.00	46.847.927.014	-	-26.0%
BELANJA DAERAH	**2,383,277,058,326.48**	**2,395,343,354,250.62**	**2,665,227,953,350.48**	**2,703,055,564,941.63**	**2,928,371,783,276.78**	**4.9%**
BELANJA OPERASI	**1,624,378,077,484.89**	**1,605,290,587,016.36**	**1,785,982,601,253.16**	**1,854,533,486,748.09**	**2,110,262,394,277.04**	**6.2%**
Belanja Pegawai	903,955,322,509.00	979,165,676,231.00	977,690,921,110.00	989,298,004,815.40	1,096,732,007,113.13	4.6%
Belanja Barang dan Jasa	659,014,418,130.89	560,978,980,586.36	722,359,819,806.89	741,774,843,163.69	868,153,766,034	5.5%
Belanja Hibah	49,675,136,845.00	54,627,830,199.00	73,351,910,336.27	111,159,638,769.00	131,630,571,130	21.0%
Belanja Bantuan Sosial	11,733,200,000.00	10,518,100,000.00	12,579,950,000.00	12,301,000,000.00	13,746,050,000	3.3%
BELANJA MODAL	**249,630,540,424.49**	**351,676,609,668.26**	**445,280,815,784.32**	**377,361,709,583.54**	**392,972,257,999.74**	**9.0%**
Belanja Tanah	879,865,000.00	12,052,696,800.00	5,305,199,700.00	1,081,007,000.00	558,507,500	-129.7%

URAIAN	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Belanja Peralatan dan Mesin	67,814,494,089.55	108,801,121,457.20	123,899,653,221.82	63,599,826,229.00	85,091,348,390	-4.9%
Belanja Gedung dan Bangunan	48,030,087,135.24	104,334,733,933.67	161,670,035,681.14	131,000,970,097.54	121,792,634,929	14.6%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	121,882,701,382.12	121,926,629,933.39	149,834,805,029.36	174,733,447,960.00	176,963,643,806	8.5%
Belanja Aset Tetap Lainnya	11,023,392,817.58	4,561,427,544.00	4,571,122,152.00	6,946,458,297.00	7,512,499,375	-24.9%
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	1,053,624,000	100.0%
BELANJA TAK TERDUGA	**103,309,911,807.10**	**25,420,769,197.00**	**6,235,275,135.00**	**5,055,487,150.00**	**2,014,691,000.00**	**-197.1%**
Belanja Tak Terduga	103,309,911,807.10	25,420,769,197.00	6,235,275,135.00	5,055,487,150.00	2,014,691,000	-197.1%
BELANJA TRANSFER	**405,958,528,610.00**	**412,955,388,369.00**	**427,729,261,178.00**	**466,104,881,460.00**	**423,122,440,000.00**	**0.8%**
Belanja Bagi Hasil	11,310,947,410.00	14,108,458,900.00	18,024,368,820.00	17,822,911,360.00	18,015,264,900	10.4%
Belanja Bantuan Keuangan	394,647,581,200.00	398,846,929,469.00	409,704,892,358.00	448281970100.00	405,107,175,100	0.4%
SURPLUS / (DEFISIT)	**52,119,899,752.95**	**213,094,407,192.62**	**(163,742,226,907.55)**	**(15,728,634,259.03)**	**(93,652,697,473.45)**	**-138.0%**
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**319,626,566,750.81**	**365,970,350,438.50**	**551,361,745,762.47**	**372,130,280,413.04**	**352,632,439,018.01**	**-1.9%**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	319,354,816,778.31	365,746,466,503.75	551,064,757,631.11	372,079,669,613.04	352,530,045,904.01	-1.8%
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
Penerimaan Piutang Daerah	271,749,972.50	223,883,934.75	296,988,131.36	50,610,800.00	102,393,114.00	-108.3%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**6,000,000,000.00**	**28,000,000,000.00**	**15,450,000,000.00**	**3,500,000,000.00**	**800,000,000.00**	**-170.4%**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00	28,000,000,000.00	15,450,000,000.00	3,500,000,000.00	800,000,000	-170.4%
Pembayaran Pokok Pinajam Dalam Negeri-Pemerintah Pusar	-	-	-	-	-	
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
PEMBIAYAAN NETTO	**313,626,566,750.81**	**337,970,350,438.50**	**535,911,745,762.47**	**368,630,280,413.04**	**351,832,439,018.01**	**-1.5%**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**365,746,466,503.76**	**551,064,757,631.12**	**372,169,518,854.92**	**352,632,439,018.01**	**258,179,741,544.56**	**-14.1%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui gambaran kinerja pelaksanaan APBD 2020 – 2024 Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

B. Kinerja Pendapatan Daerah

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 3,6% per tahun. Pendapatan daerah terdiri dari tiga sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di antara ketiga sumber tersebut, PAD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,80%, dengan Pajak Daerah sebagai kontributor terbesar yang mencatat rata-rata pertumbuhan 9,5% per tahun. Pendapatan retribusi pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 90,23%. Tren kenaikan penerimaan pajak daerah terlihat secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2024, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kebijakan dan regulasi. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain:

1. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023
   Peraturan ini mengatur optimalisasi penerimaan pajak, khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penerangan Jalan. Penerapan regulasi ini mendorong peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan memperkuat basis pendapatan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
   Regulasi ini memperkenalkan restrukturisasi pajak, termasuk penggabungan lima jenis pajak berbasis konsumsi menjadi satu kategori. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan daerah guna menghindari

duplikasi pemungutan, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan.

3. Ekspansi dan Diversifikasi Objek Pajak
   Pemerintah daerah juga melakukan perluasan objek pajak, mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak atas mineral bukan logam dan batuan. Diversifikasi ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
4. Penyederhanaan dan Rasionalisasi Retribusi Daerah
   Reformasi kebijakan retribusi dilakukan guna meningkatkan efektivitas pemungutan dengan biaya administrasi yang lebih rendah serta meningkatkan kepatuhan wajib retribusi. Langkah ini juga bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, sekaligus mengurangi beban ekonomi bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Pendapatan dari retribusi daerah menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Persentase kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2024, di mana jenis retribusi yang berkontribusi paling signifikan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sementara itu, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencatat rata-rata pertumbuhan 5,2%, dengan kontribusi terbesar berasal dari dividen atas penyertaan modal di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya lembaga keuangan daerah.

Pendapatan dari sumber Lain-lain PAD yang Sah kinerjanya juga fluktuatif, bahkan pada tahun 2023 tercatat mengalami penurunan yang sangat tajam dan tahun 2024 tidak ada sama sekali atau nol rupiah. Peningkatan paling tinggi terjadi pada

tahun 2022, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penerimaan dana insentif serta hibah dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk masih didominasi oleh pendapatan transfer, yang mencatat pertumbuhan agregat sebesar 4,6% dalam lima tahun terakhir. Pendapatan transfer ini bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Transfer dari Pemerintah Pusat mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta Dana Insentif Daerah/Fiskal. Realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat bersifat fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan 3,9% per tahun. Kabupaten Nganjuk masih sangat bergantung pada perhitungan DAU dari pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa daerah ini belum sepenuhnya mandiri dalam hal pendapatan. Sejak tahun 2023, Dana Alokasi Umum (DAU) dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu DAU yang penggunaannya diatur dan DAU yang penggunaannya tidak diatur, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 Tahun 2022. Selain itu, Dana Insentif Daerah (DID) hanya diberikan pada tahun 2021, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Sementara itu, pendapatan transfer antar daerah berasal dari bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, yang berfungsi sebagai tambahan dana bagi daerah untuk mendukung pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Kelompok pendapatan daerah lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 10,3%. Komponen ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

   Pada tahun 2024, Kabupaten Nganjuk tidak memperoleh pendapatan dari hibah pemerintah pusat.

2. Pendapatan Lain-lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

   Komponen ini mencakup hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pendapatan dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes TK I). Sejak tahun 2021 hingga 2024, realisasi pendapatan ini mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat serta efektivitas pengelolaan dana di tingkat daerah.

Tabel 2.197 Tabel Pendapatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi Tahun									
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
PENDAPATAN DAERAH	**2,435,396,958,079.43**		**2,608,437,761,443.24**		**2,501,485,726,442.93**		**2,687,326,930,682.60**		**2,834,719,085,803.33**	
Pendapatan Asli Daerah	402,347,144,361.43	16.52%	478,462,299,146.24	18.34%	445,309,435,990.93	17.80%	402,487,512,960.60	14.98%	486,211,985,270.33	17.2%
Pendapatan Transfer	1,924,766,633,718.00	79.03%	2,020,931,609,297.00	77.48%	1,906,669,688,426.00	76.22%	2,234,991,490,708.00	83.17%	2,348,507,100,533.00	82.8%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	108,283,180,000.00	4.45%	109,043,853,000.00	4.18%	149,506,602,026.00	5.98%	49,847,927,014.00	1.85%	-	0.0%

Sumber: BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2025

Sedangkan untuk memperoleh gambaran kinerja PAD, maka dapat diketahui dari perbandingan target PAD dan realisasi PAD selama 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.198 Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	323,260,574,754.00	359,762,424,055.00	384,183,486,327.00	372,424,742,693.00	481,571,527,997.00
Realisasi	402,347,144,361.43	478,462,299,146.24	445,309,435,990.93	402,487,512,960.60	486,211,985,270.33
Persentase Realisasi	124.47%	132.99%	115.91%	108.07%	100.96%

Sumber: BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2025

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk telah berhasil secara konsisten dalam mencapai dan melebihi target PAD selama lima tahun terakhir. Persentase capaian yang selalu di atas 100% menunjukkan adanya efektivitas dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan asli daerah.

C. Kinerja Belanja Daerah

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 1,74%. Meskipun realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, tren kenaikan mulai terlihat secara konsisten sejak tahun 2021 hingga 2024. Belanja daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencerminkan alokasi anggaran untuk mendukung berbagai program pemerintahan dan layanan publik. Secara struktural, belanja daerah terdiri dari empat kategori utama, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer. Dari keseluruhan belanja daerah selama periode 2020-2024, Belanja Operasi memiliki porsi terbesar, dengan kontribusi tertinggi mencapai 68,6% dari total anggaran belanja daerah. Komponen dalam Belanja Operasi

mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, serta Belanja Bantuan Keuangan.

1. Belanja Pegawai: Porsi Dominan dalam Belanja Operasi

   Belanja Pegawai menjadi komponen terbesar dalam Belanja Operasi, yang mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 4,6% per tahun. Anggaran ini digunakan untuk membayar kompensasi dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja terbilang masing cukup tinggi, yaitu berkisar 36-40 persen per tahun. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengingat amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengharuskan proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja daerah.

   Selain Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa juga menjadi komponen utama dalam Belanja Operasi. Pada tahun 2024, porsi Belanja Barang dan Jasa mencapai 29,65% dari total Belanja Daerah. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pengadaan barang serta layanan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk kebutuhan operasional kantor, pemeliharaan infrastruktur, serta berbagai program layanan publik.

   Di sisi lain, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah memiliki porsi yang lebih kecil dalam total anggaran belanja daerah. Meskipun demikian, kedua jenis belanja ini tetap berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program bantuan langsung serta hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan lembaga non-pemerintah yang berkontribusi dalam pembangunan daerah.

2. Belanja Modal: Investasi dalam Infrastruktur dan Aset Daerah
   Selain Belanja Operasi, Belanja Modal juga menjadi elemen penting dalam struktur belanja daerah. Anggaran ini dialokasikan untuk pengadaan aset tetap, pembangunan infrastruktur, serta investasi dalam sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Belanja Modal cenderung berfluktuasi, tergantung pada prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam APBD setiap tahunnya. Pengalokasian anggaran dalam kategori ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi dalam infrastruktur strategis.
3. Belanja Transfer: Dukungan Keuangan untuk Pemerintah Desa
   Belanja Transfer merupakan bentuk pengeluaran daerah yang digunakan untuk menyalurkan dana ke pemerintah desa serta entitas lainnya. Pada tahun 2024, proporsi Belanja Transfer mencapai 14,45% dari total Belanja Daerah. Dana ini mencakup alokasi bantuan keuangan untuk desa, serta transfer dana ke instansi lain yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran di tingkat lokal. Belanja Transfer berperan penting dalam mendukung pembangunan desa, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta memastikan keseimbangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
4. Belanja Tidak Terduga: Antisipasi Pengeluaran Darurat
   Selain ketiga kategori utama di atas, terdapat Belanja Tidak Terduga, yang dialokasikan untuk menghadapi kondisi darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Anggaran dalam kategori ini biasanya digunakan untuk merespons bencana alam, krisis ekonomi, atau situasi darurat lainnya yang memerlukan intervensi keuangan dari

pemerintah daerah. Mengingat sifatnya yang tidak terencana, realokasi anggaran dalam Belanja Tidak Terduga sering kali dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak dan kebijakan prioritas pemerintah daerah dalam situasi tertentu.

Analisis terhadap struktur dan pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Nganjuk selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran daerah, terutama pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Sementara itu, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga tetap berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah, pemerintahan desa, serta respons terhadap kondisi darurat.

Untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja, terutama dalam mengoptimalkan investasi infrastruktur melalui Belanja Modal serta meningkatkan keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Selain itu, dengan adanya dinamika fiskal yang terus berkembang, kebijakan belanja daerah harus selaras dengan kebutuhan prioritas masyarakat dan program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Tabel 2.199 Proporsi Belanja Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2020-2024

URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
BELANJA DAERAH	**2,383,277,058,326.48**		**2,395,343,354,250.62**		**2,665,227,953,350.48**		**2,703,055,564,941.63**		**2,928,371,783,276.78**	
Belanja Operasi	1,624,378,077,484.89	68.16%	1,605,290,587,016.36	67.02%	1,785,982,601,253.16	67.01%	1,854,533,486,748.09	68.61%	2,110,262,394,277.04	72.06%
Belanja Modal	249,630,540,424.49	10.47%	351,676,609,668.26	14.68%	445,280,815,784.32	16.71%	377,361,709,583.54	13.96%	392,972,257,999.74	13.42%
Belanja Tak Terduga	103,309,911,807.10	4.33%	25,420,769,197.00	1.06%	6,235,275,135.00	0.23%	5,055,487,150.00	0.19%	2,014,691,000.00	0.07%
Belanja Transfer	405,958,528,610.00	17.03%	412,955,388,369.00	17.24%	427,729,261,178.00	16.05%	466,104,881,460.00	17.24%	423,122,440,000.00	14.45%

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2025

Secara umum, realisasi belanja Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren yang konsisten, dengan tingkat pencapaian yang secara rutin mendekati atau bahkan melebihi 80% setiap tahunnya. Belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur pengeluaran, mencerminkan fokus utama pemerintah daerah pada pembiayaan aktivitas rutin serta penyediaan layanan publik. Sementara itu, belanja modal mengalami fluktuasi, dengan beberapa tahun mencatat peningkatan yang signifikan, meskipun secara keseluruhan masih menunjukkan variasi dalam alokasinya. Belanja tidak terduga dan belanja transfer memiliki proporsi yang relatif kecil, menandakan adanya perencanaan anggaran yang lebih matang serta minimnya kebutuhan untuk pengeluaran mendadak dalam skala besar.Dengan pola pengelolaan yang demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran Kabupaten Nganjuk tergolong cukup efektif dan stabil dalam mendukung kebutuhan pembangunan serta operasional pemerintahan daerah setiap tahunnya.

D. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya berfokus pada tiga aspek utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Keuangan daerah memegang peranan krusial dalam perencanaan pembangunan karena berkaitan erat dengan analisis kondisi daerah, termasuk potensi serta tantangan yang dihadapi. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek keuangan ini, pemerintah daerah dapat merancang strategi pendanaan yang efektif untuk merealisasikan program pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah yang optimal ditandai oleh keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah, efisiensi serta efektivitas dalam belanja, dan pemanfaatan potensi pembiayaan secara cermat. Keseimbangan ini bertujuan agar

pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa tahapan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Seluruh tahapan tersebut telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk aspek pengelolaan keuangan.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan memperbarui regulasi dalam rangka meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah secara lebih rinci.

Dengan regulasi yang telah diterapkan, harapannya pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat.

E. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kebutuhan pembangunan serta operasional pemerintahan. Tingkat kemandirian yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tidak terlalu bergantung pada

sumber pendanaan eksternal, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari luar negeri. Untuk mencapai kemandirian fiskal, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber daya lokal yang lebih efektif, peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta inovasi dalam diversifikasi sumber pendapatan. Selain itu, kebijakan belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang memiliki dampak luas dan berkelanjutan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih produktif.

Dengan strategi yang tepat, kemandirian keuangan daerah dapat menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan, memungkinkan daerah untuk lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal. Sebaliknya, semakin rendah kemandirian keuangan, semakin besar ketergantungan daerah terhadap pihak luar. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, digunakan rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

$$Kemandirian\ Keuangan\ Daerah = \frac{Total\ PAD}{Total\ Pendapatan}$$

Tabel 2.200 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Tahun	PAD		Pendapatan Transfer		Lain-lain pendapatan daerah yang sah		Total Pendapatan	Kemandirian Keuangan
	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)=(2)+(3)+(4)	(6)=(2)/(5)
2020	402,347,144,361.43	16.52%	1,924,766,633,718.00	79.03%	108,283,180,000.00	4.45%	2,435,396,958,079.43	0.17
2021	478,462,299,146.24	18.34%	2,020,931,609,297.00	77.48%	109,043,853,000.00	4.18%	2,608,437,761,443.24	0.18
2022	445,309,435,990.93	17.80%	1,906,669,688,426.00	76.22%	149,506,602,026.00	5.98%	2,501,485,726,442.93	0.18
2023	402,487,512,960.60	14.98%	2,234,991,490,708.00	83.17%	49,847,927,014.00	1.85%	2,687,326,930,682.60	0.15
2024	486,211,985,270.33	17.15%	2,348,507,100,533.00	82.85%	-	0.00%	2,834,719,085,803.33	0.17

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2025

Tabel di atas menyajikan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Total Pendapatan, serta rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Nganjuk dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Secara umum, meskipun rasio kemandirian keuangan menunjukkan tren peningkatan di beberapa tahun, Kabupaten Nganjuk masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Untuk meningkatkan kemandirian finansial, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD, seperti peningkatan efisiensi pemungutan pajak daerah, pengelolaan retribusi yang lebih transparan, serta pengembangan inovasi di sektor ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat mendorong diversifikasi sumber pendapatan, misalnya melalui pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif, kemitraan dengan sektor swasta, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kemandirian fiskal Kabupaten Nganjuk dapat meningkat secara berkelanjutan.

F. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merujuk pada kemampuan keuangan suatu daerah yang tercermin dari total pendapatan daerah serta penerimaan pembiayaan tertentu, setelah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja wajib, serta pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Pendapatan yang bersifat terikat ini mencakup berbagai komponen, seperti Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Otonomi

Khusus, serta Dana Desa. Sementara itu, belanja tertentu yang menjadi prioritas dalam penganggaran meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru, Belanja Bagi Hasil, serta Alokasi Dana Desa.

Penghitungan kapasitas fiskal memainkan peran penting dalam reformulasi pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU), di mana pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi dana lebih mencerminkan kebutuhan riil serta kapasitas fiskal daerah masing-masing. Dengan demikian, daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi diharapkan mampu membiayai kebutuhannya secara lebih mandiri, sementara daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dapat menerima dukungan dari pemerintah pusat untuk menjamin pemerataan pembangunan.

Dalam konteks Kabupaten/Kota, kapasitas fiskal dihitung berdasarkan potensi riil pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia serta tingkat efektivitas dalam pengelolaannya. Perhitungan ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi keuangan yang lebih berkelanjutan, termasuk dalam menentukan prioritas belanja serta optimalisasi sumber pendapatan lokal. Untuk memahami posisi kapasitas fiskal suatu daerah secara lebih komprehensif, pengukuran dilakukan dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan dalam regulasi terkait. KFD dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$KFD = (Pendapatan + Penerimaan\ pembiayaan\ tertentu) - (Pendapatan\ yang\ penggunaannya\ sudah\ ditentukan + Belanja\ tertentu + pengeluaran\ pembiayaan\ tertentu)$$

Kemudian untuk mengetahui Kategori Kapasitas Fiskal Daerah, dapat dihitung melalui rumus berikut.

$$RKFD = \frac{KFD}{Belanja\ Pegawai}$$

Kapasitas fiskal daerah diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Klasifikasi ini membantu dalam memahami kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri. Berikut adalah rincian masing-masing kategori kapasitas fiskal daerah:

Tabel 2.201 Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Dasar Hukum
2020	1,205	Tinggi	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK. 07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2021	1,187	Tinggi	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2022	1,272	Tinggi	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2023	1,010	Rendah	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2024	1,095	Rendah	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Sumber: PMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Tabel berikut menyajikan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Nganjuk selama periode 2020 hingga 2024, lengkap dengan kategori kapasitas fiskal serta dasar hukum yang mengaturnya. Fluktuasi RKFD selama lima tahun terakhir mencerminkan dinamika kondisi keuangan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal nasional dan optimalisasi pendapatan daerah.

Pada tahun 2020, RKFD Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 1,205, yang diklasifikasikan dalam kategori tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK. 07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 1,187, kategori tinggi, sesuai dengan PMK Nomor 116/PMK.07/2021.

Tahun 2022 menunjukkan sedikit kenaikan RKFD menjadi 1,272, masih tetap berada dalam kategori tinggi, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 193/PMK.07/2022. Pada tahun 2023, RKFD mengalami penurunan menjadi 1,010 kategori rendah. Sampai dengan pada 2024 sebesar 1,095, RKFD msih berstatusnya kategori rendah, sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 65 Tahun 2024.

Tren fluktuatif ini mencerminkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kapasitas fiskal Kabupaten Nganjuk, termasuk tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat, serta dinamika belanja daerah. Penurunan RKFD pada tahun 2024 menunjukkan perlunya strategi lebih lanjut dalam optimalisasi sumber pendapatan daerah, efisiensi belanja, serta perencanaan keuangan yang lebih berkelanjutan agar kapasitas fiskal daerah dapat kembali meningkat dan lebih stabil di masa mendatang.

G. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur merupakan rasio antara anggaran yang dialokasikan bagi operasional aparatur pemerintahan dengan total anggaran belanja daerah. Komponen belanja ini mencakup berbagai aspek pengeluaran yang bertujuan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Kebutuhan aparatur dalam anggaran belanja daerah meliputi pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil

(PNS), pejabat daerah, serta tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Selain itu, belanja ini juga mencakup dana pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan.

Selain kompensasi pegawai, fasilitas kerja dan operasional perkantoran juga menjadi bagian dari kebutuhan aparatur. Ini termasuk pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendukung seperti kantor, kendaraan dinas, alat komunikasi, serta teknologi informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Biaya operasional lainnya, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan penyediaan bahan bakar untuk kendaraan dinas, juga masuk dalam kategori ini.

Melihat perannya yang strategis, alokasi anggaran untuk kebutuhan aparatur perlu dikelola secara efisien dan proporsional, sehingga tidak mengurangi porsi anggaran yang dialokasikan untuk sektor lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Optimalisasi pengelolaan belanja aparatur yang seimbang akan mendorong efektivitas birokrasi sekaligus memastikan bahwa anggaran daerah tetap fokus pada pembangunan dan pelayanan publik.Rumus proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Proporsi\ Belanja\ Pemenuhan\ Kebutuhan\ Aparatur = \frac{Belanja\ Aparatur}{Belanja\ Daerah}$$

Tabel 2.202 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2024

Tahun	Realisasi		Rasio
	Kebutuhan Aparatur (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	
2019	Rp941.226.632.350,64	Rp2.541.996.619.515,29	37,03%
2020	Rp903.955.322.509,00	Rp2.383.277.058.326,48	37,93%
2021	Rp979.165.676.231,00	Rp2.395.343.354.250,62	40,88%
2022	Rp977.675.422.819,92	Rp2.665.205.211.303,42	36,68%
2023	Rp989.298.004.815,40	Rp2.703.427.165.191,63	36,59%
2024	Rp1.081.272.869.931,00	Rp.2.876.373.596.319,33	37,59%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Nganjuk

Proporsi belanja aparatur terhadap total belanja daerah menunjukkan tren yang cenderung menurun secara rata-rata dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah, di mana alokasi belanja semakin difokuskan pada pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Meskipun tren ini menunjukkan arah yang positif, data dari tabel sebelumnya mengindikasikan bahwa proporsi belanja aparatur masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam jumlah pegawai, kebijakan kenaikan gaji atau tunjangan, serta kebutuhan operasional pemerintahan yang dapat bervariasi dari tahun ke tahun.

Secara regulasi, terdapat ambang batas belanja pegawai yang ideal, yaitu tidak melebihi **30% dari total belanja daerah**, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks Kabupaten Nganjuk, proporsi belanja pegawai masih berada di atas batas ideal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih perlu dioptimalkan untuk mencapai keseimbangan antara belanja aparatur dan belanja yang lebih produktif, seperti investasi dalam

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat.

Untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat terus melakukan berbagai strategi, seperti rasionalisasi belanja pegawai, efisiensi birokrasi, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) agar ketergantungan pada anggaran belanja aparatur semakin berkurang. Dengan demikian, anggaran daerah dapat lebih diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

H. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, terutama ketika terjadi defisit anggaran. Dengan kata lain, pembiayaan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah agar tetap berjalan sesuai dengan perencanaan fiskal yang telah ditetapkan.

Di Kabupaten Nganjuk, sumber pembiayaan daerah berasal dari berbagai komponen, di antaranya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang telah diberikan, serta penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Komponen-komponen ini menjadi elemen kunci dalam menjaga likuiditas keuangan daerah dan memastikan bahwa program pembangunan serta pelayanan publik dapat terus berjalan tanpa terkendala masalah pendanaan.

Di sisi lain, pengeluaran dalam pembiayaan daerah meliputi beberapa aspek utama, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, serta pembayaran pokok utang. Penyertaan modal daerah umumnya dilakukan untuk mendukung

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat beroperasi lebih optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Nganjuk, penyertaan modal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 mengenai penyertaan modal pemerintah pada BUMD.

Keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pembiayaan daerah sangat bergantung pada strategi yang diterapkan dalam mengelola sumber pendanaan serta pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Selain itu, optimalisasi sumber pendapatan daerah juga menjadi langkah penting guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari sumber eksternal, sehingga kemandirian fiskal daerah dapat semakin diperkuat.

Tabel berikut menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ defisit di Kabupaten Nganjuk:

Tabel 2.203 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.435.396.958.079,43	2.608.437.761.443,24	2.501.196.777.618,99	2.687.326.930.682,60	2.834.668.602.772,33
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	2.383.277.058.326,48	2.395.343.354.250,62	2.665.205.211.303,42	2.703.055.564.941,63	2.928.371.783.276,78
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.000.000.000,00	28.000.000.000,00	15.450.000.000,00	3.500.000.000,00	800.000.000
		46.119.899.753	185.094.407.193	(179.458.433.684)	(19.228.634.259)	(94.503.180.504,45)

Berdasarkan data dalam tabel, Kabupaten Nganjuk mencatat surplus anggaran pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing sebesar Rp 46.119.899.753 dan Rp 185.094.407.193. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, kondisi keuangan daerah mengalami perubahan dengan terjadinya defisit anggaran. Defisit tersebut tercatat sebesar Rp 179.192.226.907,55 pada tahun 2022 dan Rp 19.228.634.259 pada tahun 2023. Pergeseran dari surplus ke defisit ini mencerminkan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam pendapatan daerah, peningkatan belanja, atau faktor eksternal lainnya.

Tabel 2.204 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	99,91%	99,94%	99.95%	100	99,97%
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	0,03%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,09%	0,06%	0.05%	-	

Sumber: BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2024

Tabel di atas menyajikan data mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, serta berbagai faktor yang memengaruhi besarnya SiLPA. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap SiLPA antara lain kelebihan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelebihan penerimaan dari dana perimbangan,

serta kelebihan penerimaan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penurunan SiLPA setiap tahunnya menjadi indikator terjadinya defisit anggaran riil, yang berarti belanja daerah melebihi jumlah pendapatan yang diterima. Dampak dari defisit ini dapat terlihat dalam beberapa aspek berikut:

1. **Indikasi Ketidakseimbangan Fiskal**. Penurunan SiLPA menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, yang dapat mengarah pada keterbatasan anggaran untuk tahun-tahun mendatang.

2. **Perlunya Evaluasi Kebijakan Penganggaran**. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu meninjau kembali kebijakan penganggaran untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk menyesuaikan alokasi belanja atau mencari sumber pendapatan tambahan guna menutup kekurangan anggaran.

3. **Peningkatan Efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**. Tren penurunan SiLPA menunjukkan perlunya optimalisasi belanja daerah agar lebih efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan memangkas pengeluaran yang kurang prioritas serta meningkatkan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

4. **Dampak pada Kualitas Layanan Publik**. Jika defisit anggaran terus berlanjut tanpa pengelolaan yang tepat, maka dapat berpengaruh pada kualitas layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap mendapatkan pendanaan yang memadai.

5. **Strategi Keuangan Jangka Panjang**. Untuk mengatasi penurunan SiLPA, Kabupaten Nganjuk perlu merancang strategi keuangan jangka panjang yang berorientasi pada

peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian belanja. Pendekatan ini bisa melibatkan optimalisasi pemungutan pajak daerah, peningkatan investasi di sektor produktif, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Dengan adanya strategi yang tepat, diharapkan Kabupaten Nganjuk dapat menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi risiko defisit yang berkelanjutan.

Penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang terjadi secara berkelanjutan, disertai dengan defisit dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencerminkan tantangan serius bagi Kabupaten Nganjuk dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah. Kondisi ini dapat berdampak pada kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan mempertahankan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang terencana, sistematis, dan menyeluruh. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi optimalisasi sumber pendapatan daerah melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, eksplorasi peluang pendapatan alternatif, serta peningkatan investasi di sektor-sektor produktif yang dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

Di sisi pengeluaran, pemerintah daerah perlu mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam alokasi anggaran. Pengurangan belanja yang kurang prioritas, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan pembiayaan

tambahan, baik melalui program bantuan, kerja sama investasi, maupun inisiatif lainnya yang dapat mendukung keberlanjutan fiskal.

Dengan penerapan strategi yang tepat dan berkelanjutan, Kabupaten Nganjuk dapat menghadapi tantangan keuangan dengan lebih baik, menjaga stabilitas fiskal, serta memastikan bahwa pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap berjalan secara optimal.

Tabel 2.205 Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	319.354.816.778,31	100	365.746.466.503,75	100	551.192566.166,11	100	372.079.669.613,04	100	352.530.045.904,01	100
2	Pelamp auan penerimaan PAD	79.086.569.607,04	24,764	118.699.875.091,24	32,454	61.406.449.173,99	11,14	30.062.770.267,60	8,08	12.808.963.412	3,63
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	5.971.558.827,00	1,87	12.943.802.677,00	-3,54	- 23.520.850.291,00	-4,27	20.549.180.071,00	5,52	48.068.503.955	13,63
4	Pelamp auan peneri maan lain- lain pendap atan daerah yang sah	- 673.920.000,00	-0,21	- 612,00	0,001	-8.868.176.177,00	-1,61	- 4.030.762.688,00	-1,08	0	0

Tabel yang ditampilkan menggambarkan dinamika perubahan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten Nganjuk selama lima tahun terakhir. Selama periode tersebut, nilai SiLPA mengalami fluktuasi, dengan lonjakan signifikan yang terjadi pada tahun 2022. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan pendapatan daerah atau efisiensi dalam realisasi belanja pemerintah daerah.

Salah satu indikator positif yang dapat diamati adalah peningkatan pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan dan pemungutan PAD, baik melalui optimalisasi sumber pajak dan retribusi daerah maupun inovasi dalam kebijakan fiskal lokal. Pertumbuhan PAD yang konsisten menjadi salah satu kunci utama dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, tidak semua komponen pendapatan daerah menunjukkan tren yang sama. Pelampauan penerimaan dana perimbangan serta penerimaan lain-lain yang sah justru mengalami fluktuasi dan cenderung menunjukkan tren negatif. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam stabilitas pendapatan dari transfer pemerintah pusat serta sumber pendapatan lainnya. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan fiskal nasional, penyesuaian alokasi anggaran pusat, atau dinamika ekonomi makro dapat memengaruhi besaran penerimaan daerah dari sumber ini.

Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi pengelolaan keuangan yang adaptif dan berkelanjutan. Kabupaten Nganjuk perlu terus memperkuat upaya dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui diversifikasi sumber pendapatan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan serta eksekusi anggaran dapat membantu memastikan bahwa setiap potensi pendapatan

dimanfaatkan secara optimal demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2.2. Proyeksi keuangan Daerah tahun 2026-2030

Analisis kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk berperan penting dalam menentukan kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan serta memberikan pelayanan publik yang optimal. Perencanaan keuangan daerah untuk periode 2026–2030 akan menjadi landasan utama dalam merealisasikan program pembangunan yang berkelanjutan. Dalam menyusun proyeksi anggaran untuk lima tahun ke depan, pemerintah daerah menggunakan pendekatan berbasis data historis, yakni dengan menganalisis tren pendapatan daerah selama periode 2020–2024.

Selain berdasarkan tren historis, proyeksi keuangan juga mempertimbangkan berbagai kebijakan strategis dan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Salah satu aspek utama dalam perencanaan ini adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal.

Penyusunan proyeksi pendapatan daerah dilakukan secara indikatif dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi fiskal, seperti pertumbuhan ekonomi, regulasi baru, serta potensi sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan. Selain itu, proyeksi ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan perkembangan terbaru serta informasi yang diperoleh dalam proses perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Sebagai bagian dari tahapan perencanaan strategis, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyusun tabel proyeksi indikatif dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun mendatang.

Tabel 2.206 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	P-APBD 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
1	PENDAPATAN	2.834.719.085.803,33	2.785.986.816.060,77	3.361.031.614.946,34	3.548.215.761.877,00	3.611.943.030.014,00	3.966.426.796.167,00	3.974.138.590.698,00
	A. Pendapatan Asli Daerah	486.211.985.270,33	587.200.106.361,77	576.113.183.228,01	595.860.727.197,18	622.049.045.899,32	648.237.364.601,48	674.425.683.303,63
	B. Pendapatan Transfer	2.348.507.100.533,00	2.198.786.709.699,00	2.781.976.501.718,33	2.949.118.911.679,82	2.986.334.248.814,68	3.314.273.722.735,52	3.295.405.627.681,37
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	2.941.930.000,00	3.236.123.000,00	3.559.735.300,00	3.915.708.830,00	4.307.279.713,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.834.719.085.803,33	2.785.986.816.060,77	3.361.031.614.946,34	3.548.215.761.877,00	3.611.943.030.014,00	3.966.426.796.167,00	3.974.138.590.698,00
2	BELANJA	2.928.371.783.276,78	3.043.575.799.749,50	3.500.231.614.946,34	3.677.415.761.877,00	3.731.143.030.014,00	4.075.626.796.167,00	4.073.338.590.698,00
	A. Belanja Operasi	2.110.262.394.277,04	2.281.294.992.046,13	2.113.649.369.782,38	2.118.115.518.283,50	2.132.212.991.643,50	2.146.175.467.890,50	2.144.978.343.902,00
	B. Belanja Modal	392.972.257.999,74	323.975.262.230,00	829.040.096.463,96	999.678.763.59,50	1.020.955.548.370,50	1.343.367.258.276,50	1.341.860.246.796,00
	C. Belanja Tak Terduga	2.014.691.000,00	13.259.603.473.37	4.100.000.000,00	4.200.000.000,00	4.300.000.000,00	4.400.000.000,00	4.500.000.000,00
	D. Belanja Transfer	423.122.440.000,00	425.045.942.000,00	553.442.148.700.00	555.421.480.000,00	573.674.490.000,00	581.684.070.000,00	582.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.928.371.783.276,78	3.043.575.799.749,50	3.500.231.614.946,34	3.677.415.761.877,00	3.731.143.030.014,00	4.075.626.796.167,00	4.073.338.590.698,00

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	P-APBD 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
	SURPLUS/DEFISIT	-93.652.697.473,45	-257.588.983.688,73	-139.200.000.000,00	-129.200.000.000,00	-119.200.000.000,00	-109.200.000.000,00	-99.200.000.000,00
3	PEMBIAYAAN							
	A. Penerimaan	352.632.439.018,01	258.224.083.688,73	140.000.000.000,00	130.000.000.000,00	120.000.000.000,00	110.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	B. Pengeluaran	800.000.000,00	635.100.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	351.832.439.018,01	257.588.983.688,73	139.200.000.000,00	129.200.000.000,00	119.200.000.000,00	109.200.000.000,00	99.200.000.000,00
	SISA LEBIH TAHUN BERKENAAN	258.179.741.544,56	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa kapasitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren perbaikan yang stabil dari tahun ke tahun. Hasil analisis perhitungan kapasitas riil keuangan daerah mengindikasikan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Nganjuk cukup baik dan terus mengalami peningkatan.

Untuk periode 2025–2030, arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah diarahkan pada penguatan kapasitas keuangan yang berkelanjutan. Strategi utama dalam peningkatan kapasitas riil keuangan daerah mencakup berbagai aspek, terutama dalam kebijakan pendapatan, yang mencakup langkah-langkah berikut:

A. Kebijakan Pendapatan

1. Penguatan Kelembagaan dan Sistem Operasional

a. Meningkatkan efektivitas struktur kelembagaan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
b. Mengembangkan sistem operasional yang lebih efisien dan akuntabel untuk optimalisasi penerimaan daerah.

B. Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, serta karakteristik dan daya beli masyarakat.
2. Mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan pendapatan daerah.

C. Peningkatan Koordinasi dengan Berbagai Pihak

1. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah penghasil pendapatan, kabupaten/kota lain, aparat penegak hukum, serta sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan.

D. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

1. Mengembangkan layanan yang lebih baik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak untuk menciptakan kepercayaan dan kepastian hukum dalam pembayaran pajak daerah.

E. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam penyediaan layanan publik sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah.

F. Peningkatan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah

1. Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan non-pajak.
2. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah dengan berbasis pada prinsip transparansi dan efektivitas.

G. Penyempurnaan Administrasi dan Efisiensi Anggaran

1. Mengembangkan sistem administrasi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.

H. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Meningkatkan kinerja layanan masyarakat melalui perbaikan tata kelola organisasi dan sistem kerja yang lebih efektif.
2. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berintegritas tinggi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk memberikan layanan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Mendorong inovasi dalam sistem pelayanan guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat terus meningkatkan kapasitas keuangan daerah secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada dana transfer, serta memperkuat stabilitas fiskal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal.

2.2.3. Kebijakan Belanja Daerah

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah, kebijakan belanja Kabupaten Nganjuk diarahkan pada optimalisasi penggunaan dana serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa langkah strategis dalam kebijakan belanja mencakup:

1. Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa.

   Melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa guna memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal dan efisien.

   Mengembangkan strategi pengendalian belanja pegawai untuk mengurangi beban fiskal yang berlebihan tanpa mengorbankan efektivitas layanan publik.

2. Pengendalian Proporsi Belanja Pegawai.

   Mengkaji kembali komposisi belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat ambang batas belanja pegawai berdasarkan regulasi masih berada di atas 30%. Mendorong kebijakan pengelolaan pegawai yang lebih efisien, termasuk melalui peningkatan produktivitas pegawai serta optimalisasi sistem manajemen kepegawaian.

3. Mengutamakan Pengeluaran yang Produktif

Memastikan bahwa belanja daerah difokuskan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal. Menghindari pengeluaran yang bersifat konsumtif atau kurang produktif yang tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah.

4. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)

   Mengelola belanja daerah dengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap penggunaan dana. Mendorong evaluasi berkala terhadap program-program yang dibiayai dengan anggaran daerah guna memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pembangunan.

   1) Prioritas pada Urusan Pemerintahan Daerah

      Mengalokasikan belanja daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.Memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar dan pembangunan daerah.

2) Pemanfaatan Belanja Rutin secara Efektif dan Efisien

Memastikan bahwa belanja rutin, seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS), belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor, dikelola dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Menekan biaya operasional yang tidak esensial dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mendukung keberlanjutan fiskal daerah.

2.2.4. Kebijakan Pembiayaan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan mendukung implementasi program pembangunan, kebijakan pembiayaan Kabupaten Nganjuk diarahkan pada pemanfaatan sumber pembiayaan yang strategis dan berkelanjutan.

1. Optimalisasi Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

   Menggunakan SiLPA secara strategis untuk mendukung proyek-proyek prioritas yang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Mengalokasikan SiLPA untuk program pembangunan yang bersifat produktif, seperti pengembangan infrastruktur ekonomi, peningkatan investasi daerah, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Perencanaan Pemanfaatan SiLPA secara Berkelanjutan.

   Menyusun strategi penggunaan SiLPA yang matang agar dana tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang maksimal serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Menyesuaikan alokasi SiLPA dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan fiskal yang berkembang setiap tahunnya.

3. Penyusunan Kerangka Pendanaan Berbasis Kapasitas Riil Keuangan Daerah.

   Hasil perhitungan kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel akan menjadi acuan utama dalam merancang skema pendanaan untuk program-program pembangunan dalam lima tahun ke depan dan digunakan sebagai panduan dalam mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Prioritas Alokasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam mendukung efektivitas pengelolaan anggaran daerah, alokasi dana akan dibagi ke dalam tiga prioritas utama, yaitu:

Prioritas I: Belanja untuk Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Anggaran akan dialokasikan terutama untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dalam sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik lainnya yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Prioritas II: Pendanaan untuk Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan

Anggaran dalam kategori ini mencakup sektor-sektor pembangunan yang bersifat strategis tetapi tidak secara langsung masuk dalam cakupan pelayanan dasar, seperti pengembangan ekonomi daerah, pengelolaan lingkungan, dan sektor ketahanan pangan.

Prioritas III: Program Pendukung, Penunjang, dan Fungsi Perangkat Daerah

Dana yang dialokasikan dalam prioritas ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berperan sebagai unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah,

termasuk pengembangan kapasitas aparatur, peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.

Dengan kebijakan yang komprehensif dalam pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat stabilitas keuangan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah serta analisis isu strategis memiliki peran krusial dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan, sekaligus sebagai landasan utama dalam perumusan program prioritas yang akan dijalankan.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam lima tahun ke depan, tantangan pembangunan global semakin kompleks akibat perubahan yang cepat di berbagai sektor, dikenal sebagai megatren. Fenomena ini mencerminkan perubahan transformatif dalam skala besar dan jangka panjang, terutama didorong oleh kemajuan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), serta komputasi modern.

Digitalisasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan global, termasuk di Indonesia. Percepatan digitalisasi semakin nyata sejak pandemi COVID-19 pada 2019, yang memperkuat peran digitalisasi dalam perekonomian dan daya saing nasional. Dalam satu dekade terakhir, digitalisasi telah mendorong inovasi, efisiensi, hingga disrupsi di berbagai sektor, mengubah pola

interaksi sosial dan ekonomi. Negara-negara seperti Estonia, Singapura, Malaysia, dan China telah memanfaatkan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka, dan Indonesia pun menargetkan sektor digital sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, dengan proyeksi nilai aktivitas ekonomi mencapai Rp22.513 triliun pada tahun 2045.

Namun, meskipun megatren digital membawa peluang, jika tidak diantisipasi dengan baik, dampaknya dapat menyebabkan disrupsi yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan jangka panjang di Indonesia harus berorientasi pada transformasi menyeluruh yang berbasis kolaborasi antara berbagai elemen bangsa guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan di Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan berbagai kemajuan yang signifikan, namun tetap menghadapi tantangan dari berbagai dimensi, baik eksternal maupun internal. Permasalahan tersebut perlu diatasi melalui kebijakan yang terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Nganjuk antara lain:

1. *Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah yang Belum Optimal*

   Pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan daya saing daerah. Sektor pertanian tetap menjadi pilar utama perekonomian daerah, namun optimalisasi nilai tambah melalui strategi hilirisasi industri berbasis pertanian masih belum maksimal. Hilirisasi diperlukan agar hasil pertanian tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Tantangan lainnya adalah perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap produktivitas komoditas unggulan pertanian, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan

permukiman yang semakin mengurangi luas lahan produktif. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengancam ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Indikator yang menunjukkan perlunya penguatan sektor pertanian adalah tren penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang berkurang dari 28% pada tahun 2020 menjadi 27,3% pada tahun 2023. Selain pertanian, sektor peternakan juga menghadapi hambatan, terutama terkait keterbatasan fasilitas dan infrastruktur Rumah Potong Hewan (RPH) yang higienis dan memenuhi standar. Peningkatan investasi dalam modernisasi RPH serta sistem distribusi daging yang lebih baik menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing sektor peternakan di daerah ini.

Selain sektor pertanian dan peternakan, Kabupaten Nganjuk juga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan Industri Kecil Menengah (IKM), namun pengelolaannya masih belum optimal. Pengembangan sektor-sektor ini memerlukan strategi yang lebih terpadu, mulai dari promosi destinasi wisata, peningkatan kapasitas pelaku usaha kreatif, hingga penguatan ekosistem industri kecil yang berbasis pada keunggulan lokal.

Dari sisi industri dan investasi, Kabupaten Nganjuk memiliki keuntungan strategis dengan keberadaan infrastruktur utama, seperti jalan tol dan Bandara Dhoho Kediri. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai daya tarik investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam menarik investor, seperti pemberian insentif, penyederhanaan regulasi investasi, serta penguatan konektivitas antara pusat produksi dan jalur distribusi.

Dengan optimalisasi di berbagai sektor ini, Kabupaten Nganjuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. *Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Publik*

Kondisi permukiman di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana dasar. Salah satu permasalahan utama adalah masih tingginya angka rumah tidak layak huni, yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 85,91%. Angka ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih intensif untuk memastikan lingkungan permukiman yang layak dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rendahnya akses penduduk terhadap hunian yang layak dan terjangkau disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan pendapatan, dampak bencana alam, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang standar rumah layak huni dalam pembangunan rumah secara swadaya. Oleh karena itu, diperlukan program perumahan yang lebih inklusif, baik melalui bantuan langsung, subsidi perumahan, maupun peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan rumah mandiri yang memenuhi standar kelayakan.

Selain persoalan hunian, akses terhadap air minum yang layak juga masih menjadi tantangan. Hingga tahun 2024, hanya 16,58% rumah tangga di Kabupaten Nganjuk yang mendapatkan akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan. Namun, akses ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk belum terpenuhinya aspek kontinuitas serta kualitas air minum yang sesuai

dengan standar kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur air bersih, optimalisasi layanan SPAM, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap kualitas air minum.

Di sisi lain, permasalahan pertanahan juga menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Masih terdapat berbagai hambatan dalam pemanfaatan tanah kosong untuk kepentingan umum yang belum terinventarisasi, proses legalisasi pengadaan tanah yang tertunda, serta administrasi tukar-menukar lahan atau kawasan hutan untuk kepentingan umum dan permukiman. Kurangnya kepastian hukum terkait pengelolaan dan peruntukan lahan dapat menghambat berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur dasar dan fasilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan percepatan dalam tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan terintegrasi agar dapat mendukung pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Dengan adanya perbaikan di sektor permukiman, air bersih, dan tata kelola pertanahan, Kabupaten Nganjuk dapat mewujudkan lingkungan yang lebih layak huni, sehat, dan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis yang mencakup intervensi kebijakan, peningkatan infrastruktur, serta edukasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh penduduk.

3. *Pembangunan Infrastruktur yang Belum Merata*

Konektivitas dan infrastruktur jalan di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kondisi jalan kabupaten yang hanya mencapai sekitar 70% dalam kategori mantap fungsional. Kondisi ini menjadi isu strategis yang harus segera diatasi, mengingat infrastruktur jalan yang tidak optimal dapat menghambat

mobilitas masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi efektivitas distribusi hasil pembangunan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan jalan adalah ketidaksesuaian antara kapasitas jalan dengan beban kendaraan yang melintas, yang dalam jangka panjang dapat memperparah degradasi infrastruktur dan meningkatkan biaya pemeliharaan.

Selain kondisi jalan, sektor transportasi juga menghadapi tantangan besar dengan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Mayoritas insiden kecelakaan disebabkan oleh faktor kelalaian pengendara, yang diperparah dengan kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan. Dalam menghadapi proyeksi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dalam 20 tahun ke depan, perbaikan dan pengembangan infrastruktur transportasi perlu menjadi prioritas utama. Peningkatan kualitas jalan, penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas, serta penguatan regulasi dan edukasi keselamatan berkendara menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi di Kabupaten Nganjuk.

Selain itu, pengelolaan sumber daya air juga menjadi aspek krusial yang harus mendapatkan perhatian serius. Masalah banjir perkotaan yang masih sering terjadi menunjukkan perlunya penataan sistem drainase dan pengelolaan air yang lebih baik. Di sisi lain, akses terhadap sumber daya air yang masih terbatas serta ancaman kekeringan di beberapa wilayah semakin menambah kompleksitas permasalahan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk pengembangan infrastruktur irigasi yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi konservasi air, serta peningkatan

kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi.

Dengan pendekatan yang holistik dalam pengembangan infrastruktur jalan, transportasi, dan sumber daya air, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Optimalisasi perencanaan dan implementasi kebijakan di sektor-sektor ini akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

4. *Terdapatnya Potensi Konflik Sosial dan Relatif Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Perkawinan Anak*

   Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 menjadi indikasi bahwa upaya perlindungan terhadap kelompok rentan ini masih belum optimal di Kabupaten Nganjuk. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan pemuda, yang menyebabkan ketergantungan finansial dan meningkatkan risiko terjadinya perkawinan anak. Ketidakmandirian ekonomi sering kali membuat perempuan dan anak terjebak dalam siklus kekerasan dan eksploitasi tanpa memiliki akses yang memadai untuk keluar dari situasi tersebut.

   Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Norma sosial dan budaya yang masih menganggap kekerasan sebagai hal yang lumrah semakin memperburuk kondisi ini. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga berkontribusi pada kurangnya pemahaman akan pentingnya

kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak dasar perempuan serta anak.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan inklusif, penguatan sosialisasi terkait hak-hak perempuan dan anak, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian finansial. Pemerintah daerah dapat mendorong pelatihan keterampilan bagi perempuan dan pemuda, menciptakan akses yang lebih luas terhadap modal usaha, serta memperkuat regulasi perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Dengan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan, Kabupaten Nganjuk dapat mewujudkan ekosistem sosial yang lebih adil, di mana perempuan dan anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan serta memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

5. *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Masih Rendah*

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan mendasar di Kabupaten Nganjuk, dengan angka kemiskinan yang masih berada di atas 10%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka yang tetap bertahan di atas 4% menunjukkan bahwa tantangan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih cukup besar. Kondisi ini mencerminkan bahwa berbagai kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan masih belum sepenuhnya efektif.

Salah satu faktor utama yang perlu diperbaiki adalah ketersediaan data yang akurat dan terpilah mengenai sasaran program pengentasan kemiskinan. Tanpa data yang tepat, efektivitas program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan keterampilan kerja menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan berbasis digital yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, serta akses terhadap modal usaha menjadi langkah strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemberdayaan sektor informal serta pengembangan industri kreatif dan UMKM juga harus didorong sebagai salah satu solusi untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang lebih terarah dan berbasis data yang valid, Kabupaten Nganjuk dapat mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

6. *Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal*

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Nganjuk sangat dipengaruhi oleh akses serta mutu pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Rendahnya akses terhadap

pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan SDM di daerah ini. Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum mencapai 100%, menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemerataan layanan pendidikan. Untuk menciptakan SDM yang unggul, diperlukan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, maupun penguatan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman.

Selain aspek akademik, pembentukan karakter dan penguatan nilai budaya juga menjadi tantangan jangka panjang, terutama bagi generasi muda yang hidup di era digital dengan arus informasi yang begitu cepat. Agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas budaya bangsa, diperlukan pendekatan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan karakter sejak dini. Upaya ini dapat diwujudkan melalui program edukasi budaya, penguatan kegiatan seni tradisional, serta peningkatan kapasitas budayawan dan seniman daerah dalam mengembangkan kreativitas berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, generasi muda dapat memiliki ketahanan budaya yang kuat sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan global.

Di samping itu, literasi dan budaya baca harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun SDM yang unggul di era digital. Akses terhadap bahan bacaan berkualitas serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan literasi menjadi faktor penting dalam membentuk masyarakat yang kritis, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Selain sektor pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Nganjuk. Permasalahan kesehatan seperti tingginya angka stunting, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta penanganan penyakit menular dan tidak menular masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis yang kompeten, menjadi langkah krusial dalam memperbaiki indikator kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan SDM yang lebih berkualitas, sehat, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

7. *Ketahanan Pangan, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana*

Kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Antisipasi terhadap dampak perubahan iklim menjadi prioritas yang harus diimplementasikan di tingkat daerah, mengingat tantangan lingkungan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, ekspansi ekonomi, perubahan pola hidup masyarakat, serta dinamika perubahan iklim global. Dalam perumusan RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 2025–2045, kualitas lingkungan hidup ditetapkan sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2045.

Salah satu agenda utama dalam pembangunan jangka panjang adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta peningkatan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai strategi mitigasi perubahan iklim. Kedua aspek ini

menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kondisi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian utama, mengingat permasalahan tata kelola persampahan terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan meliputi perluasan cakupan layanan pengelolaan sampah, penyediaan infrastruktur yang memadai untuk sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta optimalisasi upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Selain berdampak pada lingkungan fisik, perubahan iklim juga memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap sektor pertanian, terutama dalam hal produktivitas tanaman pangan. Ketidakstabilan iklim dapat mengganggu siklus pertumbuhan tanaman, yang pada akhirnya berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional. Tantangan dalam sektor ketahanan pangan meliputi keterjangkauan pangan—baik dari segi harga maupun distribusi—serta masih belum optimalnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan akses pangan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indeks Kualitas Air secara capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan capaian kualitas air yang menurun pada tahun 2024. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup. Mengingat Indeks Kualitas Air merupakan salah satu komponen pembentuk nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Selain itu, menurunnya kualitas lingkungan hidup juga memiliki korelasi erat dengan meningkatnya kejadian bencana, terutama

bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana menjadi aspek yang sangat penting dalam meminimalisir dampak negatif dari kejadian bencana. Edukasi, kesiapsiagaan, serta penguatan sistem mitigasi bencana perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih tanggap dan resilient terhadap ancaman lingkungan yang semakin kompleks.

8. *Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal*

Berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal di Kabupaten Nganjuk. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator utama yang belum mencapai hasil maksimal, seperti indeks reformasi birokrasi dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang masih berada pada kategori B. Selain itu, indeks pelayanan publik serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan perlunya perbaikan yang lebih lanjut. Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur bisnis layanan, sehingga efektivitas dan kualitas pelayanan dapat terus meningkat.

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalisme pegawai negeri sipil menjadi aspek yang krusial dalam memastikan pelayanan publik yang prima. Pegawai yang kompeten dan berpegang teguh pada prinsip integritas tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi

birokrasi, tetapi juga dapat mengurangi risiko terjadinya praktik-praktik korupsi, seperti gratifikasi, suap, atau pemerasan dalam lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi SDM perlu difokuskan pada penguasaan teknologi informasi guna mendukung percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik. Dengan demikian, aparatur sipil negara tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga lebih responsif terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat.

Revolusi industri 4.0 membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, yang kini menuntut sistem kerja yang lebih fleksibel, inovatif, dan adaptif. Dalam menghadapi perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu melakukan reformasi tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan efisiensi dalam operasional birokrasi, menyederhanakan prosedur administratif yang berbelit-belit, serta menghilangkan regulasi yang berlebihan yang berpotensi menghambat inovasi. Selain itu, penguatan mekanisme pengendalian internal sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik.

Di samping aspek administratif dan kelembagaan, tantangan besar lainnya yang perlu segera diatasi adalah kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan mengoptimalkan potensi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Trantibumlinmas) juga menjadi faktor krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun

berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat potensi konflik sosial yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang inklusif serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna menciptakan kondisi sosial yang lebih harmonis dan kondusif dalam jangka panjang.

2.3.2. Isu Strategis

2.3.2.1. Isu strategis global yang disebutkan dalam RPJMN 2025-2029

A. Decarbonization

Dekarbonisasi merupakan proses mengurangi atau menghilangkan emisi karbon dioksida (CO_2) dari berbagai sektor ekonomi, sistem energi, dan aktivitas manusia. Tujuan utama dari dekarbonisasi adalah untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan menekan jumlah CO_2 di atmosfer, mengingat gas ini merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Upaya dekarbonisasi menjadi bagian penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pencapaian target mitigasi perubahan iklim yang telah disepakati secara global.

Terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam proses dekarbonisasi, antara lain:

1. **Transisi ke Energi Terbarukan**. Penggunaan energi berbasis fosil, seperti batu bara dan minyak bumi, perlu dikurangi dengan beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan panas bumi. Langkah ini bertujuan untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan dari sektor pembangkit listrik dan industri.
2. **Peningkatan Efisiensi Energi**. Meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, perumahan, dan transportasi, dapat mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan dan menekan emisi karbon. Hal ini mencakup

penerapan teknologi hemat energi, sistem pencahayaan dan pendingin udara yang lebih efisien, serta optimalisasi proses produksi di sektor industri.

3. **Transformasi Transportasi**. Pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dalam sektor transportasi dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik (EV), memperluas infrastruktur transportasi publik, serta mengadopsi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti hidrogen dan biofuel.
4. **Teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS)** Emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan industri berat dapat dikurangi melalui teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), yang memungkinkan CO_2 ditangkap dan disimpan di bawah tanah atau digunakan kembali dalam proses produksi, seperti pembuatan beton ramah lingkungan.
5. **Konservasi dan Reboisasi**. Praktik-praktik seperti reboisasi, agroforestri, dan pertanian regeneratif dapat membantu menyerap karbon dari atmosfer. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang dapat membantu menyeimbangkan emisi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.
6. **Ekonomi Sirkular dan Manajemen Limbah**. Menerapkan konsep ekonomi sirkular, seperti daur ulang (recycling), peningkatan nilai limbah (upcycling), serta pengurangan limbah (waste reduction), dapat membantu menekan emisi karbon dari sektor manufaktur dan konsumsi, serta menghemat sumber daya alam yang terbatas.
7. **Kompensasi Karbon (Carbon Offsetting)**. Upaya dekarbonisasi juga dapat didukung dengan investasi dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti reboisasi, pengembangan energi

terbarukan, atau peningkatan teknologi yang mendukung netralitas karbon.

Dekarbonisasi merupakan bagian integral dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam kerangka **Perjanjian Paris (Paris Agreement)**, negara-negara di dunia berkomitmen untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dibandingkan tingkat pra-industri, serta berupaya menekan peningkatan suhu hingga 1,5°C. Untuk mencapai target ini, diperlukan transformasi besar dalam cara energi diproduksi, dikonsumsi, dan dikelola di berbagai sektor.

Implementasi strategi dekarbonisasi tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat sosial dan ekonomi, di antaranya:

1. **Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca**, yang membantu memperlambat laju perubahan iklim dan dampak negatifnya.
2. **Peningkatan Kualitas Udara**, dengan berkurangnya pembakaran bahan bakar fosil, yang mengurangi polusi udara serta risiko kesehatan akibat penyakit pernapasan.
3. **Ketahanan dan Keamanan Energi**, dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya fluktuatif serta mengembangkan sumber energi domestik yang berkelanjutan.
4. **Peluang Ekonomi dan Lapangan Kerja**, terutama dalam sektor energi terbarukan, manufaktur teknologi rendah karbon, serta penelitian dan inovasi lingkungan.

Meskipun memiliki berbagai manfaat, proses dekarbonisasi menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi agar dapat berjalan efektif, di antaranya Biaya Investasi yang Tinggi, terutama dalam pengembangan dan implementasi teknologi energi rendah karbon serta infrastruktur pendukungnya. Kompleksitas dalam Perancangan Kebijakan, yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas negara untuk mencapai transisi yang berkelanjutan.

Dampak Sosial dan Ekonomi pada Sektor Berbasis Fosil, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi komunitas yang bergantung pada industri bahan bakar fosil, sehingga memerlukan strategi transisi yang adil (just transition).

Kebutuhan Kerjasama Internasional, karena perubahan iklim merupakan isu global yang membutuhkan komitmen bersama dari berbagai negara, terutama dalam berbagi teknologi dan pendanaan bagi negara berkembang. Dekarbonisasi merupakan langkah krusial dalam upaya global untuk menanggulangi perubahan iklim dan memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan mengadopsi strategi berbasis energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, serta konservasi lingkungan, dekarbonisasi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem, perekonomian, dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Namun, agar upaya ini dapat berjalan optimal, diperlukan kebijakan yang komprehensif, investasi yang memadai, serta komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

B. Green Development

Pembangunan hijau atau *green development* merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip utama dari pembangunan hijau adalah keberlanjutan, di mana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dengan demikian, pembangunan hijau tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem dan

kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan hijau, berbagai langkah dapat dilakukan, antara lain:

1. **Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan**. Transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomassa, menjadi langkah utama dalam pembangunan hijau. Selain mengurangi emisi karbon, penggunaan energi yang lebih bersih juga dapat meningkatkan ketahanan energi dalam jangka panjang.
2. **Pengurangan Polusi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan**. Menekan tingkat pencemaran udara, air, dan tanah melalui pengelolaan limbah yang lebih baik serta penerapan teknologi ramah lingkungan sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini juga berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.
3. **Pemanfaatan Sumber Daya Lokal**. Penggunaan bahan baku lokal dalam industri dan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi ketergantungan pada impor serta menekan emisi karbon dari rantai pasok. Pendekatan ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal serta menciptakan peluang kerja di daerah.
4. **Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan**. Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan hijau melalui penerapan praktik pertanian berkelanjutan, seperti **agroforestri, pertanian organik, dan pertanian regeneratif**. Metode ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga menjaga kesuburan tanah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
5. **Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan.** Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, seperti jalan raya berbahan material ramah lingkungan, sistem transportasi berbasis energi bersih, dan gedung hijau (green buildings),

dapat mengurangi jejak karbon serta meningkatkan efisiensi energi. Desain kota hijau yang mendukung mobilitas berkelanjutan, seperti jalur pejalan kaki dan kendaraan listrik, juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan hijau.

6. **Pengelolaan Limbah yang Efektif.** Konsep ekonomi sirkular menjadi solusi dalam mengelola limbah secara berkelanjutan. Pendekatan seperti recycling (daur ulang), upcycling (pemanfaatan ulang dengan peningkatan nilai), serta biodegradasi (pengolahan limbah secara alami) dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
7. **Pemberdayaan Masyarakat dan Akses terhadap Sumber Daya**

   Pembangunan hijau juga menekankan pada kesejahteraan sosial dengan memastikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya alam, pendidikan, serta pelatihan keterampilan hijau. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengadopsi praktik berkelanjutan akan mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan.

Implementasi pembangunan hijau memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat, di antaranya:

1. Mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga membantu dalam mitigasi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan yang lebih bersih dan nyaman.
3. Menciptakan peluang ekonomi baru, terutama dalam sektor energi terbarukan, industri hijau, serta pariwisata berkelanjutan.

4. Memperkuat ketahanan pangan dan energi, dengan mengurangi ketergantungan pada bahan impor serta memastikan ketersediaan sumber daya yang lebih stabil.
5. Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri, melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya.

Meskipun menawarkan banyak manfaat, pembangunan hijau juga menghadapi beberapa tantangan, seperti:

1. Tingginya biaya awal investasi untuk infrastruktur hijau dan transisi energi terbarukan.
2. Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat terkait pentingnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Ketidakseimbangan kebijakan dan insentif, di mana regulasi yang mendukung ekonomi hijau masih belum diterapkan secara luas di berbagai sektor.
4. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur, terutama di daerah dengan akses yang terbatas terhadap energi bersih dan sumber daya berkelanjutan.

Pembangunan hijau merupakan langkah strategis untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengadopsi energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, infrastruktur hijau, serta pengelolaan sumber daya yang efisien, pembangunan hijau dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem global. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam menerapkan kebijakan serta praktik yang mendukung keberlanjutan.

Pembangunan hijau memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Salah satu manfaat utamanya adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan

mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta mengurangi polusi udara, air, dan tanah. Selain itu, pembangunan hijau berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang lebih sehat, akses terhadap energi bersih, serta sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Lebih dari itu, pembangunan hijau juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dengan mengadopsi teknologi dan praktik berkelanjutan, seperti efisiensi energi, sistem pertanian ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dari sisi ekonomi, pembangunan hijau mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengutamakan penggunaan bahan baku isu dari sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menciptakan peluang kerja baru di sektor energi terbarukan dan industri hijau. Selain itu, pembangunan hijau juga membantu meningkatkan kemandirian masyarakat dengan memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi berbasis komunitas.

Namun, dalam implementasinya, pembangunan hijau menghadapi sejumlah tantangan. Tingginya biaya awal investasi menjadi salah satu hambatan utama, terutama dalam pengembangan infrastruktur hijau, teknologi energi terbarukan, dan sistem transportasi berkelanjutan. Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya alam serta kompleksitas dalam pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Tantangan lainnya adalah perlunya koordinasi dan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas, akademisi, media (pentahelix), serta sektor industri lainnya (multihelix), untuk memastikan keberlanjutan pembangunan hijau. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor penting dalam

kesuksesan pembangunan hijau, terutama dalam hal mengurangi konsumsi energi berlebih, meningkatkan partisipasi dalam daur ulang, serta mengadopsi pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan hijau harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Diperlukan kebijakan yang mendukung, insentif ekonomi, serta edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat dan dunia usaha semakin terdorong untuk berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

C. Automation, Internet of Things and Digitization

Internet of Things (IoT) merujuk pada ekosistem perangkat fisik yang terhubung melalui jaringan internet, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data secara otomatis. Perangkat ini mencakup berbagai objek, seperti perangkat keras, kendaraan, bangunan, serta benda lainnya yang dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak. Teknologi IoT memungkinkan perangkat untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data secara real-time, sehingga mendukung berbagai inovasi dalam berbagai sektor.

Karakteristik Utama Perangkat IoT:

1. Konektivitas: Perangkat IoT dapat terhubung ke internet atau jaringan lain, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antarperangkat.
2. Sensor dan Pengumpulan Data: Perangkat ini dilengkapi dengan sensor yang mampu mendeteksi dan mengukur berbagai parameter lingkungan, seperti suhu, tekanan, cahaya, suara, atau gerakan.

3. Pemrosesan Data: Data yang dikumpulkan dapat diproses secara lokal dalam perangkat itu sendiri atau dikirim ke server berbasis cloud untuk analisis lebih lanjut.
4. Volume Data yang Besar: IoT menghasilkan jumlah data yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan mengotomatisasi pengambilan keputusan.
5. Beragam Aplikasi: Teknologi IoT telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti smart city untuk meningkatkan efisiensi kota, otomatisasi industri untuk meningkatkan produktivitas, health automation untuk pemantauan kesehatan jarak jauh, home automation untuk meningkatkan kenyamanan rumah, serta transport automation untuk mengoptimalkan sistem transportasi.

Dengan terus berkembangnya teknologi, IoT semakin menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari dan industri, mendorong efisiensi, kenyamanan, serta inovasi di berbagai sektor.

Internet of Things (IoT), automasi, dan digitalisasi merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat fisik untuk saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan internet. Dengan kemampuan ini, perangkat dapat mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data secara real-time, menciptakan ekosistem yang lebih cerdas dan efisien. Teknologi ini telah berkembang pesat dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai industri, mulai dari teknologi konsumen, manufaktur, otomotif, hingga sektor kesehatan.

Di sektor teknologi konsumen, IoT digunakan dalam perangkat rumah pintar (*smart home*), seperti asisten virtual, termostat otomatis, dan sistem keamanan berbasis AI. Dalam industri otomotif, IoT mendukung pengembangan kendaraan otonom, sistem navigasi berbasis data, serta pemantauan kondisi

kendaraan secara jarak jauh. Sementara itu, di bidang kesehatan, teknologi ini memungkinkan pemantauan pasien secara real-time melalui perangkat medis yang terhubung, meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, dan mempercepat diagnosis serta pengobatan. Selain itu, IoT juga berperan dalam sektor pertanian dengan membantu petani mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk melalui sensor pintar yang dapat memantau kondisi tanah dan tanaman.

Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi IoT juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah **keamanan siber**, di mana perangkat yang terhubung rentan terhadap peretasan dan pencurian data. **Interoperabilitas** juga menjadi kendala, karena banyak perangkat yang dibuat oleh produsen berbeda menggunakan standar komunikasi yang tidak selalu kompatibel satu sama lain. Selain itu, **pengelolaan data** menjadi tantangan tersendiri, mengingat volume data yang sangat besar memerlukan sistem penyimpanan dan pemrosesan yang efisien. **Infrastruktur jaringan** yang andal juga diperlukan untuk memastikan konektivitas yang stabil, terutama di daerah terpencil. Terakhir, **analisis data** menjadi faktor krusial dalam mengubah data mentah menjadi wawasan yang bermanfaat, sehingga diperlukan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*) untuk mengolah informasi secara efektif.

Seiring dengan kemajuan teknologi, tantangan-tantangan ini perlu diatasi dengan pengembangan kebijakan yang mendukung keamanan data, standarisasi perangkat, serta investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang tepat, IoT, automasi, dan digitalisasi dapat menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di berbagai sektor.

D. Diversifikasi Rantai Suplai

Diversifikasi rantai suplai merupakan suatu strategi yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan stabilitas dalam rantai suplai mereka. Hal ini dilakukan dengan cara memperluas jaringan sumber suplai dan melibatkan lebih banyak supplier. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada satu supplier tunggal, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti gangguan produksi, keterlambatan pengiriman, atau fluktuasi harga. Selain itu, diversifikasi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar, memastikan kelancaran operasional, dan menjaga kualitas produk atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. Dengan demikian, diversifikasi rantai suplai tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis.

Manfaat dan Tantangan Diversifikasi Rantai Suplai:

1. **Pengurangan Risiko Kehilangan Sumber Suplai:** Diversifikasi rantai suplai membantu perusahaan mengurangi risiko kehilangan pasokan akibat gangguan seperti bencana alam, keterlambatan pengiriman, atau masalah geopolitik. Dengan memiliki beberapa sumber suplai, perusahaan dapat memastikan kelancaran operasional meskipun salah satu supplier mengalami masalah.
2. **Peningkatan Kestabilan Rantai Suplai:** Strategi ini memperkuat stabilitas rantai suplai, memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi secara efektif meskipun terjadi gangguan di salah satu jalur suplai. Hal ini sangat penting untuk menjaga kontinuitas bisnis dan memenuhi permintaan pelanggan.

3. **Fleksibilitas dalam Menghadapi Perubahan Pasar:** Diversifikasi memungkinkan perusahaan untuk lebih tanggap terhadap perubahan pasar, seperti fluktuasi permintaan, perubahan tren, atau ketidakpastian ekonomi. Dengan lebih banyak opsi suplai, perusahaan dapat dengan cepat menyesuaikan strategi operasionalnya.
4. **Peningkatan Kompetensi dalam Pemilihan dan Pengelolaan Supplier:** Proses diversifikasi mendorong perusahaan untuk lebih selektif dalam memilih supplier yang berkualitas dan mengelola hubungan yang baik dengan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
5. **Peningkatan Nilai Perusahaan melalui Efisiensi dan Pengurangan Biaya:** Dengan diversifikasi, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya operasional, mengurangi ketergantungan pada satu supplier yang mungkin menetapkan harga tinggi, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan stakeholder.

Meskipun diversifikasi rantai suplai merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas, terdapat beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, biaya yang dikeluarkan untuk mengelola beberapa supplier cenderung lebih tinggi. Kedua, kompleksitas manajemen meningkat karena perusahaan harus mengoordinasikan lebih banyak pihak. Ketiga, menjaga konsistensi kualitas produk dari berbagai supplier bisa menjadi tantangan tersendiri. Terakhir, komunikasi yang efektif dengan banyak supplier membutuhkan sistem dan prosedur yang terstruktur.

Dengan demikian, diversifikasi rantai suplai adalah langkah strategis yang dapat memberikan banyak manfaat, namun

perusahaan perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul.

E. Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular, yang juga dikenal sebagai ekonomi cakra atau ekonomi lingkaran, adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana uang dan sumber daya diciptakan, digunakan, dan dihilangkan dalam suatu sistem ekonomi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Hayek, seorang ekonom ternama asal Austria, pada tahun 1976. Secara mendasar, ekonomi sirkular berfokus pada tiga prinsip utama: (1) penciptaan uang dan sumber daya baru melalui berbagai aktivitas seperti produksi, ekstraksi bahan baku, dan konversi sumber daya; (2) pemanfaatan uang dan sumber daya tersebut untuk memproduksi serta mengonsumsi barang dan jasa; dan (3) penghapusan atau penghancuran uang dan sumber daya yang sudah tidak memiliki nilai atau tidak lagi digunakan.

Komponen Utama Ekonomi Sirkular:

1. **Produk:** Merupakan hasil dari proses produksi yang dilakukan oleh manusia, baik berupa barang fisik maupun jasa.
2. **Jaringan:** Meliputi seluruh proses transaksi dan interaksi antara produsen dan konsumen dalam sistem ekonomi.
3. **Uang:** Berfungsi sebagai alat tukar yang digunakan untuk membeli dan menjual produk.
4. **Sumber Daya:** Adalah bahan-bahan atau aset yang digunakan sebagai input dalam proses produksi.

Manfaat Ekonomi Sirkular:

1. **Peningkatan Produktivitas:** Dengan memungkinkan produsen untuk menciptakan produk secara lebih efisien, ekonomi sirkular dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan.

2. **Keseimbangan Ekonomi:** Konsep ini mendorong penghancuran atau daur ulang produk yang sudah tidak bernilai, sehingga menciptakan keseimbangan dalam sistem ekonomi.
3. **Kemampuan Konsumsi yang Lebih Baik:** Konsumen dapat memanfaatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, meningkatkan kepuasan dan efisiensi konsumsi.

Meskipun ekonomi sirkular menawarkan banyak manfaat, konsep ini juga tidak lepas dari tantangan. Beberapa di antaranya adalah inefisiensi dalam proses produksi dan distribusi, keterlambatan pengiriman yang dapat mengganggu rantai pasok, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Selain itu, implementasi ekonomi sirkular memerlukan perubahan pola pikir dan sistem yang kompleks, yang mungkin sulit diadopsi oleh beberapa pihak.

Secara keseluruhan, ekonomi sirkular merupakan konsep yang penting untuk memahami dinamika penciptaan, penggunaan, dan penghapusan uang serta sumber daya dalam suatu sistem ekonomi. Namun, untuk mengoptimalkan potensinya, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang ada.

F. Physical Internet

Physical Internet (PI) adalah sebuah konsep inovatif yang menggambarkan jaringan fisik global yang terdiri dari berbagai infrastruktur, seperti jalur transportasi, peralatan, dan teknologi canggih, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan sistem komputer di seluruh dunia. Sebagai bagian integral dari ekosistem internet yang lebih luas, PI mencakup tiga elemen utama: jaringan fisik (infrastruktur), jaringan logika (software dan protokol), serta aplikasi yang memungkinkan interaksi dan pertukaran data. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem

yang lebih terintegrasi, efisien, dan aman dalam mengelola arus informasi dan sumber daya fisik.

Manfaat Physical Internet:

1. **Peningkatan Keamanan Data:** PI menggunakan teknologi enkripsi canggih untuk melindungi data sebelum dikirim, sehingga mengurangi risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi sensitif.
2. **Efisiensi Biaya:** Dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan mengurangi redundansi, PI dapat menurunkan biaya pengiriman data dan operasional secara signifikan.
3. **Aksesibilitas yang Lebih Baik:** PI memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan dari mana saja dan kapan saja, meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas dalam berbagai sektor.
4. **Skalabilitas:** Konsep ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan jaringan secara global, memungkinkan lebih banyak perangkat dan sistem untuk terhubung dengan mudah.

Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi Physical Internet tidak lepas dari tantangan. Beberapa di antaranya termasuk:

1. **Keterbatasan Sumber Daya:** Membangun dan memelihara infrastruktur PI memerlukan investasi besar dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan finansial.
2. **Keterlambatan Pengiriman:** Masalah teknis atau gangguan pada jaringan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman data, yang dapat memengaruhi efisiensi operasional.

3. **Kemampuan Teknologi:** Tidak semua wilayah atau negara memiliki akses ke teknologi canggih yang dibutuhkan untuk mendukung PI, menciptakan kesenjangan digital.
4. **Keamanan Siber:** Meskipun PI menawarkan enkripsi data, ancaman siber seperti peretasan atau serangan malware tetap menjadi risiko yang perlu diwaspadai.

Secara keseluruhan, Physical Internet adalah konsep yang revolusioner dalam menghubungkan dunia fisik dan digital. Dengan potensinya untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan aksesibilitas, PI dapat menjadi fondasi penting bagi perkembangan teknologi di masa depan. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi global dan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada.

G. Aglomerasi

Aglomerasi adalah proses penggabungan beberapa unit individu atau organisasi yang berbeda menjadi satu entitas yang lebih besar dan lebih efektif. Dalam berbagai bidang, aglomerasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta memperkuat kemampuan dan kompetensi. Proses ini sering digunakan untuk menciptakan sinergi antar-entitas yang bergabung, sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan jika mereka beroperasi secara terpisah.

Manfaat Aglomerasi:

1. **Peningkatan Efisiensi:** Aglomerasi dapat mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menghilangkan redundansi dalam proses produksi atau layanan.
2. **Pengurangan Biaya:** Dengan mengintegrasikan operasi, aglomerasi mampu menghilangkan biaya overhead yang tidak diperlukan, sehingga menurunkan biaya secara keseluruhan.

3. **Peningkatan Kemampuan:** Proses ini memungkinkan penggabungan sumber daya, teknologi, dan keahlian (expertise) dari berbagai entitas, sehingga menciptakan kapabilitas yang lebih kuat dan komprehensif.
4. **Pengembangan Kompetensi:** Aglomerasi mendorong pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar-entitas yang bergabung.

Meskipun aglomerasi menawarkan banyak manfaat, proses ini juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. **Kesulitan Integrasi:** Menggabungkan budaya, sistem, dan proses dari berbagai entitas dapat menimbulkan konflik atau ketidakselarasan yang sulit diatasi.
2. **Keterbatasan Sumber Daya:** Meskipun aglomerasi bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, keterbatasan dalam hal finansial, infrastruktur, atau tenaga ahli dapat menjadi hambatan.
3. **Keterlambatan Pengiriman:** Proses integrasi yang kompleks dapat menyebabkan keterlambatan dalam operasional atau pengiriman produk dan layanan.
4. **Kemampuan Manajemen:** Mengelola entitas yang lebih besar dan lebih kompleks memerlukan kemampuan manajemen yang tinggi, yang mungkin tidak dimiliki oleh semua organisasi.

Secara keseluruhan, aglomerasi adalah strategi yang efektif untuk menciptakan entitas yang lebih besar dan lebih kompetitif. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan integrasi dan manajemen yang muncul selama proses penggabungan.

H. Segala Sesuatu adalah Layanan

Everything is a Service (EIS) adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa segala sesuatu, baik itu produk, layanan, atau

teknologi, pada dasarnya merupakan bentuk layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam konsep ini, layanan dipahami sebagai interaksi dinamis antara berbagai pihak, seperti konsumen dan penyedia layanan, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Layanan ini dapat berupa produk fisik, jasa, atau solusi teknologi yang dikembangkan dengan fokus utama pada kepuasan dan nilai yang diberikan kepada konsumen. EIS mencerminkan pergeseran paradigma dari model kepemilikan tradisional ke model berbasis layanan, di mana nilai lebih ditekankan pada pengalaman dan manfaat yang diterima oleh pengguna.

Manfaat Everything is a Service (EIS):

1. Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen, EIS memungkinkan penyedia layanan untuk menciptakan solusi yang lebih relevan, personal, dan berkualitas tinggi.
2. Efisiensi Operasional: Konsep ini mendorong integrasi proses bisnis yang lebih baik, mengurangi redundansi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga menurunkan biaya operasional secara signifikan.
3. Keamanan Data yang Lebih Baik: EIS menempatkan keamanan data dan informasi konsumen sebagai prioritas utama, dengan menerapkan teknologi enkripsi dan protokol keamanan yang canggih.
4. Fleksibilitas dan Skalabilitas: Model layanan ini memungkinkan konsumen untuk mengakses solusi sesuai kebutuhan mereka, tanpa harus berinvestasi besar dalam infrastruktur atau aset fisik.

Tantangan dalam Everything is a Service (EIS): Meskipun EIS menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak lepas dari tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Membangun dan memelihara layanan yang berkualitas memerlukan investasi besar dalam hal teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
2. Kemampuan Teknologi: Tidak semua penyedia layanan memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengembangkan dan mengelola solusi berbasis EIS secara efektif.
3. Keterlambatan Pengiriman: Proses pengembangan dan implementasi layanan yang kompleks dapat menyebabkan keterlambatan dalam memenuhi permintaan konsumen.
4. Ketergantungan pada Konektivitas: EIS sangat bergantung pada konektivitas internet dan infrastruktur digital, yang dapat menjadi kendala di daerah dengan akses terbatas.

Secara keseluruhan, Everything is a Service (EIS) adalah konsep yang mencerminkan evolusi dalam cara bisnis dan konsumen berinteraksi. Dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan, efisiensi, dan keamanan, EIS menawarkan potensi besar untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk keterbatasan sumber daya dan ketergantungan pada teknologi.

I. Remote Work is Everywhere: Tren Kerja Jarak Jauh yang Meningkat

Remote work, atau kerja jarak jauh, adalah sistem kerja yang memungkinkan individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional mereka dari lokasi di luar kantor atau lingkungan kerja konvensional. Dengan kemajuan teknologi dan konektivitas digital, konsep ini telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi tren yang semakin diterima oleh banyak perusahaan dan pekerja di berbagai sektor.

Salah satu keunggulan utama dari remote work adalah fleksibilitasnya, yang memungkinkan pekerja untuk menentukan sendiri waktu dan tempat kerja mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, tetapi juga memberikan kenyamanan lebih dalam menjalankan pekerjaan. Selain itu, perusahaan dapat menghemat biaya operasional, seperti sewa kantor, utilitas, serta transportasi karyawan, sehingga lebih efisien secara finansial. Dari sisi produktivitas, bekerja dari rumah atau lokasi pilihan dapat mengurangi gangguan yang sering terjadi di kantor, memungkinkan pekerja untuk lebih fokus dan meningkatkan kualitas hasil kerja mereka.

Keuntungan lainnya adalah meningkatnya keberagaman dalam tim, karena perusahaan dapat merekrut talenta terbaik dari berbagai daerah, bahkan lintas negara, tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Hal ini membuka peluang bagi individu dengan berbagai latar belakang untuk berkontribusi dalam lingkungan kerja yang lebih inklusif.

Namun, di balik manfaatnya, remote work juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah potensi rasa keterasingan atau isolasi sosial akibat minimnya interaksi langsung dengan rekan kerja. Selain itu, efektivitas komunikasi dan kolaborasi dapat terhambat tanpa adanya koordinasi yang baik. Keterbatasan akses terhadap sumber daya atau infrastruktur pendukung di beberapa lokasi juga bisa menjadi kendala dalam menyelesaikan tugas dengan optimal.

Dengan berbagai kelebihan dan tantangan yang ada, remote work terus berkembang sebagai model kerja yang relevan di era digital. Perusahaan dan pekerja perlu menyesuaikan diri dengan strategi dan alat yang tepat agar dapat memaksimalkan manfaat dari sistem kerja ini tanpa mengorbankan produktivitas dan kesejahteraan tim.

J. Sharing Economy

Ekonomi berbagi, atau yang lebih dikenal dengan istilah *sharing economy*, merupakan model ekonomi yang bertumpu pada prinsip pemanfaatan bersama sumber daya melalui jaringan sosial dan teknologi digital. Dalam sistem ini, individu dapat saling berbagi aset atau layanan—seperti kendaraan, properti, atau fasilitas lainnya—melalui platform daring yang menghubungkan penyedia dan pengguna secara langsung. Perkembangan teknologi dan internet telah mendorong pertumbuhan ekonomi berbagi, menjadikannya alternatif yang semakin populer dalam berbagai sektor industri.

Salah satu ciri utama dari *sharing economy* adalah sifatnya yang berbasis hubungan *peer-to-peer* (P2P), di mana individu dapat berinteraksi langsung tanpa perantara tradisional. Model ini bergantung pada platform digital yang berfungsi sebagai penghubung antara mereka yang memiliki sumber daya dengan mereka yang membutuhkannya. Selain itu, konsep ini menekankan kerja sama dan partisipasi komunitas, memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi sumber daya guna mencapai manfaat bersama. Berbeda dari sistem ekonomi tradisional yang cenderung terpusat, ekonomi berbagi lebih desentralistik, bergantung pada kepercayaan dan hubungan sosial dalam komunitas yang lebih luas.

Keunggulan dari *sharing economy* cukup signifikan, terutama dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan berbagi aset yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal, individu dan bisnis dapat mengurangi pemborosan dan menekan biaya operasional. Selain itu, banyak platform berbagi yang menerapkan sistem ulasan dan peringkat, sehingga meningkatkan transparansi serta keamanan transaksi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan.

Namun, di balik berbagai manfaatnya, *sharing economy* juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu isu utama adalah regulasi, karena model bisnis ini sering kali berada di luar kerangka hukum tradisional, yang dapat memunculkan konflik dengan peraturan yang sudah ada. Selain itu, keamanan data pengguna menjadi perhatian besar, mengingat banyaknya informasi pribadi yang tersimpan dalam platform digital. Perlindungan konsumen juga menjadi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang layak.

Meskipun memiliki berbagai tantangan, *sharing economy* terus berkembang dan beradaptasi seiring dengan kemajuan teknologi serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan regulasi yang tepat dan strategi mitigasi risiko yang efektif, konsep ini dapat menjadi solusi inovatif dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kolaborasi masyarakat.

A. Perubahan Iklim dan Lingkungan

Isu strategis terkait perubahan iklim dan lingkungan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia saat ini. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup kesehatan, ekonomi, serta stabilitas sosial dan politik di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim yang semakin nyata, ditandai dengan peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, serta degradasi ekosistem, memerlukan perhatian serius dan tindakan segera dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat global.

Dalam dua dekade mendatang, perubahan iklim diperkirakan akan menjadi isu strategis yang semakin krusial, karena dampaknya akan semakin dirasakan oleh semua lapisan

masyarakat. Fenomena cuaca ekstrem, seperti badai, gelombang panas, dan kekeringan berkepanjangan, dapat mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Selain itu, naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es di Kutub Utara dan Antartika berisiko menenggelamkan wilayah pesisir serta memicu migrasi paksa jutaan penduduk yang tinggal di daerah rawan banjir.

Deforestasi yang masif juga menjadi ancaman serius terhadap keseimbangan ekosistem, mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon, serta mempercepat hilangnya habitat bagi berbagai spesies satwa liar. Jika tidak ditangani dengan baik, hilangnya biodiversitas akan mengganggu keseimbangan rantai makanan dan menurunkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan lingkungan.

Dari segi ekonomi, dampak perubahan iklim dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata menjadi beberapa industri yang paling rentan terhadap perubahan iklim, karena bergantung pada kondisi alam yang stabil. Biaya pemulihan dari bencana alam yang semakin sering terjadi juga dapat membebani anggaran negara dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, perubahan iklim juga berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik dan konflik sosial. Persaingan atas sumber daya yang semakin langka, seperti air dan lahan subur, dapat memicu ketidakstabilan di beberapa wilayah. Negara-negara dengan infrastruktur yang lemah atau ketahanan ekonomi yang rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak, meningkatkan risiko krisis kemanusiaan, kelaparan, dan konflik antar-komunitas.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan ini. Kebijakan mitigasi, seperti transisi ke energi terbarukan, reforestasi, serta peningkatan efisiensi energi, perlu dipercepat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan ketahanan pangan, juga harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

Dengan kerja sama global yang solid dan pendekatan berbasis inovasi serta keberlanjutan, tantangan perubahan iklim dapat diatasi secara efektif. Kesadaran masyarakat dan komitmen politik yang kuat akan menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Perubahan iklim membawa berbagai dampak negatif yang mengancam kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Salah satu dampak utama adalah pemanasan global, yang terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Menurut World Meteorological Organization (WMO), suhu global telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celsius sejak era praindustri dan terus menunjukkan tren kenaikan. Dalam empat tahun terakhir saja, suhu rata-rata dunia meningkat sebesar 1,2 derajat Celsius. Kenaikan suhu ini berdampak langsung pada pola cuaca ekstrem, mempercepat pencairan es di kutub, meningkatkan permukaan air laut, serta memicu bencana alam seperti badai tropis, gelombang panas, dan kekeringan yang semakin sering terjadi.

Selain itu, curah hujan yang tidak menentu dan lebih ekstrem menjadi pemicu utama banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah, terutama di daerah yang memiliki sistem drainase buruk atau telah mengalami deforestasi. Hujan lebat

yang berlangsung dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir bandang yang menghancurkan infrastruktur, merusak lahan pertanian, dan mengganggu kehidupan masyarakat. Tanah longsor juga semakin sering terjadi di daerah perbukitan dan pegunungan yang mengalami degradasi lahan akibat penggundulan hutan. Kejadian ini tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga merenggut nyawa banyak orang setiap tahunnya.

Perubahan iklim juga berdampak buruk pada **keberlangsungan hidup satwa liar**. Deforestasi, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan menjadi faktor utama yang mengancam populasi berbagai spesies. Satwa liar seperti harimau Sumatera, orangutan, dan badak Jawa semakin terdesak akibat menyempitnya habitat alami mereka. Menurut World Wide Fund (WWF), populasi satwa liar secara global telah mengalami penurunan drastis sebesar 60% sejak tahun 1970. Hilangnya biodiversitas ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi juga berdampak pada masyarakat lokal yang bergantung pada keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan ekonomi dan sosial mereka.

Dampak perubahan iklim juga terlihat jelas di ekosistem laut. **Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu dan permukaan air laut**, yang berdampak langsung pada kerusakan terumbu karang dan habitat laut lainnya. Di Indonesia, kenaikan permukaan air laut yang terjadi setiap tahun mengancam pemukiman pesisir serta ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan bagi jutaan nelayan. Terumbu karang yang rusak akibat pemanasan air laut dan aktivitas manusia berisiko menghancurkan rantai makanan di laut serta mengurangi populasi ikan, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi perikanan.

Selain kerusakan lingkungan, perubahan iklim juga membawa konsekuensi serius terhadap **kesehatan manusia**.

Kualitas udara yang buruk akibat polusi dan peningkatan suhu ekstrem dapat memperburuk penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit kardiovaskular. Menurut Global Burden of Disease Study, sekitar 6 juta kematian di seluruh dunia setiap tahun disebabkan oleh polusi udara. Di Indonesia, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sekitar 97% kota-kota di Indonesia belum memenuhi standar kualitas udara yang disetujui, sehingga meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, perubahan pola curah hujan dan suhu yang ekstrem juga mempengaruhi ketersediaan air bersih, meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis air seperti diare dan demam berdarah.

Melihat berbagai dampak negatif ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk **mengurangi dan menanggulangi dampak perubahan iklim**. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil meliputi:

1. **Pengurangan emisi gas rumah kaca**, melalui peralihan ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam industri dan transportasi.
2. **Peningkatan kebijakan perlindungan lingkungan**, dengan memperketat regulasi terkait deforestasi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sampah dan limbah industri.
3. **Implementasi kebijakan energi bersih**, yang mendorong penggunaan sumber energi rendah karbon serta efisiensi energi dalam aktivitas sehari-hari.
4. **Restorasi ekosistem**, termasuk reforestasi dan rehabilitasi terumbu karang, guna menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah dampak lebih lanjut dari perubahan iklim.
5. **Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat**, agar setiap individu turut berkontribusi dalam upaya mitigasi

perubahan iklim melalui gaya hidup berkelanjutan dan praktik ramah lingkungan.

Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi lingkungan, dan masyarakat luas, dampak buruk perubahan iklim dapat ditekan, dan dunia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan serta lebih baik bagi generasi mendatang.

B. Migrasi

Migrasi diperkirakan akan menjadi salah satu isu strategis yang semakin kompleks dalam dua dekade ke depan, didorong oleh pertumbuhan populasi, perubahan iklim, serta ketidakstabilan ekonomi dan politik. Berbagai faktor seperti konflik bersenjata, kemiskinan, degradasi lingkungan, dan terbatasnya kesempatan kerja di negara asal membuat banyak individu dan keluarga mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang bermigrasi, tetapi juga memberikan tantangan besar bagi negara tujuan, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Sebagai salah satu isu global yang mendesak, migrasi memiliki dampak luas terhadap **keamanan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi**. Di satu sisi, migrasi dapat memberikan manfaat dengan memperkaya tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, lonjakan jumlah migran yang tidak terkendali dapat menimbulkan tantangan dalam penyediaan layanan publik, ketersediaan lapangan kerja, serta integrasi sosial antara penduduk lokal dan pendatang. Oleh karena itu, migrasi harus dikelola dengan kebijakan yang seimbang, memperhatikan kepentingan migran serta negara penerima.

Berikut adalah beberapa isu utama yang berkaitan dengan migrasi:

1. Anak-Anak Migran yang Rentan Terabaikan

   Menurut laporan UNICEF, terdapat sekitar **31 juta anak migran** di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, **1 dari 3 anak migran menjadi korban konflik dan perang**, yang memaksa mereka meninggalkan rumah dan kehidupan mereka sebelumnya. Anak-anak migran merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan manusia, pelecehan seksual, pekerja anak, dan kekerasan. Selain itu, mereka juga menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum yang memadai. Tanpa intervensi yang tepat, anak-anak migran berisiko kehilangan masa depan yang lebih baik dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan serta ketidakpastian sosial.

2. Tingkat Migrasi Global yang Meningkat

   Bank Dunia mencatat bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, jumlah migran internasional telah mencapai sekitar **281 juta orang**, dan angka ini terus meningkat seiring dengan berlanjutnya konflik di berbagai negara. Perang, perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam, serta kesenjangan ekonomi antarnegara menjadi pemicu utama meningkatnya migrasi global. Lonjakan jumlah migran ini memberikan tekanan besar pada negara tujuan, terutama dalam penyediaan perumahan, layanan kesehatan, infrastruktur pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja.

   Negara-negara penerima migran juga menghadapi tantangan dalam **integrasi sosial** antara masyarakat lokal dan pendatang. Ketidakmampuan dalam mengelola migrasi dapat memicu ketegangan sosial, meningkatnya sentimen anti-imigran, serta ketidakstabilan politik di beberapa negara. Di sisi lain, kebijakan migrasi yang inklusif dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia dapat mengubah migrasi menjadi

peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

3. Politik Anti-Migrasi dan Dampaknya

   Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara telah menerapkan kebijakan anti-migrasi yang ketat untuk membatasi arus masuk migran, baik yang datang secara legal maupun ilegal. Kebijakan ini sering kali didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan nasional, beban ekonomi, dan tekanan sosial. Namun, menurut laporan International Organization for Migration (IOM), pembatasan migrasi yang berlebihan justru dapat merugikan tidak hanya para migran, tetapi juga negara yang menerapkannya.

   Migrasi yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara penerima. Banyak sektor industri di negara maju bergantung pada tenaga kerja migran untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di bidang seperti pertanian, konstruksi, dan layanan kesehatan. Selain itu, tenaga kerja migran juga berkontribusi pada perekonomian melalui pembayaran pajak dan konsumsi. Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu ketat dapat menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi, kekurangan tenaga kerja, serta perlambatan pertumbuhan sektor-sektor yang bergantung pada tenaga kerja migran.

   Selain aspek ekonomi, kebijakan anti-migrasi yang keras juga berisiko memperburuk ketegangan sosial dan hubungan internasional. Beberapa negara mengalami krisis kemanusiaan akibat deportasi massal dan pembatasan hak-hak migran, yang berujung pada peningkatan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang dalam kebijakan migrasi, di mana negara tetap mempertahankan kontrol atas perbatasan mereka, tetapi juga

mengakui kontribusi positif migran serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

4. Migrasi Iklim dan Lingkungan

   Perubahan iklim semakin menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya migrasi global. Menurut laporan IOM, puluhan juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat bencana lingkungan, seperti banjir, kekeringan, badai, dan kenaikan permukaan air laut. Fenomena ini dikenal sebagai migrasi iklim atau pengungsian lingkungan, di mana masyarakat berpindah untuk mencari tempat yang lebih aman dan layak untuk ditinggali.

   Beberapa daerah di dunia, termasuk kepulauan di Pasifik dan Asia Tenggara, sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut, yang berpotensi membuat wilayah-wilayah ini tidak dapat dihuni dalam beberapa dekade ke depan. Di Indonesia, kota-kota pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya menghadapi ancaman serius dari peningkatan air laut, yang dapat memicu gelombang migrasi internal ke daerah yang lebih tinggi.

   Selain bencana alam, kelangkaan sumber daya alam, seperti air bersih dan lahan pertanian subur, juga memicu perpindahan penduduk. Krisis air yang berkepanjangan di beberapa wilayah Afrika dan Timur Tengah, misalnya, telah menyebabkan ribuan orang bermigrasi ke daerah lain demi bertahan hidup. Jika tidak ditangani dengan baik, migrasi iklim dapat meningkatkan tekanan sosial dan ekonomi di daerah tujuan, serta memperburuk ketegangan geopolitik di tingkat global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan adaptasi dan mitigasi yang lebih kuat untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mencegah migrasi paksa akibat degradasi lingkungan.

5. Tantangan Keamanan dalam Migrasi

   Migrasi ilegal sering dikaitkan dengan isu keamanan, terutama terkait dengan penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan eksploitasi pekerja. Banyak migran yang tidak memiliki dokumen resmi menjadi korban jaringan kriminal yang memanfaatkan situasi mereka untuk keuntungan pribadi. Mereka sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, terjebak dalam utang, atau menjadi korban kekerasan.

   Selain itu, banyak negara menghadapi biaya tinggi dalam menangani tahanan imigrasi. Di beberapa negara maju, pusat-pusat penahanan imigran menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk menampung dan mengelola migran ilegal yang tertangkap. Namun, kebijakan penahanan yang ketat sering kali menimbulkan kritik dari organisasi hak asasi manusia, yang menyoroti kondisi tidak layak di kamp-kamp detensi serta perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para migran.

   Di sisi lain, kebijakan yang terlalu lemah dalam mengelola migrasi juga dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, terutama jika tidak ada sistem pemantauan yang efektif terhadap migran yang masuk. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara menjaga keamanan negara dan memastikan bahwa migrasi tetap dikelola secara adil dan manusiawi.

Dengan kebijakan yang tepat, migrasi dapat diubah dari tantangan menjadi peluang bagi pembangunan global, di mana migran dapat berkontribusi secara positif terhadap perekonomian dan masyarakat negara tujuan, sekaligus mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

C. Persaingan Ekonomi

Persaingan ekonomi merupakan isu strategis global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat,

serta stabilitas keuangan dunia. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, negara-negara berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing ekonomi mereka melalui kebijakan perdagangan, inovasi teknologi, serta regulasi industri yang kompetitif. Namun, dalam prosesnya, muncul berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekonomi internasional. Berikut adalah beberapa isu utama dalam persaingan ekonomi global:

1) Perang Dagang dan Dampaknya terhadap Ekonomi Global

   Konflik perdagangan antara negara-negara besar, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang dimulai pada tahun 2018, telah memberikan dampak luas terhadap ekonomi global. Kebijakan saling mengenakan tarif impor yang tinggi pada berbagai produk telah mengganggu rantai pasok global, menurunkan volume perdagangan, serta menciptakan ketidakpastian bagi investor dan pelaku bisnis.

   Dampak dari perang dagang ini terasa tidak hanya di dua negara yang terlibat, tetapi juga di negara-negara lain yang memiliki hubungan ekonomi dengan AS dan Tiongkok. Banyak negara berkembang mengalami fluktuasi harga komoditas, penurunan ekspor, serta gangguan dalam pasokan bahan baku akibat kebijakan proteksionisme yang diterapkan kedua negara.

   Selain itu, perang dagang telah mempercepat tren deglobalisasi, di mana beberapa negara mulai mengurangi ketergantungan pada perdagangan internasional dan beralih ke kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada pasar domestik. Hal ini dapat mengubah dinamika perdagangan dunia dalam jangka panjang dan mendorong negara-negara untuk mencari mitra dagang baru di luar kekuatan ekonomi utama seperti AS dan Tiongkok.

2) Tarif dan Hambatan Perdagangan

Sebagai bagian dari strategi untuk melindungi industri dalam negeri, banyak negara menerapkan tarif impor, kuota perdagangan, perizinan ekspor, serta pajak tambahan terhadap produk luar negeri. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencatat bahwa praktik proteksionisme ini semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hambatan perdagangan ini sering kali menguntungkan industri domestik dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat merugikan konsumen karena harga barang impor menjadi lebih mahal. Selain itu, kebijakan semacam ini dapat menyebabkan retaliasi dari negara mitra dagang, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi arus perdagangan global dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor ke negara maju sering kali menghadapi tantangan besar akibat tarif dan hambatan perdagangan ini. Untuk mengatasi hal ini, banyak negara mulai mencari perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang lain guna memperluas akses pasar mereka dan mengurangi ketergantungan pada negara tertentu.

3) Perkembangan Teknologi dan Dampaknya terhadap Daya Saing Ekonomi

Teknologi dan inovasi digital memainkan peran penting dalam menentukan daya saing ekonomi suatu negara. Negara-negara yang memiliki teknologi maju cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi, efisiensi industri yang lebih baik, serta kemampuan inovasi yang lebih besar dibandingkan negara yang masih tertinggal secara teknologi.

Namun, perkembangan teknologi ini juga menciptakan kesenjangan ekonomi antara negara maju dan berkembang.

Banyak negara berkembang menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi baru karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga kerja yang terampil, serta kesulitan dalam mengakses modal untuk investasi teknologi.

Di sisi lain, digitalisasi juga mengubah struktur tenaga kerja global, dengan meningkatnya otomatisasi dan kecerdasan buatan yang menggantikan pekerjaan manual. Negara-negara yang tidak mampu beradaptasi dengan transformasi digital berisiko mengalami peningkatan pengangguran serta stagnasi ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi menjadi kunci bagi negara-negara berkembang agar dapat tetap bersaing dalam ekonomi global yang semakin berbasis digital.

4) Ketergantungan pada Tarif Impor dan Fluktuasi Harga Global

Banyak negara berkembang masih sangat bergantung pada tarif impor dan ekspor untuk mendukung ekonomi mereka. Namun, ketergantungan ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga global, terutama untuk komoditas seperti minyak, gas, dan bahan pangan.

Sebagai contoh, kenaikan tarif impor oleh negara-negara maju dapat menyebabkan lonjakan harga barang konsumsi di negara berkembang, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Selain itu, ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan global sering kali menyebabkan volatilitas nilai tukar mata uang, yang dapat memperburuk ketidakstabilan ekonomi di negara-negara yang memiliki sistem keuangan yang lebih lemah.

Untuk mengurangi ketergantungan ini, banyak negara mulai mencari cara untuk membangun ketahanan ekonomi mereka melalui diversifikasi industri dan peningkatan kapasitas produksi domestik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi

ketergantungan pada impor dan meningkatkan daya saing di pasar global.

5) Perdagangan Manusia dalam Ekonomi Global

Salah satu isu yang jarang dibahas dalam konteks persaingan ekonomi global adalah perdagangan manusia. Dalam ekonomi global yang sangat kompetitif, permintaan terhadap tenaga kerja murah sering kali menyebabkan peningkatan eksploitasi tenaga kerja, terutama di sektor informal seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur.

Perdagangan manusia sering kali berkembang di negara-negara dengan regulasi tenaga kerja yang lemah, di mana pekerja migran dan kelompok rentan lainnya menjadi korban eksploitasi. Organisasi seperti International Labour Organization (ILO) mencatat bahwa jutaan orang di seluruh dunia terjebak dalam kondisi kerja paksa dengan upah rendah, jam kerja berlebihan, serta kondisi kerja yang tidak aman.

Selain itu, perdagangan manusia juga terkait dengan industri ilegal, seperti eksploitasi seksual dan perbudakan modern, yang sulit untuk diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat, baik dalam hal penegakan hukum, perlindungan tenaga kerja, maupun peningkatan standar etika dalam perdagangan global.

Persaingan ekonomi global membawa tantangan yang kompleks dan beragam, mulai dari perang dagang, hambatan perdagangan, ketergantungan pada tarif impor, hingga eksploitasi tenaga kerja. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang, termasuk:

1. Mendorong perdagangan yang lebih terbuka dan adil, dengan mengurangi hambatan perdagangan yang tidak perlu dan meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara.
2. Mempercepat inovasi teknologi di negara berkembang, melalui investasi dalam pendidikan dan infrastruktur digital.
3. Mengurangi ketergantungan pada tarif impor, dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan mendiversifikasi sektor ekonomi.
4. Memperketat regulasi terhadap eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia, dengan memperkuat standar ketenagakerjaan global.

Dengan pendekatan yang tepat, negara-negara dapat memanfaatkan persaingan ekonomi sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip perdagangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peningkatan persaingan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika didukung oleh inovasi, efisiensi produksi, dan ekspansi pasar global. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, persaingan yang semakin ketat dapat menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dunia, menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan internasional, serta meningkatkan ketegangan geopolitik.

Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan ekonomi antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Uni Eropa telah menjadi isu strategis yang mempengaruhi dinamika perdagangan dan investasi global. Perang dagang, kebijakan proteksionisme, serta ketegangan dalam rantai pasok

global telah menciptakan tantangan baru bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan internasional.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa persaingan ekonomi tetap berlangsung dalam koridor yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Beberapa langkah penting yang dapat diambil meliputi:

1) Meningkatkan Transparansi dan Keterbukaan Perdagangan

   Transparansi dalam perdagangan global sangat penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan prediktif. Organisasi seperti World Trade Organization (WTO) dan International Monetary Fund (IMF) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aturan perdagangan internasional tetap adil dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak oleh negara-negara tertentu.

   Negara-negara juga perlu bekerja sama dalam mengurangi hambatan perdagangan yang tidak perlu, seperti tarif impor yang berlebihan, kuota ekspor, dan regulasi yang membatasi akses pasar bagi negara berkembang. Keterbukaan perdagangan dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi global, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif.

2) Mendorong Inovasi dan Transformasi Teknologi

   Dalam era digital, teknologi dan inovasi menjadi faktor utama dalam menentukan daya saing ekonomi suatu negara. Negara-negara yang mampu mengadopsi teknologi canggih dalam industri manufaktur, jasa, dan sektor keuangan akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dibandingkan negara yang masih bergantung pada metode produksi tradisional.

Untuk itu, diperlukan investasi besar dalam riset dan pengembangan (R&D), pendidikan, serta infrastruktur digital agar negara-negara dapat bersaing di pasar global. Transformasi digital juga berperan dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok, mempercepat proses perdagangan, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual yang berisiko terdampak otomatisasi.

Namun, ketimpangan dalam adopsi teknologi antara negara maju dan negara berkembang juga perlu diatasi agar semua negara memiliki kesempatan yang sama dalam persaingan global. Kerja sama internasional dalam bidang transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

3) Mengembangkan Kebijakan Perdagangan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Dalam menghadapi persaingan global, negara-negara perlu menerapkan kebijakan perdagangan yang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, tenaga kerja, dan stabilitas sosial.

Sebagai contoh, tren perdagangan global saat ini semakin mengarah pada ekonomi hijau dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Negara-negara yang mampu menerapkan kebijakan perdagangan yang ramah lingkungan, seperti produksi energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di masa depan.

Selain itu, kebijakan perdagangan juga perlu memperhatikan hak-hak tenaga kerja. Beberapa negara masih menghadapi masalah seperti eksploitasi buruh, upah rendah, dan

kurangnya perlindungan bagi pekerja di sektor manufaktur dan industri berbasis ekspor. Untuk memastikan bahwa persaingan ekonomi tidak merugikan pekerja, diperlukan standar tenaga kerja yang lebih baik serta kerja sama internasional dalam menegakkan regulasi yang adil dan beretika.

4) Mengelola Ketegangan Ekonomi Antarnegara

   Persaingan untuk mendominasi ekonomi global sering kali memicu tindakan proteksionisme, yang dapat memperburuk hubungan ekonomi antarnegara. Kebijakan seperti peningkatan tarif impor, subsidi industri dalam negeri, dan pembatasan investasi asing sering kali digunakan oleh negara-negara besar untuk melindungi pasar domestik mereka, tetapi di sisi lain dapat merugikan negara lain yang bergantung pada perdagangan internasional.

   Ketegangan ekonomi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi berkembang menjadi konflik geopolitik yang lebih luas, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas perdagangan internasional dan mencegah eskalasi konflik ekonomi.

   Negara-negara perlu berkomitmen pada kerja sama multilateral dan negosiasi perdagangan yang saling menguntungkan, daripada mengandalkan kebijakan proteksionisme yang dapat merusak stabilitas ekonomi jangka panjang.

5) Menghadapi Tantangan Masa Depan dalam Persaingan Ekonomi

   Dalam dua dekade ke depan, persaingan ekonomi global akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan pergeseran demografi. Negara-negara yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini akan

memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan daya saing mereka di pasar global.

Beberapa tantangan utama yang perlu diantisipasi meliputi:

a) Ketergantungan pada rantai pasok global: Pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa rentannya ekonomi global terhadap gangguan rantai pasok. Ke depan, negara-negara perlu mencari strategi diversifikasi dalam produksi dan distribusi barang agar lebih tahan terhadap krisis ekonomi global.
b) Perubahan iklim dan ekonomi hijau: Negara-negara yang tidak berinvestasi dalam energi terbarukan dan praktik bisnis berkelanjutan berisiko tertinggal dalam persaingan global, karena tren ekonomi masa depan akan semakin mengarah pada dekarbonisasi dan keberlanjutan.
c) Kesenjangan ekonomi global: Ketimpangan ekonomi antara negara maju dan berkembang masih menjadi tantangan utama. Untuk menciptakan persaingan yang lebih adil, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Persaingan ekonomi global adalah keniscayaan dalam sistem perdagangan internasional, tetapi harus dikelola dengan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas ekonomi dunia. Keterbukaan perdagangan, inovasi teknologi, kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, serta kerja sama multilateral adalah kunci untuk memastikan bahwa persaingan ekonomi dapat membawa manfaat bagi semua negara, bukan hanya segelintir kekuatan ekonomi besar.

Dengan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan, dunia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang, stabil, dan menguntungkan bagi semua pihak, tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

D. Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi akan menjadi isu strategis yang terus berkembang dalam dua dekade ke depan, dengan dampak luas terhadap ekonomi, keamanan, privasi, hak asasi manusia, serta lingkungan. Kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi informasi, digitalisasi, blockchain, dan komputasi kuantum, akan mengubah cara negara, masyarakat, dan industri beroperasi, menciptakan peluang besar sekaligus tantangan kompleks.

Dalam konteks global, persaingan dalam pengembangan dan penerapan teknologi telah menjadi bagian dari strategi geopolitik negara-negara besar. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa berlomba dalam menguasai sektor teknologi canggih, sementara negara-negara berkembang berusaha mengejar ketertinggalan melalui investasi dalam infrastruktur digital dan sumber daya manusia. Teknologi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia dan terus berkembang pesat, memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, keamanan, hingga hak asasi manusia. Meskipun kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, ketergantungan yang berlebihan dan penggunaan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan tantangan baru, seperti masalah privasi, keamanan siber, serta dampak sosial dan lingkungan.

Berikut adalah beberapa isu strategis yang muncul dalam penggunaan teknologi:

1) Ketergantungan Terhadap Teknologi dan Sumber Daya

   Ketergantungan manusia terhadap teknologi semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengatasi permasalahan lingkungan seperti polusi udara dan pengelolaan sumber daya alam. Teknologi canggih seperti sensor udara, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan

(AI) telah diterapkan untuk memantau emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi limbah industri.

Namun, ketergantungan ini juga menghadirkan tantangan baru. Produksi perangkat elektronik dan baterai berteknologi tinggi memerlukan sumber daya alam yang terbatas, seperti litium dan kobalt, yang dieksploitasi dalam jumlah besar. Ini dapat mengarah pada kerusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, serta ketidakstabilan geopolitik di negara-negara penghasil sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan serta kebijakan daur ulang elektronik untuk mengurangi dampak negatif dari ketergantungan terhadap teknologi.

2) Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Dalam era digital, keamanan siber menjadi tantangan utama bagi organisasi, pemerintah, dan individu. Dengan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital, ancaman serangan siber seperti peretasan, pencurian data, dan ransomware semakin meningkat. Menurut laporan dari International Telecommunication Union (ITU), lebih dari 60% organisasi global mengalami setidaknya satu insiden keamanan siber setiap tahun, yang berdampak pada kehilangan data, gangguan operasional, dan kerugian ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, banyak negara telah menerapkan kebijakan keamanan siber yang lebih ketat, termasuk regulasi perlindungan data seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Di masa depan, peningkatan teknologi keamanan seperti kriptografi kuantum, kecerdasan buatan dalam deteksi ancaman, serta regulasi ketat terkait penggunaan data akan menjadi kunci dalam melindungi sistem digital dari ancaman siber.

3) Peran Kecerdasan Buatan dalam Transformasi Ekonomi

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) telah menjadi kekuatan utama dalam revolusi industri 4.0, dengan dampak luas terhadap produktivitas, efisiensi, dan penciptaan pasar baru. AI digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari manufaktur, keuangan, pendidikan, hingga layanan pelanggan, memberikan manfaat dalam otomatisasi proses, analisis data, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Namun, adopsi AI juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti:

a) Potensi hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi, terutama dalam industri yang masih mengandalkan tenaga kerja manusia.
b) Etika dalam penggunaan AI, termasuk masalah bias algoritma, diskriminasi dalam sistem AI, serta penyalahgunaan teknologi untuk manipulasi data.
c) Regulasi dan tata kelola AI, di mana masih diperlukan kebijakan global untuk memastikan AI digunakan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab.

Ke depan, negara-negara perlu mengembangkan kebijakan adaptif yang memungkinkan masyarakat beradaptasi dengan perubahan ini, seperti program pelatihan ulang tenaga kerja (reskilling) dan regulasi AI yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi.

1) Inovasi Teknologi dalam Sektor Kesehatan

Teknologi telah membawa revolusi dalam dunia medis dan kesehatan, memungkinkan diagnosis lebih akurat, perawatan yang lebih efektif, serta pengelolaan penyakit yang lebih baik. Beberapa inovasi utama dalam sektor kesehatan meliputi:

a) Penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis data medis dan membantu dokter dalam mendeteksi penyakit lebih awal.
b) Teknologi genomic dan bioteknologi, yang memungkinkan pengobatan berbasis genetika untuk penyakit kronis dan kanker.
c) Peralatan medis canggih, seperti jarum suntik non-spill, robot bedah, dan perangkat wearable untuk pemantauan kesehatan secara real-time.

Namun, penggunaan teknologi dalam kesehatan juga menimbulkan tantangan, seperti ketergantungan pada peralatan medis yang mahal, keterbatasan akses teknologi di negara berkembang, serta etika dalam penggunaan data kesehatan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memastikan akses yang adil terhadap teknologi kesehatan serta perlindungan data pasien agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

5) Privasi dan Pengawasan Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi seperti CCTV canggih, pengenalan wajah (facial recognition), serta sistem pemantauan berbasis AI semakin banyak digunakan untuk tujuan keamanan. Teknologi ini telah membantu dalam mengurangi tingkat kejahatan, meningkatkan efisiensi keamanan publik, serta mendukung investigasi hukum.

Namun, di sisi lain, teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran serius terkait privasi dan hak asasi manusia. Beberapa isu utama yang muncul meliputi:

a) Penyalahgunaan teknologi pengawasan oleh pemerintah otoriter untuk membatasi kebebasan berekspresi dan mengontrol populasi.

b) Kurangnya regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi, sehingga informasi pribadi masyarakat dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
c) Kekhawatiran akan "masyarakat pengawasan" (surveillance state), di mana setiap aktivitas individu dapat dipantau dan dikendalikan oleh otoritas.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan regulasi internasional yang mengatur penggunaan teknologi pengawasan, dengan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk tujuan yang sah, transparan, dan tetap menghormati hak-hak individu. Kemajuan teknologi telah memberikan dampak besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, kesehatan, keamanan, hingga hak asasi manusia. Namun, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol juga dapat menimbulkan tantangan baru, seperti keamanan siber, pengawasan yang berlebihan, dampak sosial akibat otomatisasi, serta ketimpangan akses terhadap teknologi.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dalam pengelolaan teknologi, termasuk:

a) Kebijakan yang mendukung inovasi namun tetap melindungi hak individu dan masyarakat.
b) Kerja sama internasional dalam regulasi teknologi digital, AI, dan keamanan siber.
c) Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Dalam dua dekade ke depan, keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan akan menjadi faktor penentu dalam menciptakan masa depan yang lebih aman, adil, dan sejahtera bagi semua.

E. Konflik Internasional

Dalam dua dekade mendatang, konflik internasional yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Uni Eropa diperkirakan akan terus menjadi tantangan utama bagi stabilitas global. Bentuk konflik ini dapat bervariasi, mulai dari konfrontasi militer langsung, penerapan sanksi ekonomi, hingga perang siber (cyberwarfare) yang menargetkan infrastruktur kritis negara lain. Selain mempengaruhi hubungan antarnegara, ketegangan ini juga berdampak pada ekonomi global, keamanan regional, serta kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membawa keuntungan serta risiko dalam dinamika konflik internasional. Di satu sisi, teknologi memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ancaman, meningkatkan transparansi, serta memperkuat diplomasi digital. Namun, di sisi lain, senjata berbasis AI, serangan siber, serta propaganda digital telah menjadi alat baru dalam perang modern, meningkatkan kompleksitas konflik. Globalisasi yang memperkuat keterkaitan ekonomi antarnegara juga dapat menjadi pemicu ketegangan, terutama dalam hal persaingan sumber daya, dominasi pasar, dan kebijakan perdagangan proteksionis.

Untuk menghadapi tantangan global ini, diperlukan kerjasama internasional yang lebih kuat dan strategis guna mencegah eskalasi konflik serta menciptakan mekanisme penyelesaian yang lebih efektif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. **Diplomasi Preventif** – Menguatkan dialog antarnegara guna menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan transparansi dalam kebijakan luar negeri.

2. **Perjanjian Keamanan Global** – Memperbarui serta memperkuat kesepakatan internasional terkait senjata nuklir, perang siber, dan penggunaan teknologi militer.
3. **Sanksi Bertarget dan Mekanisme Mediasi** – Mengembangkan pendekatan yang lebih spesifik dalam penerapan sanksi ekonomi guna menghindari dampak buruk terhadap masyarakat sipil.
4. **Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan** – Mendorong kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan untuk mengurangi ketegangan akibat rivalitas ekonomi.
5. **Pemberdayaan Organisasi Internasional** – Mengoptimalkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G20, ASEAN, dan organisasi regional lainnya dalam menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi.

Konflik internasional merupakan tantangan global yang tidak hanya mengancam stabilitas politik dan ekonomi, tetapi juga keamanan serta kesejahteraan masyarakat dunia. Dalam menghadapi era yang semakin kompleks dengan hadirnya teknologi canggih dan persaingan global yang ketat, pendekatan yang mengedepankan diplomasi, kerja sama, serta kebijakan yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan menjadi kunci dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan stabil.

Konflik internasional terus menjadi tantangan strategis bagi stabilitas global, dengan berbagai dampak yang meluas pada politik, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa konflik utama yang terjadi saat ini tidak hanya melibatkan aktor domestik tetapi juga negara-negara besar dengan kepentingan geopolitik masing-masing. Berikut adalah beberapa konflik global yang menjadi perhatian utama dunia:

2.3.2.2.1. Konflik Israel-Palestina

Ketegangan antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan tetap menjadi salah satu konflik paling kompleks di dunia. Konflik ini melibatkan berbagai faktor, termasuk perbatasan, hak kepemilikan tanah, keamanan, serta identitas nasional. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 4.000 orang tewas dalam eskalasi konflik di Gaza selama enam minggu pada tahun 2014, dan hingga kini kekerasan masih sering terjadi. Konflik ini tidak hanya memengaruhi stabilitas di Timur Tengah tetapi juga memiliki implikasi global, terutama dalam hal kebijakan luar negeri dan keamanan internasional.

2.3.2.2.2. Konflik di Suriah

Perang saudara di Suriah yang bermula pada tahun 2011 telah menjadi salah satu konflik paling berdarah di abad ke-21. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 500.000 orang dan menyebabkan lebih dari 11 juta orang mengungsi atau kehilangan tempat tinggal. Konflik ini semakin rumit dengan keterlibatan berbagai kekuatan global seperti Rusia, Amerika Serikat, Iran, dan Turki, yang memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut. Selain itu, keberadaan kelompok-kelompok ekstremis menambah kompleksitas konflik, yang hingga kini masih belum menemukan solusi yang berkelanjutan.

2.3.2.2.3. Konflik di Ukraina

Konflik di Ukraina dimulai pada tahun 2014 dengan aneksasi Crimea oleh Rusia, diikuti dengan pertempuran antara pemerintah Ukraina dan kelompok separatis pro-Rusia di wilayah timur. Eskalasi konflik ini telah menyebabkan lebih dari 13.000 kematian dan memaksa 1,5 juta orang mengungsi. Dampaknya meluas ke bidang ekonomi dan politik internasional, terutama dalam hubungan antara Rusia dan

Barat. Sanksi ekonomi terhadap Rusia serta ketegangan antara NATO dan Rusia semakin memperumit situasi geopolitik di Eropa Timur.

2.3.2.2.4. Krisis Politik dan Ekonomi di Venezuela

Venezuela telah mengalami krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan, ditandai dengan hiperinflasi, kelangkaan bahan pokok, serta meningkatnya ketidakstabilan sosial. Konflik antara pemerintahan Nicolás Maduro dan oposisi telah memicu demonstrasi massal dan tindakan represif oleh aparat keamanan. Situasi ini menyebabkan lebih dari 5 juta orang Venezuela meninggalkan negara mereka dalam satu dekade terakhir, menjadikan krisis pengungsi Venezuela sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

2.3.2.2.5. Perang dan Ketidakstabilan di Afghanistan

Afghanistan telah menjadi medan konflik selama lebih dari empat dekade, dengan dampak yang signifikan terhadap keamanan global. Intervensi Amerika Serikat dan NATO sejak 2001 bertujuan untuk memberantas kelompok teroris dan membangun pemerintahan yang stabil. Namun, penarikan pasukan asing pada tahun 2021 mengarah pada kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan, yang menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Situasi ini juga meningkatkan risiko kebangkitan kelompok teroris yang dapat mengancam keamanan internasional.

Konflik internasional tidak hanya mempengaruhi negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik, ekonomi global, serta kesejahteraan masyarakat internasional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang berfokus pada:

a) Dialog diplomatik untuk mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik.
b) Kerja sama internasional dalam menangani krisis kemanusiaan, seperti bantuan bagi pengungsi dan rekonstruksi pascakonflik.
c) Penerapan hukum internasional untuk memastikan keadilan dan mengurangi dampak negatif konflik bersenjata.

Dengan solusi damai, negosiasi yang efektif, serta kerja sama antarnegara, stabilitas dunia dapat dipertahankan, dan dampak konflik terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

2.3.2.2. Isu Kebijakan Nasional

2.3.2.2.1. Isu strategis nasional Indonesia dalam 20 tahun ke depan dengan memperhatikan RPJPN Rancangan Indonesia Emas 2025-2045

Visi RPJPN Indonesia Emas 2025-2045: “Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, namun tingkat produktivitas masih rendah ditengah persaingan global yang meningkat.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menargetkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, meskipun tantangan seperti tingkat produktivitas yang masih rendah serta meningkatnya persaingan global menjadi perhatian utama. Dalam rangka mewujudkan visi ini, pemerintah menetapkan lima sasaran utama yang menjadi indikator keberhasilan transformasi nasional:

1. Pendapatan per Kapita Setara dengan Negara Maju
   Indonesia menargetkan kenaikan pendapatan per kapita agar setara dengan negara-negara maju, sehingga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kemiskinan Menuju Nol dan Pengurangan Ketimpangan

Program pemberantasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.

3. Meningkatkan Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional

   Indonesia diharapkan semakin aktif dalam diplomasi global, memperkuat posisinya dalam organisasi internasional, dan meningkatkan daya tawar di kancah global.

4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

   Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, inovasi, dan keterampilan tenaga kerja untuk menghadapi revolusi industri serta persaingan global.

5. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju Net Zero Emission

   Indonesia berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menurunkan emisi karbon secara bertahap hingga mencapai netralitas karbon.

Strategi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045 Untuk merealisasikan visi besar ini, strategi transformasi nasional dirancang berdasarkan tiga pilar utama: Transformasi, Landasan Transformasi, dan Kerangka Implementasi Transformasi. Delapan program transformasi utama dirancang dan dibagi dalam tiga tahap. Tahapan pertama mencakup tiga transformasi penting:

1. Transformasi Sosial: Membangun Manusia Unggul

   Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

2. Transformasi Ekonomi: Keluar dari Middle-Income Trap (MIT)

   Mendorong inovasi, peningkatan investasi, dan diversifikasi sektor ekonomi agar Indonesia tidak terjebak dalam jebakan negara berpenghasilan menengah.

3. Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

   Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat

Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara maju yang kompetitif secara global, inklusif secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan.dalam proses pengambilan kebijakan.

Dalam mewujudkan **Indonesia Emas 2045**, diperlukan **tahapan strategis** yang terdiri dari **landasan transformasi** dan **kerangka implementasi**. Kedua aspek ini bertujuan untuk membangun **pondasi yang kokoh**, memastikan kebijakan pembangunan berjalan efektif, serta menjaga kesinambungan pertumbuhan di berbagai sektor.

A. Landasan Transformasi

   Landasan transformasi merupakan dasar utama dalam proses pembangunan yang mencakup stabilitas hukum, ketahanan sosial-budaya, serta keseimbangan ekologi. Dua aspek penting dalam landasan transformasi ini adalah:

   1) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Global

      Supremasi hukum dan stabilitas nasional menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Untuk mencapai hal ini, pemerintah berfokus pada:

      a) Memperkuat institusi hukum dan penegakan keadilan guna meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha,

b) Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan nasional melalui kebijakan pertahanan yang adaptif serta diplomasi yang proaktif,
c) Memperluas pengaruh Indonesia di tingkat global, baik dalam diplomasi politik, ekonomi, maupun kemitraan strategis di berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB.

2) Ketahanan Sosial-Budaya dan Ekologi

Indonesia memiliki kekayaan sosial-budaya dan ekologi yang harus dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi dalam aspek ini mencakup:

a) Penguatan identitas nasional dan keberagaman budaya sebagai aset penting dalam membangun solidaritas sosial,
b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya melalui pemberdayaan komunitas lokal,
c) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan mengutamakan konservasi lingkungan serta kebijakan berbasis ekonomi hijau,
d) Pembangunan ekosistem industri berbasis lingkungan, yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.

B. Kerangka Implementasi Transformasi

Untuk memastikan efektivitas dari landasan transformasi, diperlukan kerangka implementasi yang jelas dan terarah. Implementasi ini melibatkan pembangunan di berbagai aspek dengan tiga fokus utama:

1) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

a) Mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara Indonesia bagian barat dan timur,
b) Meningkatkan investasi di daerah tertinggal dan perbatasan, guna mempercepat pemerataan ekonomi,
c) Memperkuat otonomi daerah agar kebijakan pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

2) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas serta Ramah Lingkungan
a) Membangun infrastruktur modern dan berkelanjutan, seperti transportasi berbasis energi hijau,
b) Memastikan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan telekomunikasi yang lebih merata,
c) Meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya terbarukan, guna mengurangi jejak karbon nasional.

3) Kesinambungan Pembangunan untuk Generasi Mendatang
a) Memastikan pembangunan ekonomi berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan,
b) Mengembangkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing nasional,
c) Mendorong kebijakan jangka panjang yang inklusif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis.

2.3.2.2.2. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang kokoh menjadi elemen krusial bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, meningkatkan produktivitas nasional, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh daerah, termasuk kawasan tertinggal dan perbatasan. Meskipun telah mengalami peningkatan dalam

beberapa tahun terakhir, infrastruktur Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan dan investasi strategis. Berdasarkan World Bank's Logistics Performance Index (LPI) tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-72 dalam aspek logistik, yang mencerminkan tantangan dalam efisiensi transportasi dan rantai pasok. Selain itu, dalam Indeks Pembangunan Infrastruktur Global 2019, Indonesia berada di peringkat ke-40, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam daya saing infrastruktur dibandingkan dengan negara-negara maju.

Untuk meningkatkan daya saing global dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, Indonesia perlu meningkatkan investasi infrastruktur secara signifikan. Investasi ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, tetapi juga mencakup pengembangan infrastruktur digital, energi, dan transportasi hijau yang ramah lingkungan.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci:

1. Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur

   Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia memerlukan investasi sebesar Rp6.000 triliun selama periode 2020-2024 untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur nasional. Namun, keterbatasan anggaran negara mengharuskan pemerintah mencari alternatif pendanaan yang lebih inovatif.

   Beberapa tantangan utama dalam investasi infrastruktur meliputi:

   a) Keterbatasan anggaran pemerintah, sehingga perlu melibatkan skema pembiayaan alternatif.
   b) Kesenjangan pembangunan antarwilayah, yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dibandingkan daerah lain.
   c) Lambatnya realisasi proyek infrastruktur akibat regulasi dan birokrasi yang kompleks.

d) Kurangnya keterlibatan sektor swasta, terutama dalam proyek-proyek skala besar dan jangka Panjang

Investasi dalam pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan strategi investasi yang inovatif, peningkatan kerja sama sektor swasta, serta optimalisasi regulasi dan kebijakan, Indonesia dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

2. Meningkatkan Konektifitas

Meningkatkan konektivitas antarwilayah merupakan salah satu strategi utama dalam pembangunan infrastruktur nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Konektivitas yang baik tidak hanya mempercepat pergerakan barang dan manusia tetapi juga mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Salah satu fokus utama dalam peningkatan konektivitas adalah pengembangan jaringan transportasi multimoda yang mencakup transportasi darat, laut, dan udara. Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada jaringan jalan raya sebagai sarana utama distribusi logistik dan mobilitas penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, hanya sekitar 10% dari total panjang jalan di Indonesia yang termasuk dalam kategori jalan tol, menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur jalan berkualitas tinggi.

Ketergantungan pada jalan raya sebagai moda transportasi utama sering kali menyebabkan kemacetan dan meningkatkan biaya distribusi barang. Keterbatasan jalan tol

dan jalur alternatif di berbagai daerah menyebabkan rendahnya efisiensi dalam distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Selain itu, kurangnya integrasi transportasi laut dan udara juga menjadi tantangan dalam meningkatkan konektivitas nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem transportasi laut yang lebih terintegrasi untuk menghubungkan daerah terpencil dan mempercepat pengiriman barang antar pulau. Infrastruktur bandara di beberapa daerah masih terbatas, sehingga menghambat potensi sektor pariwisata dan investasi di wilayah-wilayah dengan akses udara terbatas.

Pembangunan infrastruktur transportasi yang belum merata juga menjadi salah satu tantangan utama. Wilayah Indonesia bagian timur masih memiliki keterbatasan dalam infrastruktur transportasi, sehingga biaya logistik lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Akses transportasi di daerah terpencil dan perbatasan yang masih minim juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi beberapa strategi utama untuk meningkatkan konektivitas nasional. Strategi tersebut mencakup pengembangan transportasi multimoda dengan memperluas jaringan jalan tol dan jalur kereta api, meningkatkan kapasitas pelabuhan dan rute pelayaran, serta mengembangkan bandara regional guna meningkatkan aksesibilitas ke daerah terpencil. Selain itu, peningkatan infrastruktur logistik melalui pembangunan pusat distribusi logistik terpadu dan pemanfaatan teknologi digital seperti big data dan artificial intelligence (AI) dalam sistem logistik juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Investasi dalam infrastruktur transportasi berkelanjutan juga harus diperhatikan, seperti pengembangan transportasi

publik berbasis energi ramah lingkungan, termasuk kereta listrik dan bus berbahan bakar rendah emisi. Pembangunan jalur transportasi hijau seperti jalur sepeda dan trotoar yang aman bagi pejalan kaki juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Selain investasi fisik, penguatan kebijakan dan regulasi transportasi juga menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan konektivitas nasional. Pemerintah perlu mendorong kebijakan subsidi transportasi publik agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas serta menyederhanakan regulasi investasi infrastruktur guna menarik minat sektor swasta dalam pembangunan konektivitas nasional.

Dengan penerapan strategi yang tepat, peningkatan konektivitas transportasi di Indonesia dapat berjalan lebih optimal. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi ketimpangan antarwilayah serta mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

3. Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah yang masih signifikan. Infrastruktur yang dibangun secara merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil dan terisolasi, akan berperan dalam meningkatkan konektivitas, membuka peluang ekonomi baru, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan telekomunikasi. Pembangunan yang terpusat hanya di wilayah perkotaan atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi

berisiko memperlebar kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Investasi dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil harus difokuskan pada peningkatan aksesibilitas, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara perintis yang dapat membuka keterisolasian wilayah. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital seperti jaringan internet dan listrik juga sangat penting untuk meningkatkan akses terhadap informasi, pendidikan, serta layanan ekonomi digital yang semakin berkembang. Dengan adanya akses infrastruktur yang baik, masyarakat di daerah terpencil dapat lebih mudah mengakses pasar, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta menarik investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang merata juga mendukung distribusi layanan publik yang lebih efektif. Ketersediaan rumah sakit, sekolah, serta sarana air bersih dan sanitasi yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal. Hal ini tidak hanya mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga membantu mengurangi tingkat urbanisasi yang tidak terkendali, karena masyarakat di daerah akan memiliki akses terhadap fasilitas yang setara dengan perkotaan. Selain itu, kebijakan pembangunan yang berbasis pemerataan juga dapat menciptakan lapangan kerja di berbagai wilayah, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun, tantangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur tetap ada, mulai dari keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit, hingga koordinasi antar pemangku

kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan sektor swasta dalam investasi infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mempercepat pembangunan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dengan komitmen yang kuat dalam pemerataan pembangunan, Indonesia dapat mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur yang merata bukan hanya tentang konektivitas fisik, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan ekonomi yang memungkinkan seluruh rakyat Indonesia menikmati manfaat pembangunan secara setara.

4. Meningkatkan Inovasi Teknologi

Peningkatan inovasi teknologi menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih efisien, terjangkau, dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data dalam berbagai aspek konstruksi dan pengelolaan infrastruktur dapat mengoptimalkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan proyek. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time, yang dapat meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan serta mengurangi risiko kesalahan dan pemborosan sumber daya. Selain itu, penggunaan material ramah lingkungan dan teknologi konstruksi yang hemat biaya juga dapat mendorong kebijakan pembangunan infrastruktur

yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan masa depan.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia, inovasi teknologi harus menjadi prioritas dalam strategi jangka panjang, terutama untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam dua dekade mendatang. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan konektivitas, transportasi, energi, serta fasilitas publik lainnya, pemerintah perlu mempercepat investasi dalam pengembangan teknologi dan memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan akademisi guna menciptakan solusi infrastruktur yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Digitalisasi dalam sistem transportasi, smart city, serta penggunaan energi terbarukan di berbagai proyek infrastruktur juga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain fokus pada inovasi, pemerataan pembangunan infrastruktur juga harus menjadi perhatian utama. Pembangunan yang hanya terpusat di wilayah perkotaan akan memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya secara lebih merata untuk membangun infrastruktur di daerah tertinggal, termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Dengan adanya pemerataan infrastruktur, akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berbasis inovasi dan pemerataan akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Regulasi yang mendukung adopsi teknologi, insentif bagi industri yang mengembangkan solusi inovatif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi akan menjadi

faktor kunci dalam mencapai pembangunan infrastruktur yang maju dan berdaya saing tinggi. Dengan pendekatan yang holistik, Indonesia dapat mewujudkan infrastruktur yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyatnya.

2.3.2.2.3. Lingkungan Hidup

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim, yang semakin berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa wilayah di Indonesia secara rutin mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Dampak dari bencana ini tidak hanya merugikan sektor ekonomi, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat serta keseimbangan ekosistem. Salah satu permasalahan lingkungan yang mendesak adalah pencemaran laut akibat sampah plastik. Pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam jumlah sampah plastik yang masuk ke laut, dengan total lebih dari 3,2 juta ton, yang berdampak serius pada kehidupan laut dan keseimbangan ekosistem pesisir.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan serta mencegah dampak buruk perubahan iklim. Pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, mengembangkan energi terbarukan, serta memperketat regulasi terkait pengelolaan limbah dan perlindungan hutan. Selain itu, program-program seperti gerakan pengurangan plastik sekali pakai, rehabilitasi kawasan pesisir, serta penerapan ekonomi sirkular dalam industri harus diperkuat untuk menciptakan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga lingkungan. Edukasi mengenai pola konsumsi yang ramah lingkungan, gaya hidup berkelanjutan, serta kesadaran akan pentingnya konservasi alam harus terus ditingkatkan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan lingkungan yang lebih tangguh dan berdaya saing. Dengan demikian, upaya menjaga lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim bukan hanya menjadi isu strategis nasional, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen global untuk menciptakan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Isu lingkungan hidup di Indonesia menjadi salah satu tantangan strategis nasional yang perlu mendapatkan perhatian serius. Upaya pencegahan dan penanggulangan perubahan iklim, serta penanganan pencemaran lingkungan yang semakin meningkat, menjadi prioritas utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci yang dilengkapi dengan data dan fakta mengenai isu strategis nasional terkait lingkungan hidup di Indonesia.

1. Perubahan Iklim

   Indonesia menghadapi dampak serius akibat perubahan iklim, termasuk peningkatan suhu, kekeringan yang lebih panjang, banjir yang semakin sering, tanah longsor, serta kebakaran hutan yang merusak ekosistem. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu rata-rata tahunan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1,3 derajat Celcius pada tahun 2020. Perubahan iklim ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak pada sektor pertanian, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi

terhadap perubahan iklim harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, serta mengembangkan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan guna mengurangi dampak negatif perubahan iklim bagi generasi mendatang.

2. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan menjadi ancaman besar yang tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengelola limbah, terutama sampah plastik yang mencemari laut. Pada tahun 2018, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah sampah plastik yang masuk ke laut terbesar kedua di dunia, mencapai lebih dari 3,2 juta ton. Selain pencemaran plastik, masalah lingkungan lainnya seperti polusi udara akibat emisi kendaraan dan industri, serta pencemaran air dari limbah domestik dan industri, juga semakin mengkhawatirkan. Polusi udara dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan, sementara pencemaran air mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan strategis dalam mengatasi pencemaran lingkungan, seperti penguatan regulasi, peningkatan sistem pengelolaan limbah, promosi gaya hidup ramah lingkungan, serta pengembangan teknologi hijau untuk menjaga keseimbangan alam dan kualitas hidup masyarakat.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu isu strategis nasional yang mendesak, mengingat keterbatasan sumber daya yang semakin terancam akibat eksploitasi besar-besaran dari sektor industri, perdagangan, dan aktivitas

ekonomi lainnya. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis yang luas, cadangan mineral yang besar, hingga keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, tekanan terhadap lingkungan terus meningkat, yang berpotensi mengancam keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa degradasi lahan di Indonesia mencapai sekitar 1 juta hektar per tahun, disebabkan oleh deforestasi, pertambangan yang tidak ramah lingkungan, serta konversi lahan untuk kebutuhan perkebunan dan pemukiman. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih berkelanjutan, termasuk peningkatan regulasi terhadap eksploitasi sumber daya, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

4. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan langkah konkret dalam mengurangi emisi dari berbagai sektor utama, seperti energi, transportasi, dan industri. Selain itu, penguatan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi hal yang krusial guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam menghadapi isu strategis nasional terkait lingkungan hidup, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip pembangunan

berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam dua dekade ke depan, guna memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekosistem.

2.3.2.2.4. Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi yang lebih intensif. Berdasarkan data dari Kementerian Perekonomian, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4,82%, sementara di Provinsi Jawa Timur angkanya sedikit lebih rendah, yaitu 3,74%. Angka ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, isu strategis nasional dalam pemberdayaan ekonomi mencakup peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi dan pemerataan, Indonesia dapat memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di berbagai wilayah. Berikut adalah penjelasan lengkap beserta data dan fakta terkait isu strategis nasional pemberdayaan ekonomi di Indonesia:

1. Peningkatan Kesempatan Kerja

   Salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia adalah meningkatkan akses terhadap lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu menciptakan ekosistem ekonomi yang

kondusif bagi investasi serta memperkuat pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Sektor UKM memiliki peran krusial dalam perekonomian nasional, karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung kemudahan perizinan usaha, akses pembiayaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaku UKM dapat berkembang secara lebih kompetitif. Selain itu, upaya untuk meningkatkan konektivitas dan digitalisasi bagi sektor usaha juga penting agar UKM dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Dengan pendekatan yang komprehensif, peningkatan kesempatan kerja dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu aspek krusial dalam upaya pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Untuk menghadapi persaingan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Pendidikan yang berorientasi pada keterampilan teknis, inovasi, dan kewirausahaan menjadi faktor penting dalam mencetak tenaga kerja yang kompetitif. Selain itu, pelatihan vokasional dan program sertifikasi juga perlu diperluas guna memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan praktis yang siap diterapkan di dunia kerja. Tidak hanya itu, pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis juga harus diperhatikan agar SDM Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika

ekonomi global. Dengan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan SDM, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berdaya saing tinggi.

3. Pengembangan Sektor Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif

   Pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan salah satu isu strategis nasional yang berperan penting dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata, diperlukan diversifikasi sektor ekonomi yang dapat menciptakan peluang kerja luas serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah sektor pariwisata, yang telah menjadi salah satu penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

   Dengan meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi, akomodasi, dan fasilitas wisata yang berkualitas, daya tarik destinasi wisata di Indonesia dapat semakin meningkat. Selain itu, penguatan sektor pariwisata juga harus didukung dengan strategi pemasaran digital, peningkatan kualitas layanan, serta pelatihan bagi tenaga kerja di industri pariwisata agar dapat bersaing di tingkat global.

   Lebih jauh lagi, pendekatan berbasis pariwisata berkelanjutan juga perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor ini tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Program ekowisata, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan wisata, serta pelestarian budaya dan warisan lokal dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan

keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh.

4. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Regional

   Isu strategis dalam pemberdayaan ekonomi juga meliputi upaya pengurangan kesenjangan ekonomi dan disparitas antarwilayah di Indonesia. Tingkat ketimpangan, yang tercermin dalam nilai rasio Gini, masih tergolong tinggi, menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang signifikan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terarah untuk mengatasi ketimpangan tersebut serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemerataan investasi, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan peluang usaha bagi masyarakat di berbagai lapisan sosial dan wilayah.

   Dalam konteks pemberdayaan ekonomi sebagai isu strategis nasional di Indonesia, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif. Kolaborasi ini diperlukan untuk mendorong investasi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih kompetitif di pasar kerja, serta mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan adanya dukungan kebijakan yang tepat, insentif bagi dunia usaha, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terwujud. Selain itu, pendekatan ini juga

berperan dalam mempersempit kesenjangan sosial-ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

2.3.2.2.5. Pertahanan Keamanan

Indonesia perlu mengambil langkah proaktif untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, seperti terorisme dan potensi konflik antarnegara. Meningkatkan stabilitas dan keamanan menjadi salah satu isu strategis nasional yang membutuhkan perhatian serius guna memastikan kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 20 tahun ke depan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, melalui strategi yang terencana dan terukur, negara berupaya mempercepat pembangunan serta memperkuat ketahanan nasional. Beberapa aspek utama dalam isu keamanan nasional mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, perlindungan terhadap kedaulatan negara dari ancaman eksternal dan internal, serta peningkatan kapasitas pertahanan untuk menghadapi berbagai skenario yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Berikut adalah penjelasan lengkap beserta data dan fakta terkait isu strategis keamanan nasional di Indonesia:

1. Penanggulangan Terorisme

   Penanggulangan terorisme merupakan salah satu isu strategis dalam menjaga keamanan nasional di Indonesia. Ancaman terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh nyata adalah rangkaian serangan teror di Surabaya pada tahun 2018 yang mengguncang keamanan domestik. Berdasarkan data dari

Komisi Nasional Anti-Terorisme, Indonesia telah mengalami 56 insiden teror sejak tahun 2000 hingga 2020, dengan total korban jiwa mencapai 820 orang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan sistem intelijen, penguatan kapasitas aparat keamanan, serta kerja sama lintas lembaga dalam mencegah dan menindak aksi terorisme. Selain itu, pendekatan berbasis pencegahan melalui program deradikalisasi, edukasi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan sosial juga menjadi strategi penting dalam menekan potensi radikalisasi di masyarakat. Dengan strategi yang menyeluruh, Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman terorisme dan memastikan stabilitas keamanan nasional.

2. Perlindungan Terhadap Kedaulatan Negara

   Perlindungan terhadap kedaulatan negara merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga keamanan nasional Indonesia. Ancaman terhadap kedaulatan tidak hanya datang dari potensi konflik antarnegara, tetapi juga dari berbagai bentuk kejahatan lintas batas yang semakin kompleks. Keamanan maritim menjadi salah satu tantangan utama, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas dan berbatasan dengan banyak negara. Ancaman seperti perompakan, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Selain itu, aktivitas perjudian daring ilegal dan perdagangan gelap semakin berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan

penguatan patroli perbatasan, peningkatan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan lintas negara, serta penegakan hukum yang lebih ketat. Dengan strategi yang komprehensif dan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi kedaulatan negara dari ancaman eksternal maupun internal.

3. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara

   Peningkatan kapasitas pertahanan negara menjadi salah satu isu strategis utama dalam menjaga keamanan nasional Indonesia. Mengingat berbagai potensi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, Indonesia perlu terus memperkuat sistem pertahanan dan keamanan melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kesiapan personel militer dan kepolisian, serta penguatan strategi pertahanan negara.

   Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam mengembangkan strategi penanggulangan terorisme yang lebih efektif dan terkoordinasi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk sektor pertahanan, menjadikannya salah satu pos belanja terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

   Sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara, Kampanye Nasional Wajib Militer (KN-Wamil) mulai diterapkan untuk meningkatkan kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertahanan. Program ini bertujuan untuk membangun ketahanan nasional yang lebih kuat dengan melibatkan lebih banyak warga negara dalam

sistem pertahanan. Dengan strategi yang komprehensif, Indonesia berupaya menciptakan sistem pertahanan yang tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman, baik di tingkat domestik maupun global.

4. Pemberantasan Narkoba

   Pemberantasan narkoba merupakan salah satu isu strategis dalam menjaga keamanan nasional di Indonesia, mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, menghambat produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan angka kriminalitas.

   Narkoba menjadi ancaman serius yang berpotensi melemahkan ketahanan bangsa jika tidak ditangani dengan tegas dan sistematis. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan prevalensi yang tinggi di kalangan remaja dan pekerja usia produktif. Selain itu, jaringan peredaran narkotika semakin kompleks dengan keterlibatan sindikat internasional yang memanfaatkan jalur perdagangan ilegal.

   Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dalam memberantas narkoba, baik melalui penegakan hukum yang lebih ketat, penguatan patroli perbatasan untuk mencegah penyelundupan, hingga program rehabilitasi bagi pengguna agar mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Selain itu, edukasi dan kampanye pencegahan juga harus terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional

serta melindungi generasi muda dari ancaman narkotika yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam upaya menjaga keamanan nasional di Indonesia, diperlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga terkait guna meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap ancaman yang ada. Sinergi antara TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta instansi lainnya menjadi kunci dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan mencakup peningkatan kerja sama dalam operasi keamanan, pertukaran informasi intelijen yang lebih efektif, serta optimalisasi penggunaan teknologi untuk mendeteksi potensi ancaman seperti terorisme, kejahatan siber, dan konflik lintas batas. Selain itu, penguatan kapasitas intelijen menjadi aspek krusial dalam mencegah berbagai bentuk gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi ancaman nyata.

Dengan adanya koordinasi yang solid antarinstansi, Indonesia dapat lebih sigap dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional, menjaga stabilitas dalam negeri, serta melindungi kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

2.3.2.3. Isu Strategis Daerah Provinsi Jawa Timur

Isu strategis di Provinsi Jawa Timur disusun dengan mempertimbangkan tahap awal pelaksanaan RPJMN Jawa Timur periode 2025-2029, yang mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan daerah.

2.3.2.3.1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Pemerataan dan pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu isu strategis utama di Provinsi Jawa Timur.

Upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal menjadi kunci dalam menggerakkan perekonomian regional. Pemanfaatan potensi lokal secara optimal serta penguatan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun, pengembangan investasi berbasis sumber daya lokal di Jawa Timur masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi dan pembangunan daerah. Meskipun provinsi ini memiliki kekayaan sumber daya di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, pemanfaatannya belum mencapai potensi maksimal. Stabilitas sosial, politik, dan ekonomi menjadi faktor fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, belum adanya pedoman yang jelas terkait pengembangan produk unggulan daerah serta daya saing produk menjadi hambatan lain yang perlu segera diatasi.

Jawa Timur telah menyusun berbagai konsep pengembangan wilayah dengan tujuan meningkatkan minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, di sektor sosial dan ekonomi. Namun, permasalahan utama yang masih dihadapi adalah belum adanya perencanaan teknis yang terstruktur mengenai implementasi konsep pengembangan wilayah yang berbasis pada fungsi dan peran masing-masing kota dan kabupaten dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi regional.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi, diperlukan percepatan keseimbangan pembangunan antara koridor wilayah utara-selatan serta wilayah kepulauan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Jawa Timur. Secara umum, disparitas yang terjadi disebabkan oleh

keterbatasan aksesibilitas dan ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti transportasi, sumber daya air, serta layanan dasar. Selain itu, efektivitas implementasi konsep pengembangan wilayah, seperti Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata, dan Industri, masih belum optimal. Oleh karena itu, upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas menjadi langkah strategis yang harus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Jawa Timur.

2.3.2.3.2. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan kemiskinan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif dan strategi yang terintegrasi untuk mengatasinya. Faktor-faktor penyebab kemiskinan sangat beragam dan saling berkaitan, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, inflasi dan stabilitas ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global, turut menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, sehingga memperlambat pengembangan ekonomi lokal.

Ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan juga berdampak pada sektor pertanian, yang merupakan salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat di banyak daerah. Keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, serta perubahan

iklim yang tidak menentu semakin menyulitkan petani dalam mempertahankan usaha mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang dapat mendorong pertumbuhan usaha ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Namun, dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global dan nasional, minat investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mengalami penurunan yang cukup drastis. Akibatnya, skenario penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam bentuk kebijakan perlindungan dan penguatan terhadap usaha ekonomi lokal masyarakat. Pemanfaatan potensi lokal secara maksimal menjadi salah satu strategi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

2.3.2.3.3. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan bekualitas

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) akibat layanan pendidikan yang belum memadai merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ketidakseimbangan dalam akses pendidikan berkualitas dapat memperlebar kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok sosial dalam masyarakat. Rendahnya kualitas layanan pendidikan berdampak langsung pada minimnya SDM yang kompeten, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. SDM yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang baik menjadi faktor krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi, baik secara alami maupun akibat arus migrasi ke perkotaan dan pedesaan, turut memperumit permasalahan SDM. Terlebih lagi, dampak dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021 mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja, yang mendorong perpindahan penduduk ke berbagai wilayah. Perubahan demografi ini meningkatkan tekanan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, yang semakin terbatas. Keterbatasan ini menyulitkan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial-ekonomi, termasuk tingkat pendidikan yang masih didominasi pada level menengah serta meningkatnya marginalisasi kelompok rentan, seperti perempuan dan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

Ketika kualitas SDM belum mampu bersaing secara optimal, risiko meningkatnya angka pengangguran (unemployment) dan pekerjaan di bawah kapasitas (underemployment) menjadi lebih besar. Kondisi ini dapat memicu permasalahan sosial-ekonomi yang lebih kompleks, seperti meningkatnya kemiskinan, ketimpangan sosial, serta berkurangnya daya saing tenaga kerja nasional di tingkat global. Oleh karena itu, peningkatan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas menjadi salah satu strategi utama dalam membangun SDM unggul yang mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

2.3.2.3.4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik

Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik diarahkan pada perbaikan sistem administrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Reformasi birokrasi yang berfokus pada penyederhanaan prosedur administrasi dan optimalisasi layanan publik menjadi langkah

strategis untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Proses birokrasi yang berbelit dapat menjadi penghambat efektivitas pemerintahan, sehingga diperlukan reformasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola yang berkualitas. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintahan agar lebih profesional dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan SDM yang unggul, efektivitas pemerintahan dalam mengelola kebijakan dan melayani masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Selanjutnya, optimalisasi penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibumlinmas) harus berjalan selaras dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penerapan strategi berbasis penegakan hukum yang humanis, edukatif, dan persuasif, serta peningkatan partisipasi masyarakat, menjadi pendekatan penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Reformasi dalam sistem pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat membentuk kebijakan yang lebih strategis dalam pengelolaan Trantibumlinmas.

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat diperkuat melalui koordinasi lintas instansi, penggunaan sistem informasi berbasis data untuk memetakan gangguan keamanan dan ketertiban, serta pengoptimalan saluran pengaduan masyarakat. Dengan adanya integrasi data dan koordinasi yang lebih baik, respons terhadap permasalahan sosial dan keamanan dapat lebih cepat dan efektif, terutama di wilayah Jawa Timur.

Di samping itu, kepemimpinan daerah yang berwawasan global namun tetap berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan

lokal juga menjadi faktor kunci dalam pembangunan wilayah. Pemimpin yang mampu menggabungkan perspektif global dengan kekuatan budaya lokal dapat mendorong masyarakat untuk berpikir maju dan berdaya saing di tingkat internasional tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Hal ini penting dalam membangun komunitas yang dinamis, inovatif, serta berakar pada nilai-nilai sosial yang kuat.

2.3.2.3.5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan

Lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya memiliki peran fundamental dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tekanan terhadap sumber daya alam semakin meningkat. Permintaan yang melebihi ketersediaan sumber daya menyebabkan degradasi lingkungan, menurunnya daya dukung ekosistem, serta berkurangnya kapasitas lingkungan dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti air, udara bersih, dan pangan. Penurunan kualitas ekosistem ini mengakibatkan berkurangnya manfaat yang dapat diperoleh dari lingkungan, sehingga mengancam kesejahteraan manusia dan keberlanjutan kehidupan di bumi.

Selain itu, penurunan kualitas lingkungan hidup berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Aktivitas manusia yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, penggunaan lahan yang tidak terkendali, serta pencemaran lingkungan, mempercepat degradasi ekosistem. Salah satu penyebab utama memburuknya kualitas lingkungan adalah perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah lahan

kritis, meningkatnya risiko bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, serta penyusutan kawasan lindung yang berperan sebagai penyangga ekosistem.

Di Provinsi Jawa Timur, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ancaman krisis pangan semakin nyata akibat pertumbuhan populasi yang pesat dan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman. Sementara itu, ketersediaan air di daerah perkotaan semakin berkurang akibat eksploitasi yang tidak seimbang dengan kapasitas alami sumber daya air. Selain itu, risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan terus meningkat, yang diperburuk oleh perubahan iklim dan ketidakseimbangan dalam pengelolaan tata ruang.

Faktor-faktor yang memperparah peningkatan risiko bencana mencakup meningkatnya kerentanan akibat perubahan iklim, kurangnya infrastruktur pendukung untuk mitigasi bencana, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat. Upaya kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, penerapan kebijakan tata ruang yang ketat, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konservasi lingkungan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup di masa depan.

2.3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Nganjuk

2.3.2.4.1. Transformasi Sosial

1. Kesehatan untuk Semua

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia yang unggul hanya dapat dicapai jika

masyarakat memiliki akses kesehatan yang merata dan optimal. Oleh karena itu, jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Nganjuk harus menjadi landasan utama dalam upaya transformasi sosial yang berkelanjutan. Dengan kondisi kesehatan yang baik, masyarakat dapat hidup lebih produktif, meningkatkan kesejahteraan, serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Untuk mewujudkan akses kesehatan yang inklusif, perlu diperkuat implementasi program seperti Universal Health Coverage (UHC) serta edukasi kesehatan bagi masyarakat. Pemerataan layanan kesehatan akan membantu mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan keadilan dalam akses terhadap fasilitas medis, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

Selain itu, strategi kesehatan untuk semua juga harus mencakup upaya pencegahan terhadap berbagai penyakit menular, termasuk penyakit yang dapat muncul di masa depan akibat meningkatnya mobilitas penduduk. Program pengentasan stunting serta promosi gaya hidup sehat juga menjadi elemen penting dalam mencegah berbagai permasalahan kesehatan di masa mendatang.

Dalam jangka panjang, adanya bonus demografi dapat membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, pola konsumsi yang kurang sehat dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, yang pada akhirnya akan membebani sistem kesehatan daerah. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dalam kebijakan kesehatan harus terus dikembangkan untuk memastikan kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten

Nganjuk.Secara rinci isu-isu strategis kesehatan untuk semua antara lain:

a. Kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas penduduk yang dapat meningkatkan risiko wabah penyakit menular;
b. Pemenuhan akses kesehatan untuk masyarakat miskin;
c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan lingkungan sehat;
d. Peningkatan pemenuhan angka kecukupan gizi dan penanganan stunting termasuk didalamnya upaya penurunan AKI, AKB dan indikator kesehatan lainnya.

2. Pendidikan berkualitas yang merata

Pendidikan yang berkualitas dan merata harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk. Kesetaraan dalam akses dan mutu pendidikan tidak hanya memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk berkembang, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan menjadi aset bagi kemajuan daerah di masa depan. Dengan akses pendidikan yang setara, setiap warga Kabupaten Nganjuk dapat mengembangkan potensinya secara maksimal, sehingga ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi.

Pemerataan pendidikan juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Masyarakat yang terdidik memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kemiskinan hingga ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses terhadap pembelajaran yang relevan dan berkualitas.

Namun, salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan di Kabupaten Nganjuk adalah masih adanya ketidaksesuaian antara kualitas pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Berdasarkan data Sakernas BPS tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi tercatat pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 11,05%. Padahal, lulusan SMK seharusnya memiliki keterampilan yang siap pakai sesuai dengan tuntutan industri.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan berbagai langkah strategis, seperti pembaruan kurikulum agar lebih sesuai dengan perkembangan dunia kerja, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akses pendidikan berkualitas dapat terwujud bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk, menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Secara rinci isu strategis terkait pendidikan berkualitas yang merata antara lain:

a. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik terutama terkait penguasaan IPTEK khususnya teknologi informasi;
c. Perlunya peningkatan aksesbilitas Pendidikan bagi masyarakat miskin;
d. Perlunya pengembangan kurikulum dan metode belajar mengajar yang adaptif/sesuai kebutuhan dan standar global;
e. Masih adanya kesenjangan antara kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

3. Pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial

Pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi regional harus menjadi

prioritas utama dalam mewujudkan transformasi sosial yang inklusif di Kabupaten Nganjuk. Upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial yang memastikan setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang yang tersedia.

Salah satu strategi utama dalam pengentasan kemiskinan adalah memperkuat sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Perlindungan sosial di Kabupaten Nganjuk harus diimplementasikan secara menyeluruh dengan memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat dapat keluar dari kondisi kemiskinan dan lebih aktif dalam membangun kemandirian ekonomi mereka.

Agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan sistem tata kelola data yang akurat dan terintegrasi. Kebijakan **Satu Data Regsosek Nganjuk** yang telah diterapkan menjadi langkah awal yang baik dalam memastikan bantuan sosial serta intervensi kebijakan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Data yang dikelola dengan baik akan membantu pemerintah dalam menyusun strategi intervensi yang lebih efektif, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun program pemberdayaan.

Di samping itu, pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara cerdas dan berkelanjutan harus menjadi bagian dari kebijakan pengurangan kemiskinan. Masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah mereka, baik melalui sektor pertanian, industri kreatif, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu menciptakan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Melalui kombinasi strategi pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi potensi daerah, pembangunan di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan secara lebih inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menanamkan dasar yang kuat bagi kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Isu strategis terkait pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut:

a. Belum efektifnya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang didukung dengan data sasaran penerima manfaat yang akurat.
b. Optimalisasi akses jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja.

2.3.2.4.2. Transformasi Ekonomi

Isu-isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan antara lain:

1. Pengembangan potensi dan sektor unggulan daerah

Pembangunan berbasis potensi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk. Dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber daya lokal secara efektif, pemerintah daerah dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

Salah satu langkah penting yang perlu diperkuat adalah pengembangan zonasi ekonomi dan industri guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terstruktur dan kompetitif. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci dalam memperlancar arus barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Sektor unggulan seperti pertanian—dengan produk khas bawang merah—serta sektor industri dan jasa harus terus dioptimalkan melalui kebijakan yang tepat serta dukungan investasi. Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah penguatan industri berbasis pertanian untuk mengatasi permasalahan dalam rantai distribusi hulu-hilir. Namun, di sisi hulu, masih terdapat tantangan seperti alih fungsi lahan pertanian serta lambatnya inovasi dan adopsi teknologi yang dapat menghambat produktivitas sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang holistik dan berbasis keberlanjutan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan selaras dengan pelestarian sumber daya alam.

Minimnya regenerasi petani menjadi salah satu tantangan utama yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan produktivitas sektor pertanian dalam jangka panjang. Kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor ini dapat menyebabkan penurunan tenaga kerja produktif serta inovasi dalam pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk menarik minat generasi muda, seperti modernisasi pertanian, peningkatan akses terhadap teknologi, serta skema insentif yang mendukung keberlanjutan usaha pertanian.

Di sisi lain, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan kualitas produk, penguatan strategi pemasaran, serta pemanfaatan platform digital dan e-commerce untuk memperluas akses pasar. Dengan transformasi digital ini, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda menjadi solusi strategis dalam menciptakan

lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran. Namun, akses terhadap permodalan masih menjadi kendala utama yang harus diatasi. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperluas skema pembiayaan yang lebih inklusif serta memberikan pendampingan bagi pelaku usaha muda agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Sementara itu, rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Selingkar Willis diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan pertanian. Optimalisasi kawasan ini dapat meningkatkan daya tarik wisata berbasis alam dan agrowisata, sekaligus memperkuat keterkaitan antara sektor pertanian dan industri kreatif. Dengan sinergi yang tepat, kawasan ini berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar.

Penguatan sektor unggulan daerah menjadi isu strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Namun, pengembangan potensi dan produk unggulan daerah, seperti sektor pertanian, pariwisata, serta koperasi dan usaha mikro, masih belum optimal. Diperlukan strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan daya saing sektor-sektor ini, termasuk inovasi dalam produksi, pemasaran, serta akses terhadap teknologi dan investasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, transformasi ekonomi digital menjadi agenda penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya memperluas literasi dan keterampilan digital sebagai prasyarat utama untuk membangun ekosistem digital yang inklusif. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital, masyarakat dapat lebih produktif dalam memanfaatkan ruang digital untuk mengembangkan usaha, memperluas akses pasar, serta menciptakan nilai ekonomi baru yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk nyata dari transformasi digital adalah penyediaan layanan digital yang berorientasi pada kesetaraan dan inklusivitas, khususnya bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Untuk mencapai hal ini, kebijakan pemerintah harus berfokus pada inklusi digital, yaitu upaya yang memastikan aksesibilitas dan pemanfaatan teknologi digital bagi seluruh masyarakat.

Inklusi digital bertumpu pada tiga pilar utama: (1) membangun motivasi untuk beradaptasi dengan dunia digital, (2) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menggunakan teknologi secara efektif, dan (3) memberikan kesempatan yang luas bagi semua kalangan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Dukungan pemerintah dalam mewujudkan inklusi digital dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberian bantuan dan insentif bagi kelompok yang membutuhkan, serta program advokasi yang mencakup pendampingan dan kemudahan akses terhadap layanan digital.

Dengan strategi yang tepat, transformasi ekonomi digital tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing tinggi.Transformasi ekonomi digital menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan sektor strategis di Kabupaten Nganjuk. Namun, beberapa tantangan utama masih perlu diatasi agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Tantangan tersebut meliputi:

a. **Penguatan digitalisasi dalam sektor strategis**, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, yang masih menghadapi kendala dalam adopsi teknologi dan akses pasar digital.

b. **Keterbatasan infrastruktur digital**, terutama di wilayah pedesaan, yang menghambat akses internet cepat dan layanan digital yang memadai bagi pelaku usaha dan masyarakat.
c. **Pemanfaatan ekonomi digital sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi**, yang belum sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat melalui inovasi dan integrasi digital dalam berbagai sektor.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mempercepat adopsi teknologi digital, memperluas akses terhadap infrastruktur digital, serta memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha agar dapat beradaptasi dengan ekonomi berbasis teknologi.

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif

Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai bersifat berkualitas dan inklusif. Pendekatan ini menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menekankan pada beberapa aspek utama:

1) **Keberlanjutan dan inklusivitas**, yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas, menjaga kelestarian lingkungan, dan menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.

2) **Efisiensi dan inovasi**, yang menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Peningkatan nilai tambah dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, dan jasa, dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan global.

3) **Penguatan ketahanan ekonomi**, dengan mendorong diversifikasi usaha, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan teknologi dan kewirausahaan.

Dengan strategi ini, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan landasan ekonomi yang kuat, tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap elemen masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga memastikan keseimbangan dengan kelestarian lingkungan. Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip ekonomi dengan aspek keberlanjutan guna menciptakan pembangunan yang merata, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mencegah degradasi lingkungan. Visi jangka panjang yang diusung adalah membangun pola pertumbuhan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan empat prioritas utama dalam strategi pembangunan:

1) **Meningkatkan ekonomi daerah yang inklusif dan tangguh**, melalui pemerataan pembangunan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

2) **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing**, dengan menitikberatkan pada pendidikan, pelatihan, serta peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja.

3) **Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel**, melalui reformasi birokrasi yang mendorong efektivitas pelayanan publik serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan.

4) **Meningkatkan kesejahteraan sosial yang harmonis dan berbasis budaya lokal**, guna menciptakan masyarakat yang lebih solid, inklusif, dan memiliki ketahanan sosial yang baik.

Selain itu, integrasi ekonomi menjadi salah satu strategi penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Upaya ini dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

1) **Pembangunan infrastruktur konektivitas yang berkualitas**, guna mempercepat distribusi barang dan jasa serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

2) **Pemberian insentif dan kemudahan perizinan bagi investasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan**, guna menarik lebih banyak investor dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis.

3) **Pengendalian biaya distribusi dan variabel ekonomi lainnya**, agar harga bahan baku dan produk lokal tetap

kompetitif serta tidak membebani pelaku usaha kecil dan menengah.

4) **Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru dan kawasan industri terpadu**, untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif dan meningkatkan daya saing daerah.

Dengan menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Kabupaten Nganjuk tidak hanya berupaya meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta bersifat layak, bermartabat, dan mendukung pengembangan keterampilan masyarakat. Kombinasi antara kebijakan ekonomi yang inklusif, pembangunan infrastruktur yang mendukung, serta komitmen terhadap keberlanjutan akan menciptakan ekosistem pertumbuhan yang lebih stabil, adil, dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Peningkatan pendapatan masyarakat harus diiringi dengan pencapaian inklusi sosial dan pembangunan manusia yang lebih holistik. Kabupaten Nganjuk tidak hanya berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus ditopang oleh integrasi ekonomi yang lebih luas serta penyediaan infrastruktur berkualitas yang mendukung konektivitas dan aksesibilitas.

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEK) menjadi pilar utama dalam mempercepat transformasi sosial dan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Fokus pada pengembangan IPTEK tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang lebih adaptif, kreatif, dan berdaya saing di era digital. Di tengah perubahan global yang cepat, penguasaan ilmu dan teknologi menjadi kunci dalam

menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang baru di berbagai sektor.

Investasi dalam IPTEK membuka jalan bagi solusi inovatif terhadap berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Melalui riset dan pengembangan, Kabupaten Nganjuk dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mempercepat pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti industri, pertanian, dan jasa. Selain itu, inovasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan penciptaan budaya yang mendorong kreativitas dan membuka ruang bagi ide-ide baru yang dapat memperkuat daya saing daerah.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menginisiasi program-program unggulan seperti **Kawasan Industri Nganjuk (KING)** dan **Kawasan Ekonomi Nganjuk (KEN) Digital** sebagai upaya untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis teknologi. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan literasi IPTEK di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat ekosistem inovasi dan teknologi di Kabupaten Nganjuk, seperti:

1) **Pengembangan SDM yang unggul** melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi guna membangun tenaga kerja yang kompetitif di era industri 4.0.

2) **Dukungan kebijakan yang kondusif** bagi perkembangan industri kreatif dan digital, termasuk dalam hal insentif usaha, kemudahan akses permodalan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

3) **Optimalisasi transformasi digital** terutama dalam aspek distribusi dan promosi produk, guna memperluas akses

pasar bagi pelaku usaha lokal dan mendorong daya saing di tingkat nasional maupun global.

4) **Penguatan ekosistem inovasi** melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas, sehingga tercipta sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah **ekonomi kreatif**, yang mayoritas digerakkan oleh generasi muda. Dengan memanfaatkan bonus demografi, sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi masa depan. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, seperti kurangnya dukungan kebijakan yang memadai, keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal, serta belum terbentuknya jaringan ekosistem industri kreatif yang terfasilitasi dengan optimal.

Selain itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis kesehatan. Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam bidang IPTEK, masyarakat Kabupaten Nganjuk dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, menciptakan produk dan layanan yang lebih berkualitas, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat nasional dan internasional.

Melalui strategi pembangunan berbasis IPTEK yang inovatif dan inklusif, Kabupaten Nganjuk dapat menggali potensi penuh masyarakatnya dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan serta berdaya saing tinggi.

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan produktivitas ekonomi menjadi faktor

kunci. Kabupaten Nganjuk menghadapi berbagai tantangan strategis dalam bidang ini, yang mencakup:

1) **Peningkatan pelatihan tenaga kerja berbasis IPTEK** untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih adaptif terhadap perubahan industri dan kemajuan teknologi.
2) **Kurangnya ruang dan dukungan bagi generasi muda** dalam mengembangkan inovasi, kreativitas, dan keterampilan IPTEK, yang menghambat lahirnya ide-ide baru dan wirausahawan berbasis teknologi.
3) **Minimnya akses dan dukungan untuk penciptaan wirausaha baru**, serta keterbatasan dalam menyediakan akses ke lapangan pekerjaan yang berkualitas.
4) **Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi kreatif**, yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya saing daerah.
5) **Perlunya peningkatan produktivitas dan nilai tambah** dalam sektor-sektor ekonomi produktif dan riil, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kebijakan yang mendorong pengembangan ekosistem inovasi berbasis IPTEK, mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan, penguatan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha, serta penciptaan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi berbasis teknologi.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan telah menjadi agenda utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan

ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Strategi ini menekankan dua aspek utama, yaitu:

1) **Keberlanjutan ekologis**
   a. Menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, mitigasi dampak perubahan iklim, serta penerapan teknologi hijau.
   b. Mendorong efisiensi energi, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta konservasi sumber daya alam untuk memastikan daya dukung lingkungan dalam jangka panjang.
2) **Inklusivitas sosial dan pemerataan ekonomi**
   a. Memastikan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan peluang ekonomi yang setara.
   b. Mengembangkan kebijakan yang mendukung ekonomi berbasis komunitas serta memperkuat sektor UMKM agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, Kabupaten Nganjuk perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam berbagai dokumen perencanaan strategis, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian, pembangunan daerah dapat lebih tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan iklim serta risiko lingkungan yang semakin kompleks.

Selain itu, pembangunan industri di Kabupaten Nganjuk harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Peningkatan produktivitas ekonomi perlu dibarengi dengan kebijakan yang mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Namun, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam kebijakan konversi energi, sehingga diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat dalam implementasi regulasi yang lebih tegas.

Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan limbah industri serta eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan galian C dan deforestasi, yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan keseimbangan ekosistem jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan insentif dan disinsentif pajak serta retribusi daerah, sebagai langkah strategis untuk mendorong praktik industri yang lebih ramah lingkungan.

Dengan mengadopsi prinsip ekonomi berkelanjutan, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya membawa manfaat bagi generasi saat ini tetapi juga memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang. Integrasi teknologi hijau, inovasi industri, serta regulasi yang berpihak pada lingkungan akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberlanjutan ekonomi menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai ekonomi yang berkelanjutan meliputi:

1) **Dampak Industrialisasi terhadap Lingkungan Hidup**
   Pesatnya perkembangan industri membawa dampak signifikan terhadap ekosistem, mulai dari peningkatan emisi karbon, pencemaran air dan udara, hingga degradasi lahan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mendorong industri untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan, seperti efisiensi energi, penggunaan teknologi hijau, serta pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab.

2) **Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Ketersediaan Air**
Meningkatnya aktivitas ekonomi, seperti pertambangan galian C dan konversi lahan hijau untuk keperluan pembangunan, dapat mengurangi ketersediaan air serta berdampak pada keseimbangan ekosistem jangka panjang. Deforestasi dan alih fungsi lahan tanpa perencanaan yang matang juga berpotensi meningkatkan risiko bencana ekologis, seperti banjir dan kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang komprehensif, termasuk perencanaan tata ruang yang lebih berkelanjutan serta penerapan standar lingkungan yang ketat dalam kegiatan pertambangan dan pembangunan.

3) **Afirmasi Kebijakan dan Regulasi Konversi Energi**
Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan ekonomi yang lebih hijau. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan konversi energi ke sumber energi terbarukan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan afirmatif, insentif bagi industri yang beralih ke energi hijau, serta regulasi yang lebih tegas dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi konvensional. Selain itu, investasi dalam infrastruktur energi terbarukan dan riset terkait efisiensi energi juga harus menjadi prioritas untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui kebijakan yang tepat, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kelangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

2.3.2.4.3. Transformasi Tata Kelola

Dalam proses pembangunan Kabupaten Nganjuk, berbagai tantangan strategis perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Beberapa isu utama yang menjadi fokus dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah meliputi:

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nganjuk merupakan faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif. Profesionalisme ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga mengedepankan aspek moral dan etika dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas serta dedikasi aparatur menjadi suatu keharusan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berkualitas.

Selain menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, penguatan profesionalisme ASN juga berkontribusi terhadap pembentukan budaya kerja berbasis transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dengan adanya budaya kerja yang kuat dan berlandaskan etika, kolaborasi antaraparat dapat ditingkatkan sehingga menghasilkan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Peningkatan profesionalisme ini juga harus bersifat berkelanjutan dengan terus memberikan peluang pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi ASN. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, ASN dituntut untuk menguasai teknologi informasi serta memahami konsep e-government. Dengan peningkatan kompetensi di bidang teknologi, pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien.

Isu strategis terkait peningkatan profesionalisme ASN meliputi:

a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN yang didukung dengan penguasaan IPTEK.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi membuka akses informasi bagi masyarakat sehingga mereka dapat memahami kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan serta memberikan pengawasan yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah memiliki tolok ukur yang jelas dan dapat dievaluasi. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang baik, masyarakat dapat menilai efektivitas dan pencapaian dari kebijakan yang telah diterapkan. Hal ini juga berdampak pada efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik serta pengalokasian sumber daya yang lebih tepat sasaran.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengimplementasikan berbagai inisiatif seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), program satu data, serta konsep pemerintahan terbuka. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat transparansi serta meningkatkan responsivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Isu strategis terkait transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi:

a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Good governance merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan berpihak pada masyarakat. Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum harus menjadi pijakan utama dalam tata kelola pemerintahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang inklusif serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, good governance juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, mengurangi potensi korupsi, serta memperkuat legitimasi pemerintahan. Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan dengan meraih indeks SPBE yang sangat baik pada tahun 2023. Namun, peningkatan lebih lanjut tetap diperlukan agar tata kelola pemerintahan semakin optimal.

Isu strategis terkait tata kelola pemerintahan meliputi:

a. Penerapan good governance yang didukung oleh e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Birokrasi yang Adaptif

Dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, birokrasi harus mampu bertransformasi menjadi lebih fleksibel, responsif, dan efisien. Penerapan teknologi digital dalam sistem pemerintahan, integrasi data, serta otomatisasi layanan menjadi faktor utama dalam menciptakan birokrasi yang lebih adaptif.

Untuk mencapai hal ini, strategi reformasi birokrasi yang berorientasi pada kinerja perlu diterapkan secara menyeluruh. Struktur organisasi birokrasi juga harus lebih fleksibel dan berbasis hasil agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan harmonisasi kebijakan juga menjadi

langkah penting dalam mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat inovasi serta pelayanan publik.

Isu strategis terkait birokrasi yang adaptif meliputi:

a. Penerapan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kinerja.

5. Pemerataan Layanan Publik Berkualitas

Pemerataan akses terhadap layanan publik merupakan aspek penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus memastikan bahwa setiap warga, terutama di daerah terpencil serta kelompok rentan, mendapatkan layanan publik yang setara dan berkualitas.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa layanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik adalah dengan mengadopsi teknologi informasi untuk mempercepat dan menyederhanakan prosedur layanan. Dengan pemanfaatan teknologi, proses penyediaan layanan dapat dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, serta minim hambatan birokratis.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam penyediaan layanan publik juga harus menjadi perhatian utama. Koordinasi antarinstansi pemerintah perlu diperkuat guna memastikan layanan publik berjalan dengan efektif dan terintegrasi.

Isu strategis terkait pemerataan layanan publik meliputi:

a. Peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.

Dengan mengatasi berbagai isu strategis di atas, Kabupaten Nganjuk dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan inklusif. Hal ini akan menjadi landasan

utama bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

6. Stabilitas sosial politik

Stabilitas sosial dan politik merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Nganjuk, supremasi hukum menjadi pilar utama yang menopang keamanan, ketertiban, serta stabilitas ekonomi makro dan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan strategis dalam memperkuat keamanan daerah, menciptakan ketertiban umum, dan memastikan kestabilan ekonomi demi mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Keamanan Daerah yang Kuat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Keamanan daerah yang tangguh menjadi prasyarat utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Keamanan yang terjamin akan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi tanpa rasa khawatir. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terdorong untuk berkontribusi terhadap pembangunan lokal serta menjaga harmoni sosial di lingkungan mereka.

Di sisi lain, keamanan daerah yang kuat juga menjadi faktor utama dalam efektivitas penegakan hukum. Dengan adanya sistem keamanan yang terorganisir, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum dengan tegas. Untuk mewujudkan hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan patroli keamanan, implementasi program polisi komunitas, serta pelaksanaan inisiatif pencegahan kejahatan berbasis masyarakat. Selain itu,

peningkatan infrastruktur keamanan, seperti pemasangan CCTV di area publik, optimalisasi pencahayaan jalan, serta penyediaan fasilitas keamanan lainnya, akan berkontribusi dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Dalam upaya mencegah serta menanggulangi potensi radikalisme dan ekstremisme, perlu adanya pendekatan berbasis edukasi, dialog antar komunitas, serta pelaksanaan program deradikalisasi yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa keamanan daerah tetap terjaga, Kabupaten Nganjuk dapat menarik lebih banyak investasi, mendorong pertumbuhan sektor bisnis, serta menciptakan lapangan kerja baru yang akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi dan sosial. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kondusivitas lingkungan juga menjadi elemen kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Stabilitas sosial tidak dapat dicapai tanpa adanya ketertiban umum yang terjaga dengan baik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Nganjuk adalah munculnya konflik identitas yang sering terjadi di antara kelompok perguruan silat, khususnya yang melibatkan generasi muda. Konflik semacam ini berpotensi mengganggu harmoni sosial serta mengancam stabilitas daerah jika tidak segera diatasi dengan pendekatan yang tepat.

Untuk menanggulangi permasalahan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat dalam menciptakan strategi pencegahan konflik yang efektif. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan peran tokoh masyarakat dan agama dalam menyosialisasikan nilai-nilai toleransi, penguatan dialog antar

kelompok, serta penyelenggaraan program edukasi yang menanamkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan upaya kolaboratif ini, Kabupaten Nganjuk dapat mewujudkan lingkungan yang lebih harmonis dan bebas dari potensi konflik sosial yang berlarut-larut.

c. Stabilitas Makroekonomi Daerah dan Kemandirian Fiskal

Stabilitas ekonomi daerah merupakan elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing ekonomi lokal. Stabilitas ini dapat dicapai melalui keseimbangan dalam pengelolaan variabel ekonomi makro, seperti keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pembangunan daerah, serta keseimbangan antara tingkat tabungan dan investasi. Selain itu, stabilitas ekonomi juga bergantung pada struktur pasar yang kompetitif serta sektor-sektor ekonomi produktif yang berkembang secara optimal.

Dalam rangka memantapkan stabilitas makroekonomi daerah, diperlukan kebijakan ekonomi yang terkoordinasi dengan baik. Kebijakan perpajakan dan keuangan daerah harus dirancang secara strategis untuk merangsang masuknya investasi ke Kabupaten Nganjuk. Selain itu, reformasi kebijakan ekonomi perlu dilakukan guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif bagi para pelaku usaha di tingkat lokal. Mendorong peran sektor perbankan dan koperasi dalam meningkatkan investasi daerah juga menjadi langkah penting dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih dinamis serta memperkuat sektor industri, pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan.

Namun, tantangan utama yang masih dihadapi Kabupaten Nganjuk adalah kurang optimalnya instrumen kebijakan dan koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi

makro. Dari sisi fiskal, sumber-sumber pendapatan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, sehingga masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung proyek-proyek ekonomi strategis di daerah. Dengan demikian, Kabupaten Nganjuk dapat mencapai tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi serta memperkuat ketahanan ekonominya dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

Stabilitas sosial dan politik merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat keamanan daerah, menciptakan ketertiban umum, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan kemandirian fiskal, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan pada supremasi hukum dan prinsip good governance. Dengan strategi yang terarah dan implementasi kebijakan yang efektif, Kabupaten Nganjuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

7. Ketahanan Sosial dan Ekologi

Isu-Isu Strategis dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk

a. Penguatan Nilai Keagamaan, Moralitas, dan Kebudayaan

Kabupaten Nganjuk memiliki keberagaman agama dan budaya yang menjadi bagian integral dari ketahanan sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan, isu strategis yang dihadapi mencakup upaya mempromosikan toleransi,

penghormatan terhadap keberagaman agama dan budaya, serta menjaga kearifan lokal yang telah lama berkembang. Salah satu contohnya adalah ritual mandi di Air Terjun Sedudo, yang merepresentasikan nilai-nilai sosial seperti kasih sayang, kerja sama, dan keharmonisan sosial.

Selain itu, pelestarian situs warisan budaya serta pengembangan praktik keagamaan dan budaya yang selaras dengan nilai-nilai modern dan hak asasi manusia menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi isu ini, diperlukan penguatan sistem pendidikan berbasis karakter, kebijakan yang mendukung dialog lintas agama dan budaya, serta implementasi program yang menegaskan identitas nasional yang inklusif berdasarkan Pancasila.

Arus globalisasi yang pesat juga membawa tantangan baru, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap budaya asing yang bertentangan dengan norma sosial dan agama. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat perlu menjadi prioritas guna membangun masyarakat yang beragama, berakhlak, dan memiliki budaya yang maju.

b. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Karakter

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nganjuk adalah bagaimana menciptakan individu yang berdaya saing tinggi, memiliki karakter kuat, serta mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal ini mencakup kesetaraan gender dalam pendidikan dan dunia kerja, serta

pembangunan keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter masyarakat yang produktif.

Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga harus diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang melibatkan tenaga pendidik dan orang tua. Selain itu, pelatihan kerja berbasis keterampilan menjadi langkah krusial dalam membangun tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global.

Isu lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatnya permasalahan kesehatan mental dan dekadensi moral di kalangan generasi muda. Sebagai bagian dari bonus demografi, generasi muda harus dipersiapkan untuk menghadapi dampak negatif globalisasi dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, strategi pembangunan SDM di Kabupaten Nganjuk harus mengutamakan penguatan karakter bangsa melalui pendidikan moral dan etika, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan yang relevan di era modern.

c. Ketahanan Energi, Ketersediaan Air, dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Nganjuk, mengingat ketergantungan yang tinggi pada energi fosil. Oleh karena itu, transisi menuju energi terbarukan menjadi langkah strategis yang perlu didorong guna menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan dan efisien. Kebijakan yang mendukung diversifikasi sumber energi serta peningkatan infrastruktur energi hijau harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan RPJPN 2025-2045.

Selain itu, Kabupaten Nganjuk juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air, di mana beberapa wilayah mengalami kelangkaan air akibat perubahan iklim, pola cuaca

yang tidak menentu, serta pengelolaan sumber daya air yang belum optimal. Infrastruktur distribusi air bersih dan sanitasi yang belum memadai turut menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini, sehingga berdampak pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di daerah tersebut.

Sebagai daerah agraris, kemandirian pangan menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan. Untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan infrastruktur irigasi, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, serta dukungan terhadap inovasi di sektor pertanian berbasis teknologi. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu memperkuat kebijakan yang mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, guna menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, ketersediaan air bersih, serta kemandirian pangan di masa depan.

8. Implementasi transformasi Aspek pembangunan

Isu-Isu strategis pembangunan Kabupaten Nganjuk antara lain.

a. Pemerataan pembangunan merupakan langkah penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Salah satu strategi utama untuk mencapainya adalah dengan memastikan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Infrastruktur yang memadai akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

   Secara teori, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik sebagai tulang punggung aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Infrastruktur juga berperan sebagai modal sosial yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi daerah.

Misalnya, peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi akan mempercepat pergerakan barang dan jasa, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Data terbaru menunjukkan bahwa indeks Gini di Kabupaten Nganjuk meningkat dari 0,30 pada tahun 2022 menjadi 0,32 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan, terutama dari aspek ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara inklusif dengan mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan masyarakat agar dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan. Selain itu, konektivitas antarwilayah harus diperkuat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih terjadi.

Sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019, pengembangan wilayah berbasis Kawasan Selingkar Willis dan Lintas Selatan harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan. Fokus utama pengembangan ini mencakup peningkatan nilai tambah sektor agroindustri dan pengembangan kawasan agropolitan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

b. Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar dan Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas infrastruktur layanan dasar sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa isu utama dalam bidang ini mencakup akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, perumahan yang layak, serta sarana pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi yang efektif masih menjadi tantangan di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan. Infrastruktur perumahan juga perlu ditingkatkan,

baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk memastikan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan layak huni.

Selain infrastruktur dasar, Kabupaten Nganjuk juga menghadapi tantangan lingkungan hidup, seperti banjir perkotaan dan risiko tanah longsor di daerah tertentu. Intensitas hujan yang tinggi dan sistem drainase yang kurang optimal sering menyebabkan gangguan pada aktivitas masyarakat, termasuk sektor perdagangan dan layanan publik. Oleh karena itu, peningkatan manajemen air hujan serta penguatan infrastruktur pengendalian banjir menjadi kebutuhan mendesak.

Masalah lain yang juga penting adalah pencemaran udara dan air akibat limbah industri serta sampah domestik yang belum terkelola dengan baik. Kabupaten Nganjuk perlu mengadopsi strategi pembangunan hijau, seperti program *Low Carbon Green Growth*, untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Implementasi teknologi ramah lingkungan serta pelibatan masyarakat dalam program pelestarian lingkungan menjadi langkah penting dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.

Isu strategis terkait infrastruktur dan lingkungan hidup meliputi:

1) Ketersediaan air bersih dan pengelolaan sumber daya air yang belum optimal.
2) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak huni.
3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana ekologis.
4) Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

c. Kesinambungan Pembangunan

Keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Nganjuk menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik. Seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi, kebutuhan terhadap pembangunan juga terus bertambah. Namun, keterbatasan anggaran daerah sering kali menjadi hambatan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Kabupaten Nganjuk masih bergantung pada sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian. Oleh karena itu, perlu ada upaya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Selain itu, diperlukan strategi pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan, termasuk mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan layanan publik.

Untuk menjamin kesinambungan pembangunan, diperlukan sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan desa. Skema pembiayaan yang lebih strategis antara APBN, APBD, dan APBDes perlu dirancang agar pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif dan terarah.

Isu strategis terkait kesinambungan pembangunan meliputi:

1) Perlunya keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan.
2) Sinkronisasi prioritas pembangunan antara pusat, daerah, dan desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.
3) Optimalisasi skema pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan mengatasi berbagai isu strategis ini, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2.207 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	1. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah yang Belum Optimal	1.Kurang Optimalnya Pengentasan Kemiskinan	1. Persaingan Ekonomi a. Perang Dagang dan Dampaknya terhadap Ekonomi Global b. Tarif dan Hambatan Perdagangan c. Perkembangan Teknologi dan Dampaknya terhadap Daya Saing Ekonomi d. Ketergantungan pada Tarif Impor dan Fluktuasi Harga Global e. Perdagangan Manusia dalam Ekonomi Global	1. Pemberdayaan Ekonomi a. Peningkatan Kesempatan Kerja b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia c. Pengembangan Sektor Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif d. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Regional	1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	1. Transformasi Ekonomi a. Pengembangan potensi dan sektor unggulan daerah
	2. Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Publik	2.Perlunya Peningkatan Pertumbuhan UMKM dan Akses Perbankan			2. a. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; b. perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; c. perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan kemiskinan; d. perluasan akses fasilitas	2. Transformasi Sosial a. Kesehatan untuk Semua b. Pendidikan berkualitas yang merata c. Pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
					kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; e. pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.	
	3. Pembangunan Infrastruktur yang Belum Merata			2. Pembangunan Infrastruktur a. Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur b. Meningkatkan Konektifitas c. Pemerataan Pembangunan d. Meningkatkan Inovasi Teknologi		3. Implementasi transformasi Aspek pembangunan a. Pemerataan pembangunan b. Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar dan Lingkungan Hidup Berkualitas c. Kesinambungan Pembangunan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	4. Terdapatnya Potensi Konflik Sosial dan Relatif Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Perkawinan Anak		2. Migrasi a. Anak-Anak Migran yang Rentan Terabaikan b. Tingkat Migrasi Global yang Meningkat c. Politik Anti-Migrasi dan Dampaknya d. Migrasi Iklim dan Lingkungan e. Tantangan Keamanan dalam Migrasi			4. Ketahanan Sosial dan Ekologi a. Penguatan Nilai Keagamaan, Moralitas, dan Kebudayaan b. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Karakter c. Ketahanan Energi, Ketersediaan Air, dan Kemandirian Pangan
			3. Konflik Internasional a. Konflik Israel-Palestina b. Konflik di Suriah c. Konflik di Ukraina d. Krisis Politik dan Ekonomi di Venezuela e. Perang dan Ketidakstabilan di Afghanistan			
	5. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Masih Rendah	3. Rendahnya Keterampilan Tenaga Kerja dan Tingginya Angka Pengangguran				

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	6. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal	4. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah dan Meningkatnya Kenakalan Remaja			3. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan bekualitas	
	7. Ketahanan Pangan, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana	5. Perlunya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan	4. Perubahan Iklim dan Lingkungan a. Pemanasan Global b. curah hujan yang tidak menentu dan lebih ekstrem pemicu utama banjir dan tanah longsor c. keberlangsungan hidup satwa liar	3. Lingkungan Hidup a. Perubahan Iklim b. Pencemaran Lingkungan c. Pengelolaan Sumber Daya Alam d. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	5. Ketahanan Sosial dan Ekologi d. Penguatan Nilai Keagamaan, Moralitas, dan Kebudayaan e. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Karakter f. Ketahanan Energi, Ketersediaan Air, dan Kemandirian Pangan
		6. Potensi Peningkatan Risiko Bencana				

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	8. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	7. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	5. Penggunaan Teknologi a. Ketergantungan Terhadap Teknologi dan Sumber Daya b. Keamanan Siber dan Perlindungan Data c. Peran Kecerdasan Buatan dalam Transformasi Ekonomi d. Inovasi Teknologi dalam Sektor Kesehatan e. Privasi dan Pengawasan Digital	4. Pertahanan Keamanan a. Penanggulangan Terorisme b. Perlindungan Terhadap Kedaulatan Negara c. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara d. Pemberantasan Narkoba	5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	6. Transformasi Tata Kelola a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN yang didukung dengan penguasaan IPTEK b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan c. Penerapan good governance yang didukung oleh egovernment untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. d. Penerapan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kinerja. e. Peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						7. Stabilitas sosial politik a. Keamanan Daerah yang Kuat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan b. Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Stabilitas Makroekonomi Daerah dan Kemandirian Fiskal

2.3.2.5. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan berbagai strategi pengembangan kawasan perkotaan yang mencakup:

1. Peningkatan Sistem Pusat Pelayanan
    a. Menetapkan hierarki pusat pelayanan kegiatan berdasarkan skala kabupaten, kawasan, dan lingkungan agar distribusi layanan menjadi lebih efektif dan merata.
    b. Memperkuat fungsi pusat pelayanan di kawasan perkotaan dan perdesaan guna mendukung pengembangan sektor ekonomi unggulan.
    c. Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kawasan perkotaan, dengan pembagian 20% sebagai RTH publik dan 10% sebagai RTH privat guna menjaga keseimbangan lingkungan dan kualitas udara.
2. Pengembangan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Layak
    a. Membangun serta meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang menjadi lebih lancar.
    b. Mengembangkan pasokan energi melalui peningkatan jaringan transmisi listrik agar kebutuhan listrik bagi rumah tangga dan industri dapat terpenuhi secara optimal.
    c. Memperluas cakupan layanan telekomunikasi untuk mendukung akses informasi dan komunikasi yang lebih baik.
    d. Mengoptimalkan jaringan sumber daya air guna mendukung kebutuhan domestik, industri, dan pertanian.

e. Meningkatkan layanan penyediaan air minum (SPAM) agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses air bersih yang aman dan layak.
f. Mengembangkan sistem sanitasi lingkungan yang lebih baik serta memperkuat mekanisme pengendalian dampak lingkungan akibat aktivitas perkotaan.

3. Pemantapan Fungsi Lindung untuk Ketahanan Lingkungan dan Daya Dukung Ekologis
   a. Menetapkan batas-batas kawasan lindung secara tegas untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan.
   b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung sesuai dengan karakteristik dan kapasitas ekologisnya agar dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.
   c. Mengurangi alih fungsi lahan dengan mengutamakan konservasi tanah dan air guna menjaga kualitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim global.
   d. Mengimplementasikan program penghijauan, reboisasi, serta penanaman pohon dalam skala besar untuk meningkatkan kualitas udara dan keseimbangan ekosistem.
   e. Mengelola tanah dan sistem drainase secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan air tanah dan air permukaan.
   f. Menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai elemen utama dalam konservasi tata air dan keberlanjutan lingkungan hidup.
4. Pengaturan dan Pengelolaan Kawasan Budidaya untuk Mendukung Perekonomian Berkelanjutan
   a. Mengoptimalkan penggunaan lahan agar dapat meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata.

b. Mengendalikan alih fungsi lahan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
c. Mengembangkan kawasan permukiman yang aman, nyaman, serta sesuai dengan prinsip keseimbangan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

5. Identifikasi dan Optimalisasi Sumber-Sumber Ekonomi Potensial pada Kawasan Strategis
   a. Mengembangkan sektor pertanian berbasis kawasan agropolitan guna memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing petani.
   b. Mengembangkan sektor perikanan dan kelautan melalui pendekatan minapolitan agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pesisir.
   c. Mendorong kawasan ekonomi cepat tumbuh dengan menarik investasi dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
   d. Memaksimalkan potensi pariwisata daerah dengan meningkatkan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi, akomodasi, serta fasilitas wisata.
   e. Menata serta mengendalikan pertumbuhan kawasan industri agar selaras dengan pengembangan sistem jaringan transportasi, sehingga distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan pembangunan kawasan perkotaan di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan secara optimal, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah.

Strategi pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan meningkatkan pelayanan masyarakat mencakup:

a. Menetapkan sistem pusat pelayanan kegiatan pada tingkat kabupaten, kawasan, dan lingkungan;
b. Memperkuat peran pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pengembangan potensi ekonomi unggulan; serta
c. Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan dengan luas minimal 30% dari total wilayah, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Tabel 2.208 Kondisi RTH Tahun 2022-2024

Tahun	Luas (Ha)			Persentase	
	Luas Standar RTH (20% x Luas Wilayah)	RTH	Tutupan Vegetasi	RTH	Total RTH+Vegetasi
2022	25781,33	23,75	-	0,90%	0,90%
2023	25781,33	53,37	87,35	0,21%	0,55%
2024	25781,33	60,78	87,20	0,24%	0,57%

Strategi untuk penyediaan prasarana yang layak dan terpadu dalam mendukung sistem perkotaan dan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi :

a. mengembangkan dan membangun jaringan jalan dalam menghubungkan pusat permukiman yang ada;
b. mengembangkan ketersediaan energi pengembangan sistem jaringan transmisi listrik; listrik
c. mengembangkan jaringan pelayanan telekomunikasi;
d. mengembangkan ketersediaan jaringan sumber daya air; dan
e. mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
f. mengembangkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan.

Strategi untuk pemantapan fungsi lindung dalam meningkatkan kebertahanan dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam, meliputi:

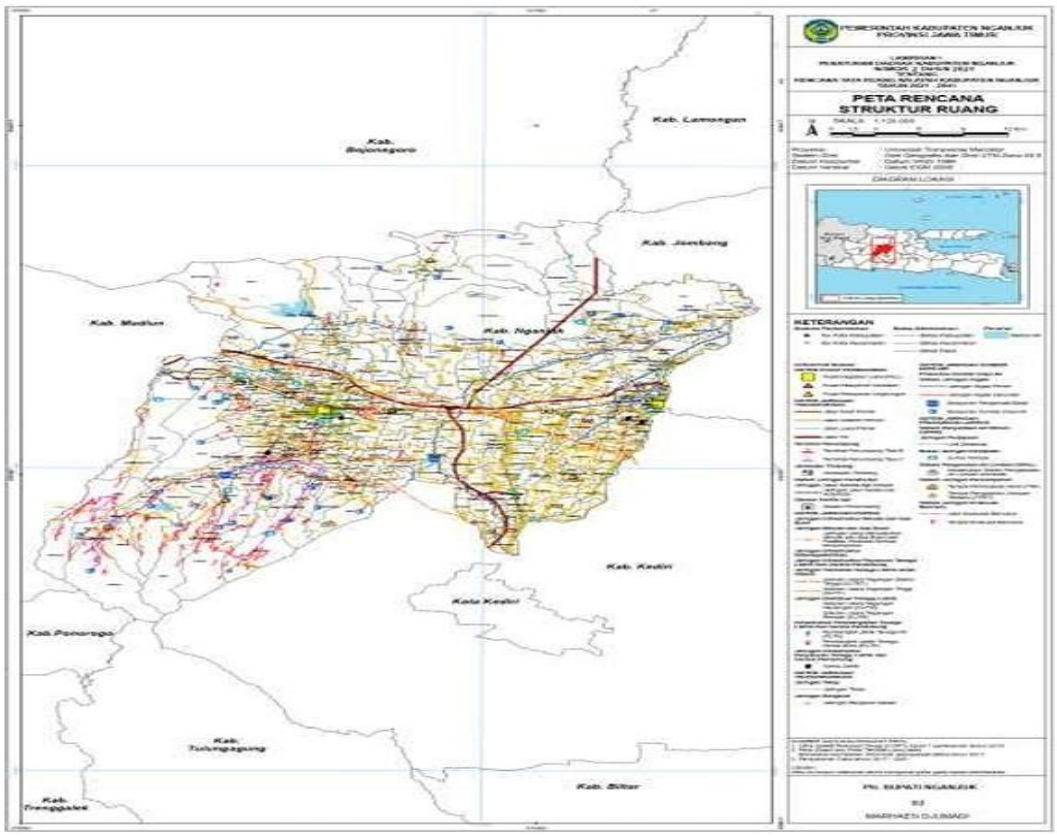
a. memantapkan batas kawasan lindung;
b. meningkatkan fungsi lindung sesuai dengan fungsi masing masing kawasan yang berkelanjutan;
c. meningkatkan fungsi lindung melalui alih fungsi lahan yang mempunyai kemampuan untuk konservasi tanah dan air dalam mendukung kebertahanan kualitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim global;
d. meningkatkan kualitas udara melalui program penghijauan, reboisasi dan penanaman dalam skala besar,
e. meningkatkan ketersediaan air tanah dan air permukaan melalui pengelolaan tanah dan sistem drainase;
f. meningkatan kelestarian kawasan hutan sebagai fungsi lindung untuk menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan hidup.

Strategi dalam penetapan dan pengelolaan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah secara berkelanjutan, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencakup:

a. Mengatur pola pemanfaatan lahan guna meningkatkan produktivitas dalam sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata;
b. Mengendalikan alih fungsi lahan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, perdagangan dan jasa, industri, serta pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta
c. Mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan kapasitas daya dukung lingkungan.

Strategi dalam mengidentifikasi potensi sumber ekonomi di kawasan strategis meliputi:

a. Mengembangkan potensi ekonomi guna mendorong pertumbuhan kawasan agropolitan;
b. Mengembangkan potensi ekonomi untuk mendukung kawasan minapolitan;
c. Mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi cepat tumbuh melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang ada;
d. Mengembangkan sektor pariwisata daerah dengan meningkatkan infrastruktur pendukungnya; serta
e. Mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan peruntukan kawasan industri untuk meningkatkan efisiensi serta pengembangan sistem jaringan transportasi.



Gambar 2.42 Peta Rencana Struktur Ruang
Sumber : Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021

1. Sistem Jaringan Jalan

sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :

A. Jalan Umum;

Jalan umum terdiri atas :

a. jalan arteri primer terdiri atas:
   1. ruas jalan batas Kabupaten Madiun-Batas Kota Nganjuk;
   2. jalan Gatot Subroto;
   3. jalan Lingkar Nganjuk;
   4. ruas jalan batas Kota Nganjuk-Kertosono; dan
   5. ruas jalan Kertosono-Batas Kabupaten Jombang.

b. jalan kolektor primer terdiri atas :
   1. ruas jalan Batas Kabupaten Nganjuk (Simpang 4 Candi) - Batas Kabupaten Kediri;

2. ruas jalan Guyangan - Simpang Empat Candi;
3. ruas jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng) –
4. Nganjuk (Guyangan);
5. ruas batas kabupaten Kediri – Magersari;
6. ruas jalan Magersari – Pogoh;
7. ruas jalan Pogoh - Selopuro;
8. ruas jalan Selopuro – Kepel;
9. ruas jalan Kepel - Bulak;
10. ruas jalan Bulak– Sidorejo;
11. ruas jalan Sidorejo – Proliman;
12. ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas
13. Kab.Madiun).
14. ruas jalan Jetis – Watudandang;
15. ruas jalan Tanjungtani-Gondanglegi;
16. ruas jalan Warujayeng – Jetis; dan
17. ruas jalan Waung – Warujayeng.
18. ruas jalan Gondang Kulon-Ngujung;
19. ruas jalan Ngangkatan-Gondang Kulon;
20. ruas jalan Ngujung – Lengkong;
21. ruas jalan Lengkong-Ngasem;
22. ruas jalan Ngasem-Munung;
23. ruas jalan Kemaduh-Lengkong;
24. ruas jalan Banaran-Kemaduh;
25. jalan Gatot Subroto (Kecamatan Kertosono);
26. jalan A Yani (Kecamatan Kertosono);
27. ruas jalan Rejoso – Ngangkatan;
28. ruas jalan Tamanan – Rondokuning - Klangon (batas
29. Kabupaten Madiun).
30. ruas batas kabupaten Kediri – Magersari.
31. ruas jalan Magersari – Pogoh;
32. ruas jalan Pogoh - Selopuro;
33. ruas jalan Selopuro – Kepel;

34. ruas jalan Kepel - Bulak;
35. ruas jalan Bulak– Sidorejo;
36. ruas jalan Sidorejo – Proliman;dan
37. ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas
38. Kab.Madiun).

c. jalan lokal primer terdiri atas :
1. ruas jalan Banjarsari – Kurungrejo;
2. ruas jalan Banjarsari –Kelutan;
3. ruas jalan Baron – Kwajon;
4. ruas jalan Berbek – Kuncir;
5. ruas jalan Berbek – Nglajer;
6. ruas jalan Cerme – Berbek;
7. ruas jalan Gajahbelur – Jetis;
8. ruas jalan Gareman-Babadan;
9. ruas jalan Gebangkerep-Kaloran;
10. ruas jalan Gondangkulon-Ngluyu;
11. ruas jalan Jekek – Kemaduh;
12. ruas jalan Kandeg – Jekek;
13. ruas jalan Kandeg-Kandangan;
14. ruas jalan Kudu-Tambak;
15. ruas jalan Kuncir – Sidorejo;
16. ruas jalan Loceret-Berbek;
17. ruas jalan Mungkung – Berbek;
18. ruas jalan Ngluyu – Bajang;
19. ruas jalan Ngrami – Gondangkulon;
20. ruas jalan Ngrombot – Tirobinangun;
21. ruas jalan Patihan-Gajah Belur;
22. ruas jalan Semanding – Berbek;
23. ruas jalan Sidorejo-Ngliman;
24. ruas jalan Siwalan – Sawahan;
25. ruas jalan Tirtobinangun – Begendeng;
26. ruas jalan Trayang –Kelutan;

27. ruas jalan Warujayeng – Jetis;
28. ruas jalan Warujayeng – Trayang;
29. ruas jalan Watudandang-Kelutan;
30. ruas jalan Wilangan - Bomo (Proliman);
31. ruas jalan Baron – Gareman;
32. ruas jalan Gajahbelor – Watudandang;
33. Jalan Supriadi;
34. ruas jalan Kandeg-Demangan;
35. ruas jalan Kandeg-Jekek;
36. ruas jalan Kedunglo –Tanjungtani;
37. ruas jalan Kelutan – Jabon;
38. ruas jalan Kudu – Ngrombot;
39. ruas jalan Kuncir – Pogoh;
40. ruas jalan Loceret-Ngepeh;
41. ruas jalan Mangunsari – Bajulan;
42. ruas jalan Ngepung-Babadan;
43. ruas jalan Ngrajeg – Ngujung;
44. ruas jalan Sekaran-Patihan;
45. ruas jalan Tamanan – Sambikerep;
46. ruas jalan Tanjungrejo-Sekaran;
47. ruas jalan Dukuhan-Tambak;
48. ruas jalan Bukur-Pakucen; dan
49. ruas jalan Kedung Ingas-Kedung Mlaten.

B. Jalan tol;

Jalan tol, terdiri atas:

1. ruas jalan Tol Ngawi-Kertosono;
2. ruas jalan Kertosono-Kediri; dan
3. ruas jalan Kertosono- Babat.

C. terminal penumpang;

Terminal penumpang terdiri atas :

1. Terminal penumpang tipe B Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk.

2. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ketosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Nganjuk.

D. Jembatan timbang

Jembatan timbang, terdapat di Kecamatan Bagor.

2. Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan kereta api terdiri atas:

1. jaringan jalur kereta api;
2. stasiun kereta api; dan
3. Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum
4. yaitu jaringan jalur kereta api antarkota jalur ganda Surabaya
5. Jember- Banyuwangi dan Bangil Malang-Blitar-Kertosono yang
6. melintasi di Kecamatan Wilangan-Kecamatan Bagor-Kecamatan
7. Nganjuk- Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Tanjunganom
8. Kecamatan Baron- Kecamatan Kertosono.
9. Stasiun kereta api berupa stasiun penumpang terdapat di
10. Kecamatan Nganjuk, di perbatasan Kecamatan Baron dan
11. Kecamatan Tanjunganom; Kecamatan Kertosono, Kecamatan
12. Bagor, Kecamatan Sukomoro dan di Kecamatan Wilangan.

3. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi meliputi :

1) Jaringan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yaitu yaitu jalur minyak dan gas

bumi yang melalui Kecamatan Kertosono-Kecamatan Baron-Kecamatan Tanjunganom- Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Nganjuk-Kecamatan Bagor- Kecamatan Wilangan-Kecamatan Rejoso-Kecamatan Gondang-Kecamatan Lengkong-Kecamatan Jatikalen

2) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas :

1. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, terdiri atas :
   a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Loceret.
   b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP) terdapat di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Rejoso.
2. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas :
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem terdiri atas :
      1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) terdapat di Kecamatan Ngronggot Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Bagor dan Kecamatan Wilangan; dan
      2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terdapat di Kecamatan Prambon, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Sawahan.
   b. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas :
      1) Saluran Udara Tengangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh kecamatan; dan
      2) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh kecamatan.

3) gardu induk terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Kertosono dan Kecamatan Nganjuk.

4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air meliputi:

1. Sistem jaringan irigasi;

   Jaringan irigasi primer terdiri atas :

   a. saluran primer Widas Utara di Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening;
   b. saluran primer Warujayeng-Kertosono (W-K) di Daerah Irigasi (D.I) Mrican Kiri;
   c. saluran primer Ngudikan Kiri dan Ngudikan Kanan di Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening; dan
   d. saluran primer Bulakmojo di Daerah Irigasi (D.I) Bulakmojo.
   e. jaringan irigasi sekunder dan tersier tersebar di seluruh kecamatan.

2. Sistem pengendalian banjir

   sistem pengendali banjir berupa bangunan pengendali banjir di Bendungan Semantok Kecamatan Rejoso, Bendungan Margopatut Kecamatan Sawahan, Dam Kuncir Kecamatan Ngetos dan Dam Malangsari Kecamatan Tanjunganom.

3. Bangunan sumber daya air.

   Bangunan sumber daya terdiri atas :

   1) bendungan, terdiri atas :
      (a). bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso; dan
      (b). bendungan Margopatut di Kecamatan Sawahan.
   2) embung terdiri atas :
      (a). embung Kulak Secang, embung Gondang (Pojok Dua) dan embung Joho, di Kecamatan Pace;

(b). embung Oro-oro Ombo, embung Suru dan Sekarlangit di Kecamatan Ngetos;
(c). embung Bajulan di Kecamatan Loceret; embung
(d). embung Estu Mulyo, embung Suwaru dan embung Klonggean di Kecamatan Sawahan.
(e). embung Tempuran dan embung Bajang Kecamatan Ngluyu;
(f). embung Bangle di Kecamatan Lengkong; dan
(g). embung Sumberurip di Kecamatan Berbek.

3) waduk, terdiri atas:
(a). waduk Mbah Irun atau Puhsalak, waduk Sumber Suko di Kecamatan Bagor;
(b). waduk Sumberkepuh, waduk Sumbersono dan waduk Logawe di Kecamatan Lengkong;
(c). waduk Kedungsengon dan waduk Kecamatan Gondang; Sumberagung
(d). waduk Perning di Kecamatan Jatikalen; dan
(e). waduk Manggarejo di Kecamatan Wilangan

5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:

A. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas kabupaten/kota dan Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten.

a. Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas kabupaten/kota terdiri atas :
1) Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Besar merupakan SPAM Regional Lintas Tengah memanfaatkan Sungai Brantas meliputi Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang;

2) Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Kecil terdiri atas :
   a) Kabupaten Madiun - Kabupaten Nganjuk; dan
   b) Kabupaten Kediri - Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Jombang.

b. Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten terdiri atas :
   1) jaringan perpipaan meliputi :
      a) unit air baku terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk;
      b) unit produksi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk;
      c) unit distribusi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk; dan
      d) unit pelayanan terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan,

Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk.

e) bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa terdapat di Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Berbek, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Baron, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Lengkong.

B. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), berupa system pengelolaan air limbah domestik yaitu Intalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terdapat di Kecamatan Pace.

C. Sistem Jaringan Persampahan.

Sistem jaringan persampahan terdiri atas :

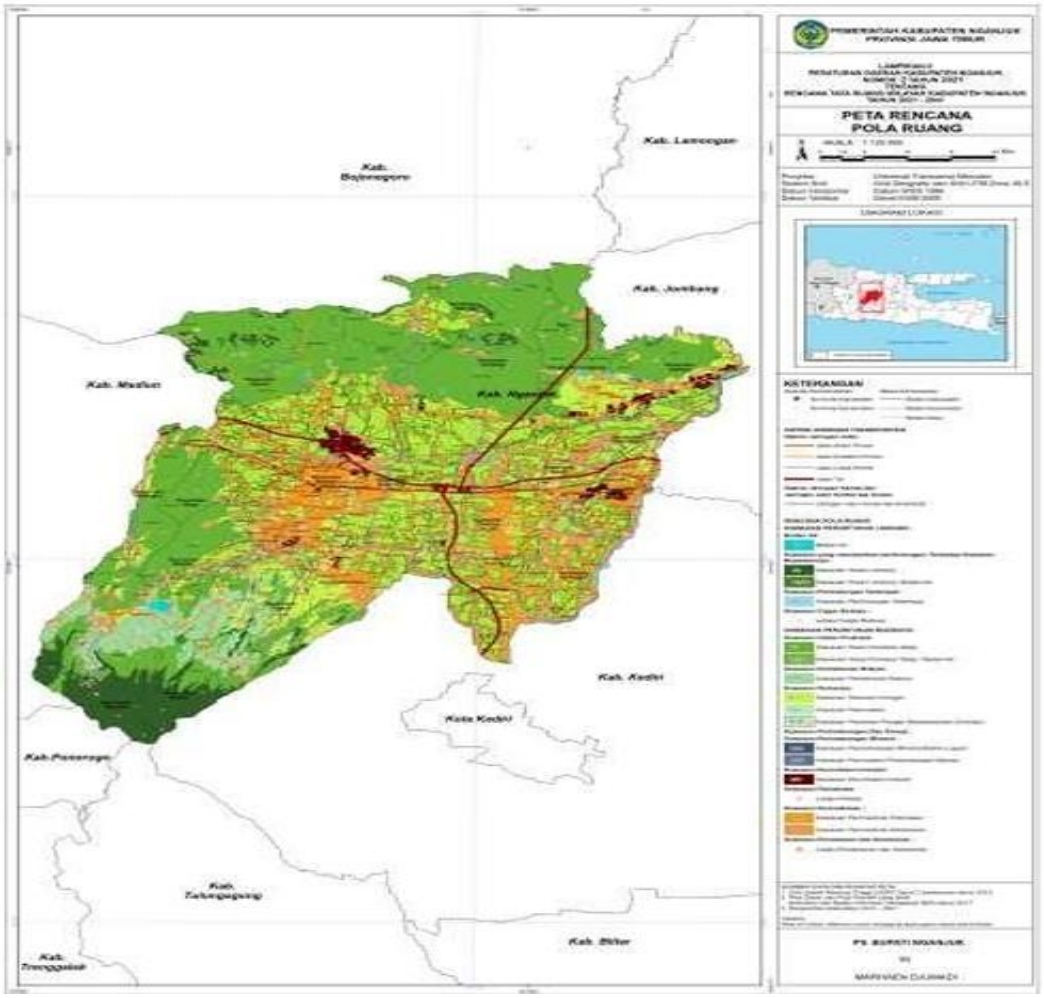
a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di Kecamatan Prambon.
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdapat di Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Pace, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Kertosono

D. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

Sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana banjir dari titik lokasi banjir melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
b. jalur evakuasi bencana bahaya cuaca ekstrim terdiri atas :
c. jalur evakusai bencana puting beliung dari titik lokasi puting beliung melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
d. jalur evakuasi bencana angin dari titik lokasi angin melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;

e. jalur evakusai bencana longsor dari titik lokasi longsor melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
f. jalur evakuasi bahaya bencana leletusan gunung berapi dari titik lokasi melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana
g. tempat evakuasi bencana sebagimana dimaksud pada huruf a, b dan c terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Pace dan Kecamatan Prambon; dan
h. tempat evakuasi bencana sebagaimana di tertulis pada huruf d terdapat di fasilitas umum kecuali sarana Pendidikan.



Gambar 2.43 Peta Rencana Pola Ruang
Sumber : Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021

1. Kawasan Budidaya

A. Kawasan hutan produksi meliputi

a. Kawasan Hutan Produksi Tetap

kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 42.324 Ha.

b. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Rejoso dengan luasan kurang lebih 428 Ha. Kawasan perkebunan rakyat terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan dengan luasan kurang lebih 5.000 Ha (lima ribu hektar).

B. Kawasan pertanian terdiri atas :

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 37.781 Ha dengan kawasan yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngluyu dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 27.542 Ha.

b. Kawasan Peternakan.

Kawasan peternakan terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Patianrowo dengan luasan kurang lebih 151 Ha.

B. Kawasan pertambangan dan energi, berupa kawasan pertambangan mineral terdiri atas :

a. kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Sawahan dengan luasan kurang lebih 50 Ha; dan

b. kawasan peruntukan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 104 Ha. Kawasan peruntukan industri terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Wilangan.dengan luasan kurang lebih 1.918 Ha.

C. Kawasan pariwisata terdiri atas :

a. Lokasi Pariwisata Alam

Lokasi pariwisata alam, terdiri atas :

1) Air terjun Sedudo, wisata Watu Lawang, agrowisata lingkar Gunung Wilis, air terjun Watu Lumbung, air terjun Banyu Anjlok, air terjun Selo Leter, wisata agroforestry, wisata alam Watu Belah, air terjun Singokromo, air terjun Gedangan, kebun mawar (Agrowisata Ganter), embung estumulyo, Bukit Persinggahan Jend. Sudirman (BPJS), wisata hutan Bambu, bukit batu Songgong, Petungulung Tubing Adventure dan Gua Ndalem Kebonagung di Kecamatan Sawahan;

2) Air Merambat Roro Kuning, air terjun Pring Jowo, pendakian Sekartaji, air terjun Coban Unut, pemandian Sri Tanjung Wisata Tirta, wisata Jolotundo, Gua Alap-alap dan Bukit Gua Dali Sumber Klampok di Kecamatan Loceret;
3) Air Terjun Ngebleng di Kecamatan Jatikalen;
4) Grojogan Dhuwur Sumbermiri di Kecamatan Lengkong.
5) Wisata bukit Salju, sumber mata air Banyu Towo, air terjun Coban Tretes dan air terjun Sumber Manik di Kecamatan Ngetos;
6) Gua Margo Tresno dan wisata watu Gandul di Kecamatan Ngluyu;
7) Gua dan Grojogan Putri ayu di Kecamatan Rejoso; dan
8) Lokasi pariwisata wisata alam lainnya yang terdapat di seluruh kecamatan.

b. lokasi pariwisata budaya

Lokasi pariwisata budaya terdiri atas:

1) Makam Kanjeng Djimat dan Masjid Al-Arfiyyah di Kecamatan Berbek;
2) Petilasan Gajah Mada di Kecamatan Kertosono;
3) Candi Lor, monumen DR. Soetomo, pura Kerta Bhuwana Giri Wilis, monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Gua Romusha di Kecamatan Loceret;
4) Gedung Juang 45, klenteng Hok Yoe Kiong dan museum Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk;
5) Makam Kyai Poleng, pertapaan Argojali, makam Sunan Ngatas Angin, kampung Mangga, candi Ngetos dan Makam Para Aulia Ngetos di Kecamatan Ngetos;
6) Makam Sono Gedong dan makam Rajeg Wesi di Kecamatan Ngluyu;
7) Makam Nyi Ageng Sepet dan makam Sentono Kacek di Kecamatan Pace;

8) Petilasan Kadipaten Posono, makam Tumenggung Kopek dan Masjid Pakuncen Kecamatan Patianrowo;
9) Situs Condrogeni, makam Ki Ageng Ngaliman, makam Gedhong Wetan, petilasan Watu Banteng, makam Eyang Kabul Misuwur, pertapaan Sadepok dan Makam Menteri Supeno di Kecamatan Sawahan;
10) Makam Keniten dan Padepokan Langen Tayub di Kecamatan Tanjunganom; dan
11) Makam Syech Sulukhi di Kecamatan Wilangan.

c. lokasi pariwisata buatan.

Lokasi pariwisata buatan terdapat di seluruh kecamatan.

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g terdiri atas:

a. Kawasan Permukiman Perkotaan
   Kawasan permukiman perkotaan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 12.010 Ha
b. kawasan permukiman perdesaan.
   Kawasan permukiman perdesaan terdapat di seluruh kecamatan direncanakan dengan luasan kurang lebih 17.888 Ha.

Kawasan Strategis

Kawasan Strategis yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

a. kawasan Agropolitan Selingkar Wilis meliputi Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan Kecamatan Berbek;
b. Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang;
c. kawasan industri meliputi Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Sukomoro;

d. kawasan pariwisata Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso;
e. kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan; dan
f. kawasan ekonomi cepat tumbuh di Kecamatan Pace.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menjelaskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk periode 2025–2029. Penyusunan Visi dan Misi dalam RPJMD ini merujuk pada visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih, **Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., S.H., M.M., M.B.A.,** dan **Trihandy Cahyo Saputro, S.T.,** yang secara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Februari 2025. Sebagai dokumen perencanaan strategis, RPJMD berfungsi sebagai panduan utama dalam mengarahkan pembangunan daerah agar selaras dengan janji politik kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, Visi, Misi, serta Program Kerja yang dirumuskan dalam RPJMD bukan hanya sekadar arah kebijakan, tetapi juga bentuk komitmen yang harus diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. Diharapkan, kebijakan ini dapat memastikan pembangunan daerah berlangsung secara terstruktur, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Visi dan misi yang telah dirumuskan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Nganjuk. Proses perumusan ini tidak hanya melibatkan analisis mendalam terhadap tantangan dan kebutuhan daerah, tetapi juga mengintegrasikan berbagai pendekatan berbasis data dan partisipasi pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang disusun tidak hanya bersifat responsif terhadap permasalahan aktual, tetapi juga mampu memberikan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Elaborasi antara gagasan dan komitmen Bupati serta Wakil Bupati terpilih dengan kondisi faktual permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis daerah menjadi aspek krusial dalam

penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025–2029. Dalam proses ini, keterlibatan berbagai elemen, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki daya dukung yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta koordinasi lintas sektor juga menjadi faktor utama dalam menjamin keselarasan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025–2029 disusun dengan tujuan utama untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan perencanaan yang berbasis bukti dan partisipatif, strategi serta arah kebijakan yang diimplementasikan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah dalam berbagai sektor. Dengan demikian, RPJMD ini menjadi instrumen utama dalam mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing di masa depan.

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

3.1.1.1. Visi Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nganjuk adalah: ***"Nganjuk Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan".***

Visi ini dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Nganjuk, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau

memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta hasil telaah terhadap Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk 2025–2045, dirumuskan sebuah visi pembangunan yang menggambarkan cita-cita masyarakat Kabupaten Nganjuk di masa depan. Cita-cita ini mencerminkan aspirasi untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, maju, adil, makmur, dan sejahtera dalam suatu tatanan sosial yang demokratis, religius, serta menjunjung tinggi nilai estetika dan prinsip keberlanjutan.

Tabel 3.1.
Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1.	Peningkatan Pendapatan Perkapita	1. PDRB per kapita (dalam ribu Rp)	32.062,8776	59.668,4720
		2. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	16,58-18,66	27,44-29,08
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	3. Tingkat Kemiskinan (%)	9,89-8,98	0,75-0,22
		4. Rasio Gini (Indeks)	0,32	0,31-0,30
		5. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1-5,2	5-5,6
3.	Peningkatan Daya Saing Daerah	6. Indeks Daya Saing Daerah	3,5	3,8
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat	7. Indeks Pembangunan Manusia	73,87	88,92
5.	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	8. Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO2Eq)	1.487.989,73	22.836.378,54
		9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,61	74,19

Sumber : RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

Dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi utama untuk mencapai Visi Kabupaten Nganjuk 2045 melalui 5 misi agenda pembangunan daerah, selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 42 indikator utama pembangunan.

Misi Agenda 1 **Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia unggul**
Pelayanan kesehatan kesehatan yang berkualitas dan terjamin bagi setiap penduduk
Peningkatan taraf pendidikan penduduk serta pendidikan yang inklusif dan adaptif
Percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan perlindungan penduduk rentan yang berkeadilan dan inklusif
Misi Agenda 2 **Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui integrasi ekonomi serta transformasi digital**
Pengembangan Iptek dan inovasi, serta percepatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan perkuatan struktur ekonomi daerah
Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang didukung pengelolaan kehutanan
Pengarusutamaan transformasi digital melalui pengembangan super platform, percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
Peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global
Pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
Misi Agenda 3 **Mewujudkan transformasi tata kelola untuk penguatan pemerintahan daerah yang berintegritas**
Penguatan regulasi taat asas dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima
Misi Agenda 4 **Memantapkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah**
Penegakan hukum daerah, peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, serta hak politik local
Stabilitas ekonomi makro daerah
Daya saing investasi daerah

Misi Agenda 5 **Memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan**
Penguatan peran agama untuk kemaslahatan masyarakat dan pemajuan kebudayaan
Peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Peningkatan ketahanan air dan pemenuhan kebutuhan pangan
Peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan ikllim

Sumber : RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, perumusan kebijakan perencanaan jangka menengah RPJMD dimaksud memperhatikan fokus arah kebijakan Tahap I RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Arah Kebijakan dan Pembangunan Tahap I
RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

Tahap I : Penguatan Pondasi Transformasi	
Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan Kualitas SDM
Transformasi Ekonomi	Hilirisasi sumberdaya alam unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemenuhan akses digital, pertumbuhan ekonomi kota dengan didukung kemandirian desa dan peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi yang adil dan merata melalui pemenuhan dan pemanfaatan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan

Transformasi Tata Kelola	Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan dinamis
Keamanan Daerah, Demokrasi, dan Stabilitas	Memperkuat ketenteraman,ketertiban dan perlindungan masyarakat, politik dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.
Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasandan modal dasar pembangunan

Sumber : RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk.

Visi dan Misi yang ditetapkan dalam dokumen ini berperan sebagai fondasi utama dalam menentukan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, visi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing, sehingga Kabupaten Nganjuk dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Visi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah :

> *Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat*

Visi tersebut mengandung 3 (empat) pokok visi yang merupakan gambaran atas kondisi Kabupaten Nganjuk yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu ***"Maju"***, ***"Sejahtera"***, dan **Bermartabat**".



Secara substansi, penjelasan dari ketiga pokok visi antara lain sebagai berikut:

1. Konsep "**Maju**" dalam visi ini menggambarkan kondisi masyarakat yang maju dimana masyarakat yang maju adalah mereka yang berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Mereka memiliki akses luas terhadap pendidikan dan teknologi, memungkinkan mereka untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas hidup. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi, dan layanan digital, mendukung aktivitas ekonomi dan keseharian mereka, sementara pemerintahan yang transparan serta partisipatif memastikan kebijakan yang berpihak pada kemajuan bersama. Selain itu, nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan tetap dijaga, menciptakan keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan. Dengan masyarakat yang produktif, kreatif, dan terbuka terhadap perubahan, kemajuan

tidak hanya tercermin dalam aspek material, tetapi juga dalam pola pikir dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

2. Pokok visi "**Sejahtera**" . Masyarakat sejahtera adalah komunitas yang hidup dalam keseimbangan antara ekonomi yang stabil, sosial yang harmonis, serta lingkungan yang lestari. Setiap individu memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, serta lapangan pekerjaan yang layak, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan nyaman. Kehidupan sosial diwarnai dengan rasa kebersamaan dan gotong royong, menciptakan lingkungan yang aman dan saling mendukung. Pemerintah yang transparan dan partisipatif memastikan setiap warga dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain itu, kesadaran akan keberlanjutan lingkungan menjadikan masyarakat lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam, menjaga kebersihan, dan menciptakan ruang hidup yang sehat. Dengan keseimbangan ini, masyarakat tidak hanya mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pokok visi **“bermartabat”** masyarakat yang bermartabat adalah menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap individu dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang bermartabat memiliki nilai-nilai etika, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga tercipta lingkungan yang inklusif dan harmonis. Selain itu, pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya dan moral, membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dengan penuh

martabat, memiliki kemandirian, serta mampu menghadapi tantangan masa depan dengan kesiapan dan optimisme.

3.1.1.2. Misi Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Nganjuk sebagai disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.1. Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk



Secara lebih detil, penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut.

1. Misi **"Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban**". Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera", dan " Bermartabat". Misi pembangunan "Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan MYE, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban" bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkembang secara seimbang, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Masyarakat yang dinamis berarti mereka yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan, berinovasi, dan mampu

beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri. Harmoni dalam kehidupan sosial diwujudkan melalui sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga hubungan yang baik antarindividu maupun kelompok. Landasan spiritual dalam pembangunan, yang berakar pada nilai-nilai Ketuhanan MYE, memberikan arah moral bagi masyarakat agar setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada keadilan, etika, serta kesejahteraan bersama. Selain itu, pembangunan ini juga berupaya memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini dicapai melalui sistem hukum yang adil, kebijakan yang inklusif, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik atau ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat yang berbudaya, religius, dan harmonis dalam kehidupan bersama.

2. Misi "**Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan".** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Maju", "Sejahtera", dan "Bermartabat".Birokrasi yang bersih menekankan pada pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga seluruh kebijakan dan layanan publik dapat berjalan dengan jujur dan berintegritas. Profesionalisme dalam birokrasi berarti setiap aparatur negara memiliki kompetensi yang tinggi, bekerja sesuai dengan standar yang jelas, serta mampu memberikan layanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan dan penggunaan anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat. Dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, pemerintahan harus

aspiratif, yakni mendengarkan dan memahami kebutuhan serta harapan masyarakat sebelum merumuskan kebijakan. Selain itu, pemerintahan yang partisipatif membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan. Transparansi juga menjadi aspek penting, di mana seluruh informasi terkait kebijakan, anggaran, dan capaian pembangunan harus mudah diakses oleh publik guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel, serta didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan, pembangunan di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Misi "**Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan**". Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok "Maju", "Sejahtera" dan "Bermartabat". Misi ini bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai dan berkualitas, seperti jalan, jembatan, transportasi, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, merupakan faktor utama dalam meningkatkan konektivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Percepatan pembangunan infrastruktur memungkinkan peningkatan aksesibilitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Infrastruktur yang baik juga meningkatkan efisiensi layanan publik, memastikan masyarakat dapat mengakses fasilitas umum dengan lebih mudah dan nyaman. Namun, percepatan pembangunan ini harus tetap memperhatikan **kelestarian lingkungan** agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan, perlu diterapkan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, serta perlindungan terhadap sumber daya alam. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tetap harmonis dengan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun yang akan datang.

4. Misi "**Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas".** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Maju" , "Sejahtera", dan "Bermartabat". berfokus pada pengembangan manusia sebagai aset utama dalam kemajuan daerah. Dalam bidang **pendidikan**, peningkatan kualitas meliputi penyediaan fasilitas belajar yang lebih baik, peningkatan kompetensi guru, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan individu yang cerdas, inovatif, dan siap bersaing di dunia kerja. Sementara dalam bidang **kesehatan**, pelayanan yang bermutu mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang profesional, serta akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan merata. Kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sinergi antara pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, masyarakat dapat berkembang secara optimal, baik dari segi intelektual maupun fisik. Hal ini akan menciptakan **sumber daya manusia yang unggul**, produktif, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
5. Misi "**Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal**". Misi ini sesuai dengan visi "Maju" dan "Sejahtera". Misi pembangunan ini menekankan peran aktif pemerintah dalam mendukung sektor ekonomi yang berbasis pada kekuatan masyarakat, terutama dalam bidang pertanian dan sumber daya

lokal. Dalam konteks pertanian, misi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang berpihak pada mereka, seperti penyediaan akses permodalan, distribusi pupuk dan benih berkualitas, serta pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani. Selain itu, pendampingan teknologi pertanian dan pelatihan bagi petani juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya saing hasil pertanian di pasar. Di sisi lain, pengembangan potensi lokal mencakup pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis pada kekayaan sumber daya daerah, seperti produk olahan hasil pertanian, kerajinan tangan, atau pariwisata berbasis kearifan lokal. Dengan dukungan kebijakan yang pro-rakyat, seperti kemudahan perizinan usaha, akses pasar, serta pelatihan keterampilan, ekonomi lokal dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Melalui keberpihakan pemerintah yang nyata dalam bentuk regulasi, bantuan, dan fasilitasi, ekonomi kerakyatan dapat berkembang lebih mandiri dan berdaya saing, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

6. Misi pembangunan " **Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna** " bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi wisata dan sektor produktif lainnya secara lebih efisien dan inovatif. Misi ini sesuai dengan visi “Maju” , “Sejahtera”, dan “Bermartabat”. Dalam sektor pariwisata, pembangunan diarahkan pada pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan infrastruktur pendukung, serta promosi yang lebih luas untuk menarik wisatawan. Selain itu, pemanfaatan teknologi, seperti digital marketing dan sistem reservasi online, dapat meningkatkan daya saing pariwisata daerah di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, dalam sektor produktif lainnya, seperti industri kreatif, pertanian, dan perdagangan, penerapan teknologi tepat guna

menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Teknologi ini mencakup mesin-mesin produksi modern yang hemat energi, sistem irigasi cerdas untuk pertanian, serta platform digital untuk mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan pendekatan ini, sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya dapat berkembang lebih pesat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

7. Misi pembangunan "**Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal**" bertujuan untuk melestarikan serta mengangkat nilai-nilai budaya daerah agar tetap hidup dan dihargai oleh masyarakat, terutama di tengah arus modernisasi. Misi ini merujuk pada visi "Sejahtera" dan "Bermartabat" Kesenian dan kebudayaan lokal merupakan identitas yang mencerminkan karakter suatu daerah. Oleh karena itu, upaya pelestarian dapat dilakukan melalui pendidikan budaya sejak dini, penyelenggaraan festival seni, serta dukungan terhadap para seniman dan budayawan agar tetap berkarya. Selain itu, promosi budaya melalui media digital dan platform wisata juga dapat meningkatkan daya tarik daerah bagi wisatawan serta memperkenalkan warisan budaya ke tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, kearifan lokal yang mencakup tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial harus terus dipertahankan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menjaga praktik-praktik budaya yang mencerminkan kearifan leluhur, seperti dalam tata cara bertani, pengelolaan lingkungan, maupun kehidupan sosial yang berbasis gotong royong. Dengan meningkatnya kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan, dan kearifan lokal, masyarakat tidak hanya menjaga warisan leluhur tetapi juga dapat menjadikannya sebagai potensi ekonomi, misalnya melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis

budaya. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara kemajuan zaman dengan pelestarian identitas daerah.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 menetapkan misi pembangunan daerah sebagai prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk. Prioritas pembangunan daerah tersebut merupakan pedoman penyusunan sasaran, arah kebijakan, rencana kerja dan penganggaran daerah di setiap Perangkat Daerah, termasuk penjabaran Program Unggulan Kepala Daerah dalam Program Prioritas RPJMD.

Setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah tahun 2025-2029. Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) Nganjuk sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 1
   Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban.
2. Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 2
   Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 3
   Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 4
   Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

5. Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 5

   Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal.

6. Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 6

   Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna.

7. Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 7

   Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal.

Prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Nganjuk disusun dengan memadupadankan agenda transformasi RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045. Relevansi prioritas pembangunan daerah dan strategi transformasi RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan transformatif untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk Sejahtera 2045.

Tabel 3.3.
Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan
RPJPD Tahun 2025-2045

RPJMD 2025-2029	Arah Pembangunan RPJPD 2025-2045	Agenda Pembangunan RPJPD 2025-2045
Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 1, Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban	Penegakan hukum daerah, peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, serta hak politik lokal (10)	Memantapkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 2, Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan	Penguatan regulasi taat asas dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (9)	Mewujudkan transformasi tata kelola untuk penguatan pemerintahan daerah yang berintegritas
	Stabilitas ekonomi makro daerah (11)	Memantapkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan

RPJMD 2025-2029	Arah Pembangunan RPJPD 2025-2045	Agenda Pembangunan RPJPD 2025-2045
pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan		stabilitas ekonomi makro daerah
Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 3, Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup (15)	Memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan
	Peningkatan ketahanan air dan pemenuhan kebutuhan pangan (16)	
	Peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan ikllim (17)	
Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 4, Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas	Pelayanan kesehatan kesehatan yang berkualitas dan terjamin bagi setiap penduduk (1)	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang unggul
	Peningkatan taraf pendidikan penduduk serta pendidikan yang inklusif dan adaptif (2)	
	Percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan perlindungan penduduk rentan yang berkeadilan dan inklusif (3)	
	Peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif (14)	Memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan
Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 5, Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal	Pengembangan Iptek dan inovasi, serta percepatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan perkuatan struktur ekonomi daerah (4)	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui integrasi ekonomi serta transformasi digital
Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 6, Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang didukung pengelolaan kehutanan (5)	

RPJMD 2025-2029	Arah Pembangunan RPJPD 2025-2045	Agenda Pembangunan RPJPD 2025-2045
produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna	Pengarusutamaan transformasi digital melalui pengembangan super platform, percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital (6)	
	Peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global (7)	
	Pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (8)	
	Daya saing investasi daerah (12)	Memantapkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) 7, Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal	Penguatan peran agama untuk kemaslahatan masyarakat dan pemajuan kebudayaan (13)	Memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan

Sumber: RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, Analisis 2025

3.1.2.Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di selanjutnya diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah. Setiap visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan harus dijabarkan secara konkret dalam bentuk tujuan yang jelas serta sasaran yang terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Tujuan pembangunan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode tertentu, sedangkan sasaran pembangunan merupakan

indikator keberhasilan dari setiap tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap tujuan dan sasaran harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk potensi daerah, kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses pembangunan.

Secara lebih rinci, perumusan Tujuan dan Sasaran yang berlandaskan pada setiap misi dapat dilihat dalam pemaparan berikut. Setiap misi akan diuraikan dalam bentuk kebijakan dan program prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan memiliki arah yang jelas, berbasis pada data dan analisis yang komprehensif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3.1.2.1. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

Pada Misi satu, dijabarkan ke dalam satu tujuan dan satu sasaran. Pembangunan di Kabupaten Nganjuk didasarkan pada visi yang mengedepankan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu misi utama yang diusung adalah "MISI-1," yang bertujuan "**Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran"**. Misi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara dinamika sosial dan stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dalam kehidupan sosial, dan budaya.

Dalam konteks ini, dinamika sosial yang diharapkan mencerminkan masyarakat yang aktif, inovatif, dan partisipatif dalam pembangunan daerah, sementara harmonisasi kehidupan sosial menekankan aspek kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya menciptakan masyarakat yang tidak hanya berkembang dalam aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai manifestasi dari misi ini, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat tetap terjaga. Pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bermoral, memiliki solidaritas tinggi, serta menjunjung tinggi norma dan etika sosial yang berlaku. Tujuan ini diukur dengan Indeks Kesalehan Sosial.

Untuk mengukur keberhasilan misi dan tujuan ini, terdapat satu sasaran yang ingin dicapai, yakni **"Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat"**. Hal ini mencakup upaya menciptakan lingkungan sosial yang stabil, minim konflik, dan mendorong toleransi antarwarga. Dalam praktiknya, pemerintah dapat menjalankan berbagai program seperti penguatan lembaga adat, penyuluhan tentang pentingnya toleransi dan keberagaman, serta kebijakan yang mendukung inklusivitas sosial. Pada sasaran ini juga mengupayakan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk mendukung terwujudnya masyarakat harmonis. Sasaran ini diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Secara keseluruhan, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Pembangunan yang berbasis nilai-nilai Ketuhanan tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip moral dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan Kabupaten Nganjuk dapat berkembang menjadi daerah yang maju dan berdaya saing, namun tetap mempertahankan identitas sosial dan budaya yang menjadi ciri khasnya.

3.1.2.2. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 2

MISI-2 berfokus pada peningkatan kinerja birokrasi. Misi ini bertujuan "Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik". Tujuan ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Kabupaten Nganjuk menekankan prinsip aspiratif, partisipatif, dan transparan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, serta memastikan bahwa pemerintah bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Tata kelola pemerintahan yang baik akan berdampak langsung pada efisiensi administrasi, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari birokrasi yang lebih responsif, cepat, dan inovatif dalam menangani berbagai kebutuhan mereka.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran pembangunan. Sasaran Pertama, **"Meningkatnya kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)"**, yang diukur melalui Nilai Sistem Merit. Hal ini penting agar birokrasi memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan. Sasaran Kedua, **"Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah"**, yang diukur melalui Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran ini memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan.

Sasaran Ketiga, "**Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas"**. Sasaran ini diukur dengan indeks Integritas Pemerintah Daerah dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Integritas menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan publik serta pencegahan praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Sasaran Keempat, **"Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah"**. Sasaran ini diukur dengan Indeks

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rasio kapasitas fiskal daerah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, serta berdaya saing

Sasaran Kelima, **"Meningkatnya kualitas layanan publik"**. Sasaran ini diukur melalui Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik. Dengan sasaran ini, pemerintah daerah menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan yang langsung dirasakan masyarakat.

Sasaran Keenam adalah **"Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah"**, yang diukur melalui Indeks Pemerintah Digital. Transformasi digital menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan pencapaian seluruh sasaran tersebut, Misi 2 diharapkan mampu mewujudkan birokrasi Kabupaten Nganjuk yang bersih, profesional, akuntabel, serta berintegritas, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

3.1.2.3. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

MISI-3 berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur publik. Infrastruktur yang memadai dan berkualitas menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya pembangunan yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Artinya, dalam setiap pembangunan infrastruktur, harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat untuk jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Tujuan utama dari misi ini adalah "**Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan"**. Tujuan ini diukur dengan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur. Infrastruktur yang handal mencerminkan fasilitas publik yang berkualitas, tahan lama, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Infrastruktur yang berkelanjutan berarti bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem yang ada.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran pembangunan. Sasaran Pertama, **"Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal"**. Sasaran ini diukur melalui indikator Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota serta rasio konektivitas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan infrastruktur transportasi yang dapat mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.

Sasaran Kedua, **"Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan"**. Sasaran ini diukur melalui indikator persentase rumah tangga dengan akses pada hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan akses terhadap perumahan yang memadai, masyarakat diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik serta lingkungan pemukiman yang sehat.

Sasaran Ketiga, **"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup"**. Sasaran ini tercermin melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Hal tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan kelestarian lingkungan, sehingga pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan kualitas ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

Sasaran Keempat adalah **"Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana"**. Sasaran ini diukur dengan Indeks Risiko Bencana. Kabupaten Nganjuk, seperti banyak daerah lain di Indonesia, berisiko menghadapi berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Program seperti pelatihan mitigasi bencana, peningkatan infrastruktur tahan bencana, serta penyediaan sistem peringatan dini menjadi bagian dari strategi yang diterapkan

Secara keseluruhan, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan ini menegaskan komitmen Kabupaten Nganjuk dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya infrastruktur yang handal dan berkelanjutan, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam hal aksesibilitas, efisiensi ekonomi, serta kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan kemajuan daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

3.1.2.4. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 4

Pembangunan di Kabupaten Nganjuk memiliki visi yang kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, **MISI-4** difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas layanan di sektor-sektor tersebut agar mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan zaman. Pendidikan yang baik akan menciptakan generasi yang cerdas dan produktif, sementara layanan kesehatan yang optimal akan memastikan masyarakat tetap sehat dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, peningkatan daya beli

masyarakat juga menjadi perhatian utama, karena kesejahteraan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup.

Sejalan dengan misi ini, Tujuan Pertama adalah untuk "**Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas"**. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sejumlah sasaran yang harus diwujudkan secara terintegrasi. Sasaran Pertama, **"Meningkatnya akses dan mutu pendidikan"**. Sasaran ini diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan lama Sekolah. Pendidikan yang bermutu akan melahirkan generasi cerdas, kritis, dan produktif. Sasaran Kedua adalah **"Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat"**. Sasaran ini diukur dengan Usia Harapan hidup. Pelayanan kesehatan yang baik akan menjamin terwujudnya masyarakat yang sehat dan berdaya. Pada saat yang sama, didukung dengan peningkatan daya beli masyarakat juga harus mendapat perhatian agar kesejahteraan dan kualitas hidup dapat terus meningkat.

Sasaran Ketiga, **"Meningkatnya kesetaraan gender"**. Sasaran ini diukur dengan Indeks Ketimpangan Gender. pembangunan manusia tidak boleh terlepas dari aspek keadilan dan perlindungan. Oleh karena itu, peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak menjadi sasaran strategis yang harus diwujudkan. Perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan perlu mendapatkan perlindungan yang memadai agar dapat tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan

Sasaran Keempat adalah **"Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga"**. sasaran ini diukur dengan Indeks Pembangunan Keluarga. peningkatan kualitas pembangunan keluarga menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera akan menjadi basis utama dalam mencetak generasi yang berkualitas. Dengan pembangunan keluarga yang baik, diharapkan akan tercipta masyarakat yang kuat, berkarakter, dan siap menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang

Sasaran kelima adalah **"Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga**". Sasaran ini diukur dengan Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga. pembangunan sumber daya manusia juga diarahkan pada peningkatan prestasi pemuda dan olahraga. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa perlu diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan positif, termasuk dalam bidang olahraga. Prestasi olahraga tidak hanya membangun kebanggaan daerah, tetapi juga memperkuat disiplin, sportivitas, dan kesehatan generasi muda

Sasaran keenam adalah **"Meningkatnya literasi masyarakat**". Sasaran ini diukur dengan indeks pembangunan literasi. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi digital, finansial, serta literasi sosial yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan global.

Tujuan kedua adalah **"Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan".** Untuk mengukur tujuan dimaksud menggunakan Tingkat Kemiskinan dan Gini ratio. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat beberapa sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Sasaran Pertama, "**Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif"**. Sasaran ini diukur dengan indeks kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang dirancang dengan baik akan menjadi bantalan (social safety net) yang mampu menjaga masyarakat dari berbagai risiko, baik akibat guncangan ekonomi, bencana alam, maupun perubahan sosial lainnya. Sistem perlindungan sosial yang adaptif diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi kelompok rentan, serta menjaga daya beli masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Sasaran Kedua, "**Meningkatnya kemandirian desa"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Desa. Sasaran ini menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat, di mana masyarakat

tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunan di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Pada saat yang sama, penguatan kemandirian desa menjadi prioritas agar desa mampu mengelola potensi yang dimiliki secara optimal, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan baru, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan dan memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Secara keseluruhan, pembangunan Kabupaten Nganjuk melalui **MISI-4** diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, dan berpendidikan dengan menjamin akses yang adil bagi semua kalangan. Dengan SDM yang berkualitas dan sistem jaminan sosial yang kuat, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Beriringan dengan terwujudnya SDM yang berkualitas, pemerintah juga berupaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan diharap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk dapat tercapai dan terus berkembang menjadi daerah yang maju dan inklusif.

3.1.2.5. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 5

Pembangunan Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi dengan menitikberatkan pada potensi lokal dan pertanian sebagai fondasi utama. Misi pembangunan ini adalah Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal**.** Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan yang lebih besar terhadap sektor pertanian dan usaha berbasis sumber daya lokal guna menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Langkah ini mencerminkan komitmen untuk memberdayakan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil, agar mereka

dapat lebih berkembang dan berdaya saing dalam perekonomian daerah.

Sejalan dengan misi tersebut, tujuan dari misi ini adalah **"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif"**. Tujuan ini diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud bukan hanya ditunjukkan oleh peningkatan angka PDRB, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperluas akses terhadap peluang usaha, dan memperkuat basis ekonomi kerakyatan sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih adil dan merata.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis. Sasaran Pertama, **"Meningkatnya nilai tambah pertanian"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Pertumbuhan PRDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dilakukan melalui modernisasi teknologi, penguatan rantai pasok, dan diversifikasi produk olahan sehingga pendapatan petani dan nelayan dapat meningkat. Sasaran Kedua, '**Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Nilai tambah perindustrian dan perdagangan dilakukan dengan mendorong industri pengolahan berbasis potensi lokal, memperluas akses distribusi, serta memanfaatkan teknologi digital agar produk daerah dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Sasaran Ketiga, **"Meningkatnya investasi daerah"**. Sasaran ini diukur dengan indikator nilai investasi. Peningkatan investasi daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur, dan promosi potensi unggulan daerah,

sehingga arus modal yang masuk dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kapasitas produksi daerah.

Sasaran Keempat, **"Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase peningkatan volume usaha mikro dan Persentase peningkatan koperasi berkualitas. Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro melalui perbaikan kelembagaan, akses permodalan, serta digitalisasi usaha agar koperasi dan UMKMK mampu menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, dukungan terhadap koperasi merah putih yang merupakan arahan dari pemerintah pusat tetap dilaksanakan. Pemerintah daerah berupaya memperkuat peran koperasi dan usaha mikro agar lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan pasar. Dengan adanya dukungan terhadap usaha kecil dan koperasi, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sasaran Kelima, **"Menurunnya pengangguran terbuka"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Menurunnya pengangguran terbuka dengan memperluas kesempatan kerja melalui sektor-sektor produktif, khususnya pertanian, perikanan, perdagangan, industri, pariwisata serta UMKMK. Sasaran Keenam, **"Meningkatnya ketahanan pangan daerah"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah. Meningkatnya ketahanan pangan daerah dilakukan melalui peningkatan produksi, pengendalian distribusi dan harga, serta penyediaan cadangan pangan strategis agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Secara keseluruhan, strategi pembangunan Kabupaten Nganjuk melalui penguatan ekonomi berbasis pertanian dan potensi lokal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Dengan dukungan pemerintah yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, diharapkan Nganjuk dapat berkembang menjadi daerah

yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

3.1.2.6. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 6

Misi 6 terdiri dari satu tujuan dan satu sasaran. Pembangunan Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk mendorong sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Misi pembangunan ini adalah Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna. Dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan potensi wisata serta mendukung sektor produktif lainnya seperti industri kreatif, pertanian, dan usaha mikro. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Misi 6 sangat terkait dengan Misi 5 Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal. Sektor pariwisata merupakan salah satu pendukung ekonomi kerakyatan dengan potensi lokal Kabupaten Nganjuk. Maka tujuan yang ingin dicapai pada Misi 6 berkontribusi terhadap tujuan **"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif".** Bersinergi dengan sasaran pada misi 5, sasaran pada misi ke 6 adalah **"Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata"** yang diukur dengan indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. Peningkatan nilai tambah ini dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata yang lebih menarik, peningkatan fasilitas, serta promosi wisata yang lebih luas dan efektif. Dengan strategi ini, Kabupaten Nganjuk berupaya meningkatkan daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar.

Penguatan sektor pariwisata tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur wisata, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini.

Secara keseluruhan, strategi pembangunan Kabupaten Nganjuk dalam sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pemanfaatan teknologi tepat guna serta penguatan sektor pariwisata, Kabupaten Nganjuk berupaya menjadi destinasi wisata unggulan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara luas.

3.1.2.7. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 7

Di dalam misi 7 (Tujuh) ini terdiri dari satu tujuan dan satu sasaran. Misi ke 7 bersinergi dengan Misi 1 mempunyai 1 tujuan yaitu **"Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran"**. Untuk Misi 7 hanya didukung sasaran **"Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah"**, sasaran ini diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan. Misi utama yang diusung dalam pembangunan ini adalah meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap kesenian, kebudayaan, dan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat identitas budaya masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan meningkatnya kebanggaan terhadap budaya lokal, diharapkan masyarakat lebih sadar akan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas daerah mereka, serta memiliki keinginan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

Berdasarkan misi tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah memajukan kebudayaan daerah. Upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelestarian seni tradisional, peningkatan kualitas dan eksistensi budaya lokal di tingkat nasional maupun internasional, hingga penguatan peran budaya dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kemajuan kebudayaan daerah juga bisa dicapai melalui berbagai program seperti festival budaya, revitalisasi seni tradisional, edukasi budaya di sekolah, serta pembinaan bagi seniman dan pelaku budaya agar mereka terus berkarya dan memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda.

Sasaran konkret dari tujuan ini adalah meningkatnya pelestarian budaya lokal. Pelestarian ini tidak hanya terbatas pada aspek kesenian dan adat istiadat, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap benda cagar budaya, situs bersejarah, serta tradisi lisan yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Pemerintah daerah dapat berperan dalam menyediakan regulasi, pendanaan, serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan budaya lokal. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi strategi penting dalam mendokumentasikan dan mempromosikan kebudayaan daerah agar lebih dikenal luas oleh masyarakat global.

Secara keseluruhan, strategi pembangunan ini bertujuan untuk menjadikan budaya sebagai salah satu pilar utama dalam memperkuat identitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebanggaan terhadap budaya lokal, masyarakat akan semakin terdorong untuk melestarikan warisan leluhur mereka. Peningkatan kualitas dan daya saing budaya daerah juga akan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menciptakan peluang usaha berbasis budaya, serta memperkuat posisi Kabupaten Nganjuk sebagai daerah yang kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal.

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Visi dan Misi, serta Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran		Indeks Kesalehan Sosial
				Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
2.		Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Nilai Sistem Merit
				Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
				Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas	Indeks Integritas Pemerintah Daerah
					Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
				Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
					Rasio kapasitas fiskal daerah
				Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik
				Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah	Indeks Pemerintah Digital
3.		Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
				Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	Tingkat kemantapan jalan daerah
					Rasio Konektivitas
				Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
				Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana
4.		Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		manusia yang berkualitas			
				Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah
					Harapan Lama Sekolah
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender
				Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)
				Meningkatnya prestasi pemuda dan Olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
				Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat
			Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan		Tingkat Kemiskinan
					Gini Ratio
				Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa
5.		Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		Pertumbuhan Ekonomi
				Meningkatnya nilai tambah pertanian	Pertumbuhan PRDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
				Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan
					Rasio PDRB

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
					Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
				Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi
				Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro	Persentase peningkatan volume usaha mikro
					Persentase peningkatan koperasi berkualitas
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
				Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan
6.		Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna		Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
7.		Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal		Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan

Setelah perumusan Tujuan dan Sasaran berdasarkan Misi RPJMD, maka tahap selanjutnya adalah penetapan cascading tujuan dan sasaran RPJMD, serta indikator kinerja dan targetnya selama periode perencanaan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat - Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban - Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran		Indeks Kesalehan Sosial (Indeks)	91,006	91,448	92,131	92,814	93,497	94,18	94,863	
		Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	79,24	79,29	79,34	79,39	79,44	79,50	79,55	
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	62,41	65,73	68,54	71,68	74,11	77,27	79,98	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
yang aspiratif, partisipatif dan transparan - Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan - Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas - Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis		Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	60,55	60,70	60,90	61,10	61,30	61,50	61,70	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	84,05	84,35	84,65	84,95	85,25	85,55	85,85	
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Nilai Sistem Merit (Nilai)	260	280	285	290	300	320	325	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)	3,224	3,327	3,430	3,45	3,5	3,6	3,7	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	70,07	72	73	76	79	80	80,01	
		Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas	Indeks Integritas Pemerintah Daerah (Indeks)	68,56	69	70	71	73	75	78	
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,19	3,200	3,210	3,230	3,250	3,260	3,270	
		Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	70,729	70,812	70,941	71,076	71,198	71,267	71,386	
			Rasio kapasitas fiskal daerah (Rasio)	1,095	1,124	1,137	1,150	1,163	1,176	1,189	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
pertanian dan potensi lokal - Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna - Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan local		Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,57	4,58	4,59	4,61	4,62	4,63	4,66	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	87,29	87,6	88	88,4	88,8	89,2	89,5	
		Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	1,5	1,5	1,75	1,85	2,00	2,15	2,25	
	Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)	79	80	81	82	83	84	85	
		Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	68,214	70,05	72,35	74,31	76,28	78,25	80,22	
			Rasio Konektivitas (Rasio)	0,2	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	
		Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	74,49	74,50	74,51	74,52	74,53	74,54	74,55	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	69,07	72,61	72,69	72,77	72,84	72,92	73,00	
		Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	112,14	105,02	104,59	103,48	101,14	99,51	99,06	
	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	75,24	75,92	76,58	77,24	77,89	78,55	78,81	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,25	8,40	8,56	8,71	8,86	9,01	9,17	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,18	13,19	13,21	13,28	13,37	13,43	13,47	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,64	74,76	75,01	75,27	75,53	75,78	76,04	
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,351	0,354	0,340	0,335	0,332	0,325	0,325	
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)	65,94	65,95	65,96	65,97	65,98	65,99	66,00	
		Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga (%)	0,96	1,05	1,11	1,15	1,18	1,22	1,26	
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	42,08	60,11	60,20	60,25	60,30	60,35	60,40	
	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan		Tingkat Kemiskinan (%)	10,17	10,16	9,90	9,63	9,37	9,10	8,83	
			Rasio Gini (Indeks)	0,289	0,288	0,287	0,286	0,285	0,284	0,283	
		Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	62,61	62,67	62,73	62,79	62,85	62,91	62,97	
		Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa (Indeks)	0,78191	0,781	0,7812	0,7814	0,7816	0,7818	0,782	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,93	4,98	5,02	5,49	5,69	5,89	6,09	
		Meningkatnya nilai tambah pertanian	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1,57	1,98	2,05	2,13	2,21	2,28	2,36	
		Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,92	16,27	16,61	16,96	17,30	17,65	17,71	
			Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20,53	20,54	20,55	20,57	20,60	20,62	20,64	
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi (Rp)	1.359.191.202.844	1.102.000.000.000	1.157.000.000.000	1.203.000.000.000	1.239.090.000.000	1.276.000.000.000	1.314.550.581.000	
		Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro	Persentase peningkatan volume usaha mikro (%)	2	3	4	5	6	7	8	
			Persentase peningkatan koperasi berkualitas (%)	73	74	75,20	76,30	77,40	78,50	79,60	
		Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,87	3,77	3,59	3,36	3,13	2,93	2,90	
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	71,42	73,66	75,21	76,75	77,27	78,05	78,57	
		Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,05	2,08	2,12	2,16	2,20	2,24	2,28	

Keterangan: Target kinerja di tahun 2030 merupakan tanggungjawab / kinerja dari kepala daerah selanjutnya

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sangat bergantung pada efektivitas implementasi strategi, penetapan arah kebijakan, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Strategi pembangunan berfungsi sebagai rencana tindakan yang komprehensif, mencakup berbagai langkah dan upaya yang akan dilakukan guna mengoptimalkan sumber daya, menentukan tahapan, menetapkan lokus, serta mengidentifikasi program prioritas dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah. Dengan strategi yang tepat, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai secara berkelanjutan dan terarah.

Strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah, yang merupakan proses pentahapan pembangunan berdasarkan prioritas tahunan guna memastikan pencapaian tujuan kepala daerah. Dalam penyusunan RPJMD, arah kebijakan ini menjadi pedoman utama dalam menetapkan tahapan pembangunan selama lima tahun ke depan, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki kesinambungan dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang.

Selain itu, implementasi pembangunan daerah juga diwujudkan melalui program-program yang dirancang secara sistematis untuk mencapai hasil atau sasaran (outcome) tertentu di masa mendatang. Setiap program pembangunan harus disusun dengan indikator kinerja yang jelas agar pelaksanaannya dapat terukur dan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Dengan sinergi antara strategi, kebijakan, dan program prioritas yang tepat, Kabupaten Nganjuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.2.1.1. Strategi Pembangunan Kabupaten Nganjuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan arahan bahwa strategi pembangunan daerah harus dirancang secara komprehensif agar mampu menjawab sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan selaras dengan visi jangka panjang daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, strategi yang disusun harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi dan tantangan yang ada, kebutuhan masyarakat, serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, strategi yang diterapkan dapat lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi serta lebih efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Tabel 3.6. dalam dokumen perencanaan pembangunan berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan strategi yang harus diterapkan untuk setiap sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Tabel ini menyajikan hubungan antara tujuan pembangunan, sasaran yang ditetapkan, serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapainya. Dengan adanya tabel ini, proses perencanaan menjadi lebih sistematis dan terukur, memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Lebih lanjut, implementasi strategi pembangunan daerah yang efektif juga membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Partisipasi aktif dari seluruh elemen ini

dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 3.6 Strategi Pembangunan Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029

Tujuan		Sasaran		Strategi
MISI 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban				
1.1	**Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran**	1.1.1	Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	(1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta nilai-nilai kebangsaan dan toleransi melalui pendidikan formal dan nonformal. (2) Mendorong integrasi pendidikan karakter dan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. (3) Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat harmoni sosial serta mencegah konflik berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). (4) Membangun forum komunikasi lintas agama dan budaya sebagai wadah dialog serta mediasi dalam menyelesaikan perbedaan pandangan. (5) Menjaga stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, dan menegakkan peratuan daerah dan peraturan kepala daerah. (6) mengoptimalkan peran pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, serta mengendalikan keselamatan kebakaran mencakup bangunan gedung, bangunan perumahan di lingkungan permukiman, kendaraan motor, bahan berbahaya dan areal lahan

Tujuan		Sasaran		Strategi
				(7) meningkatkan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran
MISI 2 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan				
2.1	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik**	2.1.1	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	(1) Menguatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN (2) Membudayakan nilai dasar ASN (BerAKHLAK: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif) (3) Mereformasi Sistem Karier dan Manajemen Kinerja
		2.1.2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	(4) Menguatkan Sistem Perencanaan dan Penganggaran (5) Meningkatkan efektifitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan secara terintegrasi (6) Memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menyebarkan informasi yang mudah dipahami masyarakat (7) Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara optimal di seluruh OPD (8) Mengintegrasikan sistem e-government (e-budgeting, e-procurement, e-office) untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi penyalahgunaan (9) Mengadopsi praktik quadruple helix (pemerintah–akademisi–bisnis–masyarakat) dalam pengembangan inovasi. (10) Penguatan kompetensi ASN dalam riset dan pengembangan (litbangda) serta pemanfaatan teknologi digital.

Tujuan		Sasaran		Strategi
				(11) Memberikan kesempatan ASN belajar dari best practices daerah lain (benchmarking, knowledge sharing) (12) Mengoptimalkan sinergitas pemerintahan di kecamatan
		2.1.3	Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas	(13) Menanamkan nilai anti-korupsi, transparansi, dan akuntabilitas di setiap level birokrasi. (14) Mengoptimalkan pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) (15) Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui website resmi, media sosial, dan aplikasi digital
		2.1.4	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	(16) Menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) (17) Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk transparansi anggaran (18) Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah untuk memperluas kepatuhan wajib pajak. (19) Pelatihan manajemen keuangan daerah, akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan fiskal
		2.1.5	Meningkatnya kualitas layanan publik	(20) Menetapkan dan menegakkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai bidang (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dll). (21) Menjamin layanan publik yang mudah dijangkau masyarakat pedesaan, miskin, dan rentan. (22) Menyediakan kanal pengaduan masyarakat (call center, aplikasi, SP4N-Lapor, media sosial)
		2.1.6	Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah	(23) Meningkatkan konektivitas internet di seluruh wilayah, terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan,

Tujuan		Sasaran		Strategi
				terluar). (24) Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui kanal digital yang mudah diakses. (25) Mengembangkan dan menerapkan roadmap transformasi digital daerah
Misi 3 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan				
3.1	Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	(1) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah strategis yang menunjang konektivitas antar kecamatan dan desa. (2) Mengoptimalisasi alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur strategis dan pengawasan penggunaannya (3) Merevitalisasi infrastruktur yang ada dengan standar kualitas yang baik dan berkelanjutan (4) Meningkatkan keselamatan transportasi
		3.1.2	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	(5) Mendorong penyusunan regulasi insentif pembangunan hunian terjangkau bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). (6) Mengintegrasikan program perumahan dengan program penanggulangan kemiskinan dan pengentasan kawasan kumuh (7) Menyediakan infrastruktur dasar perumahan: air bersih, sanitasi, listrik, jalan lingkungan (8) memfasilitasi penyelesaikan permasalahan pertanahan

Tujuan		Sasaran		Strategi
		3.1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	(9) Mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah dengan prinsip keberlanjutan, sehingga setiap proyek mempertimbangkan dampak ekologis (10) Meningkatkan tata kelola lingkungan berbasis data, dengan pemantauan kualitas udara, air, dan tanah secara berkala (11) Menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan hutan, dengan mencegah eksploitasi sumber daya yang berlebihan. (12) Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi untuk mengurangi emisi karbon (13) Meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana ekologis, seperti banjir dan kekeringan, melalui perencanaan tata ruang yang berbasis mitigasi risiko (14) Mengoptimalkan pengelolaan sampah terpadu dan berbasis masyarakat
		3.1.4	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	(15) Mengintegrasikan aspek mitigasi bencana dalam rencana pembangunan daerah, termasuk perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana (16) Membangun kemitraan dengan organisasi keagamaan untuk memperkuat peran mereka dalam edukasi dan bantuan kemanusiaan pascabencana. (17) Menggunakan media sosial dan jaringan komunitas untuk meningkatkan penyebaran informasi terkait

Tujuan		Sasaran		Strategi
				mitigasi dan bantuan pascabencana.
MISI 4 : Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas				
4.1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	4.1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	(1) Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan (2) Mendorong penerapan metode pembelajaran inovatif, seperti pendekatan berbasis proyek (Project-Based Learning) dan pembelajaran berbasis teknologi. (3) Pelatihan dan pengembangan profesional guru secara berkala guna meningkatkan kompetensi pedagogik dan teknologi mereka (4) Mengembangkan ekosistem pendidikan berbasis komunitas, di mana sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah bekerja sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (5) Mendorong penggunaan aplikasi edukatif berbasis teknologi untuk pembelajaran mandiri (6) Mewujudkan pemerataan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan sesuai standar kompetensi
		4.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	(7) Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan (8) Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk penanganan gizi buruk, melibatkan dinas kesehatan, pendidikan, sosial, dan pertanian (9) Meningkatkan cakupan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan agar mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. (10) Menggalakkan kampanye PHBS di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat, termasuk kebiasaan mencuci tangan, konsumsi air bersih, dan

Tujuan		Sasaran		Strategi
				penggunaan jamban sehat. (11) Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi layak, terutama di daerah pedesaan dan kawasan kumuh perkotaan
		4.1.3	Meningkatnya kesetaraan gender	(12) Mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, termasuk pemberian hak cuti melahirkan dan kebijakan ramah keluarga di lingkungan kerja (13) Mendorong kurikulum pendidikan yang mengajarkan kesetaraan gender, serta melawan stereotip gender di sekolah (14) Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi perempuan, terutama di sektor ekonomi kreatif, pertanian, dan perdagangan. (15) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan bahaya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui kampanye dan edukasi (16) Meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan anak, termasuk mengoptimalkan peran Satuan Tugas Perlindungan Anak di tingkat desa dan kelurahan (17) Mengadakan kampanye dan edukasi tentang hak anak serta pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sekolah, komunitas, dan media sosial (18) Mendorong program sekolah ramah anak, dengan memastikan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. (19) Membangun budaya keluarga yang mendukung perkembangan anak secara optimal, dengan mengurangi praktik-praktik yang berisiko seperti pernikahan anak dan eksploitasi tenaga kerja anak
		4.1.4	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	(20) Penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan.

Tujuan		Sasaran		Strategi
				(21) Edukasi pola asuh anak dan penguatan peran orang tua dalam pendidikan karakter (22) Pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan ekonomi produktif. (23) Peningkatan peran BKKBN, PKK, dan lembaga sosial masyarakat dalam pembangunan keluarga
		4.1.5	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	(24) Mengadakan seleksi dan pembinaan atlet berbakat sejak usia dini melalui sekolah dan klub olahraga. (25) Pembinaan atlet melalui sekolah olahraga, klub olahraga, dan akademi olahraga. (26) Meningkatkan kualitas stadion, lapangan sepak bola, kolam renang, dan gedung olahraga di Kabupaten Nganjuk (27) Memberikan dukungan kepada komunitas pemuda untuk kegiatan sosial, lingkungan, dan olahraga (28) Menyelenggarakan kegiatan seperti marathon, senam massal, dan fun bike untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (29) Program kompetisi berjenjang dari tingkat sekolah, desa, kecamatan hingga kabupaten/kota (30) Menyelenggarakan event olahraga rutin (turnamen daerah, pekan olahraga pelajar/daerah)
		4.1.6	Meningkatnya literasi masyarakat	(31) Mempermudah akses terhadap perpustakaan digital dengan menyediakan buku elektronik (e-book) baik kualitas maupun kualitas yang baik (32) Meningkatkan keterampilan penggunaan platform digital seperti e-learning, jurnal online, dan media sosial yang edukatif. (33) Mengadakan festival literasi, lomba menulis, dan diskusi buku untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Tujuan		Sasaran		Strategi
				(34) Pembangunan dan revitalisasi perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat (TBM), dan pojok baca di ruang publik (35) Meningkatkan distribusi buku, bahan bacaan, dan media literasi ke wilayah pedesaan dan terpencil
4.2	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan	4.2.1	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	(36) Strategi penurunan kemiskinan secara signifikan meliputi mendorong petumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui integrasi program perlindungan sosial yang didukung dengan akurasi dan efektivitas pengelolaan data tunggal sosial ekonomi dalam penentuan sasaran penerima manfaat yang secara terus menerus dimutakhirkan serta diperkuat dengan teknologi digital dalam pengelolaannya, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah (37) Sinergi lintas urusan/bidang/sektor program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat (38) Penguatan layanan bagi kelompok rentan (anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana) (39) Integrasi program perlindungan sosial dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim (40) Mendorong kolaborasi dengan dunia usaha melalui CSR untuk perlindungan dan pemberdayaan sosial

Tujuan		Sasaran		Strategi
		4.2.2	Meningkatnya kemandirian desa	(41) Menguatkan kelembagaan masyarakat desa (BPD, LPM, PKK, Karang Taruna) agar berperan aktif dalam pembangunan (42) Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya desa (pertanian, perikanan, pariwisata, industri rumahan). (43) Mengembangkan kegiatan sosial berbasis komunitas untuk memperkuat solidaritas
MISI 5 : Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal				
5.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	5.1.1	Meningkatnya nilai tambah pertanian	(1) Meningkatkan produktivitas sektor strategis melalui program agroforestri, yang mengintegrasikan tanaman kehutanan dengan komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani hutan (2) Penerapan teknologi tepat guna dan digitalisasi pertanian/perikanan (3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian (4) Penguatan kelembagaan ekonomi petani untuk meningkatkan daya tawar. (5) Mendorong diversifikasi usaha pertanian, dengan pengembangan agrowisata, industri pengolahan hasil pertanian, dan produk berbasis komoditas unggulan daerah
		5.1.2	Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan	(6) Mendorong transformasi dari produksi bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah (7) Menguatkan Inovasi produk industri lokal melalui desain, kemasan, sertifikasi mutu, dan hak kekayaan intelektual (HKI) (8) Meningkatkan promosi dagang, pameran produk, dan business matching.

Tujuan		Sasaran		Strategi
				(9) Mengembangkan industri berbasis potensi lokal (agroindustri, kerajinan kreatif).
		5.1.3	Meningkatnya investasi daerah	(10) Transparansi regulasi dan kepastian hukum bagi investor. (11) Mempromosikan potensi unggulan daerah melalui forum investasi, business matching, dan pameran (12) Meningkatkan diplomasi ekonomi daerah untuk menarik investor domestik maupun asing (13) Fasilitasi kemitraan pemerintah-swasta (Public Private Partnership/PPP) untuk pembangunan infrastruktur (14) Penyederhanaan perizinan melalui OSS-RBA dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
		5.1.4	Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro	(15) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk usaha produktif (UMKM digital). (16) Pelatihan manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro (17) Memfasilitasi pembiayaan melalui KUR, LPDB, perbankan daerah, dan koperasi simpan pinjam (18) Menguatkan peran BUMD dan lembaga keuangan mikro dalam pembiayaan usaha rakyat. (19) Memfasilitasi promosi melalui pameran, marketplace digital, dan kerja sama dengan retail modern (20) Memfasilitasi sertifikasi produk (SNI, halal, PIRT, HACCP, ISO). (21) Memberikan pelatihan dan pendampingan peningkatan mutu produk sesuai standar pasar global.
		5.15	Menurunnya pengangguran terbuka	(22) Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha, agar mereka memiliki keterampilan

Tujuan		Sasaran		Strategi
				dalam manajemen keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk. (23) Mendorong sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja, sehingga mereka memiliki daya saing lebih tinggi dalam mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak (24) Memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. (25) Memberikan dukungan pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. (26) Memfasilitasi investasi di sektor padat karya (manufaktur, pertanian modern, pariwisata, dll.) (27) Mengembangkan ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan sektor jasa modern
		5.16	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	(28) Melakukan intensifikasi pertanian melalui penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, dan mekanisasi. (29) Mengembangkan infrastruktur pasca panen: gudang, cold storage, rumah kemas, dan pasar tani. (30) Menguatkan kelembagaan kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), BUMDes, dan koperasi pangan (31) Mengoptimalkan lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah (32) Menguatkan kemitraan petani dengan pelaku usaha/industri pengolahan pangan

Tujuan		Sasaran		Strategi
Misi 6: Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna				
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	6.1.1	Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata	(1) Mengembangkan destinasi wisata dan menciptakan incon wisata nganjuk (2) Peningkatan kualitas jalan menuju destinasi wisata, terutama ke daerah pegunungan dan pedesaan. (3) Mengembangkan festival tahunan yang bisa menjadi daya tarik wisatawan (4) Kerja sama dengan agen perjalanan dan platform online seperti Traveloka, Tiket.com, dan Google Maps untuk meningkatkan visibilitas destinasi. (5) Memberikan keringanan pajak untuk UMKM yang baru berkembang agar tetap beroperasi dan berkembang. (6) Mendorong pembangunan hotel, resort, dan penginapan berbasis rumah warga (homestay). (7) Mengembangkan desa wisata berbasis komunitas dengan sistem pengelolaan mandiri oleh masyarakat setempat. (8) Mengembangkan produk kreatif lokal seperti batik khas Nganjuk dan souvenir berbasis seni budaya daerah

Tujuan		Sasaran		Strategi
Misi 7: Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal				
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran	7.1.1	Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah	(1) Meningkatkan revitalisasi dan pemeliharaan situs budaya (2) Mengoptimalkan digitalisasi dan promosi melalui platform online (3) Meningkatkan pendidikan dan sosialisasi budaya local dengan integrasi lurikulum muatan local dan pelatihan bagi masyarakat pelaku budaya (4) Menyelenggarakan festival budaya tahunan untuk mempromosikan warisan budaya kepada wisatawan.

Matriks strategi pembangunan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam tabel di atas merupakan seperangkat rencana tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Matriks ini mencakup berbagai pendekatan dan langkah-langkah strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta memastikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan prioritas pemerintah daerah. Dengan demikian, strategi RPJMD tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program kerja mereka agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Selain itu, keberadaan strategi yang terstruktur dalam RPJMD menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang. Mengingat dinamika pembangunan yang sangat cepat dan kompleks, baik dari faktor internal seperti perubahan kebijakan daerah, keterbatasan anggaran, maupun faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi global, perubahan iklim, serta kemajuan teknologi, maka fleksibilitas dalam implementasi strategi menjadi sangat diperlukan. Dalam situasi di mana strategi RPJMD yang telah dirumuskan tidak lagi relevan akibat perubahan lingkungan strategis, maka Perangkat Daerah dapat menyesuaikan atau merumuskan strategi baru yang lebih adaptif dan sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD tetap terjaga, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Dengan adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada evaluasi berkala, Perangkat Daerah diharapkan dapat merespons

perubahan dengan cepat serta mengadopsi inovasi kebijakan yang lebih efektif. Pemanfaatan data yang akurat, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, serta sinergi antara berbagai sektor menjadi faktor kunci dalam menyukseskan implementasi strategi pembangunan jangka menengah ini. Melalui langkah-langkah ini, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi alat yang dinamis dalam mengarahkan pembangunan daerah agar lebih responsif, inklusif, dan berdaya saing.

3.2.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan selama periode perencanaan. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan panduan operasional bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perumusannya, arah kebijakan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi daerah, tantangan pembangunan, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi pedoman bagi perencanaan jangka menengah tetapi juga mencerminkan visi jangka panjang pembangunan daerah.

Arah kebijakan menjelaskan implementasi strategi yang telah ditetapkan pada tiap pentahapan pembangunan, sehingga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dampak yang maksimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Implementasi arah kebijakan dapat dilakukan dalam satu tahun anggaran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kebijakan akan berlangsung lebih dari satu tahun, tergantung pada skala, kompleksitas, serta sumber daya yang tersedia. Fleksibilitas

dalam pelaksanaan arah kebijakan memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta politik yang dapat memengaruhi jalannya pembangunan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus memiliki kesinambungan dengan kebijakan tahun-tahun sebelumnya dan selanjutnya agar proses pembangunan berjalan secara progresif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, penekanan fokus arah kebijakan setiap tahun harus tetap selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirancang dalam RPJMD. Konsistensi dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa pencapaian target pembangunan tidak terhambat oleh perubahan kebijakan yang tidak terencana. Selain itu, arah kebijakan juga harus responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi, transformasi ekonomi, serta tantangan sosial yang mungkin muncul selama periode perencanaan.

Arah Kebijakan Pembangunan juga berfungsi sebagai *Milestone* pembangunan yang berisi pentahapan pembangunan secara berkala. Setiap tahapan pembangunan telah disusun dengan mempertimbangkan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045. Dengan adanya tahapan pembangunan yang sistematis, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi arah kebijakan sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antar perangkat daerah, sinergi dengan pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkala menjadi aspek

penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk.



Secara lebih rinci, pentahapan pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7 di bawah ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perencanaan dan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Tabel 3.7.
Arah Kebijakan / Pentahapan Pembangunan Pembangunan Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029

TAHAP I (Tahun 2026)	TAHAP II (Tahun 2027)	TAHAP III (Tahun 2028)	TAHAP IV (Tahun 2029)	TAHAP V (Tahun 2030)
Penguatan Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah. Peningkatan kualitas SDM, Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Peningkatan Jaminan Sosial dan peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan merupakan pondasi percepatan pembangunan daerah yang harus dipenuhi di tahun pertama pemerintahan. Penguatan terhadap unsur pondasi pembangunan tersebut	**Pengelolaan Sektor Strategis Daerah.** Sektor stratgis daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi meliputi sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor industri. Pada sisi lain, Usaha Mikro, Koperasi dan Ekonomi Digital serta pariwisata daerah merupakan fokus pembangunan daerah, yang dikembangkan secara	**Akselerasi Pembangunan Sektoral.** Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu wilayah pengembangan komodtas agroindustri dan minapolitan, serta pariwisata, sangat membutuhkan dukungan berbagai sumberdaya dari mitra strategis. Kerjasama strategis *hexahelic* mendorong percepatan pembangunan sektoral dan spasial lebih efektif. Pada sisi lain, pelibatan stakeholder	**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat** Tahap ini merupakan perwujudan Visi RPJMS yang ditandai kemajuan di berbagai bidang, antara lain pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif yang telah terintegrasi dengan dengan sektor primer pertanian. Tahap ini juga ditandai kapasitas SDM yang berkarakter, layanan infrastruktur merata dan berkualitas serta pendapatan perkapita yang	**Pemantapan Transformasi Pembangunan.** Pada tahap ini merupakan periodesasi Kepala Daerah Baru, yang dijabarkan sesuai dengan Visi-Misi Pembangunan jangka menengah tahun 2030-2035.

TAHAP I (Tahun 2026)	TAHAP II (Tahun 2027)	TAHAP III (Tahun 2028)	TAHAP IV (Tahun 2029)	TAHAP V (Tahun 2030)
memiliki peran strategis (*Leverage*), karena berpengaruh besar terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi tahapan pembangunan selanjutnya.	simultan dengan sektor strategis di atas. Pemanfaatan sumberdaya (*Internal resources*) pembangunan secara terfokus pada sektor strategis merupakan langkah efektif dalam pembangunan.	pembangunan ini juga akan diarahkan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan perluasan lapangan kerja.	tumbuh signifikan. Kondisi ini mendorong terjadinya aglomerasi industri dan perdagangan yang semakin massif dari daerah sekitar dengan pelaku usaha / masyarakat Kabpaten Nganjuk.	

Sebagai upaya untuk mendukung Arah Kebijakan sebagaimana dituangkan dalam pentahapan pembangunan di atas, maka perlu dirumuskan berbagai arah kebijakan pendukung sektoral maupun spasial yang dapat mempercepat realisasi target pembangunan daerah. Arah kebijakan sektoral mencakup kebijakan yang berfokus pada pembangunan di bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, serta infrastruktur, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, arah kebijakan spasial berorientasi pada pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik geografis, potensi ekonomi lokal, serta kebutuhan pembangunan di setiap kawasan. Kombinasi antara kebijakan sektoral dan spasial diharapkan dapat menciptakan sinergi yang optimal dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk secara menyeluruh.

Program lintas sektoral merupakan program strategis yang dirancang untuk melibatkan berbagai sektor pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Program ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai perangkat daerah agar kebijakan yang diterapkan tidak berjalan secara parsial, melainkan saling mendukung dan melengkapi. Sebagai contoh, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berkaitan dengan sektor kebudayaan, tetapi juga memerlukan dukungan dari sektor infrastruktur, transportasi, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, keterpaduan dalam pelaksanaan program lintas sektoral menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Di sisi lain, program kewilayahan merupakan bentuk implementasi dari pendekatan pembangunan berbasis lokasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kawasan tertentu agar

dapat memberikan dampak positif bagi wilayah sekitarnya. Program ini berpedoman pada prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yang merupakan konsep perencanaan pembangunan berbasis kawasan. Dalam kerangka THIS, sebuah tema pembangunan yang telah disepakati akan diterapkan pada lokasi atau kawasan tertentu (Spasial). Untuk mendukung implementasi tema tersebut, berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut akan diidentifikasi secara menyeluruh (Holistik) dan kemudian dikerjakan secara terintegrasi oleh berbagai perangkat daerah terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing (Integratif). Dengan pendekatan ini, pembangunan suatu kawasan tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga memiliki dampak luas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah sekitar.

Melalui program kewilayahan yang berbasis pada konsep THIS, diharapkan Kabupaten Nganjuk dapat mengembangkan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi unggulan dan mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya. Kawasan-kawasan ini nantinya dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi sektor lain serta wilayah sekitarnya. Dengan adanya kawasan yang berkembang pesat, keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat lebih terjaga, sehingga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Nganjuk.

Dalam konteks Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk, arah kebijakan yang dirumuskan harus diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan meliputi penguatan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan,

pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam layanan pemerintahan dan perekonomian daerah. Semua kebijakan tersebut harus dirancang secara berkelanjutan, responsif terhadap perubahan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan. Beberapa Langkah kebijakan yang akan dilakukan antara lain:

MISI 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban, arah kebijakan yang ditetapkan:

(1) Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, politik dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.
(2) Peningkatan mitigasi, pencegahan, penindakan dan pemulihan potensi gangguan keamanan dan konflik sosial.
(3) pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
(4) penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat gangguan trantibum.
(5) Pemenuhan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar.

MISI 2 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan, arah kebijakan yang ditetapkan:

(1) Menggerakan birokrasi sebagai mesin yang kuat, efisien, dan efektif dalam pelaksanaan dan pengelolaan seluruh program pembangunan daerah guna transformasi tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik.

(2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan, dan adaptif dalam memperkuat daya saing global untuk mendukung penguatan prinsip-prinsip good governance, merespon perubahan dalam ekonomi global, serta menciptakan ekosistem inovasi di sektor publik.

(3) Peningkatan capaian kinerja pembangunan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat, serta diharapkan mampu memenuhi standar birokrasu berkelas dunia.

(4) Penguatan sumber daya manusia ASN sebagai modal utama dalam keberhasilan reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi digital, penguatan integritas, dan pengembangan profesionalisme ASN dalam menghadapi disrupsi global dan kompleksitas tuntutan pelayanan publik.

(5) Memperkuat integritas dan netralitas ASN, serta mencegah terjadinya praktik jual-beli jabatan dan budaya birokrasi yang patronistik, serta mengatasi tantangan struktural dan fragmentasi kelembagaan

(6) Peningkatan manajemen pemerintahan daerah berbasis kinerja yang didukung dengan data dan informasi yang valid dan akurat (*evidence based*).

(7) Penyiapan dan identifikasi pemenuhan kebutuhan layanan Pemerintah secara elektronik (E-Gov).

(8) Penerapan sistem merit dan manajemen talenta sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen dan pengembangan karir ASN.

(9) Meningkatnya temuan dan inovasi baru dan meningkatnya Indeks Inovasi Daerah.

(10) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur.

(11) Terbentuknya sistem informasi dan manajemen pengembangan SDM aparatur

(12) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pada setiap unit pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pelayanan Publik.
(13) Terwujudnya pelayanan publik berbasis digital yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
(14) Terwujudnya sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Nganjuk yang terintegrasi.
(15) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko, serta berorientasi hasil dan berdampak.
(16) Pemenuhan infrastruktur digital dan percepatan transformasi digital.

Misi 3 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, arah kebijakan yang ditetapkan:

(1) Dukungan kebijakan untuk ketahanan pangan, air dan energi
(2) Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim dan ancaman bencana.
(3) Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan (emisi GRK, limbah B3 dan limbah industri), peningkatan pemenuhan ruang terbuka hijau, serta penanganan sampah.
(4) Pemenuhan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang.
(5) Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
(6) Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah.
(7) Pemenuhan peningkatan konektivitas antar wilayah dan penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MISI 4 : Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, arah kebijakan yang ditetapkan:

(1) Peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan kesehatan.
(2) Peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh.
(3) Peningkatan kemitraan dan pengembangan kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi sebagai upaya untuk menciptakan inovasi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta *transfer of knowledge* dari riset dan penelitian.
(4) Penyediaan akses perlindungan sosial dan dukungan data terpadu terkait kesejahteraan sosial
(5) Terwujudnya peningkatan, perluasan aksesibilitas dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
(6) Terwujudnya ketersediaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standar kompetensi.
(7) Terselenggaranya proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.
(8) Terwujudnya pengembangan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(9) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan keluarga berencana (KB) serta peningkatan kualitas hidup kesehatan masyarakat,
(10) Menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, serta stunting dan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk.
(11) Tersedianya pembiayaan kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(12) Peningkatan kesetaraan gender dan kesempatan berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

(13) Terwujudnya pemerataan, kemudahan aksesibilitas serta pelayanan sosial bagi PPKS dan kaum rentan sosial.

(14) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa untuk mendukung kemandirian desa

(15) Penguatan peran BUMDes, BUMDesma, dan lembaga ekonomi desa lainnya yang mendukung kemandirian desa.

MISI 5 : Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal, arah kebijakan yang ditetapkan:

(1) Hilirisasi sumberdaya alam unggulan daerah, pemenuhan akses digital, pertumbuhan ekonomi daerah dengan didukung kemandirian desa.

(2) Penguatan hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dengan mendorong keterlibatan petani milenial.

(3) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

(4) Kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, usaha mikro, agrobisnis pertanian dan pariwisata berkelanjutan.

(5) Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, tenaga kerja yang kreatif dan inovatif menjadi potensi pengembangan sektor unggulan meliputi optimalisasi produktivitas pertanian, Pengembangan Pariwisata daerah, ekonomi kreatif, UMKM, Koperasi dan sektor ekonomi produktif dan potensial.

(6) Peningkatan sektor eksisting yaitu pertanian dalam hal produktivitas dengan cara penerapan pembangunan pertanian dengan strategi intensifikasi terhadap tahapan proses produksi pertanian dari Hulu sampai Hilir yang berbasis kluster (kawasan sentra produksi) dengan penguatan

kelembagaan Tani kemitraan, mengenai peningkatan kualitas, kuantitas, dan jenis komoditi yang berorientasi Ekspor

(7) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.

(8) Terwujudnya transformasi sistem perekonomian mendukung ekonomi hijau yaitu pembangunan ekonomi yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan efisien, mengurangi emisi GRK dan polusi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

(9) Terwujudnya entrepreneurship warga masyarakat, ditandai dengan peningkatan jumlah pelaku usaha, keragaman bentuk dan jenis usaha, serta peningkatan kemudahan perijinan usaha dan pelayanan pembinaan pengembangan kegiatan usaha, khususnya pada lingkup UMKM.

(10) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di semua wilayah kecamatan

(11) Stabilitasi harga dan menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan

Misi 6: Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna, arah kebijakan yang ditetapkan:

(1) Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

(2) Meningkatkan daya tarik destinasi wisata, pemasaran pariwisata, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Misi 7: Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal, arah kebijakan yang ditetapkan:

(1) Terwujudnya peningkatan kemampuan dan kreativitas masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal.
(2) Peningkatan peran dan fungsi fasilitas-fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat untuk aktivitas pengembangan budaya lokal yang berdaya saing

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Selain pendekatan sektoral, program ini juga diterapkan dalam konteks kewilayahan (spatial approach), di mana lokasi-lokasi tertentu di Kabupaten Nganjuk akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, intervensi pembangunan tidak hanya tersebar secara merata, tetapi lebih tepat sasaran, terutama di daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi atau ketimpangan sosial yang signifikan. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi alokasi sumber daya dan memastikan bahwa bantuan serta program pemberdayaan benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 memperlihatkan secara lebih rinci bagaimana program lintas sektoral ini diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. Tabel ini juga menggambarkan keterkaitan antara berbagai perangkat daerah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, serta bagaimana setiap kebijakan dan intervensi diarahkan untuk mencapai hasil yang nyata dan berkelanjutan. Dengan adanya strategi pembangunan yang terarah, diharapkan masyarakat miskin di Kabupaten Nganjuk dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap hak-hak dasar

mereka, sekaligus memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

1. Percepatan Pembangunan Perekonomian Kabupaten Nganjuk

Kebijakan ini diimplementasikan guna mendukung "Penguatan Pondasi Transformasi" sebagai arah kebijakan Tahap I Tahun 2025-2029 pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tema pembangunan lintas sektoral yang harus didukung oleh berbagai perangkat daerah terkait. Peningkatan daya saing perekonomian daerah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk, mengingat struktur perekonomiannya yang ditopang oleh sektor potensial yang mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor industri pengolahan. Dengan kontribusi sebesar 63,33% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024, sektor potensial tersebut memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sektor ini harus dilakukan secara optimal agar dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk, terutama sebagai penyedia bahan baku bagi sektor industri dan perdagangan. Namun, tekanan dari perkembangan sektor industri dan perdagangan, termasuk alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman, dapat mengancam keberlanjutan sektor pertanian. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ke depan harus memastikan bahwa sektor pertanian tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai, sehingga dapat terus

berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha agribisnis.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada tiga kebijakan utama:

(a) **Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (Value Added)**, hilirisasi merupakan strategi penting dalam meningkatkan daya saing sektor unggulan daerah, terutama bagi aktor ekonomi di sektor bawah, seperti petani, pengrajin, dan pelaku usaha kecil. Melalui hilirisasi, produk-produk dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri kreatif akan diproses lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah tinggi sebelum dipasarkan. Dengan demikian, masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam rantai nilai industri. Program ini akan didukung dengan penyediaan infrastruktur produksi, akses teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaku usaha dapat lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

(b) Penguatan Limpahan Kesejahteraan Ekonomi (Multiplier Effect) melalui Forward dan Backward Linkage, strategi ini bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antara sektor industri dengan sektor lainnya dalam perekonomian daerah. Forward linkage mendorong sektor industri untuk menciptakan keterkaitan ke depan dengan sektor perdagangan dan jasa, sehingga produk yang dihasilkan dapat dipasarkan lebih luas dan menciptakan lapangan kerja baru. Sementara itu, backward linkage memperkuat keterkaitan ke belakang dengan sektor hulu, seperti pertanian dan usaha kecil, sehingga industri lokal lebih banyak menggunakan bahan baku dan tenaga kerja dari daerah sendiri. Dengan adanya keterkaitan ini, putaran ekonomi di

Kabupaten Nganjuk akan menjadi lebih dinamis, distribusi pendapatan menjadi lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

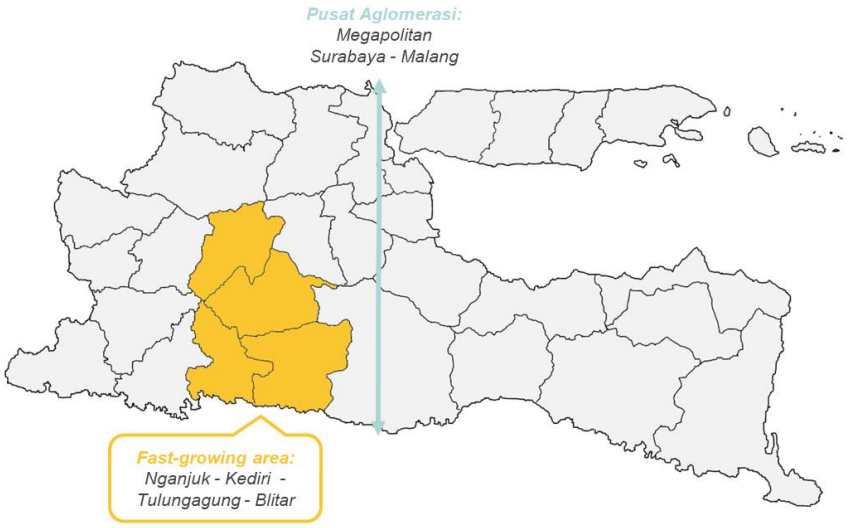
(c) **Ekspansi Ekonomi Lintas Daerah untuk Meningkatkan Ekspor dan Surplus Perdagangan Antar Daerah,** ekspansi ekonomi ke pasar luar daerah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Peningkatan ekspor (net export) serta surplus perdagangan antar daerah (regional trade surplus) akan mendorong pertumbuhan PDRB dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih kuat. Untuk mendukung ekspansi ini, perlu adanya kebijakan yang berfokus pada penguatan daya saing produk lokal, peningkatan kualitas dan standar produk sesuai dengan permintaan pasar global, serta pengembangan jaringan perdagangan dan logistik. Selain itu, kerja sama antar daerah juga harus diperkuat guna menciptakan sinergi ekonomi yang saling menguntungkan dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan daya saing perekonomian Kabupaten Nganjuk dapat meningkat secara signifikan. Sektor industri dan pertanian dapat berkembang secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Kebijakan ini juga akan memastikan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka PDRB semata, tetapi juga memperhatikan aspek inklusivitas dan keberlanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Lingkungan Hidup.

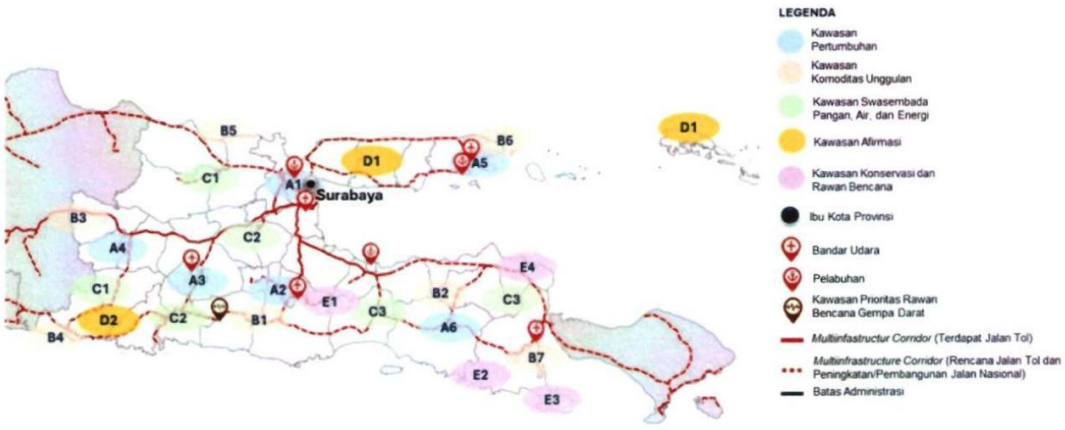
Area *fast*-growing untuk Nganjuk dalam Gambar 3.2 tersebut ditandai dengan lingkaran merah di sebelah kiri dan label "Fast-growing area: Nganjuk-Kediri-Tulungagung-Blitar". Area ini menunjukkan tingkat pertumbuhan signifikan yang dapat diamati dari konsentrasi cahaya yang cukup terang di wilayah tersebut, menandakan perkembangan ekonomi, infrastruktur, dan urbanisasi yang meningkat.

Gambar 3.2 Tren Aglomerasi di Provinsi Jawa Timur



Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, diolah

Gambar 3.3 Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 di Provinsi Jawa Timur



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Faktor utama yang mendukung pertumbuhan pesat di kawasan ini meliputi:

(i) **Aksesibilitas dan Infrastruktur**, Wilayah Nganjuk, Kediri, Tulungagung, dan Blitar memiliki akses transportasi yang semakin berkembang, terutama dengan adanya jalan tol dan jalur kereta api yang menghubungkan daerah ini dengan pusat ekonomi lainnya di Jawa Timur.

(ii) **Perkembangan Sektor Industri dan Perdagangan**, Kediri dan Nganjuk menjadi pusat industri dan perdagangan yang berkembang pesat, dengan sektor manufaktur, agribisnis, dan industri makanan serta minuman yang menjadi tulang punggung perekonomian.

(iii) **Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota**, Kota-kota di kawasan ini mengalami peningkatan jumlah penduduk dan ekspansi kawasan perkotaan, yang mendorong pertumbuhan sektor jasa, perumahan, dan bisnis lokal.

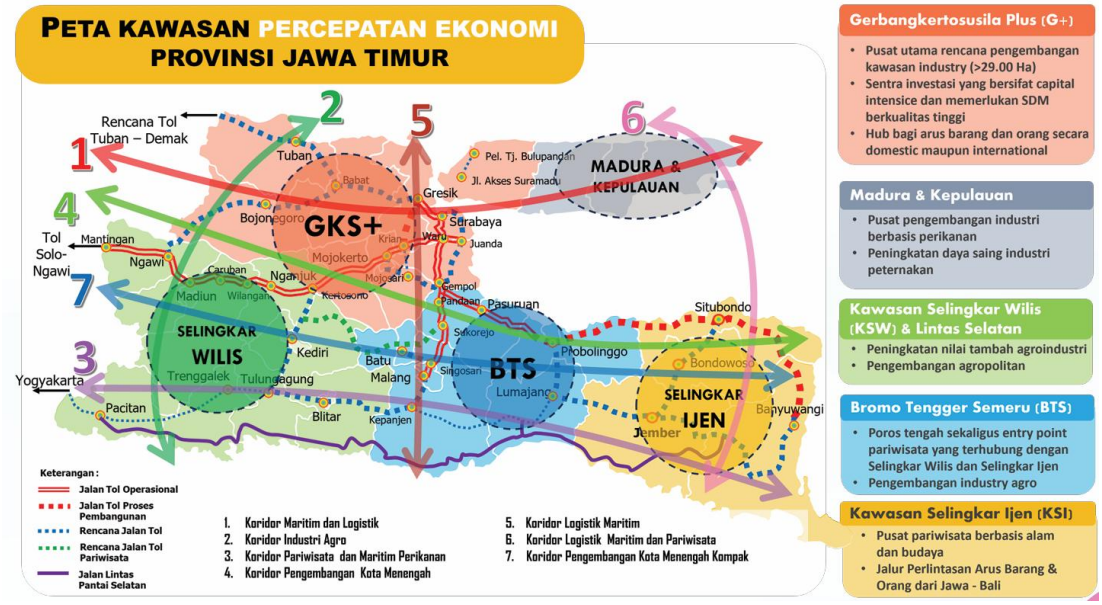
(iv) **Sumber Daya Alam dan Sektor Pertanian**, Tulungagung dan Blitar dikenal sebagai daerah dengan sektor pertanian yang kuat, terutama dalam produksi padi, kopi, dan peternakan.

Adanya hilirisasi produk pertanian juga mendorong nilai tambah ekonomi di kawasan ini.

(v) **Dampak Spillover dari Megapolitan Surabaya-Malang**, Pertumbuhan di kawasan *megapolitan* Surabaya-Malang yang semakin padat menyebabkan ekspansi investasi dan industri ke wilayah-wilayah yang berdekatan, termasuk kawasan Nganjuk-Kediri-Tulungagung-Blitar.

Dengan berbagai faktor tersebut, kawasan ini terus berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur, menawarkan peluang investasi dan pembangunan yang lebih luas di masa depan.

Gambar 3.4 Koridor Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Timur



Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Gambar 3.5 Peta Sebaran Pusat Kegiatan Provinsi Jawa Timur



Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Dalam **Peta Kawasan Percepatan Ekonomi Provinsi Jawa Timur**, Kabupaten Nganjuk memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi regional, khususnya dalam sektor agroindustri, perdagangan, dan penguatan konektivitas antarwilayah. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menunjukkan bagaimana Nganjuk terintegrasi dalam kebijakan percepatan ekonomi provinsi:

a. **Bagian dari Kawasan Selingkar Wilis (KSW)**: Pengembangan Agroindustri dan Agropolitan, Nganjuk termasuk dalam Kawasan Selingkar Wilis (KSW), yang berfokus pada:
   (1) Peningkatan nilai tambah agroindustri:
      (i) Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan hortikultura untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar regional maupun ekspor.

(ii) Pengembangan industri berbasis pertanian, seperti pengolahan padi, sayuran, dan komoditas unggulan lainnya.

(iii) Peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha mikro dalam mengakses teknologi modern dan pasar yang lebih luas.

(2) Pengembangan agropolitan

(i) Mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi perkotaan dan perdesaan dengan memperkuat rantai pasok dan konektivitas antarwilayah.

(ii) Peningkatan akses infrastruktur pedesaan, termasuk jalan, irigasi, dan fasilitas pendukung pertanian lainnya.

Kawasan Selingkar Wilis ini diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian yang mampu menopang kebutuhan industri pengolahan serta mendukung ketahanan pangan daerah.

b. Bagian dari Koridor Pengembangan Kota Menengah (Koridor 7), Nganjuk berada dalam jalur **Koridor Pengembangan Kota Menengah**, yang bertujuan untuk:

(1) Meningkatkan keseimbangan pertumbuhan antara kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang dengan kota-kota menengah seperti Madiun, Kediri, dan Nganjuk.

(2) Mengembangkan sektor industri dan perdagangan di kota-kota menengah guna menciptakan pusat ekonomi baru yang dapat menekan urbanisasi ke kota-kota besar.

(3) Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui investasi infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengembangan kawasan industri.

Sebagai bagian dari koridor ini, Nganjuk memiliki peluang untuk tumbuh sebagai pusat distribusi dan perdagangan bagi

wilayah sekitarnya, terutama dalam sektor pertanian dan industri pengolahan.

c. **Kedekatan dengan Gerbangkertosusila Plus (GKS+): Akses ke Pusat Industri dan Pasar yang Lebih Luas,** Gerbangkertosusila Plus (GKS+) merupakan kawasan dengan konsentrasi industri terbesar di Jawa Timur, meliputi wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan sekitarnya. Meskipun Nganjuk tidak termasuk dalam kawasan ini, letaknya yang cukup dekat memberikan beberapa keuntungan:
   (1) Peluang keterkaitan industri
      (i) Nganjuk dapat menjadi pemasok bahan baku pertanian dan agroindustri bagi kawasan industri di GKS+.
      (ii) Pengembangan klaster industri berbasis sumber daya lokal yang dapat mendukung kebutuhan industri besar di GKS+.
   (2) Peningkatan akses pasar dan investasi
      (i) Kedekatan dengan GKS+ mempermudah akses bagi produk-produk lokal Nganjuk ke pasar yang lebih besar.
      (ii) Investor dari kawasan industri dapat melihat Nganjuk sebagai lokasi potensial untuk pengembangan industri pendukung yang membutuhkan lahan lebih luas dan biaya operasional lebih rendah.
   (3) Mobilitas tenaga kerja
      (i) Masyarakat Nganjuk memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan di sektor industri yang berkembang di GKS+.
      (ii) Adanya arus komuter antara Nganjuk dan kota-kota industri di sekitarnya akan mendorong peningkatan ekonomi lokal.

3. Aksesibilitas dan Infrastruktur: Penguatan Mobilitas dan Logistik

Nganjuk memiliki keunggulan dalam konektivitas dan akses transportasi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang. Infrastruktur utama yang menunjang Nganjuk meliputi:

a. Akses ke Jalan Tol Trans Jawa dan Jalur Kereta Api:
   (1) Tol Solo-Nganjuk-Surabaya yang menghubungkan Nganjuk dengan kota-kota besar lainnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
   (2) Jalur ganda atau double track kereta api lintas selatan.
   (3) Memudahkan distribusi hasil pertanian dan produk industri ke pusat-pusat perdagangan utama.
b. Pengembangan jalur logistik dan transportasi:
   (1) Rencana peningkatan jaringan jalan dan konektivitas antarwilayah untuk mendukung distribusi barang dan jasa, serta mobilitas, perdagangan dan investasi.
   (2) Pengembangan angkutan barang dan sistem distribusi yang lebih efisien untuk mempercepat arus barang dari dan ke Nganjuk.

Aksesibilitas yang baik ini menjadi faktor kunci dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Berdasarkan peta percepatan ekonomi, Nganjuk memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, serta memberikan kontribusi pembangunan nasional **Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi** khususnya dalam:

(1) **Agroindustri dan agropolitan** – sebagai bagian dari Kawasan Selingkar Wilis yang berfokus pada peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan pengolahan.
(2) **Pengelolaan sumber daya air serta penyediaan air berkelanjutan,** untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura

(3) **Pusat pertumbuhan ekonomi menengah** – melalui Koridor Pengembangan Kota Menengah yang bertujuan untuk menyeimbangkan perkembangan antara kota besar dan kota kecil.

(4) **Dukungan terhadap kawasan industri GKS+** – sebagai pemasok bahan baku dan tenaga kerja bagi pusat industri di Jawa Timur.

(5) **Konektivitas dan infrastruktur** – dengan akses ke jalan tol dan jalur logistik utama yang mempermudah distribusi barang dan perdagangan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, pengembangan kawasan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur untuk menjawab potensi dan tantangan yang dihadapi, diantaranya adalah

a. Pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri pengolahan dan manufaktur, pariwisata, agropolitan, dan minapolitan;
b. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan, seperti pembangunan jalan tol dan jalan nasional, revitalisasi jalur kereta api, pelebaran jalan, pembangunan pelabuhan, pembangunan transportasi perkotaan;
c. Pembangunan infrastruktur lainnya yang menunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Timur seperti pembangunan SPAM, bendungan, dan IPAL; dan
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Timur seperti pengembangan SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu daerah bagian dari Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dalam implementasinya kebutuhan tersebut dijabarkan dalam bentuk program/proyek sesuai dengan potensi dan tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Double Track Surabaya – bangil – Malang – Blitar – Kertosono (Jalur Kereta Api);
2. Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Kediri – Tulungagung;
3. Pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di Kawasan Selingkar Wilis;
4. Pelebaran dan Perbaikan Geometri Jalan Selingkar Wilis (Ring 1);
5. Pelebaran Jalan Radial Menuju Selingkar Wilis;
6. Pembangunan Bendungan Margopatut Kecamatan Sawahan;
7. SPAM Regional Lintas Tengah Kapasitas Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang (Sumber Air Baku dari Sungai Brantas); dan
8. Pembangunan Rencana Kawasan Industri Nganjuk.

Dengan memanfaatkan peluang ini, Kabupaten Nganjuk dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

4. Penguatan Riset, Penelitian, dan Pengembangan untuk Mendukung Inovasi dan Daya Saing Daerah.

Tantangan pembangunan daerah ke depan sangat terkait erat dengan pilihan kebijakan yang tepat di tengah ketidakpastian yang tinggi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, peran dari riset, penelitian, dan pengembangan menjadi sangat krusial, terutama dalam mendorong lahirnya inovasi di berbagai bidang yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Inovasi yang dihasilkan harus mampu menjawab permasalahan yang ada, baik dalam hal

peningkatan efisiensi birokrasi, optimalisasi sumber daya, maupun penyediaan layanan publik yang lebih baik.

Salah satu fokus utama inovasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Transformasi digital dalam pelayanan publik akan memungkinkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, serta mendorong keterlibatan publik dalam pembangunan daerah. Selain itu, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk menganalisis tren dan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil lebih berbasis data (evidence-based policy).

Di sisi lain, tantangan pembangunan daerah ke depan juga berkaitan dengan ketahanan wilayah dalam menghadapi berbagai risiko, baik dari aspek energi, pangan, maupun sumber daya alam. Ketahanan energi menjadi isu strategis, mengingat kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi. Oleh karena itu, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, angin, dan biomassa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Program rintisan EBT harus didorong dengan insentif bagi investor serta dukungan riset dan pengembangan teknologi energi yang lebih efisien dan terjangkau.

Selain ketahanan energi, ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, serta fluktuasi harga bahan pangan dapat memengaruhi stabilitas pasokan dan harga pangan. Untuk itu, perlu strategi komprehensif dalam meningkatkan produktivitas pertanian, seperti pemanfaatan teknologi pertanian presisi, diversifikasi komoditas, serta pembangunan infrastruktur

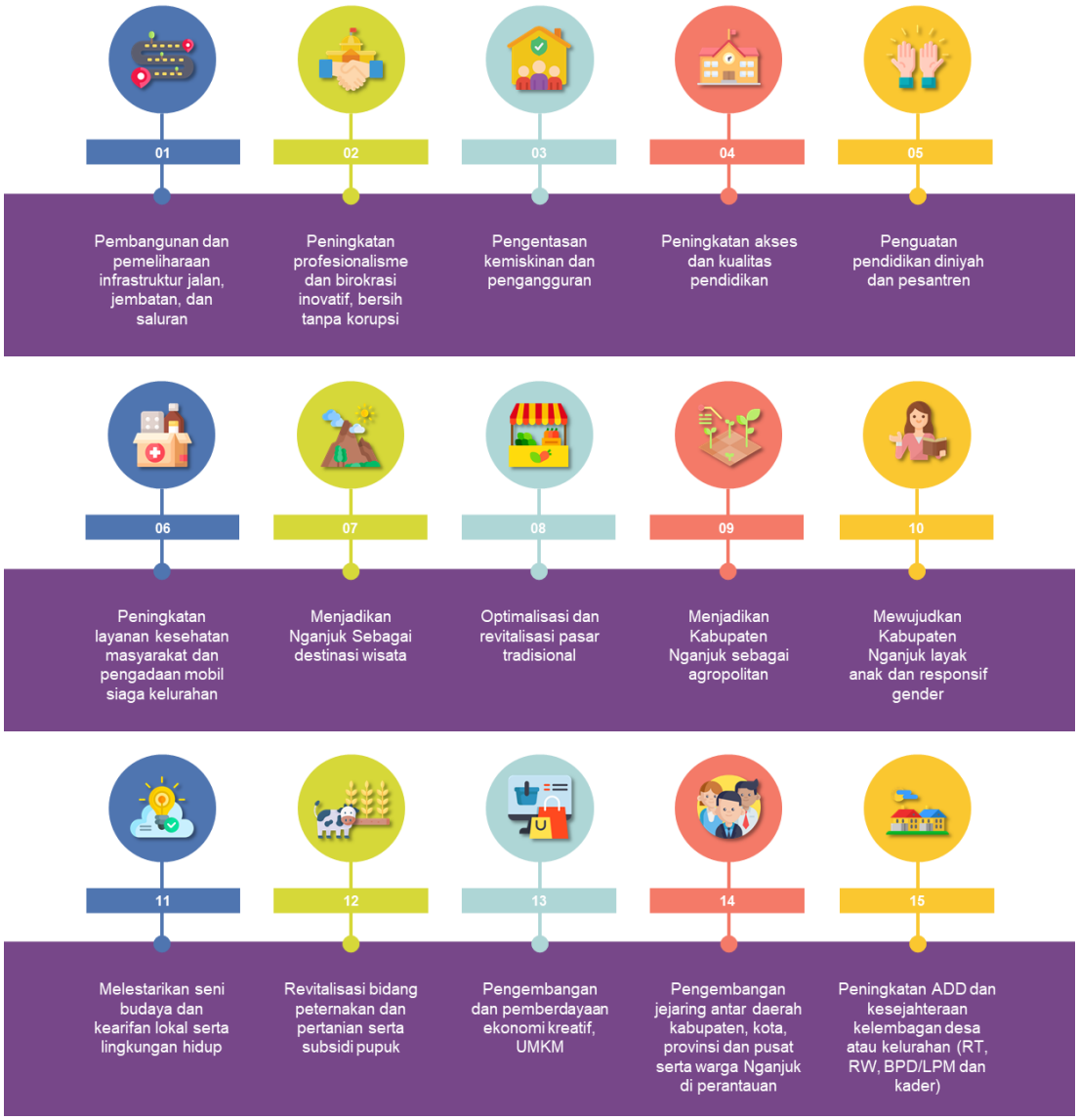
pertanian yang mendukung rantai pasok yang efisien. Program ketahanan pangan juga harus memperhatikan aspek kemandirian petani serta akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau.

Terakhir, ketahanan sumber daya alam menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah, serta konservasi sumber daya alam harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Pola pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan perlu diterapkan melalui pendekatan ekonomi sirkular, efisiensi penggunaan air, serta rehabilitasi lahan kritis. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan lingkungan serta mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam.

Dengan menghadapi tantangan ini melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, dan kebijakan berbasis riset, pembangunan daerah ke depan dapat lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program terpilih yang secara teknokratik memiliki kontribusi besar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program prioritas merupakan elaborasi antara program utama pendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diselaraskan dengan 15 (Lima Belas) Program Prioritas Kepala Daerah.



Implementasi program prioritas diharapkan dapat menjadi langkah percepatan bagi pencapaian tujuan pembangunan lebih efektif dan efisien. Berikut disajikan Program Prioritas Kepala Daerah yang harus diimplementasikan selama periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disajikan berikut ini

TABEL 3.8. TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
20252029 - Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat - Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban - Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan - Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan - Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran			Indeks Kesalehan Sosial(Indeks)		
		Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)		
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)		
			Meningkatnya fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan	Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**(PU.5) Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren**
			Meningkatnya fasilitasi kewaspadaan dini dan penanganan potensi konflik didaerah	Cakupan laporan kewaspadaan dini didaerah yang ditindaklanjuti (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
		Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)		
			Meningkatnya daya tarik museum	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke museum (%)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**(PU.11) Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup**
			Meningkatnya pelestarian sejarah dan warisan budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
berkualitas - Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal - Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna - Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN		Nilai Sistem Merit (Nilai)		
			Meningkatanya Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan hasil Uji Kompetensi Optimal Dan Cukup Optimal (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
				Rasio Jabatan Fungsional yang bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatanya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis, manajerial dan fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya disiplin ASN	Persentase ASN yang tidak di jatuhi hukuman disiplin (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP berkinerja minimal Baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi (diluar tenaga guru dan kesehatan) (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya pengelolaan data ASN yang terintegrasi dengan SIASN	persentase pengelolaan data ASN yang terintegrasi dengan SIASN (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya pengembangan karier jabatan struktural	Persentase keterisian jabatan struktural (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)		
				Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**(PU.14) Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan**
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bagor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**(PU.6) Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan**
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kertosono	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**(PU.6) Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan**
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjunganom	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**(PU.6) Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan**
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**(PU.6) Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan**

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Nganjuk	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**(PU.6) Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan**
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**(PU.15) Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)**
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kertosono	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**(PU.15) Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)**
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**(PU.15) Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)**
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro			**(PU.15) Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)**
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tanjunganom	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**(PU.15) Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)**
			Meningkatnya Kebijakan Sektor Prioritas Pembangunan Nasional dan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkualitas dan Inklusif	Persentase Kebijakan Sektor Prioritas Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Indeks Tata Kelola Pengadaan (Skor)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
				Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah, Kewilayahan, dan Kerjasama yang tepat waktu, tepat subtansi, dan sesuai ketentuan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
			Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kesesuaian program prioritas daerah	Persentase capaian kinerja sasaran strategis Renstra PD dengan predikat minimal tinggi (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
				Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah terhadap prioritas daerah dan isu daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**(PU.5) Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren**
			Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
			Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola dalam kondisi baik (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi dan difasilitasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengembangan potensi unggulan dan penyelesaian permasalahan pembangunan (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Terwujudnya Fasilitasi kebijakan di bidang Kinerja OPD, Pelayanan Publik, Penataan Organisasi dan Tata Laksana	Persentase Kebijakan di Bidang Kinerja OPD, Pelayanan Publik, Penataan Organisasi dan Tata Laksana yang difasilitasi (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
		Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
				Indeks Integritas Pemerintah Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi	Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
			Meningkatnya efektivitas pencegahan resiko fraud pada perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Fraud Control Planning (FCP) sesuai standar (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan	PersentaseTindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP > 80% (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas manajemen resiko perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan manajemen resiko sesuai standart (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas pengawasan berbasis resiko	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan berbasis resiko sesuai standar (Dokumen)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya pembangunan zona integritas	Persentase Perangkat Daerah yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	Persentase laporan pengaduan masyarakat yang terselesaikan (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya peran APIP sebagai assurance dan consulting sesuai dengan PKPT berbasis resiko	Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)		
				Rasio kapasitas fiskal daerah (Rasio)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut/Wajib Retribusi	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
			Meningkatnya Penerapan Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital	Indeks Elektronifikasi Pemerintah daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase Realisasi lain-lain PAD yang sah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	persentase peningkatan subyek/obyek pajak/ retribusi daerah yang dimuktahirkan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi** **(PU.15) Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)**
				Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan aset daerah yg sesuai ketentuan (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Meningkatnya kualitas layanan publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Cakupan penerbitan akta kematian (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Cakupan penerbitan akta perkawinan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Cakupan penerbitan akta perceraian (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan IKD (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Cakupan Penerbitan KIA (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
				Cakupan penerbitan KK (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Cakupan penerbitan KTP-El (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase dokumen administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Sarana dan Prasarana yang layak (%)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
		Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah		Indeks Pemerintah Digital (Indeks)		
			Meningkatnya keamanan aplikasi dan infrastruktur daerah	Persentase aplikasi pemerintah daerah yang memenuhi standart keamanan informasi (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk (Skor)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya proporsi sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik	Persentase sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
	Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur(Indeks)		
		Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal		Rasio Konektivitas (Rasio)		
				Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)		
			Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya ketaatan berlalu lintas	Persentase pengemudi angkutan orang dan barang yang taat peraturan berlalu lintas (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Konstruksi Jalan	Persentase panjang jalan yang meningkat kualitas konstruksinya (fleksibel dan rigid pavement) (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**(PU.1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran**
			Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung Negara	Persentase bangunan gedung negara yang berkualitas (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya layanan infrastruktur jaringan irigasi	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya Layanan Sanitasi Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Pelayanan Air Minum Layak dan Aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Pelayanan Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Persampahan	Persentase jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Persentase sistem pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik (sungai,dam, dll) (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen KKPR yang di keluarkan (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya SDM konstruksi yang bersertifikat	Persentase peningkatan jumlah SDM konstruksi yang bersertifikat (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	Persentase penerapan manajemen rekayasa lalu lintas (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Load factor angkutan umum (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Optimalisasi kapasitas jalan melalui pengelolaan perparkiran	Persentase ketaatan parkir (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan yang berfungsi optimal (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
		Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
			Meningkatnya Pemanfaatan Tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Bidang Tanah Yang Difasilitasi Penatagunaan Tanahnya (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**(PU.1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran**
			Meningkatnya pembangunan dan perbaikan rumah baru secara swadaya	Persentase Pengajuan PBG/SLF Rumah Swadaya yang diterbitkan (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya pembangunan perumahan oleh developer	Persentase Rumah terbangun oleh developer (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Terlaksananya intervensi penyediaan rumah layak huni diluar Kawasan kumuh Oleh Pemerintah	Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**(PU.3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya efektifitas perencanaan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**(PU.11) Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup**
			Meningkatnya fasilitasi terhadap pengaduan lingkungan hidup	Persentase fasilitasi terhadap pengaduan LH (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya pemenuhan RTH	Persentase RTH memenuhi standar teknis (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya pengelolaan limbah industri	Persentase limbah industri yang terkelola (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah	persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Penurunan emisi GRK	Penurunan Emisi GRK kumulatif (Ton CO2 Eq) (TON CO2 EQ)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			MENINGKATNYA PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENDAPAT LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**(PU.11) Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup**
			MENINGKATNYA PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	PERSENTASE REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI YANG DILAKUKAN (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya air minum aman, Meningkatnya kualitas SKUDR Permukiman, Meningkatnya pemberdayaan kesehatan berbasis masyarakat	Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**(PU.6) Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan**
				Jumlah Permukiman yang memenuhi syarat (Satuan Permukiman (SP))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Desa ber-STBM Lima Pilar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya angka populasi bebas penyakit menular	Insidensi TBC per 100.000 penduduk (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Annual parasite insdence malaria per 1000 penduduk (Per 1000 Penduduk)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insidensi HIV per 1000 penduduk (Per 1000 Penduduk)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase kematian akibat dengue (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya angka populasi bebas penyakit tidak menular	Presentase DM dalam pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase Puskesmas melaksanakan upaya berhenti merokok (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase hipertensi dalam pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya deteksi dini faktor resiko penyakit, Menurunnya risiko penyakit degeneratif	Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok umur (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya fasyankes yang sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME	Prosentase fasyankes sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kekebalan kelompok, Menurunnya kasus keracunan pangan	Jumlah kasus keracunan pangan (Kasus)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Bagor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Berbek	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Gondang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Jatikalen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Kertosono	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Lengkong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Loceret	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Nganjuk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Ngetos	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Ngluyu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Ngronggot	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Pace	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Patianrowo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Prambon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Rejoso	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				(Nilai)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Sawahan	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Sukomoro	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Tanjunganom	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Wilangan	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio nakes dan named sesuai populasi (Rasio)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Dinas Kesehatan)	Persentase Labkesmas Tk 2 dengan SPA sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Bagor)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Baron)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Berbek)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Gondang)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Jatikalen)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Kertosono)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Lengkong)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Loceret)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Nganjuk)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Ngetos)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas ngluyu)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas ngronggot)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Pace)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Patianrowo)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas prambon)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Rejoso)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Sawahan)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Sukomoro)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Tanjunganom)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Wilangan)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (RSUD Kertosono)	Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (RSUD Nganjuk)	Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya mutu layanan primer dan labkesmas tk-2, Meningkatnya kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang mencapai target INM (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				IKM Layanan Kesehatan RSUD, Puskesmas, dan Labkesmas Tk-2) (Nilai)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Labkesmas Tk 2 yang mencapai target INM (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu layanan rujukan dan kemandirian keuangan BLUD RSUD Kertosono	Indeks Nasional Mutu (INM) Ketepatan Waktu Visite Dokter (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				CRR (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Penggunaan APD (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD Kertosono (Indeks)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				TOI (Hari)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan penggunaan formularium nasional (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kecepatan Waktu Tanggap Komplain (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Terhadap Alur klinis (Clinical Pathway) (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tunggu Rawat Jalan (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Penundaan Operasi Elektif (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepuasan Pasien (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				BOR (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				NDR (Per 1000 Penduduk)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya mutu layanan rujukan dan kemandirian keuangan BLUD RSUD Nganjuk	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Penggunaan APD (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan RSUD Nganjuk (Indeks)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tunggu Rawat Jalan (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				BOR (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Ketepatan Waktu Visite Dokter (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan penggunaan formularium nasional (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kecepatan Waktu Tanggap Komplain (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Terhadap Alur klinis (Clinical Pathway) (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Penundaan Operasi Elektif (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				CRR (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				NDR (Per 1000 Penduduk)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				TOI (Hari)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Kepuasan Pasien (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Pelayanan Gizi masyarakat	Presentase Bumil KEK (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting pada balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insiden Stunting pada Balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia 6-23 Bulan mendapatkan MPASI (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Bayi 6 Bulan mendapatkan ASI eksklusif (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase kabupaten kota dengan CFR direct obstetric (eklampsi dan perdarahan post partum <1%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada anak	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Neonatal (per 1000 kelahiran hidup) (Per 1.000 Kelahiran)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya perlindungan kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya tingkatan kabupaten sehat	Tingkatan Kabupaten Sehat (Predikat)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya upaya gaya hidup sehat pada masyarakat	Persentase Pustu dan Puskesmas yang menyelenggarakan program aktifitas fisik (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya upaya kesehatan jiwa	Prevalensi depresi pada usia lebih dari sama dengan 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Terpenuhinya perbekalan kesehatan sesuai standar difasyankes	Persentase faskes primer dengan Obat, Vaksin dan BMHP sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Meningkatnya akses dan mutu pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Murni Kesetaraan (7-18) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**(PU.4) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan**
				Angka Partisipasi Murni PAUD (5-6 Tahun) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat (7-12) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat (13-15) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kemampuan Literasi Peserta Didik yang Mencapai Kompetensi Minimum	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket C (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Prosentase Peserta didik SMP dengan Kemampuan Literasi mencapai Kompetensi Minimum (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Prosentase Peserta didik SD dengan Kemampuan Literasi mencapai Kompetensi Minimum (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kemampuan Numerasi Peserta Didik yang Mencapai Kompetensi Minimum	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum SD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket C (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Mengikuti Diklat (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Indeks Distribusi Guru (Skor)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional Aktif (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Memiliki Akreditasi Minimal B	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Memiliki Akreditasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik SD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik Paket C (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik SD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik Paket C (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				SMP (%)		
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik SD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik Paket C (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Meningkatnya kesetaraan gender		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	Persentase ARG (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**(PU.10) Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender**
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak oleh PD (%)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Meningkatnya Peran Lembaga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya Peran Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peran serta Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial melalui Pelatihan dan Sosialisasi (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatakan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga		Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga (%)		
			Meningkatnya pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**(PU.3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)		
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase Keluarga akseptor yang Memiliki Usaha Ekonomi produktif (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Lansia	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**(PU.6) Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan**
			Meningkatnya Pengetahuan Orang Tua dalam Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Menurunnya kelahiran Pasangan Usia Subur pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Terwujudnya Edukasi Keluarga yang memiliki Remaja	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
		Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya koleksi bahan pustaka	Persentase peningkatan bahan pustaka (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**(PU.4) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan**
			Meningkatnya pelestarian koleksi naskah kuno	Persentase peningkatan naskah kuno yang dilestarikan (%)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya pengelolaan perpustakaan sesuai standart	Persentase perpustakaan yang ber SNP (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya pengelolaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip (Perangkat Daerah)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi**
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan			Tingkat Kemiskinan((%))		
				Rasio Gini(Indeks)		
		Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
			Meningkatnya Pengelolaan TMP	Persentase TMP yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**(PU.3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**
			Meningkatnya Peran TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase TKSK yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS sesuai dengan SPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Meningkatnya kemandirian desa		Indeks Desa (Indeks)		
			Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**(PU.15) Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)**
			Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa	Persentase BUMDes yang aktif dan menghasilkan laba (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Kapasitas kelembagaannya diberdayakan (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Penataan Desa yang Legal, Efektif dan Berkelanjutan	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Desa (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa	Persentase desa dengan tata kelola keuangan yang baik (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Terjalinnya Kerjasama Desa yang Produktif dan Legal	Persentase Desa yg melaksanakan kerja sama yang produktif dan legal (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.			Pertumbuhan Ekonomi(%)		
		Meningkatnya nilai tambah pertanian		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kelasnya (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**(PU.9) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan (PU.12) Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk**
			Meningkatnya kualitas Prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pemanfaatan benih unggul	Persentase Petani yang menggunakan bibit unggul (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pemenuhan sarana pertanian	Persentase alsintan dalam kondisi baik (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase ketersediaaan pupuk terhadap kebutuhan pupuk (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya populasi ternak	Persentase Peningkatan populasi ternak Ruminansia (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Peningkatan Populasi Unggas (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Menurunnya Kejadian Kasus Penyakit Hewan	Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Terbitnya rekomendasi usaha peternakan	Prosentase Terbitnya rekomendasi usaha peternakan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Tertanganinya area yang terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang tertangani (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Terwujudnya fasilitasi ijin usaha pertanian	Prosentase izin usaha pertanian yang terfasiitasi penerbitan NIB (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
		Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
			Meningkatkannya jaminan perlindungan konsumen melalui kepatuhan pemilik UTTP melakukan tera/tera ulang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**(PU.8) Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional**
			Meningkatnya kemudahan perizinan IKM	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya kepatuhan pelaporan usaha industri	Persentase usaha industri yang patuh melaporkan dalam SIINAS (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya kepatuhan perizinan pelaku usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Persentase pelaku usaha perdagangan yang taat perizinan (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya kualitas produk industri	Persentase produk IKM yang bersertifikasi (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya nilai ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya penggunaan sarpras yang berkualitas	Persentase IKM yang memiliki sarana prasarana produksi dalam kondisi baik (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya perluasan pemasaran perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang terakses pasar (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya pertumbuhan usaha industri	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya produk IKM yang diajukan sertifikasi	Persentase produk IKM yang layak difasilitasi sertifikasi (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Terbentuknya perwilayahan industri	Persentase perwilayahan industri yang terbentuk (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Terkendalinya harga bahan pokok	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Koefisien laju harga bapokting (Angka)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
		Meningkatnya investasi daerah		Nilai Investasi (Rp)		
			Meningkatnya daya tarik investasi	Persentase peningkatan proyek investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**(PU.3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya ketepatan penerbitan perizinan dan non perizinan	Persentase penerbitan perizinan tepat waktu (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas LKPM	Persentase pelaku usaha/investor yang melaporkan LKPM (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
		Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro		Persentase peningkatan volume usaha mikro (%)		
				Persentase peningkatan koperasi berkualitas (%)		
			Meningkatnya kapasitas usaha mikro yang berkembang	Persentase usaha mikro yang mendapatkan akses pasar moderen (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan perkoperasian	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**PU.13) Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM**
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya kualitas tata kelola koperasi	Persentase koperasi dengan kategori sehat dan cukup sehat (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		Menurunnya pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan (%)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**(PU.3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**
			Meningkatnya kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Presentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya penanganan perselisihan HI	Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama (PB) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya tata kelola dan perlindungan ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompentesi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah.		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatkan Cadangan Pangan	Persentase cadangan pangan (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**(PU.9) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan**
			Meningkatnya pangan segar yang aman	Persentase uji sampel yang aman (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS/PROGRAM UNGGULAN BUPATI (PU)
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**(PU.12) Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk**
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Menurunnya desa rawan pangan	Persentase desa rawan pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**(PU.3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**
			Mewujudkan konsumsi pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi	Persentase angka konsumsi sesuai AKG (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Tersedianya sarpras cadangan pangan yang berkualitas	Persentase infrastruktur cadangan pangan dalam kondisi baik (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	**(PU.9) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan**
		Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang terkelola (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**(PU.7) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata**
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	Presentase peningkatan produk ekonomi kreatif (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**PU.13) Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM**
				Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

3.2.3. Penyelarasan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

3.2.3.1. Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional dan Pelaksanaa Kegiatan Prioritas Utama (KPU) pada RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 memberikan dukungan sejumlah Program Prioritas Nasional dan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) pada RPJMN Tahun 2025-2029, dengan rincian Program Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.9. DUKUNGAN PROGRAM RPJMD KABUPATEN NGANJUK 2025-2029 TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS UTAMA ASTACITA RPJMN 2025-2029

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
1.	Proritas Nasional I			
	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1.	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
				4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.	Prioritas Nasional II			
	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui	6.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
	Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
				3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		7.	Pembangunan pangan akuatik (blue food)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
				3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		8.	Pembangunan pangan hewani	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
				3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
				3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		9.	Pembangunan pangan lokal dan nabati	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		14.	Konservasi sumberdaya air	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		15.	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
				1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		16.	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman,	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
			berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	LIMBAH
				1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		18.	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		20.	Pengelolaan susut dan sisa pangan	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		21.	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		22.	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
				2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
				KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		24.	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
				2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		25.	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
3.	Prioritas Nasional III			
	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	28.	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
		33.	Penguatan ekosistem aplikasi dan gim	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		34.	Pengembangan koperasi sektor produksi	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
				2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
				2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
				2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
4.	Prioritas Nasional IV			
	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	35.	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		36.	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
				4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		37.	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		38.	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		39.	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		41.	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		42.	Penurunan kematian ibu dan anak	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
		43.	Pencegahan dan penurunan stunting	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
				2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
				1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
				1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
				1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
				2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
				1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
				2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		44.	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				2.14.04 – PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		45.	Penuntasan TBC	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
				DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		46.	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		47.	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		48.	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
				DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		49.	Investasi pelayanan kesehatan primer	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		50.	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		51.	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		52.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		53.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
			dan inovasi	
		54.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
5.	Prioritas Nasional V			
	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	-	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
				3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
6.	Prioritas Nasional VI			
	Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	70.	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	1.06.02 – PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
				SOSIAL
				1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		74.	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
				1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
				1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		75.	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA
				2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
				2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				2.13.05 – PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
				HUKUM ADAT
7.	Prioritas Nasional VII			
	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	76.	Pencegahan tindak pidana korupsi	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
				6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		77.	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		78.	Transformasi digital layanan publik prioritas	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		79.	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
8.	Prioritas Nasional VIII			
	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis	81.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN

No.	Prioritas Nasional	No.	Kegiatan Prioritas Utama	Program Perangkat Daerah
	Dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur			KARAKTER KEBANGSAAN
		82.	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
				2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
				2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Tabel 3.10. DUKUNGAN PROGRAM RPJMD KABUPATEN NGANJUK 2025-2029 TERHADAP ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN 2025-2029 DI KABUPATEN NGANJUK

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Program Perangkat Daerah
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Program Perangkat Daerah
		3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikulutara	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada DAS-Brantas	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Program Perangkat Daerah
	tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Program Perangkat Daerah
	kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama	
	Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.2.3.2. Dukungan Program Daerah terhadap Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 juga memberikan dukungan Program Kerja Prioritas Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, dengan rincian Program Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Dukungan dan Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029/ Program Kerja Prioritas Jatim	Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029/ Program Unggulan Kepala Daerah
1.	Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	(PK.4) Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
	(1) PKH Plus (2) Klinik BUMDes (3) Desa Devisa (4) Jatim Puspa Plus (5) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP) (6) Bantuan Sosial bagi Miskin Ekstrem (7) Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Wani Sejahtera (PUTRI Jawara) (8) Keluarga Penerima Manfaat Jawa Timur Wani Sejahtera (KPM Jawara) (9) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Wani Sejahtera (PPKS Jawara) (10) Elektrifikasi (11) Rumah Tinggal Layak Huni (12) Jambanisasi (13) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (14) Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif	(PU.3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran (PU.15) Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029/ Program Kerja Prioritas Jatim	Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029/ Program Unggulan Kepala Daerah
	Inklusif Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) (15) Pengurangan Beban 26 PPKS (16) Pemberdayaan BUMDes (17) Desa Berdaya (18) Jatim Infinity	
2.	Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	(PK.5) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal
		(PK.6) Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna
	(1) Millenium Job Centre (2) EkoTren-One Pesantren One Product (3) Youth Creativepreneur Center (YC2) (4) Job Market Fair (5) Pelatihan Kerja dan Revitalisasi UPT Balai Latihan Kerja (BLK) dan Mobile Training Unit (MTU) (6) Promosi Dagang dan Investasi (7) Sadar Legalitas Berusaha (SALEHA) (8) Stabilisasi Harga (9) Koperasi Sektor Riil (10) Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) dan Dana Bergulir (DAGULIR) (11) Klinik Investasi (12) Ekosistem Halal	(PU.3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran (PU.7) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata (PU.8) Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional (PU.13) Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
3.	Jatim Akses, Memperkuat Infrastuktur Konektivitas	(PK.3) Mewujudkan percepatan pembangunan

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029/ Program Kerja Prioritas Jatim	Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029/ Program Unggulan Kepala Daerah
	Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan	infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
	(1) Trans Jatim Plus (2) Mudik Balik Gratis (3) Pemenuhan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan (4) Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang (5) Penanganan Jalan dan Jembatan	(PU.1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
4.	Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	(PK.5) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal
	(1) Youth Agrifuture-Hub (2) Hilirisasi dan Korporasi Pertanian (Agri-Industri Pedesaan) (3) Jatim Agro-Hub (4) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (5) Penanganan Banjir (6) Asuransi Petani (7) Kemandirian Pangan	(PU.9) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan (PU.12) Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
5.	Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan	(PK.4) Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
	(1) Jatim World Class Education (2) Beasiswa Santri Unggul (3) East Java Center of Literacy	(PU.4) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan (PU.5) Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029/ Program Kerja Prioritas Jatim	Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029/ Program Unggulan Kepala Daerah
	(4) Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) (5) Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu (6) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)/BOSDA MADIN (7) Bantuan Untuk SMK Jurusan Prioritas (8) Pendidikan Kesetaraan Berbasis Vokasi (Kejar Paket) (9) Double Track (Program Pendidikan Formal dan Program Ketrampilan Kewirausahaan) (10) Millenial Incubation for Entrepreneurship dan Innovation (MILEA) (11) Sekolah Boarding (12) Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan (13) Peningkatan Kesejateraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (14) Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Guru Non ASN jenjang TK/SD/SMP (15) Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN (16) Cerdas Digital (Cerdig) (17) Bantuan Pendidikan Siswa Keluarga Prasejahtera	
6.	Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan	(PK.4) Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
	(1) Jatim World Class Hospital Collaboration (2) Kesehatan Inklusif Preventif dan Aksesibel (KIPA)	(PU.6) Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029/ Program Kerja Prioritas Jatim	Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029/ Program Unggulan Kepala Daerah
	(3) Bunda Anak Impian (BUAIAN) (4) Mental Wellness and Happiness Service	
7.	Jatim Berkah-Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	(PK.2) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
	(1) Birokrasi Transformatif 4.0	(PU.2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi (PU.14) Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
8.	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	(PK.1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban
		(PK.4) Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
		PK.7) Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal
	(1) Sentra Penguatan Seniman, Budayawan dan Warisan Seni Adat (SENIWARIS) (2) Kenduri Kebhinekaan (3) Ngopi dan Kolaborasi Serap Aspirasi (4) Tunjangan Kehormatan Juru Pelihara Cagar Budaya (5) Kualitas dan Ketahanan Keluarga, Pemenuhan	(PU.10) Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender (PU.11) Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029/ Program Kerja Prioritas Jatim	Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029/ Program Unggulan Kepala Daerah
	Hak Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak (6) Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (7) Pelestarian Naskah Kuno (8) Sistem Integrasi Penyelenggaraan Transtibumlinmas Jawa Timur (9) Jawa Timur Pusat Arsip, Memori dan Peradaban (JATIMPURA)	
9.	Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	(M.3) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
	(1) Bersih dengan Renewable Energy (BERSERI) (2) Desa Wisata Cerdas, Mandiri dan Sejahtera (Dewi Cemara) (3) Mangrove Lestari (4) Penanggulangan Bencana (5) Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (6) Pengendalian Pencemaran Air (7) Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat (8) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional (9) Penyediaan Akses Sanitasi Aman (10) Penanganan Desa Rawan Kekeringan (11) DAS Berkualitas	(PU.11) Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sangat bergantung pada efektivitas implementasi strategi, penetapan arah kebijakan, serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Strategi pembangunan berfungsi sebagai rencana tindakan yang komprehensif, mencakup berbagai langkah dan upaya yang akan dilakukan guna mengoptimalkan sumber daya, menentukan tahapan, menetapkan lokus, serta mengidentifikasi program prioritas dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah. Dengan strategi yang tepat, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai secara berkelanjutan dan terarah.

Strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah, yang merupakan proses pentahapan pembangunan berdasarkan prioritas tahunan guna memastikan pencapaian tujuan kepala daerah. Dalam penyusunan RPJMD, arah kebijakan ini menjadi pedoman utama dalam menetapkan tahapan pembangunan selama lima tahun ke depan, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki kesinambungan dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang.

Selain itu, implementasi pembangunan daerah juga diwujudkan melalui program-program yang dirancang secara sistematis untuk mencapai hasil atau sasaran (outcome) tertentu di masa mendatang. Setiap program pembangunan harus disusun dengan indikator kinerja yang jelas agar pelaksanaannya dapat terukur dan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Dengan sinergi antara strategi, kebijakan, dan program prioritas yang tepat, Kabupaten Nganjuk dapat

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

4.1. Program Perangkat Daerah

Belanja daerah akan dialokasikan pada rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh para perangkat daerah di Kabupaten Nganjuk. Harapannya, belanja tersebut dapat dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga target indikator program dapat tercapai dan pada akhirnya berdampak pada capaian indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja utama daerah yang telah ditetapkan.

Program sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini merupakan kumpulan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Nganjuk tahun 2026-2030. Mengingat bahwa waktu penyusunan dokumen RPJMD ini dilaksanakan pada saat APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan, maka periode dalam tabel berikut ini mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah tahun 2026-2030. Pencantuman target pembangunan tahun 2030 merupakan upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, dimana kinerja tahun 2030 sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah masa bhakti berikutnya.

Rincian detail program perangkat daerah, indikator kinerja beserta target dan pagu anggarannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.361.170.347.828,000		1.373.349.534.768,000		1.383.005.954.218,000		1.394.204.906.218,000		1.394.406.580.218,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					789.208.560.276,000		789.466.462.576,000		789.336.382.026,000		789.465.834.026,000		789.467.508.026,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	81,65	82,00	82,65	789.208.560.276,000	83,65	789.466.462.576,000	84,65	789.336.382.026,000	85,65	789.465.834.026,000	85,65	789.467.508.026,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					554.977.119.352,000		566.888.403.992,000		576.664.903.992,000		587.724.403.992,000		587.924.403.992,000	
Meningkatnya Kemampuan Literasi Peserta Didik yang Mencapai Kompetensi Minimum	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket A (%)	60	73,34	86,67	159.284.258.384,000	100	161.792.433.264,000	100	163.754.433.264,000	100	165.950.433.264,000	100	165.950.433.264,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket B (%)	36,59	37,92	39,25		40,58		41,91		43,24		43,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket C (%)	35,84	40,05	44,27		48,49		52,7		56,92		56,92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Prosentase Peserta didik SD dengan Kemampuan Literasi mencapai Kompetensi Minimum (%)	61,75	66,78	71,81		76,84		81,87		86,9		86,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Prosentase Peserta didik SMP dengan Kemampuan Literasi mencapai Kompetensi Minimum (%)	50,57	57,03	63,49		69,95		76,41		82,87		82,87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kemampuan Numerasi Peserta Didik yang Mencapai Kompetensi Minimum	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket A (%)	80	100	100	159.284.258.384,000	100	161.792.433.264,000	100	163.754.433.264,000	100	165.950.433.264,000	100	165.950.433.264,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket B (%)	25,61	26,33	27,05		27,77		28,49		29,21		29,21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket C (%)	26,52	30,47	34,43		38,39		42,34		46,30		46,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum SD (%)	57,21	57,94	58,68		59,42		60,15		60,89		60,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum SMP (%)	32,89	34,41	35,93		37,45		38,97		40,49		40,49		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik Paket A (%)	61,29	64,61	67,93	372.475.000,000	71,25	477.475.000,000	74,57	582.475.000,000	77,89	687.475.000,000	77,89	687.475.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik Paket B (%)	62,64	67,83	73,02		78,21		83,4		88,59		88,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik Paket C (%)	60,66	68,76	76,86		84,96		93,06		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik SD (%)	75,46	87,27	99,08		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik SMP (%)	73,82	75,23	76,64		78,05		79,46		80,87		80,87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik Paket A (%)	58,59	62,41	66,23	372.475.000,000	70,05	477.475.000,000	73,87	582.475.000,000	77,69	687.475.000,000	77,69	687.475.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik Paket B (%)	54,92	55,71	56,51		57,31		58,1		58,90		58,90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik Paket C (%)	54,24	54,62	55		55,38		55,76		56,14		56,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik SD (%)	58,29	60,13	61,98		63,83		65,67		67,52		67,52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik SMP (%)	55,9	56,71	57,52		58,33		59,14		59,95		59,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik SMP (%)	69,67	71,94	74,21	372.475.000,000	76,48	477.475.000,000	78,75	582.475.000,000	81,02	687.475.000,000	81,02	687.475.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik Paket B (%)	66,05	67,88	69,71		71,54		73,37		75,2		75,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik Paket A (%)	73,41	75,56	77,71		79,86		82,01		84,16		84,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik Paket C (%)	62,39	67,46	72,54		77,62		82,69		87,77		87,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik SD (%)	75,31	77,87	80,44		83,01		85,57		88,14		88,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Memiliki Akreditasi Minimal B	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Memiliki Akreditasi Minimal B (%)	73,3	73,30	86,3	24.640.369.000,000	99,3	24.640.369.000,000	100	24.640.369.000,000	100	24.640.369.000,000	100	24.640.369.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Murni Kesetaraan (7-18) (%)	12,41	18,25	24,09	210.650.808.584,000	29,93	217.230.743.464,000	35,77	222.768.243.464,000	41,61	229.120.743.464,000	41,61	229.320.743.464,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni PAUD (5-6 Tahun) (%)	83,22	84,39	85,56		86,73		87,9		89,07		89,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat (7-12) (%)	99,75	99,98	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat (13-15) (%)	97,89	99,12	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					16.926.918.300,000		16.926.918.300,000		16.926.918.300,000		16.926.918.300,000		16.926.918.300,000	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru (Skor)	0,58	1,01	1,44	16.926.918.300,000	1,87	16.926.918.300,000	2,3	16.926.918.300,000	2,73	16.926.918.300,000	2,73	16.926.918.300,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (%)	72,8	80,8	88,8		96,8		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Megikuti Diklat (%)	54,58	72,73	90,88		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					57.749.900,000		67.749.900,000		77.749.900,000		87.749.900,000		87.749.900,000	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional Aktif (%)	100	100	100	57.749.900,000	100	67.749.900,000	100	77.749.900,000	100	87.749.900,000	100	87.749.900,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					611.859.302.786,000		691.839.388.278,000		689.469.903.234,000		867.458.576.576,000		880.916.583.385,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					455.129.292.486,000		464.760.403.978,000		473.381.277.834,000		483.060.608.636,000		493.341.538.651,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	60,50	65	70	165.275.803.596,000	72	166.991.043.717,000	73	167.090.543.717,000	75	167.301.043.717,000	80	167.333.073.717,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Bagor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	3.341.836.419,000	78	3.676.020.060,000	79	4.043.622.066,000	80	4.447.984.272,000	81	4.892.782.699,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	3.445.956.185,000	78	3.790.551.803,000	79	4.169.606.983,000	80	4.586.567.681,000	81	5.045.224.449,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Berbek	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	4.451.453.240,000	78	4.735.294.609,000	79	5.208.824.070,000	80	5.729.706.477,000	81	6.302.677.125,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Gondang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	3.704.814.636,000	78	4.075.296.100,000	79	4.482.825.710,000	80	4.931.108.281,000	81	5.424.219.109,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Jatikalen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	1.273.873.080,000	78	1.401.260.388,000	79	1.541.386.427,000	80	1.695.525.069,000	81	1.865.077.576,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Kertosono	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	3.622.428.720,000	78	3.984.671.592,000	79	4.383.138.751,000	80	4.821.452.626,000	81	5.303.597.889,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Lengkong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	2.601.000.000,000	78	2.861.100.000,000	79	3.147.210.000,000	80	3.461.931.000,000	81	3.808.124.100,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Loceret	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	5.010.187.955,000	78	5.511.206.751,000	79	6.062.327.426,000	80	6.365.443.797,000	81	6.683.715.987,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Nganjuk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	3.714.306.399,000	78	4.085.737.039,000	79	4.494.310.743,000	80	4.943.741.817,000	81	5.438.115.999,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Ngetos	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	2.400.999.206,000	78	2.641.099.127,000	79	2.905.209.039,000	80	3.195.729.943,000	81	3.515.302.938,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Ngluyu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	1.448.445.055,000	78	1.593.289.561,000	79	1.752.618.517,000	80	1.927.880.368,000	81	2.120.668.405,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Ngronggot	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	6.754.876.274,000	78	7.430.363.901,000	79	8.173.400.292,000	80	8.990.740.321,000	81	9.889.814.353,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Pace	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	3.823.571.959,000	78	4.205.929.155,000	79	4.626.522.070,000	80	5.089.174.277,000	81	5.598.091.705,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	2.743.685.924,000	78	3.018.054.516,000	79	3.319.859.968,000	80	3.651.845.965,000	81	4.017.030.561,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Patianrowo														Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Prambon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	5.462.100.000,000	78	6.008.310.000,000	79	6.609.141.000,000	80	7.270.055.100,000	81	7.997.060.610,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Rejoso	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	4.859.677.523,000	78	5.345.645.275,000	79	5.880.209.803,000	80	6.468.230.783,000	81	7.115.053.861,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Sawahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	3.603.693.957,000	78	3.964.063.353,000	79	4.360.469.688,000	80	4.796.516.657,000	81	5.276.168.322,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Sukomoro	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	3.347.413.132,000	78	3.682.154.445,000	79	4.050.369.890,000	80	4.455.406.879,000	81	4.900.947.567,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Tanjunganom	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	6.686.333.478,000	78	6.546.793.263,000	79	6.585.910.419,000	80	6.627.375.225,000	81	6.671.328.460,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Wilangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	76,61	77	77	2.556.835.748,000	78	2.712.519.323,000	79	2.993.771.255,000	80	3.303.148.381,000	81	3.643.463.219,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu layanan rujukan dan kemandirian keuangan BLUD RSUD Nganjuk	BOR (%)	65,88	70	70,5	130.000.000.000,000	71	131.000.000.000,000	71,5	132.000.000.000,000	72	133.000.000.000,000	72,5	134.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	CRR (%)	103	90	91		92		93		94		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan RSUD Nganjuk (Indeks)	79,88	82	82,3		82,7		83		83,2		83,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kecepatan Waktu Tanggap Komplain (%)	76,66	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	91,15	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	81,45	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Penggunaan APD (%)	93,83	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan penggunaan formularium nasional (%)	95	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Terhadap Alur klinis (Clinical Pathway) (%)	66,32	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (%)	99,09	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepuasan Pasien (%)	73,67	76,61	76,61		76,61		76,61		76,61		76,61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Ketepatan Waktu Visite Dokter (%)	85,87	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium (%)	92,05	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Penundaan Operasi Elektif (%)	1,64	< 5	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi (%)	7,21	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tunggu Rawat Jalan (%)	80,13	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	NDR (Per 1000 Pasien Keluar Hidup dan Mati)	8,25	45	42		38		36		35		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	TOI (Hari)	2	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu layanan rujukan dan kemandirian keuangan BLUD RSUD Kertosono	BOR (%)	69,08	70	72	85.000.000.000,000	74	85.500.000.000,000	76	85.500.000.000,000	78	86.000.000.000,000	80	86.500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	CRR (%)	86,23	86,4	86,65		86,95		87,05		87,3		87,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD Kertosono (Indeks)	84,09	85	85,5		85,9		86		86,5		86,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kecepatan Waktu Tanggap Komplain (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	98,1	98,2	98,3		98,4		98,5		98,6		98,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	83,7	83,9	84,1		84,3		84,5		84,7		84,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Penggunaan APD (%)	93,7	93,9	94,1		94,3		94,5		94,7		94,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan penggunaan formularium nasional (%)	64,8	65	65,2		65,4		65,6		65,8		66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Terhadap Alur klinis (Clinical Pathway) (%)	50	50	51		52		53		54		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (%)	98	98,1	98,2		98,3		98,4		98,5		98,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepuasan Pasien (%)	84,09	85,1	85,2		85,3		85,4		85,5		85,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Ketepatan Waktu Visite Dokter (%)	95,2	95,3	95,4		95,5		95,6		95,7		95,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Penundaan Operasi Elektif (%)	0,42	0,4	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tunggu Rawat Jalan (%)	39,79	43	43,5		44		44,5		45		45,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	NDR (Per 1000 Pasien Keluar Hidup dan Mati)	24,94	24,9	24,8		24,6		24,4		24,2		24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	TOI (Hari)	1,83	2	2,2		2,4		2,6		2,8		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					154.086.270.300,000		223.619.870.300,000		212.353.600.000,000		380.340.440.000,000		383.173.764.000,000	
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar (%)	26,8	26,8	35	550.000.000,000	35	1.500.000.000,000	35	1.500.000.000,000	85	1.500.000.000,000	85	1.500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anemia ibu hamil (%)	27,7	27,7	26		26		26		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (%)	20	20	25		25		25		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase kabupaten kota dengan CFR direct obstetric (eklampsi dan perdarahan post partum <1%) (%)	20	20	25		25		25		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Gizi masyarakat	Insiden Stunting pada Balita (%)	3	2,3	2,3	550.000.000,000	1,7	1.600.000.000,000	1,3	1.600.000.000,000	1	1.600.000.000,000	1	1.600.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia 6-23 Bulan mendapatkan MPASI (%)	60,9	60,9	73		73		73		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Bayi 6 Bulan mendapatkan ASI eksklusif (%)	68,6	68,6	73		73		73		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Bumil KEK (%)	15	15	15		15		15		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting pada balita (%)	8,5	8	8		8		8		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya air minum aman, Meningkatnya kualitas SKUDR Permukiman, Meningkatnya pemberdayaan kesehatan berbasis masyarakat	Desa ber-STBM Lima Pilar (%)	18	18	25	200.000.000,000	28	250.000.000,000	32	250.000.000,000	35	250.000.000,000	39	250.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Permukiman yang memenuhi syarat (Satuan Permukiman (SP))	50	50	100		150		200		250		300		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi syarat (%)	5	5	5		6		7		8		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya perbekalan kesehatan sesuai standar difasyankes	Persentase faskes primer dengan Obat, Vaksin dan BMHP sesuai standar (%)	85	85	88	13.050.000.000,000	90	14.055.000.000,000	93	15.060.000.000,000	95	15.565.000.000,000	95	16.070.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya tingkatan kabupaten sehat	Tingkatan Kabupaten Sehat (Predikat)	Padapa	Padapa	Padapa	200.000.000,000	Wiwerda	300.000.000,000	Wiwerda	300.000.000,000	Wistara	300.000.000,000	Wistara	300.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya upaya kesehatan jiwa	Prevalensi depresi pada usia lebih dari sama dengan 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4	178.400.000,000	1,4	172.000.000,000	1,4	172.000.000,000	1,4	172.000.000,000	1,4	172.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya deteksi dini faktor resiko penyakit, Menurunnya risiko penyakit degeneratif	Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok umur (%)	25	25	35	175.000.000,000	46	625.000.000,000	55	625.000.000,000	61	625.000.000,000	70	625.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%)	23,4	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya angka populasi bebas penyakit tidak menular	Presentase DM dalam pengendalian (%)	90	90	17,5	339.000.000,000	20	399.000.000,000	22,5	413.400.000,000	25	428.240.000,000	25	443.564.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase hipertensi dalam pengendalian (%)	85	85	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Puskesmas melaksanakan upaya berhenti merokok (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kekebalan kelompok, Menurunnya kasus keracunan pangan	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	81,37	80	85	255.000.000,000	90	365.000.000,000	93	370.000.000,000	95	375.000.000,000	95	380.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%)	69	74	78		82		86		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah kasus keracunan pangan (Kasus)	≤ 2	≤ 2	≤ 2		≤ 2		≤ 2		≤ 2		≤ 2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu layanan primer dan labkesmas tk-2, Meningkatnya kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	IKM Layanan Kesehatan RSUD, Puskesmas, dan Labkesmas Tk-2) (Nilai)	60	60	60	965.000.000,000	65	1.015.000.000,000	70	1.065.000.000,000	75	1.115.000.000,000	80	1.165.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Labkesmas Tk 2 yang mencapai target INM (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang mencapai target INM (%)	10	10	20		30		40		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya perlindungan kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	96	96	98	91.500.000.000,000	98	101.500.000.000,000	98	101.500.000.000,000	98	101.500.000.000,000	99	101.500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya fasyankes yang sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME	Prosentase fasyankes sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME (%)	22,9	28,99	43,48	165.670.300,000	57,97	165.670.300,000	72,46	170.000.000,000	86,96	170.000.000,000	100	170.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Dinas Kesehatan)	Persentase Labkesmas Tk 2 dengan SPA sesuai standar (%)	30	70	70	22.770.000.000,000	90	24.805.000.000,000	95	27.460.000.000,000	100	29.872.000.000,000	100	32.130.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	40	40	50		60		75		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	45	45	60		70		75		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Bagor)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	500.000.000,000	60	500.000.000,000	60	500.000.000,000	60	500.000.000,000	60	500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Baron)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	500.000.000,000	80	500.000.000,000	60	500.000.000,000	60	500.000.000,000	60	500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Berbek)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	640.000.000,000	60	640.000.000,000	60	640.000.000,000	60	640.000.000,000	60	640.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Gondang)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	635.000.000,000	60	635.000.000,000	60	635.000.000,000	60	635.000.000,000	60	635.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Jatikalen)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	695.000.000,000	60	695.000.000,000	60	695.000.000,000	60	695.000.000,000	60	695.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Kertosono)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	665.200.000,000	60	665.200.000,000	60	665.200.000,000	60	665.200.000,000	60	665.200.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Lengkong)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	975.000.000,000	60	975.000.000,000	60	975.000.000,000	60	975.000.000,000	60	975.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Loceret)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	480.000.000,000	60	480.000.000,000	60	480.000.000,000	60	480.000.000,000	60	480.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Nganjuk)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	603.000.000,000	60	603.000.000,000	60	603.000.000,000	60	603.000.000,000	60	603.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas ngluyu)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	1.180.000.000,000	60	1.180.000.000,000	60	1.180.000.000,000	60	1.180.000.000,000	60	1.180.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas ngronggot)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	538.000.000,000	60	538.000.000,000	60	538.000.000,000	60	538.000.000,000	60	538.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Pace)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	682.000.000,000	60	682.000.000,000	60	682.000.000,000	60	682.000.000,000	60	682.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar	60	60	60	835.000.000,000	60	835.000.000,000	60	835.000.000,000	60	835.000.000,000	60	835.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan lanjutan (Puskesmas Patianrowo)	(%)													Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas prambon)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	702.000.000,000	60	702.000.000,000	60	702.000.000,000	60	702.000.000,000	60	702.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Rejoso)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	1.055.000.000,000	60	1.055.000.000,000	60	1.055.000.000,000	60	1.055.000.000,000	60	1.055.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Sawahan)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	998.000.000,000	60	998.000.000,000	60	998.000.000,000	60	998.000.000,000	60	998.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Sukomoro)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	704.000.000,000	60	704.000.000,000	60	704.000.000,000	60	704.000.000,000	60	704.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Tanjunganom)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	489.000.000,000	60	489.000.000,000	60	489.000.000,000	60	489.000.000,000	60	489.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Wilangan)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	850.000.000,000	60	850.000.000,000	60	850.000.000,000	60	850.000.000,000	60	850.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (RSUD Nganjuk)	Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	78	78,5	79	7.000.000.000,000	79,6	50.000.000.000,000	80	35.000.000.000,000	80,5	200.000.000.000,000	81	200.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (RSUD Kertosono)	Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	80,42	81	82	0,000	84	10.000.000.000,000	86	10.000.000.000,000	88	10.000.000.000,000	90	10.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Ngetos)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	60	60	60	517.000.000,000	60	517.000.000,000	60	517.000.000,000	60	517.000.000,000	60	517.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada anak	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	16,85	16,85	12,62	100.000.000,000	12,62	300.000.000,000	12,62	300.000.000,000	12,62	300.000.000,000	9,96	300.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (per 1000 kelahiran hidup)	9,3	9,3	9,2		9,2		9,2		7,2		7,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya angka populasi bebas penyakit menular	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	60	90	90	1.845.000.000,000	90	2.325.000.000,000	90	2.325.000.000,000	90	2.325.000.000,000	90	2.325.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Annual parasite insdence malaria per 1000 penduduk (Per 1000 Penduduk)	0,01	<1	<1		<1		<1		<1		<1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	60	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV per 1000 penduduk (Per 1000 Penduduk)	0,24	0,24	0,18		0,18		0,18		0,16		0,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi TBC per 100.000 penduduk (Angka)	130	252	252		231		211		190		190		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase kematian akibat dengue (%)	2	2	1		0,7		0,7		0,6		0,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					250.000.000,000		210.000.000,000		216.500.000,000		238.150.000,000		261.965.000,000	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio nakes dan named sesuai populasi (Rasio)	5,3:1000	5,3:1000	5.3:1000	250.000.000,000	5,4:1000	210.000.000,000	5,4:1000	216.500.000,000	5,5:1000	238.150.000,000	5,5:1000	261.965.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					440.000.000,000		605.000.000,000		610.000.000,000		620.000.000,000		620.000.000,000	
Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	100	100	100	440.000.000,000	100	605.000.000,000	100	610.000.000,000	100	620.000.000,000	100	620.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.953.740.000,000		2.644.114.000,000		2.908.525.400,000		3.199.377.940,000		3.519.315.734,000	
Meningkatnya upaya gaya hidup sehat pada masyarakat	Persentase Pustu dan Puskesmas yang menyelenggarakan program aktifitas fisik	50	50	50	1.953.740.000,000	60	2.644.114.000,000	65	2.908.525.400,000	70	3.199.377.940,000	70	3.519.315.734,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(%)													Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					273.700.849.283,340		301.010.934.210,000		331.052.027.631,000		364.097.230.395,000		400.446.953.436,000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.485.096.000,000		35.693.605.600,000		39.222.966.160,000		43.105.262.776,000		47.375.789.054,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75	76	77	32.485.096.000,000	78	35.693.605.600,000	79	39.222.966.160,000	80	43.105.262.776,000	81	47.375.789.054,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					22.522.500.000,000		24.774.750.000,000		27.252.225.000,000		29.977.447.500,000		32.975.192.250,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Persentase sistem pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik (sungai,dam, dll) (%)	76,43	76,93	77,43	11.200.000.000,000	77,93	12.320.000.000,000	78,43	13.552.000.000,000	78,93	14.907.200.000,000	79,43	16.397.920.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya layanan infrastruktur jaringan irigasi	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik (%)	75,31	75,36	75,41	11.322.500.000,000	75,46	12.454.750.000,000	75,51	13.700.225.000,000	75,56	15.070.247.500,000	75,61	16.577.272.250,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.000.000.000,000		2.200.000.000,000		2.420.000.000,000		2.662.000.000,000		2.928.200.000,000	
Meningkatnya Pelayanan Air Minum Layak dan Aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	97,314	97,334	97,354	2.000.000.000,000	97,374	2.200.000.000,000	97,394	2.420.000.000,000	97,414	2.662.000.000,000	97,434	2.928.200.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.500.000.000,000		1.650.000.000,000		1.815.000.000,000		1.996.500.000,000		2.196.150.000,000	
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Persampahan	Persentase jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun (%)	70	70,02	70,04	1.500.000.000,000	70,06	1.650.000.000,000	70,08	1.815.000.000,000	70,10	1.996.500.000,000	70,12	2.196.150.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.100.000.000,000		1.190.000.000,000		1.289.000.000,000		1.397.900.000,000		1.517.690.000,000	
Meningkatnya Layanan Sanitasi Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	91,46	91,48	91,50	1.100.000.000,000	91,52	1.190.000.000,000	91,54	1.289.000.000,000	91,56	1.397.900.000,000	91,58	1.517.690.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					15.200.000.000,000		16.720.000.000,000		18.392.000.000,000		20.231.200.000,000		22.254.320.000,000	
Meningkatnya Pelayanan Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	60	60,02	60,04	15.200.000.000,000	60,06	16.720.000.000,000	60,08	18.392.000.000,000	60,10	20.231.200.000,000	60,12	22.254.320.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					29.842.302.519,000		32.826.532.770,000		36.109.186.047,000		39.720.104.652,000		43.692.115.118,000	
Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung Negara	Persentase bangunan gedung negara yang berkualitas (%)	83,33	83,34	83,35	29.842.302.519,000	83,36	32.826.532.770,000	83,37	36.109.186.047,000	83,38	39.720.104.652,000	83,39	43.692.115.118,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					166.950.950.764,340		183.646.045.840,000		202.010.650.424,000		222.211.715.467,000		244.432.887.014,000	
Meningkatnya Kualitas Konstruksi Jalan	Persentase panjang jalan yang meningkat kualitas konstruksinya (fleksibel dan rigid pavement) (%)	68,214	70,05	72,35	166.950.950.764,340	74,31	183.646.045.840,000	76,28	202.010.650.424,000	78,25	222.211.715.467,000	80,22	244.432.887.014,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					100.000.000,000		110.000.000,000		121.000.000,000		133.100.000,000		146.410.000,000	
Meningkatnya SDM konstruksi yang bersertifikat	Persentase peningkatan jumlah SDM konstruksi yang bersertifikat (%)	63,77	64,00	64,30	100.000.000,000	64,35	110.000.000,000	64,40	121.000.000,000	64,45	133.100.000,000	64,50	146.410.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.000.000.000,000		2.200.000.000,000		2.420.000.000,000		2.662.000.000,000		2.928.200.000,000	
Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW (%)	100	100	100	1.000.000.000,000	100	1.100.000.000,000	100	1.210.000.000,000	100	1.331.000.000,000	100	1.464.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen KKPR yang di keluarkan (%)	100	100	100	1.000.000.000,000	100	1.100.000.000,000	100	1.210.000.000,000	100	1.331.000.000,000	100	1.464.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					21.677.129.238,000		24.069.608.029,000		24.846.118.832,000		26.720.280.715,000		26.639.858.786,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.934.558.208,000		7.765.108.029,000		8.541.618.832,000		9.395.780.715,000		10.335.358.786,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	77,5	79	80	6.934.558.208,000	81	7.765.108.029,000	82	8.541.618.832,000	83	9.395.780.715,000	84	10.335.358.786,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.130.000.000,000		1.130.000.000,000		1.230.000.000,000		1.130.000.000,000		1.230.000.000,000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	880.000.000,000	100	860.000.000,000	100	960.000.000,000	100	860.000.000,000	100	960.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya pembangunan perumahan oleh developer	Persentase Rumah terbangun oleh developer (%)	55,52	55,59	55,67	150.000.000,000	55,74	150.000.000,000	55,81	150.000.000,000	55,87	150.000.000,000	55,94	150.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya pembangunan dan perbaikan rumah baru secara swadaya	Persentase Pengajuan PBG/SLF Rumah Swadaya yang diterbitkan (%)	100	100	100	100.000.000,000	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					4.465.998.480,000		5.502.000.000,000		5.452.000.000,000		6.072.000.000,000		5.452.000.000,000	
Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	4,9	4,9	4.465.998.480,000	4,9	5.502.000.000,000	4,9	5.452.000.000,000	4,9	6.072.000.000,000	4,9	5.452.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					5.889.572.550,000		6.802.500.000,000		6.752.500.000,000		7.252.500.000,000		6.752.500.000,000	
Terlaksananya intervensi penyediaan rumah layak huni diluar Kawasan kumuh Oleh Pemerintah	Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha (%)	2,44	3,24	2,77	5.889.572.550,000	3,24	6.802.500.000,000	3,26	6.752.500.000,000	3,28	7.252.500.000,000	3,3	6.752.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					3.257.000.000,000		2.870.000.000,000		2.870.000.000,000		2.870.000.000,000		2.870.000.000,000	
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU (%)	21,68	23,78	25,87	3.257.000.000,000	27,97	2.870.000.000,000	30,07	2.870.000.000,000	32,17	2.870.000.000,000	34,27	2.870.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN					32.186.210.219,000		39.917.331.873,000		42.189.590.584,000		45.835.089.949,000		46.272.812.108,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MASYARAKAT														
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.184.443.219,000		26.890.573.373,000		28.167.142.434,000		30.478.066.084,000		30.627.700.843,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	83,1	83,2	83,33	4.602.509.000,000	83,53	5.670.857.000,000	83,69	5.726.550.000,000	83,81	6.377.050.000,000	83,90	5.948.050.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	78,50	90	79,25	7.889.647.719,000	81,50	11.669.367.273,000	83	12.119.919.714,000	83,50	12.725.161.028,000	84	13.303.795.787,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	62	63	68	8.692.286.500,000	69	9.550.349.100,000	70	10.320.672.720,000	71	11.375.855.056,000	72	11.375.855.056,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.347.765.500,000		5.711.887.000,000		5.884.228.000,000		6.120.005.200,000		6.634.092.600,000	
Meningkatnya pencegahan gangguan trantibum	Persentase gangguan trantibum yang dapat dicegah (%)	85	85	65	1.955.163.650,000	69	3.147.900.000,000	73	3.147.900.000,000	77	3.164.700.000,000	80	3.539.800.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya penindakan gangguan trantibum	Persentase penindakan gangguan trantibum yang tertangani (%)	65	65	69	1.212.269.800,000	73	1.230.270.000,000	77	1.365.270.000,000	80	1.490.270.000,000	80	1.525.270.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani (%)	65	65	69	456.600.650,000	73	358.717.000,000	77	396.058.000,000	80	490.035.200,000	80	594.022.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya pemberdayaan Satlinmas	Persentase pemberdayaan Satlinmas (%)	33	40	43	723.731.400,000	73	975.000.000,000	77	975.000.000,000	80	975.000.000,000	80	975.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					3.343.000.000,000		3.771.500.000,000		4.090.500.000,000		4.851.500.000,000		4.625.500.000,000	
MENINGKATNYA PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENDAPAT LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA (%)	0,0023	0,0023	0,0025	87.500.000,000	0,0028	96.000.000,000	0,0030	105.000.000,000	0,0032	415.000.000,000	0,0034	150.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Masyarakat Sub Urusan Bencana
MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	0,685	0,686	0,688	2.313.500.000,000	0,693	2.513.500.000,000	0,695	2.763.500.000,000	0,696	3.043.500.000,000	0,698	3.068.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
MENINGKATNYA PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	90	90	90	559.000.000,000	90	639.000.000,000	90	699.000.000,000	90	770.000.000,000	90	784.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	PERSENTASE REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI YANG DILAKUKAN (%)	69,5	71,5	72,5	383.000.000,000	73,5	523.000.000,000	74,5	523.000.000,000	75,5	623.000.000,000	76,5	623.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					3.311.001.500,000		3.543.371.500,000		4.047.720.150,000		4.385.518.665,000		4.385.518.665,000	
Meningkatnya peran masyarakat dalam melakukan pencegahan kebakaran	Persentase kecamatan yang telah dibentuk relawan kebakaran (%)	10	10	10	81.100.000,000	10	121.000.000,000	10	190.500.000,000	10	190.500.000,000	10	190.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan non kebakaran	Persentase pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang terselesaikan (%)	100	100	100	3.229.901.500,000	100	3.422.371.500,000	100	3.857.220.150,000	100	4.195.018.665,000	100	4.195.018.665,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					21.140.654.055,000		25.110.704.866,000		29.870.191.839,000		35.581.205.205,000		42.417.702.747,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.247.494.605,000		11.096.913.526,000		13.316.392.231,000		15.979.670.676,000		19.159.188.811,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	78,15	78,20	78,25	9.247.494.605,000	78,30	11.096.913.526,000	78,35	13.316.392.231,000	78,40	15.979.670.676,000	78,45	19.159.188.811,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					528.000.000,000		631.100.000,000		754.570.000,000		902.459.000,000		1.079.623.300,000	
Meningkatnya Peran TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase TKSK yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	100	100	100	528.000.000,000	100	631.100.000,000	100	754.570.000,000	100	902.459.000,000	100	1.079.623.300,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					4.614.200.000,000		5.337.040.000,000		6.204.448.000,000		7.245.337.600,000		8.494.405.120,000	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	60	65	70	4.614.200.000,000	75	5.337.040.000,000	80	6.204.448.000,000	85	7.245.337.600,000	90	8.494.405.120,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti (%)	60	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti (%)	60	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti (%)	60	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (%)	60	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					5.610.960.000,000		6.677.652.000,000		7.953.182.400,000		9.483.818.880,000		11.320.582.656,000	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	65	70	75	5.610.960.000,000	80	6.677.652.000,000	85	7.953.182.400,000	90	9.483.818.880,000	95	11.320.582.656,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.049.999.900,000		1.259.999.880,000		1.511.999.856,000		1.814.399.827,000		2.177.279.793,000	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	65	70	75	1.049.999.900,000	80	1.259.999.880,000	85	1.511.999.856,000	90	1.814.399.827,000	95	2.177.279.793,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					89.999.550,000		107.999.460,000		129.599.352,000		155.519.222,000		186.623.067,000	
Meningkatnya Pengelolaan TMP	Persentase TMP yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	89.999.550,000	100	107.999.460,000	100	129.599.352,000	100	155.519.222,000	100	186.623.067,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					11.122.389.350,000		11.673.542.000,000		12.291.736.000,000		13.014.986.000,000		13.328.586.000,000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.109.986.000,000		7.109.986.000,000		7.109.986.000,000		7.109.986.000,000		7.109.986.000,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75,20	76	76,10	7.109.986.000,000	76,20	7.109.986.000,000	76,40	7.109.986.000,000	76,70	7.109.986.000,000	77	7.109.986.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		250.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Presentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	80	80,10	80,17	100.000.000,000	80,25	100.000.000,000	80,28	100.000.000,000	80,34	250.000.000,000	80,50	100.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					756.797.000,000		857.000.000,000		957.000.000,000		1.062.000.000,000		1.157.000.000,000	
Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompentesi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	52,76	52,80	52,82	756.797.000,000	52,83	857.000.000,000	52,85	957.000.000,000	52,87	1.062.000.000,000	52,88	1.157.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.264.867.150,000		1.468.256.000,000		1.785.000.000,000		2.051.000.000,000		2.218.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten (%)	73,21	75	77	1.264.867.150,000	79	1.468.256.000,000	81	1.785.000.000,000	83	2.051.000.000,000	85	2.218.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.890.739.200,000		2.138.300.000,000		2.339.750.000,000		2.542.000.000,000		2.743.600.000,000	
Meningkatnya penanganan perselisihan HI	Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama (PB) (%)	90	90,10	90,15	369.507.600,000	90,20	510.000.000,000	90,25	511.450.000,000	90,30	512.400.000,000	90,35	513.350.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya tata kelola dan perlindungan ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	22,94	27,46	30,26	1.521.231.600,000	33,06	1.628.300.000,000	35,86	1.828.300.000,000	38,66	2.029.600.000,000	41,46	2.230.250.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	54,55	55	55,05		55,10		55,15		55,20		55,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.764.788.169,000		6.920.745.803,000		8.295.894.964,000		9.946.073.156,000		11.926.288.747,000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					958.500.000,000		1.150.200.000,000		1.380.240.000,000		1.656.288.000,000		1.987.545.600,000	
Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	Persentase ARG (%)	28,3141	28,50	28,75	618.500.000,000	29,00	742.200.000,000	29,40	890.640.000,000	29,70	1.068.768.000,000	30,00	1.282.521.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Peran Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peran serta Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial melalui Pelatihan dan Sosialisasi (%)	0,92	0,59	0,75	340.000.000,000	1,15	408.000.000,000	1,20	489.600.000,000	1,25	587.520.000,000	1,40	705.024.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					689.475.000,000		827.370.000,000		992.844.000,000		1.191.412.000,000		1.429.695.360,000	
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatakan Layanan Komprehensif (%)	65	70	75	689.475.000,000	80	827.370.000,000	85	992.844.000,000	90	1.191.412.000,000	95	1.429.695.360,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					940.485.030,000		1.128.582.036,000		1.354.298.444,000		1.625.158.132,000		1.950.189.758,000	
Meningkatnya Peran Lembaga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	72,36	73,45	73,60	940.485.030,000	73,80	1.128.582.036,000	74,25	1.354.298.444,000	74,60	1.625.158.132,000	75,10	1.950.189.758,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					45.000.000,000		57.000.000,000		59.400.000,000		62.280.000,000		65.736.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak oleh PD (%)	100	100	100	45.000.000,000	100	57.000.000,000	100	59.400.000,000	100	62.280.000,000	100	65.736.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					1.554.128.139,000		1.864.953.767,000		2.237.944.520,000		2.685.533.424,000		3.222.640.109,000	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	65,57	65,60	65,60	1.554.128.139,000	65,65	1.864.953.767,000	65,70	2.237.944.520,000	65,75	2.685.533.424,000	65,80	3.222.640.109,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1.577.200.000,000		1.892.640.000,000		2.271.168.000,000		2.725.401.600,000		3.270.481.920,000	
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	85,32	85,40	85,40	1.577.200.000,000	85,45	1.892.640.000,000	85,50	2.271.168.000,000	85,55	2.725.401.600,000	85,60	3.270.481.920,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					14.463.636.000,000		14.648.711.000,000		15.026.146.000,000		15.390.901.000,000		15.732.705.000,000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.957.636.000,000		8.043.636.000,000		8.138.636.000,000		8.223.636.000,000		8.289.136.000,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75,35	75,5	76	7.957.636.000,000	77	8.043.636.000,000	78,5	8.138.636.000,000	80	8.223.636.000,000	81,5	8.289.136.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1.712.000.000,000		1.714.000.000,000		1.716.000.000,000		1.718.000.000,000		1.720.000.000,000	
Tersedianya sarpras cadangan pangan yang berkualitas	Persentase infrastruktur cadangan pangan dalam kondisi baik (%)	42,71	43,68	44,66	1.712.000.000,000	45,63	1.714.000.000,000	46,6	1.716.000.000,000	47,57	1.718.000.000,000	48,54	1.720.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					4.394.000.000,000		4.471.075.000,000		4.731.510.000,000		4.989.265.000,000		5.248.569.000,000	
Meningkatkan Cadangan Pangan	Persentase cadangan pangan (%)	100	100	100	2.724.000.000,000	100	2.693.075.000,000	100	2.830.110.000,000	100	2.972.625.000,000	100	3.109.365.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Mewujudkan konsumsi pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi sesuai AKG (%)	88,86	100	100	1.670.000.000,000	100	1.778.000.000,000	100	1.901.400.000,000	100	2.016.640.000,000	100	2.139.204.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					195.000.000,000		200.000.000,000		210.000.000,000		215.000.000,000		220.000.000,000	
Menurunnya desa rawan pangan	Persentase desa rawan pangan (%)	0,7	0,7	0,7	195.000.000,000	0,7	200.000.000,000	0,7	210.000.000,000	0,7	215.000.000,000	0,7	220.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					205.000.000,000		220.000.000,000		230.000.000,000		245.000.000,000		255.000.000,000	
Meningkatnya pangan segar yang aman	Persentase uji sampel yang aman (%)	100	100	100	205.000.000,000	100	220.000.000,000	100	230.000.000,000	100	245.000.000,000	100	255.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					350.000.000,000		360.000.000,000		360.000.000,000		360.000.000,000		360.000.000,000	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					350.000.000,000		360.000.000,000		360.000.000,000		360.000.000,000		360.000.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Bidang Tanah Yang Difasilitasi Penatagunaan Tanahnya (%)	99,75	100	100	350.000.000,000	100	360.000.000,000	100	360.000.000,000	100	360.000.000,000	100	360.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					32.445.000.000,000		32.445.000.000,000		32.445.000.000,000		32.615.000.000,000		32.785.000.000,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.015.000.000,000		18.015.000.000,000		18.015.000.000,000		18.015.000.000,000		18.015.000.000,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,5	80,5	80,5	18.015.000.000,000	80,6	18.015.000.000,000	80,7	18.015.000.000,000	80,7	18.015.000.000,000	80,7	18.015.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya efektifitas perencanaan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	80	80	80	600.000.000,000	80	600.000.000,000	80	600.000.000,000	80	600.000.000,000	80	600.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					930.000.000,000		930.000.000,000		930.000.000,000		930.000.000,000		930.000.000,000	
Penurunan emisi GRK	Penurunan Emisi GRK kumulatif (Ton CO2 Eq) (TON CO2 EQ)	263.561,09	268.883,65	274.261,33	930.000.000,000	279.746,56	930.000.000,000	285.341,49	930.000.000,000	291.048,32	930.000.000,000	296.869,28	930.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					4.050.000.000,000		4.050.000.000,000		4.050.000.000,000		4.050.000.000,000		4.050.000.000,000	
Meningkatnya pemenuhan RTH	Persentase RTH memenuhi standar teknis (%)	0,570	0,576	0,578	4.050.000.000,000	0,580	4.050.000.000,000	0,582	4.050.000.000,000	0,584	4.050.000.000,000	0,586	4.050.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		640.000.000,000		680.000.000,000	
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	78	79,5	80	600.000.000,000	81,5	600.000.000,000	82	600.000.000,000	83,5	640.000.000,000	84	680.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		240.000.000,000		280.000.000,000	
Meningkatnya pengelolaan limbah industri	Persentase limbah industri yang terkelola (%)	41,76	43,75	44,56	200.000.000,000	47,89	200.000.000,000	51,02	200.000.000,000	54,45	240.000.000,000	58,17	280.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		630.000.000,000		660.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7,25	7,73	8,21	600.000.000,000	8,68	600.000.000,000	9,16	600.000.000,000	9,64	630.000.000,000	10,11	660.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		240.000.000,000		280.000.000,000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (%)	7,54	8,02	8,49	200.000.000,000	8,97	200.000.000,000	9,45	200.000.000,000	9,92	240.000.000,000	10,40	280.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		220.000.000,000		240.000.000,000	
Meningkatnya fasilitasi terhadap pengaduan lingkungan hidup	Persentase fasilitasi terhadap pengaduan LH (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	220.000.000,000	100	240.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					7.050.000.000,000		7.050.000.000,000		7.050.000.000,000		7.050.000.000,000		7.050.000.000,000	
Meningkatnya pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah	persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	23,85	24,81	25,76	3.525.000.000,000	26,71	3.525.000.000,000	27,66	3.525.000.000,000	28,61	3.525.000.000,000	29,56	3.525.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	28,07	28,27	28,47	3.525.000.000,000	28,67	3.525.000.000,000	28,87	3.525.000.000,000	29,07	3.525.000.000,000	29,27	3.525.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10.546.000.000,000		10.928.000.000,000		11.249.000.000,000		11.599.000.000,000		11.976.000.000,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					8.701.000.000,000		8.953.000.000,000		9.129.000.000,000		9.299.000.000,000		9.576.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	78,85	79	80	8.701.000.000,000	80,01	8.953.000.000,000	80,02	9.129.000.000,000	80,03	9.299.000.000,000	80,04	9.576.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					765.000.000,000		825.000.000,000		895.000.000,000		950.000.000,000		1.005.000.000,000	
Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan IKD (%)	13,45	14	15	765.000.000,000	16	825.000.000,000	17	895.000.000,000	18	950.000.000,000	19	1.005.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Penerbitan KIA (%)	30,02	33	35		40		45		50		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan KK (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan KTP-El (%)	99,44	99,49	99,54		99,59		99,64		99,69		99,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					490.000.000,000		520.000.000,000		555.000.000,000		590.000.000,000		625.000.000,000	
Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun (%)	93,53	95	96	490.000.000,000	97	520.000.000,000	98	555.000.000,000	99	590.000.000,000	99	625.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penerbitan akta kematian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan akta perceraian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan akta perkawinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					430.000.000,000		470.000.000,000		510.000.000,000		590.000.000,000		590.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (%)	33,33	45,83	50	430.000.000,000	54,16	470.000.000,000	58,83	510.000.000,000	62,50	590.000.000,000	62,50	590.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					160.000.000,000		160.000.000,000		160.000.000,000		170.000.000,000		180.000.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	100	100	100	160.000.000,000	100	160.000.000,000	100	160.000.000,000	100	170.000.000,000	100	180.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					13.536.316.976,000		15.182.678.674,000		16.510.308.541,000		17.961.929.425,000		19.726.582.568,000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					7.650.216.976,000		8.615.748.674,000		9.624.958.541,000		10.421.929.425,000		11.479.077.568,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	74,15	75	76	7.650.216.976,000	77	8.615.748.674,000	78	9.624.958.541,000	79	10.421.929.425,000	80	11.479.077.568,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					130.000.000,000		143.000.000,000		157.300.000,000		173.250.000,000		190.605.000,000	
Meningkatnya Penataan Desa yang Legal, Efektif dan Berkelanjutan	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Desa (%)	27	27	28	130.000.000,000	29	143.000.000,000	31	157.300.000,000	34	173.250.000,000	37	190.605.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					205.100.000,000		225.630.000,000		237.900.000,000		262.700.000,000		281.200.000,000	
Terjalinnya Kerjasama Desa yang Produktif dan Legal	Persentase Desa yg melaksanakan kerja sama yang produktif dan legal (%)	70	70	87	205.100.000,000	87	225.630.000,000	87	237.900.000,000	87	262.700.000,000	87	281.200.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.504.000.000,000		5.079.800.000,000		5.297.350.000,000		5.831.650.000,000		6.418.450.000,000	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa	Persentase desa dengan tata kelola keuangan yang baik (%)	70	75	78	3.115.000.000,000	80	3.426.500.000,000	82	3.769.200.000,000	85	4.146.000.000,000	87	4.560.700.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik (%)	71,93	71,93	77,7	1.185.000.000,000	79,62	1.428.800.000,000	81,54	1.281.150.000,000	83,46	1.413.950.000,000	85,38	1.558.850.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa	Persentase BUMDes yang aktif dan menghasilkan laba (%)	15	20	25	204.000.000,000	30	224.500.000,000	35	247.000.000,000	40	271.700.000,000	45	298.900.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.047.000.000,000		1.118.500.000,000		1.192.800.000,000		1.272.400.000,000		1.357.250.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Kapasitas kelembagaannya diberdayakan (%)	28	45	37	1.047.000.000,000	42	1.118.500.000,000	47	1.192.800.000,000	52	1.272.400.000,000	57	1.357.250.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					32.231.203.125,000		33.906.565.047,000		35.606.893.300,000		37.391.237.969,000		39.263.799.861,000	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.582.408.000,000		10.061.528.400,000		10.564.604.820,000		11.092.835.061,000		11.647.476.814,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,50	84,00	82,00	9.582.408.000,000	83,00	10.061.528.400,000	84,00	10.564.604.820,000	85,00	11.092.835.061,000	86,00	11.647.476.814,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.309.371.250,000		1.374.839.813,000		1.443.581.804,000		1.515.760.894,000		1.591.548.938,000	
Menurunnya kelahiran Pasangan Usia Subur pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	42,05	40	39	1.309.371.250,000	38	1.374.839.813,000	37	1.443.581.804,000	36	1.515.760.894,000	35	1.591.548.938,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					13.382.034.375,000		14.114.937.859,000		14.825.684.752,000		15.570.968.992,000		16.352.517.438,000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	73,82	80,06	80,07	13.382.034.375,000	80,08	14.114.937.859,000	80,09	14.825.684.752,000	80,10	15.570.968.992,000	80,11	16.352.517.438,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					7.957.389.500,000		8.355.258.975,000		8.773.021.924,000		9.211.673.022,000		9.672.256.671,000	
Meningkatnya Pengetahuan Orang Tua dalam Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) (%)	53,8	54	55	6.234.637.500,000	55,10	6.546.369.375,000	55,20	6.873.687.844,000	55,30	7.217.372.236,000	55,40	7.578.240.848,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Edukasi Keluarga yang memiliki Remaja	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) (%)	84,09	85,31	86,44	420.500.000,000	87,48	441.525.000,000	88,44	463.601.250,000	89,33	486.781.313,000	90,44	511.120.378,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Lansia	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	58,06	59,37	59,88	847.000.000,000	60,39	889.350.000,000	60,89	933.817.500,000	61,39	980.508.376,000	61,89	1.029.533.794,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase Keluarga akseptor yang Memiliki Usaha Ekonomi produktif (%)	83,62	84,00	85,00	455.252.000,000	85,10	478.014.600,000	85,20	501.915.330,000	85,30	527.011.097,000	85,40	553.361.651,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					60.266.500.000,000		62.256.500.000,000		62.176.500.000,000		62.576.500.000,000		62.936.500.000,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.316.500.000,000		13.986.500.000,000		13.586.500.000,000		13.666.500.000,000		13.706.500.000,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	82	82	82	12.316.500.000,000	82	13.986.500.000,000	82	13.586.500.000,000	82	13.666.500.000,000	82	13.706.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					45.050.000.000,000		45.370.000.000,000		45.690.000.000,000		46.010.000.000,000		46.330.000.000,000	
Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (%)	99,12	99,21	99,26	550.000.000,000	99,32	550.000.000,000	99,36	550.000.000,000	99,41	550.000.000,000	99,47	550.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya ketaatan berlalu lintas	Persentase pengemudi angkutan orang dan barang yang taat peraturan berlalu lintas (%)	77,98	80,00	80,50	800.000.000,000	81,00	820.000.000,000	81,50	840.000.000,000	82,00	860.000.000,000	82,50	880.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan yang berfungsi optimal (%)	0,74	0,87	1,00	35.600.000.000,000	1,12	35.800.000.000,000	1,25	36.000.000.000,000	1,38	36.200.000.000,000	1,50	36.400.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	Load factor angkutan umum (%)	87,82	90	91	4.400.000.000,000	92	4.500.000.000,000	93	4.600.000.000,000	94	4.700.000.000,000	95	4.800.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penerapan manajemen rekayasa lalu lintas (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Optimalisasi kapasitas jalan melalui pengelolaan perparkiran	Persentase ketaatan parkir (%)	87,82	90	91	3.700.000.000,000	92	3.700.000.000,000	93	3.700.000.000,000	94	3.700.000.000,000	95	3.700.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					2.900.000.000,000		2.900.000.000,000		2.900.000.000,000		2.900.000.000,000		2.900.000.000,000	
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	100	100	100	2.900.000.000,000	100	2.900.000.000,000	100	2.900.000.000,000	100	2.900.000.000,000	100	2.900.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					19.954.705.216,000		30.692.200.000,000		30.697.200.000,000		31.718.000.000,000		31.756.000.000,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.254.939.416,000		6.589.200.000,000		6.594.200.000,000		6.698.000.000,000		6.726.000.000,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,1	83	85	4.254.939.416,000	85	6.589.200.000,000	85	6.594.200.000,000	86	6.698.000.000,000	86	6.726.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.425.763.000,000		2.503.000.000,000		2.503.000.000,000		2.560.000.000,000		2.570.000.000,000	
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk (Skor)	87,09	90	90	1.425.763.000,000	90	2.503.000.000,000	90	2.503.000.000,000	90	2.560.000.000,000	90	2.570.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					14.274.002.800,000		21.600.000.000,000		21.600.000.000,000		22.460.000.000,000		22.460.000.000,000	
Meningkatnya proporsi sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik	Persentase sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik (%)	100	100	100	14.274.002.800,000	100	21.600.000.000,000	100	21.600.000.000,000	100	22.460.000.000,000	100	22.460.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8.962.593.700,000		9.152.524.550,000		9.161.524.550,000		9.162.524.550,000		9.163.524.550,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.062.343.700,000		6.234.024.550,000		6.234.024.550,000		6.234.024.550,000		6.234.024.550,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71,75	72	75	6.062.343.700,000	76	6.234.024.550,000	77	6.234.024.550,000	78	6.234.024.550,000	78	6.234.024.550,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					609.000.000,000		610.000.000,000		611.000.000,000		612.000.000,000		613.000.000,000	
Meningkatnya Koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan perkoperasian	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa (%)	26,85	26,95	27	609.000.000,000	28	610.000.000,000	29	611.000.000,000	30	612.000.000,000	31	613.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					352.250.000,000		356.000.000,000		358.000.000,000		358.000.000,000		358.000.000,000	
Meningkatnya kualitas tata kelola koperasi	Persentase koperasi dengan kategori sehat dan cukup sehat (%)	10,7	10,9	11	352.250.000,000	12	356.000.000,000	13	358.000.000,000	14	358.000.000,000	15	358.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					461.500.000,000		463.500.000,000		464.500.000,000		464.500.000,000		464.500.000,000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (%)	21,48	21,6	22	461.500.000,000	23	463.500.000,000	24	464.500.000,000	25	464.500.000,000	26	464.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					177.500.000,000		179.000.000,000		179.000.000,000		179.000.000,000		179.000.000,000	
Meningkatnya Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi (%)	16,11	16,5	17	177.500.000,000	18	179.000.000,000	19	179.000.000,000	20	179.000.000,000	21	179.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					875.000.000,000		883.000.000,000		887.000.000,000		887.000.000,000		887.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas usaha mikro yang berkembang	Persentase usaha mikro yang mendapatkan akses pasar moderen (%)	7	8	9	875.000.000,000	10	883.000.000,000	11	887.000.000,000	12	887.000.000,000	13	887.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					425.000.000,000		427.000.000,000		428.000.000,000		428.000.000,000		428.000.000,000	
Meningkatnya pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan (%)	22,5	23,5	24,5	425.000.000,000	25,5	427.000.000,000	26,5	428.000.000,000	27,5	428.000.000,000	28,5	428.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.896.130.000,000		9.517.025.000,000		8.815.223.750,000		8.446.400.000,000		8.516.070.000,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.901.000.000,000		8.294.000.000,000		7.504.000.000,000		7.044.000.000,000		7.044.000.000,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	72	73	73	6.901.000.000,000	73	8.294.000.000,000	73	7.504.000.000,000	73	7.044.000.000,000	73	7.044.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					280.000.000,000		350.000.000,000		330.000.000,000		360.000.000,000		360.000.000,000	
Meningkatnya daya tarik investasi	Persentase peningkatan proyek investasi (%)	5,40	5,00	5,00	280.000.000,000	4,00	350.000.000,000	3,00	330.000.000,000	3,00	360.000.000,000	3,00	360.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					300.000.000,000		400.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000		500.000.000,000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	1,00	1,00	1,00	300.000.000,000	1,00	400.000.000,000	1,00	450.000.000,000	1,00	450.000.000,000	1,00	500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN					251.130.000,000		264.025.000,000		277.223.750,000		293.400.000,000		308.070.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya ketepatan penerbitan perizinan dan non perizinan	Persentase penerbitan perizinan tepat waktu (%)	95	100	100	251.130.000,000	100	264.025.000,000	100	277.223.750,000	100	293.400.000,000	100	308.070.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					140.000.000,000		185.000.000,000		230.000.000,000		275.000.000,000		280.000.000,000	
Meningkatnya kualitas LKPM	Persentase pelaku usaha/investor yang melaporkan LKPM (%)	100	100	100	140.000.000,000	100	185.000.000,000	100	230.000.000,000	100	275.000.000,000	100	280.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					24.000.000,000		24.000.000,000		24.000.000,000		24.000.000,000		24.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	70	75	75	24.000.000,000	80	24.000.000,000	80	24.000.000,000	85	24.000.000,000	85	24.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					20.977.835.785,000		23.993.832.940,000		27.366.599.531,000		30.754.919.435,000		34.957.903.319,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.381.360.785,000		11.258.832.940,000		13.496.599.531,000		16.179.919.435,000		19.397.903.319,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	79,3	79,4	79,5	9.381.360.785,000	79,6	11.258.832.940,000	79,7	13.496.599.531,000	79,8	16.179.919.435,000	80	19.397.903.319,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					3.556.475.000,000		4.350.000.000,000		5.140.000.000,000		5.600.000.000,000		6.200.000.000,000	
Meningkatnya pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	88,24	88,89	89,47	3.556.475.000,000	90	4.350.000.000,000	90,48	5.140.000.000,000	90,91	5.600.000.000,000	91,30	6.200.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					7.540.000.000,000		7.785.000.000,000		8.030.000.000,000		8.175.000.000,000		8.460.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya cabang olahraga berprestasi	Presentase cabang olahraga yang berprestasi (%)	56,76	59,46	62,16	7.540.000.000,000	64,86	7.785.000.000,000	67,57	8.030.000.000,000	70,27	8.175.000.000,000	72,97	8.460.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					500.000.000,000		600.000.000,000		700.000.000,000		800.000.000,000		900.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang meningkat kapasitasnya (%)	45,4	45,6	45,9	500.000.000,000	46,3	600.000.000,000	46,6	700.000.000,000	46,8	800.000.000,000	47,2	900.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					500.160.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000		750.000.000,000		800.000.000,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					500.160.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000		750.000.000,000		800.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (%)	40	45	50	500.160.000,000	55	700.000.000,000	60	700.000.000,000	65	750.000.000,000	70	800.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					500.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		500.000.000,000		550.000.000,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					500.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		500.000.000,000		550.000.000,000	
Meningkatnya keamanan aplikasi dan infrastruktur daerah	Persentase aplikasi pemerintah daerah yang memenuhi standart keamanan informasi (%)	96	97	97	500.000.000,000	97	400.000.000,000	97	400.000.000,000	97	500.000.000,000	97	550.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					6.920.000.000,000		7.479.500.000,000		7.740.000.000,000		8.325.000.000,000		8.570.000.000,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.100.000.000,000		3.450.000.000,000		3.600.000.000,000		3.950.000.000,000		4.000.000.000,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan (%)	2	2	2	3.100.000.000,000	2	3.450.000.000,000	2	3.600.000.000,000	2	3.950.000.000,000	2	4.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan (%)	36,48	37,41	38,40		39,46		40,58		41,77		43,03		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN					3.125.000.000,000		3.225.000.000,000		3.325.000.000,000		3.425.000.000,000		3.525.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
CAGAR BUDAYA														
Meningkatnya pelestarian sejarah dan warisan budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	33,77	34,10	34,43	3.125.000.000,000	34,75	3.225.000.000,000	35,08	3.325.000.000,000	35,41	3.425.000.000,000	35,74	3.525.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					695.000.000,000		804.500.000,000		815.000.000,000		950.000.000,000		1.045.000.000,000	
Meningkatnya daya tarik museum	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke museum (%)	2	2	2	695.000.000,000	2	804.500.000,000	2	815.000.000,000	2	950.000.000,000	2	1.045.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.175.404.000,000		1.121.609.450,000		1.147.900.000,000		1.154.200.000,000		1.154.200.000,000	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.152.968.900,000		1.098.609.450,000		1.124.900.000,000		1.131.200.000,000		1.131.200.000,000	
Meningkatnya pengelolaan perpustakaan sesuai standart	Persentase perpustakaan yang ber SNP (%)	10	10	10	951.968.900,000	10	868.000.000,000	10	873.700.000,000	10	879.500.000,000	10	879.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
Meningkatnya koleksi bahan pustaka	Persentase peningkatan bahan pustaka (%)	5	5	5	201.000.000,000	5	230.609.450,000	5	251.200.000,000	5	251.700.000,000	5	251.700.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					22.435.100,000		23.000.000,000		23.000.000,000		23.000.000,000		23.000.000,000	
Meningkatnya pelestarian koleksi naskah kuno	Persentase peningkatan naskah kuno yang dilestarikan (%)	10	10	10	22.435.100,000	10	23.000.000,000	10	23.000.000,000	10	23.000.000,000	10	23.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					10.303.387.833,000		10.363.387.833,000		10.418.387.833,000		10.483.387.833,000		10.543.387.833,000	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.648.387.833,000		9.648.387.833,000		9.648.387.833,000		9.648.387.833,000		9.648.387.833,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	74	75	75	9.648.387.833,000	75	9.648.387.833,000	76	9.648.387.833,000	76	9.648.387.833,000	76	9.648.387.833,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					635.000.000,000		690.000.000,000		740.000.000,000		800.000.000,000		855.000.000,000	
Meningkatnya pengelolaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip (Perangkat Daerah)	38	52	52	635.000.000,000	52	690.000.000,000	52	740.000.000,000	52	800.000.000,000	52	855.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					20.000.000,000		25.000.000,000		30.000.000,000		35.000.000,000		40.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	25.000.000,000	100	30.000.000,000	100	35.000.000,000	100	40.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.386.000.000,000		5.920.000.000,000		2.973.000.000,000		3.068.000.000,000		3.116.000.000,000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					387.000.000,000		3.804.000.000,000		805.000.000,000		821.000.000,000		822.000.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	0,2	1	1	387.000.000,000	1	3.804.000.000,000	1	805.000.000,000	1	821.000.000,000	1	822.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.197.000.000,000		1.254.000.000,000		1.285.000.000,000		1.331.000.000,000		1.357.000.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	-8.02 %	1	1	1.197.000.000,000	1	1.254.000.000,000	1	1.285.000.000,000	1	1.331.000.000,000	1	1.357.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					802.000.000,000		862.000.000,000		883.000.000,000		916.000.000,000		937.000.000,000	
Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan (%)	1,19	1,25	1,26	802.000.000,000	1,27	862.000.000,000	1,28	883.000.000,000	1,29	916.000.000,000	1,30	937.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					15.120.500.000,000		16.070.000.000,000		16.605.000.000,000		17.220.000.000,000		19.180.000.000,000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					6.185.000.000,000		6.920.000.000,000		7.300.000.000,000		7.805.000.000,000		8.480.000.000,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang terkelola (%)	40	40	44	6.185.000.000,000	48	6.920.000.000,000	52	7.300.000.000,000	56	7.805.000.000,000	60	8.480.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					5.865.500.000,000		6.005.000.000,000		6.110.000.000,000		6.185.000.000,000		6.525.000.000,000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	1	1	1	5.865.500.000,000	1	6.005.000.000,000	1	6.110.000.000,000	1	6.185.000.000,000	1	6.525.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pariwisata	(%)													Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					3.070.000.000,000		3.145.000.000,000		3.195.000.000,000		3.230.000.000,000		4.175.000.000,000	
Meningkatnya pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif (%)	1	1	1	3.070.000.000,000	1	3.145.000.000,000	1	3.195.000.000,000	1	3.230.000.000,000	1	4.175.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Presentase peningkatan produk ekonomi kreatif (%)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					43.963.308.565,000		45.051.000.000,000		45.701.500.000,000		46.208.500.000,000		46.833.000.000,000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.011.000.000,000		35.764.000.000,000		36.652.500.000,000		36.840.000.000,000		37.377.500.000,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,05	81	81,3	35.011.000.000,000	81,6	35.764.000.000,000	81,9	36.652.500.000,000	82,2	36.840.000.000,000	82,5	37.377.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.463.500.000,000		3.807.500.000,000		3.678.000.000,000		3.869.000.000,000		4.065.000.000,000	
Meningkatnya pemenuhan sarana pertanian	Persentase alsintan dalam kondisi baik (%)	90	90	90	1.600.000.000,000	90	1.700.000.000,000	90	1.800.000.000,000	90	1.900.000.000,000	90	2.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase ketersediaaan pupuk terhadap kebutuhan pupuk (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pemanfaatan benih unggul	Persentase Petani yang menggunakan bibit unggul (%)	62	62	62	1.600.000.000,000	63	1.575.000.000,000	64	1.275.000.000,000	65	1.315.000.000,000	66	1.360.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya populasi ternak	Persentase Peningkatan populasi ternak Ruminansia (%)	-1,83	1	1	263.500.000,000	1	532.500.000,000	1	603.000.000,000	1	654.000.000,000	1	705.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Populasi Unggas (%)	2	2,02	2,04		2,06		2,08		2,10		2,12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.055.000.000,000		2.670.000.000,000		2.570.000.000,000		2.520.000.000,000		2.420.000.000,000	
Meningkatnya kualitas Prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	100	100	100	3.055.000.000,000	100	2.670.000.000,000	100	2.570.000.000,000	100	2.520.000.000,000	100	2.420.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					882.208.565,000		1.070.000.000,000		1.113.500.000,000		1.147.000.000,000		1.193.000.000,000	
Menurunnya Kejadian Kasus Penyakit Hewan	Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan (%)	6,79	10	10	882.208.565,000	10	1.070.000.000,000	10	1.113.500.000,000	10	1.147.000.000,000	10	1.193.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					600.000.000,000		636.000.000,000		647.000.000,000		658.000.000,000		669.000.000,000	
Tertanganinya area yang terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang tertangani (%)	100	100	100	600.000.000,000	100	636.000.000,000	100	647.000.000,000	100	658.000.000,000	100	669.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					66.600.000,000		103.500.000,000		125.500.000,000		144.500.000,000		163.500.000,000	
Terwujudnya fasilitasi ijin usaha pertanian	Prosentase izin usaha pertanian yang terfasiitasi penerbitan NIB (%)	100	100	100	46.000.000,000	100	59.000.000,000	100	74.000.000,000	100	89.000.000,000	100	104.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Terbitnya rekomendasi usaha peternakan	Prosentase Terbitnya rekomendasi usaha peternakan (%)	100	100	100	20.600.000,000	100	44.500.000,000	100	51.500.000,000	100	55.500.000,000	100	59.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					885.000.000,000		1.000.000.000,000		915.000.000,000		1.030.000.000,000		945.000.000,000	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kelasnya (%)	0,94	1,54	1,54	885.000.000,000	1,54	1.000.000.000,000	1,54	915.000.000,000	1,54	1.030.000.000,000	1,54	945.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					8.667.970.290,000		8.629.934.620,000		8.824.134.620,000		9.016.334.620,000		13.156.034.620,000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					184.217.310,000		217.254.810,000		249.854.810,000		284.454.810,000		321.554.810,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan perizinan pelaku usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang taat perizinan (%)	18	19,67	21,33	184.217.310,000	23	217.254.810,000	24,67	249.854.810,000	26,33	284.454.810,000	28	321.554.810,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	22,86	24,86	26,86		28,86		30,86		32,86		34,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					7.150.000.000,000		6.750.000.000,000		6.750.000.000,000		6.750.000.000,000		10.750.000.000,000	
Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak (%)	50	54	58,33	7.150.000.000,000	62,5	6.750.000.000,000	66,67	6.750.000.000,000	70,83	6.750.000.000,000	75	10.750.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					211.179.810,000		292.679.810,000		319.279.810,000		341.879.810,000		364.479.810,000	
Terkendalinya harga bahan pokok	Koefisien laju harga bapokting (Angka)	12,4	12,2	11,95	211.179.810,000	11,65	292.679.810,000	11,30	319.279.810,000	10,90	341.879.810,000	10,45	364.479.810,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	81,96	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					120.338.000,000		145.000.000,000		170.000.000,000		195.000.000,000		215.000.000,000	
Meningkatnya nilai ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor (%)	0,68	1	2	120.338.000,000	3,5	145.000.000,000	5,5	170.000.000,000	8	195.000.000,000	11,5	215.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					450.000.000,000		525.000.000,000		600.000.000,000		675.000.000,000		675.000.000,000	
Meningkatkannya jaminan perlindungan konsumen melalui kepatuhan pemilik UTTP melakukan tera/tera ulang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	89,12	90	90	450.000.000,000	91	525.000.000,000	92	600.000.000,000	93	675.000.000,000	94	675.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					552.235.170,000		700.000.000,000		735.000.000,000		770.000.000,000		830.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perluasan pemasaran perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang terakses pasar (%)	11,08	12,34	13,61	552.235.170,000	14,87	700.000.000,000	16,14	735.000.000,000	17,41	770.000.000,000	18,67	830.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					15.480.175.979,000		16.473.796.606,000		17.175.317.021,000		18.068.224.197,000		18.804.452.052,000	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.471.149.059,000		15.502.816.606,000		16.195.587.021,000		16.969.514.197,000		17.784.752.052,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	82,30	82,31	82,32	14.471.149.059,000	82,34	15.502.816.606,000	82,36	16.195.587.021,000	82,38	16.969.514.197,000	82,40	17.784.752.052,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					776.984.800,000		798.500.000,000		790.000.000,000		775.000.000,000		790.000.000,000	
Meningkatnya kualitas produk industri	Persentase produk IKM yang bersertifikasi (%)	2,94	3	7,51	25.840.000,000	11	28.500.000,000	14	40.000.000,000	17	45.000.000,000	20	50.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya pertumbuhan usaha industri	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten (%)	2,15	2,2	2,3	335.000.000,000	2,4	480.000.000,000	2,5	350.000.000,000	2,6	360.000.000,000	2,7	365.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Terbentuknya perwilayahan industri	Persentase perwilayahan industri yang terbentuk (%)	24	28	35	225.000.000,000	47	60.000.000,000	53	145.000.000,000	59	80.000.000,000	71	80.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya produk IKM yang diajukan sertifikasi	Persentase produk IKM yang layak difasilitasi sertifikasi (%)	100	100	100	120.000.000,000	100	125.000.000,000	100	130.000.000,000	100	140.000.000,000	100	145.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya penggunaan sarpras yang berkualitas	Persentase IKM yang memiliki sarana prasarana produksi dalam kondisi baik (%)	58	59	60	71.144.800,000	62	105.000.000,000	65	125.000.000,000	67	150.000.000,000	70	150.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					72.981.060,000		80.180.000,000		88.200.000,000		97.030.000,000		106.700.000,000	
Meningkatnya kemudahan perizinan IKM	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	77	79	80	72.981.060,000	81	80.180.000,000	82	88.200.000,000	83	97.030.000,000	84	106.700.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					159.061.060,000		92.300.000,000		101.530.000,000		226.680.000,000		123.000.000,000	
Meningkatnya kepatuhan pelaporan usaha industri	Persentase usaha industri yang patuh melaporkan dalam SIINAS (%)	25	25	25	159.061.060,000	26	92.300.000,000	27	101.530.000,000	27	226.680.000,000	28	123.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					82.500.000,000		200.000.000,000		206.000.000,000		210.000.000,000		222.000.000,000	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					82.500.000,000		200.000.000,000		206.000.000,000		210.000.000,000		222.000.000,000	
Meningkatnya keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan (%)	6,7	9	10	82.500.000,000	11	200.000.000,000	12	206.000.000,000	13	210.000.000,000	14	222.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					80.645.848.760,000		82.216.938.715,000		83.819.451.890,000		85.454.018.747,000		87.121.277.202,000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					60.590.888.000,000		61.760.884.000,000		62.954.280.000,000		64.171.548.000,000		65.413.160.000,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	83,35	83,55	83,75	18.987.315.000,000	83,95	19.367.058.000,000	84,15	19.754.396.000,000	84,35	20.149.482.000,000	84,55	20.552.469.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi (%)	100	100	100	3.638.632.000,000	100	3.711.403.000,000	100	3.785.630.000,000	100	3.861.341.000,000	100	3.938.567.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase dokumen administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (%)	100	100	100	25.280.731.000,000	100	25.786.337.000,000	100	26.302.057.000,000	100	26.828.093.000,000	100	27.364.648.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola dalam kondisi baik (%)	100	100	100	11.583.502.000,000	100	11.773.367.000,000	100	11.967.030.000,000	100	12.164.565.000,000	100	12.366.052.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu (%)	100	100	100	425.343.000,000	100	433.849.000,000	100	442.524.000,000	100	451.373.000,000	100	460.399.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Fasilitasi kebijakan di bidang Kinerja OPD, Pelayanan Publik, Penataan Organisasi dan Tata Laksana	Persentase Kebijakan di Bidang Kinerja OPD, Pelayanan Publik, Penataan Organisasi dan Tata Laksana yang difasilitasi (%)	100	100	100	675.365.000,000	100	688.870.000,000	100	702.643.000,000	100	716.694.000,000	100	731.025.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					17.246.913.000,000		17.591.846.000,000		17.943.679.000,000		18.302.548.000,000		18.668.596.000,000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah, Kewilayahan, dan Kerjasama yang tepat waktu, tepat subtansi, dan sesuai ketentuan (%)	100	100	100	670.165.000,000	100	683.566.000,000	100	697.236.000,000	100	711.179.000,000	100	725.401.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	15.090.519.000,000	100	15.392.328.000,000	100	15.700.174.000,000	100	16.014.176.000,000	100	16.334.459.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi dan difasilitasi (%)	100	100	100	1.486.229.000,000	100	1.515.952.000,000	100	1.546.269.000,000	100	1.577.193.000,000	100	1.608.736.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.808.047.760,000		2.864.208.715,000		2.921.492.890,000		2.979.922.747,000		3.039.521.202,000	
Meningkatnya Kebijakan Sektor Prioritas Pembangunan Nasional dan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkualitas dan Inklusif	Persentase Kebijakan Sektor Prioritas Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti (%)	30	100	100	2.808.047.760,000	100	2.864.208.715,000	100	2.921.492.890,000	100	2.979.922.747,000	100	3.039.521.202,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Skor)	75,89	78,71	81,54		84,36		87,19		90,01		92,83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					89.543.552.815,000		89.935.264.532,000		89.035.264.532,000		96.310.264.532,000		89.035.264.532,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.455.942.435,000		45.847.654.152,000		45.767.654.152,000		52.467.654.152,000		45.767.654.152,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,6	80,7	80,8	33.747.442.435,000	80,9	34.139.154.152,000	81	34.139.154.152,000	81,2	34.139.154.152,000	81,5	34.139.154.152,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Persentase Sarana dan Prasarana yang layak (%)	83	85	86	11.708.500.000,000	87	11.708.500.000,000	88	11.628.500.000,000	89	18.328.500.000,000	90	11.628.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai)	86,22	86,5	87		87,5		88		88,5		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					44.087.610.380,000		44.087.610.380,000		43.267.610.380,000		43.842.610.380,000		43.267.610.380,000	
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100	23.198.000.000,000	100	23.198.000.000,000	100	22.788.000.000,000	100	23.363.000.000,000	100	22.788.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	42,8	60	60		60		62		62		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	80	82	85	20.889.610.380,000	88	20.889.610.380,000	90	20.479.610.380,000	93	20.479.610.380,000	95	20.479.610.380,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					8.677.750.000,000		9.310.970.000,000		9.325.235.000,000		9.787.000.000,000		10.307.040.000,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.781.500.000,000		6.983.500.000,000		7.184.500.000,000		7.385.500.000,000		7.586.500.000,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71	73	73	6.781.500.000,000	75	6.983.500.000,000	77	7.184.500.000,000	79	7.385.500.000,000	81	7.586.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					621.250.000,000		992.470.000,000		745.735.000,000		946.500.000,000		1.205.540.000,000	
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD (%)	100	100	100	621.250.000,000	100	992.470.000,000	100	745.735.000,000	100	946.500.000,000	100	1.205.540.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.275.000.000,000		1.335.000.000,000		1.395.000.000,000		1.455.000.000,000		1.515.000.000,000	
Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kesesuaian program prioritas daerah	Persentase capaian kinerja sasaran strategis Renstra PD dengan predikat minimal tinggi (%)	97	98	99	1.275.000.000,000	100	1.335.000.000,000	100	1.395.000.000,000	100	1.455.000.000,000	100	1.515.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah terhadap prioritas daerah dan isu daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					471.605.792.820,000		476.230.184.000,000		478.188.666.000,000		481.153.446.000,000		482.774.261.000,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.865.468.820,000		28.278.814.000,000		30.021.314.000,000		32.367.414.000,000		34.342.514.000,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,05	81	81,1	7.114.814.000,000	81,3	7.235.314.000,000	81,6	7.130.814.000,000	81,8	7.221.814.000,000	82	7.178.814.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75,70	75,80	75,85	17.750.654.820,000	75,90	21.043.500.000,000	80	22.890.500.000,000	80,25	25.145.600.000,000	80,50	27.163.700.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					437.357.774.000,000		437.440.370.000,000		437.579.352.000,000		437.725.032.000,000		437.877.747.000,000	
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (%)	100	100	100	767.155.000,000	100	805.512.000,000	100	845.788.000,000	100	888.076.000,000	100	932.480.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30	30	30	1.861.099.000,000	30	1.899.152.000,000	30	1.991.611.000,000	30	2.088.691.000,000	30	2.190.627.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40	40	40		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	5	5	5	434.729.520.000,000	5	434.735.706.000,000	5	434.741.953.000,000	5	434.748.265.000,000	5	434.754.640.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.032.550.000,000		2.136.000.000,000		2.243.000.000,000		2.356.000.000,000		2.474.000.000,000	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan aset daerah yg sesuai ketentuan (%)	100	100	100	2.032.550.000,000	100	2.136.000.000,000	100	2.243.000.000,000	100	2.356.000.000,000	100	2.474.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.350.000.000,000		8.375.000.000,000		8.345.000.000,000		8.705.000.000,000		8.080.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut/Wajib Retribusi	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut (%)	89,05	90,50	90,80	3.965.000.000,000	90,90	4.340.000.000,000	91	4.510.000.000,000	91,25	4.695.000.000,000	91,50	4.695.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	persentase peningkatan subyek/obyek pajak/ retribusi daerah yang dimuktahirkan (%)	0,63	1,09	1,11	2.445.000.000,000	1,14	2.595.000.000,000	1,20	2.295.000.000,000	1,37	2.370.000.000,000	2	1.595.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Penerapan Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital	Indeks Elektronifikasi Pemerintah daerah (%)	93,25	93,75	94	900.000.000,000	94,25	1.400.000.000,000	94,5	1.500.000.000,000	94,75	1.600.000.000,000	95	1.750.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase Realisasi lain-lain PAD yang sah (%)	100	100	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					11.263.246.910,000		11.401.746.910,000		11.669.346.910,000		11.949.846.910,000		12.584.346.910,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.298.246.910,000		7.394.246.910,000		7.444.246.910,000		7.517.246.910,000		7.581.246.910,000	
meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,5	81,35	81,50	7.298.246.910,000	81,75	7.394.246.910,000	82	7.444.246.910,000	82,25	7.517.246.910,000	82,50	7.581.246.910,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.965.000.000,000		4.007.500.000,000		4.225.100.000,000		4.432.600.000,000		5.003.100.000,000	
Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi (diluar tenaga guru dan kesehatan) (%)	54,89	55	55,1	275.000.000,000	55,3	340.000.000,000	55,4	380.000.000,000	55,6	385.000.000,000	55,8	410.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan karier jabatan struktural	Persentase keterisian jabatan struktural (%)	74	78	79	695.000.000,000	81	700.000.000,000	83	710.000.000,000	84	720.000.000,000	85	760.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatanya Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan hasil Uji Kompetensi Optimal Dan Cukup Optimal (%)	72	75	75,5	1.760.000.000,000	76	1.590.000.000,000	76,5	1.640.000.000,000	77	1.840.000.000,000	77,5	2.090.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Rasio Jabatan Fungsional yang bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan (%)	29,07	30	31		32		33		34		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP berkinerja minimal Baik (%)	99	99	99	495.000.000,000	99	544.500.000,000	99	598.800.000,000	99	588.600.000,000	99	724.300.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya disiplin ASN	Persentase ASN yang tidak di jatuhi hukuman disiplin (%)	99	99	99	440.000.000,000	99	483.000.000,000	99	546.300.000,000	99	549.000.000,000	99	618.800.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengelolaan data ASN yang terintegrasi dengan SIASN	persentase pengelolaan data ASN yang terintegrasi dengan SIASN (%)	70	75	85	300.000.000,000	90	350.000.000,000	95	350.000.000,000	100	350.000.000,000	100	400.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					5.030.000.000,000		5.515.000.000,000		5.636.500.000,000		6.015.150.000,000		6.401.665.000,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					5.030.000.000,000		5.515.000.000,000		5.636.500.000,000		6.015.150.000,000		6.401.665.000,000	
Meningkatanya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis, manajerial dan fungsional (%)	75	77	78	5.030.000.000,000	80	5.515.000.000,000	82	5.636.500.000,000	84	6.015.150.000,000	85	6.401.665.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.675.000.000,000		2.675.000.000,000		2.675.000.000,000		2.675.000.000,000		2.675.000.000,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.675.000.000,000		2.675.000.000,000		2.675.000.000,000		2.675.000.000,000		2.675.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengembangan potensi unggulan dan penyelesaian permasalahan pembangunan (%)	90	90	90	2.175.000.000,000	92	2.175.000.000,000	94	2.175.000.000,000	96	2.175.000.000,000	98	2.175.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan (%)	44,7	45,6	46	500.000.000,000	47	500.000.000,000	48	500.000.000,000	49	500.000.000,000	50	500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					24.084.000.000,000		25.510.000.000,000		24.804.000.000,000		24.898.000.000,000		24.958.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.089.000.000,000		22.460.000.000,000		21.624.000.000,000		21.648.000.000,000		21.653.000.000,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	81,7	83	83,05	21.089.000.000,000	83,10	22.460.000.000,000	83,15	21.624.000.000,000	83,20	21.648.000.000,000	83,25	21.653.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.185.000.000,000		1.190.000.000,000		1.230.000.000,000		1.250.000.000,000		1.255.000.000,000	
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	Persentase laporan pengaduan masyarakat yang terselesaikan (%)	100	100	100	270.000.000,000	100	270.000.000,000	100	295.000.000,000	100	295.000.000,000	100	295.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya peran APIP sebagai assurance dan consulting sesuai dengan PKPT berbasis resiko	Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT (%)	100	100	100	465.000.000,000	100	470.000.000,000	100	485.000.000,000	100	505.000.000,000	100	510.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan	PersentaseTindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	95,3	95,35	95,38	200.000.000,000	95,41	200.000.000,000	95,45	200.000.000,000	95,48	200.000.000,000	95,52	200.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP > 80% (%)	-	-	76	250.000.000,000	78	250.000.000,000	80	250.000.000,000	82	250.000.000,000	84	250.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.810.000.000,000		1.860.000.000,000		1.950.000.000,000		2.000.000.000,000		2.050.000.000,000	
Meningkatnya efektivitas pencegahan resiko fraud pada perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Fraud Control Planning (FCP) sesuai standar (%)	50	52	54	80.000.000,000	56	80.000.000,000	58	90.000.000,000	60	90.000.000,000	62	90.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas manajemen resiko perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan manajemen resiko sesuai standart (%)	58	60	62	700.000.000,000	64	750.000.000,000	66	800.000.000,000	68	850.000.000,000	70	900.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya pembangunan zona integritas	Persentase Perangkat Daerah yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM (%)	8	8	8	80.000.000,000	8	80.000.000,000	8	90.000.000,000	10	90.000.000,000	10	90.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi	Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK (Nilai)	95,21	95,22	95,24	700.000.000,000	95,26	700.000.000,000	95,28	720.000.000,000	95,30	720.000.000,000	95,32	720.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan berbasis resiko	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan berbasis resiko sesuai standar (Dokumen)	1	1	1	250.000.000,000	1	250.000.000,000	1	250.000.000,000	1	250.000.000,000	1	250.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					124.596.754.274,000		128.010.202.173,000		126.004.363.234,000		129.460.212.735,000		132.937.760.824,000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100.203.134.092,000		102.393.339.775,000		99.748.440.016,000		102.306.442.547,000		105.047.170.322,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Bagor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	73,35	73,35	74	6.487.056.667,000	75	7.019.553.310,000	76	6.622.155.994,000	77	6.802.914.227,000	78	6.802.914.227,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Bagor- Kelurahan Kedondong	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71,40	74	74		75		76		77		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Bagor- Kelurahan Guyangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71,40	74	74		75		76		77		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Baron	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	70,1	70,1	72	3.795.749.265,000	73	3.783.812.325,000	74	3.802.731.387,000	75	3.821.745.044,000	76	3.840.853.769,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Berbek	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	70	3.079.813.683,000	70	3.079.813.683,000	75	3.079.813.683,000	75	3.079.813.683,000	80	3.081.813.683,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Gondang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	66	66	67,5	2.973.988.533,000	68	3.073.988.533,000	68,5	3.173.988.533,000	69	3.273.988.533,000	69,5	3.373.988.533,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Jatikalen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75,23	75,23	75,75	2.951.850.000,000	76	2.977.630.000,000	76,25	3.018.639.000,000	76,5	3.051.535.000,000	76,75	3.085.675.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Kertosono	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,85	69,85	71	5.950.000.000,000	71,5	5.994.500.000,000	72	5.748.000.000,000	72,5	5.795.500.000,000	73	5.846.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Kertosono - Kelurahan Banaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,85	69,85	71		71,5		72		72,5		73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Lengkong	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	69,15	70	2.816.662.582,000	71	2.967.302.340,000	72	3.093.833.489,000	73	3.226.569.808,000	74	3.374.006.976,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Loceret	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	55,5	55,5	65	3.625.561.625,000	66	3.798.072.950,000	67	3.863.645.000,000	68	4.052.400.000,000	69	4.325.800.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66	28.520.497.746,000	66,5	29.124.423.997,000	67	25.573.293.020,000	67,5	26.159.806.850,000	68	26.363.497.950,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Jatirejo	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Begadung	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Bogo	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Cangkringan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Ganungkidul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Kartoharjo	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Kauman	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Kramat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Mangundikaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Payaman	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Ploso	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Ringinanom	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Werungotok	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	66		66,5		67		67,5		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Ngetos	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	70	74	74	2.754.751.446,000	75	2.745.125.000,000	76	2.756.325.000,000	76,2	2.722.025.000,000	76,4	2.768.225.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Ngluyu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	67,75	67,75	70,1	2.367.331.866,000	70,5	2.554.065.053,000	71	2.864.471.558,000	71,5	3.150.918.714,000	72	3.466.010.585,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Ngronggot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	70,1	70,5	71	2.835.011.588,000	71,5	2.950.750.550,000	72	2.956.076.008,000	72,5	3.167.086.076,000	73	3.287.507.850,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Pace	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	68,45	68,45	69	3.413.003.570,000	69	3.397.950.000,000	69	3.465.950.000,000	70	3.438.450.000,000	70	3.501.950.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Patianrowo	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	70	70	71	3.445.281.500,000	72	3.552.980.800,000	72	3.656.980.800,000	73	3.710.880.800,000	74	4.217.380.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	73,05	73,05	81	3.098.578.998,000	81,5	3.098.578.998,000	81,75	3.098.578.998,000	82	3.098.578.998,000	82,5	3.098.578.998,000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah - Kecamatan Prambon														Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Rejoso	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	61	61	63	3.456.022.757,000	66	3.628.823.895,000	68	3.810.265.090,000	70	4.000.778.344,000	72	4.200.817.261,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Sawahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,25	69,25	70,5	3.135.035.384,000	71	3.312.919.900,000	72	3.456.598.435,000	73	3.641.714.834,000	75	3.813.030.080,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Sukomoro	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	69,4	71,85	5.170.747.702,000	72,4	5.190.747.700,000	73	5.190.747.700,000	74	5.200.000.146,000	75	5.230.000.146,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Sukomoro - Kelurahan Sukomoro	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	69,4	71,85		72,4		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Sukomoro - Kelurahan Kapas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	69,4	71,85		72,4		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Tanjunganom	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	74,55	74,55	75	7.705.309.230,000	75,5	7.469.153.192,000	76	7.790.766.851,000	76,5	8.130.935.432,000	77	8.535.012.443,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Tanjunganom - Kelurahan Tanjunganom	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	74,55	74,55	75		75,5		76		76,5		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Tanjunganom - Kelurahan Warujayeng	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	74,55	74,55	75		75,5		76		76,5		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Wilangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,8	71	72	2.620.879.950,000	72,5	2.673.147.549,000	73	2.725.579.470,000	73,5	2.780.801.058,000	74	2.834.107.021,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.046.307.280,000		2.232.376.678,000		2.324.895.132,000		2.404.083.737,000		2.498.276.307,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	95	95	100	43.275.000,000	100	120.659.100,000	100	120.669.100,000	100	120.669.100,000	100	120.669.100,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	79	79	82	57.980.550,000	83	57.980.550,000	85	58.270.453,000	86	58.561.805,000	87	58.854.614,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	85	90.000.000,000	85	90.000.000,000	85	90.000.000,000	85	90.000.000,000	85	90.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Gondang	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	84	84	86	20.550.400,000	87	23.550.400,000	88	25.550.400,000	89	28.550.400,000	90	32.550.400,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Jatikalen	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	100	90.000.000,000	100	100.000.000,000	100	110.000.000,000	100	120.000.000,000	100	130.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Kertosono	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	73,42	73,42	82	120.000.000,000	84	125.000.000,000	86	130.000.000,000	88	135.000.000,000	90	140.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	78,84	78,84	100	45.003.150,000	100	45.903.213,000	100	46.803.276,000	100	47.739.342,000	100	49.171.522,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Loceret	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	89	89	100	72.950.000,000	100	79.000.000,000	100	81.000.000,000	100	86.000.000,000	100	103.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Nganjuk	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	86,09	86,09	86,09	55.698.750,000	86,09	55.698.750,000	86,09	55.698.750,000	86,09	55.698.750,000	86,09	55.698.750,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Ngetos	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	76	76	80	29.950.000,000	85	35.000.000,000	90	39.950.000,000	95	40.000.000,000	98	40.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Ngluyu	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	80	24.000.000,000	82	27.000.000,000	84	30.000.000,000	86	33.000.000,000	88	33.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	83	83	84	74.406.000,000	86	74.406.000,000	88	74.406.000,000	90	74.406.000,000	90	74.406.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	100	100	100	31.000.000,000	100	32.000.000,000	100	32.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	81	75.500.000,000	82	75.500.000,000	85	75.500.000,000	87	75.500.000,000	88	75.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	87	87	95	137.640.180,000	95	137.640.180,000	95	137.640.180,000	100	137.640.180,000	100	137.640.180,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	85	85.904.000,000	87,5	90.199.200,000	90	94.709.160,000	92,5	99.444.618,000	95	104.416.849,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	100	100	100	110.715.200,000	100	116.250.960,000	100	122.063.400,000	100	128.166.600,000	100	128.986.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	80	10.450.000,000	81	20.450.000,000	82	20.450.000,000	83	20.450.000,000	84	20.450.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Tanjunganom	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	90	90	90	25.700.000,000	90	26.985.000,000	90	28.334.250,000	90	29.750.963,000	90	31.238.511,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	80	72.930.000,000	82	74.388.600,000	84	75.876.372,000	86	77.393.899,000	88	78.941.777,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	95	95	100	26.000.000,000	100	17.220.000,000	100	17.220.000,000	100	17.220.000,000	100	17.220.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	79	79	82	7.150.000,000	83	7.150.000,000	85	7.185.750,000	86	7.221.679,000	87	7.257.787,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	85	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Gondang	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	84	84	86	126.286.000,000	87	133.286.000,000	88	138.286.000,000	89	145.286.000,000	90	152.286.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Jatikalen	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	80	80	100	57.500.000,000	100	65.000.000,000	100	72.000.000,000	100	79.000.000,000	100	85.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Kertosono	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	75	75	82	37.500.000,000	84	39.500.000,000	86	41.750.000,000	88	43.000.000,000	90	45.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	57,06	57,06	100	15.638.500,000	100	15.951.270,000	100	16.264.040,000	100	16.589.321,000	100	17.087.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di kecamatan Loceret	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	89	89	100	0,000	100	9.000.000,000	100	10.000.000,000	100	12.000.000,000	100	20.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Nganjuk	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	86,09	86,09	86,09	11.542.700,000	86,09	13.042.700,000	86,09	13.042.700,000	86,09	13.042.700,000	86,09	13.042.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Ngetos	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	75	75	75	25.000.000,000	80	25.000.000,000	85	25.000.000,000	90	25.000.000,000	95	25.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Ngluyu	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	80	80	80	6.000.000,000	82	7.000.000,000	84	8.000.000,000	86	9.000.000,000	88	10.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	90	90	90	41.950.000,000	90	42.813.300,000	90	43.063.100,000	90	43.563.100,000	90	44.621.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	9.500.000,000	100	9.500.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	80	80	81	25.000.000,000	82	25.000.000,000	85	25.000.000,000	87	25.000.000,000	88	25.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	87	87	95	4.928.400,000	95	4.928.400,000	95	4.928.400,000	95	4.928.400,000	95	4.928.400,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	80	80	87,5	17.240.800,000	90	18.102.840,000	92,5	19.007.982,000	95	19.958.381,000	97,5	20.956.300,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	13.840.800,000	100	14.532.840,000	100	15.259.400,000	100	16.022.400,000	100	16.800.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	79,83	79,83	80	18.500.000,000	81	28.500.000,000	82	28.500.000,000	83	28.500.000,000	84	28.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjunganom	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	90	90	90	50.000.000,000	90	52.500.000,000	90	55.125.000,000	90	57.881.250,000	90	60.775.313,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	80	80	80	3.925.000,000	82	4.003.500,000	84	4.083.570,000	86	4.165.241,000	88	4.248.546,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	95	95	100	64.150.000,000	100	49.592.600,000	100	49.592.600,000	100	49.592.600,000	100	49.592.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	79	79	82	1.650.000,000	83	1.650.000,000	85	1.658.250,000	86	1.666.541,000	87	1.674.874,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	85	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Gondang	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	84	84	86	17.150.000,000	87	17.150.000,000	88	20.150.000,000	89	20.150.000,000	90	23.150.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Jatikalen	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	80	100	7.500.000,000	100	8.500.000,000	100	9.500.000,000	100	10.500.000,000	100	11.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Kertosono	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	71	71	82	25.000.000,000	84	30.000.000,000	86	35.000.000,000	88	40.000.000,000	90	45.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	84,73	84,73	100	6.119.250,000	100	6.241.635,000	100	6.364.020,000	100	6.491.300,000	100	6.686.039,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Loceret	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	24.150.000,000	100	26.000.000,000	100	29.000.000,000	100	30.500.000,000	100	35.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Nganjuk	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	86,09	86,09	86,09	5.100.000,000	86,09	6.600.000,000	86,09	6.700.000,000	86,09	6.800.000,000	86,09	6.900.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Ngetos	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	15.000.000,000	85	15.000.000,000	90	15.000.000,000	95	15.000.000,000	98	15.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Ngluyu	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	3.600.000,000	82	4.000.000,000	84	4.500.000,000	86	5.000.000,000	88	5.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	90	90	90	6.281.400,000	90	6.281.400,000	90	6.281.400,000	90	6.581.300,000	90	6.581.300,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	100	100	100	13.500.000,000	100	14.000.000,000	100	14.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pace	Pelayanan Umum di Kecamatan (%)													
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	80	81	5.650.000,000	82	5.650.000,000	85	5.650.000,000	87	5.650.000,000	88	5.650.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	87	87	95	6.260.400,000	95	6.260.400,000	95	6.260.400,000	95	6.260.400,000	95	6.260.400,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	80	85	20.595.400,000	87,5	21.625.170,000	90	22.706.429,000	92,5	23.841.750,000	95	25.033.837,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	5.545.400,000	100	5.822.670,000	100	6.113.800,000	100	6.419.400,000	100	6.700.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	79,3	79,3	80	14.650.000,000	81	34.650.000,000	82	49.592.000,000	83	49.592.600,000	84	49.592.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Tanjunganom	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	6.500.000,000	80	6.825.000,000	80	7.166.250,000	80	7.524.563,000	80	7.900.791,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	6.750.000,000	82	6.885.000,000	84	7.022.700,000	86	7.163.154,000	88	7.306.417,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Wilangan														
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					14.255.792.938,000		15.335.696.451,000		15.753.223.151,000		16.334.214.536,000		16.758.429.464,000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	100	1.117.091.022,000	100	1.221.882.000,000	100	1.223.882.000,000	100	1.225.882.000,000	100	1.225.882.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor - Kelurahan Kedondong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor - Kelurahan Guyangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	75	75	80	47.530.000,000	82	47.530.000,000	84	47.767.650,000	85	48.006.488,000	86	48.246.521,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	95	156.783.800,000	95	156.783.800,000	95	156.783.800,000	95	156.783.800,000	95	156.783.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gondang	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	86	86	86	65.878.350,000	88	70.878.350,000	90	80.878.350,000	92	95.878.350,000	94	100.878.350,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jatikalen	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	80	80	100	95.000.000,000	100	99.000.000,000	100	104.000.000,000	100	110.000.000,000	100	114.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kertosono	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	74,41	74,41	82	982.500.000,000	84	984.750.000,000	86	994.500.000,000	88	998.000.000,000	90	1.004.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kertosono - Kelurahan Banaran	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	74,41	74,41	82		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	92,61	92,61	100	179.405.250,000	100	182.993.355,000	100	186.581.460,000	100	190.313.089,000	100	196.022.482,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Loceret	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100	168.220.200,000	100	175.000.000,000	100	183.500.000,000	100	188.000.000,000	100	197.400.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100	7.014.284.874,000	100	7.573.524.838,000	100	7.780.754.373,000	100	8.064.675.123,000	100	8.278.132.773,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Jatirejo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Begadung	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Bogo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Cangkringan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ganungkidul														
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Kartoharjo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Kauman	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Kramat	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Mangundikaran	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Payaman	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Ploso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan Ringinanom	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk - Kelurahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Werungotok														
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngetos	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	60	60	70	108.287.500,000	80	165.237.000,000	85	165.237.500,000	90	167.862.500,000	95	167.862.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngluyu	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	80	80	80	40.000.000,000	82	44.000.000,000	84	48.000.000,000	86	53.000.000,000	88	60.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100	162.933.500,000	100	162.956.000,000	100	162.978.800,000	100	164.543.000,000	100	165.500.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100	62.000.000,000	100	63.500.000,000	100	66.000.000,000	100	74.000.000,000	100	74.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	80	80	80	74.325.000,000	82	74.500.000,000	85	74.500.000,000	87	74.500.000,000	88	74.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	86	86	95	114.897.700,000	95	114.897.700,000	95	114.897.700,000	95	114.897.700,000	95	114.897.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	80	80	85	113.891.600,000	87,5	119.586.180,000	90	125.565.489,000	92,5	131.843.763,000	95	138.435.952,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100	112.210.600,000	100	117.821.000,000	100	123.712.100,000	100	129.897.600,000	100	136.600.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88,34	88,34	88,4	1.125.283.142,000	88,5	1.321.882.000,000	88,75	1.421.882.000,000	89	1.521.882.000,000	89,25	1.621.882.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro - Kelurahan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88,34	88,34	88,4		88,5		88,75		89		89,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro - Kelurahan Kapas	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88,34	88,34	88,4		88,5		88,75		89		89,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tanjunganom	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	95	2.446.614.000,000	95	2.568.944.700,000	95	2.620.371.810,000	95	2.751.390.401,000	95	2.808.088.789,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tanjunganom - Kelurahan Tanjunganom	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tanjunganom - Kelurahan Warujayeng	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	80	80	80	68.656.400,000	82	70.029.528,000	84	71.430.119,000	86	72.858.722,000	88	74.315.897,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.188.904.250,000		1.290.609.500,000		1.336.235.961,000		1.377.321.598,000		1.456.503.828,000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	95	95	100	50.125.000,000	100	62.675.000,000	100	62.675.000,000	100	62.675.000,000	100	62.675.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	78	78	81	17.475.000,000	82	17.475.000,000	85	17.562.375,000	86	17.650.187,000	87	48.246.521,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	73.266.000,000	100	73.266.000,000	100	73.266.000,000	100	73.266.000,000	100	73.266.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gondang	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	85	85	85	30.170.000,000	85	35.170.000,000	85	40.170.000,000	85	45.170.000,000	85	50.170.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jatikalen	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	80	80	100	48.000.000,000	100	50.000.000,000	100	52.500.000,000	100	55.000.000,000	100	57.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kertosono	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	130.000.000,000	100	135.000.000,000	100	139.500.000,000	100	142.500.000,000	100	147.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	83,92	83,92	100	26.292.500,000	100	27.018.890,000	100	27.763.329,000	100	28.531.349,000	100	29.387.289,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Loceret	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	88	88	100	24.600.000,000	100	25.000.000,000	100	26.250.000,000	100	28.000.000,000	100	30.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Nganjuk	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	17.609.850,000	100	19.109.850,000	100	19.109.850,000	100	19.109.850,000	100	19.109.850,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di	80	80	90	18.950.000,000	100	25.900.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kecamatan Ngetos	Kecamatan (%)													
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngluyu	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	24.000.000,000	82	27.000.000,000	84	30.000.000,000	86	33.000.000,000	88	36.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	90	90	90	33.545.850,000	91	35.050.850,000	92	35.580.000,000	93	36.925.070,000	95	37.425.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	31.000.000,000	100	33.000.000,000	100	34.000.000,000	100	34.000.000,000	100	34.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	52.500.000,000	82	52.500.000,000	83	52.500.000,000	85	52.500.000,000	87	52.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	86	86	95	60.007.050,000	95	60.007.050,000	95	60.007.050,000	95	60.007.050,000	95	60.007.050,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	80	80	85	89.495.400,000	87,5	93.970.170,000	90	98.668.679,000	92,5	103.602.112,000	95	108.782.218,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	20.986.200,000	100	22.035.500,000	100	23.137.200,000	100	24.294.100,000	100	25.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	40	40	100	20.450.000,000	100	30.450.000,000	100	30.450.000,000	100	30.450.000,000	100	30.450.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tanjunganom	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	95	95	95	30.500.000,000	95	32.025.000,000	95	33.626.250,000	95	35.307.563,000	95	37.072.941,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	30.000.000,000	82	30.600.000,000	84	31.212.000,000	86	31.836.240,000	88	32.472.965,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	95	95	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	78	78	81	6.500.000,000	82	6.500.000,000	85	7.000.000,000	86	8.000.000,000	87	8.075.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	90	90	90	50.000.000,000	90	50.000.000,000	90	50.000.000,000	90	50.000.000,000	90	50.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Gondang	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	85	85	85	10.000.000,000	85	15.500.000,000	85	20.500.000,000	85	25.000.000,000	85	35.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Jatikalen	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	80	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Kertosono	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	37.500.000,000	100	40.000.000,000	100	42.500.000,000	100	45.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di	95,58	95,58	100	20.054.000,000	100	20.655.620,000	100	21.275.289,000	100	21.913.548,000	100	22.570.954,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Perkada di Kecamatan Lengkong	Kecamatan (%)													
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Loceret	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	100	100	100	17.600.000,000	100	20.000.000,000	100	21.000.000,000	100	22.000.000,000	100	25.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Nganjuk	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Ngetos	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	100	100	100	3.000.000,000	100	3.000.000,000	100	3.000.000,000	100	3.000.000,000	100	3.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Ngluyu	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	80	80	3.600.000,000	82	4.000.000,000	84	5.000.000,000	86	5.500.000,000	88	6.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	90	90	90	6.000.000,000	91	6.500.000,000	92	7.000.000,000	93	8.000.000,000	95	8.075.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	100	100	100	0,000	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	80	80	6.000.000,000	82	6.500.000,000	83	7.000.000,000	85	8.000.000,000	87	8.075.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	86	86	95	51.082.000,000	95	51.082.000,000	95	51.082.000,000	100	51.082.000,000	100	51.082.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	80	85	22.695.400,000	87,5	23.830.170,000	90	25.021.679,000	92,5	26.272.762,000	95	27.586.401,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	100	100	100	0,000	100	6.170.400,000	100	6.478.900,000	100	6.478.900,000	100	6.802.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	40	40	100	10.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Tanjunganom	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	80	80	20.000.000,000	80	21.000.000,000	80	22.050.000,000	80	23.152.500,000	80	24.310.125,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	80	80	35.900.000,000	82	36.618.000,000	84	37.350.360,000	86	38.097.367,000	88	38.859.314,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					4.431.968.660,000		4.160.644.318,000		4.244.199.147,000		4.369.124.079,000		4.442.026.299,000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	95	95	100	402.951.000,000	100	170.000.000,000	100	180.000.000,000	100	195.000.000,000	100	195.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	79	79	80	267.059.560,000	82	223.946.500,000	84	225.066.233,000	85	226.191.564,000	86	227.322.521,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	189.750.000,000	100	189.750.000,000	100	189.750.000,000	100	189.750.000,000	100	189.750.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gondang	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	85	85	86	27.625.000,000	86	30.625.000,000	88	33.625.000,000	90	36.625.000,000	92	39.625.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Jatikalen	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	80	80	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	205.000.000,000	100	210.000.000,000	100	215.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kertosono	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	315.000.000,000	100	317.500.000,000	100	320.000.000,000	100	325.000.000,000	100	330.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	84	84	100	137.501.250,000	100	141.566.288,000	100	145.749.677,000	100	150.059.767,000	100	154.561.560,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Loceret	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	99	99	100	439.519.750,000	100	450.000.000,000	100	460.000.000,000	100	470.000.000,000	100	476.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Nganjuk	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	207.200.000,000	100	208.200.000,000	100	208.200.000,000	100	208.200.000,000	100	208.200.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ngetos	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	80	80	100	78.450.000,000	100	85.450.000,000	100	88.000.000,000	100	88.000.000,000	100	88.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ngluyu	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	25.000.000,000	82	28.000.000,000	84	31.000.000,000	86	34.000.000,000	88	37.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	83	83	83	412.500.000,000	90	425.000.000,000	91	440.000.000,000	93	450.000.000,000	95	465.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kecamatan Ngronggot														
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	265.000.000,000	100	278.500.000,000	100	278.500.000,000	100	288.500.000,000	100	288.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	80	80	81	450.000.000,000	81	350.000.000,000	82	350.000.000,000	83	380.000.000,000	85	380.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Prambon	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	86	86	95	95.883.000,000	95	95.883.000,000	95	95.883.000,000	100	95.883.000,000	100	95.883.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	80	80	85	300.777.000,000	87,5	315.815.850,000	90	331.606.643,000	92,5	348.186.975,000	95	365.596.323,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	226.093.100,000	100	232.954.500,000	100	238.352.300,000	100	244.019.900,000	100	249.900.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	40	40	100	205.000.000,000	100	225.000.000,000	100	225.000.000,000	100	225.000.000,000	100	225.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Tanjunganom	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	90	90	90	68.700.000,000	90	72.135.000,000	90	75.741.750,000	90	79.528.838,000	90	83.505.279,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	117.959.000,000	82	120.318.180,000	84	122.724.544,000	86	125.179.035,000	88	127.682.616,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Wilangan														
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					2.470.647.054,000		2.597.535.451,000		2.597.369.827,000		2.669.026.238,000		2.735.354.604,000	
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Bagor	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	95	95	100	45.660.000,000	100	50.415.000,000	100	50.415.000,000	100	50.415.000,000	100	50.415.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	80	13.750.000,000	82	13.750.000,000	82	13.818.750,000	83	13.887.844,000	84	13.957.283,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Berbek	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	100	100	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Gondang	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	88	88	88	256.723.650,000	90	258.723.650,000	95	261.723.650,000	95	266.723.650,000	95	270.723.650,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Jatikalen	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	70	70	70	4.000.000,000	75	4.000.000,000	80	4.000.000,000	85	4.000.000,000	90	4.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Kertosono	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	100	100	100	105.000.000,000	100	110.500.000,000	100	115.750.000,000	100	120.250.000,000	100	122.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Lengkong	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	73,67	73,67	100	56.866.600,000	100	58.003.932,000	100	59.141.264,000	100	60.324.090,000	100	62.133.813,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Loceret	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	97	97	100	60.850.000,000	100	65.000.000,000	100	69.000.000,000	100	75.000.000,000	100	79.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Nganjuk	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	100	100	100	8.580.000,000	100	8.580.000,000	100	10.580.000,000	100	10.580.000,000	100	10.580.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Ngetos	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	100	5.000.000,000	100	96.650.000,000	100	96.650.000,000	100	96.650.000,000	100	96.650.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa	80	80	80	85.000.000,000	82	93.500.000,000	84	103.000.000,000	86	115.000.000,000	88	126.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ngluyu	(%)													Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Ngronggot	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	80	14.216.000,000	82	15.861.128,000	85	17.958.351,000	87	19.050.000,000	90	22.050.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Pace	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	100	100	100	20.026.000,000	100	26.000.000,000	100	26.000.000,000	100	28.000.000,000	100	28.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Patianrowo	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	80	15.000.000,000	82	15.000.000,000	85	15.000.000,000	87	15.000.000,000	90	15.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Prambon	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	86	86	95	230.876.000,000	95	230.876.000,000	95	230.876.000,000	100	230.876.000,000	100	230.876.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Rejoso	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	85	85	100	48.375.000,000	100	50.793.750,000	100	53.333.438,000	100	56.000.109,000	100	58.800.115,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Sawahan	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	100	100	100	23.556.600,000	100	24.734.400,000	100	25.971.000,000	100	27.269.700,000	100	28.600.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Sukomoro	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	80	138.492.454,000	85	148.492.454,000	87	98.492.454,000	88	98.492.454,000	89	98.492.454,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Tanjunganom	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	90	90	90	16.578.000,000	90	17.406.900,000	90	18.277.245,000	90	19.191.107,000	90	20.150.663,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Wilangan	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	80	121.600.000,000	82	124.032.000,000	84	126.512.640,000	86	129.042.893,000	88	131.623.751,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bagor	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	95	95	100	43.250.000,000	100	36.325.000,000	100	36.325.000,000	100	36.325.000,000	100	36.325.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	80	15.000.000,000	82	15.000.000,000	82	15.075.000,000	83	15.150.375,000	84	15.226.127,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di kecamatan Berbek	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Gondang	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	88	88	88	18.365.000,000	90	21.365.000,000	95	23.365.000,000	95	23.365.000,000	95	30.365.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Jatikalen	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	70	70	70	32.000.000,000	75	33.000.000,000	80	34.000.000,000	85	35.000.000,000	90	36.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Kertosono	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	85.000.000,000	100	87.500.000,000	100	90.000.000,000	100	92.750.000,000	100	95.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Lengkong	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	97,02	97,02	100	9.277.000,000	100	9.462.540,000	100	9.648.080,000	100	9.841.042,000	100	10.136.273,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Loceret	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	97	97	100	90.825.000,000	100	98.000.000,000	100	105.000.000,000	100	112.000.000,000	100	117.600.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Nganjuk	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.800.000,000	100	15.800.000,000	100	15.800.000,000	100	15.800.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ngetos	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	100	91.700.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ngluyu	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	80	4.000.000,000	82	5.000.000,000	84	5.500.000,000	86	6.000.000,000	88	6.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ngronggot	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	77	80	80	30.726.150,000	82	31.918.872,000	85	31.742.399,000	87	37.450.500,000	90	38.510.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Pace	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	38.000.000,000	100	47.500.000,000	100	47.500.000,000	100	49.500.000,000	100	49.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Patianrowo	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	80	50.000.000,000	82	50.000.000,000	85	50.000.000,000	87	50.000.000,000	90	50.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Prambon	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	86	86	95	185.052.700,000	95	185.052.700,000	95	185.052.700,000	100	185.052.700,000	100	185.052.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rejoso	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	85	85	100	163.652.500,000	100	171.835.125,000	100	180.426.881,000	100	189.448.225,000	100	198.920.637,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Sawahan	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	32.222.400,000	100	33.833.500,000	100	35.525.100,000	100	37.301.400,000	100	39.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukomoro	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	80	16.476.000,000	85	16.476.000,000	87	16.476.000,000	88	16.476.000,000	90	16.476.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjunganom	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	49.950.000,000	100	46.447.500,000	100	33.019.875,000	100	34.670.869,000	100	36.404.412,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Wilangan	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	80	35.000.000,000	82	35.700.000,000	84	36.414.000,000	86	37.142.280,000	88	37.885.126,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					16.758.670.970,000		17.226.400.000,000		17.658.150.000,000		98.085.450.000,000		18.085.450.000,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.485.270.970,000		5.527.700.000,000		5.709.750.000,000		5.877.350.000,000		5.877.350.000,000	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	72,1	72,21	72,31	5.485.270.970,000	72,43	5.527.700.000,000	72,55	5.709.750.000,000	72,72	5.877.350.000,000	72,90	5.877.350.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					3.121.000.000,000		3.272.000.000,000		3.423.000.000,000		3.573.000.000,000		3.573.000.000,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	85	85	85	3.121.000.000,000	86	3.272.000.000,000	86	3.423.000.000,000	86	3.573.000.000,000	86	3.573.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN					5.420.000.000,000		5.472.000.000,000		5.524.000.000,000		85.576.000.000,000		5.576.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya etika dan budaya politik	Cakupan pemahaman pendidikan politik di masyarakat (%)	80	80	81	5.420.000.000,000	82	5.472.000.000,000	83	5.524.000.000,000	84	85.576.000.000,000	85	5.576.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.097.900.000,000		1.278.200.000,000		1.278.400.000,000		1.278.600.000,000		1.278.600.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan	Persentase ormas penerima hibah (%)	50	50	66,67	1.097.900.000,000	66,67	1.278.200.000,000	66,67	1.278.400.000,000	66,67	1.278.600.000,000	66,67	1.278.600.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					512.500.000,000		523.500.000,000		534.000.000,000		544.500.000,000		544.500.000,000	
Meningkatnya fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan	Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan (%)	100	100	100	512.500.000,000	100	523.500.000,000	100	534.000.000,000	100	544.500.000,000	100	544.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.122.000.000,000		1.153.000.000,000		1.189.000.000,000		1.236.000.000,000		1.236.000.000,000	
Meningkatnya fasilitasi kewaspadaan dini dan penanganan potensi konflik didaerah	Cakupan laporan kewaspadaan dini didaerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	1.122.000.000,000	100	1.153.000.000,000	100	1.189.000.000,000	100	1.236.000.000,000	100	1.236.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					**3.500.231.614.946,340**		**3.677.415.761.877,000**		**3.731.143.030.014,000**		**4.075.626.796.167,000**		**4.073.338.590.698,000**	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan melalui penetapan indikator kinerja daerah, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimanifestasikan dalam dokumen RPJMD. Berbagai indikator kinerja daerah yang dituangkan dalam bab ini sangat penting karena akan menjadi acuan dalam perumusan target kinerja perencanaan pembangunan jangka pendek daerah (RKPD) maupun Perangkat Daerah (Renja).

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas;

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi;

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan, indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum dan indikator kinerja kunci; Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Visi dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kab Nganjuk Tahun 2025-2045, indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD, Indikator yang merupakan amanat nasional dan provinsi serta IKK menjadi IKD.

Penetapan IKU dan IKD serta penentuan target pencapaiannya dalam dokumen RPJMD sangat penting karena menggambarkan tujuan pembangunan jangka menengah daerah yang indentik

dengan gambaran kesejahteraan masyarakat. Penetapkan target IKU dan IKD didasarkan atas evaluasi terhadap keberhasilan / capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026. Pada sisi lain target IKU dan IKD merupakan ukuran yang dipergunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses pembangunan ke depan, untuk mengetahui apakah sudah berada di arah yang tepat sebagaimana dimaksud dalam substansi Visi dan Misi RPJMD.

lndikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Nganjuk sejumlah 12 Indikator sesuai pada tabel 4.2. sedangkan IKD terlampir pada tabel 4.3.

IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

TABEL 4.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,92	76,58	77,24	77,89	78,55	78,81	
2.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	80	81	82	83	84	85	
3.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	91,448	92,131	92,814	93,497	94,18	94,863	
4.	Tingkat Kemiskinan	(%)	10,16	9,90	9,63	9,37	9,10	8,83	
5.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,98	5,02	5,49	5,69	5,89	6,09	
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,35	84,65	84,95	85,25	85,55	85,85	
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,61	72,69	72,77	72,84	72,92	73,00	
8.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,354	0,340	0,335	0,332	0,325	0,325	
9.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,58	4,59	4,61	4,62	4,63	4,66	
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,77	3,59	3,36	3,13	2,93	2,90	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks	87,6	88	88,4	88,8	89,2	89,5	
12.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60,7	60,90	61,10	61,30	61,50	61,70	

Tabel 4.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	112,14	105,02	104,59	103,48	101,14	99,51	99,06	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	69,07	72,61	72,69	72,77	72,84	72,92	73,00	
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	71,42	73,66	75,21	76,75	77,27	78,05	78,57	
4	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	m^3/detik	312	312	312	312	312	312	312	
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	69,07	65,27	65,27	65,27	65,27	65,27	65,27	
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	28,07	28,27	28,47	28,67	28,87	29,07	29,27	
7	persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	23,85	24,81	25,76	26,71	27,66	28,61	29,56	
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7,71	7,59	7,48	7,36	7,24	7,13	7,01	
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,056	0,223	0,39	0,557	0,724	0,891	1,058	
10	Penurunan Emisi GRK kumulatif (Ton CO2 Eq)	TON CO2 EQ	263.561,09	268.883,65	274.261,33	279.746,56	285.341,49	291.048,32	296.869,28	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,24	75,92	76,58	77,24	77,89	78,55	78,81	
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,93	4,98	5,02	5,49	5,69	5,89	6,09	
3	Tingkat Kemiskinan	(%)	10,17	10,16	9,90	9,63	9,37	9,10	8,83	
4	Rasio Gini	Indeks	0,289	0,288	0,287	0,286	0,285	0,284	0,283	
5	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	62,61	62,67	62,73	62,79	62,85	62,91	62,97	
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,351	0,354	0,340	0,335	0,332	0,325	0,325	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,87	3,77	3,59	3,36	3,13	2,93	2,90	
8	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	65,94	65,95	65,96	65,97	65,98	65,99	66,00	
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,25	8,40	8,56	8,71	8,86	9,01	9,17	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
10	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	0,96	1,05	1,11	1,15	1,18	1,22	1,26	
11	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,57	1,98	2,05	2,13	2,21	2,28	2,36	
12	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	79,24	79,29	79,34	79,39	79,44	79,50	79,55	
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,18	13,19	13,21	13,28	13,37	13,43	13,47	
14	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60,55	60,70	60,90	61,10	61,30	61,50	61,70	
15	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:literasi membaca	%	71	72	72,09	72,29	72,30	72,44	72,69	
16	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	%	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	
17	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten	%	5,53	8,5	10	10,2	10,5	10,7	10,8	
18	Proporsi jumlah usaha mikro non pertanian pada level kabupaten	%	3	9	9,01	9,02	9,03	9,04	9,05	
19	Pendapatan Per Kapita	Ribu Rupiah	30.263	31.538	32.813	34.088	35.363	36.638	37.913	
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	22,94	27,46	30,26	33,06	35,86	38,66	41,46	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	28,67	28,70	28,73	28,76	28,79	28,82	28,85	
22	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	60	90	90	90	90	90	90	
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55,22	55,68	56,13	56,59	57,05	57,5	57,96	
24	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,36	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	
25	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	22,8	18,80	17,50	16,30	15,20	14,20	14,20	
26	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
27	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	90,52	94,34	86,48	78,62	78,62	70,75	70,75	
28	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1	1,36	1,37	1,38	1,39	1,40	1,41	
29	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	60	90	90	90	90	90	90	
30	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	96	96	98	98	98	98	99	
31	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:numerasi	%	54	55	55,07	55,20	55,37	55,59	56	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	79	80	81	82	83	84	85	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	15,92	16,27	16,61	16,96	17,30	17,65	17,71	
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,64	74,76	75,01	75,27	75,53	75,78	76,04	
4	Indeks Desa	Indeks	0,78191	0,781	0,7812	0,7814	0,7816	0,7818	0,782	
5	Nilai Investasi	Rp	1.359.191.202.844	1.102.000.000.000	1.157.000.000.000	1.203.000.000.000	1.239.090.000.000	1.276.000.000.000	1.314.550.581.000	
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,05	2,08	2,12	2,16	2,20	2,24	2,28	
7	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	42,08	60,11	60,20	60,25	60,30	60,35	60,40	
8	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	68,214	70,05	72,35	74,31	76,28	78,25	80,22	
9	Rasio Konektivitas	Rasio	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	
10	Rasio kapasitas fiskal daerah	Rasio	1,095	1,124	1,137	1,150	1,163	1,176	1,189	
11	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	20,53	20,54	20,55	20,57	20,60	20,62	20,64	
12	Persentase peningkatan volume usaha mikro	%	2	3	4	5	6	7	8	
13	Persentase peningkatan koperasi berkualitas	%	73	74	75,20	76,30	77,40	78,50	79,60	
14	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	0,224	0,229	0,232	0,235	0,239	0,242	0,245	
15	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	57,28	57,29	57,3	57,31	57,32	57,33	57,34	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
16	Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	1	1	1	1	1	1	1	
17	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	%	63,72	68,18	72,65	77,12	81,58	86,05	90,52	
18	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	73,06	77,52	81,99	86,46	90,92	95,39	99,7	
19	Tingkat Inflasi	%	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	
21	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	0,2	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	
22	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,39	3,40	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	
23	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	
24	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,24	4,28	4,31	4,33	4,36	4,38	4,39	
25	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	4,84	4,87	4,9	4,93	4,95	4,97	5	
26	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	
27	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	%	5,15	5,16	5,35	5,35	5,34	5,34	5,33	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	91,006	91,448	92,131	92,814	93,497	94,18	94,863	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,05	84,35	84,65	84,95	85,25	85,55	85,85	
3	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,224	3,327	3,430	3,45	3,5	3,6	3,7	
4	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,57	4,58	4,59	4,61	4,62	4,63	4,66	
5	Indeks Integritas Pemerintah Daerah	Indeks	68,56	69	70	71	73	75	78	
6	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	74,49	74,50	74,51	74,52	74,53	74,54	74,55	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	70,729	70,812	70,941	71,076	71,198	71,267	71,386	
8	Nilai Sistem Merit	Nilai	260	280	285	290	300	320	325	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks	87,29	87,6	88	88,4	88,8	89,2	89,5	
10	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,190	3,200	3,210	3,230	3,250	3,260	3,270	
11	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	1,5	1,5	1,75	1,85	2,00	2,15	2,25	
12	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	70,07	72	73	76	79	80	80,01	
13	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	62,41	65,73	68,54	71,68	74,11	77,27	79,98	
14	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tingkat Kabupaten	Indeks	44,07	44,13	44,19	44,25	44,31	44,37	44,43	
15	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	86,78	86,81	86,85	86,91	86,95	87,00	87,06	
16	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,25	70,8	70,9	71	71,1	71,2	71,3	
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,25	8,40	8,56	8,71	8,86	9,01	9,17	
18	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,18	78,26	78,36	78,46	78,56	78,66	78,76	
19	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	99	100	100	100	100	100	100	
20	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE)	Indeks	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	
21	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,66	83,5	83,6	83,7	83,8	83,9	84	
22	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0	0	0	0	0	0	0,01	
23	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	61	61	65	69	73	77	80	
24	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	86,40	86,45	86,55	86,65	86,75	86,85	86,95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik SMP	%	69,67	71,94	74,21	76,48	78,75	81,02	81,02	
2	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik Paket B	%	66,05	67,88	69,71	71,54	73,37	75,2	75,2	
3	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket C	%	26,52	30,47	34,43	38,39	42,34	46,30	46,30	
5	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik Paket A	%	61,29	64,61	67,93	71,25	74,57	77,89	77,89	
6	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik Paket C	%	62,39	67,46	72,54	77,62	82,69	87,77	87,77	
7	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket A	%	80	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik Paket B	%	62,64	67,83	73,02	78,21	83,4	88,59	88,59	
9	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik Paket A	%	73,41	75,56	77,71	79,86	82,01	84,16	84,16	
10	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum SMP	%	32,89	34,41	35,93	37,45	38,97	40,49	40,49	
11	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket C	%	35,84	40,05	44,27	48,49	52,7	56,92	56,92	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
12	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik SMP	%	55,9	56,71	57,52	58,33	59,14	59,95	59,95	
13	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik Paket C	%	54,24	54,62	55	55,38	55,76	56,14	56,14	
14	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik Paket A	%	58,59	62,41	66,23	70,05	73,87	77,69	77,69	
15	Angka Partisipasi Murni PAUD (5-6 Tahun)	%	83,22	84,39	85,56	86,73	87,9	89,07	89,07	
16	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Keamanan yang Baik SD	%	75,31	77,87	80,44	83,01	85,57	88,14	88,14	
17	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket B	%	36,59	37,92	39,25	40,58	41,91	43,24	43,24	
18	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik SD	%	75,46	87,27	99,08	100	100	100	100	
19	Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat (13-15)	%	97,89	99,12	100	100	100	100	100	
20	Prosentase Peserta didik SD dengan Kemampuan Literasi mencapai Kompetensi Minimum	%	61,75	66,78	71,81	76,84	81,87	86,9	86,9	
21	Angka Partisipasi Murni Kesetaraan (7-18)	%	12,41	18,25	24,09	29,93	35,77	41,61	41,61	
22	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket A	%	60	73,34	86,67	100	100	100	100	
23	Persentase Guru yang Mengikuti Diklat	%	54,58	72,73	90,88	100	100	100	100	
24	Indeks Distribusi Guru	Skor	0,58	1,01	1,44	1,87	2,3	2,73	2,73	
25	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	%	72,8	80,8	88,8	96,8	100	100	100	
26	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik SD	%	58,29	60,13	61,98	63,83	65,67	67,52	67,52	
27	Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat (7-12)	%	99,75	99,98	100	100	100	100	100	
28	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan	%	57,21	57,94	58,68	59,42	60,15	60,89	60,89	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum SD									
29	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik SMP	%	73,82	75,23	76,64	78,05	79,46	80,87	80,87	
30	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Memiliki Akreditasi Minimal B	%	73,3	73,30	86,3	99,3	100	100	100	
31	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Kebinekaan yang Baik Paket C	%	60,66	68,76	76,86	84,96	93,06	100	100	
32	Persentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum Paket B	%	25,61	26,33	27,05	27,77	28,49	29,21	29,21	
33	Persentase Satuan Pendidikan dengan Iklim Inklusivitas yang Baik Paket B	%	54,92	55,71	56,51	57,31	58,1	58,90	58,90	
34	Prosentase Peserta didik SMP dengan Kemampuan Literasi mencapai Kompetensi Minimum	%	50,57	57,03	63,49	69,95	76,41	82,87	82,87	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Pelayanan kesehatan orang usia 15 - 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas mendapat	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	skrining kesehatan sesuai standar									
9	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Pelayanan kesehatan penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Pelayanan kesehatan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	75,31	75,36	75,41	75,46	75,51	75,56	75,61	
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	76,43	76,93	77,43	77,93	78,43	78,93	79,43	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	91,46	91,48	91,50	91,52	91,54	91,56	91,58	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	97,314	97,334	97,354	97,374	97,394	97,414	97,434	
5	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota									
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	0	4,90	9,80	14,70	19,60	24,50	29,40	
2	Persentase unit rumah yang terfasilitasi PSU	%	27,55	30,77	31,94	33,06	34,13	35,17	36,16	
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3,03	2,97	2,92	2,87	2,81	2,76	2,70	
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	85	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	85	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	9,66	9,60	9,50	9,4	9,30	9,2	9,1	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	90	90	90	90	90	90	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
6	Nilai Indeks Satlinmas	Indeks	61	61	65	69	73	77	80	
7	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum (IPKKU)	Indeks	61	61	65	69	73	77	80	
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0,0023	0,0023	0,0025	0,0028	0,0030	0,0032	0,0034	
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,685	0,686	0,688	0,693	0,695	0,696	0,698	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	%	74,69	74,85	75,24	76,43	77,02	77,69	78,00	
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	35,84	35,86	35,88	36,00	36,12	36,24	36,36	
2	Presentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	80	80,10	80,17	80,25	80,28	80,34	80,50	
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	73,21	75	77	79	81	83	85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	54,55	55	55,05	55,10	55,15	55,20	55,25	
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	52,76	52,80	52,82	52,83	52,85	52,87	52,88	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%	28,3141	28,50	28,50	29,00	29,40	29,70	30	
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk perempuan	6,9803	6,87	6,76	6,65	6,54	6,43	6,32	
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Persentase cadangan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	100	100	100	100	100	100	
4	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	66,63	68,55	74,70	82,86	90,93	95,97	100	
5	Penanganan sengketa tanah garapan yang	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	dilakukan melalui mediasi									
6	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	63,33	64,52	65,63	65,63	65,63	65,63	65,63	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	93,95	93,98	93,99	94,00	94,05	94,08	94,10	
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Cakupan kepemilikan IKD	%	13,45	14	15	16	17	18	19	
2	Cakupan penerbitan KK	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan penerbitan akta perceraian	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Penerbitan KIA	%	30,02	33	35	40	45	50	55	
5	Cakupan penerbitan akta kematian	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan penerbitan akta perkawinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	%	93,53	95	96	97	98	99	99	
8	Cakupan Penerbitan KTP	%	99,44	99,49	99,54	99,59	99,64	99,69	99,74	
9	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama	%	33,33	45,83	50	54,16	58,83	62,50	62,50	
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase Desa Mandiri	%	29,92	45,5	47,3	49,2	51	53	54,9	
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,42	10,10	10,00	9,90	9,80	9,70	9,60	
2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	Rata-rata Anak per	1,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	per WUS usia 15-49 Tahun	Wanita								
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	73,82	80,06	80,07	80,08	80,09	80,10	80,11	
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	V/C Rasio jalan perkotaan	Rasio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	3,85	4	6	8	10	12	14	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	97,11	98	98	98	98	98	98	
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	
2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	73	74,1	75,2	76,3	77,4	78,5	79,6	
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	117,73	5	5	4	3	3	3	
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	%	9,53	9,62	9,65	9,68	9,70	9,72	9,74	
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	5	5	6	7	8	9	10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	26,76	26,80	26,85	27,05	27,35	27,50	27,65	
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AU	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah	%	96,40	97	97	97	97	97	97	
AV	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Terlestarikannya cagar budaya	%	33,77	33,85	34,05	34,35	34,65	34,80	35,05	
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	77,26	77,50	78	78,25	78,5	79	79,50	
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah	Nilai	90,02	90,03	90,04	90,05	90,06	90,07	90,08	
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	85	86	86,25	86,50	87	87,25	87,50	
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	%	103,98	100	100	100	100	100	100	
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
1	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	4,84	4,86	4,88	4,90	4,93	4,95	4,97	
2	Tingkat hunian akomodasi	%	10,26	10,30	10,55	10,65	10,85	10,90	10,05	
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	100	50	50	50	50	50	50	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,05	2,15	2,20	2,25	2,28	2,30	2,32	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,03	2,08	2,10	2,13	2,15	2,17	2,19	
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Tanaman Pangan (Jagung)	Ton/Ha	7,09	7,14	7,19	7,24	7,29	7,34	7,39	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	56	10	10	10	10	10	10	
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Tanaman Pangan (Porang)	Ton/Ha	11,01	11,06	11,12	11,17	11,23	11,28	11,34	
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Tanaman Pangan	Ton/Ha	1,82	1,83	1,84	1,85	1,85	1,86	1,87	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	(Kacang Tanah)									
5	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Tanaman Pangan (Kacang Hijau)	Ton/Ha	1,47	1,48	1,49	1,50	1,50	1,51	1,52	
6	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Tanaman Pangan (Ubi Jalar)	Ton/Ha	17,05	17,14	17,22	17,31	17,40	17,48	17,58	
7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Tanaman Pangan (Ubi Kayu)	Ton/Ha	14,81	14,88	14,96	15,03	15,11	15,18	15,26	
8	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Tanaman Pangan (Kedelai)	Ton/Ha	2,04	2,05	2,05	2,06	2,07	2,07	2,08	
9	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Tanaman Pangan (Padi)	Ton/Ha	6,50	6,54	6,59	6,63	6,68	6,73	6,76	
BB	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	81,96	90	90	90	90	90	90	
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	22,86	24,86	26,86	28,86	30,86	32,86	34,86	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	89,12	90	90	91	92	93	94	
BC	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	2,15	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	77	79	80	81	82	83	84	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0	
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	
BD	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	75,89	78,71	81,54	84,36	87,19	90,01	92,83	
BE	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**									
1	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	80	82	85	88	90	93	95	
2	Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	42,8	60	60	60	62	62	65	
BF	**5.01 – PERENCANAAN**									
1	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase capaian kinerja sasaran strategis Renstra PD dengan predikat minimal tinggi	%	97	98	99	100	100	100	100	
3	Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah terhadap prioritas daerah dan isu daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
BG	**5.02 – KEUANGAN**									
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	17,15	19,92	20,47	21,10	21,80	22,54	23,34	
2	Indeks Pengelolaan Barang Miik Daerah	Nilai	80	80	80	80	80	80	80	
3	Ketepatan Pelaksanaan Penganggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	%	99	99	99	99	99	99	99	
BH	**5.03 – KEPEGAWAIAN**									
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	54,89	55,00	55,10	55,30	55,40	55,60	55,80	
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	29,07	30	31	32	33	34	35	
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20,93	21,25	21,50	22	22,25	22,50	23	
BI	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengembangan potensi unggulan dan penyelesaian permasalahan pembangunan	%	90	90	90	92	94	96	98	
2	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	44,7	45,6	46	47	48	49	50	
BJ	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3	3,005	3,010	3,015	3,020	3,025	3,030	
2	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3,194	3,200	3,210	3,220	3,225	3,230	3,235	
3	PersentaseTindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	95,3	95,35	95,38	95,41	95,45	95,48	95,52	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
BK	**7.01 – KECAMATAN**									
1	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	73,59	75,45	77	78	79	79	79	Kecamatan Prambon
2	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	63,52	75	75	80	83	87	87	Kecamatan Bagor
3	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	73,59	73,59	75	77	79	81	83	Kecamatan Wilangan
4	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	64,70	65	66	67	68	69	70	Kecamatan Baron
5	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	73,16	76	76,15	76,2	76,25	76,3	76,35	Kecamatan Tanjunganom
6	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	83,49	84	84	85	85	86	86	Kecamatan Pace
7	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	83,71	83,71	84	84,5	85	85,5	86	Kecamatan Sawahan
8	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	58,80	82	83	84	85	85	85	Kecamatan Loceret
9	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	82,87	82,90	82,95	83,00	83,05	83,10	83,15	Kecamatan Ngetos
10	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	79,83	82,70	82,90	83,10	83,87	84,40	86,65	Kecamatan Sukomoro
11	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	51,56	66	67	67,5	68	68,5	69	Kecamatan Gondang
12	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	82,63	83,00	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25	Kecamatan Jatikalen
13	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	72,87	76	77	78	79	80	81	Kecamatan Lengkong
14	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	64,92	84	85	87	88	89	90	Kecamatan Ngluyu
15	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	84,50	85	85	86	87	88	88	Kecamatan Berbek
16	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	50,50	50,50	60	62	64	68	70	Kecamatan Rejoso
17	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	86,70	86,80	86,90	87,00	87,10	87,20	87,30	Kecamatan Nganjuk
18	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	56,48	57	60	65	70	75	77	Kecamatan Ngronggot
19	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	64,70	77	77	78	78	79	79	Kecamatan Patianrowo
20	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	46,98	78	79	82	84	86	86	Kecamatan Kertosono
BL	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
1	Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	85	85	85	86	86	86	86	

Selanjutnya berbagai target kinerja yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana dituang dalam tabel-tabel di atas menjadi acuan dalam penyusunan target kinerja dalam dokumen perencanaan Perangkat daerah, baik perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis Perangkat Daerah) maupun rencana jangka pendek (Rencana Kerja Perangkat Daerah).

4.3. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prirotas yang dijalankan oleh lintas instansi, lintas Perangkat Daerah dan antarjenjang pemerintahan. Kompleksites pelaksanaan program/kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi, lintas Perangkat Daerah dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan sccara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah merupakan bagian integral Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Perangkat Daerah, badan usaha, dan badan lainnya sehubungan dengan adanya risiko pembangunan daerah.

Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Daerah akan dilakukan pembahasan bersama pemerintah pusat dan provinsi, serta Perangkat Daerah, badan usaha, dan badan lainnya yang akan terlibat. Sebagai upaya untuk mengawal ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD, nantinya kebijakan Manajemen Risiko

Pembangunan Daerah mengacu pada kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, kemudian menjadi acuan Perangkat Daerah, badan usaha, dan badan lainnya dalam mengelola risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah diperlukan regulasi terkait integrasi Manajemen Risiko Pembangunan Daerah dengan siklus perencanaan pembangunan daerah, integrasi proses bisnis Manajemen Risiko Pembangunan Daerah lintas urusan/bidang/sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Daerah kepada sumber daya manusia pengelola risiko di Perangkat Daerah, badan usaha, dan badan lainnya, penguatan kelembagaan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam pengelolaan risiko pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

Bagian ini memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Pedoman Transisi merupakan pedoman yang diperlukan untuk menyusun acuan kebijakan pada akhir periode RPJMD agar proses pembangunan tetap berkesinambungan dan tidak mengalami stagnasi. Dengan adanya pedoman ini, setiap permasalahan pembangunan yang masih tersisa dapat diakomodasi dalam perencanaan berikutnya, sehingga terjadi kesinambungan dan perbaikan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Sementara itu, Kaidah Pelaksanaan berfungsi sebagai petunjuk teknis yang harus diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama Perangkat Daerah. Kaidah ini mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja agar selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta memastikan efektivitas dan efisiensi dalam implementasinya.

5.1. Pedoman Transisi Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan memberikan acuan umum pada saat periodesasi RPJMD ini berakhir, maka ditetapkan beberapa pedoman transisi sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani hingga akhir periode RPJMD ini tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMD periode selanjutnya. Dengan demikian, setiap tantangan yang masih ada dapat ditanggulangi melalui berbagai program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran pada periode berikutnya.

2. Program prioritas dan/atau proyek strategis daerah yang telah dilaksanakan dalam periode RPJMD ini dan masih memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan ke depan direkomendasikan untuk dilanjutkan dalam RPJMD berikutnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek penting serta menghindari pemborosan sumber daya akibat penghentian program yang sudah berjalan dengan baik.

5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dirancang untuk menyajikan berbagai ketentuan teknis yang harus diperhatikan dalam implementasi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Tujuannya adalah menciptakan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan pembangunan, sehingga efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan maupun pelaksanaan program dapat terwujud. Kaidah pelaksanaan ini mencakup:

1. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Nagnjuk Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 setiap tahunnya dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Jika dalam proses penyusunan RKPD selama periode RPJMD ini terjadi perubahan asumsi atau faktor eksternal yang mempengaruhi target kinerja program RKPD, baik meningkat atau menurun dibandingkan target kinerja RPJMD, maka penyesuaian tetap dilakukan dengan

menjaga pencapaian target akhir periode RPJMD secara agregat. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan meskipun terjadi dinamika eksternal.

4. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), RKPD Kabupaten Nganjuk menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan demikian, Aturan Peralihan dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pedoman ini memastikan bahwa transisi antara periode RPJMD berjalan dengan lancar dan setiap kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif. Adapun hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan akan ditetapkan sesuai kebutuhan di masa mendatang.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Surtrisno, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001